2022

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

RKPD TAHUN 2022 KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
21. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);

24. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
40. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
43. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tengang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
53 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan.
(2) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-1 (satu) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
(3) RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan mendahului dari Perda RPJMD 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan tahun 2022-2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun daerah sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
(2) RKPD tahun 2022 bertujuan untuk:
    a. Mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah di tahun pertama pemerintahan daerah tahun 2021-2026;
    b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
    c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
RKPD Sebagai Pedoman Renja PD

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyusunan Renja – PD Tahun 2022, PD berpedoman pada RKPD Tahun 2022 untuk menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Daerah dengan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
(3) Renja PD Tahun 2022 selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup tentang Renstra PD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renja PD Tahun 2022 kepada Kepala Bappeda;
b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD Tahun 2022, untuk menyelaraskan kesesuaian antara program/kegiatan/sub kegiatan PD Tahun 2022 dengan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022;
c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka, memperoleh pengesahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
d. Bupati menetapkan Renja PD Tahun 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2022 ditetapkan.

BAB III
DOKUMEN RKPD

Pasal 6

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kabupaten Bandung, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penutup serta lampiran program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan PD.

Pasal 7

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. PD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja PD dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan;
b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja PD;
c. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
d. Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;

e. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, dilakukan pada saat Perubahan RKPD; dan
f. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2022 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RKPD
Pasal 10

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
    b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
    c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) RKPD dapat diubah dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan Perda RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan kemudian.

Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 72/2021
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL x

BAB 1 PENDAHULUAN ..... BAB 1-1

1.1. Latar Belakang ..... BAB 1-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... BAB 1-3

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... BAB 1-17

1.4. Maksud dan Tujuan ..... BAB 1-18

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... BAB 1-19

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH ..... BAB 2-1

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... BAB 2-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... BAB 2-1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... BAB 2-1

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... BAB 2-8

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana ..... BAB 2-9

2.1.1.4. Demografi Penduduk ..... BAB 2-12

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB 2-17

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... BAB 2-17

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... BAB 2-30

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... BAB 2-36

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ..... BAB 2-36

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan ..... BAB 2-76

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... BAB 2-84
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... BAB 2-84
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... BAB 2-85
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... BAB 2-86
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... BAB 2-88
2.1.5. Aspek Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah ..... BAB 2-90
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... BAB 2-92
2.2.1. Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun ke-5 ..... BAB 2-92
2.2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2020 ..... BAB 2-96
2.3. Evaluasi Penerapan SPM di Kabupaten Bandung ..... BAB 2-97
2.4. Kondisi Covid-19 di Kabupaten Bandung Tahun 2020 ..... BAB 2-102
2.4.1. Dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung ..... BAB 2-102
2.4.2. Upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung ..... BAB 2-107
2.4.2.1. Upaya Promotif ..... BAB 2-107
2.4.2.2. Upaya Preventif ..... BAB 2-109
2.4.2.3. Upaya Kuratif ..... BAB 2-110
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... BAB 2-111
2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 ..... BAB 2-111
2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ..... BAB 2-119
2.6. Inovasi Pembangunan Daerah ..... BAB 2-126
2.6.1. Si Jalu Mampang (Sinergi Jaga Lumbung Pangan) ..... BAB 2-126
2.6.2. SIBEDAS (Sistem Terintegrasi Berorientasi Mikro DAS di Kawasan Perdesaan Kecamatan Cimenyan) ..... BAB 2-126
2.6.3. SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu) ..... BAB 2-133
2.6.4. SAE-KIR (Sistem Antrian Elektronik-KIR) ..... BAB 2-136
2.6.5. SABUK MAS (Sistem Bangun UMKM dan Koperasi untuk Masyarakat) 2-138

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... BAB 3-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... BAB 3-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2022 ..... BAB 3-1
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto ..... BAB 3-1

3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... BAB 3-13
3.1.1.3. Inflasi ..... BAB 3-15
3.1.1.4. PDRB Per Kapita ..... BAB 3-16
3.1.1.5. Indikator Makro Ekonomi Lainnya ..... BAB 3-17
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 ..... BAB 3-20
3.1.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022 ..... BAB 3-20
3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... BAB 3-22
3.1.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2022 ..... BAB 3-24
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... BAB 3-28
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... BAB 3-28
3.2.2. Kebijakan Keuangan Daerah ..... BAB 3-29
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... BAB 3-29
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... BAB 3-34
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... BAB 3-42
3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah ..... BAB 3-44

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... BAB 4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... BAB 4-1
4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 ..... BAB 4-2
4.1.2. Telahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... BAB 4-4
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022 ..... BAB 4-5
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ..... BAB 4-15
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 ..... BAB 4-16
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... BAB 4-17
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022 ..... BAB 4-21
4.2.3.1. Isu Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2022 ..... BAB 4-24
4.2.3.2. Kebijakan Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..... BAB 4-59
4.2.3.3. Kebijakan Terkait Standar Pelayanan Minimal ..... BAB 4-66
4.2.3.4. Kebijakan Terkait Penataan Ruang Wilayah ..... BAB 4-68
4.2.3.5. Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19 ..... BAB 4-70
4.2.3.6. Kebijakan Terkait Penanganan Stunting ..... BAB 4-77
4.2.3.7. Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... BAB 4-79

4.2.3.8. Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon ..... BAB 4-96

4.3. Inovasi Perencanaan Tahun 2022 ..... BAB 4-99

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... BAB 5-1

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... BAB 6-1

BAB 7 PENUTUP ..... BAB 7-1

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 ..... BAB 1-2

GAMBAR 1.2 HIRARKI HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN ..... BAB 1-18

GAMBAR 2.1 PETA ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-3

GAMBAR 2.2 PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-3

GAMBAR 2.3 PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-5

GAMBAR 2.4 PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-7

GAMBAR 2.5 PETA KAWASAN RESAPAN AIR KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-8

GAMBAR 2.6 KERANGKA PEMIKIRAN KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH ..... BAB 2-9

GAMBAR 2.7 PETA KAWASAN RAWAN BANJIR KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-10

GAMBAR 2.8 PETA KAWASAN RISIKO GUNUNG BERAPI DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-11

GAMBAR 2.9 PETA RAWAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-11

GAMBAR 2.10 PETA RAWAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-12

GAMBAR 2.11 GRAFIK PERKEMBANGAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-13

GAMBAR 2.12 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2020 (JIWA) ..... BAB 2-13

GAMBAR 2.13 GRAFIK PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 . ..... BAB 2-14

GAMBAR 2.14 KOMPOSISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 HASIL SURVEI PENDUDUK 2020 ..... BAB 2-15

GAMBAR 2.15 PETA PERSEBARAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-16

GAMBAR 2.16 GRAFIK PERTUMBUHAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-19

GAMBAR 2.17 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-19

GAMBAR 2.18 ANALISIS QUADRAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2020 DENGAN RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2016-2020 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT ..... BAB 2-20

GAMBAR 2.19 PDRB PER KAPITA ADHK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-25

GAMBAR 2.20 GRAFIK LAJU INFLASI PDRB KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-26

GAMBAR 2.21 GRAFIK JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-27
GAMBAR 2.22 ANALISIS KUADRAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN LAJU PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT ..... BAB 2-27
GAMBAR 2.23 GRAFIK PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-28
GAMBAR 2.24 GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-28
GAMBAR 2.25 GRAFIK INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-29
GAMBAR 2.26 GRAFIK INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-29
GAMBAR 2.27 GINI RATIO KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-30
GAMBAR 2.28 GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-31
GAMBAR 2.29 ANALISIS KUADRAN LAJU PERTUMBUHAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016-2020 DAN NILAI INDEKS PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2020 ..... BAB 2-32
GAMBAR 2.30 GRAFIK CAPAIAN KOMPONEN IPM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-32
GAMBAR 2.31 GRAFIK HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-33
GAMBAR 2.32 GRAFIK HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-33
GAMBAR 2.33 GRAFIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-34
GAMBAR 2.34 GRAFIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-34
GAMBAR 2.35 GRAFIK PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-35
GAMBAR 2.36 GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 ..... BAB 2-35
GAMBAR 2.37 GRAFIK PERKEMBANGAN PURCHASING POWER PARITY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-36
GAMBAR 2.38 GRAFIK PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI JENJANG SD/SEDERAJAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-38

GAMBAR 2.39 GRAFIK PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI JENJANG SMP/SEDERAJAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-38

GAMBAR 2.40 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SD/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-39

GAMBAR 2.41 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SMP/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-39

GAMBAR 2.42 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SD/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-40

GAMBAR 2.43 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SMP /SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-40

GAMBAR 2.44 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH POSYANDU DAN BALITA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-41

GAMBAR 2.45 GRAFIK PERKEMBANGAN PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-46

GAMBAR 2.46 GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH KEMBATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-47

GAMBAR 2.47 GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-57

GAMBAR 2.48 GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-58

GAMBAR 2.49 GRAFIK PERBANDINGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG DENGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-59

GAMBAR 2.50 GRAFIK PROPORSI PENDUDUK BEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ..... BAB 2-59

GAMBAR 2.51 GRAFIK PERSENTASE UKM BERDASARKAN SKALA USAHA TAHUN 2018 ..... BAB 2-71

GAMBAR 2.52 TINGKAT PARTISIPASI PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2020 ..... BAB 2-83

GAMBAR 2.53 GRAFIK PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-84

GAMBAR 2.54 CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-90

GAMBAR 2.55 CAPAIAN INDEKS REFRMASI BIROKRASI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-90

GAMBAR 2.56 CAPAIAN NILAI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-90

GAMBAR 2.57 CAPAIAN NILAI SAKIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-91

GAMBAR 2.58 REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KERJA DAERAH BERDASARKAN PREDIKAT ..... BAB 2-96
GAMBAR 2.59 PREDIKAT CAPAIAN SPM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 ..... BAB 2-101
GAMBAR 2.60 PREDIKAT CAPAIAN SPM KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN JENIS URUSAN TAHUN 2019 ..... BAB 2-102
GAMBAR 2.61 JUMLAH KASUS AKTIF COVID-19 PER KECAMATAN ..... BAB 2-105
GAMBAR 2.62 TINGKAT KEMATIAN COVID-19 PER KECAMATAN ..... BAB 2-106
GAMBAR 2.63 PETA ZONA RISIKO COVID-19 PER DESA DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-106
GAMBAR 2.64 PROSES BISNIS INOVASI "SI JALU MAMPANG" ..... BAB 2-128
GAMBAR 2.65 *BUSINESS MODEL CANVAS* INOVASI SIBEDAS ..... BAB 2-130
GAMBAR 2.66 PROSES MANAJEMEN DAS MIKRO BERBASIS 4.0 ..... BAB 2-131
GAMBAR 2.67 *BUSINESS MODEL CANVAS* INOVASI SAKEDAP ..... BAB 2-135
GAMBAR 2.68 PROSEDUR PELAYANAN SAKEDAP ..... BAB 2-135
GAMBAR 2.69 *INTERFACE* SAKEDAP ..... BAB 2-136
GAMBAR 2.70 *INTERFACE* SAE-KIR ..... BAB 2-138
GAMBAR 2.71 *BUSINESS MODEL CANVAS* SABUK MAS ..... BAB 2-139
GAMBAR 2.72 PROSES BISNIS INOVASI SABUK MAS ..... BAB 2-140
GAMBAR 2.73 *INTERFACE* SABUK MAS ..... BAB 2-140
GAMBAR 3.1 GRAFIK PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 3-15
GAMBAR 3.2 GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL PER TRIWULAN DI TAHUN 2020 ..... BAB 3-15
GAMBAR 3.3 GRAFIK PERKEMBANGAN INFLASI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 3-16
GAMBAR 3.4 SKENARIO PEMULIHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 3-25
GAMBAR 4.1 PRIORITAS NASIONAL RKP 2022 ..... BAB 4-2
GAMBAR 4.2 MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026 ..... BAB 4-9
GAMBAR 4.3 KERANGKA PEMIKIRAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 4-22
GAMBAR 4.4 GRAFIK HASIL KUESIONER TERHADAP TINGKAT URGENSI PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 MENURUT PERSEPSI STAKEHOLDER .. BAB 4-27
GAMBAR 4.5 KELEMBAGAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ..... BAB 4-76
GAMBAR 4.6 RINCIAN ALTERNATIF MEKANISME PENYALURAN APBD KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 4-77

GAMBAR 4.7 EMISI GRK CO2 DARI PEMAKAIAN BBM INDUSTRI..... BAB 4-98
GAMBAR 4.8 PERKIRAAN EMISI GRK RUMAH TANGGA TAHUN 2018..... BAB 4-98
GAMBAR 4.9 EMISI GRK (TON/TAHUN) DARI KEGIATAN TRANSPORTASI INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA..... BAB 4-99
GAMBAR 4.10 KONSEP KEBIJAKAN BANDUNG BEDAS MANUNGGAL..... BAB 4-102

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 LUAS WILAYAH KABUPATEN BANDUNG PER KECAMATAN .....BAB 2-1

TABEL 2.2 LUAS TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG.....BAB 2-4

TABEL 2.3 PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2019.....BAB 2-6

TABEL 2.4 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016-2020..... BAB 2-16

TABEL 2.5 PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-17

TABEL 2.6 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020..... BAB 2-18

TABEL 2.7 NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000..... BAB 2-21

TABEL 2.8 NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ATAS DASAR HARGA BERLAKU ..... BAB 2-22

TABEL 2.9 PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020..... BAB 2-23

TABEL 2.10 RATA-RATA PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-24

TABEL 2.11 PDRB PER KAPITA ADHB DAN ADHK DI KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020..... BAB 2-25

TABEL 2.12 INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020..... BAB 2-26

TABEL 2.13 GINI RATIO KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020..... BAB 2-30

TABEL 2.14 IPM KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-31

TABEL 2.15 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020..... BAB 2-37

TABEL 2.16 JUMLAH GURU DAN MURID JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-40

TABEL 2.17 JUMLAH POSYANDU DAN BALITA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-41

TABEL 2.18 RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, DAN PUSTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-42

TABEL 2.19 JUMLAH DAN RASIO RUMAH SAKIT PER JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-42

TABEL 2.20 PERSENTASE BALITA GIZI BAIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-43
TABEL 2.21 SITUASI DI LOKUS PRIORITAS BERDASARKAN INDIKATOR DALAM INTERVENSI STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ..... BAB 2-43
TABEL 2.22 IDENTIFIKASI KENDALA PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-44
TABEL 2.23 PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-45
TABEL 2.24 PROPORSI JUMLAH JEMBATAN KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-46
TABEL 2.25 KONDISI JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-47
TABEL 2.26 LUAS AREAL IRIGASI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ..... BAB 2-48
TABEL 2.27 KONDISI DAS CITARUM ..... BAB 2-49
TABEL 2.28 KONDISI SUB DAS DITARUM DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-49
TABEL 2.29 PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-50
TABEL 2.30 RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-50
TABEL 2.31 RASIO RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN PER SATUAN LUAS WILAYAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-51
TABEL 2.32 CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH BERDASARKAN SUMBER PENBANGUNANNYA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018-2020 ..... BAB 2-51
TABEL 2.33 JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-52
TABEL 2.34 PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-52
TABEL 2.35 PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI DAN JUMLAH RT YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-53
TABEL 2.36 RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-53
TABEL 2.37 RASIO JUMLAH LINMAS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-54
TABEL 2.38 JENIS OBJEK YANG TERBAKAR ..... BAB 2-54
TABEL 2.39 PENYEBAB KEBAKARAN ..... BAB 2-54
TABEL 2.40 PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIR MISKIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-55
TABEL 2.41 PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-55

TABEL 2.42 JUMLAH SARANA SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 . ..... BAB 2-55
TABEL 2.43 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-56
TABEL 2.44 JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020..... BAB 2-57
TABEL 2.45 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-58
TABEL 2.46 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020..... BAB 2-58
TABEL 2.47 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-60
TABEL 2.48 INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-60
TABEL 2.49 SKOR POLA PANGAN HARAPAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN KELOMPOK PANGAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-60
TABEL 2.50 ANGKA KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-61
TABEL 2.51 PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-61
TABEL 2.52 STATUS PENATAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-62
TABEL 2.53 PENGUJIAN AIR DAN UDARA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-64
TABEL 2.54 PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-65
TABEL 2.55 RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020..... BAB 2-65
TABEL 2.56 RASIO PENDUDUK BER-KTP PER SATUAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-66
TABEL 2.57 RASIO PENDUDUK BER-KK PER SATUAN KELUARGA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-66
TABEL 2.58 RASIO CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-66
TABEL 2.59 PENERBITAN AKTA PERKAWINAN NON-MUSLIM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-67
TABEL 2.60 KELOMPOK BINAAN PKK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020... BAB 2-67
TABEL 2.61 JUMLAH LSM AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-68

TABEL 2.62 RASIO AKSEPTOR KB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-68
TABEL 2.63 RASIO IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-69
TABEL 2.64 JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-69
TABEL 2.65 JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA/PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-70
TABEL 2.66 PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-70
TABEL 2.67 JUMLAH PELAKU UKM DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-71
TABEL 2.68 JUMLAH VOLUME KOPERASI DAN OMZET USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-72
TABEL 2.69 JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-72
TABEL 2.70 JUMLAH INVESTASI PMDN/PMA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-72
TABEL 2.71 KETERSEDIAAN DOKUMEN STATISTIK TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-73
TABEL 2.72 PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-74
TABEL 2.73 BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-74
TABEL 2.74 JUMLAH PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-75
TABEL 2.75 JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-75
TABEL 2.76 JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-76
TABEL 2.77 JUMLAH ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-76
TABEL 2.78 INDIKATOR PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-76
TABEL 2.79 INDIKATOR PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-77
TABEL 2.80 INDIKATOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-78
TABEL 2.81 INDIKATOR PETERNAKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-79
TABEL 2.82 POTENSI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ..... BAB 2-80
TABEL 2.83 INDIKATOR PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 . BAB 2-81

TABEL 2.84 PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2019 ..... BAB 2-82
TABEL 2.85 JUMLAH TRANSMIGRASI MENURUT JENIS DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-82
TABEL 2.86 TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020 ..... BAB 2-83
TABEL 2.87 REALISASI KONFLIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2020 ..... BAB 2-83
TABEL 2.88 PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-85
TABEL 2.89 DATA PERKEMBANGAN JENIS IZIN DAN JUMLAH IZIN YANG TERBIT TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-86
TABEL 2.90 JUMLAH DAN REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 (Juta Rupiah) ..... BAB 2-87
TABEL 2.91 PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-88
TABEL 2.92 JUMLAH PENCARI KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2020 ..... BAB 2-88
TABEL 2.93 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ... BAB 2-89
TABEL 2.94 CAPAIAN OPINI BPK UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ..... BAB 2-91
TABEL 2.95 TINGKAT REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN TARGET TAHUN 2021 ..... BAB 2-92
TABEL 2.96 TINGKAT REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN TARGET TAHUN 2021 ..... BAB 2-93
TABEL 2.97 TINGKAT REALISASI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN TARGET TAHUN 2022 ..... BAB 2-96
TABEL 2.98 REKAPITULASI CAPAIAN SPM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ... BAB 2-98
TABEL 2.99 PREDIKAT CAPAIAN SPM KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN JENIS URUSAN TAHUN 2019 ..... BAB 2-102
TABEL 2.100 REKAPITULASI KASUS COVID-19 DI INDONESIA, PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-103
TABEL 2.101 PROGRES VAKSINASI COVID-19 DI NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT, DAN KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 2-104
TABEL 2.102 EVALUASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TERHADAP ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ..... BAB 2-112
TABEL 2.103 EVALUASI KEGIATAN KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KINERJA RENDAH DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA ..... BAB 2-118

TABEL 2.104 FAKTOR PERMASALAHAN KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 ..... BAB 2-119

TABEL 3.1 PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 (JUTA RUPIAH) .....BAB 3-3

TABEL 3.2 NILAI PDRB PER SEKTOR DI TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL TAHUN 2020 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH).....BAB 3-4

TABEL 3.3 INDEKS LOCATION QUOTIENT SEKTOR DI KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2020.....BAB 3-5

TABEL 3.4 PERHITUNGAN INDEKS SPESIALISASI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BANDUNG DI LINGKUP PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2020 .....BAB 3-7

TABEL 3.5 PERHITUNGAN INDIKATOR SHIFT SHARE ANALYSIS KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020.....BAB 3-9

TABEL 3.6 PERHITUNGAN INDIKATOR SHIFT SHARE ANALYSIS KABUPATEN BANDUNG TERHADAP NASIONAL TAHUN 2020..... BAB 3-11

TABEL 3.7 PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR UTAMA TERHADAP PDRB ADHB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020..... BAB 3-12

TABEL 3.8 LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2020 ..... BAB 3-13

TABEL 3.9 PDRB PER KAPITA ADHB DAN ADHK DI KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020..... BAB 3-16

TABEL 3.10 SKENARIO TARGET PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 3-18

TABEL 3.11 PERBANDINGAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 DAN HASIL PREDIKSI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026 ..... BAB 3-18

TABEL 3.12 REALISASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN PROYEKSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 ..... BAB 3-19

TABEL 3.13 KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL SISI KONSUMSI ..... BAB 3-20

TABEL 3.14 TARGET SASARAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TAHUN 2020-2022..... BAB 3-21

TABEL 3.15 TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2023 BAB 3-23

TABEL 3.16 TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022..... BAB 3-28

TABEL 3.17 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020 DAN PROYEKSI KABUPATEN BANDUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022..... BAB 3-31

TABEL 3.18 SELISIH PENDAPATAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 DENGAN PROYEKSI DALAM RPJMD..... BAB 3-33

TABEL 3.19 KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 3-36

TABEL 3.20 REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN PROYEKSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 ..... BAB 3-39

TABEL 3.21 SELISIH BELANJA RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 DENGAN PROYEKSI DALAM RPJMD ..... BAB 3-41

TABEL 3.22 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN PROYEKSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 ..... BAB 3-43

TABEL 3.23 DAFTAR KPBU PROVINSI JAWA BARAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 3-45

TABEL 4.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026 ..... BAB 4-10

TABEL 4.2 PENJABARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 ..... BAB 4-13

TABEL 4.3 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022 ..... BAB 4-16

TABEL 4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 ..... BAB 4-18

TABEL 4.5 SINERGI TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT, DAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 4-22

TABEL 4.6 MASALAH POKOK DAN ISU RPJPD KABUPATEN BANDUNG 2005-2025 .... BAB 4-23

TABEL 4.7 SINERGI SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2025 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 4-25

TABEL 4.8 SINERGI ISU STRATEGIS RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RANCANGAN RKPD 2022 ..... BAB 4-26

TABEL 4.9 KRITERIA PRIORITAS PEMBANGUNAN ..... BAB 4-26

TABEL 4.10 SINERGI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ..... BAB 4-28

TABEL 4.11 SINERGI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT ..... BAB 4-32

TABEL 4.12 SINERGI SASARAN PRIORITAS RKPD KABUPATEN TAHUN 2022 DENGAN SASARAN PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 DAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2022 ..... BAB 4-36

TABEL 4.13 SINERGI SASARAN PRIORITAS RKPD KABUPATEN TAHUN 2022 DENGAN SASARAN PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 DAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2022 ..... BAB 4-37

TABEL 4.14 PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 4-40

TABEL 4.15 DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022 ..... BAB 4-43

TABEL 4.16 SINERGI DAN SINKRONISASI TUJUAN TPB DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 ..... BAB 4-59

TABEL 4.17 KETERKAITAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 DENGAN PENGARUSUTAMAAN PADA RPJMN 2020-2025..... BAB 4-61

TABEL 4.18 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... BAB 4-67

TABEL 4.19 STRATEGI PEMECAHAN KENDALA PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG ..... BAB 4-79

TABEL 4.20 KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DENGAN POKOK-POKOK PIKIRAN DAERAH ..... BAB 4-80

TABEL 4.21 KETERKAITAN KONSEP BANDUNG BEDAS MANUNGGAL DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN TOLAK UKUR KEBERHASILANNYA..... BAB 4-103

TABEL 5.1 REKAPITULASI PAGU ANGGARAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022 .....BAB 5-2

TABEL 5.2 MATRIKS KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PRIORITAS, PAGU ANGGARAN DAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB TAHUN 2022 .....BAB 5-4

TABEL 5.3 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 ..... BAB 5-27

TABEL 6.1 INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 .....BAB 6-1

TABEL 6.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 .....BAB 6-1

TABEL 6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 .....BAB 6-3

TABEL 6.4 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 ..... BAB 6-18

RKPD
2022

BAB I
PENDAHULUAN

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tahapan-tahapan yang memiliki peran penting dalam perwujudan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan karena melalui perencanaan pembangunan, target pembangunan dan tahapan pencapaian target pembangunan akan lebih terukur dan terarah. Dalam pelaksanaannya, untuk mampu mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien maka perencanaan pembangunan disusun dengan memastikan kesinambungan antar wilayah dan antar waktu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan, dilaksanakan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan. Dengan demikian, SPPN dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (2), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mengacu pada pasal 12 ayat (3) dalam peraturan yang sama, yang dimaksud dengan RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan amanat dalam SPPN, yang kemudian diturunkan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kabupaten Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKP Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Dalam lingkup internal, perencanaan untuk tahun 2022 merupakan masa transisi dimana pada tahun ini periode RPJMD Tahun 2016-2021 telah habis dan RPJMD Tahun 2021-2026 sedang dalam proses penyusunan. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Tahun 2022 menjadi instrumen bagi pemerintah dalam upaya menerjemahkan kebijakan-kebijakan perencanaan kepala daerah pada periode berikutnya. Oleh karenanya, penyusunan RKPD Tahun 2022 juga berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 periode IV. Disamping itu, berkenaan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, penyusunan konsep perencanaan pembangunan di tahun 2022 juga mengadaptasi konsep yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026.

Dari sisi substansi, RKPD Tahun 2022 memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja tahun 2022 beserta pendanaannya, dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain itu, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan peranan sebagai penyedia pelayanan publik yang konsisten dan terukur. Adapun tahapan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

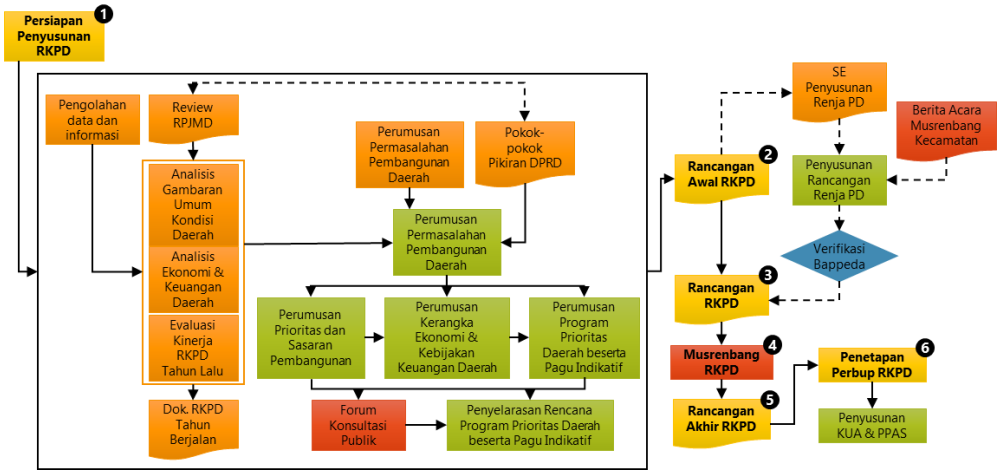

GAMBAR 1.1
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

Dalam rangka menjamin terwujudnya perencanaan yang tepat sasaran, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada proses, yakni

a. **teknokratis,** yakni tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung disusun menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, sehingga substansi dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
b. **partisipatif,** yakni perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c. **politis**, yakni penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan;
d. **atas-bawah dan bawah-atas**, yakni perencanaan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dilakukan secara sinergis antar para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing melalui suatu mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan atas-bawah merupakan perencanaan pembangunan yang mengacu pada agenda dan Prioritas Nasional dalam RKP 2022 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun pendekatan bawah-atas menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan usulan prioritas hasil Musrenbang yang berlangsung dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Selain berorientasi pada proses, perencanaan pembangunan Daerah juga berorientasi pada substansi. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pendekatan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

a. **holistik-tematik,** yakni perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
b. **integratif,** yakni perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
c. **spasial,** yakni perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan dengan mengacu pada pengembangan berbasis kewilayahan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 sebagai RKPD di tahun transisi selanjutnya akan menjadi RKPD tahun pertama di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ketika dokumennya sudah ditetapkan. Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) Tahun 2022 sehingga penyusunan RKPD ini penting peranannya dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Selain dari pada itu, dokumen RKPD 2022 ini juga akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Mengingat pentingnya dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah, maka seyogyanya seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung dapat berperan aktif mendukung implementasi RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2022 tidak luput dari konteks pandemi *Corona Virus Disease* atau Covid-19 yang menyebarluas secara global, termasuk di Indonesia, semenjak tahun 2020. Bahaya penularan Covid-19 di Indonesia yang tinggi menekankan adanya kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* guna menjaga kapasitas sistem kesehatan dan menurunkan jumlah kasus positif. Adapun dampak dari pembatasan pergerakan tersebut secara signifikan mengubah aktivitas perekonomian daerah, yakni bahwa aktivitas masyarakat perlu menjunjung protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh World Health Organisation (WHO) dan Pemerintah. Pada tahun 2021, program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi momentum untuk memulihkan kembali perekonomian daerah dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 memuat pula gambaran umum, strategi, dan arah kebijakan penanganan Covid-19 guna mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah di kala pandemi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada dasar-dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
23. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
30. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539 4815) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
46. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
72. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
73. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
74. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
75. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
76. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
77. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
78. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
79. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan kementerian Dalam negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
83. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
84. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
89. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
91. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
92. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 726);
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
97. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820);
98. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
99. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 794);
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
101. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
102. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 658);
103. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
104. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
107. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
108. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

109. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
110. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 977);
111. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560);
112. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
113. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
114. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
115. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
116. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
117. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
118. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
119. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
120. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
121. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
122. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;

123. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
124. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
125. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
126. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237)
127. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
128. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
129. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
130. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
131. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 22);
132. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
133. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);

134. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
135. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
136. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
137. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 15);
138. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 21);
139. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 22);
140. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
141. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 1);
142. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
143. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 19);
144. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
145. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
146. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
147. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014

tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);

148. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
149. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 3);
150. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
151. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
152. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 2);
153. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 13);
154. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 16);
155. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1);
156. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2);
157. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 4);
158. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5);
159. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 6);
160. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja; (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
161. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja; (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
162. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (15/365/2019));
163. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (5/147/2020));

164. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (6/166/2020));
165. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (7/167/2020));
166. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (11/202/2020));
167. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (3/77/2021));
168. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 23);
169. Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 44
170. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 65)
171. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 58)
172. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 2015 Nomor 51)
173. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);
174. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Ba ndung Tahun 2016 Nomor 39);
175. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 41);

176. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
177. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah dibuah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
178. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok , Fungsi, dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok , Fungsi, dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 65);
179. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
180. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Besaran Kompensasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 23);
181. Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 115) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 49);
182. Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 116);
183. Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 127);
184. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 20);
185. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 12);
186. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluas Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 28)

187. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 22);
188. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 30)
189. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;
190. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 51);
191. Keputusan Bupati Bandung Nomor 542/Kep.328-SDA/2021 tentang Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 disusun selain mengacu pada perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung, juga mengacu pada arahan, kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan dokumen RKP Nasional Tahun 2022, sejalan dengan arahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga sinergitas perencanaan daerah dengan perencanaan di level provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan menjaga keselarasan dan sinergitas antar daerah, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Adapun pada lingkup internal Kabupaten Bandung, dokumen RKPD Tahun 2022 akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang kemudian akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 juga menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2022. Alur hirarki hubungan antara dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dengan dokumen dokumen perencanaan di level internal Kabupaten Bandung, maupun dengan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada diagram alir sebagaimana tertera dalam **Gambar 1.2**.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode satu tahun yang mana merupakan penjabaran tahunan RPJMD. Namun pada implementasinya, RKPD Tahun 2022 ini menjadi tahun istimewa dimana tahun 2022 juga menjadi tahun pertama yang menjadi perencanaan teknis yang berasal dari gagasan yang juga dikembangkan ke dalam RPJMD Tahun 2021-2026 nantinya. Hal ini disebabkan waktu penyusunan keduanya yang hampir bersamaan. Meski demikian, gagasan yang akan dikembangkan baik didalam RKPD maupun RPJMD ini berakar pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

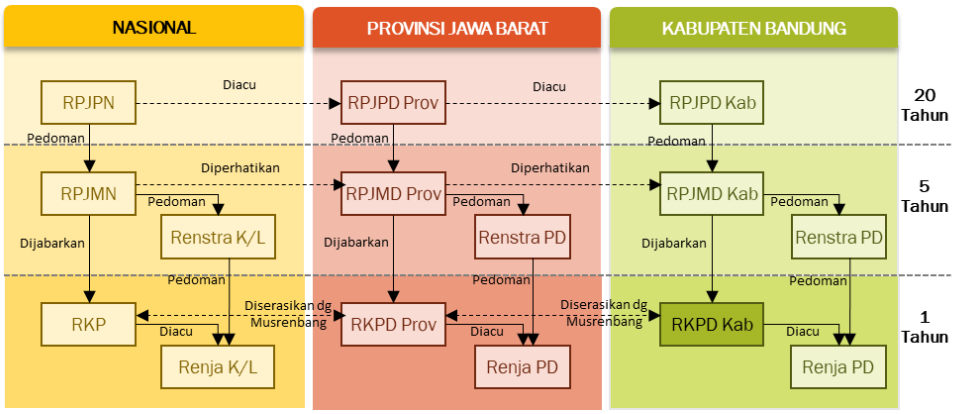

GAMBAR 1.2
HIRARKI HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Selain mempertimbangkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung di tahun 2022 juga dilaksanakan dengan berdimensi kewilayahan/spasial yang mempertimbangkan keterkaitan antar fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Selain disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, RKPD Kabupaten Bandung juga disinergikan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 serta memperhatikan potensi-potensi unggulan di 31 wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung. Perencanaan pembangunan yang berorientasi kewilayahan ini diyakini akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan wilayah sehingga akan membangun rencana pembangunan daerah tahunan yang implementatif. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan proses pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara optimal.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 ialah untuk menyediakan arahan kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan tahunan di Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan, antar sektor, dan antar tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan target dan arahan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, RKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan RKP Nasional Tahun 2022 secara efektif;
2. Mewujudkan pembangunan daerah yang optimal melalui penggunaan sumber daya secara efisien, dengan memperhatikan asas keberlanjutan.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwaktu, dan antartingkatan pemerintahan;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Mendukung optimalnya partisipasi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Bandung (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi) dalam pembangunan Kabupaten Bandung

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Bandung 2022 disajikan dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai dasar-dasar penyusunan RKPD, dimulai dari hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan RKPD, dasar-dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan baik vertikal maupun horizontal, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022, kedudukan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam perencanaan Kabupaten Bandung, keterkaitan antara dokumen RKPD Kabupaten Bandung dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memaparkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022, baik peraturan perundang-undangan di level nasional, Provinsi Jawa Barat maupun peraturan perundang- undangan di level internal Kabupaten Bandung.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Subbab ini menjelaskan hubungan antara RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 dengan dokumen lain yang relevan di level internal Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Menguraikan organisasi penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022, pengaturan bab serta penjelasan mengenai garis besar tiap bab.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memaparkan secara rinci mengenai gambaran umum kondisi daerah selama lima tahun ke belakang terhitung dari tahun 2020. Selain itu dibahas pula mengenai evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya dibandingkan terhadap RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah serta inovasi yang telah berjalan di Kabupaten Bandung.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bandung

Bagian ini memberikan uraian mengenai dasar-dasar analisis yang meliputi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Subbab ini menjelaskan hasil telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan realisasi kinerja pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 yang bersumber dari dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD Tahun 2020.

2.3 Evaluasi Penerapan SPM di Kabupaten Bandung

Pada bagian ini akan menguraikan evaluasi capaian penerapan SPM di Kabupaten Bandung.

2.4 Kondisi Covid-19 di Kabupaten Bandung Tahun 2020

Pada bagian ini akan diuraikan dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung dan upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan, yang mencakup upaya promotif, upaya preventif dan upaya kuratif.

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan serta permasalahan pokok yang menjadi dasar identifikasi isu strategis. Isu strategis kemudian menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu.

2.6 Inovasi

Subbab ini menjelaskan mengenai inovasi pembangunan daerah yang telah diselenggarakan oleh Kabupaten Bandung.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkiraan di tahun eksisting (tahun 2021), yang mencakup indikator makro ekonomi daerah, sumber pendapatan dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan nasional dan provinsi dibidang ekonomi serta pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi di Kabupaten Bandung.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi prioritas program dan kegiatan PD berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Terakhir, subbab ini memaparkan inovasi pembangunan tahun 2022.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan kebijakan dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJPD Kabupaten Bandung yang dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan jangka pendek tahun 2022.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Memaparkan gambaran prioritas pembangunan tahun 2022 dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026. Di dalam subbab ini juga memuat penjelasan terkait kebijakan-kebijakan khusus di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan upaya menjunjung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Standar Pelayanan Minimum, Penataan Ruang dan Kewilayahan, Penanganan Covid-19, Stunting dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung, dan Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Bandung.

4.3. Inovasi Perencanaan Tahun 2022

Menjelaskan tentang konsep pembangunan integratif berbasis tematik di Kabupaten Bandung, yakni Bandung Bedas Manunggal, khususnya untuk intervensi-intervensi multisektoral yang dilakukan pada tahun 2022.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2022, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memaparkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahun 2022. Indikator akan meliputi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Hasil/*Outcome* dan indikator program pembangunan daerah tahun 2022.

BAB 7 PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan mengenai peranan serta urgensi RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022. Selain dari pada itu, pada bab ini juga dipaparkan mengenai kaidah pelaksanaan RKPD bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung.

RKPD
2022

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Bandung serta hasil evaluasi pembangunan di tahun 2020. Gambaran umum daerah akan menjadi dasar bagi pemetaan potensi daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung di tahun 2022. Sedangkan hasil evaluasi pembangunan tahun lalu akan dijadikan referensi kinerja pembangunan daerah dan akan menjadi basis bagi pemetaan tantangan pembangunan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan teridentifikasinya tantangan pembangunan ini, harapannya Pemerintah Daerah dapat menyusun strategi antisipasi dalam membangun rencana pembangunan tahun 2022 yang lebih terarah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Secara garis besar, penjelasan mengenai gambaran umum kondisi daerah akan meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Ditinjau dari segi geografis, kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terbagi atas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi penduduk. Kabupaten Bandung yang berada pada jalur strategis pergerakan di Jawa Barat memberikan keunggulan absolut bagi Kabupaten Bandung. Disamping itu, posisi geografi Kabupaten Bandung yang dikelilingi deretan gunung api menjadikan kondisi lahan Kabupaten Bandung relatif subur dan ditunjang oleh ketersediaan sumber daya air sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah yang akan dibahas pada bagian ini mencakup luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, serta beberapa kondisi fisik wilayah lainnya.

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bandung meliputi 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan cakupan area seluas 174.304,12 ha, atau 4,93% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 3.537.776 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bandung berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Rincian luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bandung dijelaskan dalam **Tabel 2.1**.

TABEL 2.1
LUAS WILAYAH KABUPATEN BANDUNG PER KECAMATAN

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
				Ha	%	
1.		1.	Soreang	2.539,88	1,45	10
		2.	Kutawaringin	4.710,69	2,68	11

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
				Ha	%	
	WP Soreang – Kutawaringin - Katapang	3.	Katapang	1.563,79	0,89	7
		4.	Rancabali	15.299,92	8,42	5
		5.	Pasirjambu	19.828,09	13,59	10
		6.	Ciwidey	5.524,64	2,75	7
2.	WP Baleendah	1.	Baleendah	4.188,43	2,36	8
		2.	Dayeuhkolot	1.116,71	0,63	6
		3.	Bojongsoang	2.826,18	1,58	6
3.	WP Banjaran	1.	Banjaran	3.908,08	2,44	11
		2.	Pangalengan	21.682,28	11,09	13
		3.	Cangkuang	2.377,82	1,40	7
		4.	Cimaung	5.962,70	3,12	10
		5.	Arjasari	6.285,76	3,69	11
		6.	Pameungpeuk	1.516,01	0,83	6
4.	WP Majalaya	1.	Majalaya	2.435,03	1,44	11
		2.	Ciparay	5.374,24	2,62	14
		3.	Pacet	9.495,27	5,22	13
		4.	Kertasari	13.673,03	8,63	8
		5.	Paseh	4.796,69	2,90	12
		6.	Ibun	5.485,52	3,10	12
		7.	Solokanjeruk	2.438,89	1,36	7
5.	WP Cicalengka	1.	Cicalengka	4.358,36	2,04	12
		2.	Nagreg	4.290,34	2,80	8
		3.	Cikancung	3.878,87	2,28	9
6.	WP Cileunyi - Rancaekek	1.	Cileunyi	3.067,74	1,79	6
		2.	Rancaekek	4.493,43	2,57	14
7.	WP Cilengkrang - Cimenyan	1.	Cimenyan	4.765,43	3,01	9
		2.	Cilengkrang	3.530,25	1,71	6
8.	WP Margahayu - Margaasih	1.	Margaasih	1.834,51	1,04	6
		2.	Margahayu	1.055,53	0,60	5
Kabupaten Bandung				**174.304,12**	**100,00**	**280**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

B. Letak dan Kondisi Geografis

Dari segi administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada 1070 22' – 1080 50' Bujur Timur dan 60 41' – 70 19' Lintang Selatan. Peta orientasi wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2.1**. dan **Gambar 2.2**.

GAMBAR 2.1
PETA ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

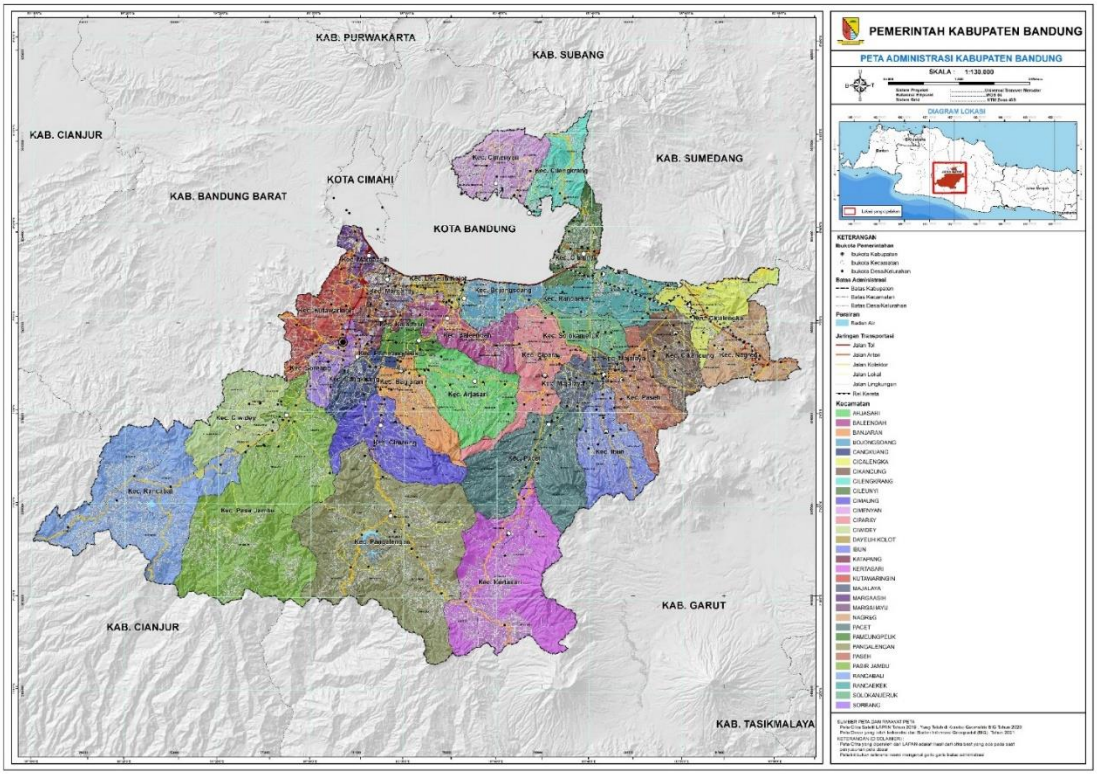

GAMBAR 2.2
PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung , 2021

C. Kondisi Topografi

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Topografi wilayah merupakan pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan, dan ketinggian secara umum pada satuan morfologi.

Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%). Sebagian besar kawasan perkotaan seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang terletak di topografi ini. Kawasan dengan topografi <700 mdpl ini berpotensi mengalami banjir yang dilanda pada setiap musim hujan dikarenakan aliran sungai yang ada di seluruh Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta dangkalnya sungai.

Adapun Kecamatan yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian wilayah Kabupaten Bandung bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang.

Rincian luas topografi Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.2** dan **Gambar 2.3**.

TABEL 2.2
LUAS TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG

No	Topografi	Luas (Ha)
1	<700 Mdpl	33.888,70
2	800 Mdpl	12.371,13
3	900 Mdpl	12.245,73
4	1000 Mdpl	9.817,52
5	1100 Mdpl	9.132,29
6	1200 Mdpl	10.024,02
7	1300 Mdpl	10.150,29
8	1400 Mdpl	9.490,25
9	1500 Mdpl	14.398,80
10	1600 Mdpl	14.043,47
11	1700 Mdpl	12.619,78
12	1800 Mdpl	9.128,66
13	1900 Mdpl	6.185,15
14	2000 Mdpl	4.478,09
15	2100 Mdpl	2.968,35
16	2200 Mdpl	1.820,84
17	2300 Mdpl	1.099,81
18	2400 Mdpl	292,59
19	2500 Mdpl	99,63
20	>2600 Mdpl	49,04
Grand Total		**174.304,12**

Sumber: Hasil Perhitungan Tematik, 2020

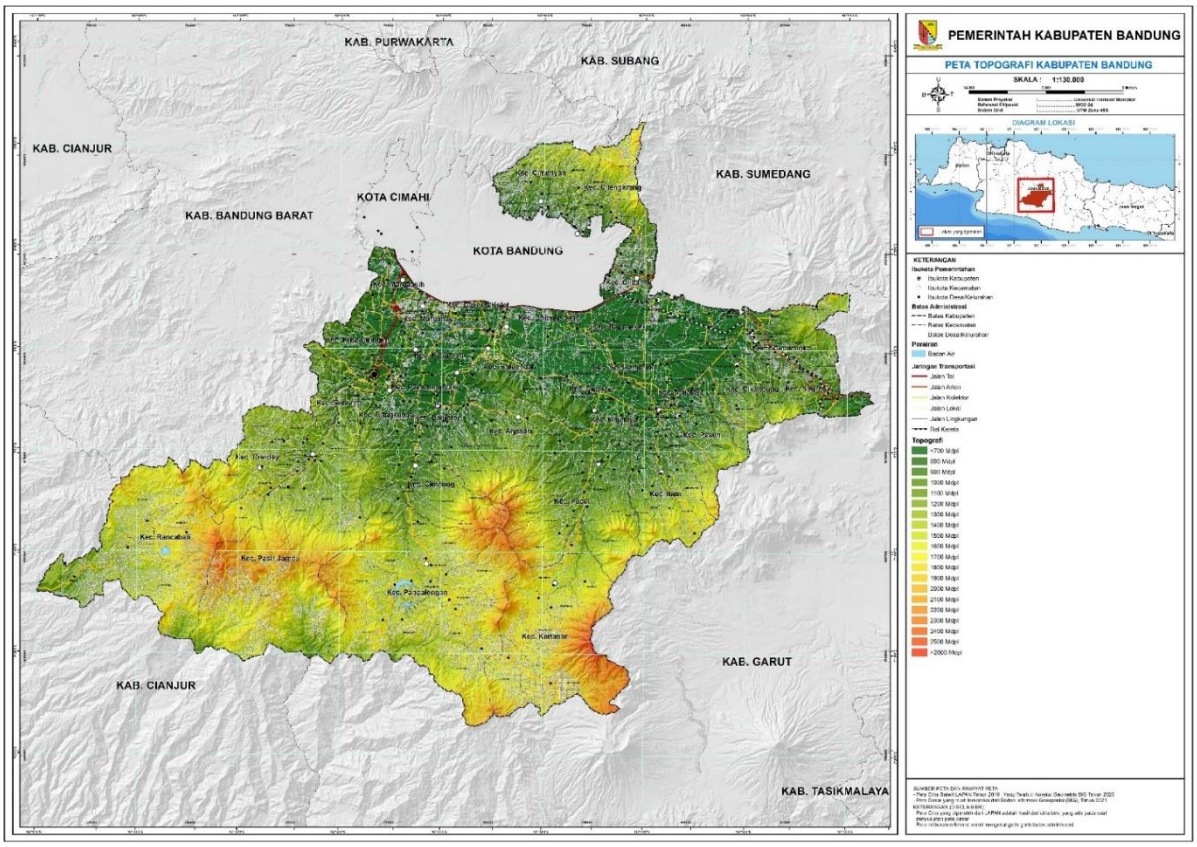

GAMBAR 2.3
PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

D. Kondisi Geologi

Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung yang dikelilingi deretan pegunungan, antara lain meliputi:

- Di bagian utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta;
- Di bagian selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut;
- Dibagian bagian barat terdapat sederetan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung-punggung tidak teratur; dan
- Di bagian timur terdapat Gunung Krenceng dan Gunung Mandalawangi.

E. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi yang cukup melimpah, baik itu sumber daya air yang berupa air bawah tanah maupun air permukaan. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan perikanan. Adapun pemanfaatan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Khusus air tanah permukaan, beberapa sumber air permukaan yang berada dalam cakupan wilayah kabupaten Bandung yaitu meliputi 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sedangkan untuk air tanah, sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah

dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada beberapa wilayah perkotaan, pasokan air penduduk ditopang melalui fasilitas PDAM.

Secara tidak langsung, kondisi hidrologi Kabupaten Bandung ini turut dipengaruhi oleh kondisi curah hujan. Kabupaten Bandung rata-rata memiliki curah hujan dengan kisaran antara 3 hingga 6 mm per tahun. Potensi limpasan air hujan yang besar ini memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur drainase guna menghindari tibulnya persoalan banjir.

F. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Kondisi iklim ini berpengaruh terhadap suhu Kabupaten Bandung, sehingga berada dalam kisaran antara 12^{o}C sampai 24^{o}C dengan kelembaban antara 75% pada musim hujan dan 87% pada musim kemarau.

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan menjadi 34 jenis sesuai dengan SNI Nomor 765-1:2014 Tentang Klasifikasi Penutup Lahan Skala Kecil dan Menengah. Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

TABEL 2.3
PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2019

No.	Pengunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Parkir Dan Lapangan	6,38
2	Bangunan Industri dan Perdagangan	1.750,65
3	Bangunan non-permukiman lain	8,84
4	Bangunan Permukiman Desa	10.032,77
5	Bangunan Permukiman Kota	15.174,40
6	Danau Buatan Lainnya	1,19
7	Danau/Telaga Alami	214,88
8	Embung	3,79
9	Hamparan Lahar/Lava	20,93
10	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	36.135,45
11	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	2.248,20
12	Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,66
13	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	197,99
14	Kebun Campuran	8.685,71
15	Kolam Air Tawar Lain	44,52
16	Kolam Oksidasi dan Pengelolaan Limbahr	81,83
17	Ladang/Tegalan dengan Palawija	26.778,70
18	Lahan Terbuka Lain	779,83
19	Landas Pacu (runway) dan taxiway	71,39
20	Lapangan diperkeras	0,71
21	Padang Golf	60,76
22	Padang Rumput	24,70
23	Penambangan Terbuka Lain	121,16
24	Perkebunan Lain	1.031,22
25	Perkebunan Teh	21.776,70
26	Permukaan diperkeras lain	29,71
27	Saluran Air	12,16
28	Sawah dengan padi diselingi palawija/tanaman lain/bero	3.972,32
29	Sawah dengan padi terus menerus	29.983,29
30	Semak/Belukar	14.720,69
31	Stadion	14,07

No.	Pengunaan Lahan	Luas (Ha)
32	Sungai	247,88
33	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,94
34	Waduk Irigasi	63,21
	Grand Total	**174.304,60**

Sumber: Interpretasi Citra SPOT-6/7 Kabupaten Bandung Tahun 2019

Sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi dengan cakupan seluas 36.135,45 ha atau sebesar 20,73% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Meninjau persentase luas penggunaan lahan ini tampak bahwa ketersediaan di Kabupaten Bandung potensial dalam mendukung fungsi pertanian. Selain dari pada itu, penggunaan lahan ini berpotensi sebagai kawasan resapan air.

Potensi kawasan resapan air ini jika dikelola dengan baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir pada saat puncak musim hujan tiba. Kawasan resapan air di Kabupaten Bandung dibagi menjadi Imbuhan Bandung Soreang, Imbuhan Banjarsari, Imbuhan Batujajar, Imbuhan Ciater, Imbuhan Cibuni, Imbuhan Garut, Imbuhan Malangbong, Imbuhan Sumedang, dan Imbuhan Llmuang. Peta kawasan resapan air di Kabupaten Bandung secara lebih rinci dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.

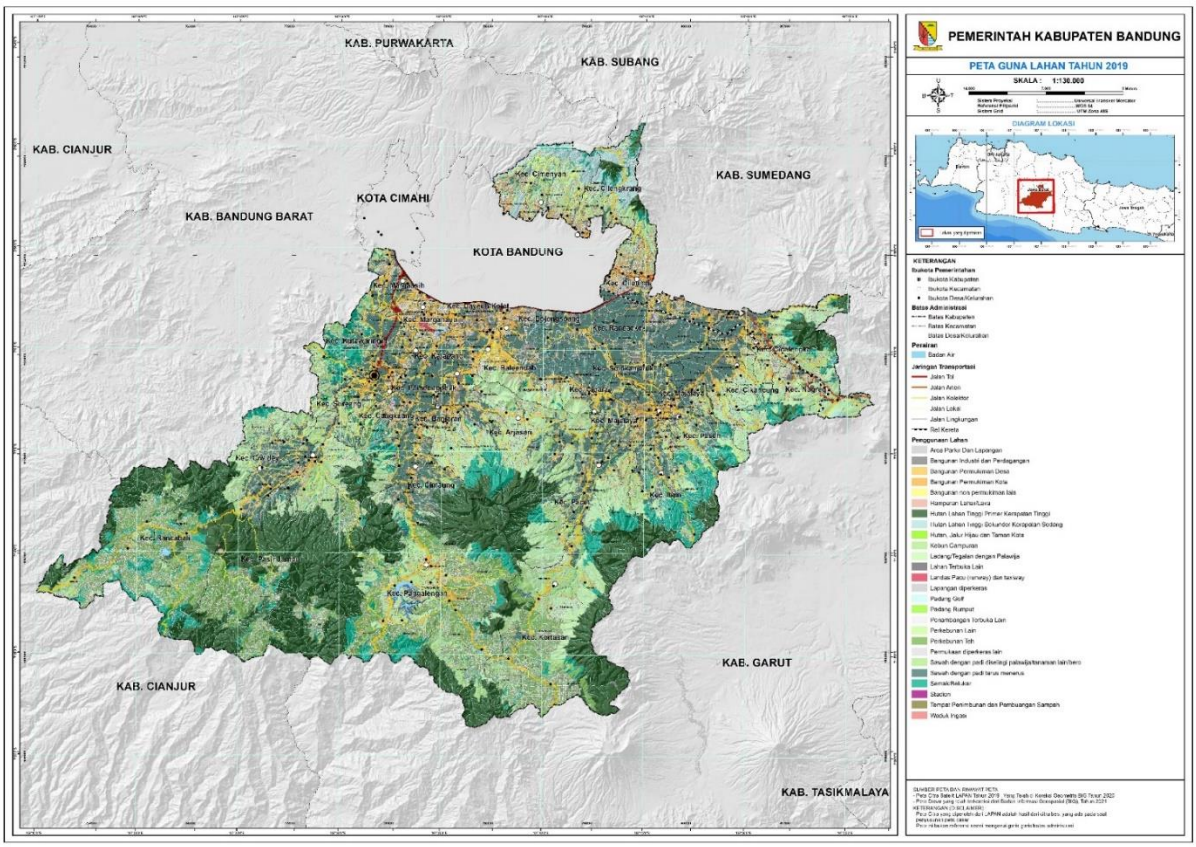

GAMBAR 2.4
PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

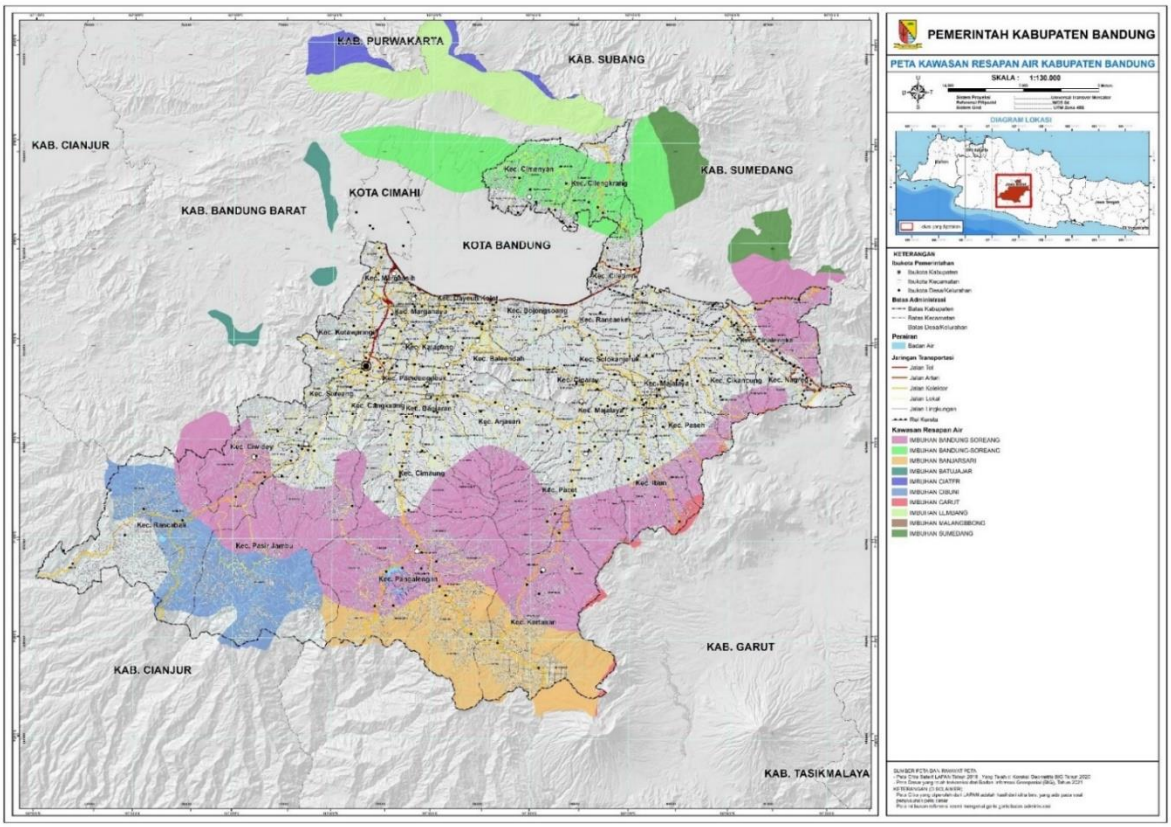

GAMBAR 2.5
PETA KAWASAN RESAPAN AIR KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level internal Kabupaten Bandung, tetapi juga dianggap strategis oleh pemerintah nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam level nasional, Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenal lagi Kawasan Strategis Propinsi, Kawasan Strategis Kabupaten. Hanya ada Kawasan Strategis Nasional.

Lokasi KSN yang berlokasi di Kabupaten Bandung adalah KSN Cekungan Bandung. Penetapan KSN didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028. KSN Cekungan Bandung dipandang penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari KSN cekungan Bandung, pengembangan Kabupaten Bandung dilakukan searah dengan arahan nasional untuk pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi bahwa berdasarkan lokasi geografi dan potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Bandung potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Keterkaitan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan wilayah tersebut sejalan mengikuti arahan kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

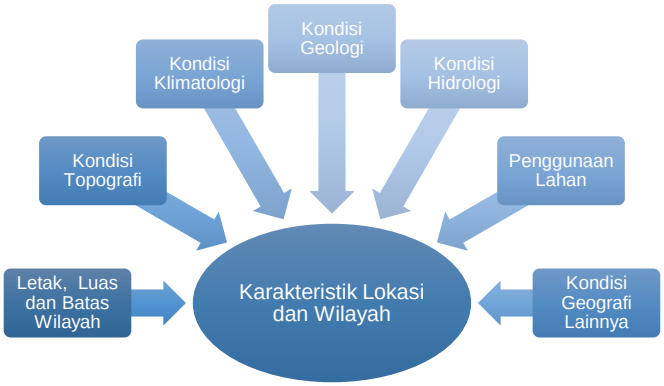

GAMBAR 2.6
KERANGKA PEMIKIRAN KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi morfologi Kabupaten Bandung yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh deretan pegunungan mengakibatkan tingginya kerentanan bencana alam baik bencana letusan gunung api, tanah longsor, banjir maupun kekeringan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bandung menduduki peringkat tingkat rawan bencana kategori Tinggi, yakni dengan skor 174.00 atau urutan 96 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung menempati ranking ketujuh dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, setelah Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Tingginya tingkat kerentanan bencana ini diukur dari berbagai faktor diantaranya jumlah kasus yang terjadi hingga potensi wilayahnya.

Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Selain diakibatkan oleh morfologi wilayah yang berupa cekungan, juga turut dipicu oleh adanya alih fungsi lahan di kawasan hulu Sungai Citarum. Selain itu, terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase juga turut memicu terjadinya banjir, terutama di beberapa titik lokasi seperti di Margaasih, Margahayu, Dayeuh Kolot, Katapang, Bojongsoang, Baleendah, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Cileunyi. Disisi lain, kawasan ini merupakan kawasan pelepasan air tanah yang memiliki daya serap air yang rendah. Pada kondisi eksisting, tingkat banjir dengan status tinggi (genangan > 3 m) terdapat di Margaasih, Margahayu, Bojongsoang, dan Baleendah dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan di wilayah perbatasan. Sedangkan titik lokasi rawan banjir lainnya berada pada status sedang (genangan 1-3 m) dan rendah (genangan <1 m). Peta kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada **Gambar 2.7**.

Selain bencana banjir, Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana letusan gunung berapi, terutama wilayah yang berada di bagian selatan dan timur Kabupaten Bandung. Namun, zona bahaya gunung berapi ini masih berada pada KRB I dan KRB II, yakni berpotensi terlanda alirah lahar hujan dan aliran awan panas, lava, dan lahar hujan dimana bukan merupakan zona dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Kecamatan yang berada di KRB I bahaya gunung berapi adalah Kecamatan Rancabali, Ciwidey, dan Pasirjambu serta Pangalengan. Sementara kecamatan yang berada di KRB II adalah Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan serta Kertasari. Lokasi persebaran kawasan risiko gunung berapi dapat dilihat secara rinci pada **Gambar 2.8**.

Selain risiko bencana banjir dan gunung berapi, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tingkat risiko bencana ini cukup tinggi karena pada sebagian besar luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan gempa yang tinggi dan sebagian lainnya memiliki tingkat kerentanan menengah. Tingkat kerentanan gempa dengan status tinggi berada di Kecamatan Cimenyan, Cilengrang, Cileunyi, Margaasih, Kutawaringin, Dayeuhkolot, Katapang, Bojongsoang, Baleendah, Rancaekek, Solokanjeruk, Ciparay, Majalaya, Cikancung, Cicalengka, dan sebagian Kecamatan Nagreg serta Pamengpeuk. Sementara kecamatan lainnya

berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2.9**.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung adalah risiko gerakan tanah mengingat topografi dan kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dimulai dari bagian utara dengan tingkat kerentanan gerakan tanah sangat rendah, menuju bagian tengah dan selatan Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerentanan rendah dan menengah, serta beberapa kawasan di bagian selatan dan timur yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

Daerah dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi hanya terdapat di sebagian kecil daerah di Kecamatan Nagreg dan Cicalengka. Sementara sebagian besar daerah lainnya memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah menengah hingga sangat rendah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2.10**.

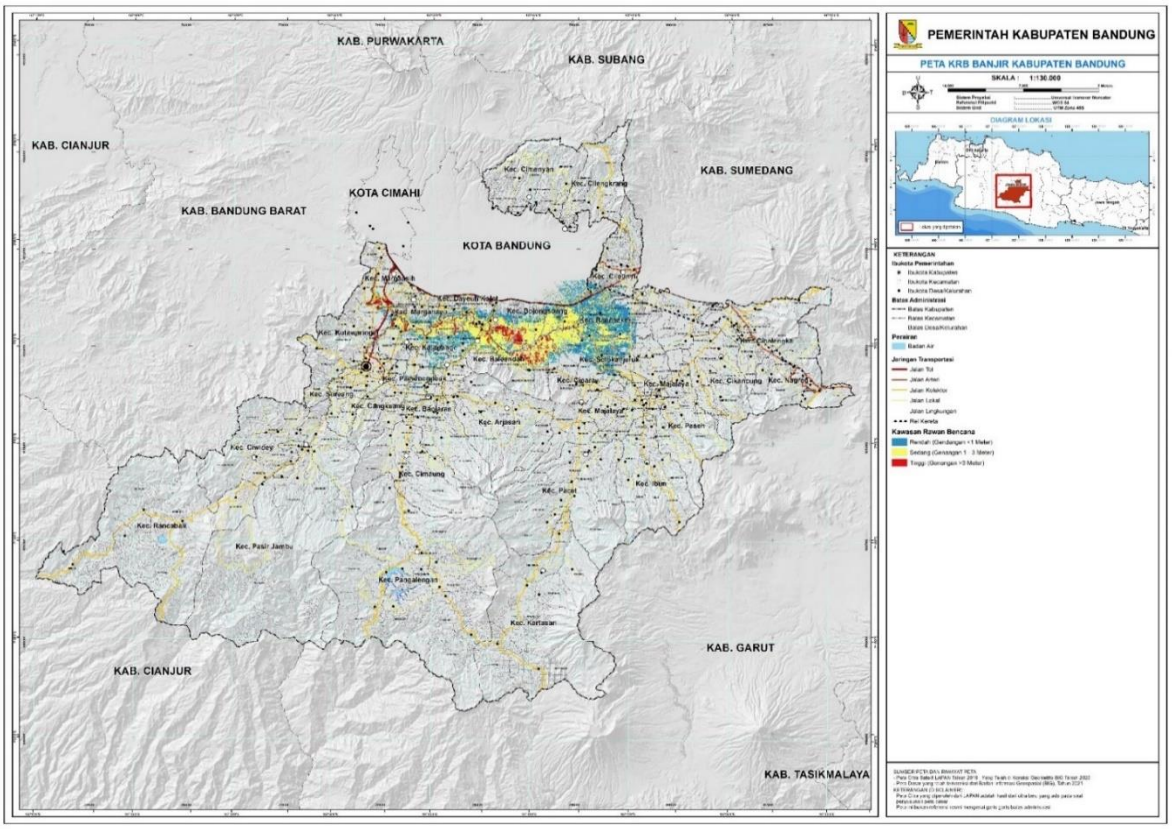

GAMBAR 2.7
PETA KAWASAN RAWAN BANJIR KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

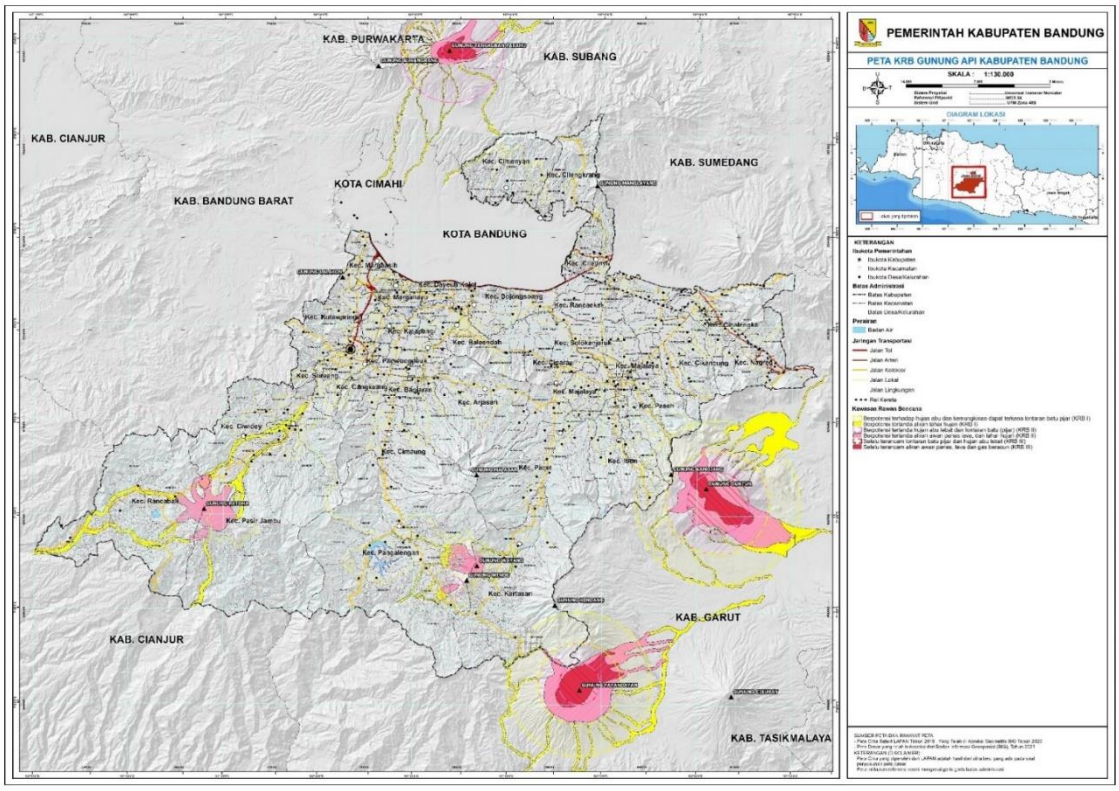

GAMBAR 2.8
PETA KAWASAN RISIKO GUNUNG BERAPI DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

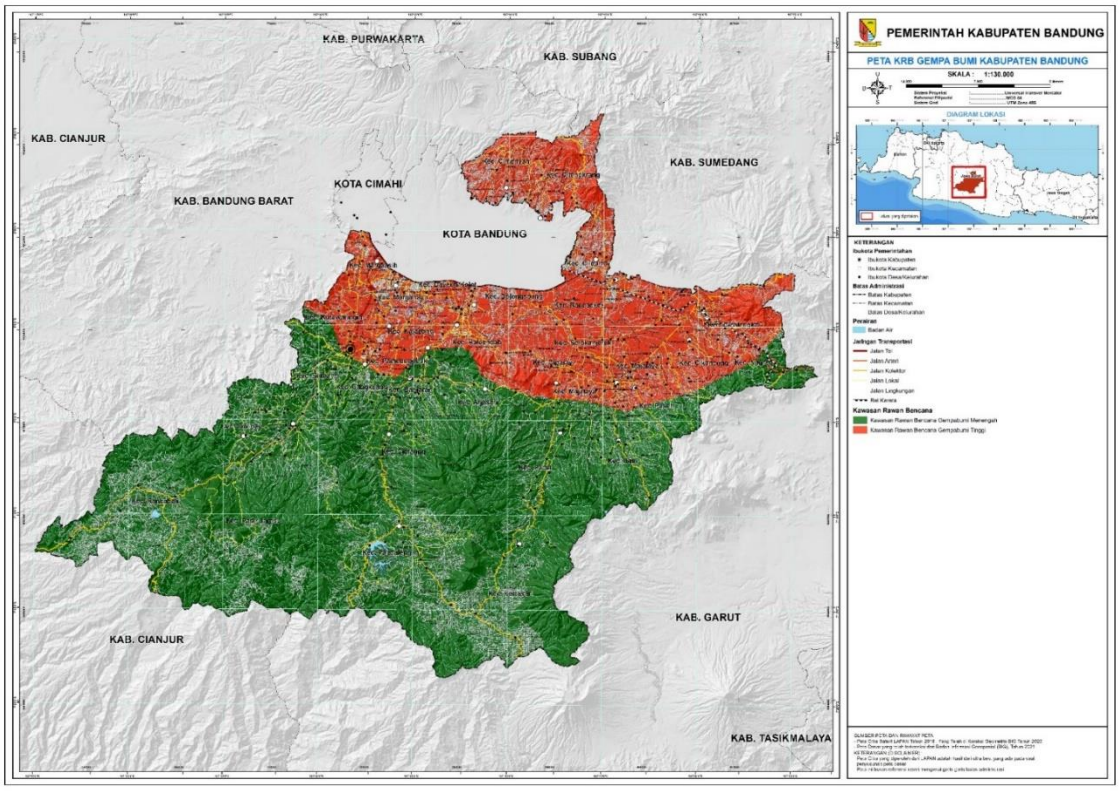

GAMBAR 2.9
PETA RAWAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

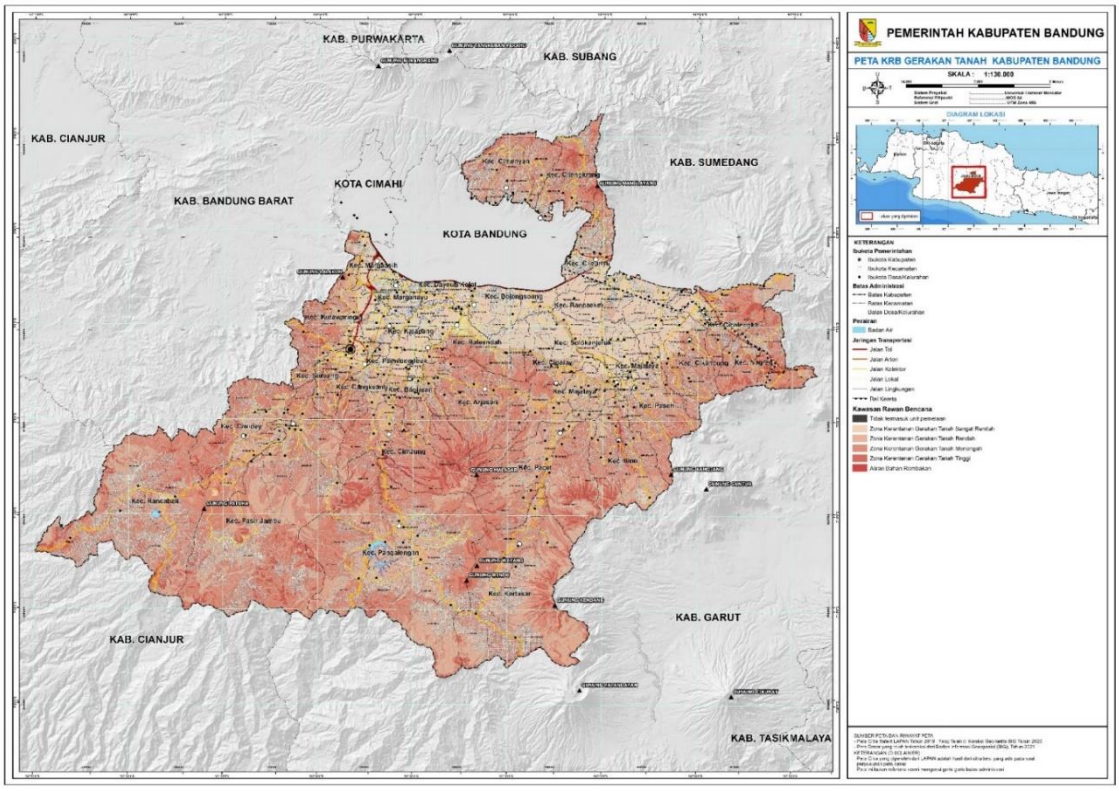

GAMBAR 2.10
PETA RAWAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

2.1.1.4. Demografi Penduduk

Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.775.279 jiwa dengan angka kepadatan penduduk sekitar 2.135 jiwa/km^2. Angka tersebut diperoleh berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Pada tahun 2020, BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.056 jiwa/km^2. Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010, juga dapat mencerminkan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan korban jiwa dan bermigrasinya masyarakat Kabupaten Bandung ke luar kota akibat melemahnya aktivitas perekonomian di daerah. Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Gambar 2.11**.

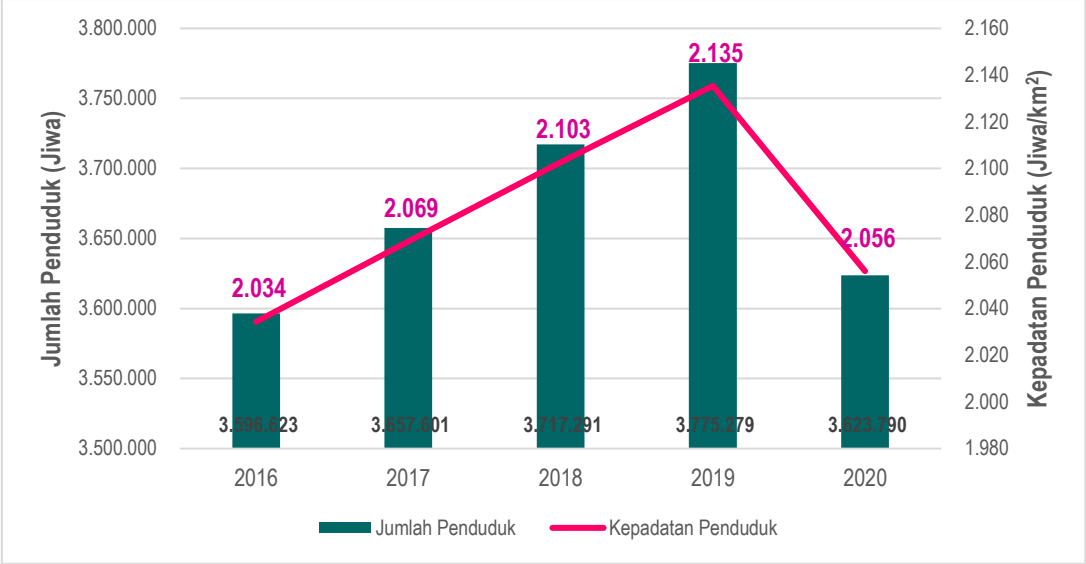

GAMBAR 2.11
GRAFIK PERKEMBANGAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2020

Jika ditinjau dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2020 termasuk ke dalam 3 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Selengkapnya jumlah penduduk untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat di **Gambar 2.12**.

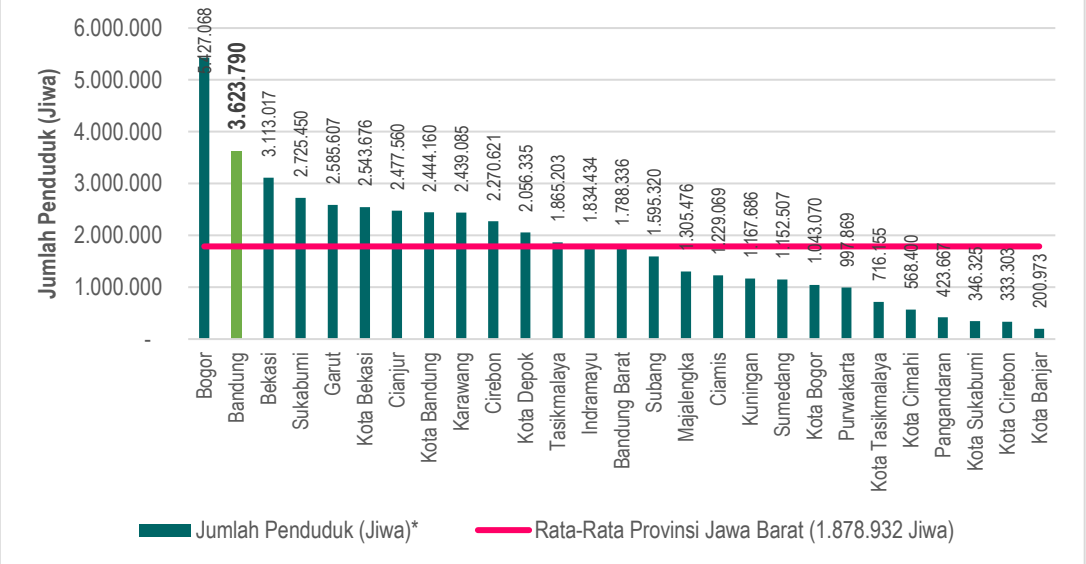

GAMBAR 2.12
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2020 (JIWA)
*Ket: *) Hasil Sensus Penduduk 2020*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2020, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 51% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.848.018 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.775.772 jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi

penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dengan dependency ratio sebesar 46% pada tahun 2020. Dengan demikian, setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bandung menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2020 digambarkan dalam piramida penduduk berikut.

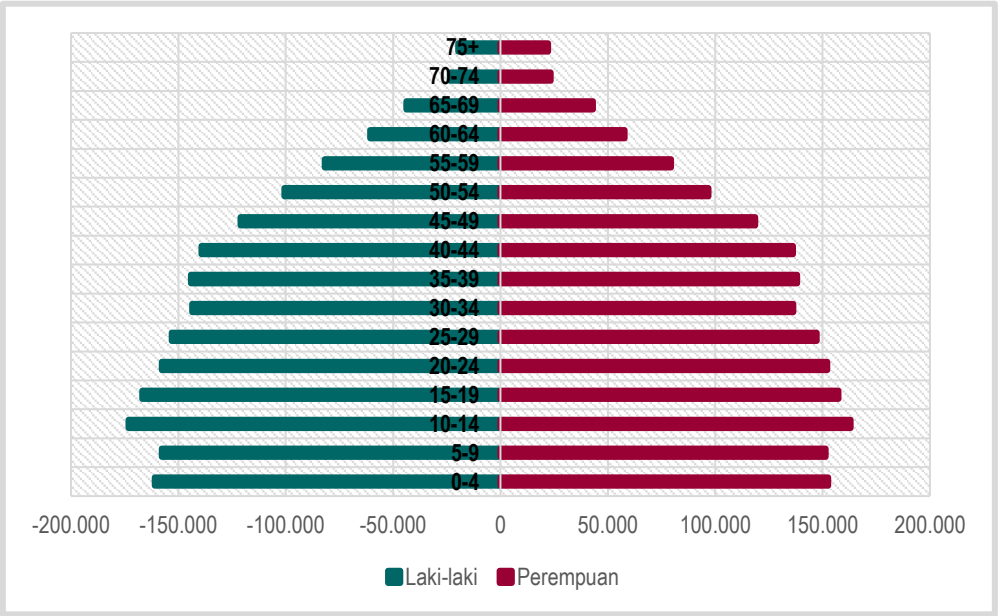

GAMBAR 2.13
GRAFIK PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan piramida penduduk di atas, tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung memiliki bentuk *expanisve*, yang ditandai dengan besarnya penduduk dalam kelompok umur muda terutama penduduk 0-19 tahun, serta sedikitnya jumlah penduduk dalam kelompok usia tua. Bentuk ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Adapun fenomena ini tercerminkan dalam hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS RI per September 2020. Walau ada perbedaan total jumlah penduduk antara hasil survei dengan Ditjen Dukcapil, secara umum komposisi penduduk Kabupaten Bandung tergolong ke kategori Gen Z, yakni penduduk usia 8-23 tahun, disusul oleh kategori Milenial, yakni penduduk usia 24-39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan. Selengkapnya komposisi penduduk berdasarkan kategori usia dapat dilihat pada **Gambar 2.14**.

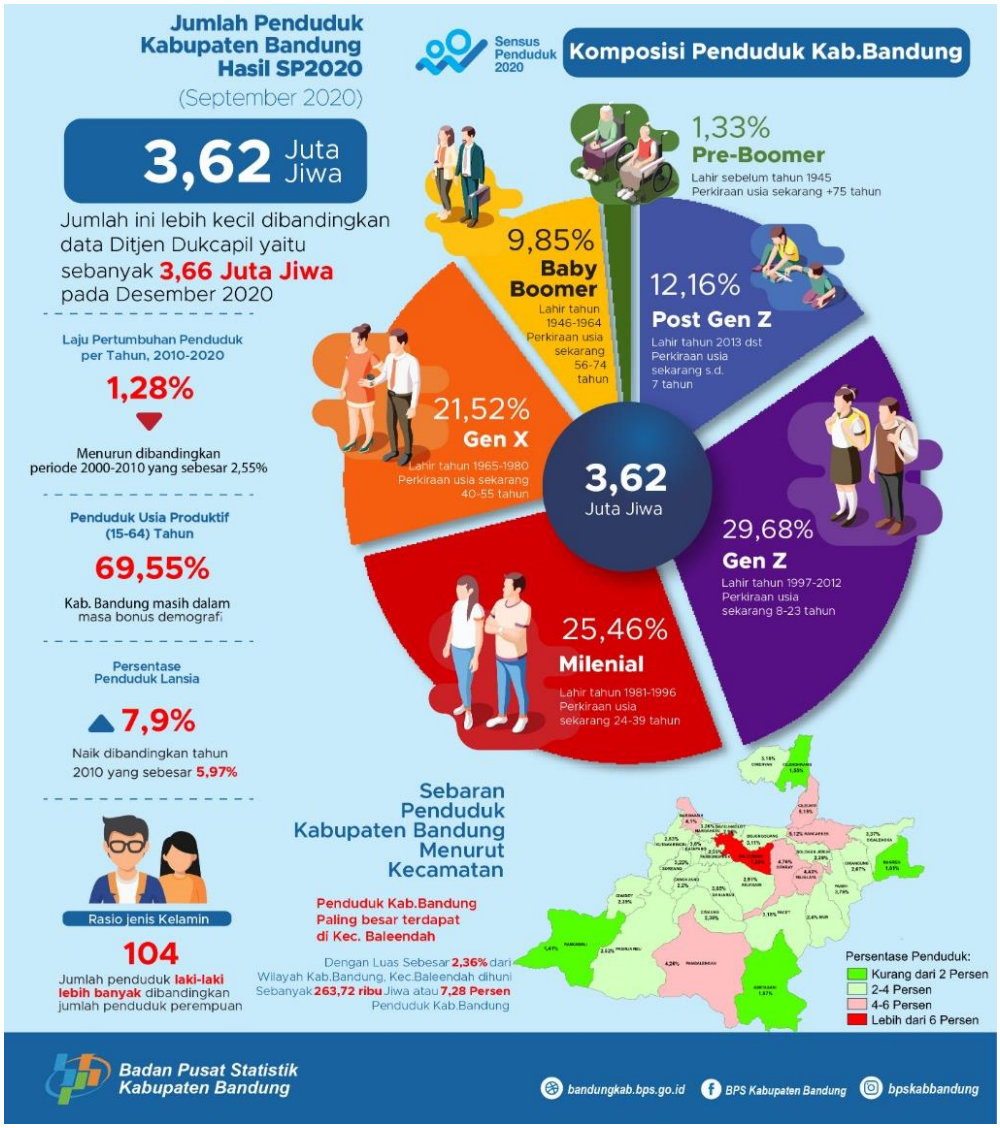

GAMBAR 2.14
KOMPOSISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 HASIL SURVEI PENDUDUK 2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Bandung, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung cenderung terkonsentrasi di bagian utara, seperti Kecamatan Baleendah, Rancaekek, Ciparay, dan Cileunyi. Adapun wilayah-wilayah yang berlokasi cenderung jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Cilengkrang, Rancabali, Nagreg, dan Kertasari cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu kategori kepadatan penduduk 0-2.500 jiwa/km^2, 2.500-5.000 jiwa/km^2, 5.000-7.500 jiwa/km^2, 7.500-10.000 jiwa/km^2, dan >10.000 jiwa/km^2. Distribusi penduduk di Kabupaten Bandung ditampilkan dalam peta pada **Gambar 2.15**. Adapun informasi lengkap mengenai demografi Kabupaten Bandung dijabarkan pada **Tabel 2.4**.

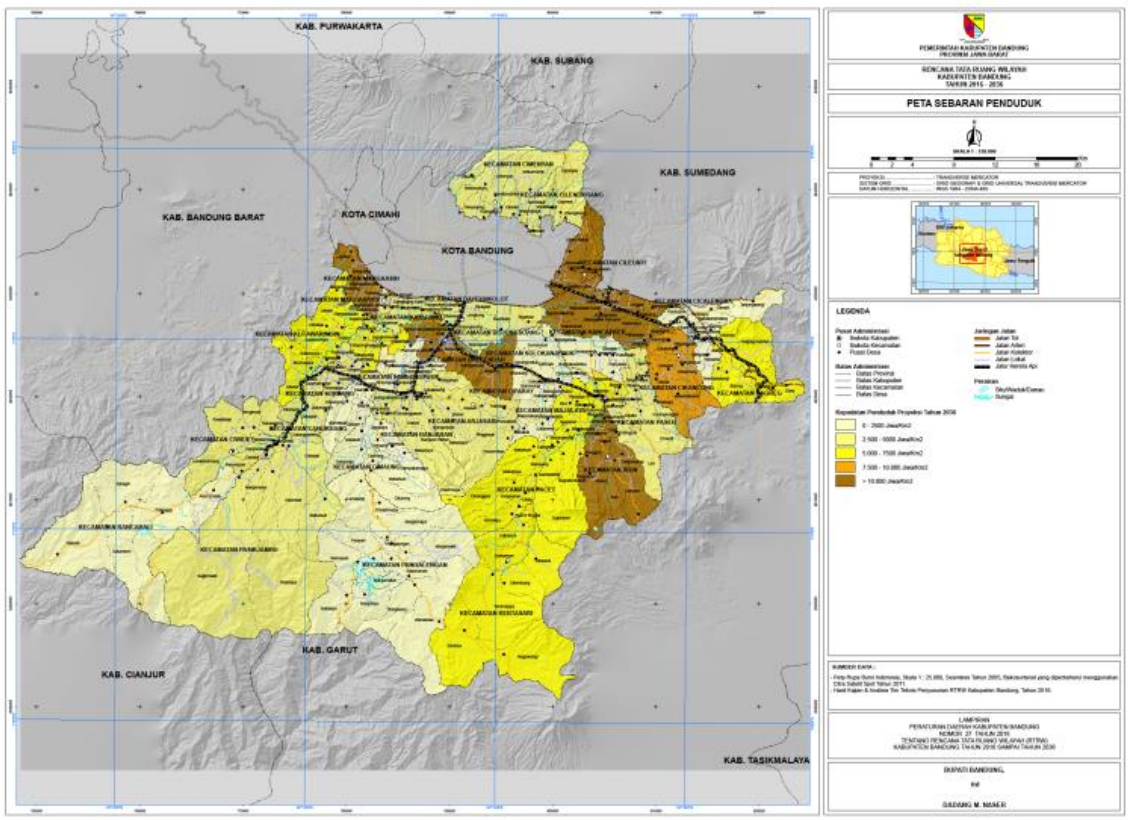

GAMBAR 2.15
PETA PERSEBARAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

TABEL 2.4
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
2016	Laki- Laki	539.932	1.206.507	77.269	1.823.708	50,71			
	Perempuan	524.894	1.172.904	75.117	1.772.915	49,29			
	Jumlah	1.064.823	2.379.411	152.386	3.596.623	100	1,77	51,16	2.041
	%	29,60	66,16	4,24					
2017	Laki- Laki	532.173	1.239.883	81.744	1.853.615	50,68			
	Perempuan	511.069	1.201.094	92.003	1.803. 986	49,32			
	Jumlah	1.043.148	2.440.717	173.736	3.657.601	100	1,70	49,86	2.075
	%	28,52	66,73	4,75					
2018	Laki- Laki	560.770	1.248.682	73.465	1.882.917	50,65			
	Perempuan	539.659	1.209.745	84.970	1.834.347	49,35			
	Jumlah	1.100.429	2.458.427	158.435	3.717.291	100	1,63	51,21	2.110
	%	29,60	66,13	4,26					
2019	Laki- Laki	495.795	1.221.733	99.879	1.911.189	50,62			
	Perempuan	465.241	1.185.747	93.284	1.864.090	49,38			
	Jumlah	961.036	2.407.480	193.163	3.775.279	100	1,56	47,94	2.143
	%	26,98	67,59	5,42					
2020	Laki- Laki	491.899	1.268.998	87.121	1.848.018	51,00			

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
	Perempuan	467.055	1.220.133	88.584	1.775.772	49,00			
	Jumlah	958.954	2.489.131	175.705	3.623.790	100	1,49	46,00	2.056
	%	26,46	68,69	4,85					

Sumber: BPS Kabupaten Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penjelasan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum, yang dibagi secara spesifik ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan basis data utama untuk menganalisis kondisi perekonomian deaerah. Dengan menggunakan komponen PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bandung, baik PDRB ADHB maupun ADHK, cenderung menunjukkan trend pertumbuhan positif namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi Covid-19. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 7,61% dan 4,60% per tahun. Informasi mendetil mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung lima tahun terakhir disajikan dalam **Tabel 2.5**.

TABEL 2.5
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

TAHUN	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	LAJU PERTUMBUHAN (%)	
			PDRB ADHB	PDRB ADHK
2016	Rp94.334,76	Rp68.804,85	10,18	6,34
2017	Rp102.865,60	Rp73.039,45	9,04	6,15
2018	Rp113.185,39	Rp77.603,12	10,03	6,25
2019	Rp124.001,19	Rp82.336,63	9,56	6,10
2020	Rp123.049,25	Rp80.829,31	-0,77	-1,87
RATA-RATA			**7,61**	**4,60**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

Secara lebih rinci, PDRB di tahun 2020, struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung didominasi oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 52,4%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,83%, dan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,7%. Meski demikian, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Bandung pada tahun juga mengalami penurunan sebesar -1,87% atau senilai Rp -1.543,87 M. Hal ini mengindikasikan bahwa volume produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan.

Secara lebih detail, PDRB ADHB tahun 2020 di Kabupaten Bandung berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.6
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB TAHUN 2020	
		PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	9.470,24	7,70
B	Pertambangan dan penggalian	2.165,06	1,76
C	Industri pengolahan	64.476,54	52,40
D	Pengadaan listrik dan gas	125,70	0,10
E	Pengadaan air; Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	47,37	0,04
F	Konstruksi	7.933,86	6,45
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	15.788,43	12,83
H	Transportasi dan pergudangan	4.468,21	3,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.016,97	2,45
J	Informasi dan komunikasi	2.336,67	1,90
K	Jasa keuangan dan asuransi	861,33	0,70
L	Real estat	1.470,25	1,19
M,N	Jasa perusahaan	490,01	0,40
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2.478,30	2,01
P	Jasa pendidikan	4.239,07	3,45
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	1.044,90	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.636,33	2,14
TOTAL		**123.049,25**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. LPE Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat disrupsi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Selengkapnya pertumbuhan LPE Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2.16**.

Adapun secara regional, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2020. Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 6,1% di tahun 2019 dan menjadi -1,87% di tahun 2020. Di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, LPE Kabupaten Bandung termasuk kabupaten/kota dengan LPE kisaran menengah. Dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat, yakni bernilai -2,44%, LPE Kabupaten Bandung masih lebih tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.19, LPE Kabupaten Bandung termasuk ke kuadran II. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata LPE Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 tinggi namun pada tahun 2020 mengalami LPE yang negatif. Fenomena tersebut terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, dan juga Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdampak disrupsi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Bandung masih mampu tumbuh pada kisaran menengah dalam konteks Provinsi Jawa Barat. Secara lebih rinci, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 2.17** dan **Gambar 2.18**.

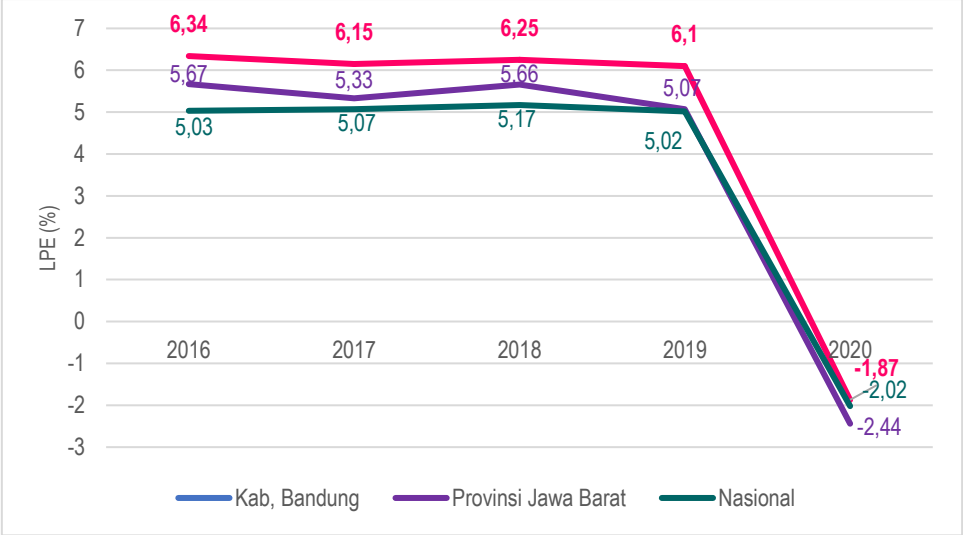

GAMBAR 2.16
GRAFIK PERTUMBUHAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

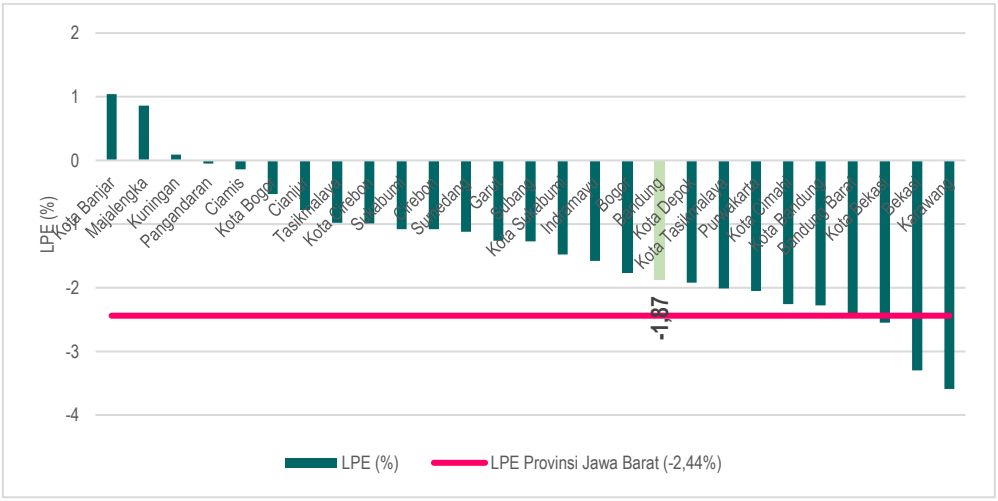

GAMBAR 2.17
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

GAMBAR 2.18
ANALISIS QUADRAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2020 DENGAN RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2016-2020 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

TABEL 2.7
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

No.	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.071.860,87	7,37	5.356.849,97	7,33	5.431.870,55	7,00	5.485.594,10	6,66	5.515.490,00	6,82
B	Pertambangan dan Penggalian	1.649.759,73	2,40	1.638.146,71	2,24	1.730.320,62	2,23	1.667.545,77	2,03	1.709.490,00	2,11
C	Industri Pengolahan	34.952.831,77	50,80	36.963.264,57	50,61	39.538.734,83	50,95	42.613.968,44	51,76	41.305.860,00	51,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93.493,38	0,14	95.645,04	0,13	94.024,00	0,12	94.879,15	0,12	90.000,00	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.461,10	0,03	24.946,20	0,03	26.607,60	0,03	27.687,87	0,03	30.520,00	0,04
F	Konstruksi	4.439.967,50	6,45	4.912.750,33	6,73	5.344.089,80	6,89	5.697.335,40	6,92	5.717.310,00	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.676.959,23	14,06	10.222.299,05	14,00	10.744.786,35	13,85	11.123.995,43	13,51	10.590.270,00	13,10
H	Transportasi dan Pergudangan	2.567.209,96	3,73	2.705.210,54	3,70	2.820.290,09	3,63	2.889.939,77	3,51	2.798.740,00	3,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.660.985,60	2,41	1.767.695,93	2,42	1.894.005,25	2,44	2.029.304,16	2,46	1.965.590,00	2,43
J	Informasi dan Komunikasi	1.455.410,18	2,12	1.644.417,31	2,25	1.802.980,28	2,32	1.994.217,92	2,42	2.464.990,00	3,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	510.853,57	0,74	530.816,89	0,73	557.470,40	0,72	573.700,73	0,70	606.530,00	0,75
L	Real Estate	833.582,01	1,21	918.273,94	1,26	1.014.600,90	1,31	1.113.273,70	1,35	1.109.150,00	1,37
M,N	Jasa Perusahaan	317.112,90	0,46	343.401,56	0,47	372.635,00	0,48	405.352,35	0,49	347.520,00	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.501.702,57	2,18	1.515.994,71	2,08	1.544.143,66	1,99	1.593.401,84	1,94	1.491.420,00	1,85
P	Jasa Pendidikan	2.121.550,61	3,08	2.289.577,42	3,13	2.432.676,00	3,13	2.587.150,93	3,14	2.697.740,00	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	537.487,72	0,78	599.943,79	0,82	648.824,81	0,84	708.386,93	0,86	684.260,00	0,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.390.622,14	2,02	1.510.219,82	2,07	1.605.061,60	2,07	1.730.898,43	2,10	1.704.420,00	2,11
	Total PDRB ADHK	68.804.850,82	100	73.039.453,78	100	77.603.121,75	100	82.336.632,90	100	80.829.310,00	100

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 2.8
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No.	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.552.775,31	8,01	8.180.369,34	7,95	8.872.311,16	7,84	9.333.834,61	7,53	9.470.240,00	7,70
B	Pertambangan dan Penggalian	2.064.735,96	2,19	2.190.035,00	2,13	2.432.718,14	2,15	2.397.476,75	1,93	2.165.060,00	1,76
C	Industri Pengolahan	49.472.413,43	52,44	53.410.543,63	51,92	58.933.668,75	52,07	65.729.950,47	53,01	64.476.540,00	52,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	112.330,48	0,12	132.910,83	0,13	131.934,40	0,12	136.390,21	0,11	125.700,00	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.822,58	0,03	34.433,56	0,03	39.623,58	0,04	42.749,65	0,03	47.370,00	0,04
F	Konstruksi	5.442.231,75	5,77	6.289.850,67	6,11	7.175.985,00	6,34	7.908.626,05	6,38	7.933.860,00	6,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.805.362,54	13,57	13.878.206,26	13,49	15.038.235,98	13,29	16.046.953,26	12,94	15.788.430,00	12,83
H	Transportasi dan Pergudangan	3.670.966,64	3,89	3.997.832,13	3,89	4.236.273,41	3,74	4.425.459,67	3,57	4.468.210,00	3,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.263.914,96	2,40	2.504.799,56	2,44	2.766.077,68	2,44	3.034.620,33	2,45	3.016.970,00	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	1.383.095,03	1,47	1.579.867,97	1,54	1.723.220,46	1,52	1.907.713,58	1,54	2.336.670,00	1,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	649.279,15	0,69	706.113,74	0,69	777.628,75	0,69	816.705,02	0,66	861.330,00	0,70
L	Real Estate	1.013.291,49	1,07	1.135.597,98	1,10	1.273.919,50	1,13	1.461.971,32	1,18	1.470.250,00	1,19
M,N	Jasa Perusahaan	401.389,56	0,43	442.542,06	0,43	498.895,60	0,44	559.739,37	0,45	490.010,00	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.126.428,65	2,25	2.272.245,76	2,21	2.439.240,20	2,16	2.639.099,44	2,13	2.478.300,00	2,01
P	Jasa Pendidikan	2.741.260,19	2,91	3.125.707,02	3,04	3.561.840,80	3,15	3.877.793,71	3,13	4.239.070,00	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	726.419,28	0,77	837.260,66	0,81	926.484,37	0,82	1.059.887,04	0,85	1.044.900,00	0,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.880.047,18	1,99	2.147.281,29	2,09	2.357.330,48	2,08	2.622.222,76	2,11	2.636.330,00	2,14
	Total PDRB ADHB	94.334.764,17	100	102.865.597,44	100	113.185.388,25	100	124.001.193,24	100	123.049.250,00	100

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 2.9
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Sektor	Tahun								Rata-rata Pertumbuhan	
		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020			
		HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,93%	0,67%	-0,50%	-0,67%	-4,59%	-1,43%	-4,79%	-3,97%	2,42%	2,25%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,53%	0,32%	-6,46%	-2,73%	-0,59%	0,95%	-9,16%	-10,04%	4,43%	-9,00%
C	Industri Pengolahan	-0,38%	0,54%	-0,38%	-0,99%	0,82%	0,28%	1,44%	1,80%	-1,26%	-1,15%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,55%	6,91%	-3,63%	8,51%	-7,48%	-9,79%	-4,89%	-5,64%	-3,38%	-7,12%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,68%	5,18%	0,17%	9,56%	0,38%	4,58%	-1,92%	-1,52%	12,30%	11,67%
F	Konstruksi	1,12%	-0,47%	4,23%	5,99%	2,38%	3,69%	0,49%	0,60%	2,22%	1,10%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,42%	-2,05%	-0,49%	-0,61%	-1,54%	-1,52%	-1,95%	-2,60%	-3,02%	-0,85%
H	Transportasi dan Pergudangan	0,37%	-1,06%	-0,73%	-0,13%	-1,88%	-3,70%	-3,41%	-4,65%	-1,35%	1,75%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15%	-1,40%	0,25%	1,46%	0,84%	0,36%	0,99%	0,14%	-1,33%	0,19%
J	Informasi dan Komunikasi	7,50%	3,90%	6,44%	4,75%	3,19%	-0,87%	4,26%	1,05%	25,91%	23,43%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25%	3,66%	-2,12%	-0,27%	-1,16%	0,09%	-3,00%	-4,14%	7,69%	6,28%
L	Real Estate	2,18%	-0,07%	3,77%	2,78%	3,99%	1,95%	3,42%	4,75%	1,49%	1,34%
M,N	Jasa Perusahaan	2,28%	0,90%	2,01%	1,11%	2,12%	2,46%	2,53%	2,41%	-12,67%	-11,78%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,22%	-2,89%	-4,90%	-2,00%	-4,14%	-2,44%	-2,74%	-1,24%	-4,65%	-5,37%
P	Jasa Pendidikan	0,71%	-1,80%	1,66%	4,57%	-0,01%	3,56%	0,24%	-0,63%	6,22%	10,16%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,57%	1,24%	5,15%	5,70%	1,78%	0,57%	2,91%	4,42%	-1,60%	-0,65%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,37%	3,36%	2,30%	4,74%	0,02%	-0,23%	1,65%	1,53%	0,31%	1,32%

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Ditinjau dari nilai rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB Kabupaten Bandung, sebagaimana diresumekan pada **Tabel 2.10**, tampak bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan kontribusi paling tinggi untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Adapun untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan kontribusi tertinggi adalah Sektor Informasi dan Komunikasi. Selain itu, sektor terendah untuk PDRB ADHB adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan untuk PDRB ADHK, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki nilai rata-rata persentase pertumbuhan paling rendah. Hal ini terjadi karena pada rentang tahun 2016-2020 sektor ini terus mengalami penurunan sehingga berdampak pada rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan.

TABEL 2.10
RATA-RATA PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		HK (%)	HB (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,88%	-0,63%
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,85%	-4,10%
C	Industri Pengolahan	0,05%	0,10%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,18%	-1,43%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85%	5,89%
F	Konstruksi	2,09%	2,18%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,49%	-1,53%
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,40%	-1,56%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,18%	0,15%
J	Informasi dan Komunikasi	9,46%	6,45%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,13%	1,12%
L	Real Estate	2,97%	2,15%
M,N	Jasa Perusahaan	-0,74%	-0,98%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,93%	-2,79%
P	Jasa Pendidikan	1,77%	3,17%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,76%	2,25%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,33%	2,14%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Indikator PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per penduduk suatu daerah. Berdasarkan **Tabel 2.11**, dapat diketahui bahwa nilai PDRB per kapita di Kabupaten Bandung mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB per kapita tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2020, yakni -2,22% untuk PDRB per kapita ADHB dan -3,27% untuk PDRB per kapita ADHK.

Pada konteks yang lebih luas, dapat dilihat dari **Tabel 2.11** bahwa PDRB per kapita Kabupaten Bandung masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yang masing-masing mencapai Rp Rp21.095.968,71, Rp 25.310.591,99, dan Rp 39.556.580,00. Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat bahwa secara umum banyak kabupaten yang memiliki PDRB per kapita ADHK yang di bawah provinsi, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi dan termasuk Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi seiring pula dengan jumlah penduduk kabupaten yang semakin tinggi. Secara lebih rinci, pemaparan PDRB per kapita pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat di **Gambar 2.19.**

TABEL 2.11
PDRB PER KAPITA ADHB DAN ADHK DI KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PDRB ADHB PER KAPITA KAB. BANDUNG	PDRB ADHK PER KAPITA KAB. BANDUNG	LAJU PERTUMBUHAN (%)	
				PDRB ADHB PER KAPITA	PDRB ADHK PER KAPITA
2016	3.596.623	Rp26.228.705,14	Rp19.130.403,94	8,26%	4,49%
2017	3.657.601	Rp28.123.788,64	Rp19.969.224,03	7,23%	4,38%
2018	3.717.291	Rp30.474.122,31	Rp20.877.714,63	8,36%	4,55%
2019	3.775.279	Rp32.845.570,68	Rp21.809.416,71	7,78%	4,46%
2020	3.623.790	Rp32.115.121,45	Rp21.095.968,71	-2,22%	-3,27%

TAHUN	PDRB ADHB PER KAPITA		PDRB ADHK PER KAPITA	
	PROVINSI JAWA BARAT	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	NASIONAL
2016	Rp34.893.620,56	Rp47.937.722,50	Rp26.923.505,52	Rp36.468.616,38
2017	Rp37.223.110,89	Rp51.891.171,86	Rp27.970.918,46	Rp37.851.365,21
2018	Rp40.305.586,71	Rp55.990.395,65	Rp29.161.391,20	Rp39.338.850,62
2019	Rp43.092.045,33	Rp59.065.437,01	Rp30.247.470,83	Rp40.844.017,67
2020	Rp42.493.747,25	Rp56.938.720,00	Rp25.310.591,99	Rp39.556.580,00

Sumber: BPS RI, 2021

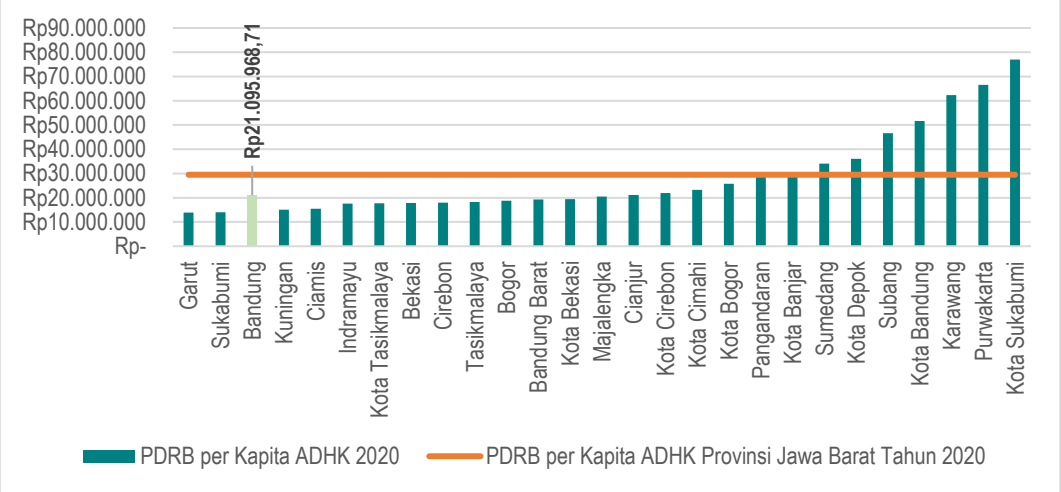

GAMBAR 2.19
PDRB PER KAPITA ADHK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

B. Laju Inflasi

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir inflasi di Kabupaten Bandung cenderung menurun. Hal ini dapat berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menjaga harga komoditas sehingga terjangkau maupun bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama pada saat pandemi Covid-19 sehingga perputaran uang di Kabupaten Bandung turut menurun. Dapat dilihat di **Gambar 2.20** bahwa pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Bandung tercatat sebesar 1,44% sehingga termasuk ke dalam klasifikasi inflasi ringan. Adapun tingkat inflasi di Kabupaten Bandung cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

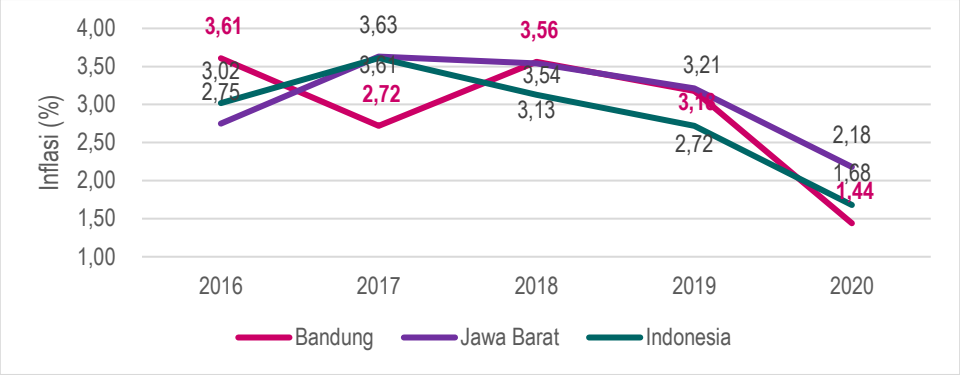

GAMBAR 2.20
GRAFIK LAJU INFLASI PDRB KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

C. Kemiskinan

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 adalah sebanyak 263.600 jiwa, hal ini menunjukkan angka yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 223.210 jiwa di tahun 2019.

TABEL 2.12
INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020

Indikator	Lingkup Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Kab. Bandung	272,65	268,02	246,13	223,21	263,23
	Prov. Jabar	4.224,30	4.168,40	3.615,80	3.399,20	3.920,23
	Nasional	28.005,39	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02
Persentase Penduduk Miskin (%)	Kab. Bandung	7,61	7,36	6,65	5,94	6,91
	Prov. Jabar	8,95	8,71	7,45	6,91	7,88
	Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Kab. Bandung	1	1,12	0,87	1,04	0,92
	Prov. Jabar	1,17	1,2	1,13	1,03	1,13
	Nasional	1,19	1,24	1,17	1,05	1,61
Indeks Keparahan Kemiskinan	Kab. Bandung	0,18	0,26	0,20	0,28	0,17
	Prov. Jabar	0,37	0,37	0,34	0,24	0,23
	Nasional	0,44	0,46	0,41	0,36	0,47
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Kab. Bandung	297.483	310.569	334.929	345.177	367.403
	Prov. Jabar	324.992	344.427	367.755	386.198	410.988
	Nasional	260.469	274.544	294.806	313.232	335.793

Sumber: BPS RI, 2021

Sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.12**, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai 17,93%. Peningkatan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin juga terjadi di level Provinsi maupun Nasional, yakni sebesar 15,33% dan 5,09%. Meski demikian, terdapat penurunan Indeks Kedalam Kemiskinan di Kabupaten Bandung, yakni mencapai 0,92 poin atau terjadi penurunan sebesar 11,54%. Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang justru mengalami peningkatan, yakni masing-masing mencapai 1,13 poin dan 1,61 poin.

Jika dilihat dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, terdapat pola perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang serupa yang terjadi di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

dan Nasional, yakni bahwa pada tahun 2016-2019 jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin cenderung menurun namun kembali meningkat di tahun 2020. Hal ini dapat diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meski demikian, nilai absolut Kabupaten Bandung untuk kelima indikator kemiskinan tersebut mayoritas berada di bawah nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan dalam **Gambar 2.21**.

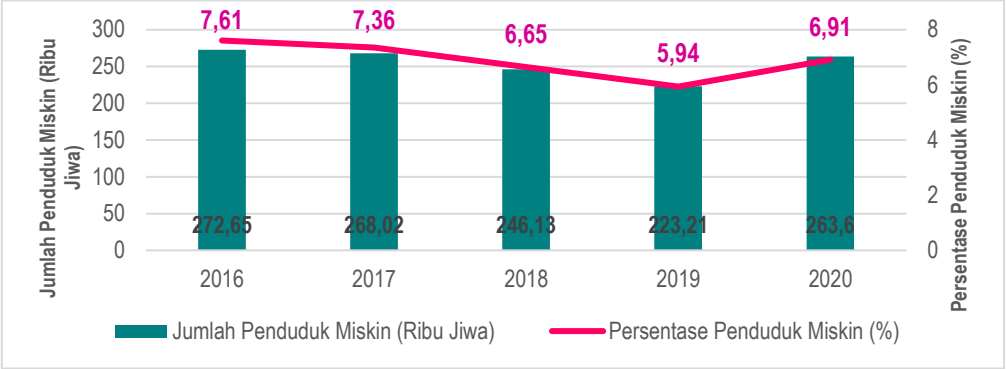

GAMBAR 2.21
GRAFIK JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

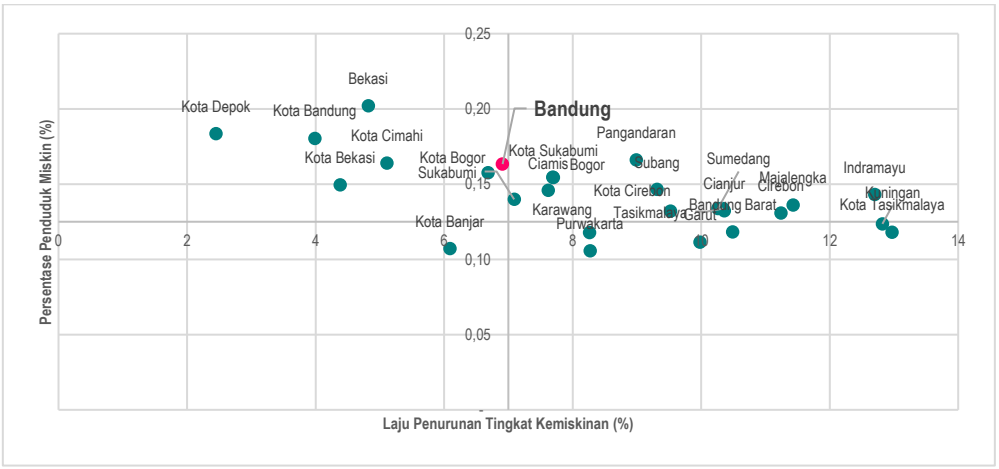

GAMBAR 2.22
ANALISIS KUADRAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN LAJU PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
Sumber: BPS RI, 2021

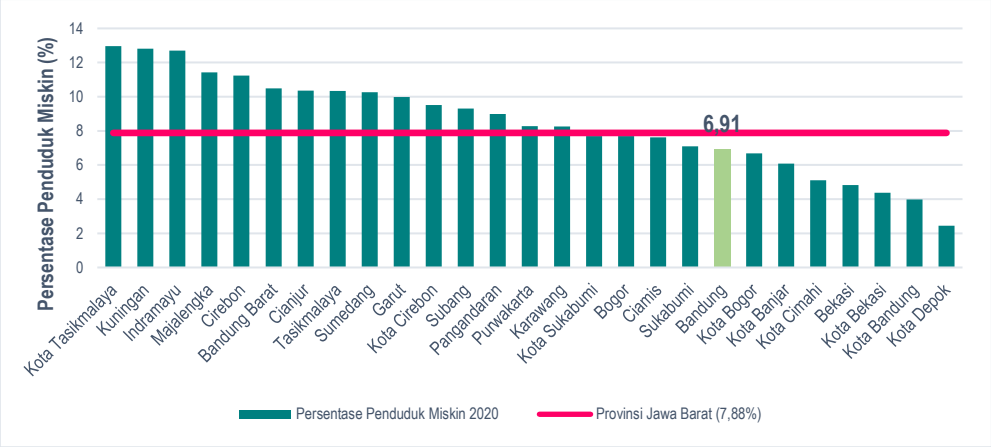

GAMBAR 2.23
GRAFIK PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS RI, 2021

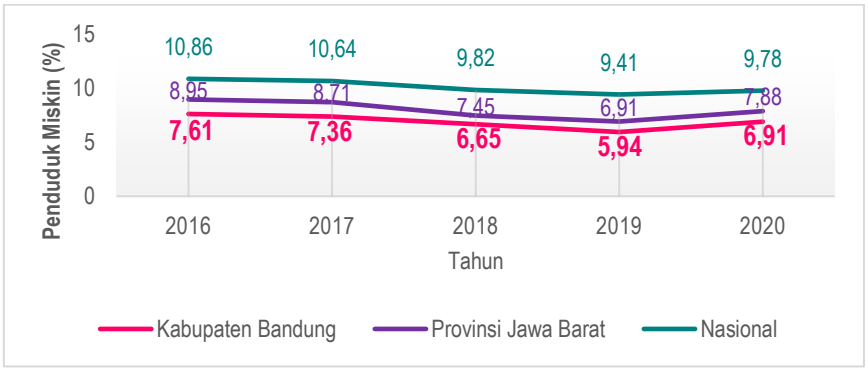

GAMBAR 2.24
GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

Selain melihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, kemiskinan di Kabupaten Bandung dapat dicermati melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Mengutip dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Secara lebih detil, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bandung sebesar adalah 0,92 di tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, Kabupaten Bandung memiliki nilai indeks yang paling rendah dan nasional tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk Kabupaten Bandung terhadap garis kemiskinannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

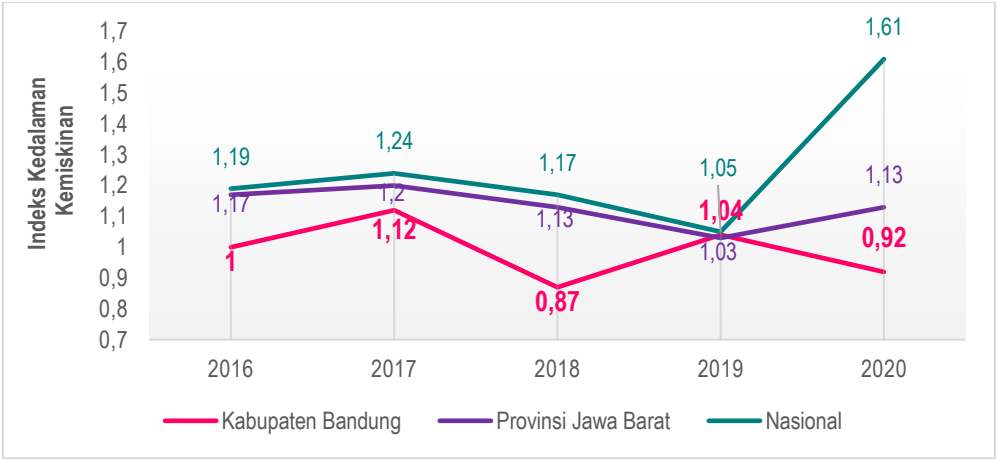

GAMBAR 2.25
GRAFIK INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bandung cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2020, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,17 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara penduduk miskin semakin rendah. Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh disrupsi pandemi Covid-19 yang berdampak secara merata di kalangan penduduk miskin. Pada konteks yang lebih luas, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung cenderung berada di bawah nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.26**.

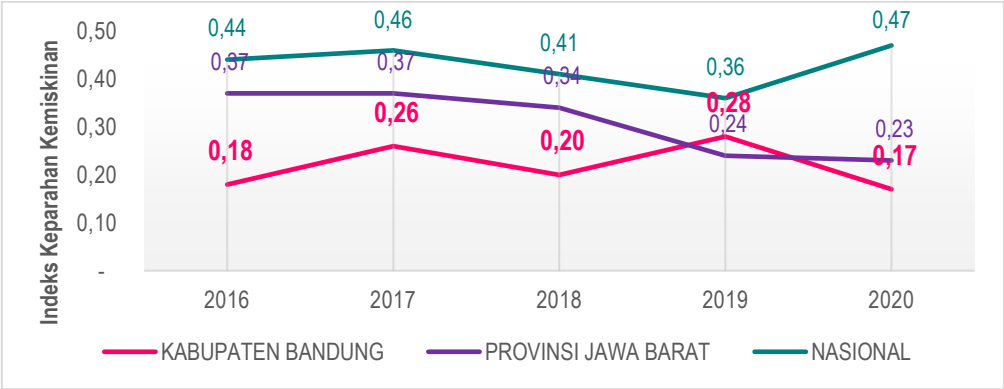

GAMBAR 2.26
GRAFIK INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

D. Ketimpangan Penduduk

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah belum bisa menjadi acuan untuk meninjau pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Dibutuhkan pengukuran lain yang dapat menunjukkan kesejahteraan ekonomi yang merata seperti gini ratio. Gini ratio adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan suatu daerah.

Nilai gini ratio di Kabupaten Bandung menunjukkan fluktuasi pada tahun 2016-2020. Apabila dilihat dari perbandingan perubahan gini ratio dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, gini ratio di Kabupaten Bandung memiliki pola perubahan yang hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016 tingkat perubahan gini ratio di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat sama-sama menurun kemudian meningkat pada tahun selanjutnya, sedangkan secara nasional gini rasio cenderung menurun. Gambaran terkait perbandingan

perubahan gini ratio antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.

TABEL 2.13
GINI RATIO KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020

Tahun	Gini Ratio		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	0,399	0,402	0,394
2017	0,390	0,393	0,391
2018	0,420	0,405	0,384
2019	0,355	0,402	0,382
2020	0,414	0,403	0,381

Sumber: BPS RI, 2021

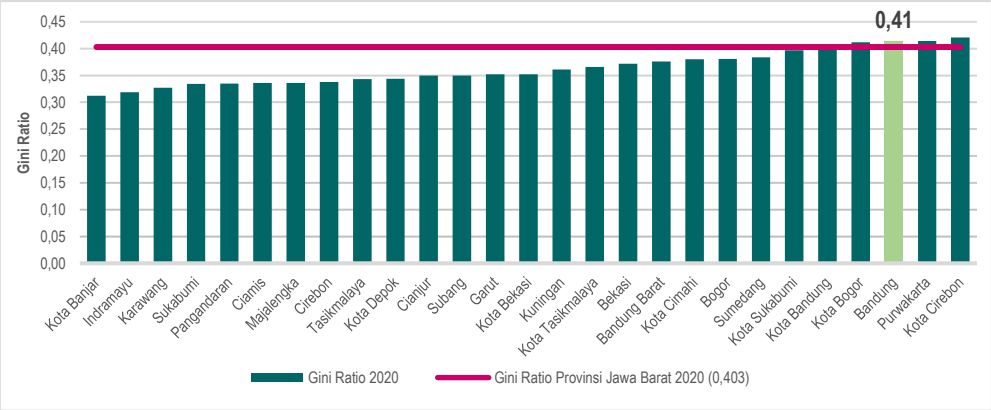

GAMBAR 2.27
GINI RATIO KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2020

Pada konteks regional, gini ratio Kabupaten Bandung menempati peringkat 3 tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, yakni senilai 0,41, setelah Kabupaten Purwakarta dan Kota Cirebon. Selengkapnya, dapat dilihat di **Gambar 2.27**.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator umum yang dapat mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, meliputi pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Sebagai akumulasi yang mewakili ketiga aspek ini, IPM dengan metode perhitungan baru diukur sebagai komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59% per tahun. Tahun 2016-2017, IPM Kabupaten Bandung meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 0,466% dari semula 70,69 di tahun 2016 menjadi 71,02 di tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, IPM Kabupaten Bandung berada pasa kisaran 71,75, tumbuh 1,03% dari angka tahun sebelumnya. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Bandung tercatat sebesar 72,41, sedangkan pada tahun 2020 nilai IPM yang tercapai adalah sebesar 72,39. Adanya tren yang cenderung meningkat untuk IPM Kabupaten Bandung di lima tahun terakhir, meski menurun di tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan sosial penduduk.

Perbandingan antara IPM di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM di Kabupaten Bandung sudah baik dikarenakan angka IPM Kabupaten Bandung selalu

berada di posisi atas dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat dan IPM Nasional. Pada tahun 2020, Kabupaten Bandung berada pada angka IPM sebesar 72,39. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,09 dan juga lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94. Meski demikian, terdapat penurunan IPM Kabupaten Bandung sebesar 0,02. Rincian IPM Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

TABEL 2.14
IPM KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	70,69	70,05	70,18
2017	71,02	70,69	70,81
2018	71,75	71,30	71,39
2019	72,41	72,03	71,92
2020	72,39	72,09	71,94

Sumber: BPS RI, 2021

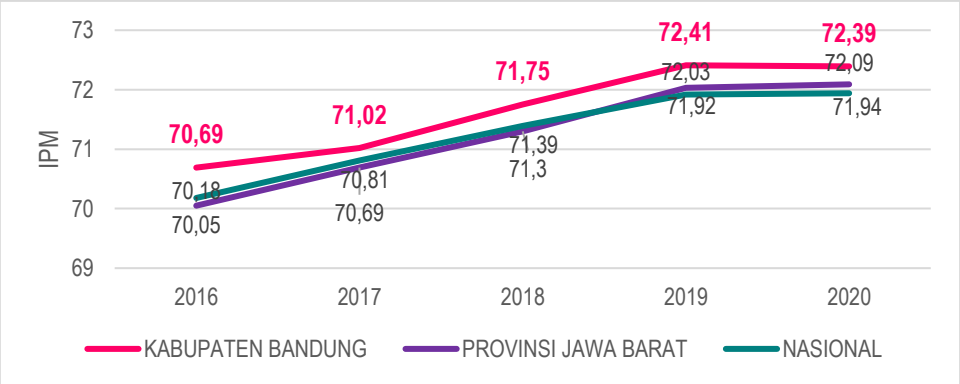

GAMBAR 2.28
GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung termasuk di antara kabupaten/kota yang memiliki IPM yang tinggi. Adapun di tahun 2020, meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Bandung melebihi IPM Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, jika ditinjau dari segi laju pertumbuhan IPM, Kabupaten Bandung cenderung berada di posisi bawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Fenomena tersebut pun dialami oleh sebagian besar kota di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kota Depok, sebagaimana dapat dilihat di kuadran IV pada **Gambar 2.29**.

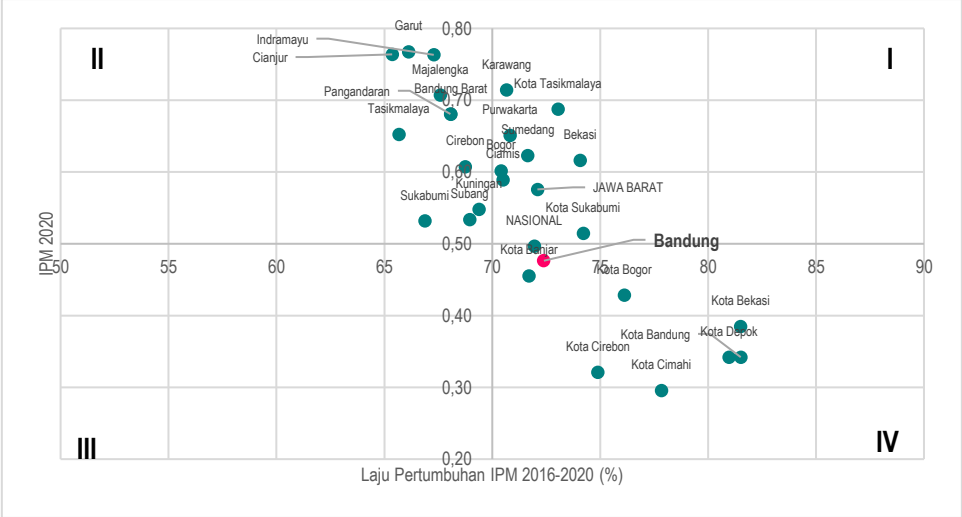

GAMBAR 2.29
ANALISIS KUADRAN LAJU PERTUMBUHAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016-2020 DAN NILAI INDEKS PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2020
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam mendukung pertumbuhan IPM Kabupaten Bandung, diperlukan pemahaman mengenai komponen-komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran. Ditinjau per komponen penyusunnya, indeks pendidikan mengalami peningkatan yang paling signifikan, yakni dari 62,83 di tahun 2016 menjadi 65,12 di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 0,90% selama tahun 2016-2020. Peningkatan juga terjadi pada indikator indeks pengeluaran dengan rata-rata pertumbuhan 0,70% selama 2016-2020, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan indeks pengeluaran tersebut dapat berkaitan dengan melambatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan menurunnya daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai salah satu dampak pandemi Covid-19. Selain itu, indeks kesehatan merupakan capaian tertinggi di antara komponen IPM, yakni mencapai 82,35 pada tahun 2020 dan mencapai rata-rata pertumbuhan 0,20% selama 2016-2020. Dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar pertumbuhan IPM Kabupaten Bandung ditandai dengan meningkatnya indeks pendidikan selama tahun 2016-2020. Secara lebih rinci, perkembangan komponen IPM Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Gambar 2.30** berikut.

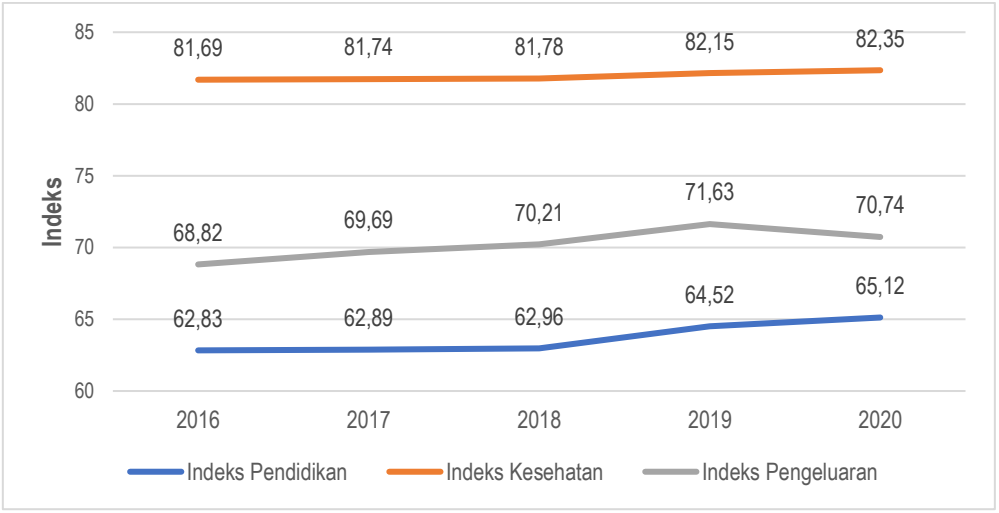

GAMBAR 2.30
GRAFIK CAPAIAN KOMPONEN IPM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

A. Indeks Pendidikan

Dalam pengukuran indeks pendidikan, pertumbuhan nilai indeks ditentukan oleh beberapa variabel. Pada perhitungan metode baru, terjadi perubahan pada beberapa variabel seperti perubahan indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS), sehingga komponen indikator untuk menentukan indeks pendidikan menjadi HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penggunaan kedua indikator ini mampu menunjukkan gambaran yang lebih relevan dalam aspek pendidikan dan perubahan yang terjadi.

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama sekolah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 yakni sebesar 12,69 tahun. Harapan lama sekolah merupakan suatu indikator yang menunjukkan lamanya sekolah dalam satuan tahun yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada usia tertentu di suatu daerah pada masa yang akan datang. Hasil perhitungan ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di suatu daerah. **Gambar 2.31**. menunjukkan gambaran peningkatan pencapaian harapan lama sekolah Kabupaten Bandung dari tahun 2016 hingga 2020. Adapun **Gambar 2.32** menunjukkan pencapaian HLS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 pada konteks kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

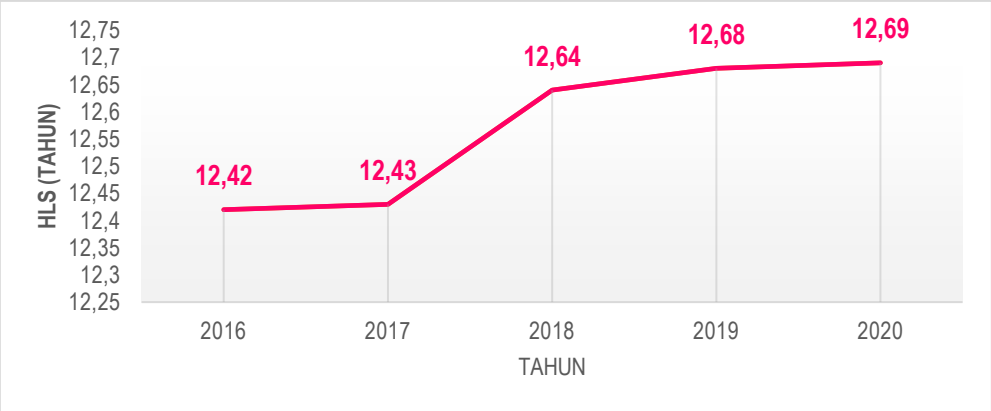

GAMBAR 2.31
GRAFIK HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

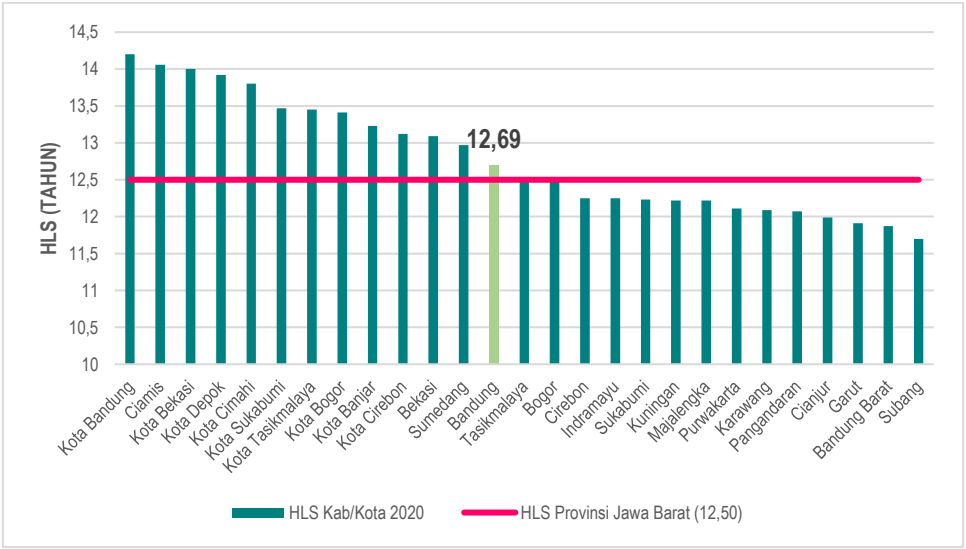

GAMBAR 2.32
GRAFIK HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui jumlah tahun rata-rata yang digunakan oleh penduduk di suatu daerah dalam menjalani pendidikan formal. Nilai rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat. Di Kabupaten Bandung, pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8,96. Meskipun sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi angka ini masih berada dibawah ketentuan wajar 12 tahun. Target RKPD 2021 untuk indikator angka rata-rata lama sekolah di tahun 2020 adalah sebesar 8,79. Dengan demikian, realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung sudah tercapai namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai ketentuan wajar 12 tahun.

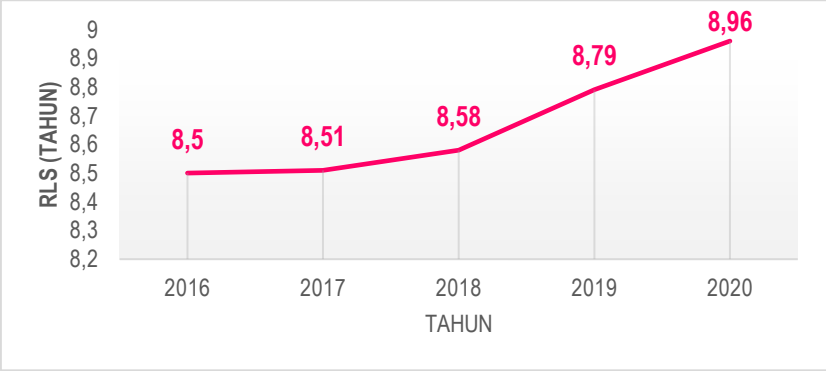

GAMBAR 2.33
GRAFIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

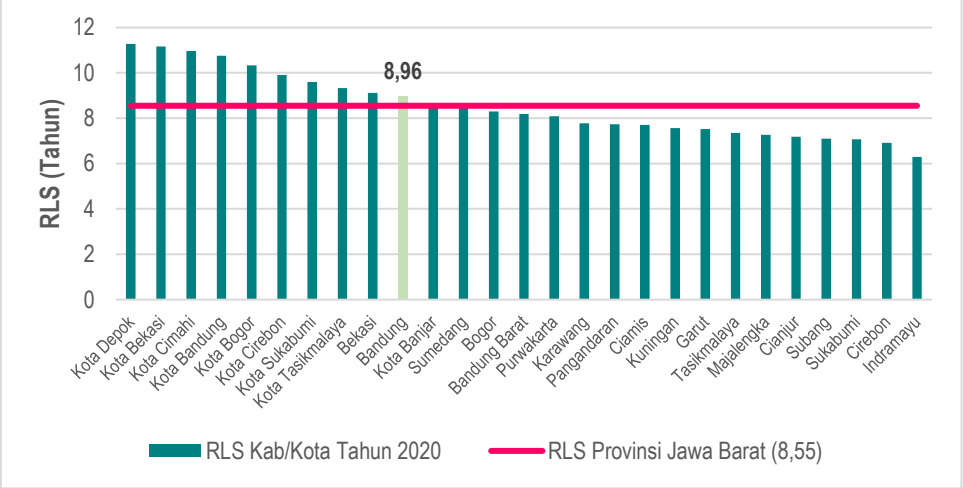

GAMBAR 2.34
GRAFIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

B. Indeks Kesehatan

Kesejahteraan sosial penduduk salah satunya tercermin dari nilai indeks kesehatan. Variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan hasil evaluasi, selama kurun waktu tahun 2016-2020, nilai indeks kesehatan Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Demikian pula halnya dengan capaian angka harapan hidup yang terus mengalami peningkatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir semakin membaik. Target RKPD 2021 untuk indikator angka harapan hidup adalah 73,2 tahun di tahun 2020. Adapun realisasinya mencapai 73,53. Hal ini menunjukkan bahwa target angka harapan hidup di tahun 2020 tercapai, bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan dalam RKPD 2021.

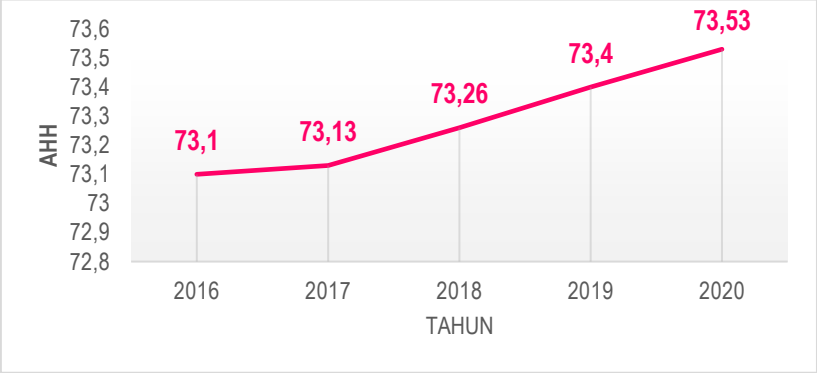

GAMBAR 2.35
GRAFIK PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

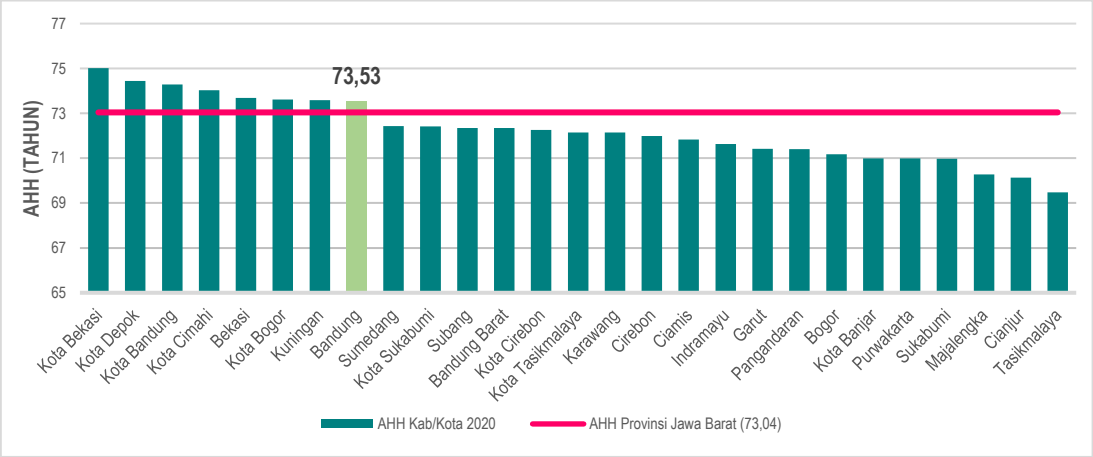

GAMBAR 2.36
GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

C. Indeks Pengeluaran

Tinggi rendahnya daya beli penduduk menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, daya beli penduduk Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan, namun menurun di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesejahteraan sosial penduduk yang semakin membaik namun daya beli masyarakat menurun pada saat pandemi Covid-19. Perkembangan daya beli penduduk Kabupaten Bandung disajikan dalam **Gambar 2.37**.

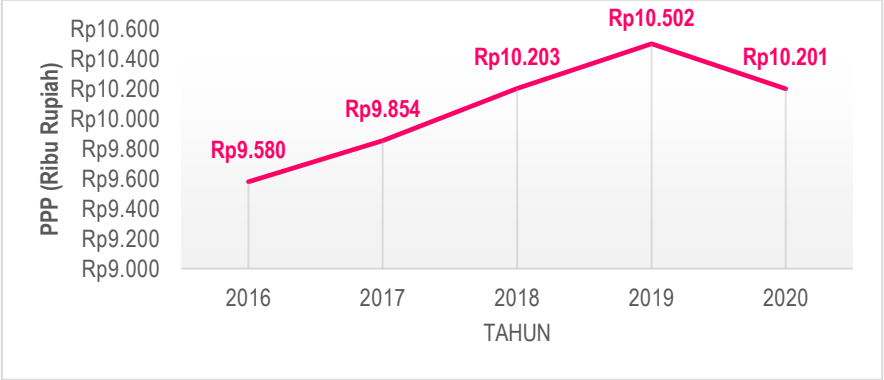

GAMBAR 2.37
GRAFIK PERKEMBANGAN PURCHASING POWER PARITY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari dua fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan pemerintah wajib dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Layanan urusan wajib terbagi menjadi dua, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non dasar).

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar meliputi: 1) urusan pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) sosial. Urusan-urusan ini merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan untuk penduduk.

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pemenuhan layanan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pemeirntah daerah akan tercermin salah satunya dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah menunjukkan seberapa besar anak di usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada level SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD/sederajat digunakan rentang usia 7-12 tahun, sementara untuk tingkat pendidikan SMP/sederajat digunakan rentang usia 13-15 tahun.

Secara garis besar, APS dikelompokkan ke dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan rasio antara jumlah siswa dalam rentang usia pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia tersebut. Sedangkan APK menunjukkan rasio antara jumlah

siswa pada jenjang pendidikan tertentu teradap total jumlah penduduk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan tertentu. Sehingga berbeda dengan APM, dalam perhitungan APK jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang usia, sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100%.

Naik turunnya nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehinga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Secara garis besar, APS tingkat SD/sederajat dan SMP/sederajat di Kabupaten Bandung sudah tergolong baik dengan nilai APS keduanya berada di atas angka 90%. Namun sayangnya angka tersebut belum diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Gambaran lengkap mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Tabel 2.15**.

TABEL 2.15
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/sederajat**						
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	Orang	374.313	373.977	367.805	335.959	338.064
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	387.951	391.130	384.694	617.193	413.652
1.3	APS SD/MI	Indeks	99,98	99,98	99,98	92,42	99,60
2	**SMP/sederajat**						
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Orang	168.070	166.130	165.166	107.257	147.622
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	192.883	195.722	194.576	207.586	209.235
2.3	APS SMP/MTs	Indeks	97,17	97,18	98,22	77,55	91,37

Sumber: BPS Kabupaten Bandung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

Ditinjau berdasarkan perkembangannya, APS, APM dan APK SD/sederajat di Kabupaten Bandung cenderung menurun pada tahun 2018-2019 namun kembali meningkat pada tahun 2020. Informasi lengkap mengenai data APK dan APM SD/sederajat Kabupaten Bandung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tertera pada **Gambar 2.38**.

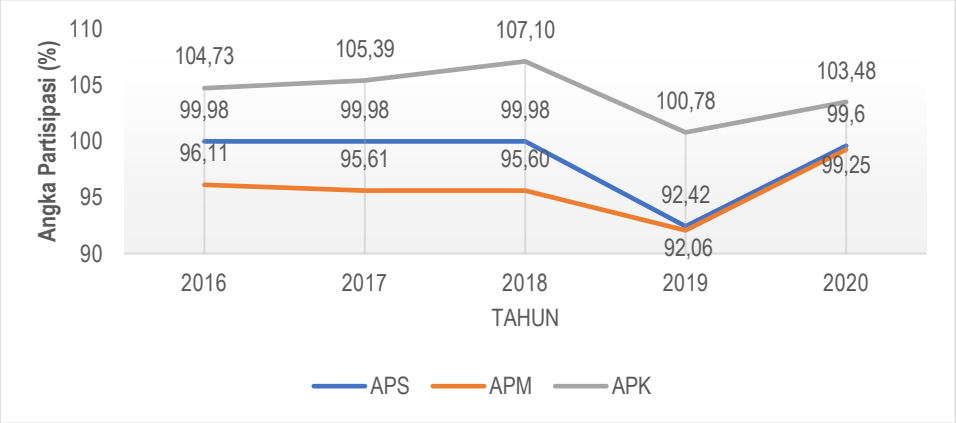

GAMBAR 2.38
GRAFIK PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI JENJANG SD/SEDERAJAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

Untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat, jika ditinjau dalam selang tahun 2016-2020 grafik perkembangan angka partisipasi jenjang SMP/sederajat menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun kembali meningkat pada tahun 2020 untuk indikator APS, APM maupun APK. Perkembangan angka partisipasi Kabupaten Bandung untuk jenjang SMP/sederajat ditampilkan dalam **Gambar 2.39**.

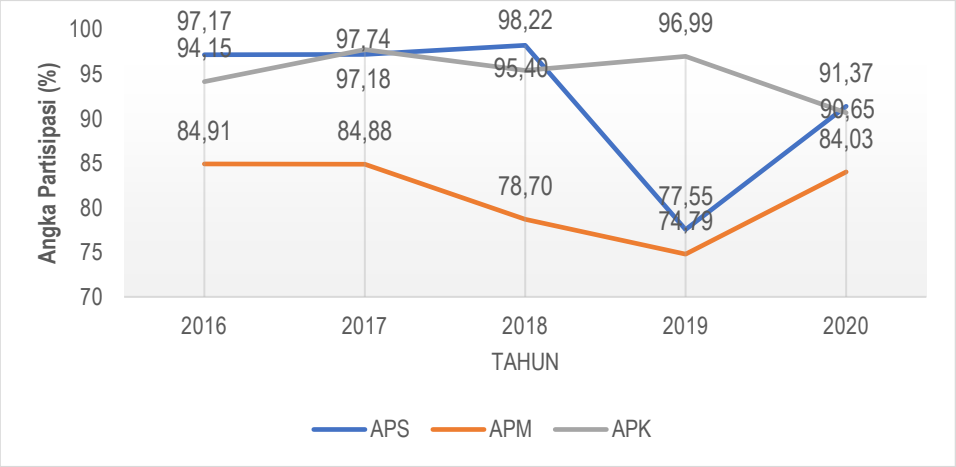

GAMBAR 2.39
GRAFIK PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI JENJANG SMP/SEDERAJAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah untuk sarana SD/sederajat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 angka rasio sebesar 242 sekolah per 10.000 penduduk dan meningkat di tahun-tahun berikutnya yang diakibatkan oleh adanya peningkatan jumlah sekolah seiring dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Pada akhir tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun tercatat sebesar 1:243. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah sekolah untuk penduduk usia 7-12 tahun dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebanyak 1 (satu) sekolah per 10.000 penduduk.

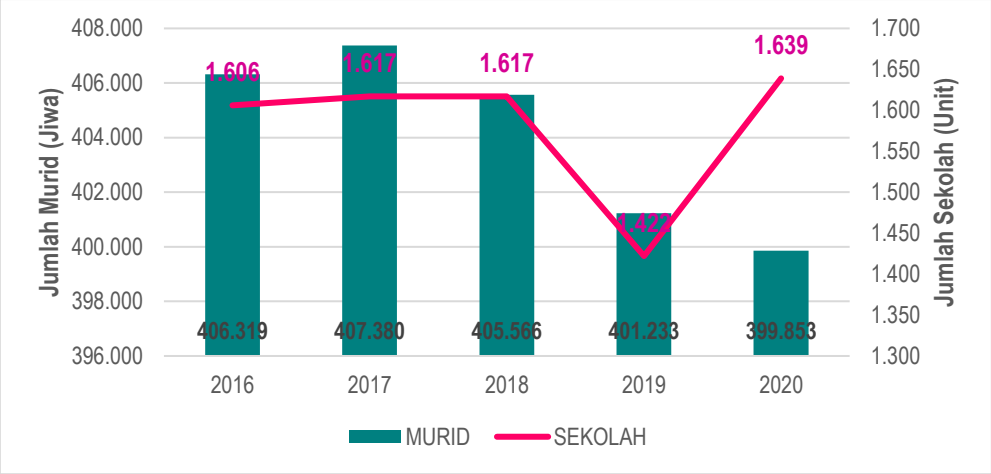

GAMBAR 2.40
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SD/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

Untuk sarana SMP/sederajat, selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 angka rasio ketersediaan sekolah cenderung mengalami fluktuasi, meningkat di tahun 2016, dan kembali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana sekolah SMP/sederajat belum seimbang dengan pertumbuhan penduduk usia 13-15 tahun. Tahun 2020, angka rasio ini tercatat sebesar 320 untuk 10.000 penduduk.

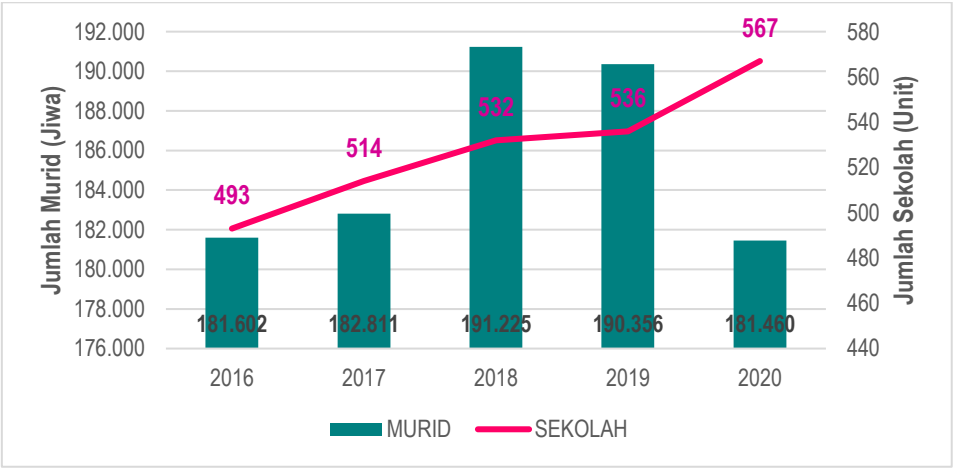

GAMBAR 2.41
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SMP/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

c. Rasio Guru dan Murid

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pada tahun 2020 ketersediaan guru SD/sederajat di Kabupaten Bandung yaitu berkisar 1 guru untuk 25 siswa. Rasio ini meningkat dari tahun 2016, yakni semula 1 guru untuk 24 siswa, namun lebih rendah dari tahun 2017 dengan rasio 1 guru untuk 26 siswa. Hal ini dikarenakan terjadinya fluktuasi jumlah guru yang cenderung menurun dan berkurangnya jumlah murid SD.

Hal serupa dapat dilihat pada jenjang SMP. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan guru terhadap murid tingkat SMP adalah 1 guru untuk 17 murid. Cenderung menurunnya jumlah guru SMP dan fluktuasi jumlah murid SMP mengakibatkan rasio tersebut naik menjadi 1 guru untuk 23 siswa pada tahun 2020.

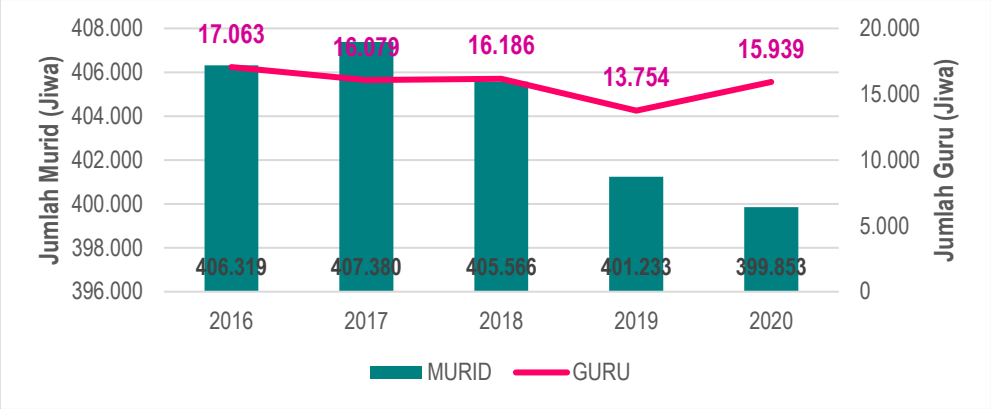

GAMBAR 2.42
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SD/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

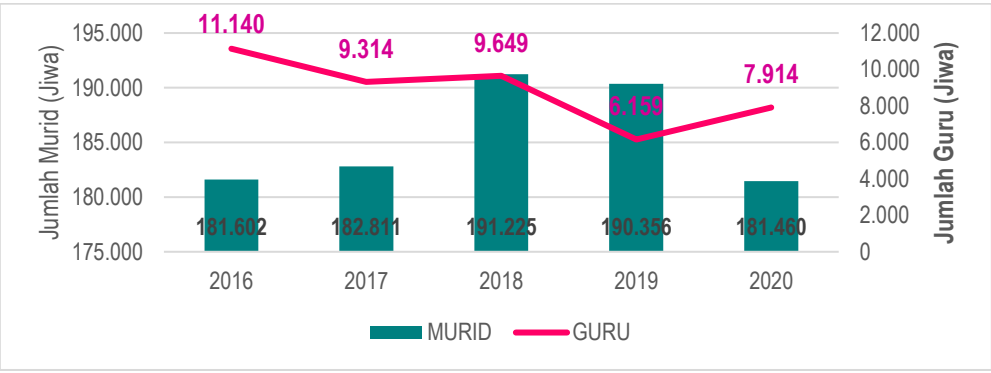

GAMBAR 2.43
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH DAN MURID SMP /SEDERAJAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 2.16
JUMLAH GURU DAN MURID JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/sederajat**					
1.1	Jumlah Guru	17.063	16.079	16.186	13.754	15.939
1.2	Jumlah Murid	406.319	407.380	405.566	401.233	399.853
1.3	Rasio Guru/Murid	1 : 24	1 : 26	1 : 25	1 : 26	1 : 25
2	**SMP/sederajat**					
2.1	Jumlah Guru	11.140	9.314	9.649	6.159	7.914
2.2	Jumlah Murid	181.602	182.811	191.225	190.356	181.460
2.3	Rasio Guru/Murid	1 : 17	1 : 20	1 : 20	1 : 23	1 : 23

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021

2. Urusan Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan urusan kesehatan, salah satunya tergambar dari capaian indikator kinerja bidang kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di tahun 2020, selain menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat seperti stunting dan kematian ibu dan bayi, Pemerintah

Kabupaten Bandung juga berupaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai realisasi indikator kinerja di bidang kesehatan di Kabupaten Bandung.

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu terdaftar di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebanyak 4.308 unit dan melayani jumlah balita sebanyak 356.854 jiwa. Dengan demikian, rasio Posyandu terhadap balita 1: 82. Hal ini berarti bahwa satu unit Posyandu di Kabupaten Bandung melayani sekitar 82 balita usia 0-3 tahun. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

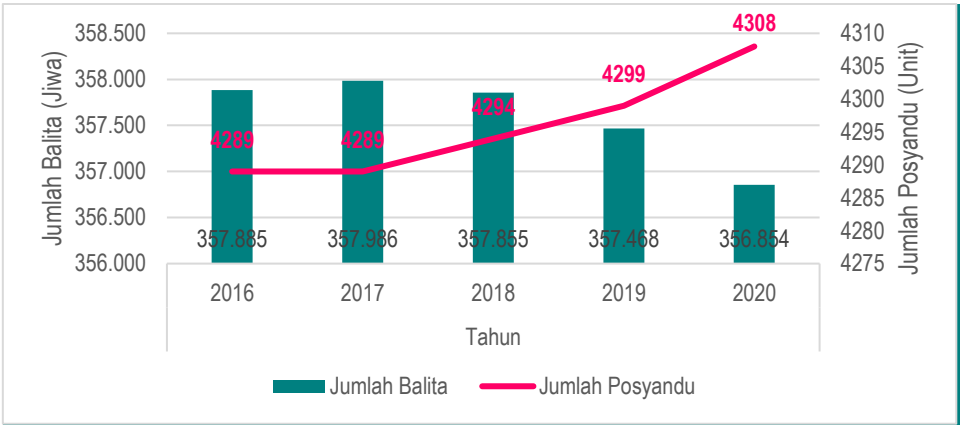

GAMBAR 2.44
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH POSYANDU DAN BALITA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 2.17
JUMLAH POSYANDU DAN BALITA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	4.289	4.289	4.294	4.299	4.308
2	Jumlah balita	357.885	357.986	357.855	357.468	356.854
3	Rasio	1:83	1:83	1:83	1:83	1:82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per penduduk tahun 2020 sebesar 1: 12.988. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung dari rasio semula 1: 12.378 pada tahun 2019. Semakin besarnya beban cakupan pelayanan

pada fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor. Pada satu sisi jumlah penduduk yang harus dilayani mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan di sisi lain jumlah sarana kesehatan cenderung tetap/tidak mengalami peningkatan.

TABEL 2.18
RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, DAN PUSTU KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	62	62	50	62	62
2	Jumlah Poliklinik	40	40	40	40	171
3	Jumlah Pustu	78	78	78	78	62
Jumlah 1, 2, dan 3		180	180	180	168	180
4	Jumlah Penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 13.079	1 : 13.017	1 : 13.640	1 : 12.378	1 : 12.988
5	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan rumah sakit adalah 1: 382.150 yang menunjukan bahwa 1 rumah sakit untuk 382.150 jiwa.

TABEL 2.19
JUMLAH DAN RASIO RUMAH SAKIT PER JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3	3
2	Jumlah Rumah Sakit Provinsi	1	1	1	1	2
3	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	3	3	4
4	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	7	8	8	10
6	Jumlah Penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
7	Rasio	1 : 513.804	1 : 522.515	1 : 464.661	1 : 471.910	1 : 383.150

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

d. Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik merupakan aset dan investasi bangsa untuk masa yang akan datang. Selama tahun 2016-2020, Kabupaten Bandung telah banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi ini. Meski demikian, terdapat penurunan jumlah balita gizi baik dan penurunan persentase jumlah balita gizi baik dikarenakan meningkatnya jumlah balita keseluruhan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk sebesar 0,04%.

TABEL 2.20
PERSENTASE BALITA GIZI BAIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Baik	272,319	265,805	251,216	246,426	159,151
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	86	112	160	147	1030
3	Jumlah Balita Seluruhnya (Usia 0-3 tahun)	357,885	357,986	357,855	357,468	356,854
4	Persentase :					
	Gizi Baik	95,21	94,59	94,29	94,26	83,61
	Gizi Buruk	0,030	0,04	0,06	0,05	0,541

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

e. Prevalensi Stunting

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung (2020), rata–rata prevalensi stunting dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebesar 17 persen. Apabila dilihat dari grafik yang telah disajikan, terdapat beberapa kecamatan yang prevalensi stuntingnya melebihi rata-rata. Kecamatan dengan jumlah prevalensi stunting tertinggi ada di Kecamatan Paseh, Ciparay, Cimaung, Banjaran, dan Rancabali. Kecamatan inilah yang harus mendapat prioritas dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung, karena menggambarkan balita stunting paling tinggi se-Kabupaten Bandung. Adapun program/kegiatan yang harus dilakukan tidak hanya perbaikan gizi pada remaja, ibu hamil/menyusui dan anak-anak balita, namun juga harus disertai langkah-langkah penanganan terhadap perbaikan lingkungan, seperti perbaikan sanitasi, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan penanganan sampah. Setelah menghitung prevalensi stunting per kecamatan, dilakukan pula analisis melalui data cakupan stunting di Kabupaten Bandung yang dapat dilihat pada **Tabel 2.21**.

TABEL 2.21
SITUASI DI LOKUS PRIORITAS BERDASARKAN INDIKATOR DALAM INTERVENSI STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No.	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat ini di Desa Fokus	Target Nasional
1	Cakupan bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan	83,8	95
2	Cakupan ibu hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	93,2	98
3	Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT	96,5	90
4	Cakupan kehadiran di posyandi (rasio yang datang terhadap total sasaran)	78,2	80
5	Cakupan ibu hamil K-4	91,5	100
6	Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vitamin A	100	90
7	Cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	84,8	100
8	Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	62,2	NA
9	Cakupan remaja putri mendapatkan TTD	100	30
10	Cakupan layanan ibu nifas	91,4	100
11	Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	100	NA
12	Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	14,2	NA
13	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	63,7	85

No.	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat ini di Desa Fokus	Target Nasional
14	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	60,5	80
15	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	198,2	NA
16	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD	198,2	100
17	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	195	100
18	Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan	474,2	NA
19	Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT	17038	NA
20	Cakupan desa nemerapkan KRPL	20,9	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (2020)

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan dan cakupan layanan program prioritas penurunan stunting maka dapat diidentifikasi beberapa kendala sebagai berikut.

TABEL 2.22
IDENTIFIKASI KENDALA PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG

No.	Aspek Analisis Manajemen Layanan	Kendala yang Diidentifikasi
1	Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	Isu stunting belum menjadi prioritas utama PD dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tertuang dalam RKA dan DPA masing-masing PD
2	Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program	Belum tersedianya basis data terkait stunting yang sampai ke tingkat desa di setiap PD
3	Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana	Belum optimalnya jumlah dan kapasitas SDM pengukur status gizi balita
		Belum optimalnya jumlah tenaga kesehatan pengelola gizi di lokus intervensi stunting
4	Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	Belum meratanya pemahaman masyarakat di Kabupaten Bandung terkait stunting

Sumber: Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung (2020)

Pemaparan di atas menunjukkan masih pentingnya upaya penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Adapun yang perlu diperhatikan juga adalah untuk mendukung target penanganan stunting untuk Kabupaten Bandung, yakni target Nasional sebesar 14% dan Provinsi sebesar 19%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bandung berlangsung dengan perkembangan yang signifikan di hampir setiap indikator kinerja. Hal ini dibuktikan diantaranya dengan semakin baiknya kondisi jalan, jembatan, jangkauan irigasi dan drainase, jumlah rumah yang ber-IMB, persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tinggal berakses sanitasi. Kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain adalah sebagai berikut.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dapat dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik (buatan) akan menyebabkan sulitnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yang sering dialami adalah banjir yang disebabkan oleh tidak seimbangnya volume air dengan kapasitas dan fungsi sungai serta drainase. Hal ini juga terjadi pada kondisi jaringan transportasi dimana kapasitasnya tidak lagi mampu menampung pergerakan barang dan manusia secara ideal.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan ke dalam kategori jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama kurun waktu tahun 2016-2017 telah terjadi penurunan kualitas jalan kabupaten. Namun di tahun 2018 proporsi jalan kondisi baik mengalami peningkatan dan terus meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 659,485 km kondisi jalan baik dengan proporsi sebesar 56,84% dari keseluruhan panjang jalan kabupaten. Berikut adalah gambaran secara mendetil mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisinya selama kurun waktu tahun 2016-2020.

TABEL 2.23
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik (km)	734,222	576,898	593,890	646,735	659,485
2	Kondisi Sedang (km)	250,363	223,414	285,185	311,464	336,784
3	Kondisi Rusak (km)	100,49	134,651	133,696	97,493	82,493
4	Kondisi Rusak Berat (km)	70,27	211,827	147,523	104,601	81,531
	Jalan secara keseluruhan (km)	1.155,35	1.146,79	1.160,29	1.160,29	1.160,29
5	Proporsi Kondisi Baik (%)	63,55	50,31	51,18	55,74	56,84
6	Proporsi Kondisi Sedang (%)	21,67	19,48	24,58	26,84	29,03
7	Proporsi Kondisi Rusak (%)	8,7	11,74	11,52	8,40	7,11
8	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	6,02	18,47	12,71	9,02	7,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

Apabila disandingkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada **Gambar 2.45** peningkatan yang cukup signifikan untuk proporsi panjang jalan dalam kondisi baik selama selang waktu 2016-2020.

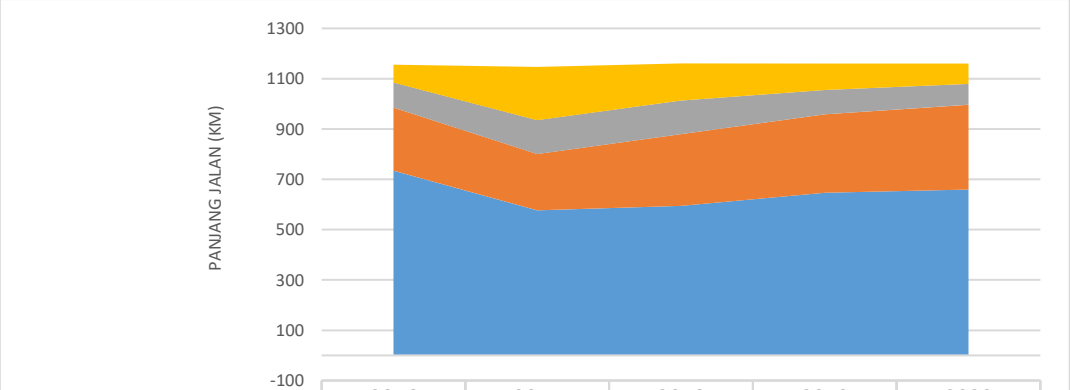

	2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Rusak Berat (km)	70,27	211,827198	147,522567	104,600618	81,531000
Kondisi Rusak (km)	100,49	134,650971	133,695543	97,493441	82,493000
Kondisi Sedang (km)	250,363	223,413645	285,184613	311,464201	336,784000
Kondisi Baik (km)	734,222	576,898294	593,889874	646,734739	659,485000

GAMBAR 2.45
GRAFIK PERKEMBANGAN PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

b. Proporsi Jumlah Jembatan

Jembatan berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah yang aksesnya terpisah oleh morfologi wilayah baik lembah maupun sungai, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah yang dapat memperlancar dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, keberadaan jembatan sekaligus akan mendukung perekonomian wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi, selama selang tahun 2016-2020, proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020, proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung adalah sebesar 53,16%. Perkembangan proporsi jembatan berdasarkan kondisinya disajikan dalam **Tabel 2.24** dan **Gambar 2.46.**

TABEL 2.24
PROPORSI JUMLAH JEMBATAN KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik (unit)	356	390	430	467	496
2	Kondisi Rusak (unit)	534	507	473	448	437
	Jumlah Keseluruhan (unit)**	890	897	903	915	933
3	Proporsi Kondisi Baik (%)	40,00	43,48	47,62	51,04	53,16
4	Proporsi Kondisi Rusak (%)	60,00	56,52	52,38	48,96	46,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

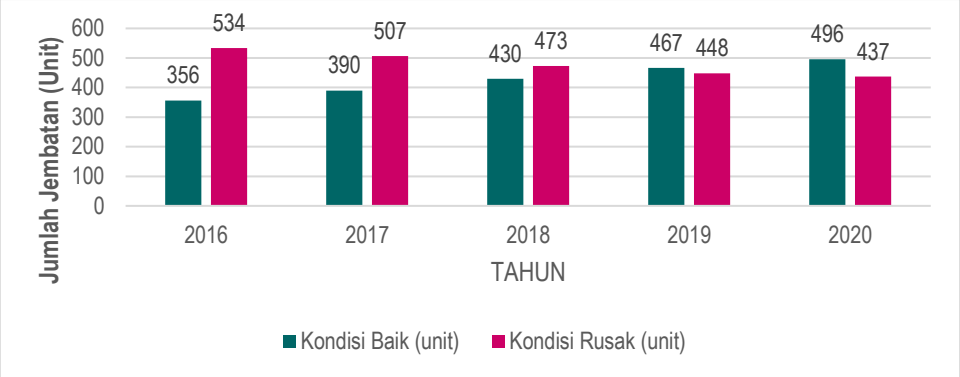

GAMBAR 2.46
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH KEMBATAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

c. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Bandung sebagian besar berfungsi untuk mendukung sektor pertanian, khususnya pertanian lahan basah. Jaringan ini meliputi baik jaringan irigasi teknis maupun jaringan irigasi non teknis. Ditinjau berdasarkan persentasenya, jaringan irigasi di Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh jaringan irigasi non teknis, dengan rata-rata persentase dalam lima tahun terakhir sebesar 97,76%. Adapun untuk jaringan irigasi teknis, persentasenya hanya mencakup 2,24%.

Dari segi panjang jaringan irigasi, dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi peningkatan panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bandung untuk irigasi teknis maupun irigasi non teknis. Informasi menyeluruh mengenai kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.25**.

TABEL 2.25
KONDISI JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Jenis Irigasi	Kondisi	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Teknis	Baik (km)	16,93	18,08	18,63	18,63	19,64
		Rusak Ringan (km)	7,03	6,33	5,58	5,58	6,84
		Rusak Berat (km)	4,43	3,99	3,92	3,92	1,92
		Total (km)	28,39	28,39	28,4	28,40	28,40
2	Non Teknis	Baik (km)	610,13	673,02	700,89	700,89	740,20
		Rusak Ringan (km)	358,77	322,89	319,39	319,39	318,82
		Rusak Berat (km)	270,12	243,11	218,74	218,74	180,00
		Total (km)	1.239,02	1.239,02	1.239,02	1.239,02	1.239,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

Ditinjau berdasarkan luas areal irigasi, khusus irigasi non teknis, irigasi dengan luas areal 0-25 ha pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah desa, sedangkan untuk irigasi dengan luas areas >25 ha pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten. Dari total luas irigasi non teknis seluas 19.819,27 ha di tahun 2020, 18,77% diantaranya atau sebesar 3.720,01 ha merupakan areal irigasi non-teknis kewenangan desa. Adapun sisanya yaitu sebanyak 81,23% atau sebesar 16.099,26 ha merupakan areal irigasi non-teknis kewenangan kabupaten.

Adapun untuk irigasi teknis di Kabupaten Bandung dikelompokkan berdasarkan luas dan kewenangannya menjadi irigasi teknis kewenangan kabupaten dengan luas areal <1.000 ha, irigasi teknis kewenangan provinsi dengan luas areal 1.000-3.000 ha, serta irigasi teknis kewenangan provinsi yang berupa irigasi lintas. Pada tahun 2020, dari total areal irigasi teknis seluas 14.559,05 ha, hanya 18,25% atau sekitar 2.607,05 ha yang merupakan irigasi kewenangan kabupaten. Adapun untuk irigasi non teknis kewenangan provinsi, areal irigasi dengan luasan 1.000-3.000 ha mencakup sekitar 61,54% atau sekitar 8.595,00 ha yang

tersebar di beberapa daerah irigasi, diantaranya DI Leuwikuya, DI Cisarea, DI Wangisagara, DI Wanir, dan DI Cisayana. Sedangkan untuk irigasi yang bersifat lintas irigasi, memiliki cakupan areal dengan persentase 20,21% dari total luasan irigasi non teknis atau sekitar 2.943 ha yang tersebar di beberapa daerah irigasi, antara lain DI Leuwikuya, DI Malang, DI Lagadar, DI Sudiplak, DI Mengger, DI Depok, DI Ciranjeng, DI Ciaro, DI Buang Batu, dan DI Ciateul.

TABEL 2.26
LUAS AREAL IRIGASI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No.	Areal Irigasi	Luas Area (ha)	Persentase (%)
A	**Irigasi Non Teknis**		
1	Kewenangan Desa dengan areal 0-25 ha	3.720,01	18,77
2	Kewenangan Kabupaten dengan Areal >25 ha	16.099,26	81,23
	TOTAL	19.819,27	**100**
B	**Irigasi Teknis**		
1	Kewenangan Kabupaten dengan Areal <1.000 ha	2.657,05	18,25
2	Kewenangan Provinsi dengan Areal 1.000-3.000 ha	8.959,00	61,54
3	Kewenangan Provinsi (Irigasi Lintas)	2.943,00	20,21
	TOTAL	14.559,05	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

d. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Kabupaten Bandung dapat di kelompokkan kedalam drainase primer, sekunder dan tersier. Jaringan drainase primer terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai lintas wilayah administratif, yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara ke Laut Jawa. Dalam sektor drainase, Kabupaten Bandung memiliki peran strategis, Sungai Citarum merupakan muara bagi anak-anak sungai yang ada di Cekungan Bandung.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat meluapnya Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005, 2010, dan 2014. Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum. Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cileunyi. Informasi detail mengenai kondisi Sub DAS Citarum ditampilkan pada **Tabel 2.27**.

TABEL 2.27
KONDISI DAS CITARUM

DAS/ SUB DAS	Panjang (km)	Daerah Tangkapan (ha)	Debit Rata-rata	Debit (m^3/ detik)
Citarum	269	268.130	14 milyar/m^3/tahun	Debit air Citarum di Majalaya: Q50 = 3,505 m^3/detik Q80=0,764 m^3/detik Q90 = 0,69 m^3/detik Debit air Citarum di Dayeuhkolot: Q50 = 5,105 m^3/detik Q80 = 1,24 m^3/detiK Q90 = 0,60 m^3/detik Debit air Citarum di Nanjung: Q50=33,975m^3/detik Q80 = 10,32 m^3/detik Q90 = 8,77 m^3/detik

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial dan Ekonomi Untuk RTRW Kab. Bandung

Dalam lingkup Kabupaten Bandung, Aliran Sungai Citarum menjadi muara bagi empat Sub DAS, antara lain sub DAS Citarik, Sub DAD Cirasea, Sub DAS Ciwidey dan Sub DAS Cisangkuy. Kendati demikian, drainase Kabupaten Bandung pada dasarnya turut pula dipengaruhi oleh drainase Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yaitu dari aliran Sub DAS Cikapundung dan Ciminyak. Secara detail kondisi Sub DAS Citarum di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.28**.

TABEL 2.28
KONDISI SUB DAS DITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

SUB DAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m^3/detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
Citarik	22.952	17.295	5.657	10,90	Kecamatan Cikancung Kecamatan Cileunyi Kecamatan Cilengkrang Kecamatan Bojongsoang Kecamatan Cicalengka Kecamatan Nagreg Kecamatan Rancaekek Kecamatan Cimenyan
Cirasea	38.110	37.219	891	22,1	Kecamatan Kertasari Kecamatan Pacet Kecamatan Ibun Kecamatan Majalaya Kecamatan Paseh Kecamatan Solokanjeruk Kecamatan Ciparay Kecamatan Baleendah
Ciwidey	22.169	-	-	12,3	Kecamatan Rancabali Kecamatan Ciwidey Kecamatan Pasirjambu Kecamatan Soreang Kecamatan Katapang Kecamatan Cangkuang Kecamatan Kutawaringin
Cisangkuy	34.159	-	-	17,7	Kecamatan Pangalengan

SUB DAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m^3/detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
					Kecamatan Cimaung Kecamatan Arjasari Kecamatan Pamengpeuk Kecamatan Banjaran Kecamatan Cangkuang Kecamatan Baleendah

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial dan Ekonomi Untuk RTRW

Disamping drainase primer, kondisi drainase Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh drainase sekunder dan drainase tersier berupa drainase permukiman. Belum terintegrasinya serta belum optimalnya kualitas saluran drainase permukiman menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir tahunan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, meski terdapat peningkatan panjang total drainase di Kabupaten Bandung, akan tetapi kualitas drainase belum mengikuti atau cenderung fluktuatif. Secara umum kondisi drainase di Kabupaten Bandung ditampilkan pada **Tabel 2.29**.

TABEL 2.29
PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	521,6	782,4	521,6	520	467,00
2	Panjang Drainase yang dipakai bangunan liar (km)	391,2	586,73	391,2	300	300
	Panjang Total Drainase (km)	924,28	1.386,42	1.441,77	1.615,87	1.623,37
3	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1,24	1,47	2,88	1,75	2,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

e. Persentase Bangunan Ber-IMB Per Seluruh Bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung. Dari tahun ke tahun persentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Bandung cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan dengan rasio bangunan ber-IMB naik 0,04% dari 7,47% di tahun 2019 menjadi 7,51% di tahun 2020.

TABEL 2.30
RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bangunan ber-IMB (unit)	75.428	75.524	75.557	75.932	76.285
2	Jumlah Bangunan (unit)	1.015.517	1.015.517	1.015.828	1.015.915	1.016.278
3	Rasio bangunan ber-IMB (%)	7,43%	7,44%	7,44%	7,47%	7,51%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung. Ketersediaan RTH dalam kota berdampak pada kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 30%, dimana 10% diantaranya adalah RTH privat (RTH yang berada di lahan milik pribadi) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2020 mencapai 98,119 ha atau 0,20% dari luas wilayah perkotaan seluas 1.762.390.000 ha. Capaian ini masih jauh dari standar kebutuhan RTH yang seharusnya sebesar 528.717.000 ha. Adapun rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dari tahun 2016 hingga 2020 ditampilkan pada **Tabel 2.31**.

TABEL 2.31
RASIO RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN PER SATUAN LUAS WILAYAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	38,28	46,55	48,39	50,90	Masih dalam penyusunan peta dasar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

f. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan); dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Disperkimtan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan p ipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau KPPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dispertasih belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya diharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kurun tahun 2018-2020, cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan. Jumlah cakupan ini pada tahun 2020 adalah 81% penduduk Kabupaten Bandung.

TABEL 2.32
CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH BERDASARKAN SUMBER PENBANGUNANNYA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018-2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
Penduduk yang sudah mendapatkan akses air bersih (%)		78,57	80,52	81,00
1	Persentase Akses air bersih yang dibangun masyarakat (%)	49,73	47.25	46,00
2	Persentase Akses air bersih yang dibangun Disperkimtan (%)	15,97	17,92	19,00

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
3	Persentase akses air bersih yang dibangun PDAM (%)	12,87	15,25	16,00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 2.33
JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perdesaan (jiwa)	483.386	531.084	584.135	676.529	669.650
2	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perkotaan (jiwa)	443.104	467.076	470.746	579.504	589.206
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.271	3.623.790
4	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perkotaan (%)	12,32	12,77	12,87	15,35	16,26
5	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan (%)	13,44	14,52	15,97	17,92	18,48

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021

g. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih; 2) Pembuangan air besar/tinja; 3) Pembuangan air limbah (air bekas); dan 4) Pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan akses aman terhadap sanitasi dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman sebanyak 3.092.904 jiwa atau sekitar 85,35% dari total jumlah penduduk. Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi bersuspek aman diduga karena belum terintegrasinya sarana sanitasi penduduk dengan saluran pembuang akhir yang terstandar, baik itu berupa septic tank individual dan IPLT bagi pengolahan limbah sistem on-site maupun IPAL bagi pengolahan limbah *sistem off-site*.

TABEL 2.34
PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Akses aman terhadap sanitasi (%)	70,04	70,19	75,54	82,4	85,35

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja seperti luas dan jumlah rumah tangga di permukiman layak huni. Selengkapnya kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap manusia. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Luas wilayah permukiman layak huni di Kabupaten Bandung dalam rentang tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020, mencapai 14.107,92 ha atau sebesar 98,67% dari luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung.

TABEL 2.35
PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI DAN JUMLAH RT YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni (ha)	13.408,50	13.534,10	13.811,90	14.093,36	14.107,92
2	Persentase permukiman layak huni (%)	93,78	94,66	96,60	98,57	98,67
3	Jumlah RT yang menempati rumah layak huni	933.911	1.149.320	1.023.120	1.173.880	1.176.487

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelayanan urusan wajib dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai berikut.

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Selama kurun lima tahun terakhir, rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan secara signifikan. Informasi detail disajikan pada **Tabel 2.36**.

TABEL 2.36
RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah polisi pamong praja	365	417	393	457	457
2	Jumlah penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,01	1,14	1,06	1,21	1,26

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021

b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata

sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

TABEL 2.37
RASIO JUMLAH LINMAS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas	5.600	5.775	5.775	5.775	5.755
2	Jumlah penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	15,84	15,79	18,21	15,30	15,88

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021

c. Jenis & Objek yang Terbakar

Banyaknya kejadian kebakaran yang cenderung meningkat dengan kompleksitas yang semakin sulit di Kabupaten Bandung yang realitasnya tidak diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran. Jumlah Penanggulangan Kejadian Kebakaran Selama Tahun 2020 adalah 282 Kali Kebakaran dan jumlah korban sebanyak 129 jiwa. Berikut adalah jenis objek yang terbakar dan penyebab kebakaran yang terjadi tahun 2020.

TABEL 2.38
JENIS OBJEK YANG TERBAKAR

Jenis Objek Terbakar	Jumlah
Rumah Tinggal	132
Gudang	19
Pabrik	17
Lainnya	114
Jumlah Kejadian	**282**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 2.39
PENYEBAB KEBAKARAN

Penyebab Kebakaran	Jumlah
Korsleting Listrik	140
Gas Bocor	12
Kompor	7
Pembakar Liar	1
Puntung rokok	9
Lainnya	113

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, 2021

6. Urusan Sosial

Dalam memberikan pelayanan wajib urusan sosial, Pemerintah Kabupaten Bandung mengevaluasi kinerja melalui indikator-indikator terkait permasalahan sosial masyarakat seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dibahas dibawah ini.

a. Penanganan PPKS Fakir Miskin

Penanganan PPKS Fakir Miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah PPKS Fakir Miskin yang juga mengalami fluktuasi pada periode yang sama. Secara lebih detail pada tahun 2020 terjadi penurunan penanganan PPKS Fakir Miskin dari tahun sebelumnya yakni menjadi 15,98% dari 17,54%. Informasi detail mengenai PPKS Fakir Miskin pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Bandung dapat dilihat di **Tabel 2.40**.

TABEL 2.40
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIR MISKIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah PPKS FM yang Tertangani (jiwa)	Jumlah PPKS FM yang Ada (jiwa)	Penanganan PPKS FM (%)
2016	13.689	13.164	10,4
2017	128.862	281.452	45,1
2018	7.462	281.452	2,7
2019	9.603	54.750	17,54
2020	8.748	54.750	15,98

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2021

b. Penanganan PPKS Anak Terlantar

Pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak terlantar di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PPKS anak terlantar yang ditangani terhadap total PPKS anak terlantar yang ada, yaitu sebesar 25,77 % di tahun 2020.

TABEL 2.41
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah PPKS Anak Terlantar Tertangani (jiwa)	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Ada (jiwa)	Penanganan PPKS Anak Terlantar (%)
2016	2.872	18.528	15,5
2017	3.133	18.528	16,90
2018	3.937	18.528	21,25
2019	4.561	18.528	24,62
2020	4.775	18.528	25,77

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2021

c. Jumlah Sarana Sosial

Meninjau tren ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bandung tampak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah unit sarana sosial. Untuk unit panti asuhan pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 43 unit, jumlahnya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara panti jompo jumlahnya 2 unit dan stagnan dari tahun lalu. Untuk sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA terjadi peningkatan sarana dari tahun ke tahun hingga di tahun 2020 total jumlah panti rehabilitasi sebanyak 4 unit.

TABEL 2.42
JUMLAH SARANA SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2016	51	1	3
2017	43	1	3
2018	41	1	6

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2019	37	2	2
2020	43	2	4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2021

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan pemerintahan wajib non dasar terdiri atas: 1) urusan tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olahraga; 14) statistik; 15) persandian; 16) kebudayaan; 17) perpustakaan; dan 18) kearsipan.

1. Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja oleh pemerintah Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Evaluasi terhadap urusan wajib non dasar terkait tenaga kerja mencakup beberapa indikator penting, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini termasuk salah satu urusan yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 dan menurunnya perekonomian daerah maupun nasional. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa kinerja urusan tenaga kerja ini menurun. Selengkapnya uraian setiap indikator kinerja urusan tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut.

a. Angkatan Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja oleh pemerintah Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Evaluasi terhadap urusan wajib non dasar terkait tenaga kerja mencakup beberapa indikator penting, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini termasuk salah satu urusan yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 dan menurunnya perekonomian daerah maupun nasional. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa kinerja urusan tenaga kerja ini menurun. Selengkapnya uraian setiap indikator kinerja urusan tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 2.43
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (jiwa)	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2016	-	-	-
2017	1.584.391,00	1.649.064,00	62,81
2018	1.575.661,00	1.658.601,00	61,89
2019	1.688.206,00	1.786.162,00	65,38
2020	1.569.974,00	1.717.376,00	62,20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

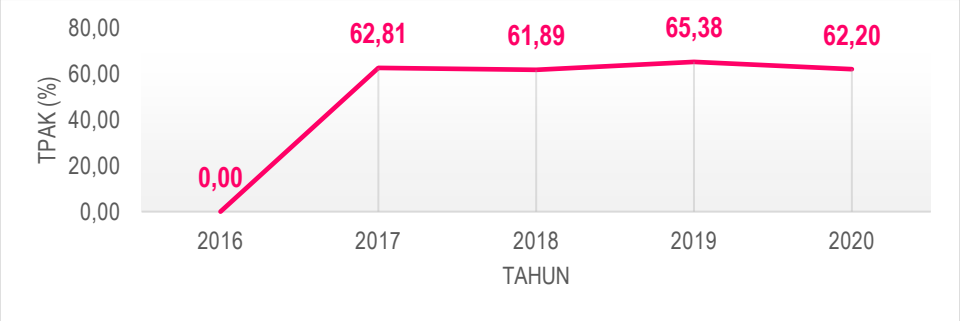

GAMBAR 2.47
GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

Terdapat berbagai jenis lapangan usaha yang menjadi mata pencaharian bagi penduduk Kabupaten Bandung. Lapangan usaha "Perdagangan besar eceran, rumah makan, dan hotel" menjadi lapangan usaha dengan jumlah pekerja tertinggi yaitu 470.717 orang, disusul perdagangan besar ecerean, rumah makan, dan hotel. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.44
JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	-	221.661	187.430	147.181	205.749
2	Pertambangan dan penggalian	-	4.997	1.600	5.437	2.013
3	Industri pengolahan	-	440.692	480.052	580.007	464.339
4	Listrik, gas, dan air	-	9.035	15.750	20.045	22.155
5	Bangunan	-	111.502	122.107	119.004	96.432
6	Perdagangan besar eceran, rumah makan, dan hotel	-	425.215	409.559	467.502	470.717
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	-	89.154	89.281	94.864	91.214
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	-	49.148	51.773	50.339	42.777
9	Jasa kemasyarakatan	-	232.987	218.109	203.827	174.578
	JUMLAH	-	**1.584.391**	**1.575.661**	**1.688.206**	**1.569.974**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

b. Pengangguran

Indikator lain yang dapat mengambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Sakernas, dalam lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 8,58% di tahun 2020.

TABEL 2.45
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2016	-	-	-
2017	64.673	1.649.064	3,92
2018	82.940	1.658.601	5
2019	97.956	1.786.162	5,48
2020	147.402	1.717.376	8,58

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

Dalam kurun waktu 2016-2020, tingkat perubahan TPT mengalami peningkatan. Grafik yang ditampilkan tidak menunjukkan data pada tahun 2016 karena estimasi yang dikeluarkan BPS pada tahun 2016 tidak sampai nilai kabupaten/kota. Grafik perkembangan TPT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

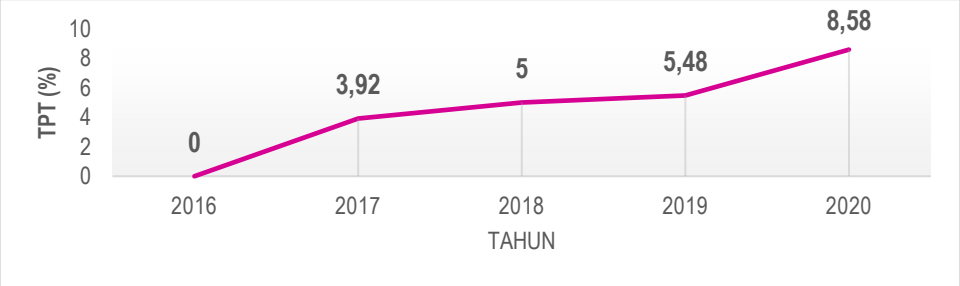

GAMBAR 2.48
GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

Sepanjang tahun 2016-2019 perbandingan perubahan TPT antara Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional lebih di dominasi nilai tingkat perubahan TPT Provinsi Jawa Barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat perubahan TPT di Kabupaten Bandung dan Nasional. Meski demikian, pada tahun 2020 terdapat peningkatan TPT di setiap tingkat pemerintahan dan kini TPT Kabupaten Bandung mencapai 8,58% yakni lebih tinggi dari TPT Nasional yang sebesar 7,07% namun masih lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat yang sebesar 10,46%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Bandung cenderung lebih kuat dibandingkan perekonomian di tingkat provinsi dan nasional serta bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Bandung memiliki lebih banyak kesempatan pekerjaan, terutama di kala pandemi.

TABEL 2.46
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	-	8,89	5,61
2017	3,92	8,22	5,5
2018	5	8,17	5,34
2019	5,48	7,9	5,01
2020	8,58	10,46	7,07

Sumber: BPS RI, 2021

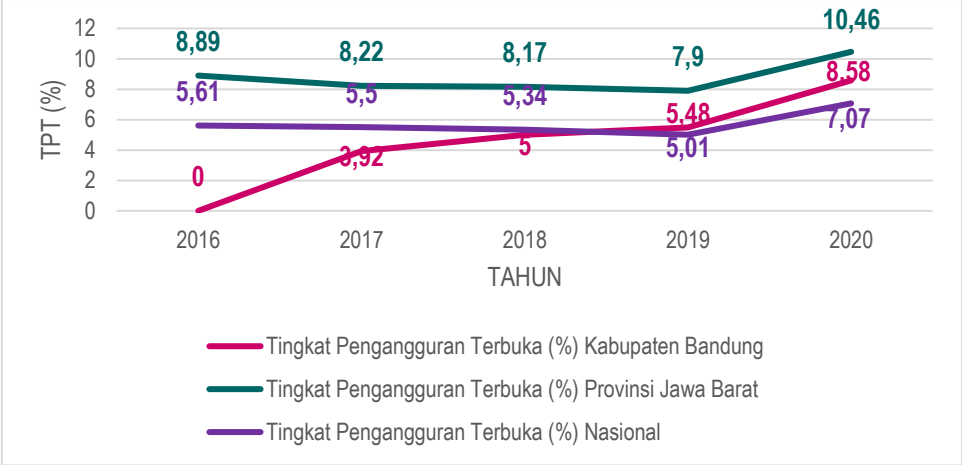

GAMBAR 2.49
GRAFIK PERBANDINGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANDUNG DENGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS RI, 2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Urusan pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah partisipasi perempuan dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi perempuan dapat dilihat dari jumlah pekerja perempuan yang terdapat di Kabupaten Bandung, yakni sebanyak 3.903 orang atau berkisar 47,63% dari total keseluruhan populasi yang bekerja di Kabupaten Bandung.

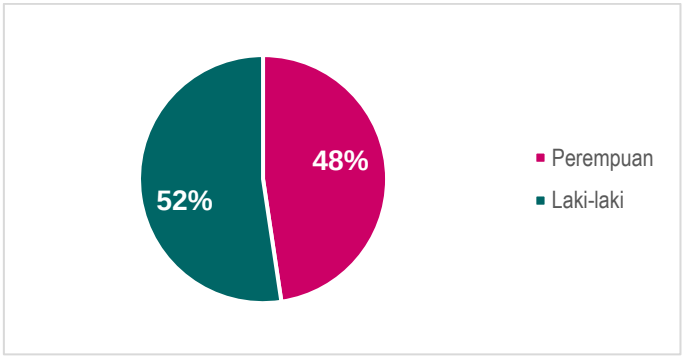

GAMBAR 2.50
GRAFIK PROPORSI PENDUDUK BEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Selain itu, terdapat juga indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak. Rincian indikator tersebut di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 2.47** dan **Tabel 2.48**. Berdasarkan **Tabel.47**, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung cenderung meningkat perlahan namun turun pada tahun 2019-2020. Meski demikian, perkembangan nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung selama 2016-2020 masih lebih tinggi dibandingkan nilai Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Sedangkan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.47** nilai Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung selama tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung menurun. Adapun nilai ini juga masih lebih rendah daripada Indeks Pemberdayaan Gender pada tingkat Provinsi Jawa Barat dan

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan IPM Kabupaten Bandung cenderung merata selama tahun 2016-2020, akan tetapi belum tentu meningkatkan keberdayaan masyarakat, terutama tingkat keberdayaan perempuan, bahkan ada kecenderungan memiliki tingkat perkembangan yang lebih rendah disbanding tingkat Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan **Tabel 2.48** menunjukkan bahwa Indeks Komposit Kesejahteraan Anak di Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan dan memiliki perkembangan nilai lebih tinggi dibandingkan tingkat Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesejahteraan anak secara perlahan cenderung meningkat di Kabupaten Bandung.

TABEL 2.47
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bandung	N/a	93,43	93,59	93,96	93,95	N/a	76,50	72,40	65,86	67,07
Provinsi Jawa Barat	89,56	89,18	89,19	89,26	89,20	71,15	70,04	70,20	69,48	70,24
Indonesia	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber: Kementerian PPPA, 2021

TABEL 2.48
INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bandung	65,20	67,60	67,60	70,98	N/a
Provinsi Jawa Barat	62,90	66,20	68,70	70,10	N/a
Indonesia	64,00	65,80	67,90	N/a	N/a

Sumber: Kementerian PPPA, 2021

3. Urusan Pangan

Secara umum, penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya skor PPH dan keanekaragaman dan konsumsi pangan di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020. Perwujudan ketahanan pangan dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut.

a. Ketersediaan Pangan

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk di wilayah yaitu berdasarkan jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per-orang per hari. Berdasarkan SPM Ketahanan Pangan, kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.200 kkal, kebutuhan protein sebesar 57 gram, dengan jumlah Skor (PPH) sebesar 100. Skor PPH di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan sampai puncaknya pada tahun 2020 dengan Skor PPH sebesar 93,80 Realisasi dan target capaian skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

TABEL 2.49
SKOR POLA PANGAN HARAPAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN KELOMPOK PANGAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	0,6	1,5	1,1	1,1
3	Pangan hewani	14,08	24	23,8	23,1	22,9

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Minyak dan lemak	5,0	5	5,0	5	5
5	Buah/Biji berminyak	0,1	0,43	0,0	0	0
6	Kacang-kacangan	10	8,5	9,3	8,5	8,7
7	Gula	1,7	1,7	2,1	1,1	1,1
8	Sayur dan buah	20,9	30	21,9	26,6	30
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0	0
Total PPH		**79,27**	**78,9**	**78,9**	**94,9**	**88,6**

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2021

b. Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM), pada tahun 2016 jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung sudah mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini ditandai dengan Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan dan Angka Ketersediaan Protein (AKP) yang melebihi angka kecukupan gizi ketersediaan pangan (ketersediaan energi sebesar 104,00 AKE dan ketersediaan protein 122,00 AKP), walaupun keberagamannya masih belum ideal ditandai dengan skor PPH tahun 2020 sebesar 93,80. Dari data tersebut, rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengkonsumsi bahan makanan energi yang sesuai standar kecukupan gizi, namun konsumsi terhadap bahan makanan yang berprotein masih kurang.

TABEL 2.50
ANGKA KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Energi (%AKE)	104,1	116,0	117,3	109,7	110,0
2	Konsumsi Protein (%AKP)	109,6	119,4	125,4	210,8	119,4
Total PPH		**77,3**	**79,2**	**84,6**	**88,6**	**83,6**

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2021

4. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan diindikasikan dengan persentase luas lahan bersertifikat. Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Persentase luas lahan bersertfikat di Kabupaten Bandung cenderung membaik sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase luas lahan bersertifikat adalah 12,07% atau 20.916,49 ha.

TABEL 2.51
PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (ha)	Luas Wilayah Kabupaten Bandung (ha)	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
2016	15.025,01	174.304,12	8,62
2017	15.077,30	174.304,12	8,65
2018	15.635,07	174.304,12	8,97
2019	18.301,93	174.304,12	10,15
2020	20.916,49	174.304,12	12,07

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021

5. Urusan Lingkungan Hidup

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung cenderung meningkat. Hal ini diindikasikan diantaranya dengan meningkatnya penataan pengendalian pencemaran air dan pencemaran limbah B3 dan volume sampah yang ditangani. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

a. Status Penataan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Industri

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Status penataan pengendalian pencemaran lingkungan pada kegiatan industri di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.52**.

TABEL 2.52
STATUS PENATAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Pengendalian Pencemaran Air**					
	Jumlah industri yang dipantau (menghasilkan air limbah)	169 industri manufaktur	169 industri manufaktur	169 industri manufaktur	169 industri manufaktur	171 industri manufaktur
	Industri yang melakukan pengujian kualitas air limbah dan melaporkan secara rutin	- 88% melakukan pengujian - 63% melaporkan	- 88% melakukan pengujian - 79% melaporkan	- 88% melakukan pengujian - 81% melaporkan	- 88% melakukan pengujian - 82% melaporkan	- 88% melakukan pengujian '- 82% melaporkan
	Penaatan Pengendalian Pencemaran Air	56,3	62	59,7	61,5	63,9
2	Pengendalian Pencemaran Udara					
	Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan emisi)	186	184	187	187	184
	Industri yang melakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong limbah dan melaporkan secara rutin	92	98	80	83	83
	Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara	92	94	78	80	81
3	**Pengawasan Pengelolaan Limbah B3**					
	Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan limbah B3)	216	206	206	210	210
	Jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan limbah B3	- 98% mengelola melalui pengelola berizin - 55% melaporkan	- 99% mengelola melalui pengelola berizin - 59% melaporkan	- 99% mengelola melalui pengelola berizin - 63.5% melaporkan	- 99% mengelola melalui pengelola berizin - 66% melaporkan	- 99% mengelola melalui pengelola berizin '- 68.1% melaporkan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penaatan Pengelolaan Limbah B3	45	50	53	57	59,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021

b. Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan setiap tahun oleh BPLH dari tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi tehadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya seperti dalam **Tabel 2.53**.

TABEL 2.53
PENGUJIAN AIR DAN UDARA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lokasi Pengujian	68 Lokasi , 3x pengujian 7 Lokasi , 12x pengujian	70 Lokasi , 3x pengujian 7 Lokasi , 12x pengujian	70 Lokasi , 3x pengujian 7 Lokasi , 12x pengujian	75 Lokasi, 3x pengujian	20 Lokasi, 3x pengujian
2	Status Mutu Air	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 53% Cemar Berat	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 55% Cemar Berat	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 36% Cemar Berat	- Storet 99% Cemar berat 1 % 1 % Cemar Sedang - IP = 55% Cemar Berat, 39 % Cemar Sedang, 5% Cemar Ringan	- Storet =100% Cemar berat - IP 20% Cemar Berat, 62% Cemar Sedang, 18% Cemar Ringan
3	Skor Storet Terburuk	-137	-152	-147	-132	-115
	- BOD (mg/L)	1.021	653	271	516	82
	- COD (mg/L)	9.880	1.420	400	1.065	233
4	Lokasi Pengujian	-	-	-	-	
5	Paremeter Tidak Memenuhi Baku Mutu	Kebisingan 76 dBA	Kebisingan LS 77,1 dBA LM 82,7dBA LSM79,3dBA	-	-	(tidak ada data karena tidak dilaksanakan pengujian udara ambien menggunakan metode manual aktif)
		TSP (debu) 6.311 µg/m³	TSP (debu) 426 µg/m³	-	-	(tidak ada data karena tidak dilaksanakan pengujian udara ambien menggunakan metode manual aktif)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II 100% berstatus mutu "cemar berat". Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata antara lain *fecal coliform*, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat yaitu Cu, Zn, dan Cr6+. Status "cemar berat" ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu *fecal coliform*. *Fecal coliform* pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan. Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti Sungai Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan Sungai Cibaligo Hilir (Kota Cimahi) . Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab

usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung, juga diperlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam pengendalian pencemaran air khususnya dan pengendalian lingkungan umumnya.

c. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Bandung yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan, juga dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat dari penimbunan sampah tersebut. Volume sampah yang tertangani di Kabupaten Bandung menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada selang tahun 2016-2020. Pada awal tahun 2016, persentase volume sampah yang tertangani hanya sebesar 320 ton/hari atau sebanyak 24% total volume sampah yang dihasilkan. Persentase ini terus meningkat hingga pada tahun 2020 dengan persentase volume sampah yang tertangani sebesar 43,43% atau sebanyak 510,24 ton/hari dari total 1.309,49 ton/hari sampah yang dihasilkan.

TABEL 2.54
PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah volume sampah yang tertangani	320 ton/hari	370,34 ton/hari	411,376	475,0824	510,24
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan	4.861,38 ton/hari	1.444 ton/hari	1289,37	1309,48	1309,48
3	Persentase (%)	24	26	32,19	34,29	43,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 adalah sebanyak 96 unit yang berlokasi di pasar atau pabrik. Daya tampung TPSS tersebut sebesar 624 m^3. Pada tahun 2020, terdapat 133 unit TPSS yang berlokasi di pasar dan pabrik dengan total daya tampung sebesar 798 m^3.

TABEL 2.55
RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPSS (unit) *)	96	-	118	126	133
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m^3)	624	-	870	756	798
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.596.623	3.657.701	3.717.291	3.775.279	3.620.000
4	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	1 : 11,5	1 : 10	1 : 4	1:750	1:750

**) Lokasi TPSS di pasar dan pabrik*
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang mencerminkan Kabupaten Bandung dari segi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dilakukan perhitungan berdasarkan kepemilikan Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Nikah. Saat ini, KTP yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Bandung sudah merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP atau KTP-el).

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung cenderung meningkat. Didukung oleh berbagai inovasi dalam pelayanan kependudukan yang berbasis digital, kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung pada urusan ini di tahun 2020 tetap meningkat walau di masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial. Selengkapnya, kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

TABEL 2.56
RASIO PENDUDUK BER-KTP PER SATUAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Keterangan
2016	2.198.931	2.465.179	89,20	(e-KTP)
2017	2.243.502	2.509.452	89,40	(e-KTP)
2018	2.389.077	2.435.478	98.09	(e-KTP)
2019	2.413.745	2.462.876	98,01	(e-KTP)
2020	2.409.401	2.484.734	99,37	(e-KTP)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021

Kartu Keluarga merupakan data yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga karena di dalam kartu ini berisi data lengkap mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kabupaten Bandung mengalami peningkatan rasio penduduk ber-KK per satuan keluarga selama selang waktu tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, rasio penduduk ber-KK per satuan keluarga adalah 89,20. Angka ini meningkat secara signifikan di tahun 2020 dengan rasio sebesar 93,93.

TABEL 2.57
RASIO PENDUDUK BER-KK PER SATUAN KELUARGA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga	Keterangan
2016	956.805	1.137.816	84,09	SIAK
2017	1.012.354	1.174.978	86,16	SIAK
2018	1.054.096	1.170.759	90.04	SIAK
2019	1.095.631	1.196.250	91,59	SIAK
2020	1.101.493	1.172.677	93,93	SIAK

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021

Akta kelahiran merupakan bukti sah yang memuat informasi terkait identitas setiap individu yang lahir. Melihat pentingnya memiliki akta kelahiran, rasio cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bandung terus meningkat sejak tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020, rasio cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bandung adalah sebesar 88,43.

TABEL 2.58
RASIO CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2016	2.276.697	3.512.189	64,82
2017	2.538.695	3.525.149	72,02
2018	1.086.851	1.221.652	88,97

Tahun	Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2019	1.057.253	1.178.692	89,70
2020	1.069.948	1.209.277	88,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung menerbitkan akta perkawinan non-muslim untuk warga Kabupaten Bandung, untuk warga muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agaman (KUA). Persentase penerbitan akta perkawinan non-muslim di Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah sebesar 174,02%.

TABEL 2.59
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN NON-MUSLIM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Target Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Persentase Penerbitan Akta Perkawainan Non-Muslim
2016	358	380	94,21
2017	306	400	76,5
2018	373	416	89,66
2019	423	432	97,92
2020	355	204	174,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan indikator kelompok binaan PKK dan LSM aktif. Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan ini cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan jumlah LSM terdaftar pada tahun 2018-2020. Selengkapnya kinerja penyelenggaraan urusan ini di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

a. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, maju dan mandiri. Jumlah PKK di Kabupaten Bandung tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Informasi mendetil mengenai kelompok binaan PKK di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.60**.

TABEL 2.60
KELOMPOK BINAAN PKK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK	56.809	87.054	69.042	67.978	67.978
	Jumlah PKK Aktif	51.582	73.995	62.137	64.579	64.579
	Persentase PKK Aktif (%)	90,80	84,99	90	95,00	95,00
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	5.227	44.736	13.964	15.138	15.490
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,10	0,60	0,22	0,23	0,24

Sumber: DPMD Kabupaten Bandung, 2021

b. Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah LSM, baik jumlah LSM terdaftar maupun jumlah LSM aktif. Tahun 2020, sekitar 311 LSM terdaftar di Kabupaten Bandung memiliki status aktif.

TABEL 2.61
JUMLAH LSM AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM terdaftar	265	274	262	267	338
2	Jumlah LSM tidak aktif	32	27	12	55	27
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	233	247	250	322	311

Sumber: Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bandung, 2021

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dank keluarga berencana ditunjukkan melalui indikator rasio akseptor Keluarga Berencana (KB). Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan ini cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Hal ini juga dapat disebabkan oleh fluktuatifnya jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Bandung. Selengkapnya, rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.62**.

TABEL 2.62
RASIO AKSEPTOR KB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2016	580.334	703.383	82,51
2017	587.289	714.046	82,25
2018	603.950	730.128	82,72
2019	554.413	699.669	79,84
2020	554.422	683.705	81,09

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Bandung, 2021

9. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan mencakup rasio izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan jumlah uji KIR angkutan umum. Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan ini cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani, meski jumlah angkutan yang meningkat. Terlebih lagi, penyelenggaraan urusan ini juga terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kinerja pada tahun 2020 menurun. Selengkapnya, gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut.

a. Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebanyak 43 izin. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh disrupsi pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perekonomian dan terbatasnya pergerakan masyarakat. Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada **Tabel 2.63**.

TABEL 2.63
RASIO IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Moda Layanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek**					
1	Antar Kota Dalam Provinsi	4.283	4.288	4.288	4.288	4.288
2	Angkutan Perkotaan	2.279	2.277	2.274	2.274	2.264
3	Angkutan Perdesaan	494	495	496	496	496
B	**Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek**					
1	Angkutan Pariwisata	108	136	150	150	160
2	Angkutan Karyawan	47	47	47	47	47
3	Angkutan Sewa Khusus	0	0	67	183	311
4	Angkutan Kawasan Tertentu	56	61	76	87	87
Jumlah Izin Trayek		7.065	7.267	7.304	7.398	7.525
Jumlah Penduduk		3.596.623	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279
Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum		**1 : 575**	1 :495	1 : 501	1 : 503	1: 501

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2021

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten Bandung baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Pada tahun 2020, jumlah kendaraaan umum yang telah melakukan uji kir sebanyak 31.751 kendaraan. Data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2016-2020 ditampilkan pada **Tabel 2.64**.

TABEL 2.64
JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Angkutan Umum	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil penumpang umum	5.672	5.136	4.406	3.896	2.143
2	Mobil bus	648	656	643	672	489
3	Mobil barang	39.769	38.344	37.327	32.987	28.968
4	Kereta gandingan/kereta tempelan	4	23	63	57	151
Jumlah		**46.093**	46.093	44.159	42.439	37.612

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2021

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dari aspek komunikasi dan informatika, sejak tahun 2013 seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung telah dilengkapi akses terhadap internet. Dalam mendukung kelancaran transformasi data dan informasi pembangunan antar perangkat daerah, beberapa sistem informasi lokalpun terus dikembangkan dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Selama kurun lima tahun, terus terjadi peningkatan jumlah sistem informasi. Upaya digitalisasi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah pun terus dikembangkan pada saat pandemi di tahun 2020. Secara detail, informasi mengenai jumlah ketersediaan sarana/ prasana komunikasi dan informasi di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2.65**.

TABEL 2.65
JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA/PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Surat Kabar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	72	74	74	85	129
2	Jumlah sistem informasi yang ada	71	110	110	131	221
3	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	4	4	-	4	5

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2021

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung mencerminkan kinerja yang fluktuatif namun cenderung menguat pada periode 2016-2019. Hal ini ditandai diantaranya dengan meningkatnya persentase koperasi aktif namun secara jumlah koperasi aktif variabel tersebut cenderung menurun. Terlebih lagi, pada tahun 2020, disrupsi pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat dan melemahnya usaha koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, meski secara umum jumlah koperasi menurun, namun pada tahun 2020 jumlah pelaku UKM meningkat. Hal ini dapat mengindikasikannya resiliensi kewirausahaan masyarakat Kabupaten Bandung namun kegiatan tersebut tidak terwadahi dalam usaha koperasi. Secara lebih rinci, gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Jumlah koperasi pada kurun waktu lima tahun terakhir sempat mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 namun kembali meningkat pada tahun 2019-2020. Selain itu, ditinjau dari produktivitas koperasi, kinerja koperasi di Kabupaten Bandung masih tergolong rendah. Dari total koperasi yang telah terbangun, selama lima tahun terakhir rata-rata hanya sekitar setengahnya merupakan koperasi yang berstatus aktif. Meninjau potensi koperasi terbangun, maka perlu upaya mendorong kinerja koperasi, serta menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif. Adapun pada kondisi pandemi seperti saat ini, upaya pemulihan koperasi yang terdampak disrupsi pandemi dan pendorongan koperasi sebagai salah satu sentra pertumbuhan masyarakat menjadi sangat penting. Informasi detail mengenai perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.66**.

TABEL 2.66
PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	861	807	806	853	866
2	Jumlah koperasi tidak aktif	861	733	786	779	786
3	Jumlah koperasi	1722	1540	1592	1632	1652

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase koperasi aktif (%)	50%	52%	51%	52%	52%
5	Jumlah koperasi produksi	201	175	175	180	197
6	Jumlah koperasi simpan pinjam	137	130	131	133	131

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021

b. Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan perlu didorong agar memiliki peningkatan kapasitas. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah koperasi dan pelaku UMKM. Informasi detail mengenai jumlah pelaku UMKM dan jumlah koperasi di Kabupaten Bandung.

TABEL 2.67
JUMLAH PELAKU UKM DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaku UKM	10.765	12.150	14.871	16.748	17.755
2	Koperasi	1.722	1.540	1.592	1.632	1.652

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha mikro, disusul usaha kecil, sementara untuk usaha menengah tidak dimasukkan ke dalam perhitungan dikarenakan menjadi bagian dari kewenangan provinsi. Berikut gambaran persentase UMKM di Kabupaten Bandung berdasarkan skala urusan.

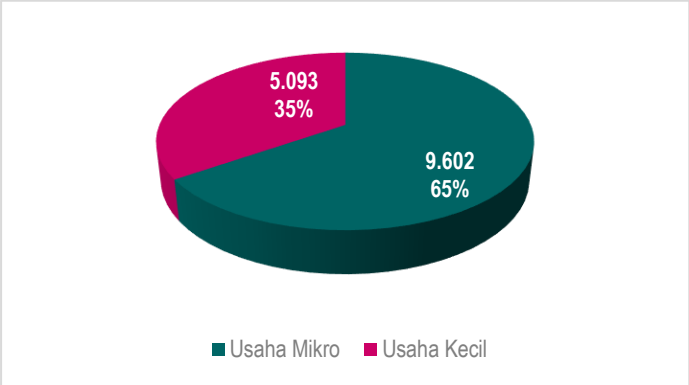

GAMBAR 2.51
GRAFIK PERSENTASE UKM BERDASARKAN SKALA USAHA TAHUN 2018
Sumber: Hasil Pengolahan Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021

c. Jumlah Omzet

Jumlah omzet menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Dalam kurun lima tahun terakhir omzet koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan, meski omzet koperasi mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 tidak terlalu berdampak pada omzet koperasi dan UMKM dan dapat mengindikasikan resiliensi pelaku serta usaha koperasi dan UMKM. Meski demikian, tidak menentunya akhir dari disrupsi pandemi ini tetap perlu diantisipasi dan tetap dibutuhkan upaya untuk terus meningkatkan resiliensi koperasi dan UMKM dengan mendorong peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM secara merata.

TABEL 2.68
JUMLAH VOLUME KOPERASI DAN OMZET USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2016-2020

No	Kegiatan	Omzet Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi	716.314.145.613	714.391.795.262	996.224.195.072	994.617.866.963	1.075.426.723.732
2	UMKM	N/a	911.250.000.000	1.115.325.000.000	1.256.100.000.000	1.331.625.000.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021

12. Urusan Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terlihat dari selang tahun 2016 hingga 2020, jumlah investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Bandung terus meningkat. Meskipun dalam kondisi pandemi di tahun 2020, jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih di atas 6.000 investor dan Penanaman Modal Asing (PMA) justru meningkat dari 103 investor di tahun 2019 menjadi 154 investor di tahun 2020.

TABEL 2.69
JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA TAHUN 2016-2020

No.	Investor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	58	71	112	6.992	6.010
2	Penanaman Modal Asing (PMA)	22	27	49	103	154
	Total	**80**	**98**	**161**	**7.095**	**6.164**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2021

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir cenderung meningkat. Ditinjau dari jumlah proyek, tahun 2020 proyek PMDN di Kabupaten Bandung berjumlah 6.010 proyek. Jumlah ini menurun jika dibandingkan jumlah proyek PMDN pada tahun sebelumnya yang mencapai 6.992 proyek. Meski demikian, hal ini berbeda dengan realisasi jumlah proyek PMA. Pada tahun 2020, sektor PMA Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebanyak 51 proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa meski jumlah proyek PMDN dan PMA menurun, iklim investasi asing di Kabupaten Bandung masih kuat.

Ditinjau dari segi nilai realisasi investasi, nilai realisasi investasi PMDN terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Meski demikian, nilai realisasi investasi PMA cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun 2019 ke 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah PMA meningkat, nilai realisasi setiap investasi PMA tersebut cenderung dalam jumlah yang lebih sedikit. Adapun secara keseluruhan nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, yakni mencapai Rp. 26.300.207.834.856. Informasi detail mengenai jumlah proyek dan realisasi investasi di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2.70**.

TABEL 2.70
JUMLAH INVESTASI PMDN/PMA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek			Realisasi Investasi			Penyerapan Tenaga Kerja	
	PMDN	PMA	Total	PMDN	PMA	Total	Indonesia	Asing
2016	2.240	67	2.307	5.297.733.143.668	2.877.269.319.178	8.175.002.462.846	67.027	100
2017	2.669	60	2.729	8.649.022.464.692	2.324.129.700.450	10.773.152.165.142	35.832	45
2018	1.317	49	1.366	8.888.625.245.625	2.189.795.938.221	11.078.421.183.846	41.087	52
2019	6.992	103	7.095	18.899.840.864.553	4.437.902.128.226	23.337.742.992.779	47.283	14
2020	6.010	154	6.164	22.666.440.330.112	3.633.767.504.744	26.300.207.834.856	50.213	33

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2021

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran mengenai urusan kepemudaan dan olahraga dapat ditunjukkan melalui indikator-indikator berikut.

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 90 pemuda berprestasi dan 101 organisasi pemuda dengan 54 Organisasi Kepemudaan (OKP) aktif di Kabupaten Bandung. Namun pada tahun 2020 tercatat hanya 1 jumlah sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten Bandung.

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga. Pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Bandung selain dimotori oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga dimotori oleh masyarakat umum yang diwadahi dalam klub dan organisasi olahraga. Tahun 2020, tercatat terdapat sebanyak 100 klub olahraga dan 90 organisasi olahraga.

14. Urusan Statistik

Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Tabel 2.71**.

TABEL 2.71
KETERSEDIAAN DOKUMEN STATISTIK TAHUN 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	PDRB	√		√			√	√		√	
2	IPM	√		√		√		√		√	
3	Suseda		√		√		√	√		√	
4	KBDA	√		√		√		√			√
								√			√
5	Indeks Gini Ratio		√		√		√		√	√	
6	Input Output		√		√		√	√			√
7	IKM		√		√	√			√	√	
8	IHK		√		√		√	√			√
9	Data Pokok	√			√		√	√		√	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2021

15. Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 secara umum sudah baik. Hal ini ditandai dengan persentase penyelesaian penegakan K3 yang secara konsisten ada di 100% dan tingginya indeks kepuasan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan persandian secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

a. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.72
PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Penegakan Perda**					
a	Jumlah Pelanggaran Perda	160	468	3101	209	192
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	160	468	3101	209	96
c	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	50
2	**Penegakan K3**					
a	Jumlah Pelanggaran K3	1.020	1.673	1363	1.798	1.198
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1.020	1.673	1363	1.798	1.198
c	Persentase Penyelesaian Penegakan K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah yang didapatkan melalui survei kepuasan masyarakat pada sarana pendidikan dan kesehatan milik pemerintah serta perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Data yang diperoleh mengenai IKM Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah sebesar 82,37%.

16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan cerminan jati diri masyarakat pada suatu daerah. Pelestarian budaya diupayakan melalui pemeliharaan benda-benda, situs, dan kawasan cagar budaya, serta penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut ini merupakan data mengenai benda-benda cagar budaya yang dilestarikan serta data perkembangan kesenian di Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2016-2020.

TABEL 2.73
BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Tahun	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
2016	100	100	100 %
2017	111	111	100 %
2018	111	111	100 %
2019	111	111	100 %
2020	111	111	100 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2021

17. Urusan Perpustakaan

Gambaran umum mengenai urusan perpustakaan yang akan dibahas meliputi jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

a. Jumlah Perpustakaan

Salah satu sarana pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yaitu sarana perpustakaan. Perpustakaan selain berperan dalam mencerdaskan siswa sekolah, juga berperan untuk mencerdaskan masyarakat secara umum, terutama dengan brkembangnya perpustakaan masyarakat di Kabupaten Bandung. Memandang pentingnya peran perpustkaan dalam pembangunan pendidikan warga, dalam kurun 2016-2020 pemerintah Kabupaten Bandung senantiasa terus melakukan pembangunan perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan masyarakat.

Meskipun dalam selang tahun 2016-2020 pembangunan perpustakaan di Kabupaten Bandung sempat mengalami fluktuasi, tetapi mulai tahun 2018 terjadi pembangunan perpustakaan secara signifikan. Dalam rentang tahun 2018-2020, pemerintah Kabupaten Bandung bekerjasama dengan masyarakat dan LSM telah berhasil membangun sebanyak 757 unit perpustakaan baru di Kabupaten Bandung. Informasi detail disajikan pada **Tabel 2.74**.

TABEL 2.74
JUMLAH PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Jenis Perpustakaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perpustakaan Desa/Kelurahan	276	69	22	92	54
2	Perpustakaan SD	66	934	636	869	1635
3	Perpustakaan SMP	64	236	208	208	568
4	Perpustakaan SMA/SMK	40	-	138	0	232
5	Perpustakaan SKPD	28	-	-	10	28
6	Perpustakaan PONTREN	37	-	-	0	483
7	Perpustakaan Masyarakat (TBM, RUPIN, dsb)	50	33	-	56	42
Total		**561**	561	1.272	1.004	1.241

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Minat baca masyarakat di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini tercermin dengan adanya kecenderungan kunjungan ke pustakaan yang meningkat dari tahun 2017-2019 namun mengalami penurunan di tahun 2020, yakni hanya sebanya 146.931 kunjungan dari 263.271 di tahun 2019. Adapun ini dapat disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memindahkan sebagian besar aktivitas masyarakat ke rumah. Informasi detail mengenai jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2.75**.

TABEL 2.75
JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan ke perpustakaan	55.072	198.913	255.308	263.271	146.931
2	Populasi yang Harus Dilayani	59.388	3.090.916	2.912.940	2.612.167	3.575.982

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021

18. Urusan Kearsipan

Dalam hal kerasipan, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung telah menerapkan kearsipan secara baku guna memiliki sistem kearsipan yang baik untuk kemudian dapat digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku menurun selama kurun waktu 2017-2019 namun meningkat di tahun 2020. Informasi detail disajikan pada **Tabel 2.76**.

TABEL 2.76
JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU TAHUN 2016-2020

No.	Perangkat Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Badan	5	5	5	5	6
2	Dinas	20	19	19	19	21
3	Bagian	12	12	12	12	12
4	RSUD	3	3	3	3	3
5	Lembaga Teknis Daerah	2	2	2	2	2
6	Kecamatan	31	31	31	31	31
7	Kelurahan	10	10	10	10	10
8	Desa	270	270	270	270	270
Total		**357**	357	353	352	352

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021

Adapun jumlah arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih terbatas. Meski sempat mengalami penurunan jumlah arsiparis di tahun 2016-2019, terdapat peningkatan jumlah arsiparis dari 2 orang di tahun 2019 menjadi 9 orang di tahun 2020. arsiparis justru mengalami penurunan. Informasi perkembangan jumlah arsiparis di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.77**.

TABEL 2.77
JUMLAH ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Indikator/Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Arsiparis Penyelia (orang)	6	5	5	2	3
2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan (orang)	7	7	5	0	3
3	Arsiparis Pelaksana (orang)	4	1	1	0	1
4	Arsiparis Pertama (orang)	1	2	1	0	2
Total		**18**	**15**	**12**	**2**	**9**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) perdagangan; 7) perindustrian; 8) transmigrasi; dan 9) kesatuan bangsa dan politik.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Secara umum, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan terus membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kapasitas kelompok, jumlah pelaku usaha yang bersertifikat, dan terjaganya lokasi-lokasi ikan di perairan umum. Meski demikian, sebagaimana terjadi di tahun 2020, masih perlu diperkuat jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai indikator perikanan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2016-2020.

TABEL 2.78
INDIKATOR PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	5	106	266	560	845

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	169	169	169	169	183
3	Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	9	9	9	12	12
4	Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (lokasi) (kumulatif)	1	22	32	48	53
5	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	93	95	97	99	99

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2021

2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Kabupaten Bandung banyak memiliki area dengan panorama alam yang menjadi daya tarik wisata, terutama di area yang berlokasi di selatan dan utara Kabupaten Bandung. Disamping kawasan pariwisata alam, Kabupaten Bandung juga kaya akan kawasan wisata budaya. Kawasan pariwisata Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi tujuan utama kunjungan domestik, tetapi juga menjadi tujuan wisata mancanegara.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar didominasi oleh wisata alam dan agro. Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Situ Cileunca, Situ Patengan, Kolam Air Panas Alami Walini, Kolam Air Panas Alami Cimanggu, Kolam Air Panas Alami Cibolang, Perkemahan Rancaupas, Tebing Keraton, Curug Cinulang. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Bandung membangkitkan perekonomian Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020, sektor pariwisata termasuk sektor yang terdampak secara signifikan dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah kunjungan wisata dan jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Bandung. Informasi detail mengenai capaian indikator capaian pariwisata di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.79**.

TABEL 2.79
INDIKATOR PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	2.000.000	2.152.222	2.449.515	2.807.660	2.072.697
2	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	156	156	156	202	9
3	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	1.955	2.217	N/a	8	58

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2021

3. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian merupakan salah satu urusan yang penting dan berkontribusi secara signifikan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Pada tahun 2016-2019, urusan pertanian ditandai dengan terus meningkatnya produktivitas komoditas. Walau demikian, penyelenggaraan urusan ini termasuk salah satu sektor yang terdampak oleh adanya disrupsi pandemi Covid-19 dan PSBB/PPKM

pada tahun 2020. Maka dari itu terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian dapat dintinjau seperti berikut.

a. Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura

Produktivitas komoditas padi cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Meski demikian, di kala pandemi produktivitas komoditas padi justru cenderung meningkat dari tahun 2019, yakni dari 63,52 menjadi 63,54 di tahun 2020. Peningkatan juga terus terjadi dengann pencapaian indeks pertanaman yang mencapai 2,76 di tahun 2020. Meski demikian, terdapat variasi pada masing-masing luas areal pengembangan hortikultura unggulan dan jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.80
INDIKATOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	**Jumlah pencapaian produktivitas komoditas (kw/ha)**					
1	Padi	63,84	63,33	63,39	63,52	63,54
II	**Luas areal pengembangan hortikultura unggulan (ha)**					
1	Alpukat	64	172,4	-	2639	18
2	Strawberry	87	123,49	-	1318	141
3	Jeruk	225	525	-	241	52
4	Jambu biji	12	47,79	-	488	7
5	Krisan	14.600	17.100	-	9977	9055
6	Sedap malam	11.205	11.625	-	9355	25415
7	Mawar	308	250	-	463	479
III	**Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)**	**2,65**	**2,67**	**2,69**	**2,73**	**2,76**
IV	**Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura**					
1	Sayuran (kw/ha)	253,92	254,03	-	207,08	219,23
2	Buah-buahan (kw/ha)	124,23	125,68	-	181,23	95,86
3	Tanaman hias (tangkai/ha)	28,87	35,89	-	10000	10,28
4	Tanaman obat (kw/ha)	3,30	3,92	-	11,5	2,25
5	Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok)	2.398	2.445	2.879	3.034	3.211
6	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (orang)	78	75	82	62	14

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2021

b. Indikator Peternakan

Dalam kurun lima tahun terakhir, status kesehatan hewan cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tercatat status kesehatan hewan adalah 72%, yakni turun dari 75,33% di tahun 2019. Berkurangnya status kesehatan hewa, kelompok ternak yang terbina, pelaku usaha pengolahan ternak yang bersertifikat, jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi dan sarana dan prasarana di rumah potong hewan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa produktivitas sektor peternakan di Kabupaten Bandung terdampak secara signifikan oleh adanya disrupsi pandemi Covid-19. Informasi detail mengenai capaian indikator peternakan Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.81**.

TABEL 2.81
INDIKATOR PETERNAKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	32	32	32	32	32
2	Meningkatnya status kesehatan hewan (%)	74,30	71,5	72	75,33	72
3	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (%)	131,34	N/a	N/a	N/a	0,09
4	Meningkatnya kelompok terbina dala mmendorong populasi ternak (kelompok)	N/a	154	190	196	25
5	Peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (orang)	200	144	100	140	0
6	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	587	130	33	100	10
7	Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	83,5	100	100	100	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2021

4. Urusan Kehutanan

Praktek illegal logging dan illegal trading, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan salah satu langkah yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya. Namun Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diantaranya urusan kehutanan sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Terdapat berbaga potensi energi dan sumber daya mineral yang tersebar di Kabupaten Bandung. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu sebagai berikut.

a. Energi

Potensi energi di Kabupaten Bandung terdiri dari panas bumi (geothermal), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik) dan tenaga surya (PLTS).

b. Panas Bumi

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap panas bumi yang cukup banyak sampai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan Pengambangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang-Darajat dan Cibuni dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothemal Darajat II Limited (Darajat) serta PT. Teknosatria energi Geothermal (Cibuni) namun untuk wilayah cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi eksplorasi pemanfaatan panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnnya pemanfaatan volume uang panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan serbagai upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan panas bumi dengan instansi terkait

baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagi sumber energi.

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah potensi panas bumi dengan besar potensi diperkirakan sebesar 2.711 Mega Watt (MW). Dari jumlah tersebut, energi panas bumi yang sudah termanfaatkan (ter-install) baru mencapai ± 787 MW yang tersebar di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, Kamojang dan Cibuni. Energi panas bumi yang telah termanfaatkan berperan penting mensuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali. Meninjau masih tingginya potensi panas bumi yang belum termanfaatkan diperkirakan potensi luas cakupan ini kedepan akan semakin berkembang. Informasi detail mengenai potensi panas bumi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.82**.

TABEL 2.82
POTENSI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No.	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1	Pangalengan	PT Geothermal Energy	Wayang Windu	Star Energy Geothermal Wayang Windu	400	227
			Patuha	PT Geo Dipa Energi	706	50
2	Kamojang-Darajat	PT Geothermal Energy	Kamojang	PT Geothermal Energy	855	240
				Chevron Geothermal Indonesia	610	270
3	Cibuni	PT Yala Tekno Geothermal	Cibuni	PT Tekno sarana Energi Geothermal	140	0
Jumlah					**2.711**	**787**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, 2020

c. Ketenagalistrikan

Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik PLN sebanyak 731.428 KK atau sekitar 82,86 % dari total jumlah KK. Pemenuhan listrik penduduk Kabupaten Bandung, disamping dipenuhi oleh listrik PLN juga dipenuhi oleh tenaga mikro hidro. Tahun 2014 tercatat jumlah pengguna energi mikro hidro di Kabupaten Bandung sebanyak 34 KK (Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu) dan pengguna energi surya sebanyak 150 KK masing–masing sebanyak 50 KK yang terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg, Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, dan Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.

d. Minyak Bumi

Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu SPBU sebanyak 73 unit usaha dan agen LPG sebanyak 54 agen.

e. Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan menjadi sumber daya pertambangan dan sumber daya air tanah.

a. Pertambangan

Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Bandung berupa andesit, tanah urug, dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan

Banjaran. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin.Kondisi pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin.Kondisi pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

b. Sumber Daya Air Tanah

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan 'one basin one management'. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5 juta m^3/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m^3.

6. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Selama kurun lima tahun terakhir, sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling besar ketiga setelah sektor industri dan pertanian. Perkembangan sektor perdagangan Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

TABEL 2.83
INDIKATOR PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US $)	824.819.145	897.710.575	1.028.957.434,14	948.614.175,00	726.705.757,52
2	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	5	3	2	5	5

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2021

Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US$) mengalami terus meningkat dari tahun 2016 sebesar US$ 824.819.145 menjadi US$ 897.710.575 pada tahun 2017 dan menjadi US$ 1.028.957.434,14 pada tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020, yakni masing-masing senilai US$948.614.175,00 dan US$726.705.758. Penurunan nilai ekspor barang dan jasa ini mengindikasikan salah satu dampak disrupsi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung.

7. Urusan Perindustrian

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

TABEL 2.84
PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2019

Tahun	Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Besar	Total
2016	8.053	395	366	8.814
2017	8.519	397	368	9.284
2018	9.233	346	140	9.719
2019	9.506	358	140	10.004
2020	12.184	902	143	12.184

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada industri kecil, baik industri non formal maupun formal, mengalami peningkatan. Industri kecil formal dan non formal di tahun 2018 berjumlah 9.233 unit. Terdapat juga 346 unit industri menengah dan 140 unit industry besar. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2020 dengan jumlah industri kecil formal dan non formal di Kabupaten Bandung berjumlah 12.184 unit, jumlah industry menengah mencapai 902 unit, dan terdapat peningkatan jumlah industry besar menjadi 143 unit.

8. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung terbatas meliputi transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang disponsori dan dibiayai oleh pemerintah. Berdasarkan perkembangannya, dalam kurun lima tahun terakhir jumlah transmigrasi umum di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah transmigran ini sejalan dengan telah meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Informasi mengenai perkembangan jumlah transmigrasi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2.85**.

TABEL 2.85
JUMLAH TRANSMIGRASI MENURUT JENIS DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Jenis Transmigrasi		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Transmigrasi Swakarsa	Jumlah KK	0	0	0	0	N/a
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	N/a
Transmigrasi Umum	Jumlah KK	8	7	3	0	N/a
	Jumlah Jiwa	31	35	9	0	N/a
Transmigrasi Bedol Desa	Jumlah KK	0	0	0	0	N/a
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	N/a

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Stabilitas kondusifitas wilayah secara signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Ringkasan realisasi indikator urusan kesatuan bangsa dan politik yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 2.85**.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen bahwa data tentang gangguan Kamtrantibmas diperoleh data bahwa konflik yang terjadi pada Tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 sehingga pada penghitungan rasio terjadi penurunan, hal tersebut mencerminkan bahwasanya konflik di masyarakat dinamis yang berpengaruh pada kondisi masyarakat itu sendiri, dimana hal itu diiringi kebijakan nasional/daerah dan tak lepas dari situasi atau kejadian yang tidak terduga lainnya contohnya pandemi Covid – 19. Selengkapnya, rincian realisasi konflik di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 2.86**.

TABEL 2.86
TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penurunan gangguan Kamtrantibmas	20 %	-74%	27%
2	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades	97%	72,18%	74%
	Persentase Ormas yang aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan	82%	100%	121%
3	Nilai akuntabilitas kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik	70	-	-
	Persentase BMD/ Aset dalam kondisi baik	98%	99%	101%

Sumber: LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, 2020

TABEL 2.87
REALISASI KONFLIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2020

No	Konflik	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Konflik Politik	9	7
2	Konflik Buruh	1	11
3	Konflik Etnik	1	2
4	Konflik Agraria	3	4
5	Konflik Ideologi	0	8
6	Konflik Hankam	0	22
	Total	**14**	**54**

Sumber: LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, 2020

Pada Tahun 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hajat PILKADA SERENTAK yang akan dilaksanakan 23 September, yang mana Kabupaten Bandung pun pada Tahun 2020 harus melaksanakan pemilihan Bupati dan wakil Bupati, pada kenyataannya pelaksanaan PILKADA SERENTAK mengalami perubahan waktu yang dilaksanakan karena kondisi pandemi covid-19, pergeseran waktu pelaksanaan PILKADA SERENTAK menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Tahun 2020 pelaksanaan PILKADA SERENTAK di Kabupaten Bandung yang diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, memiliki data pemilih berjumlah 2.371.500 jiwa dan pengguna hak pilih berjumlah 1.711.642 jiwa. Berdasarkan data tersebut bila dipersentasekan hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 72,18%. Dilihat dari target perjanjian kinerja yang menjadi indikator sasarannya, secara realisasi sebesar 72,18%, tidak mencapai target yang sebesar 97%. Menurut Komisi Pemilihan Umum menyampaikan berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dari periode pemilihan PILKADA Tahun 2005 – Tahun 2020 mengalami peningkatan. Selengkapnya tingkat partisipasi PILKADA Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2.52**.

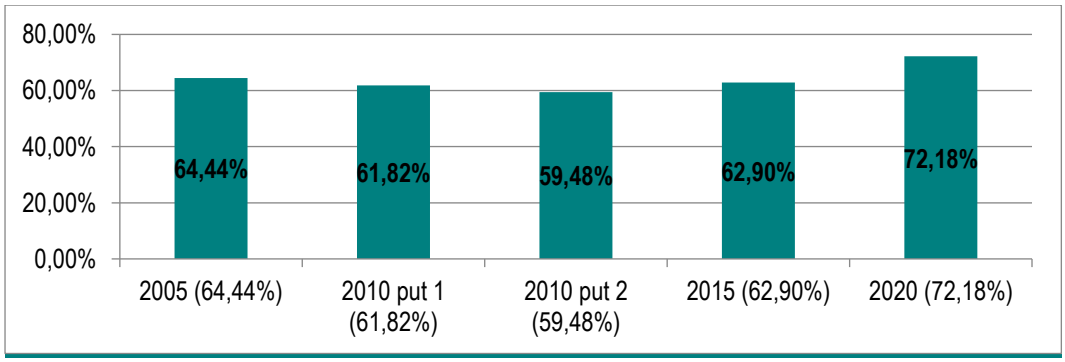

GAMBAR 2.52
TINGKAT PARTISIPASI PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2020
Sumber: LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies* (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya. Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

Sebelum meninjau lebih jauh mengenai daya saing Kabupaten Bandung, terlebih dahulu akan dibahas mengenai perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan daya Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, capaian LPE Kabupaten Bandung sempat mengalami peningkatan di tahun 2019 namun turun di tahun 2020, yang mana hal ini turut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Adapun ditinjau dari aspek PDRB ADHK, secara umum terjadi penurunan laju pertumbuhan untuk setiap lapangan usaha. Secara lebih rinci, hanya 3 lapangan usaha diantaranya memiliki pertumbuhan di kala pandemi, yakni Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Adapun sektor lainnya cenderung menurun dan bahkan mengalami laju pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

Perkembangan capaian LPE Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam **Gambar 2.53**.

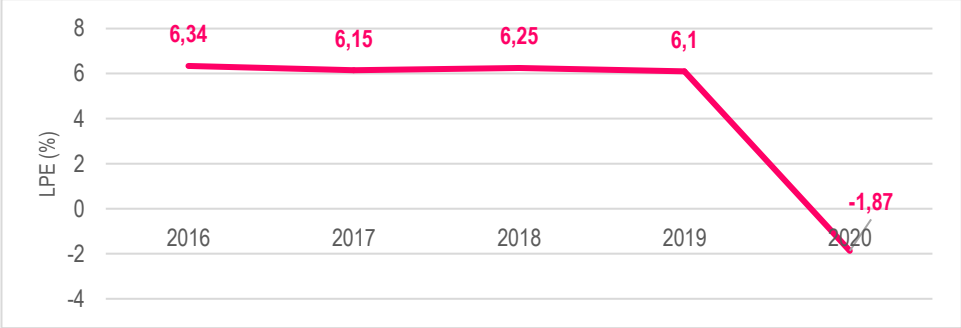

GAMBAR 2.53
GRAFIK PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Bandung antara lain tergambar dari capaian indikator kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan/angka konsumsi rata-rata RT per kapita sebulan (pangan dan non pangan). Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp. 1.184.542 yang terdiri dari bahan bukan pangan sebesar 51,99% dan bahan pangan sebesar 48,01%. Secara umum, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Bandung di tahun 2020 naik 8% dari tahun 2019. Adapun proporsi pengeluaran bahan bukan pangan naik sebesar 20% dari tahun 2019 dan pengeluaran bahan pangan justru mengalami penurunan sebesar 3%.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kabupaten Bandung.

A. Aksesibilitas Daerah

1. Level of Service (LOS) Jalan

   Indikator *level of service* (LOS) jalan atau tingkat pelayanan jalan merupakan ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, kepadatan, dan hambatan yang terjadi, sehingga dinilai dapat menunjukkan kondisi aksesibilitas Kabupaten Bandung. Dari 6 (enam) kategori *level of service* (LOS) jalan, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir Kabupaten Bandung tergolong ke dalam kategori 4 (empat) atau D, dimana kondisi jalan dalam kategori ini antara lain:

   - Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus
   - Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar
   - Pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.
   -

B. Ketersediaan Air Bersih

1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

   Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan persentase penduduk yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bandung, yakni mencapai 81,45%. Persentase tersebut merupakan peningkatan dan capaian tertinggi semenjak tahun 2016.

TABEL 2.88
PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Sumber Air Bersih	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ledeng (Perpipaan)	363.485	357.897	467.431	470.746	N/a	N/a
2	Sumur Lindung	941.950	953.796	874.975	1.818.975	N/a	N/a
3	Sumur Tidak Terlindung	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a
4	Mata Air Terlindung	129.487	137.121	189.620		N/a	N/a

No.	Sumber Air Bersih	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Mata Air Tidak Terlindung	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a
6	Sungai	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a
7	Air Hujan	N/a	7.022	20		N/a	N/a
8	Air Kemasan	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a
9	Pompa	135.103	285.283	362.423		N/a	N/a
10	Air lainnya	N/a	N/a	N/a	584.135	N/a	N/a
11	Sumur Gali dengan Pompa Listrik	722.466	792.166	777.950		N/a	N/a
12	Terminal Air	134.027	143.292	96.315		N/a	N/a
13	Total Jumlah Penduduk yang menggunakan air bersih	2.426.518	2.676.577	2.768.734	2.873.856	3.039.848	2.861.415
14	Jumlah Penduduk	3.534.112	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.271	3.575.279
15	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	73,99	74,91	78,73	78,57	80,52	81,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

C. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik. Secara umum terdapat 8 (delapan) fasilitas pembangkit tenaga listrik yang memasok listrik untuk Kabupaten Bandung, diantaranya merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air. Pada tahun 2020, produksi listrik terbesar adalah PLTA Pangalengan sebesar 1.888 juta Kwh dengan total yang didistribusikan untuk Kabupaten Bandung adalah sebesar 4,9 juta KwH. Distribusi listrik di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PLN di dua area di Kabupaten Bandung, yakni di Area Majalaya dan area Bandung, masing-masing sebesar 2,55 juta KwH dan 2,32 KwH.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kemudahan prosedur perijinan. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyediakan prosedur perizinan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan, sehingga memudahkan calon investor dalam megurus proses perizinan. Melalui kemudahan proses perizinan diharapkan akan menjadi insentif dan stimulus bagi calon investor untuk menjalankan kegiatan di Kabupaten Bandung. Lingkup perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan izin penyelenggaraan reklame. Informasi detail mengenai perkembangan perizinan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 disajikan pada **Tabel 2.90.**

TABEL 2.89
DATA PERKEMBANGAN JENIS IZIN DAN JUMLAH IZIN YANG TERBIT TAHUN 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Izin	42	89	89	44 ONLINE 12 OFFLINE	70 ONLINE 6 OFFLINE
2	Jumlah izin yang terbit	6.793	6.079	7.429	3.684 ONLINE 1.336 OFFLINE	2.966 ONLINE 1.243 OFFLINE

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2021

B. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah)

TABEL 2.90
JUMLAH DAN REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Jumlah Pajak Daerah**	**384.495.956.018**	**464.592.767.806,0**	**472.460.682.943,00**	**525.068.992.918,00**	**498.815.169.939,00**
a	Pajak Hotel	4.204.098.463	5.028.778.143,6	6.173.761.937,00	7.568.662.689,00	6.471.163.124,00
b	Pajak Restoran	12.774.005.471	18.273.358.346,4	25.695.647.125,00	32.026.966.078,00	23.014.071.913,00
c	Pajak Hiburan	1.773.066.735	3.899.227.827,0	3.796.231.351,00	5.661.456.689,00	1.969.743.217,00
d	Pajak Reklame	3.239.576.910	3.657.132.755,0	3.776.397.829,00	4.375.713.353,00	5.042.545.485,00
e	Pajak Penerangan Jalan/ GENSET	131.591.826.182	150.946.030.168,0	159.364.947.768,00	163.129.579.684,00	149.649.854.970,00
f	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	151.490.752	205.094.745,0	336.543.553,00	1.785.525.393,00	927.033.351,00
g	Pajak Parkir	520.316.508	1.124.726.494,0	1.706.415.160,00	10.016.813.856,00	2.690.488.207,00
h	Pajak Air Bawah Tanah	11.248.115.353	10.920.624.860,0	10.936.534.294,00	1.035.470.668,00	6.953.320.273,00
i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	93.198.190.759	101.686.820.619,0	104.650.994.168,00	110.201.134.526,00	96.464.116.046,00
j	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	125.795.268.885	168.850.973.848,0	156.023.209.758,00	189.267.669.982,00	205.632.833.353,00
2	**Retribusi**	**26.937.588.476**	**21.833.385.145,0**	**26.704.035.670,00**	**25.837.878.597,00**	**21.282.679.329,00**
a	Jumlah Retribusi Jasa Umum	9.138.798.200	9.827.218.970,0	11.767.975.250,00	12.257.332.000,00	12.277.370.702,00
b	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	3.856.910.500	3.318.347.000,0	4.307.256.550,00	6.257.491.223,00	3.577.695.016,00
c	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	13.941.879.776	8.687.819.175,0	10.704.035.870,00	7.323.055.374,00	5.427.613.611,00

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Mengacu pada tabel realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bandung diatas, dalam kurun lima tahun menunjukkan tren pertumbuhan positif. Lima tahun terakhir pajak daerah Kabupaten Bandung tumbuh dengan rata-rata persentase sebesar 7,165% pertahun. Adapun untuk pendapatan retribusi daerah, dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, yakni dengan rata-rata pertumbuhan -4,378%.

C. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Secara umum, perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Bandung cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan jumlah desa swasembada yang meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, yakni persentase desa yang berstatus swasembada mencapai 16,49%. Meski demikian, masih terdapat jumlah desa berstatus swakarya atau transisional yang signifikan, yaitu sebanyak 178 desa. Hal ini perlu diantisipasi pemerintah daerah untuk diarahkan menjadi desa swasembada.

TABEL 2.91
PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	211	213	177	128	55
2	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	23	35	65	108	178
3	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	6	6	23	42	46
4	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	240	254	265	278	279
5	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) (%)	2,50	2,36	8,68	15,11	16,49

Sumber: Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, 2021

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja dimana sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah pencari kerja di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar pencari kerja di tahun 2020 adalah pencari kerja laki-laki, yakni sebanyak 4.291 orang, dengan mayoritas tingkat pendidikan terakhirnya adalah lulusan SMK. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat mengantisipasi pengangguran yang meningkat dengan mengembangkan dan menyalurkan SDM kompeten dengan industri-industri yang sesuai kebutuhan perekonomian daerah.

TABEL 2.92
JUMLAH PENCARI KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja Tahun 2019			Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	23	12	35	9	7	16
SMP	62	72	134	88	64	152
MTS	20	26	46	0	0	0
SMA	898	539	1437	493	341	834
MA	0	0	0	0	0	0
SMK	1.086	583	1.669	3.277	2.904	6181
STM	0	0	0	0	0	0
SPG	0	0	0	0	0	0
SMEA	0	0	0	0	0	0
SPMA	0	0	0	0	0	0
D1	7	4	11	3	1	4
D2	3	1	4	1	1	2
D3	141	348	489	96	196	292
S1	527	720	1.247	322	385	707
S2	9	19	28	2	4	6
Total	**2.776**	**2.324**	**5.100**	**4.291**	**3.903**	**8.194**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum terdapat fluktuasi rasio ketergantungan di Kabupaten Bandung selama tahun 2016-2020, namun terdapat kecenderungan menurun di tahun 2018-2020. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) di Kabupaten Bandung. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2016-2020.

TABEL 2.93
RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	1.064.826	1.043.148	1.100.429	961.036*	958.954
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	152.386	173.736	158.435	193.163*	88.584
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) + (2)	1.217.209	1.216.884	1.258.864	N/a	1.134.659
4	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	2.379.411	2.440.717	2.458.427	2.407.480*	2.489.131
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	51,16	49,86	51,21	47,94*	45,58

**) Keterangan: Sumber Data Agregat Kependudukan Disdukcapil Smt. II 2019*
Sumber:BPS Kabupaten Bandung, 2019

2.1.5. Aspek Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau dari capaian pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan. Secara umum, pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 di komponen penyelenggaraan pemerintahan tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Rincian indikator untuk masing-masing komponen pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut.

Dari komponen pelayanan publik, kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara umum, **Gambar 2.54** menunjukkan bahwa IKM 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dan mencapai 82,90% pada tahun 2020. **Gambar 2.55** juga menunjukkan peningkatan pada Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung, yakni IRB 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dan mencapai 64,33 pada tahun 2020. Adapun **Gambar 2.56** menunjukkan bahwa Nilai Maturitas SPIP cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai maturitas SPIP mencapai 3. Progres pada komponen pelayan publik juga mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk turut menyukseskan Agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

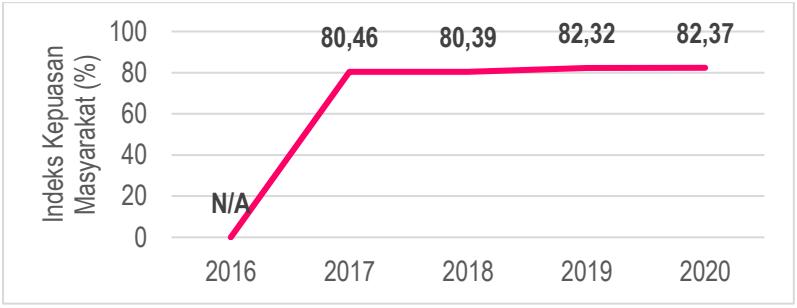

GAMBAR 2.54
CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Online, diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021.

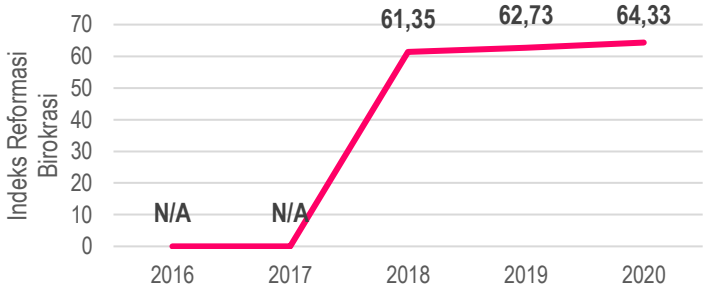

GAMBAR 2.55
CAPAIAN INDEKS REFRMASI BIROKRASI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Hasil Penilaian Kementerian PAN-RB, diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021.

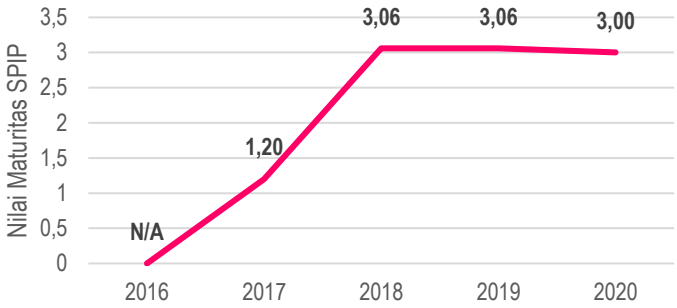

GAMBAR 2.56
CAPAIAN NILAI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Hasil Penilaian BPKP, diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021.

Dari komponen transparansi dan akuntabilitas, dapat ditinjau perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Bandung yang terus meningkat. **Gambar 2.57** menunjukkan bahwa SAKIP Kabupaten Bandung semula ada di 54,61 (CC) pada tahun 2016 dan berhasil mencapai 71,44 (BB) pada tahun 2020. Pencapaian ini menunjukkan semakin membaiknya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung sudah menggunakan *e-budgetting* mulai tahun 2019, yakni melalui simcan.bandungkab.go.id, dan melalui SIPD Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2021. Penggunaan *e-procurement* sudah dilakukan menggunakan lpse.bandungkab.go.id mulai tahun 2018. Adapun penggunaan e-Analisis Standar Biaya di Kabupaten Bandung sudah menggunakan simcan.bandungkab.go.id mulai tahun 2019 dan SIPD Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2021.

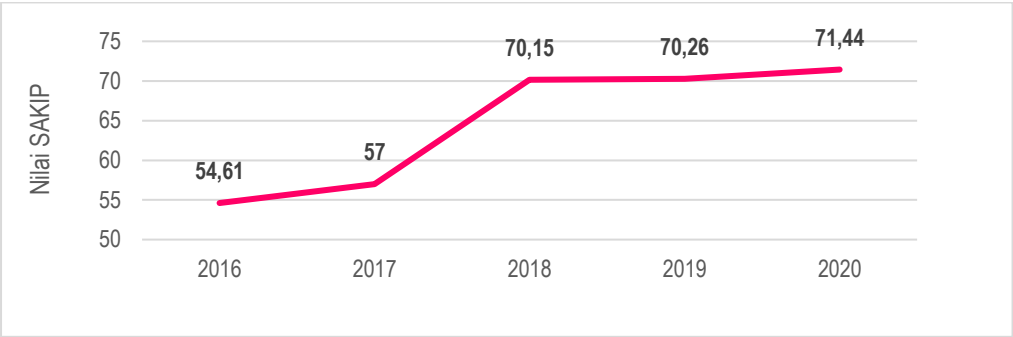

GAMBAR 2.57
CAPAIAN NILAI SAKIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dari komponen pengelolaan keuangan, dapat dilihat pada **Tabel 2.95** bahwa opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung cenderung baik, terutama dilihat pencapaian pada tahun 2017-2020 yang masuk ke kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TABEL 2.94
CAPAIAN OPINI BPK UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam rangka mengukur efektivitas strategi pembangunan tahun 2020, pada bagian ini akan dipaparkan hasil evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2020 dan RPJMD Tahun 2016-2021 tahun kelima. Evaluasi akan meliputi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja, realisasi perangkat daerah, serta laporan kinerja pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Dengan terukurnya efektivitas pembangunan daerah tahun 2020, diharapkan akan menjadi input/masukan bagi upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Bandung kedepan.

Kedudukan RKPD 2022 menjadi penting karena menjadi basis dalam penyusunan dokumen RPJMD pada masa periode selanjutnya yang tidak terlepas dari pencapaian dokumen RPJMD lama. Atas dasar tersebut, maka evaluasi dari keberjalanan RPJMD 2016-2021 tahun ke-5 dan RKPD tahun 2020 menjadi penting sebagai tolak ukur dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyusun rencana pembangunan untuk tahun 2022. Evaluasi-evaluasi yang akan dilaksanakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan RPJMD 2016-2021 tahun kelima adalah dengan melalui indikator-indikator pembangunan daerah, antara lain indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang bersumber dari dokumen RPJMD, serta indikator makro sektoral yang bersumber dari dokumen RKPD terdahulu.

2.2.1. Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun ke-5

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat realisasi dari pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) di tahun 2020. Sebagai indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan di tingkat kabupaten, evaluasinya menjadi penting untuk melihat bagaimana hasil pembangunan secara makro. Evaluasi terhadap tingkat realisasi IKU serta target yang ditetapkan untuk tahun 2022 tercantum dalam Tabel 2.87 dan IKD dalam Tabel 2.88 yang dikelompokkan berdasarkan urutan misi dalam dokumen RPJMD.

Di tahun 2020, dunia dihadapkan pada merebaknya pandemi Corona Virus Disease-19 atau dikenal dengan COVID-19 di Tiongkok, tepatnya di daerah Wuhan pada Desember 2019 dan secara cepat menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi global secara pesat dan mengakibatkan adanya kontraksi pada banyak aspek dalam perekonoomian global, termasuk di dalamnya Kabupaten Bandung. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh berbagai lapisan pemerintahan baik pada level nasional sampai dengan kabupaten/kota sebagai bentuk upaya menekan penyebaran pandemi ini, seperti munculnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan social distancing, sampai dengan lockdown, yang juga berimbas pada seluruh aspek pembangunan Kabupaten Bandung. Periode outbreak dari pandemi COVID-19 masih berlangsung sepanjang tahun 2021 dan baru akan berakhir sampai dengan ditemukannya vaksin dan disebarkan ke seluruh penduduk. Atas dasar tersebut, untuk mempertahankan kondisi perekonomian negara, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan new normal untuk mengatur kebiasaan baru bagi masyarakatnya dalam masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Sebagai dampaknya, maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target 2020 namun tetap sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi secara luas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun perubahan RKPD Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang berimplikasi pada perubahan target-target IKU dan IKD.

TABEL 2.95
TINGKAT REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN TARGET TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,33	72,39	100,08%	72,5

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target 2021
2	Tingkat Kemiskinan	6	6,91	86,83%	5,29
3	Persentase Desa Mandiri	20,74	20,74	100,00%	20,74
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,1	-1,87	30,00%	5
5	Skor PPH Konsumsi	85,4	83,3	97,54%	86,3
6	Kualitas Pelayanan Infrastruktur	71,66	61,95	86,45%	71,9
7	Indeks Kualitas Air	28	29,67	105,96%	29
8	Indeks Reformasi Birokrasi	65	64,33	98,97%	67
9	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20	-74	-370,00%	25

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan **Tabel 2.96** diketahui bahwa dari total 9 (sembilan) indikator kinerja utama (IKU), terdapat 6 (empat) indikator yang realisasinya masih di bawah target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020. Keempat indikator yang tidak tercapai tersebut adalah:

1. Tingkat Kemiskinan
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
3. Skor PPH Konsumsi
4. Kualitas Pelayanan Infrastruktur
5. Indeks Reformasi Birokrasi
6. Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas

Pada tahun 2020 terdapat perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor pembangunan. Faktor eksternal tersebut mempengaruhi tingkat capaian kinerja utama Kabupaten Bandung. Adanya ketidakseimbangan kondisi ekonomi dan politik tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur hingga tingkat keamanan daerah.Pada tahun 2020 terdapat kontraksi ekonomi global yang dipengaruhi oleh berkembangnya pandemi COVID-19 yang terjadi secara pesat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pandemi tahun 2020 mengakibatkan terbatasnya pergerakan penduduk dan logistik barang keluar masuk daerah (ekspor dan impor) yang memberikan dampak terhadap produktivitas kegiatan perekonomian daerah secara luas, begitu pula dengan Kabupaten Bandung. adanya pandemi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah saja, tetapi juga pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan penduduk. Salah satunya pembatasan kegiatan di luar rumah mengakibatkan kegiatan pendidikan menjadi terhambat, meski pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar mengajar secara daring. Selain itu, terkontraksinya perekonomian secara global mengakibatkan adanya ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada anjloknya kegiatan investasi dan ekspor impor secara luas. Selain itu, kondisi ini juga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran dan penurunan daya beli penduduk. Secara lebih rinci, kondisi pembangunan daerah Kab Bandung dapat terlihat dari capaian Indikaor Kinerja Daerah (IKD). Berikut ini adalah capiaan IKD Tahun 2020.

TABEL 2.96
TINGKAT REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN TARGET TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target 2021
MISI 1					
1	Indeks pendidikan	64,65	65,12	100,72%	64,67

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target 2021
2	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,56	11,25	131,43%	8,6
3	Persentase tingkat kelulusan SD/sederajat	99	100	101,01%	99,5
4	Persentase tingkat kelulusan SMP/sederajat	98	100	102,04%	98,5
5	Persentase pemustaka	2,5	4,9	196,00%	3
6	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	0	201	201,00%	85
7	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	80	80,36	100,45%	80,25
8	Persentase fasilitas kesehatan berakreditasi	92,31	95,83	103,81%	100
9	Indeks kesehatan	81,85	82,35	100,62%	82,2
10	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	65	98	150,77%	70
11	Indeks pengeluaran	70,59	70,74	100,21%	71,77
12	Tingkat pengangguran terbuka	6,5	8,58	68,00%	5,45
13	Indeks kedalaman kemiskinan	0,85	1,04	77,65%	0,84
14	Persentase Desa Mandiri	20,74	20,74	100,00%	16
MISI 2					
15	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	6,88	0,19	2,76%	2,35
16	Nilai tukar petani	105,36	105,36	100,00%	107,36
17	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	-2,2	-3,78	28,18%	6,19
18	Persentase Koperasi Berkualitas	4	5	125,00%	4,5
19	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	-4,56	-3,27	128,29%	2,52
20	Jumlah kunjungan wisata	2.500.000	2.072.697	82,91%	3.000.000
21	Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	-6,9	-3,21	128,29%	1,66
22	Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	65	111	170,77%	75
23	Laju pertumbuhan investasi	8,6	12,69	147,56%	10
24	Skor PPH Konsumsi	85,4	83,3	97,54%	86,3
25	Skor PPH Ketersediaan	91	93,8	103,08%	92
MISI 3					
26	Moda share	2,16	5,48	253,70%	2,25

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target 2021
27	Level of service (LOS) jalan	C	B	100,00%	C
28	Luas sawah yang terairi irigasi	55	72,76	132,29%	60
29	Akses aman terhadap air bersih	80,24	81,45	101,51%	83
30	Akses aman terhadap sanitasi	76,37	86,11	112,75%	80
31	Persentase kawasan kumuh	0,33	0,32	103,03%	0,25
32	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	58	57,46	99,07%	58
33	Response time terhadap kejadian kebakaran	75	82,27	109,69%	75
34	Persentase penanganan kebencanaan	100	100	100,00%	100
35	Luas genangan	1,5	5,62	374,67%	1,55
MISI 4					
36	Indeks kualitas air	28	29,67	105,96%	29
37	Indeks kualitas udara	78	78,1	100,13%	80
38	Persentase pengelolaan sampah	56,51	62,37	110,37%	65
39	Luas ruang terbuka hijau	48,95	51,29	104,78%	49,4
40	Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31	0,31	100,00%	0,31
MISI 5					
41	Nilai SAKIP kabupaten	72	71,44	99,22%	77
42	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	3	3	100,00%	3,2
43	Indeks kepuasan masyarakat	81,78	82,37	100,72%	82,7
44	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	1	1	100,00%	1
45	Tingkat kemandirian fiskal	16,86	38,17	226,39%	18,4
46	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20	-74	-370,00%	25
47	Persentase penegakan Perda	100	100	100,00%	100

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Penilaian terhadap ketercapaian IKU dan IKD dilakukan melalui penilaian predikat tingkat realisasi masing-masing indikator, yang ditinjau melalui persentase ketercapaian indikator di tahun 2019 terhadap target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Predikat yang diberikan terbagi atas 5 (lima) predikat, yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, dengan kriteria batas nilai dan makna sebagai berikut.

1. Kriteria “Sangat Tinggi” (Interval nilai realisasi kinerja 91% ≤ 100%)
2. Kriteria “Tinggi” (Interval nilai realisasi kinerja 76% ≤ 90%)
3. Kriteria “Sedang” (Interval nilai realisasi kinerja 66% ≤ 75%)
4. Kriteria “Rendah” (Interval nilai realisasi kinerja 51% ≤ 65%)
5. Kriteria “Sangat Rendah” (Interval nilai realisasi kinerja ≤ 50%)

Kriteria “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” menujukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara itu, kriteria “Sedang” cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Dan terakhir, kriteria

“Rendah” dan “Sangat Rendah” menujukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari 47 indikator kinerja daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, setelah dilakukan evaluasi terhadap ketercapaian indikator, terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja daerah yang belum mencapai target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB, Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB, Jumlah kunjungan wisata, Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB, Skor PPH Konsumsi, Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang, Persentase penurunan gangguan gamtibmas, dan Nilai SAKIP. Diantara kesembilan IKD tersebut, 4 diantaranya tergolong sangat rendah yaitu Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB, Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB, Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang dan Persentase penurunan gangguan kamtibmas.

Apabila dilihat berdasarkan predikatnya maka sebagian besar indikator kinerja pembangunan daerah ini sudah memiliki predikat sangat tinggi. Indikator kinerja pembangunan daerah yang memiliki predikat sangat tinggi berarti sudah memiliki tingkat ketercapaian >90 khsusnya untuk pencapaian IKD, namun untuk angka IKU terlihat bahwa hampir seimbang persentase yang capaiannya baik dan belum optimal.

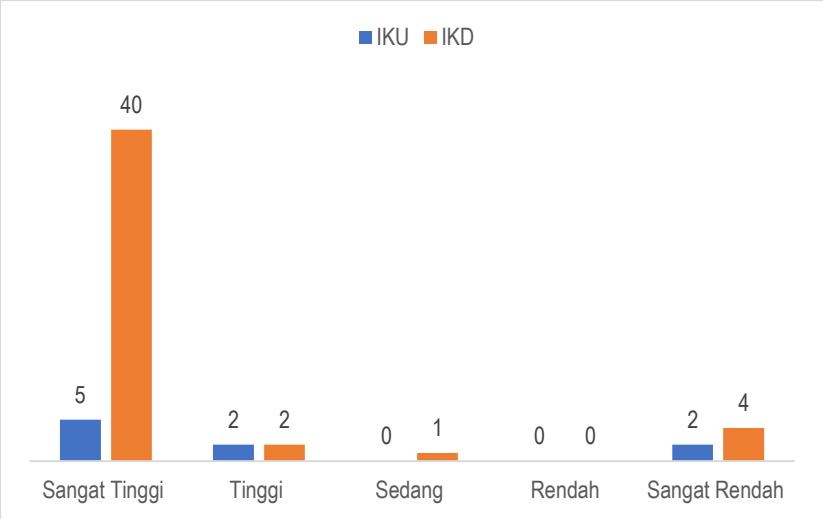

GAMBAR 2.58
REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KERJA DAERAH BERDASARKAN PREDIKAT

2.2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2020

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020 merupakan turunan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 tahun kelima. Dengan demikian, kinerja pembangunan 2020 secara garis besar tercermin dari capaian indikator makro daerah yang ditampilkan dalam **Tabel 2.98**. Target-target capaian indikator makro aspek ekonomi dan sosial di tahun 2020 yang tercantum dalam dokumen RKPD 2020 dibandingkan dengan realisasi capaiannya di Tahun 2022 untuk mendapatkan data trend yang menjadi proyeksi target capaian di tahun 2022.

Untuk aspek ekonomi, dari empat indikator makro ekonomi, dua indikator tidak mencapai target, yaitu indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi yang hanya mencapai 30% dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang hanya mencapai 99,26% Hal ini berpengaruh pada penentuan target capaian di tahun 2022 dan peninjauan ulang target capaian di tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2021.

Indikator makro sosial yang diambil sebanyak dua belas indikator, hampir sebagian besar atau 10 diantaranya mencapai target dan tiga sisanya belum mecapai target. Tiga indikator tidak mencapai target, yakni

indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 84,83% dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 68%, dan pengeluaran perkapita 11,67%. Sementara satu indikator yakni Gini Ratio tidak dapat diketahui tingkat realisasinya dikarenakan pada tahun 2020 belum tersedia. Kedua indikator makro sosial yang tidak mencapai target kemudian diproyeksikan ulang untuk mendapatkan target capaian di tahun 2022.

Namun, dalam menentukan proyeksi untuk tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dilakukan secara normatif seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh adanya wabah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, angka proyeksi indikator makro di tahun 2022 yang tertera di dalam dokumen RKPD Tahun 2022 mengalami reformulasi menyesuaikan prediksi dan asumsi perkembangan perekonomian yang akan terjadi akibat pandemi COVID-19.

TABEL 2.97
TINGKAT REALISASI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN TARGET TAHUN 2022

Aspek	Indikator Makro	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target 2021
Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,1	-1,87	30,00%	5,00
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	122.637.180,11	123.049.250,00	100,34%	136.680.325,07
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	81.430.929,94	80.829.310,00	99,26%	86.453.464,55
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per Kapita	Rp	32.239.601,33	14.639.157,88	45,00%	35.118.965,51
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Kapita	Rp	21.407.053,84	32.115.121,45	100,50%	22.213.557,35
	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	%	4,00	1,55	161,25%	2,31
Sosial	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,76	1,49	196,05%	1,52
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,33	72,39	100,08%	72,5
	Indeks Pendidikan	Poin	64,65	65,12	100,72%	64,67
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,96	101,93%	8,8
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,69	100,00%	12,72
	Indeks Kesehatan	Poin	81,85	82,35	100.62%	82,2
	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,2	73,53	100,45%	73,43
	Indeks Pengeluaran	Poin	70,59	70,74	100,21%	71,77
	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10.150	10.201	100,50%	10.550
	Tingkat Kemiskinan	%	6	6,91	86,83%	5,29
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,5	8,58	68,00%	5,45
	Gini Ratio	%	0,39 - 0,40	0,41	102,5-105,13%	0,39 - 0,4

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung 2020; LKPJ 2020; Hasil Analisis Tim RKPD, 2021

2.3. Evaluasi Penerapan SPM di Kabupaten Bandung

Semenjak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemaknaan Standar Pelayanan Minimal mengalami perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penetapan SPM. Pasal 18 UU 23/2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, Pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, serta (6) sosial.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU 23/2014 tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan SPM lalu ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing – masing yang ditetapkan oleh Kementerian terkait. Standar teknis tersebut dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan Menteri teknis lainnya kemudian menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar. Berikut adalah peraturan – peraturan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan SPM:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Mengacu pada peraturan – peraturan di atas, penerapan SPM ditujukan untuk mencapai target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Pemenuhan pelayanan dasar tersebut digunakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi terhadap pencapaian SPM ini kemudian digunakan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah, pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berikut adalah rekapitulasi hasil capaian penerapan SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2020.

TABEL 2.98
REKAPITULASI CAPAIAN SPM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
a	c	d	e	f
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun	
		502.617	622.887	80,69%
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	
		16.127	33.121	48,69%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun	
		75.322	133.993	56,21%
2	Kesehatan			
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil	
		76.833	79.131	97,10%
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin	
		70.120	75.534	92,83%
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir	
		66.856	71.937	92,94%
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah balita	
		321.541	356.541	90,18%
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar	
		72.709	170.270	42,70%
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif (15 - 59 tahun) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia produktif (15 - 59 tahun)	
		418.061	2.566.844	16,29%
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas)	
		110.237	327.577	33,65%
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara penderita hipertensi	
		111.504	1.306.543	8,53%
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus	
		32.847	321.846	10,21%
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang terlayani kesehatan	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	
		2.062	5.325	38,72%
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penderita tuberkulosis	
		11.825	16.479	71,76%
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunideficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara yang berisiko terinfeksi HIV	
		52.271	87.240	59,92%
3	Pekerjaan Umum			
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah rumah tangga	
		2.912.065	2.868.804	101,51%
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
		3.042.919	2.730.440	111,44%
4	Perumahan Rakyat			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah korban bencana	
		7	7	100,00%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah yang terkena relokasi	
		Tidak Dihitung	Tidak Dihitung	n/a
5	Tantribumlinmas			
5.1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah korban terdampak bencana	
		56.094	56.094	100,00%
5.2	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.	Jumlah korban terdampak bencana	
		56.094	56.094	100,00%
5.3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga yang dievakuasi	
		250.248	250.248	100,00%
5.4	pelayanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran	jumlah kasus yang ditangani dengan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran	jumlah kasus	
		282	232	121,55%
5.5	pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	jumlah kasus yang ditangani dengan pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	jumlah kasus	
		282	282	100,00%
5.6	pelayanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah kasus yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi	
		370	370	100,00%
5.7	pelayanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran	Jumlah desa yang mendapat pelayanan pemberdayaan	Jumlah desa yang ditagetkan mendapat pelayanan pemberdayaan	
		20	20	100,00%
5.8	pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	jumlah pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran (unit)	jumlah pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran yang ditargetkan (unit)	
		150	150	100,00%
5.9	pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	jumlah pelayanan yang terkena dampak	jumlah pelayanan yang ditargetkan terkena dampak	
		0	0	100,00%
6	Sosial			
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang	Jumlah warga negara penyandang disabilitas	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		150	150	100,00%
6.2	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		211	211	100,00%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		145	145	100,00%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		-	-	-
6.4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah warga negara korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial	
		5.328	5.328	100,00%

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2020

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian pemenuhan SPM di Kabupaten Bandung pada tahun 2020, didapatkan bahwa 61% jenis pelayanan dasar sudah memiliki predikat capaian Sangat Tinggi yaitu dengan tingkat capaian di atas 90%. Sebanyak 3% jenis pelayanan dasar memiliki predikat Tinggi yaitu dengan tingkat capaian antara 75% sampai 90%. Sementara itu, 6% jenis pelayanan dasar memiliki predikat Rendah dan 21% jenis pelayanan dasar memiliki predikat Sangat Rendah. Terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang tidak dihitung sehingga datanya N/A. Jenis pelayanan yang tidak dihitung tersebut adalah jenis pelayanan "Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti" dan "Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten" dikarenakan tidak ada pada program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung yang tertera pada Renstra dan Renja.

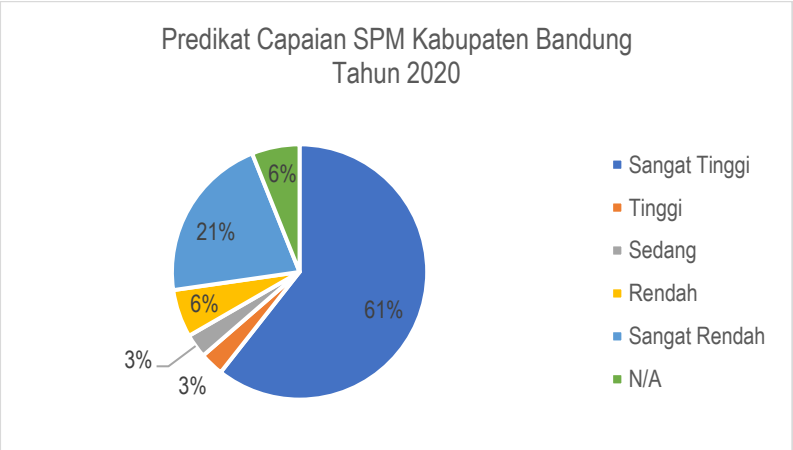

GAMBAR 2.59
PREDIKAT CAPAIAN SPM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019
Sumber: Data diolah dari Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2020

Apabila diidentifikasi berdasarkan jenis urusannya, capaian SPM bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan tantribumlinmas dikatakan sudah baik karena setiap jenis pelayanan dasar yang ditargetkan sudah memiliki capaian dengan predikat Sangat Tinggi dan Tinggi. Artinya, sebanyak lebih dari 75% penerima pelayanan sudah memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan dasar secara minimal. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun terdapat jenis pelayanan dasar dengan predikat Rendah dan Sangat Rendah, namun capaian pelayanan dasar dengan predikat Sangat Tinggi dan Tinggi masih lebih besar. Sebagian besar jenis pelayanan di bidang pendidikan baru memenuhi target capaian kurang dari 65%. Sebanyak lebih dari 35% penerima layanan belum memperoleh haknya untuk mendapatnya beberapa jenis pelayanan dasar secara minimal di bidang pendidikan.

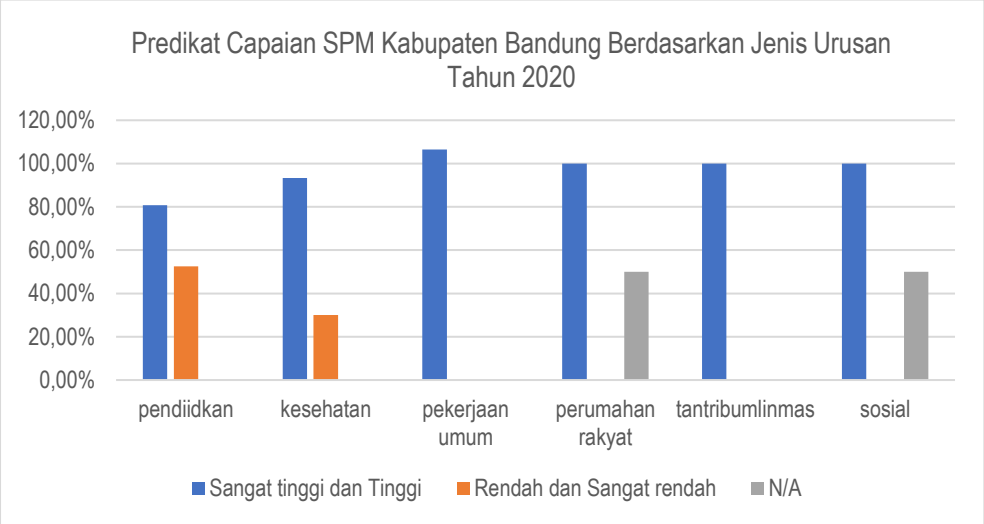

GAMBAR 2.60
PREDIKAT CAPAIAN SPM KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN JENIS URUSAN TAHUN 2019
Sumber: Data diolah dari Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2020

Jenis pelayanan dasar yang masih harus ditingkatkan capaiannya karena memiliki predikat Rendah dan Sangat Rendah adalah sebagai berikut.

TABEL 2.99
PREDIKAT CAPAIAN SPM KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN JENIS URUSAN TAHUN 2019

SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian	Predikat
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	56,21%	Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	59,92%	Rendah
Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	48,69%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	42,70%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	16,29%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	33,65%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	8,53%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	10,21%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	38,72%	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah dari Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2020

2.4. Kondisi Covid-19 di Kabupaten Bandung Tahun 2020

2.4.1. Dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung

Pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 terdampak secara signifikan oleh adanya penyebaran virus Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Wabah Covid-19 mulai merebak di Tiongkok, tepatnya

di daerah Wuhan pada Desember 2019 dan secara cepat menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Penyebaran virus ini lebih cepat dibandingkan dengan wabah-wabah penyakit serupa lainnya, seperti SARS dan MERS, dikarenakan tingginya pergerakan manusia yang mempercepat proses penyebaran. Ditambah lagi dengan masa inkubasi yang cukup panjang, yakni 2-14 hari yang menghambat proses deteksi dan penanganan dini. Mengingat pesatnya penyebaran Covid-19 di dunia, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai wabah berstatus darurat atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Istilah ini didefinisikan sebagai peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan masyarakat bagi negara-negara lain melalui penyebaran penyakit secara internasional dan membutuhkan respons internasional yang terkoordinasi.

Perkembangan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bandung dimulai sejak munculnya kasus positif pertama pada tahun 2020. Hingga saat ini, per 1 Juni 2021, total kumulatif kasus yang ada di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 14.576 orang dengan kasus aktif sebanyak 801 kasus (5,50%) dan jumlah yang meninggal akibat Covid-19 adalah sebanyak 255 jiwa (1,75%) serta terdapat 13.520 jiwa (92,76%) yang sembuh. Adapun persentase keterpakaian bed isolasi rumah sakit adalah sebesar 74% dari 289 bed. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang terpapar Covid-19 mengalami kesembuhan, namun penanganan penderita Covid-19 tersebut cukup berdampak pada penuhnya keterpakaian infrastruktur kesehatan di Kabupaten Bandung. Jika dikomparasi dengan rekapitulasi di tingkat provinsi, kasus aktif di Kabupaten Bandung lebih rendah, yakni di Provinsi Jawa Barat terdapat 9,51% kasus aktif. Meski demikian, persentase kasus Covid-19 yang meninggal di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan di Kabupaten Bandung, yaitu hanya 1,34% kasus yang meninggal di tingkat provinsi. Secara lebih rinci, berikut adalah rekapitulasi kasus Covid-19 di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Bandung.

TABEL 2.100
REKAPITULASI KASUS COVID-19 DI INDONESIA, PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG

	Total Kasus Konfirmasi	% Kasus Aktif	% Sembuh	% Meninggal
Indonesia	1.816.041	5,59 %	91,6 %	2,8 %
Jawa Barat	312.633	9,51 %	89,16 %	1,34 %
Kabupaten Bandung	14.576	5,50 %	92,76 %	1,75 %

Ket: Data update per 30 Mei 2021; Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021.

Dilihat dari persebarannya, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kasus aktif lebih tinggi. Pada rentang waktu 17-30 Mei 2021, 5 (lima) kecamatan dengan kasus aktif terbanyak adalah Pameungpeuk, Bojongsoang, Cileunyi, Rancaekek dan Ciparay. Akan tetapi, 5 (lima) kecamatan dengan kasus kematian Covid-19 terbanyak ada di Kecamatan Ciwidey, paseh, Majalaya, Ibun dan Ciparay. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kecamatan yang sarana dan prasarana kesehatannya masih memadai untuk menekan tingkat kematian Covid-19 meskipun kasus aktif Covid-19nya tinggi. Sebaliknya, ada beberapa kecamatan yang sarana dan prasarana kesehatannya kurang memadai untuk menangani kasus Covid-19 yang ada di kecamatannya, meskipun jumlah kasus aktifnya lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan kurang meratanya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung. Selengkapnya, pemaparan jumlah kasus aktif di Kabupaten Bandung untuk setiap kecamatannya dapat dilihat pada **Gambar 2.61**.

Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, teridentifikasi beberapa desa yang memiliki tingkat risiko persebaran Covid-19 yang lebih tinggi dibanding desa lainnya. Secara umum, terdapat 1 desa dengan kluster Covid-19 yang memiliki kasus aktif Covid-19 yang tinggi atau terdapat lebih dari 5 rumah kasus Covi-19 dalam 1 RT dalam suatu desa, yakni Desa Sugihmukti di Kecamatan Pasirjambu. Sulitnya akses sarana dan prasarana penanganan dan pengawasan penyebaran Covid-19 dapat melatarbelakangi tingginya risiko di desa tersebut. Secara lebih rinci, peta zona risiko Covid-19 per desa di Kabupaten Bandung dapat dilihat di **Gambar 2.63**.

Selain dari sisi kesehatan, adanya pandemi Covid-19 juga berdampakpenurunan ekonomi global secara pesat dan mengakibatkan adanya kontraksi pada hampir seluruh sektor perekonomian, khususnya kinerja sektor keuangan, industri, pariwisata, jasa, dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, munculnya kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan *social distancing*, sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berimbas pada seluruh aspek pembangunan Kabupaten Bandung. Aspek-aspek yang paling terdampak dari adanya pandemi ini mencakup kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Meski demikian, seiring dengan berkembangnya pandemi, terdapat optimisme pada proses vaksinasi masal Covid-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), distribusi vaksin Covid-19 mulai dilakukan di awal tahun 2021 dan penyelenggaraan vaksinasi sudah dilakukan bertahap untuk kalangan prioritas.

Hingga 7 Juni 2021, secara umum 9 dari 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah mendapatkan 1 dosis vaksin Covid-19. Tahap I menyasar tenaga kesehatan dan sudah tercapai 103,69% untuk vaksinasi dosis 1 dan 94,80% untuk vaksinasi dosis 2. Pada Tahap II, dilakukan vaksinasi yang menyasar kelompok prioritas lanjut usia, dan petugas publik. Tingkat distribusi vaksinasi Covid-19 untuk petugas publik lebih tinggi dibandingkan kelompok lanjut usia, baik untuk vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Semakin banyaknya masyarakat yang menerima distribusi vaksin Covid-19 dapat menjadi harapan semakin cepatnya pemulihan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Secara lebih rinci, progres vaksinasi dapat dilihat pada **Tabel 2.102**.

TABEL 2.101
PROGRES VAKSINASI COVID-19 DI NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT, DAN KABUPATEN BANDUNG

	Nasional[1]		Provinsi Jawa Barat[1]		Kabupaten Bandung[2]	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Vaksinasi Dosis 1						
Tenaga Kesehatan	1.468.764	103,69%	181,701	104,93%	7.558	88,87%
Lanjut Usia	21.553.118	16,35%	4.403.983	9,86%	312.789	6,28%
Petugas Publik	17.327.167	73,13%	2.195.338	72,7%	162.812	47,84%
Vaksinasi Dosis 2						
Tenaga Kesehatan	1.468.764	94,80%	181,701	95,42%	7.558	88,87%
Lanjut Usia	21.553.118	10,73%	4.403.983	6,94%	312.789	2,97%
Petugas Publik	17.327.167	43,24%	2.195.338	54,94%	162.812	39,47%

Sumber: [1]https://vaksin.kemkes.go.id/ (Data per 7 Juni 2021); 2Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Data per 1 Juni 2021)

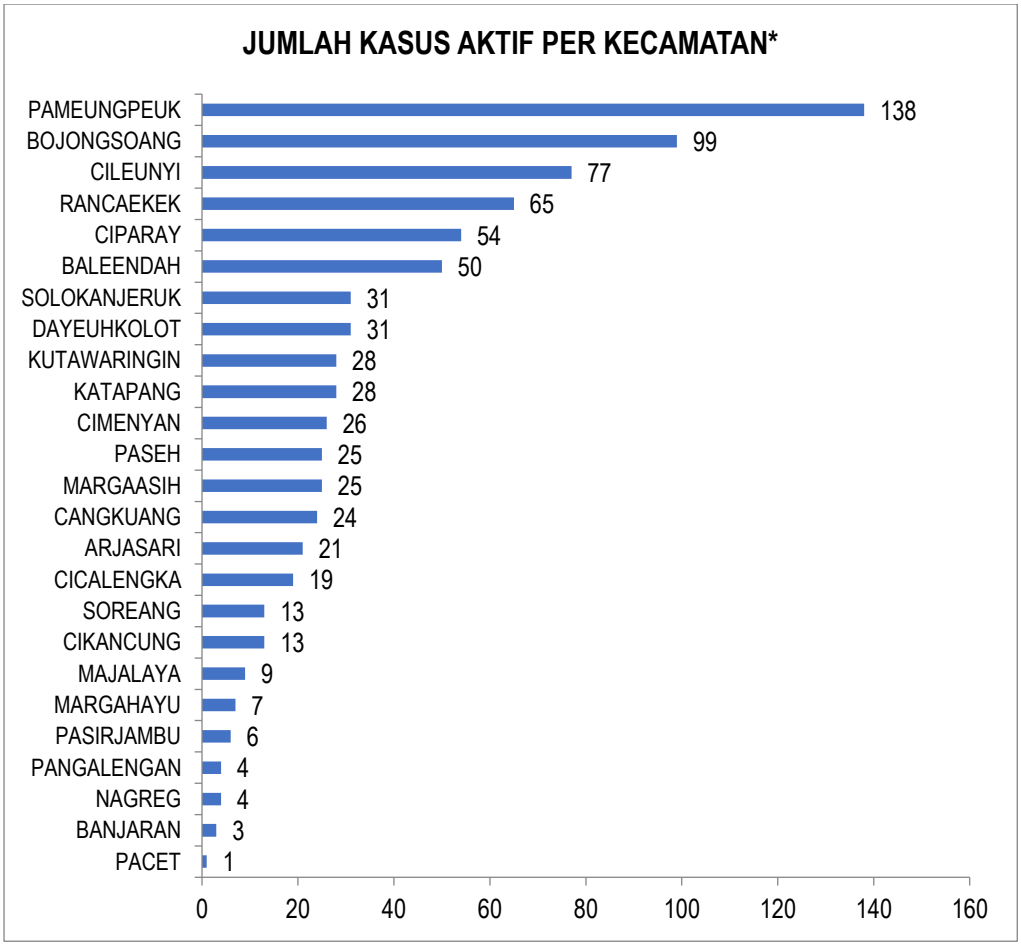

GAMBAR 2.61
JUMLAH KASUS AKTIF COVID-19 PER KECAMATAN
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021; Data update per 1 Juni 2021

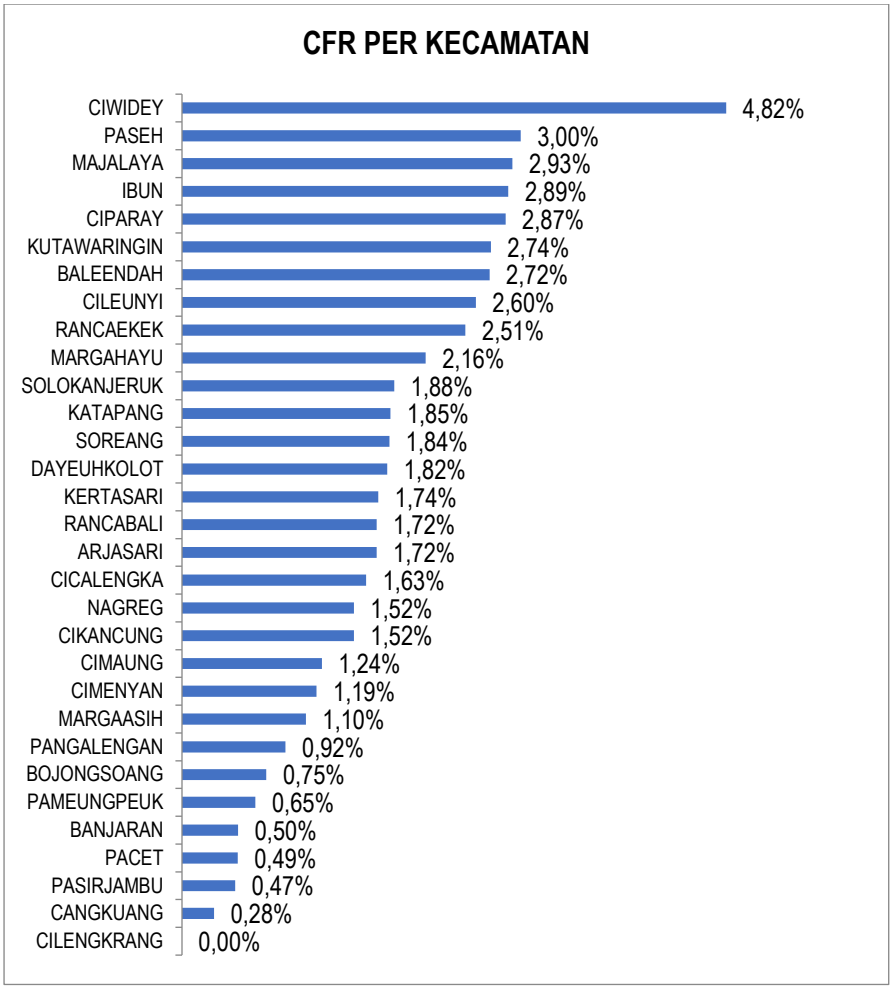

GAMBAR 2.62
TINGKAT KEMATIAN COVID-19 PER KECAMATAN
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021; Data update per 1 Juni 2021

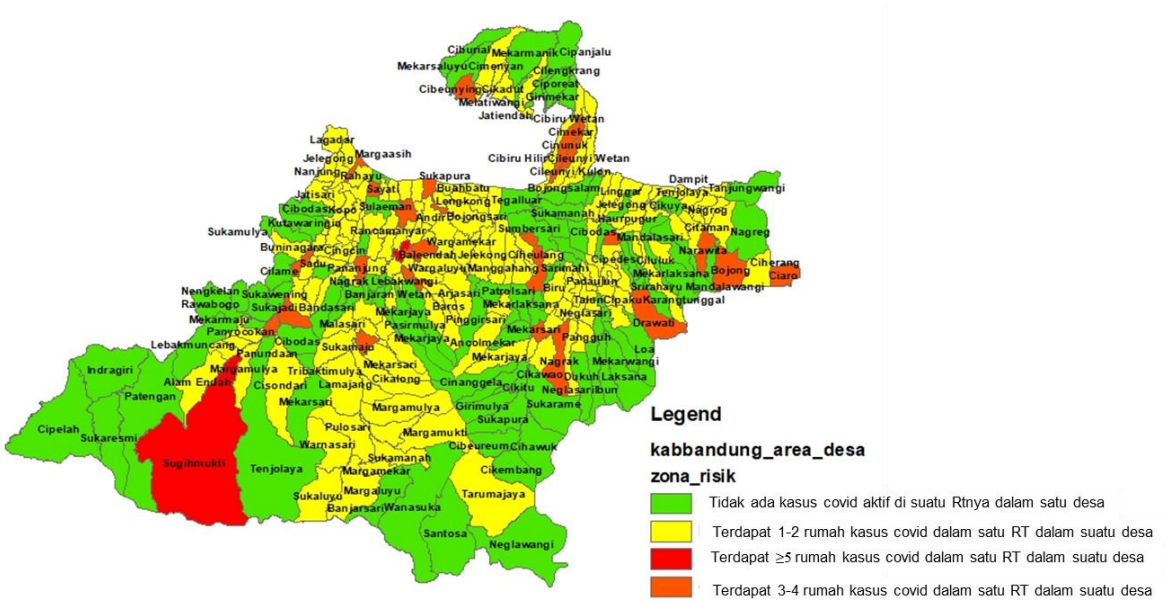

GAMBAR 2.63
PETA ZONA RISIKO COVID-19 PER DESA DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021; Data update per 1 Juni 2021

2.4.2. Upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung

Covid-19 telah membawa dampak yang besar terhadap aktivitas masyarakat di Kabupaten Bandung selama tahun 2020. Dalam merespon terhadap fenomena tersebut, upaya-upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung meliputi upaya promotif, upaya kuratif, dan upaya preventif.

2.4.2.1. Upaya Promotif

Upaya promotif mengenai cara pencegahan COVID-19 sangat penting diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemberian informasi mengenai cara transmisi dan tingkat keparahan penyakit juga dapat diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Upaya promotif ditempuh melalui upaya-upaya berikut.

i. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

ii. Advokasi 3M (Mencuci tangan. Memakai masker. Menjaga jarak. Mengurangi kerumunan. Mengurangi mobilitas)

Pemberian informasi bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan memanfaatkan media yang ada seperti melalui media sosial dan media cetak, seperti poster dan pamflet san lain-lain. Saat ini sudah tidak lagi menggaungkan 3M sebagai langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19. Berkaca pada adanya ledakan-ledakan setelah libur panjang, strategi pencegahan dari 3M menjadi 5M yakni menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mobilitas, interaksi penduduk yang tinggi, keramaian kerumunan ini terbukti dalam riset studi epidemiologi terakhir menjadi pemicu ledakan-ledakan kasus perburukan pandemi di satu wilayah. Makna gerakan 5M protokol kesehatan adalah sebagai pelengkap aksi 3M. yaitu:

1. Memakai masker,
2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir,
3. Menjaga jarak,
4. Menjauhi kerumunan, serta
5. Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah :

- Kampanye GEMA 3 M (Gerakan Masyarakat 3 M) pada tanggal 3 Nopember 2020 secara serempak di semua Puskesmas: dengan sasaran tempat-tempat Umum, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja.
- Penyebaruarsan dengan Media elektronik kerjasama dengan Diskominfo melalui Iklan Layanan Masyarakat lewat Megatron depan Al-Fathu.
- Penyebarluasan dengan Media elektronik melalui Radio kandaga dari Mulai Bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 setiap hari kerja.
- Distribusi Masker sebanyak 151.418 pcs.
- Pembuatan media cetak maupun digital.

iii. Advokasi Gerakan Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan upaya promotif dan preventif guna meningkatkan pola hidup sehat di masyarakat. GERMAS didukung oleh kebijakan Presiden dalam peraturan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017. Harapan dengan adanya GERMAS adalah untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan yang disebabkan karena perilaku masyarakat yang tidak sehat serta meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Untuk itu pembudayaan GERMAS di lingkungan internal instansi pemerintah; pelibatan aktif sektor non pemerintah mulai dari Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Institusi Pendidikan dan Perguruan Tinggi, melalui:

1. Peningkatan aktivitas fisik;
2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Diharapkan GERMAS ber-PHBS harus menjadi perubahan perilaku yang menjadi budaya di masyarakat. Selain itu, Gerakan Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah salah satu upaya pencegahan penularan virus corona yang perlu secara terus menerus disosialisasikan. Hal ini dilakukan dengan cara himbauan, penyebaran brosur, advokasi, juga pemantauan pemasangan perangkat cuci tangan di depan rumah, toko, maupun perkantoran dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan GERMAS, telah disusun draft regulasi peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

iv. Kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan Covid-19
Upaya dalam memerangi COVID-19 tidak mungkin dihadapi dengan mengerahkan kemampuan sendiri. Hal ini memberi indikasi bahwa membangun jaringan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat menjadi suatu kebutuhan.

Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengatasi permasalahan bidang kesehatan tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pelaku pembangunan yang berasal dari lintas sektor, dunia usaha, institusi pendidikan, masyarakat sipil dan media massa, baik yang ada di pusat maupun daerah. Dalam konteks program promosi kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral dalam menggalang dan menghubungkan sumber daya antar pemangku kepentingan mengarah pada sinergi dan pencapaian tujuan bersama.

Di sisi lain, keberhasilan suatu kerjasama sangat bergantung pada komitmen yang diberikan oleh pihak yang bermitra. Kerjasama ini diarahkan untuk menghasilkan sinergi dari upaya yang berkelanjutan dalam menyongsong era adaptasi kebiasaan baru. Kondisi dimana masyarakat dihadapkan pada pilihan harus hidup berdampingan dengan ancaman COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat di semua tatanan pada kondisi sebelum terjadi pandemi.

Kegiatan yang teah dilakukan adalah dengan:
1. Save the Children dalam rangka penyebarluasan informasi
2. Kepolisian dan TNI dalam kegiatan desa tangguh COVID-19
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kegiatan Desa Tangguh Covid-19
4. Dinas Tenaga Kerja dalam rangka penyediaan Tempat Isolasi bagi penyintas Covid-19
5. Kementrian Agama dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesantren (satgas Covid-19 di pesantren)

v. Advokasi melalui media komunikasi, informasi dan edukasi
Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan upaya pencegahan covid-19 baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program. Oleh karena itu faktor informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan upaya pencegahan Covid-19.

Berbagai cara dan media telah dilakukan dalam menyampaikan informasi pencegahan covid-19 kepada masyarakat antara lain melalui KIE perorangan, kelompok, media sederhana, media tradisional, dan mass media serta lokakarya dan seminar baik secara online maupun offline. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat di tempuh melalui berbagai even kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektonik diberbagai kanal seperti media sosial, media cetak, radio, televisi, maupun internet yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah memberikan kemudahan dan menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas kegiatan Advokasi KIE, harus diimbangi oleh kemampuan sumber daya manusia yang merupakan salah satu ikon penting kegiatan. Perlu disadari kondisi keterbatasan SDM pelaksana dilapangan sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu ditempuh upaya antisipasi agar pelaksanaan kegiatan advokasi KIE tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Inventarisasi dan identifikasi tenaga pelaksana yang siap pakai secara kualitatif perlu dilaksanakan sehingga dapat membantu dalam menentukan kebijakan, disamping memberikan pelatihan teknis operasional yang tepat sasaran.

Pada penggunaan sarana modern faktor SDM pelaksana advolasi KIE, menjadi sangat berperan mengingat secanggih apapun peralatan yang disediakan, tidak akan berfungsi optimal apabila para pelaksana tidak memiliki kemampuan sepadan. Kemampuan mengoperasikan peralatan, penyusunan materi, kreativitas serta inovasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya pencegahan Covid-19.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Kerjasama dengan Dikominfo dalam penyebarluasan informasi tentang Covid-19 secara elektronik baik melalui Radio Kandaga secara terus-menerus, Megatron depan mesjid Al-Fathu, media sosial lainnya seperti face book, instragram dan website.
2. Penyebarluasan informasi dilaksanakan juga dengan Radio PR FM 107,5 News Channel membahas tentang Penumonia dan informasi Covid-19 kerjasama dengan Save The Children
3. Kampanye 3 M di semua tatanan (di Institusi pendidikan, keluarga, fasilitas kesehatan, tempat kerja dan tempat Umum
4. Membuat surat himbauan untuk melaksanakan penyebarluasan informasi kepada seluruh Puskesmas se-Kabupaten Bandung.
5. Membuat media informasi media cetak (seperti booklet, baliho, spanduk, leaflet, stiker, roll banner dan media elektronik (membuat Narasi Radio, Jadwal siaran radio sebanyak 42 kali dari mulai Oktober 2020 sampai dengan 2021, menyiapkan Iklan layanan Masyarakat tentang Covid-19.
6. Menyusun buku pedoman Isolasi Mandiri
7. Terlibat dalam pemberian edukasi saat PSBB dan PPKM tentang pencegahan covid-19
8. Menyusun pedoman upaya Pencegahan Covid-19
9. Memberikan edukasi tentang covid-19 kepada Pesantren, Tempat Kerja, Balai Desa

2.4.2.2. Upaya Preventif

Upaya preventif, dilakukan melalui:

a. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
b. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
c. Peningkatan surveilans bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung (3T)
d. Mengembangkan jaring pengaman sosial mandiri maupun dengan pemerintah
e. Penegakan hukum protokol kesehatan di setiap jenjang aktivitas masyarakat
f. Peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 di masyarakat Kabupaten Bandung

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan pada tanggal 6 Maret 2020 telah mengeluarkan edaran, diantaranya:

1. Nomor P/441/6801/III/2020/Dinkes tentang Himbauan Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja ditujukan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan baik FKTP maupun FKRTL di wilayah Kabupaten Bandung.
2. Nomor B/441/6803/III/2020/Yankes tentang Kesiapsiagaan menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ditujukan kepada Kepala Puskesmas agar di puskesmas waspada terhadap gejala-gejala yang mengarah Covid-19, yang terdiri dari 4 kriteria, yaitu PDP, ODP, kasus probable dan kasus konfirmasi, melakukan deteksi dini dan respon di wilayah berupa peningkatan upaya surveilans, Penyelidikan Epidemiologi dan melaksanakan alur penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung dan algoritma COVID-19.

Sebagai bentuk antisipasi dalam pencegahan infeksi, maka pada tanggal 13 Maret 2020, Kepala Dinas Kesehatan membentuk Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/7481/III/2020/DINKES tentang Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Kabupaten Bandung.

Pada tangal 17 Maret 2020 dikeluarkan Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 800/748/BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Bahwa dimulainya WFH (Work Form Home) dalam rangka mencegah penularan COVID-19 diantara pegawai Pemda Kabupaten Bandung.

Sebagai respon atas meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Kabupaten Bandung menyatakan keadaan darurat dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 360/Kep.235-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 2020. Diktum keempat dalam keputusan tersebut mengatakan bahwa selama penetapan status keadaan tertentu darurat bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bandung cukup tinggi, sedangkan tidak ada Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, maka Pemerintah daerah berinisiatif menjadikan salah satu RSUD sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19 dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 445/Kep.266-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum daerah Majalaya sebagai Rumah Sakit Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga bisa menerima rujukan sebelum ke RS Rujukan Provinsi. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator dan menyiapkan 12 tempat tidur untuk perawatan kasus PDP atau suspek maupun kasus konfirmasi.

2.4.2.3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif, dilakukan melalui:

a. Peningkatan kapasitas daya tampung fasilitas kesehatan untuk penyintas Covid-19
b. Penyintas Covid-19 Tanpa Gejala diisolasi secara mandiri dengan pendampingan tenaga/kader kesehatan setempat

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi implementasi rencana tahun 2020 menunjukkan masih adanya beberapa program yang memiliki tingkat realisasi di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya kinerja pelaksanaan program. Pada subbab ini, akan dikaji beberapa persoalan strategis di Kabupaten Bandung, yaitu pemaparan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2020.

2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Pada **Tabel 2.103** dijabarkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 berikut dengan keterkaitannya dengan isu strategis Kabupaten Bandung sesuai dengan yang telah dirumuskan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

TABEL 2.102
EVALUASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TERHADAP ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2020
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	Berdasarkan data capaian: • Jumlah posyandu tidak ada penambahan di 2020. Jumlah balita menurun 614, tidak ada perubahan rasio posyandu dan balita dibandingkan tahun 2019. • Terjadi penurunan jumlah balita gizi buruk dibandingkan tahun 2019, tetapi juga diikuti dengan penurunan jumlah balita gizi baik, dari semula 246.426 di tahun 2019 menjadi 201.929 di tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Masih rendahnya penyerapan anggaran program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin karena kendala penduduk miskin melengkapi persyarakatan SKTM sehingga berpengaruh kepada waktu pengklaiman yang tidak sesuai target • Sulitnya pengendalian protokol kesehatan dalam pemberian bantuan sosial • Kelangkaan APD saat awal-awal masa penanganan Covid-19 • Di awal masa pendemi, Kabupaten Bandung belum memiliki laboratium khusus untuk mengecek hasil tracing Covid-19 sehingga hasil test keluar cukup lama.
Masih perlunya penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dan PPKS	Berdasarkan data capaian: • Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dari angka 5,94 menjadi 6,91 di athun 2020. Padahal di tahun 2015 – 2019 telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara kontinu. • Terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Tahun 2020 diakibatkan PHK besar-besaran dibeberapa sektor. TPT 2020 sebesar 8,58 sedangkan ditahun 2019 sebesar 5,48. • TPT di Kabupaten Bandung lebih tinggi dari TPT Nasional yang sebesar 7,07% namun masih lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat yang sebesar 10,46%. • Terdapat penambahan penduduk miskin baru di tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • PHK besar-besaran akibat Covid-19 • Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal karena tidak seimbangnya *supply demand* di masa pendemi. (bahkan pengusaha-pengusaha pun mengurangi jumlah pegawai)

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2020
		• Kurangnya assessment terhadap kebutuhan penerima manfaat. • Kurangnya pengendalian, evaluasi, serta tindak lanjut untuk menilai keberjalanan dan kebermanfaatan bantuan. • Sinkronisasi data penerima bantuan ditemukan kelemahan dimana satu KK bisa menerima lebih dari satu bantuan. karena menggunakan data NIK, sebaiknya diganti dengan data KK.
Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan	Pemanfaatan ketahanan dan kemandirian pangan	Berdasarkan data capaian: • Laju pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ADHK mengalami penurunan dari 1,28 menjadi 0,19. Ditinjau dari peringkatnya, sektor menempati peringkat ketiga, di bawah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. • Rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengkonsumsi bahan makanan energi yang melebihi standar kecukupan gizi, namun konsumsi terhadap bahan makanan yang berprotein masih kurang Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Ketersediaan bahan pangan di awal masa pandemi turun akibat permintaan yang meningkat sehingga harganya melonjak tinggi. • Penutupan pasar pada masa awal PSBB menyebabkan terhambatnya sistem distribusi pangan (kebutuhan di warung sulit). • Kualitas konsumsi di Kab. Bandung belum beragam. • Belum optimalnya kerjasama antar *stakeholder* dalam peningkatan PPH Konsumsi. • Melonjaknya harga pakan ternak akibat Covid karena sumbernya impor.
Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan	Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan	Berdasarkan data capaian: • Pengelolaan koperasi yang sebagian besar masih konvensional atau tradisional • Masih banyaknya Koperasi Aktif yang tidak melaksanakan RAT • Adanya pergeseran/revolusi industri 4.0 yang menuntut perkembangan perekonomian menjadi terdigitalisasi dan berbasis daring. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020:

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2020
		• SDM yang kurang berkualitas dalam mengelola kelembagaan koperasi salah satunya disebabkan faktor usia. • Penurunan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19. • Pengurangan jam operasional selama pandemi mengurangi pendapatan pelaku perdagangan. • Belum optimalnya pegembangan koperasi berkualitas dari hulu sampai hilir (kelembagaan, pemberdayaan, pengelolaan keuangan, dsb). • UKM dan koperasi belum secara maksimal menyentuh digitalisasi • Kurangnya pembinaan pengawas pengurus kepada koperasi • Belum adanya pengklasifikasian koperasi sesuai kinerjanya untuk dapat melihat koperasi berprestasi. • PSBB mengurangi jumlah wisatawan Kabupaten Bandung • Hilangnya *multiplier effect* secara ekonomi pariwisata bagi masyarakat karena berkurangnya jumlah wisatawan • DTW di Kabupaten Bandung kebanyakan berada di lahan swasta (bukan aset daerah). • Promosi dalam bentuk pameran tidak berdampak siginifikan. • Data input LKPM dari investor ke sistem seringkali berbeda dari kondisi nyata lapangan sehingga monev ke daerah perlu ditingkatkan. • Nilai investasi di level usaha mikro, kecil, dan menengah belum tertekam dengan baik.
Masih terbatasanya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	Berdasarkan data capaian: • Terjadi penurunan jumlah guru dan peningkatan jumlah murid di Tahun 2020 baik ditingkat SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yang menyebabkan rasio guru dan murid meningkat dari 1:26 menjadi 1:32 untuk SD/Sederajat dan 1: 23 menjadi 1: 54 untuk SMP/Sederajat. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Sikap masyarakat yang "sekolah negeri *minded*"mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi • Kuota akreditasi lembaga pendidikan formal dan nonformal ditentukan oleh pusat dan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi baik dari sisi anggaran maupun jumlah kuota

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2020
		• Pembelajaran jarak jauh tidak optimal dalam menjamin partisipasi dan pemahaman siswa terahadap materi. • Sulit sosialisasi kepemudaan secara menyeluruh karena terbatasnya anggaran dan luasnya cakupan wilayah • Belum tersosialisasikannya perpustakaan online secara optimal.
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Berdasarkan data capaian: • Terjadi peningkatan gangguan kamtibnas hingga 74% dikarenakan pandemi covid dan pilkada. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Belum optimalnya kerjasama dan dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. • Rasio tenaga pengamanan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk belum terpenuhi secara optimal. • Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung patroli belum optimal kesediannya. • Terjadi peningkatan gangguan kamtibmas dimasa pandemi dan pemilu 2020.
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Reformasi birokrasi	Berdasarkan data capaian: • Kurangnya konsistensi pengukuran dan penghitungan indikator oleh perangkat daerah. • Kurangnya konsistensi penetapan kinerja yang mengacu pada RPJMD maupun RKPD. • Pelaksanaan penerbitan KIA belum optimal. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Beberapa indikator penilaian belum memiliki kriteria SMART. • Belum optimalnya jaringan komunikasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam laporan deteksi dini. • Terjadinya *human error* dalam menginput data perencanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan.
Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa	Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan	Berdasarkan data capaian: • Pada tahun 2020 dari 270 desa 56 desa berstatus Desa Mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020:

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2020
		• Sumber Daya Manusia di desa belum sepenuhnya melek teknologi sehingga menyulitkan sosialisasi/pelatihan berbasis online. • Pendampingan dalam perencanaan desa kurang berjalan secara baik karena belum optimalnya kuantitas maupun kuantitas SDM di lingkungan internal pemerintah daerah.
Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan	Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan	Berdasarkan data capaian: • Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan drainase • Pemanfaatan lahan perumahan belum di sertai dengan penyediaan saluran drainase yang terintegrasi • Sumber air di lokasi kebakaran masih minim. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Kurangnya sarana dan prasarana kebencanaan seperti gedung pengungsian. • Tidak adanya unit pelaksana di tingkat kecamatan sehingga terkendala jarak tempuh ke wilayah bencana. • Masih sulitnya akses ke wilayah-wilayah yang terkena bencana.
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau	Pengendalian pencemaran lingkungan	Berdasarkan data capaian: • Jumlah volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Bandung adalah 1.309 ton/hari, sedangkan yang berhasil tertangani hanya 510,24 ton/hari. Hal ini berarti persentase volume sampah yang tertangani baru sebesar 43,43% saja. • Indeks kualitas air masih berada pada angka 29,67, menurun -2,08% dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020: • Masih kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah serta alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah. • Alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan sampah yang belum terpenuhi
Kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel	Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah	Berdasarkan data capaian:

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Evaluasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2020
		• Tingkat kemantapan jalan yang masih di bawah 100% menjadi salah satu persoalan dalam bidang infrastruktur di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bandung sebesar 85,87%. • Minimnya sarana pelayanan publik khusus bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel. • Masih terdapat irigasi rusak ringan dan berat sebanyak 8,64 untuk irigasi teknis dan 447,89 untuk irigasi non teknis meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. • Persentase drainase dalam kondisi baik menurun dibandingkan tahun lalu yang asalnya 2,88% tahun 2019 menjadi 1,75% tahun 2020. <u>Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020</u>: • Ada keterbatasan terhadap sumber air baku. Sebagian sumber air minum ada yang dikuasi oleh swasta. • Minimnya anggaran terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait penanganan kebakaran. • Belum tersedianya data penunjang untuk mendukung penanganan kebakaran (kondisi jalan, sumber air, dsb).

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Diantara penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Di Kabupaten Bandung, penyelenggaraan urusan kesehatan memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,36% atau termasuk kategori sangat baik. Adapun Indeks Kesehatan daerah mencapai 82,35% atau termasuk kategori sangat baik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 memiliki kinerja yang baik dan dibuktikan dengan indeks kesehatan yang tinggi.

Meski demikian, pada tahun 2020 merupakan tahun dengan banyak tantangan di bidang kesehatan. Selain terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 sebagai permasalahan utama urusan kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam upaya pelayanan kesehatan berupa belum optimalnya pencegahan dan intervensi stunting, pencegahan penyakit tidak menular dan menular, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tingginya kasus kematian ibu dan bayi (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021). Selain itu, beberapa tantangan lain yang masih perlu ditangani mencakup:

a. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
b. Pelayanan kesehatan dengan orang gangguan jiwa berat,
c. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
d. Pelayanan kesehatan usia lanjut, dan
e. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular HIV dan hepatitis

Adapun isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung meliputi:

1. Menurunkan stunting, AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi)
2. Meningkatkan sistem jaminan kesehatan nasional
3. Meningkatkan penguatan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan cakupan imunisasi
5. Menurunkan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Evaluasi kegiatan urusan kesehatan di Kabupaten Bandung tahun 2020 menunjukkan adanya beberapa kegiatan yang terselenggarakan dengan kurang optimal dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Berikut adalah ringkasan evaluasi kegiatan kesehatan lingkup kabupaten dengan kinerja yang rendah.

TABEL 2.103
EVALUASI KEGIATAN KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KINERJA RENDAH DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

No.	Evaluasi	Faktor Penghambat
1	Jumlah puskesmas yang terakreditasi sangat rendah	Secara indikator jumlah akreditasi puskesmas semua puskesmas sudah terakreditasi namun secara pencapaian keuangan masih rendah dikarenakan banyak kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandmei covid-19
2	Jumlah pengadaan BHP Pengendalian DBD, HIV dan Sifilis, vaksin refrigator varsar	Pengadaan BHP Sifilis dan DBD gagal dalam pengiriman barang
3	Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey Re- akreditasi	Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 Tanggal 29 Juli 2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendididkan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4	Jumlah penerima Insentif Tenaga Kesehatan-Prioritas Masyarakat Miskin diluar Kuota Jamkesmas di Kabupaten Bandung	Tidak terserap dikarenakan terdapat alokasi dari sumber dana lain dan SP2D tidak keluar
5	Jumlah pengadaan sanitarian kit	Pengadaan sanitasi kit gagal masuk ke Omspan

No.	Evaluasi	Faktor Penghambat
6	Rendahnya cakupan lansia yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah lansia yang banyak membutuhkan lebih banyak tenaga dan anggaran dalam pemeriksaan lansia. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, yakni hanya terdapat 602 posbindo dari 4.125 RW di Kabupaten Bandung
7	Belum terpenuhinya cakupan *Universal Health Coverage*	Tidak dimungkinkannya untuk menambah kepesertaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) oleh Kemendagri, belum semua pegawai non-PNS yang diikutsertakan dalam kepesertaan BPJS, dan rendahnya kepedulian industri-industri tertentu dengan program BPJS

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2020

Selain kegiatan urusan kesehatan lingkup kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lapangan. Berdasarkan data ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) RSUD Cicalengka memiliki presentasi kelengkapan yang belum optimal pada tahun 2020 yang berarti bahwa sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Cicalengka belum sepenuhnya memenuhi standar sarana, prasarana dan alat kesehatan, sehingga diperlukan upaya – upaya untuk melengkapinya.

Berdasarkan ringkasan kondisi dan permasalahan pelayanan kesehatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Bandung selama tahun 2020 cukup kompleks. Selain menanggulangi dan memulihkan kesehatan masyarakat di kala pandemi Covid-19, permasalahan kesehatan di Kabupaten Bandung juga masih perlu menanggulangi berbagai masalah kesehatan seperti stunting dan kematian ibu dan bayi serta masalah pelayanan kesehatan seperti pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, penyelenggaraan UHC untuk masyarakat miskin, dan akreditas puskesmas. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tahun 2022 untuk urusan pelayanan kesehatan memerlukan inovasi yang komprehensif, yakni inovasi yang dapat mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak Covid-19 dan juga mendorong penanganan masalah-masalah bidang kesehatan lainnya, seperti penyakit menular dan tidak menular, stunting, serta dapat mereformasi sistem pelayanan kesehatan agar tepat sasaran.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Perencanaan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada urusan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014. Secara rinci permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2020 dijabarkan pada **Tabel 2.104**. sebagai berikut.

TABEL 2.104
FAKTOR PERMASALAHAN KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	• Terjadi penurunan jumlah guru dan peningkatan jumlah murid di Tahun 2020 baik ditingkat SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yang menyebabkan rasio guru dan murid meningkat dari 1:26 menjadi 1:32 untuk SD/Sederajat dan 1: 23 menjadi 1: 54 untuk SMP/Sederajat. • Sikap masyarakat yang "sekolah negeri *minded*"mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi • Kuota akreditasi lembaga pendidikan formal dan nonformal ditentukan oleh pusat dan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi baik dari sisi anggaran maupun jumlah kuota • Pembelajaran jarak jauh tidak optimal dalam menjamin partisipasi dan pemahaman siswa terahadap materi.

No	Urusan	Permasalahan
		• Sulit sosialisasi kepemudaan secara menyeluruh karena terbatasnya anggaran dan luasnya cakupan wilayah • Belum tersosialisasikannya perpustakaan online secara optimal.
2	Kesehatan	• Jumlah posyandu tidak ada penambahan di 2020. Jumlah balita menurun 614, tidak ada perubahan rasio posyandu dan balita dibandingkan tahun 2019. • Terjadi penurunan jumlah balita gizi buruk dibandingkan tahun 2019, tetapi juga diikuti dengan penurunan jumlah balita gizi baik, dari semula 246.426 di tahun 2019 menjadi 201.929 di tahun 2020. • Masih rendahnya penyerapan anggaran program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin karena kendala penduduk miskin melengkapi persyarakatan SKTM sehingga berpengaruh kepada waktu pengklaiman yang tidak sesuai target • Sulitnya pengendalian protokol kesehatan dalam pemberian bantuan sosial • Kelangkaan APD saat awal-awal masa penanganan Covid-19 • Di awal masa pendemi, Kabupaten Bandung belum memiliki laboratium khusus untuk mengecek hasil tracing Covid-19 sehingga hasil test keluar cukup lama.
3	Pekerjaan Umum	• Tingkat kemantapan jalan yang masih di bawah 100% menjadi salah satu persoalan dalam bidang infrastruktur di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bandung sebesar 85,87%. • Minimnya sarana pelayanan publik khusus bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel. • Masih terdapat irigasi rusak ringan dan berat sebanyakl 8,64 untuk irigasi teknis dan 447,89 untuk irigasi non teknis meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. • Persentase drainase dalam kondisi baik menurun dibandingkan tahun lalu yang asalnya 2,88% tahun 2019 menjadi 1,75% tahun 2020. • Ada keterbatasan terhadap sumber air baku. Sebagian sumber air minum ada yang dikuasi oleh swasta. • Adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase perkotaan • Keterbatasan anggaran sehingga belum menyasar sepenuhnya pada ruas-ruas jalan strategis moda share. • Masih banyak daerah kabupaten bandung tidak terdapat bahu jalan • Ketidaksesuaian standa pembangunan jalan • Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalm pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan drainase • Masih rendahnya pengamanan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada terhadap bahaya • Masih tingginya tingkat kerusakan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan • Masih belum tersedianya sistem informasi basis data yang mempermudah pengambilan keputusan dalam rencana penanganan • Belum optimalnya pengelolaan drainase dan belum optimalnya pemanfaatan air baku • Belum optimalnya upaya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan untuk mengurangi risiko terjadinya banjir tahunan serta belum optimalnya penataan wilayah sempadan sungai. • Ketersediaan anggaran yang tidak ideal
4	Perumahan	• Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik • Belum maksimalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara fasilitas sanitasi terbangun • Jumlah Rumah Tidak Layak Huni masih tinggi

No	Urusan	Permasalahan
5	Penataan Ruang	• Masih banyaknya ruang terbuka hijau yang masih belum ditata secara optimal serta belum jelasnya aset tanah pada lokasi yang dibangun untuk penataan ruang terbuka hijau. • Penyelenggaraan Tata Ruang belum optimal karena penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat persetujuan dan diperdakan • Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan lahan sesuai rencana tapak • Masih banyak bangunan yang belum ber-IMB.
6	Perencanaan Pembangunan	• Kurangnya konsistensi pengukuran dan penghitungan indikator oleh perangkat daerah. • Kurangnya konsistensi penetapan kinerja yang mengacu pada RPJMD maupun RKPD. • Beberapa indikator penilaian belum memiliki kriteria SMART. • Belum optimalnya jaringan komunikasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam laporan deteksi dini. • Terjadinya *human error* dalam menginput data perencanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan. • Munculnya aturan baru terkait dengan perencanaan di waktu yang mendesak yang menyebabkan sinkronisasi program dan kegiatan kurang optimal • Regulasi pemerintah pusat dan daerah tidak satu waktu menyebabkan daerah harus mengadaptasi dari awal ketentuan tersebut • Kurang koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar perangkat daerah
7	Perhubungan	• Rendahnya aksesibilitas dan mobilitas penghubungkan daerah - dearah yang terisolir, meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan penggunaan kendaraan massal oleh masyarakat • Munculnya pasar-pasar tumpah dan PKL yang menyebabkan terganggunya lalulintas; • Adanya parkir-parkir liar di badan jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan; • Kondisi jalan yang rusak dibeberapa lokasi; • Kurangnya anggaran untuk pembangunan jalan serta pemasangan perlengkapan jalannya; • Rendahnya disiplin pengemudi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan tingginya hambatan samping. • Munculnya pasar-pasar tumpah dan PKL yang menyebabkan terganggunya lalulintas; • Adanya parkir-parkir liar di badan jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan; • Kondisi jalan yang rusak dibeberapa lokasi; • Kurangnya anggaran untuk pembangunan jalan serta pemasangan perlengkapan jalannya; • Rendahnya disiplin pengemudi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan tingginya hambatan samping.
8	Lingkungan Hidup	• Jumlah volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Bandung adalah 1.309 ton/hari, sedangkan yang berhasil tertangani hanya 510,24 ton/hari. Hal ini berarti persentase volume sampah yang tertangani baru sebesar 43,43% saja. • Indeks kualitas air masih berada pada angka 29,67, menurun -2,08% dibandingkan tahun 2019. • Masih kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah serta alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah. • Alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan sampah yang belum terpenuhi
9	Pertanahan	• Penyelenggaraan Tata Ruang belum optimal karena penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat persetujuan dan diperdakan

No	Urusan	Permasalahan
		• Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan lahan sesuai rencana tapak • Masih banyak bangunan yang belum ber-IMB. • Inventarisasi kepemilikan lahan masih belum maksimal.
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	• Pemenuhan kinerja KIA belum maksimal
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Masih terdapatnya balita yang menyandang status balita gizi buruk. Disisi lain, angka Kematian Bayi masih tinggi. • Masih terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila. • Belum maksimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
12	Keluarga Brencana dan Keluarga Sejahtera	• Masih adanya Pasangan Usia Subur yang belum mau/mengerti tentang pentingnnya Program Keluarga Berencana • Pandemi menyebabkan terkendalanya pelaksanaan program dan kegiatan akibat refocusing pada urusan KB dan Keluarga sejahtera
13	Sosial	• Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dari angka 5,94 menjadi 6,91 di athun 2020. Padahal di tahun 2015 – 2019 telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara kontinu. • Terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Tahun 2020 diakibatkan PHK besar-besaran dibeberapa sektor. TPT 2020 sebesar 8,58 sedangkan ditahun 2019 sebesar 5,48. • TPT di Kabupaten Bandung lebih tinggi dari TPT Nasional yang sebesar 7,07% namun masih lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat yang sebesar 10,46%. • Terdapat penambahan penduduk miskin baru di tahun 2020. • PHK besar-besaran akibat Covid-19 • Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal karena tidak seimbangnya supply demand tenaga kerja di masa pendemi. (bahkan pengusaha-pengusaha pun mengurangi jumlah pegawai) • Belum adanya intervensi terhadap tenaga kerja informal. • Kurangnya assessment terhadap kebutuhan penerima manfaat. • Kurangnya pengendalian, evaluasi, serta tindak lanjut untuk menilai keberjalanan dan kebermanfaatan bantuan. • Sinkronisasi data penerima bantuan ditemukan kelemahan dimana satu KK bisa menerima lebih dari satu bantuan. karena menggunakan data NIK, sebaiknya diganti dengan data KK.
14	Ketenaga-kerjaan	• Terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Tahun 2020 diakibatkan PHK besar-besaran dibeberapa sektor. TPT 2020 sebesar 8,58 sedangkan ditahun 2019 sebesar 5,48. • TPT di Kabupaten Bandung lebih tinggi dari TPT Nasional yang sebesar 7,07% namun masih lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat yang sebesar 10,46%. • Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap iklim ketenagakerjaan termasuk bertambahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengenaan status dirumahkan • Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal karena tidak seimbangnya supply demand di masa pendemi. (bahkan pengusaha-pengusaha pun mengurangi jumlah pegawai) • Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam standar kompetensi nasional dan internasional
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	• Masih banyaknya Koperasi Aktif yang tidak melaksanakan RATAdanya pergeseran/revolusi industri 4.0 yang menuntut perkembangan perekonomian menjadi terdigitalisasi dan berbasis daring.

No	Urusan	Permasalahan
		• SDM yang kurang berkualitas dalam mengelola kelembagaan koperasi salah satunya disebabkan faktor usia. • Penurunan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19. • Pengurangan jam operasional selama pandemic mengurangi pendapatan pelaku perdagangan. • Belum optimalnya pegembangan koperasi berkualitas dari hulu sampai hilir (kelembagaan, pemberdayaan, pengelolaan keuangan, dsb). • UKM dan koperasi belum secara maksimal menyentuh digitalisasi • Kurangnya pembinaan pengawas pengurus kepada koperasi • Belum adanya pengklasifikasian koperasi sesuai kinerjanya untuk dapat melihat koperasi berprestasi.
16	Penanaman Modal	• Promosi dalam bentuk pameran tidak berdampak siginifikan. • Data input LKPM dari investor ke sistem seringkali berbeda dari kondisi nyata lapangan sehingga monev ke daerah perlu ditingkatkan. • Nilai investasi di level usaha mukro, kecil, dan menengah belum tertekam dengan baik.
17	Kebudayaan	• Banyak nya kelompok seni yang belum memiliki legalitas hukum dan kurang aktif • Banyaknya situs cagar budaya yang belum ditetapkan • Penghasilan seniman yang sangat terkena imbas pandemik covid 19
18	Kepemudaan dan Olahraga	• Dengan adanya prokes pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga dibatasi • Sulitnya melakukan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di masa pandemi covid 19 • Luas Wilayah Kabupaten Bandung yang luas menyulitkan dalam pembinaan • Anggaran untuk Kepemudaan dan Keolahragaan masih di rasa kurang mendukung • SDM Kepemudaan yang masih belum memadai
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	• Gangguan Kamtrantibmas di masyarakat bersifat dinamis. Gangguan kamtrantibmas 2020 lebih banyak karena dampak kondisi pandemi covid-19 • Birokrasi yang panjang, anggaran terbatas, ego sektoral menghambat pelaksanaan program kegiatan. • Kondisi pandemi dan refocusing mengurangi optimalisasi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	• Banyaknya Rencana Pendidikan dan Pelatihan yang tidak terselenggara sebagai akibat dari pencegahan penyebaran Virus Covid 19 • Pada Masa Pandemi banyak lembaga penyelenggara diklat yang mengurangi intensitas penyelenggaraan diklat • Tidak semua pegawai di Kabupaten Bandung melek teknologi Informasi, sehingga proses pembinaan pegawai agak sedikit terhambat • Belum tersajikannya data kepegawaian secara lengkap sebagai bahan pertimbangan penempatan pegawai • Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada sehingga pengisian kekosongan jabatan tidak berjalan secara maksimal karena sesuai amanat UU 10 tahun 2016 dalam proses pengisian jabatan harus melalui prosedur tertentu • Pengelola administrasi kepegawaian perangkat daerah belum memahami apabila pelayanan kenaikan pangkat berbatas waktu. • Pengelola kepegawaian dan PNS kurang merespon informasi bahan tidak lengkap • Proses verifikasi dan validasi kurang maksimal karena berbatas waktu. • Kurangnya pemahaman dalam optimalisasi perencanaan, pengendalian dan operasional pajak daerah • Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam pendapatan daerah

No	Urusan	Permasalahan
		• Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah • Belum optimalnya penerimaan pajak daerah
21	Ketahanan Pangan	• Laju pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ADHK mengalami penurunan dari 1,28 menjadi 0,19. • Rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengkonsumsi bahan makanan energi yang melebihi standar kecukupan gizi, namun konsumsi terhadap bahan makanan yang berprotein masih kurang • Ketersediaan bahan pangan di awal masa pandemi turun akibat permintaan yang meningkat sehingga harganya melonjak tinggi. • Penutupan pasar pada masa awal PSBB menyebabkan terhambatnya sistem distribusi pangan (kebutuhan di warung sulit). • Kualitas konsumsi di Kab. Bandung belum beragam. • Belum optimalnya kerjasama antar stakeholder dalam peningkatan PPH Konsumsi. • Melonjaknya harga pakan ternak akibat Covid karena sumbernya impor. • Ketersediaan pangan pokok masih didominasi oleh beras dan terigu, sedangkan ketersediaan umbi-umbian masih sangat terbatas. Hal tersebut akan menghambat upaya diversifikasi konsumsi pangan pokok. • Intervensi kerawanan pangan terkendala dengan budget constraint apabila penanganannya belum lintas program/lintas sektor; Masih lemahnya sistem logistik pangan
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Sumber Daya Manusia di desa belum sepenuhnya melek teknologi sehingga menyulitkan sosialisasi/pelatihan berbasis online. • Pendampingan dalam perencanaan desa kurang berjalan secara baik karena belum optimalnya kuantitas maupun kuantitas SDM di lingkungan internal pemerintah daerah. • Penggantian pengurus Pemdes menyulkitkan kontinuitas pelatihan • Kepastian hukum Badan Usaha Milik Desa belum jelas.
23	Statistik	• Updating Process terhadap data cenderung lambat. • Masih terdapatnya data-data yang tidak sinkron antara data BPS dengan data yang diterbitkan PD lain.
24	Kearsipan	• Belum memadainya regulasi kearsipan. • Belum memadainya SDM aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan kearsipan. • Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan/ pengelolaan kearsipan antara Disarpus dengan PD lainnya sehingga belum bersinergi.
25	Komunikasi dan Informatika	• Setiap PD memiliki petugas dokumentasi yang diangkat oleh Kepala Dinas namun seringkali berganti-ganti sehingga nformasi tidak update dan terputus. • Pengaduan masyarakat seringkali direspon lambat (Lebih dari 7 hari). • Biaya anggaran akomodasi dan peralatan, sarpras untuk pembangunan film tergolong besar. • Masyarakat Kab. Bandung cenderung pasif untuk mempromosikan produk unggulannya melalui media sosial • Aplikasi yang masih disimpan diluar server diskominfo sulit dikoordinasi.
26	Perpustakaan	• Belum tersosialisasikannya perpustakaan online secara optimal. • Pandemi Covid – 19 berdampak pada pengurangan jumlah pemustaka Kabupaten bandung secara signifikan
27	Pertanian	• Dana/Pengeluaran untuk pengembangan pertanian berkurang (refocusing tahun 2020 pada Dinas Pertanian); • kurangnya investasi swasta dalam pengembangan pertanian; • pengaruh tingkat harga komoditi pertanian yang sangat fluktuatif faktor eksternal yang menjadi penghambat pertumbuhan sektor pertanian adalah selama tahun 2020

No	Urusan	Permasalahan
		demand terhadap komoditi pertanian Kabupaten Bandung berkurang diakibatkan kebijakan PSBB sehingga komoditi pertanian yang biasa dipasarkan di Jakarta, kota Bandung,Tanggerang dan daerah sekitar berkurang. • Indeks harga yang diterima petani rendah diakibatkan rendahnya harga komoditas pertanian selama tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19 (kebijakan PSBB) • Tidak adanya kebijakan tentang stabilitas harga komoditi pertanian (sebelum pandemi covid-19); • Kebijakan PSBB telah menyebabkan komoditi pertanian mengalami penurunan harga bahkan tidak laku dipasaran, hal ini menyebabkan minat petani untuk bercocok tanam menjadi menurun dikarenakan tidak memiliki modal untuk kembali berusaha.
28	Kehutanan	-
29	Energi dan Sumberdaya Mineral	-
30	Pariwisata	• PSBB mengurangi jumlah wisatawan Kabupaten Bandung • Hilangnya multiplier effect secara ekonomi pariwisata bagi masyarakat karena berkurangnya jumlah wisatawan • DTW di Kabupaten Bandung kebanyakan berada di lahan swasta (bukan aset daerah). • Belum optimal kerjsama antara stakeholder (PHRI,Perhutani,Indonesia Power) terkait penguasaaan lahan oleh Perhutani dan PTPN, • Data belum terintegrasi
31	Kelautan dan Perikanan	• Masih rendahnya adopsi teknologi budidaya perikanan • Rendahnya produktivitas usaha perikanan • Rendahnya Daya saing usaha perikanan • Masih rendahnya pemberdayaan dan kelembagaan kelompok usaha perikanan
32	Perdagangan	• Penurunan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19. • Pengurangan jam operasional selama pandemic mengurangi pendapatan pelaku perdagangan. • Ekspor terhambat karena PSBB akibat pembatasan layanan transportasi selama Pandemi
33	Industri	• Pengurangan pegawai sebagai dampak pandemic • Produksi terhambat bahan baku. • Belum terbiasanya perangkat daerah dan para UMKM, IKM dan koperasi dalam memanfaatkan teknologi dalam mengelola kegiatannya.
34	Ketransmigrasian	-

Sumber: Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2020 yang telah dipaparkan pada subbab 2.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian pembangunan Kabupaten Bandung, pembangunan pada beberapa sektor cenderung mengalami perbaikan, kendati demikian, beberapa capaian ini untuk beberapa indikator masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2020. Dengan demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka untuk periode perencanaan tahun 2022, pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada penguatan dan optimalisasi kinerja dalam penyelesaian enam isu strategis pembangunan sebagaimana termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 yang memperhatikan kondisi daerah dan mendukung visi misi Bupati terpilih.

2.6. Inovasi Pembangunan Daerah

Beberapa inovasi pelayanan masyarakat juga dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung guna merespon terhadap tantangan pembangunan yang ada. Sehubungan dengan tema RKP 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang tematik, holistik, inovatif dan spasial, khususnya dalam merespon tantangan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial dengan melanjutkan dan mengembangkan 5 (lima) inovasi pembangunan yang telah berjalan dari tahun 2018. Inovasi-inovasi tersebut meliputi: "Si Jalu Mampang" (Sinergi Jaga Lumbung Pangan), "SIBEDAS" (Sistem Terintegrasi Berorientasi Mikro DAS di Kawasan Perdesaan Kecamatan Cimenyan), "SAKEDAP" (Sistem Layanan Kependudukan Terpadu), "SAE-KIR" (Sistem Aplikasi Elektronik KIR), dan "SABUK MAS" (Sistem Bangun UMKM dan Koperasi untuk Masyarakat). Inovasi-inovasi ini telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dan terus dikembangkan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. Dengan demikian, diharapkan inovasi-inovasi ini dapat mendorong percepatan pemulihan perekonomian masyarakat yang inklusif pada tahun 2022.

2.6.1. Si Jalu Mampang (Sinergi Jaga Lumbung Pangan)

Pandemi COVID-19 berdampak pada isu ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil termasuk pelaku usaha sektor pertanian. Rantai pasok pangan dan produk pertanian terputus dan tersegmentasi karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dan komunikasi pembeli-penjual (Perdana dkk, 2020). Sistem rantai pasok pangan belum terbentuk dan tertata dengan baik, sehingga ketersediaan dan distribusi pangan untuk seluruh wilayah Kabupaten Bandung belum merata, terutama karena wilayah Kabupaten Bandung yang secara geografis luas dan tersebar. Di sisi lain, Simpul pangan di tingkat Kabupaten Bandung dan desa belum terbangun sehingga dikhawatirkan antisipasi terhadap dampak pandemi COVID-19 atau bencana daerah lainnya (seperti banjir dan longsor) masih lemah. Di samping, koordinasi dan kolaborasi antar pelaku simpul pangan (yaitu pada ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan) masih belum terbentuk dan bersinergi.

Namun demikian, sektor pertanian masih memiliki performa yang baik di tengah konstraksi ekonomi yang berat akibat dampak pandemi COVID-19 karena relatif masih mengalami pertumbuhan positif. Hal ini berkontribusi baik pada perekonomian Kabupaten Bandung yang masih didominasi oleh sektor sekunder dan primer. BPS Jawa Barat (2020) mencatat pada triwulan II tahun 2020 sektor pertanian di Jawa Barat mengalami pertumbuhan 7,64% y-on-y dan pada triwulan III tahun 2020 mencapai 3,67% y-on-y.

Hal ini mendesak dan mengajarkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan strategi penguatan sistem ketahanan pangan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat masyarakat (desa/RW/RT) sehingga di tengah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada saat pandemi COVID-19 masyarakat Kabupaten Bandung masih leluasa memiliki akses terhadap pangan. Strategi tersebut selain dapat menguatkan ketahanan pangan, juga meningkatkan daya saing produk pangan dan pertanian yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil sektor pangan dan pertanian. Berkenaan dengan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berinisiasi mengembangkan inovasi "Si Jalu Mampang" atau Sinergi Jaga Lumbung Pangan. Inovasi ini bertujuan untuk:

1. Membangun ekosistem simpul pangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk berbagai lembaga pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi/Lembaga penelitian, perbankan, dan komunitas masyarakat.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan produk pangan dari tingkat regional Kabupaten sampai dengan tingkat Lembaga kemasyarakatan yang paling kecil (seperti RT/RW atau Desa).
3. Menstabilisasi ketersediaan pasokan pangan di wilayah Kabupaten Bandung.
4. Menata pengendalian dan pengawasan distribusi pangan.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Inovasi "Si Jalu Mampang" dikembangkan secara multi tahun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip dasar inovasi ini adalah mengakselerasi optimalisasi peranan lembaga/komunitas/agen terkait

pengembangan simpul pangan yang telah ada di Kabupaten Bandung dan menata interaksi di antara lembaga tersebut melalui pengembangan ekosistem simpul kolaborasi dan pemanfaatan TIK dalam sistem *open-innovation*. Pengembangan inovasi ini terbagi dalam beberapa tahapan dan keluaran:

1. Tahap 1: penguatan kelembagaan inovasi "Si Jalu Mampang", yang meliputi:
    a. Penyusunan regulasi dan kajian akademis.
    b. Pengembangan sistem database pangan aplikasi "Si Jalu Mampang" berbasis big data. Aplikasi ini merupakan sistem omnibus untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi database pertanian dan pangan yang mencakup:
        - Sistem informasi pangan (ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan).
        - Sistem informasi supply-demand produk pangan dan pertanian.
        - Sapu Tangan (Sistem Aplikasi Penyuluhan Pertanian).
        - Sistem aplikasi harga dan pasokan pangan dan bahan pokok penting.
        - Database lahan pertanian dan sumber daya pertanian lainnya
        - Database produksi pangan pada simpul produksi.
    c. Pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Tahap 2: pengembangan ekosistem dan stimulan petani dan pelaku simpul pangan.
3. Tahap 3: pembangunan sarana dan prasarana simpul pangan.
4. Tahap 4: Pemantapan

Pelaksanaan inovasi Si Jalu Mampang terdiri atas input, proses, output, dan outcome. Rincian masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Input

    Pengembangan inovasi "Si Jalu Mampang" memerlukan input, berupa:
    a. Sinergi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
    b. Aktor yang terlibat: petani/peternak dan unit pengolahan, pedagang/distributor, agen simpul pangan wilayah di tingkat Kabupaten (asosiasi pasar tani, toko tani Indonesia), agen simpul pangan di tingkat RT/RW/Desa (komunitas masyarakat: posyandu, karang taruna, RT/RW, BUM Desa, dll), Layanan logistik atau layanan hantaran: komunitas driver ojek online aplikasi dan non-aplikasi dan komunitas angkutan umum serta PT. POS, *Start-up* digital sebagai admin aplikasi, pihak swasta (BUMD, dan perusahaan logistik dan pangan, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
    c. Pembiayaan (APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, Swasta, Dana Wakaf).

2. Proses

Pelaksanaan pengembangan inovasi "Si Jalu Mampang" meliputi 4 tahapan utama yang diilustrasikan pada **Gambar 2.64**. Ekosistem simpul pangan menjadi target utama dalam inovasi ini, yang ditandai oleh pembagian peranan dan interaksi para pemangku kepentingan dengan jelas.

a. Penguatan sub-sistem produksi pangan dalam Kawasan produksi pertanian;
b. Pengembangan simpul pangan tingkat Kabupaten dan tingkat RT/RW/desa;
c. Penguatan kerja sama dan pengembangan jejaring simpul pangan;
d. Pengembangan sistem informasi terintegrasi;

Secara lebih rinci, berikut adalah ilustrasi proses bisnis "Si Jalu Mampang".

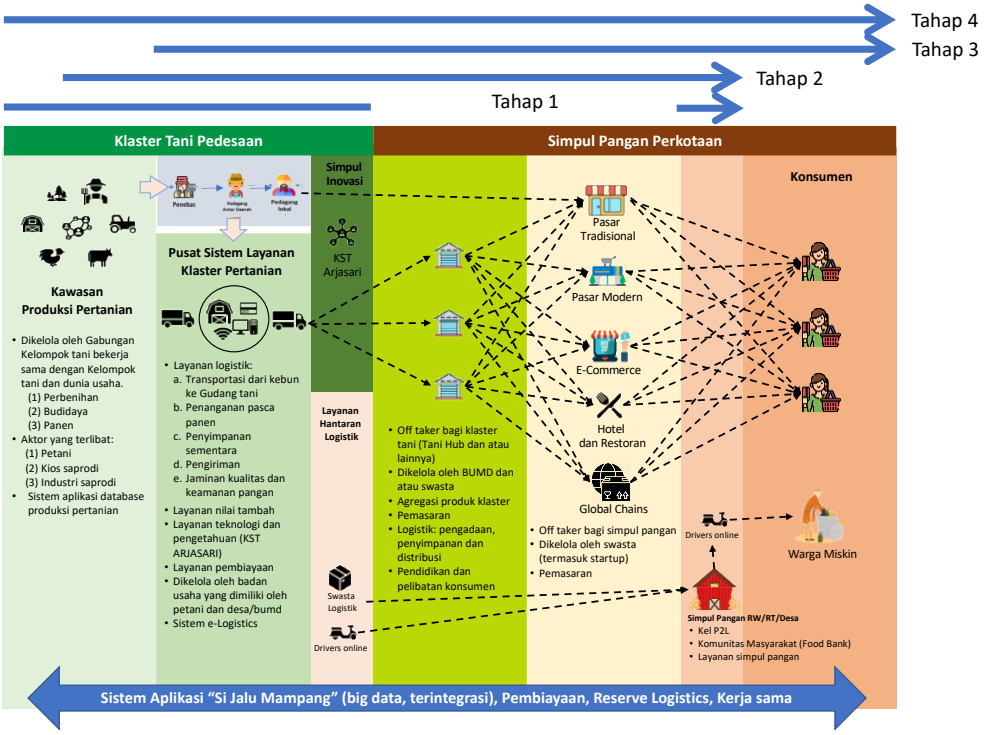

GAMBAR 2.64
PROSES BISNIS INOVASI "SI JALU MAMPANG"
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

3. Output
   a. Peraturan Daerah terkait dengan ketahanan pangan;
   b. Kajian akademis terkait dengan ketahanan pangan dan logistik pangan;
   c. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat;
   d. Sistem informasi ketahanan pangan, dan sistem informasi terkait dengan pangan dan pertanian lainnya;
   e. Sistem informasi terintegrasi ketahanan dan logistik pangan dalam aplikasi "Si Jalu Mampang";
   f. Fasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian berupa pendampingan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan;
   g. Pembangunan pusat layanan klaster pertanian dan pusat inovasi pertanian;
   h. Pembangunan pusat distribusi regional sebagai sarana pengelolaan distribusi pangan.

4. Outcome
   a. Terbangunnya ekosistem simpul pangan kondusif yang ditandai dengan kuatnya interaksi, kerja sama, dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan termasuk petani, pelaku usaha pertanian, dunia usaha, komunitas masyarakat, pasar, dan akademisi.
   b. Berkembangnya pusat inovasi pengembangan pangan dan pertanian.
   c. Berkembangnya pusat layanan klaster pertanian sebagai simpul pangan tingkat Kabupaten Bandung yang melayani wilayah Kabupaten Bandung juga Bandung Metropolitan.
   d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan walaupun di tengah
   e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha pangan dan pertanian.
   f. Meningkatnya keamanan pangan.
   g. Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung.

2.6.2. SIBEDAS (Sistem Terintegrasi Berorientasi Mikro DAS di Kawasan Perdesaan Kecamatan Cimenyan)

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, maka hal ini menjadi sinyal bahwa sungai beserta daerah alirannya telah menjadi isu permasalahan nasional. Intervensi struktural dan non struktural telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung diantaranya pembangunan polder Cieunteung dan tunnel Curug Jompong serta penertiban terhadap perusahaan yang mencemari sungai, namun hasilnya belum optimal. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1) luas genangan banjir tahun 2019 seluas 14.987,4 ha (Sumber: Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2019); 2) Indeksi Kualitas Air tahun 2019 senilai 30.3 (diatas ambang batas) (Sumber: DLH Kabupaten Bandung, 2020); 3) Tingkat Sedimentasi, Total Suspended Sediment (TSS) tahun 2016 sebesar 178 mg/l (Sumber: FTSL ITB, 2017).

Adapun isu khusus yang berkembang dalam melatarbelakangi konsep inovasi ini anatara lain:

a. Sulitnya mendapatkan data valid hasil pelaksanaan program/kegiatan factual sebagai bahan perencanaan
b. Banyaknya kegiatan infrastruktur kewilayahan dan lingkungan hidup secara subsatnsive tidak direncanakan
c. Sulitnya mengukur outcome kinerja secara tematik pada program dan kegiatan infrastruktur kewilayahan dan lingkungan hidup
d. Implemntasi program dan kegiatan infrastruktur kewilayahan dan lingkungan hidup tidak dapat disandingkan dengan program/kegiatan sejenis dari OPD/instansi lainnya, sehingga pada saat proses perendanaan tidak berdasarkan daya yang sistematis dan valid, hanya menampung usulan saja

Permasalahan DAS Citarum merupakan permasalahan bersifat *Multi-Dimensional* dengan beberapa permasalahan terkait penyusunan dokumen perencanaan dalam penanganan permasalahan DAS Citarum ini antara lain banyaknya kegiatan yang secara subtansif tidak dierencanakan, dokumen perencanaan sektor belum berdasarkan data yang sistematis dan valid, serta data belum terintegrasi sehingga sulit untuk dilakukan analisis pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perencanaan pembangunan harus bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS). Kaitan dengan permasalahan DAS Citarum, strategi dalam konsep SIBEDAS sesuai dengan sifat perencanaan pembangunan antara lain:

1. Aspek Holistik, dengan pengembangan perencanaan pembangunan partiisipatif mikro (Mikro DAS Management)
2. Aspek Integratif, melalui validitas dan pengembangan *big data* dalam Organisasi Digital. Data yang valid sangat penting karena akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan. Melalui data yang valid diharapkan Intervensi program/kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan data valid dan tersedianya big data, permasalahan yang sifatnya makro dapat dikaitkan secara mikro sehingga dapat menentukan pembagian peran aspek kinerja program/kegiatan serta tanggungjawab terhadap komitmennya tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga elemen aktor dan organisasi pembangunan.
3. Aspek Tematik, melalui pengembangan branding
4. Aspek Spasial, melalui deliniasi Mikro DAS.

   Anak sungai DAS Citarum melewati salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Cimenyan. Lokasi tersebut dipilih sebagai pilot project model perencanaan berkelanjutan berbasis Mikro DAS karena memiliki tema yang sama sebagai tangkapan air di hulu Sungai Cidurian, DAS Citarum, serta difokuskan untuk memperbaiki atau pengurangan sedimentasi Kawasan Bandung Utara (KBU).

Inovasi SIBEDAS memiliki dua inti yaitu: pertama, adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang valid, terkini dan bersifat serial dari hasil monitoring dan evaluasi. Data dan informasi tersebut didapatkan melalui pengukuran run off, tingkat sedimentasi, Indeks Kualitas Air, dan sampah yang tertangani dari suatu DAS Mikro di wilayah Kecamatan Cimenyan. Selanjutnya hasil pengukuran-pengukuran tersebut diharapkan menggambarkan upaya revitalisasi kawasan dan intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan

masyarakat serta stakeholder. Kedua, adalah membangun komitmen antar pihak baik dari Pemerintah (Pusat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan, Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cimenyan), masyarakat, komunitas maupun akademisi yang dituangkan dalam suatu dokumen yang disepakati bersama.

Tujuan dari SIBEDAS (Sistem Terintegrasi Berorientasi Mikro DAS di Kawasan Perdesaan Kecamatan Cimenyan) adalah untuk menentukan program/kegiatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun sasaran SIBEDAS adalah tersedianya data dan informasi valid, terkini, dan serial untuk bahan penyusunan perencanaan dalam rangka pencapaian target, tersedianya konsep pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat, serta tersedianya dokumen perencanaan berkelanjutan berbasis DAS Mikro di Kecamatan Cimenyan untuk kemudian diduplikasi di seluruh Desa di Kabupaten Bandung.

Berikut merupakan poin-poin aspek kebaruan inovasi SIBEDAS:

1. Model pembangunan mikro berkelanjutan (mulai dari bawah dan dari yang kecil);
2. Penggunaan lingkup ruang berdasarkan deliniasi DAS mikro;
3. Sistem monitoring kawasan salah satunya memanfaatkan model integrasi antar aplikasi dan antar indikator (tematik) dan alat ukur jarak jauh (belum ada pemantauan mikro DAS dari jarak jauh untuk mengetahui lebih detil dan melibatkan masyarakat)

Jika melihat konsep dari inovasi SIBEDAS untuk jangka panjang dapat berdampak pada reformasi sistem ketahanan bencana, karena SIBEDAS berperan disisi pemulihan lingkungan dengam program/kegiatan yang tepat sesuai kebutuhan di daerah DAS Citarum dalam hal ini di Kecamatan Cimenyan. Selain itu, program/kegiatan yang bersifat pemulihan lingkungan berlanjut pada pemulihan ekonomi pada masayarakat yang berada di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan inovasi SIBEDAS terdiri atas input, proses, *output*, dan *outcome*. Rincian masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Input

SIBEDAS merupakan program inovatif yang melibatkan berbagai unsur yang saling terintegrasi mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Untuk memudahkan keterlibatan tersebut maka dibuat ilustrasi menggunakan *Business Model Canvas* SIBEDAS sebagai berikut.

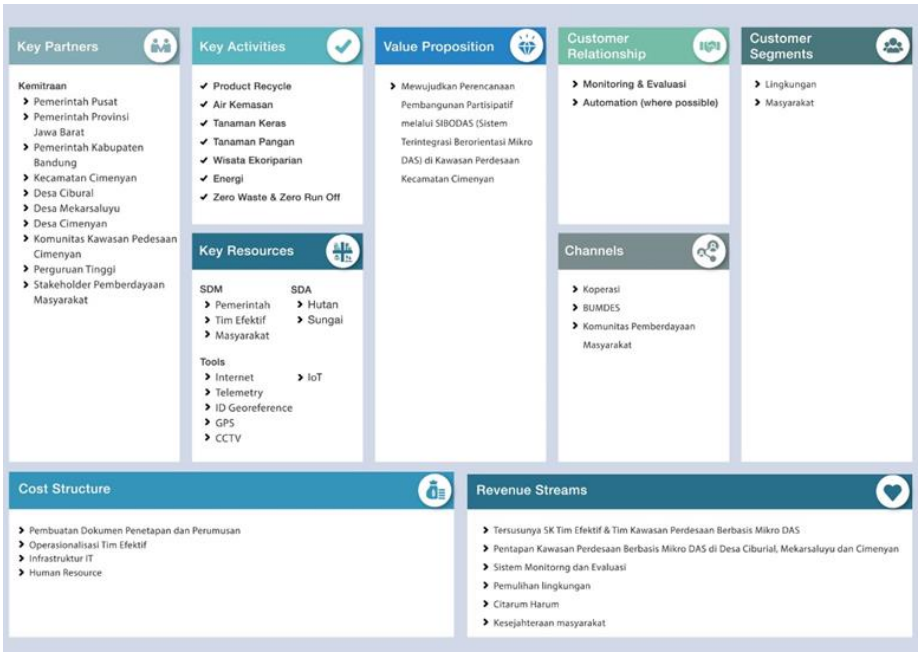

GAMBAR 2.65
BUSINESS MODEL CANVAS INOVASI SIBEDAS
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Selain *Business Model Canvas*, inovasi SIBEDAS didukung oleh sumber daya untuk mendorong keberhasilan impelementasi. Sumber daya memenuhi unsur manajemen terdiri dari *man* (SDM), money (uang), *material* (bahan baku), *machine* (peralatan mesin), *methods* (metode), *market* (pasar) dan ditambah *minute* (waktu), dan *technology*.

2. Proses

SIBEDAS akan dilakukan pada suatu kawasan/kampung sebagai pilot project dengan melibatkan unsur pemberdayan masyarakat dan pentahelix, teknologi (*smartfarming* dan IoT, *Artificial Intelegence*/AI, *Digital Monev*), sistem investasi mikro dan teknologi tepat guna lainnya. Diperlukan data kondisi eksisting di kawasan tersebut, apabila kondisi eksisting terdapat permasalahan contohnya penanaman kentang/sayuran dengan pola tanam yang salah yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi dan banjir maka perlu dilakukan rekayasa teknis.

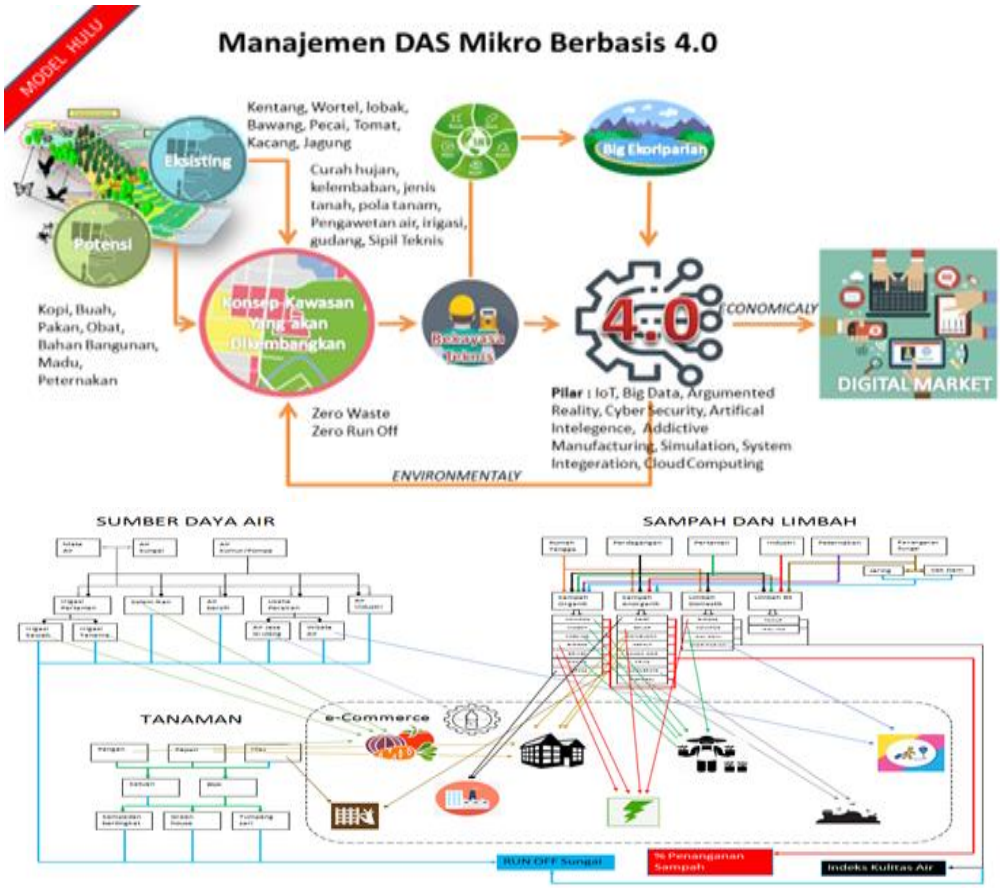

GAMBAR 2.66
PROSES MANAJEMEN DAS MIKRO BERBASIS 4.0
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Rekayasa teknis tersebut dapat berupa pengaturan jenis tanah, pola tanam, pengawetan air, irigasi, gudang, curah hujan, sipil teknis tergantung pada permasalahan yang muncul. Rekayasa teknis secara tidak langsung dapat membuat kondisi eksisting menjadi lebih tertata baik menurut jenis tanam dan kontur tanah. Hal ini dapat berpengaruh pada pemulihan lahan dan perekonomian masyarakat jangka panjang.

Selain melihat kondisi eksisting, pada model manajemen DAS mikro memperhitungkan potensi yang dapat dikembangkan melalui model analisis digital. Contohnya kawasan yang hanya ditanami tanaman kentang atau wortel sebenarnya berpotensi untuk ditanami tanaman kopi atau tanaman keras misalkan jati atau kopi. Tanaman tersebut semuanya dapat dilakukan pemasaran investasi secara online melalui e-commerce. Apabila investor khawatir akan ketidakpastian hasil dan lamanya waktu panen, penerapan ID Georeference pada tanaman yang

ditanam dapat menjadi solusi atas kekhawatiran petani. ID tersebut merupakan ID khusus/unik dari setiap tanaman atau wilayah yang akan ditawarkan kepada pihak investor, ID ini memiliki Georeference berupa koordinat dimana tanaman itu berada sehingga para petani dan investor dapat dengan mudah memantau kualitas dari tanaman yang telah mereka beri modal. Sehingga perlunya pengembangan potensi dan pengelolaan kondisi eksisting untuk menentukan konsep kawasan yang akan dikembangkan. Dengan Smart Farming, investor dapat ikut melakukan pemuliaan tanaman secara online dan tiap periode tertentu pemantauan dapat dilihat dari udara melalui data dari drone. Model investasi ini juga dapat dilakukan secara Blok (ID Block).

Rekayasa teknis merupakan peran utama pada kawasan yang nantinya akan dikembangkan. Rekayasa teknis ditentukan dengan data yang terintegrasi pada suatu Big Data online seperti infomasi curah hujan, jenis tanah, pola tanam. Data ini juga digunakan untuk rekayasa teknis pada sektor penanganan banjir, penanganan limbah dan sampah berbasis berbasis teknologi pada industri.4.0.

Rekayasa teknis pada penanganan banjir dan limbah salah satunya dengan mengembangkan Big Ecoriparian yakni pembuatan embung/polder yang memiliki fungsi yang beraneka ragam. Multiplier effect-nya embung dapat berwawasan wisata edukasi lingkungan dimana fungsi embung ini dapat mengontrol tingkat sedimentasi, limbah dan sampah yang masuk ke sungai, tambahan cadangan air bersih maupun irigasi, membantu kebutuhan peternak sapi, ikan, pengamatan COD/BOD, pengukuran telemetri yang terintegrasi, dan lain-lain. Pada embung inilah proses-proses yang bersifat penyehatan lingkungan dapat dilaksanakan serta berfungsi sebagai tempat edukasi bagi masyarakat.

Untuk rekayasa teknis berbasis 4.0 yakni dengan mengembangkan IoT, Big Data, Argumented Reality, Cyber Security, Artificial Intelegence, Addictive Manufacturing, Simulation, System Integeration, Cloud Computing. Jika sistem rekayasa teknis berbasis 4.0 ini sudah diterapkan maka secara langsung dapat bermanfaat untuk pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang akan dikembangkan tersebut. Pemulihan lingkungan yang dihasilkan sebagai akibat pemanfaatan rekayasa teknis berbasis 4.0 ini dapat membantu kawasan yang akan dikembangkan berupa terciptanya zero waste dan zero run off sehingga penanganan banjir dan pemulihan lingkungan di kawasan yang dikembangkan bersifat pembangunan berkelanjutan. Selain pemulihan lingkungan, rekayasa teknis berbasis 4.0 akan turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penataan pola tanam pada kawasan yang dikembangkan secara tepat sebagai akibat penggunaan teknologi 4.0 yang membuat lebih efisien dan efektif yang dapat memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.

Pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan pada setiap tahapan pembangunan MDM yang meliputi kegiatan: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Agar pengelolaan DAS dapat dilakukan secara optimal, maka perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan direncanakan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mikro DAS sebagai suatu unit pengelolaan.

3. *Output*

   Hasil yang diharapkan dari SIBEDAS adalah sebagai berkut:

   a. tersusunnya SK Tim Kawasan Perdesaan Berbasis Mikro DAS;
   b. terumuskannya perencanaan partisipatif berbasis Mikro DAS;
   c. Penetapan Kawasan Perdesaan berbasis Mikro DAS di seluruh Desa di Kabupaten Bandung;
   d. tersusunnya Rumusan Usulan dan konsep pembagian peran Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam mewujudkan kawasan perdesaan berbasis Mikro DAS;
   e. tersusunnya sistem monitoring dan evaluasi indikator kinerja Manajemen Mikro DAS (*Run Off*, Indeks Kualitas Air, Cakupan Penanganan Sampah dan Tingkat Sedimentasi).

4. *Outcome*

SIBEDAS memiliki manfaat baik secara internal (organisasi) maupun eksternal (manfaat rencana bagi eksternal organisasi).

a. Manfaat Internal, antara lain:

- tersedianya data valid dan Big Data secara efisien dan efektif untuk bahan perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sektor bidang perencanaan pembangunan fisik;
- tersedianya dokumen perencanaan yang mendukung pencapaian target sektor bidang perencanaan pembangunan fisik;
- perencanaan lebih akurat dan tepat sasaran;
- tersedianya Model Sistem Pembangunan Berkelanjutan berbasis Mikro DAS untuk diduplikasi;

b. Manfaat Eksternal, antara lain:
- tersedianya dokumen perencanaan dan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan partisipatif berbasis Mikro DAS sebagai komitmen dan acuan percepatan pembangunan berkelanjutan
- tersedianya dokumen yang menjamin masyarakat dan berkontribusi dalam rangka pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (adanya jaminan pembangunan berkelanjutan);
- tersedianya dokumen perencanaan dalam meningkatkan percepatan capaian kinerja instansi dan Pemerintah Daerah;
- penanggulangan banjir dan pencemaran;
- setiap masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat dikendalikan oleh mereka karena mereka sebagai aktor dalam mengawal data di lapangan;
- setelah direviu, model akan diduplikasi di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Bandung.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Badan Kerjasama Antar Desa; Inventarisasi dan Survey Data; Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mikro DAS; Rapat Koordinasi Perumusan Usulan Desa; Desk Koordinasi Desa, Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten; Rapat Koordinasi Draft Rumusan Dokumen Pengembangan Kawasan Berbasis Mikro DAS bersama Provinsi dan Pusat; termasuk menyusun Sistem Monitoring dam Evaluasi Kawasan Perdesaan Berbasis Mikro DAS.

Struktur data dengan berbagai variabel dan indikator yang telah disusun untuk keperluan monev Mikro DAS Manajemen (MDM) akan diintegrasikan ke dalam Open SID (Sistem Informasi Desa), sebuah aplikasi berbasis Desktop maupun Mobile yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bandung. Operator dari desa (tingkat RT/RW) akan mengisi data secara rutin sehingga data monev MDM selalu *up to date.*

Untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan secara terpadu, transparan dan partisipatif dan untuk menjamin keseimbangan lingkungan serta memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung, perlu melakukan pembangunan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu berbasis mikro, salah satunya melalui Program Bebenah Ekosistem Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu (Bebenah DAS).

Adapun indikator yang akan dievaluasi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui Bebenah DAS antara lain:

1. *Run Off*
2. Indeks Kualitas Air
3. Tingkat Sedimentasi
4. Sampah dan Limbah cair
5. *Biodiversity*
6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Ekoliterasi
7. Infrastruktur sosial/kelompok komunitas
8. Jasa Lingkungan

2.6.3. SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu)

Pelayanan kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarkan oleh pemerintah setempat, seperti penerbitan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan sebagainya, sebagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan. Meski demikian, kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Purwadi (2018) memaparkan bahwa dalam pelayanan kependudukan secara umum di Indonesia masih dijumpai pelayanan yang kurang tansparan, banyaknya pemohon pelayanan kependudukan yang kebingungan karena prosedur yang rumit adanya keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan KTP elektronik, kurangnya kepastian waktu dan praktik pungutan liar. Di Kabupaten Bandung sendiri memiliki tantangan untuk mengakomodasi pelayanan kependudukan untuk jumlah penduduk yang besar, yakni mencapai 3.831.505 jiwa di tahun 2020 (BPS, 2021). Kebutuhan pelayanan kependudukan ini semakin menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung seiring dengan bertumbuhnya perekonomian daerah dan masuknya pendatang baru yang perlu dilayani urusan kependudukannya (Purwadi, 2018).

Inovasi dalam pelayanan kependudukan di Kabupaten Bandung menjadi penting untuk dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan permasalahan terkait kependudukan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan program SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu) pada tahun 2020 untuk mewujudkan pelayanan kependudukan yang singkat, cepat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Kebaruan yang ditawarkan oleh inovasi ini dibandingkan program kependudukan sebelumnya yang ada di Kabupaten Bandung adalah kecepatan pelayanan kartu kependudukan (dari antri hingga kartu terbit) dan kejelasan prosedur pelayanan kependudukan yang ada dalam genggaman user.

Terlebih lagi dengan adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia, pelayanan kependudukan yang singkat, cepat, jelas, dan mudah diakses masyarakat di tengah pandemi ini menjadi layanan yang berdampak besar dalam penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Bandung dengan mengurangi mobilitas dan antrian masyarakat. Dengan demikian, pengembangan program ini selaras dengan RKP 2021 terkait pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Tujuan penyelenggaraan SAKEDAP adalah menghadirkan pelayanan kependudukan yang singkat, cepat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Sasaran dari penyelenggaraan SAKEDAP adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
2. Meningkatnya produktivitas dan transparansi pelayanan kependudukan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi terpadu
3. Berkurangnya kontak antar manusia pada antrian dan loket, Untuk mengurangi kontak petugas dengan masyarakat/pemohon dimana hal itu juga dapat mengurangi berkas yang biasanya dipegang oleh petugas dari pemohon sebagai media yang sangat berpotensi kuat menyebarkan Covid-19.

Adapun penyelenggaraan SAKEDAP selaras dengan konsep pembangunan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial yakni:

1. Aspek tematik, melalui pelayanan publik yang khusus melayani pelayanan kependudukan;
2. Aspek holistik, melalui pelayanan kependudukan yang menyediakan layanan berbagai dokumen kependudukan dengan penyelenggaraan proses antri dan verifikasi hingga notifikasi penjadwalan, perekaman, dan penerbitan dokumen secara daring di aplikasi SAKEDAP dan email;
3. Aspek integratif, melalui proses verifikasi data pemohon dengan SIAK Kemendagri; dan
4. Aspek spasial, melalui penyebarluasan aplikasi SAKEDAP ke seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dan perangkat kecamatan.

Pelaksanaan inovasi SAKEDAP terdiri atas input, proses, *output*, dan *outcome*. Rincian masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Input

SAKEDAP berupaya mempercepat, memperjelas, dan mempermudah pelayanan kependudukan, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Penyelenggaraan inovasi ini membutuhkan keterlibatan multistakeholders, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, pemerintah kecamatan dan mitra telekomunikasi lainnya. Adapun kunci dari inovasi ini adalah pengembangan sistem informasi

kependudukan terpadu berbasis aplikasi yang perlu didukung dengan sumberdaya manusia dan tools seperti bandwidth, integrated cloud storage, dan artificial intelligence untuk pelayanan kependudukan yang semakin tanggap. Setelah user menggunakan layanan SAKEDAP, terdapat pula fitur review atau survei kepuasan yang diisi oleh user yang menjadi input penyempurnaan layanan SAKEDAP kedepannya.

Secara lebih rinci, ekosistem yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi SAKEDAP dapat dilihat pada *business model canvas* berikut.

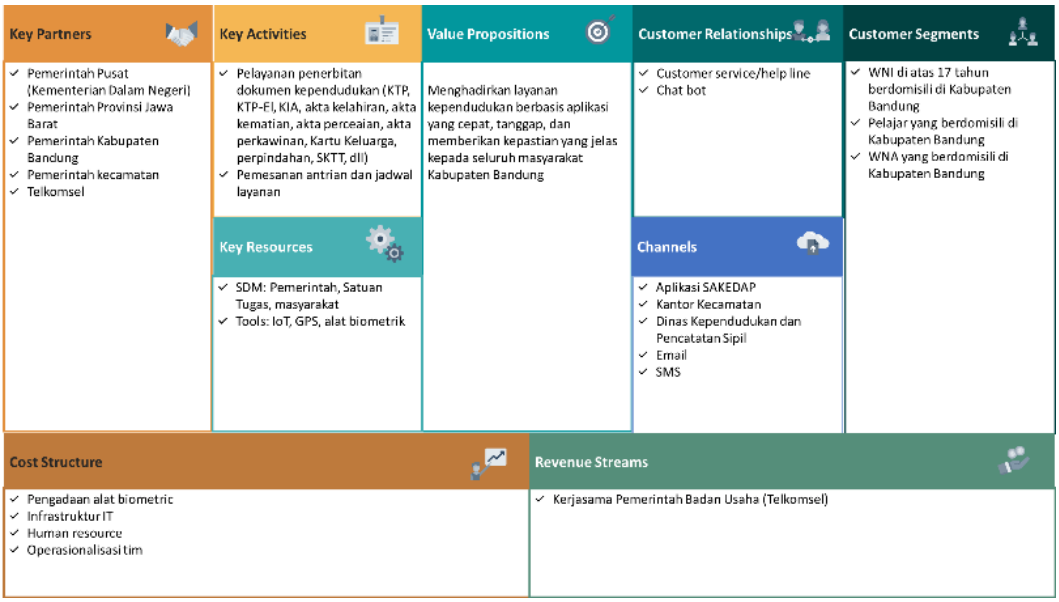

GAMBAR 2.67
BUSINESS MODEL CANVAS INOVASI SAKEDAP
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

2. Proses

Tahapan pelaksanaan inovasi SAKEDAP dirancang dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi pelayanan kependudukan. Dalam hal ini, pelayanan kependudukan melalui SAKEDAP menawarkan pelayanan kependudukan dalam genggaman user dengan notifikasi progress tracking secara realtime sehingga dapat mengurangi waktu antrian dan waktu menunggu kepastian prosedur pelayanan kependudukan.

Secara lebih rinci, prosedur pelayanan melalui SAKEDAP dapat ditinjau pada ilustrasi berikut.

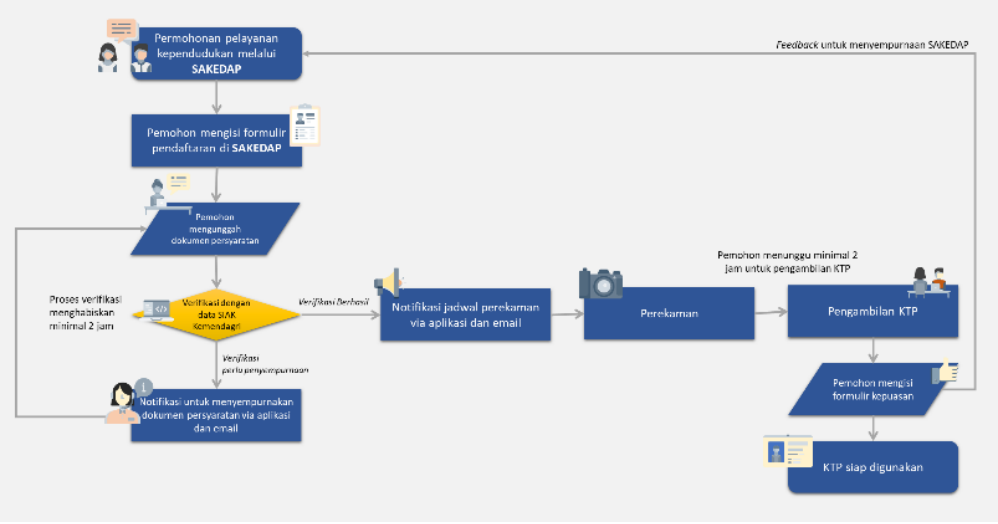

GAMBAR 2.68
PROSEDUR PELAYANAN SAKEDAP
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

3. *Output*

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: rapat koordinasi pembentukan Tim Pengembangan SAKEDAP antara Disdukcapil, Diskominfo, dan Bappeda Kabupaten Bandung; pengembangan aplikasi SAKEDAP, rapat koordinasi penyelenggaraan pelayanan kependudukan dengan mitra telekomunikasi; dan pelaksanaan pilot project pelayanan SAKEDAP di lingkungan Kabupaten Bandung. Adapun struktur data dan indikator sudah disusun oleh Disdukcapil dengan berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Bandung untuk keperluan monitoring dan evaluasi SAKEDAP.

Hasil jangka pendek yang diharapkan dari penyelenggaraan SAKEDAP adalah sebagai berikut.

a. Terlayaninya kebutuhan kependudukan masyarakat dalam waktu 1-24 jam secara mobile
b. Bertambahnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan
c. Terintegrasinya data kependudukan Kabupaten Bandung dengan SIAK Kemendagri
d. Meningkatnya transparansi pelayanan kependudukan Pemerintah Kabupaten Bandung

Adapun *output* berupa *interface* dari SAKEDAP adalah sebagai berikut.

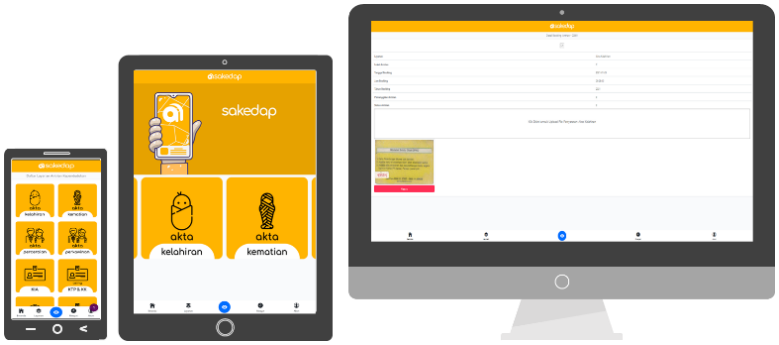

GAMBAR 2.69
INTERFACE SAKEDAP
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

4. *Outcome*

SAKEDAP menghadirkan inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Bandung secara jangka panjang. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

a. Tersedianya data kependudukan yang terpadu dalam satu aplikasi
b. Tersedianya layanan kependudukan yang menjamin kepastian prosedur dan validitas data kepada user
c. Tersedianya layanan kependudukan yang terintegrasi dengan SIAK Kemendagri
d. Tersedianya layanan kependudukan yang tanggap terhadap penanganan pandemi Covid-19 melalui pelayanan kependudukan berbasis aplikasi daring
e. Adanya kontribusi aktif dari masyarakat sebagai user untuk menyempurnakan pelayanan kependudukan melalui review atau formulir kepuasan
f. Tersedianya layanan kependudukan yang terpercaya
g. Mendukung upaya tertib Administrasi Kependudukan dengan mempermudah akses masyarakat/warga untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan

2.6.4. SAE-KIR (Sistem Antrian Elektronik-KIR)

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kerta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan ini merupakan faktor penting untuk meningkatkan keselatam tranportasi dari sisi kelaikan jalan.

Pengurusan Uji Kendaraan terkesan rumit dan memerlukan waktu yang lama merupakan bagian dari masalah klasik yang hampir dialami oleh semua tempat pengujian kendaraan bermotor di daerah. Belum lagi semua proses administrasi masih dilakukan seara manual.

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk membantu proses administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi solusi alternatif yang efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Uji Kendaraan memiliki tiga prinsip utama yanitu *collecting data*, *processing* and *analyzing data* dan terakhir reporting data. *Collecting d*ata dimaksudkan untuk mengumpulkan semua data terkait dengan pengujian kendaraan baik berupa data kepemilikan, data spesifikasi, data Riwayat serta data-data lain yang terkait. Kemudian dilakukan digitalisasi data dengan menginput semua variabel tersebut, data ini selanjutnya disebut sebagai *data master.*

Data yang sudah terdigitalisasi akan sangat membantu proses pelaksanaan pengujian. Analisa data dilakukan untuk memproses data operasional menjadi sebuah laporan yang dapat digunakan sebagai bahan eveluasi dan pengambilan kebijakan.

Tujuan dari inovasi SAE-KIR adalah:

1. untuk meningkatkan kehandalan layanan, memberi kepastian ketersediaan layanan kepada konsumen serta kejelasan antrian layanan. Untuk menekan risiko percaloan.
2. Untuk mengeliminasi peluang gratifikasi.
3. Untuk meningkatkan objektivitas layanan dan hasil uji. Sejalan dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 saat ini, inovasi SAE-KIR juga memenuhi tujuan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19: Untuk mengimplementasikan aturan physical distancing dan meminimalisir kontak antar manusia di antrian dan loket; Untuk mengeliminasi kontak petugas dan konsumen dengan uang cash sebagai media yang berpotensi kuat menyebarkan Covid-19.

Manfaat dari sistem ini adalah:

1. Mampu membuat sistem pendokumentasian data kendaraan wajib uji secara terstuktur dan rapi
2. Mampu meningkatkan efektifitas dan efisisensi pelayanan, serta mendukung upaya tertib administrasi pengujian kendaraan bermotor
3. Dapat menyajikan data secara cepat dan akurat

Adapun aspek inovasi SAE-KIR adalah sebagai berikut.

1. SAE-KIR membuat JFT penguji kendaraan bermotor, petugas dan konsumen layanan terjamin melaksanakan protokol Kesehatan Covid-19
2. SAE-KIR dapat diaplikasikan diseluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia, karena semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas fungsi pengujian kendaraan bermotor.
3. Ide inovasi ini memenuhi aspek kebaharuan, di mana walaupun beberapa daerah sudah menerapkan sistem daftar online dan/atau bayar online, tetapi prinsip amati-tiru modifikasi diadopsi dalam inovasi SAE-KIR. Di antaranya adalah kombinasi daftar dan bayar online, pemilihan hari dan jam, scan barcode untuk membuka portal gedung uji yang rawan dimasuki orang/objek tak berkepentingan/berkaitan.
4. Pelaksanaan inovasi bayar online dalam SAE-KIR merupakan kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dengan Bank BJB Banten yang disahkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 100/796/SKEP.DISHUB/V/2020 dan Nomor 287/SOR-KOM/M/2020 tanggal 26 Mei 2020.

Dalam penggunaannya, konsumen diharuskan mendaftar melalui aplikasi SAE-KIR, hingga mendapat alokasi waktu penyediaan layanan (hari dan jam) serta barcode layanan. Konsumen mendapatkan ID-billing untuk membayar secara cashless di fasilitas bank tertunjuk (ATM, mobile dan internet banking) – saat ini dengan BJB. Konsumen datang pada hari dan jam yang ditentukan dengan kewajiban memenuhi standar APD Covid-19 bagi pengemudi (pakaian lengan panjang, memakai masker dan sarung tangan), memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir pra uji sesuai nomor satuan ruang parkir (SRP) yang ditentukan, menyerahkan *barcode* layanan, bukti pembayaran *cashless*, dan kunci kendaraan kepada petugas. Konsumen menuju ruang tunggu dan memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

JFT Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan pra uji di SRP meliputi pengecekan data kendaraan, visualisasi dan fungsi fisik luar kendaraan, dimensi kendaraan. Jika tidak lulus pra uji, konsumen diarahkan untuk melaksanakan perbaikan ringan dan melengkapi persyaratan laik jalan. Jika dinyatakan lulus pra uji, petugas membawa kendaraan ke gedung uji, melakukan *scan barcode* untuk membuka portal gedung uji. Seluruh prosedur pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh JFT Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari: uji daya pancar dan penyimpangan lampu (headlight); uji kinerja rem utama dan rem parkir (brake); uji emisi gas buang kendaraan (CO, HC, Smog); uji ketepatan alat speedometer; uji tingkat kebisingan (sound level); uji kincup roda depan (side slip); uji dimensi berat kendaraan sesuai jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). Petugas membawa kendaraan yang telah diuji ke lokasi parkir yang dikhususkan untuk kendaraan yang sudah melaksanakan uji. Sistem mengirimkan hasil pengujian secara online dari alat uji ke dalam bukti lulus uji *elektronik smart card*. Terakhir, konsumen mengambil hasil uji dan kunci kendaraan di loket dekat ruang tunggu.

Berikut adalah ilustrasi penggunaan aplikasi SAE-KIR.

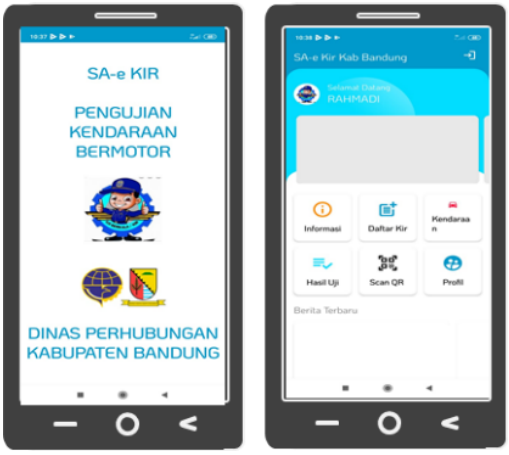

GAMBAR 2.70
INTERFACE SAE-KIR
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

2.6.5. SABUK MAS (Sistem Bangun UMKM dan Koperasi untuk Masyarakat)

Adanya kecenderungan perkembangan ekonomi yang mengarah kepada *digital economy* di era revolusi industri 4.0 yang didominasi market milenial, membawa konsekuensi kepada perlunya dilakukan Reformasi koperasi dari mulai perbaikan administrasi, menejerial sampai kepada strategi marketing dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa meninggalkan jati diri koperasi. Sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan sistem ekonomi modern untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Namun demikian, dalam pembangunan koperasi terdapat berbagai permasalahan yang cukup mendasar, sehingga mengganggu tujuan berkoperasi. Berbagai permasalahan koperasi diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu: persoalan internal koperasi dan persoalan eksternal koperasi. Persoalan internal koperasi dibedakan atas persoalan administrasi dan persoalan manajemen/teknis usaha, sedangkan persoalan koperasi dapat dilihat dalam kaitannya dengan akses kepada sumber modal atau bahan baku (bagi koperasi non KSP) serta akses kepada pasar/market. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait persoalan kepatuhan administrasi serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.

Inovasi Sabuk Mas telah *launching* pada 19 November 2019. Melalui Program Sabukmas ini, dihasilkan beberapa inovasi dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan saat ini dan masa yang akan datang. Inovasi tersebut mencakup: Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi,

Aplikasi e-koperasi, Model Business Matching, serta Tim Lintas Binwas Koperasi. Dengan berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat menciptakan keunggulan Koperasi di era milenial di Kabupaten Bandung.

Hasil yang diharapkan dari program Sabukmas dapat berkontribusi maksimal pada pencapaian misi Kabupaten Bandung yaitu "Menciptakan Perekonomian yang Berdaya Saing" serta pencapaian program, prioritas nasional dimana Koperasi juga menjadi perhatian, khususnya Nawacita yang ke-enam dan ketujuh yaitu:

a. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta
b. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Pelaksanaan inovasi SABUK MAS terdiri atas input, proses, *output*, dan *outcome*. Rincian masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Input

Program Sabukmas ini merupakan program inovatif karena penyelenggaraannya melibatkan berbagai unsur yang saling terintegrasi dari tingkat Pusat sampai Kecamatan. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat pada gambar *Business Model Canvas* Sabuk Mas berikut.

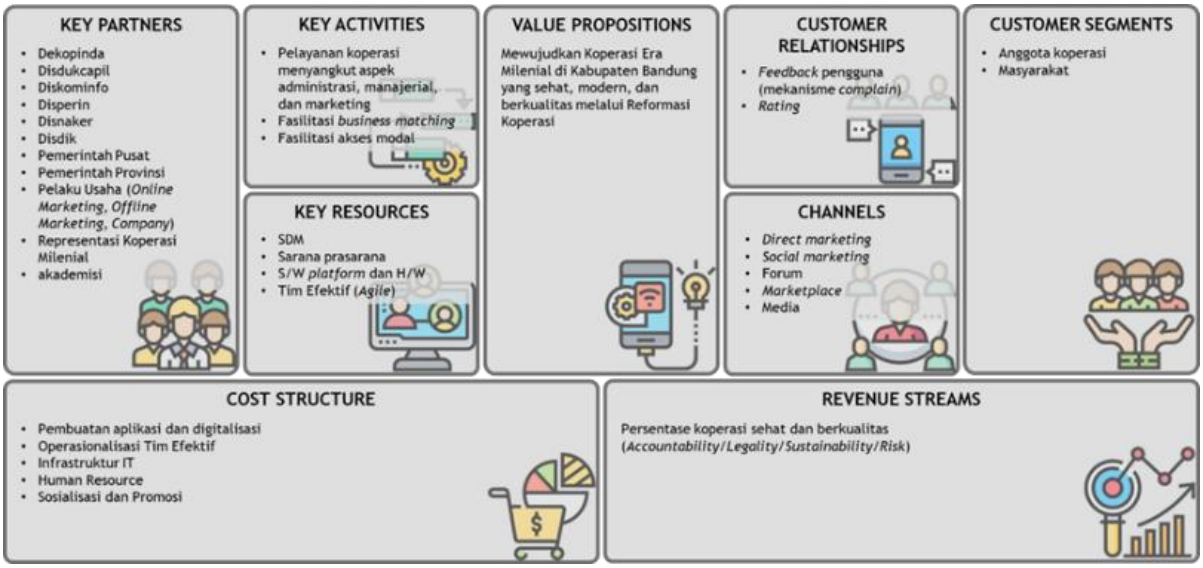

GAMBAR 2.71
BUSINESS MODEL CANVAS SABUK MAS
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

2. Proses

Pelaksanaan strategi Sabukmas dapat dilakukan melalui: 1). peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan kebijakan; 2). penegasan dan penguatan input, yakni kebijakan dan rencana aksi yang terintegrasi; 3). penguatan proses, yakni melalui fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan; 4). pengendalian pelaksanaan kegiatan Sabukmas, yakni di area kelembagaan, monitoring dan evaluasi, sistem manajemen informasi, pengawasan, pendampingan, *coaching clinic*, dan *business matching.*

Berikut adalah proses bisnis inovasi Sabuk Mas.

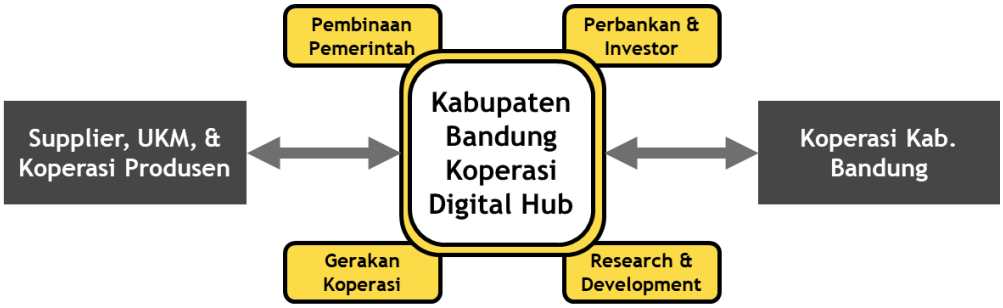

GAMBAR 2.72
PROSES BISNIS INOVASI SABUK MAS
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

3. *Output*

Keluaran Konkrit yang mendukung keberhasilan Program Sabukmas, adalah:

a. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dengan Nomor : 470/4833/Disdukcapil/2019 dan Nomor: 470/1525/Diskop-UKM.
b. Surat Pengajuan tentang Pemanfaatan Infrastruktur Data Informasi Intranet dan Publik antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung dengan Nomor :010/1713/Diskop-UKM/2019 dan Surat Jawaban Permohonan Pemanfaatan Infrastruktur dengan Nomor: 489/1108/TIK.
c. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Grand Sunshine Resort & Convention tentang Kerjasama Peningkatan Promosi Usaha Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung dengan Nomor: 518/1786/Diskop UKM/2019.
d. SK Bupati tentang Tim Sinergitas Lintas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Bandung dengan Nomor: 518/Kep.629-Diskop UKM/2019.
e. Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Repeh Rapih Kerta Rahardja Kabupaten Bandung dengan PT. Nectico Nusantara Teknologi tentang Penggunaan Aplikasi Nectico dengan Nomor Kontrak: 115/SPKPAN/DMN/10/2019.
f. Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Karyawan dan Mantan Karyawan PT. Kamola (KKMK KAMOLA) dengan PT. Nectico Nusantara Teknologi tentang Penggunaan Aplikasi Nectico dengan Nomor Kontrak: 120/SPKPAN/DMN/10/2019.

Salah satu inovasi yang dihasilkan dari Sabukmas adalah platform e-Koperasi yang terbagi ke dalam 4 (empat) interface berbeda sesuai dengan pemangku kepentingan yang terlibat sebagai penerima manfaat dari aplikasi ini. Keempat interface tersebut terdapat pada ilustrasi berikut.

GAMBAR 2.73
INTERFACE SABUK MAS

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

4. Output

Adapun manfaat bagi pemangku kepentingan yang menjadi sasaran penerima manfaat adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah:
   - Pemerintah mampu memantau kinerja koperasi secara online
   - Terwujudnya jejaring/network yang mampu mengintegrasikan koperasi dari berbagai sektor

b. Anggota:
   - Anggota mampu mendapatkan informasi secara online, real-time, dan transparan
   - Pengurus
   - Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
   - Meningkatnya kemitraan antara pengurus koperasi dengan berbagai lembaga usaha (BUMDes, pelaku usaha online, industri rumah tangga, dll)

c. Masyarakat:
   - Masyarakat mampu mendapatkan informasi tentang koperasi yang berkualitas
   - Meningkatnya ketertarikan masyarakat kalangan muda
   - Meningkatnya perekonomian kerakyatan

RKPD
2022

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan daerah dapat terselenggarakan dengan baik melalui rencana program dan kegiatan pembangunan serta ketersediaan anggaran, instrumen dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan yang selaras. Ketersediaan instrumen dan mekanisme penganggaran menjadi penting peranannya sebagai upaya mengawal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sejalan dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan melalui target indikator daerah. Sama seperti yang diterapkan pada tahun perencanaan sebelumnya, di tahun 2022 ini pendekatan penganggaran akan dilaksanakan melalui pendekatan *money follow program*. Hal ini mengamanatkan penganggaran yang berbasis program dan kinerja. Di dalam konsep ini, anggaran ditetapkan dengan mengikuti kebutuhan program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan sendiri ditetapkan mengikuti apa yang menjadi prioritas daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan. Penerapan konsep *money follow program* selain dinilai akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mengurangi pemborosan anggaran, juga diharapkan dapat mencegah penyimpangan pada program dan kegiatan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, instrumen dan mekanisme penggunaan anggaran dituangkan dalam suatu rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi keuangan daerah ini akan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan tahun berjalan. Dengan mempertimbangkan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa perencanaan kabupaten/kota dan perencanaan provinsi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka dalam penyusunan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bandung, selain mempertimbangkan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan internal daerah Kabupaten Bandung, juga mempertimbangkan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bandung tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 periode keempat dan diselaraskan dengan RPJM Nasional tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan menjadi dasar kebijkaan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Subbab arah kebijakan ekonomi daerah ini kemudian akan terbagi ke dalam kondisi ekonomi daerah tahun 2020, prakiraan tahun 2022 dan tahun 2023, beserta tantangan dan prospek yang mungkin akan dihadapi di tahun 2022.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2022

Kondisi ekonomi Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh dan mengacu pada indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Mengukur kemajuan ekonomi Kabupaten Bandung dalam konteks regional Jawa Barat dan Nasional dapat diketahui dengan menyandingkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung dengan data pertumbuhan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Salah satu indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian tersebut antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indikator makro ekonomi lainnya.

3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai PDRB Kabupaten Bandung menggambarkan kemampuan Kabupaten Bandung dalam menciptakan nilai tambah output. Adapun yang dimaksud dengan output dalam hal ini yaitu nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia, yang mana dalam hal ini

output diklasifikasikan ke dalam 17 sektor. Sektor-sektor tersebut meliputi 1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) sektor pertambangan dan penggalian; 3) sektor industri pengolahan; 4) sektor pengadaan listrik dan gas; 5) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 6) sektor konstruksi; 7) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 8) sektor transportasi dan pergudangan; 9) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; 10) sektor informasi dan komunikasi; 11) sektor jasa keuangan dan asuransi; 12) sektor real estate; 13) sektor jasa perusahaan; 14) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; 15) sektor jasa pendidikan; 16) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta 17) sektor jasa lainnya.

Meninjau tren pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung, baik itu PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, dalam kurun tahun 2016-2020 nilai PDRB Kabupaten Bandung menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Adapun sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi dan penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan, dan sektor Industri Pengolahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Bandung telah mengalami perbaikan namun perlu ditingkatkan ketahanan perekonomian daerah terhadap guncangan perekonomian di skala nasional dan global.

PDRB ADHB di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 123.049,25 (juta Rp). Selain itu, PDRB ADHK tahun 2020 mencapai angka Rp. 80.829.310 (juta Rp). Adapun sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Bandung. Di tahun 2020, sektor ini menyumbang sekitar 52,40% terhadap total PDRB ADHB atau sekitar 51,10% terhadap PDRB ADHK. Sektor lain yang memiliki kontribusi tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bandung yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,83% terhadap PDRB ADHB atau sekitar 13,10% terhadap PDRB ADHK. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menduduki posisi ketiga sebagai sektor penyumbang PDRB Kabupaten Bandung tertinggi dengan 7,70% terhadap PDRB ADHB dan 6,82% terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Bandung. Informasi detail mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Sektor Ekonomi	PDRB ADHB (Juta Rp)					PDRB ADHK (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.503.285,67	8.298.736	9.029.133	9.333.834,6	9.470.240	5.069.659,45	5.368.354	5.488.792	5.485.594,1	5.515.490
B	Pertambangan dan Penggalian	2.064.735,96	2.190.035	2.298.163	2.397.476,7	2.165.060	1.649.759,73	1.638.147	1.649.038	1.667.545,8	1.709.490
C	Industri Pengolahan	49.184.379,66	53.832.050	60.194.850	65.729.950,5	64.476.540	34.952.833,52	36.963.265	39.161.670	42.613.968,4	41.305.8600
D	Pengadaan Listrik dan Gas	109.094,43	132.911	147.315	136.390,2	125.700	93.493,38	95.645	100.866	94.879,1	900.000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.257,43	33.431	37.239	42.749,6	47.370	23.461,10	25.168	26.908	27.687,9	30.520
F	Konstruksi	5.442.231,75	6.298.851	7.075.586	7.908.626,1	7.933.860	4.439.967,50	4.912.750	5.332.869	5.697.335,4	5.717.310
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.984.360,03	13.878.206	15.477.849	16.046.953,3	15.788.430	9.676.959,23	10.222.299	10.908.518	11.123.995,4	10.590.270
H	Transportasi dan Pergudangan	3.663.866,12	3.995.263	4.546.503	4.425.459,7	4.468.210	2.562.252,12	2.705.211	2.909.075	2.889.939,8	2.798.740
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.263.914,96	2.504.800	2.819.723	3.034.620,3	3.016.970	1.660.985,60	1.767.696	1.892.702	2.029.304,2	1.965.590
J	Informasi dan Komunikasi	1.390.045,26	1.579.868	1.778.882	1.907.713,6	2.336.670	1.455.410,18	1.644.417	1.862.168	1.994.217,9	2.464.990
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	649.279,15	706.114	792.406	816.705,0	861.330	510.853,57	530.817	571.895	573.700,7	606.530
L	Real Estate	1.013.291,49	1.135.598	1.254.131	1.461.971,3	1.470.250	833.582,01	918.274	983.817	1.113.273,7	1.109.150
M,N	Jasa Perusahaan	401.389,56	442.542	491.727	559.739,4	490.010	317.112,90	343.402	367.973	405.352,4	347.520
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.120.068,44	2.233.165	2.438.137	2.639.099,4	2.478.300	1.501.702,57	1.515.995	1.565.356	1.593.401,8	1.491.420
P	Jasa Pendidikan	2.741.260,19	3.125.707	3.556.592	3.877.793,7	4.239.070	2.121.550,61	2.289.577	2.491.760	2.587.150,9	2.697.740
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	726.419,28	837.261	969.634	1.059.887,0	1.044.900	537.487,72	599.944	662.460	708.386,9	684.260
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.880.047,18	2.147.281	2.412.165	2.622.222,8	2.636.330	1.390.622,14	1.510.220	1.613.407	1.730.898,4	1.704.420
	TOTAL PDRB	**94.165.926,55**	**103.371.819**	**115.320.035**	**124.001.193,24**	**123.049.250**	**68.797.693,32**	**73.051.181**	**77.589.274**	**82.336.632,90**	**80.829.310**

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

PDRB dapat digunakan sebagai dasar dalam mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai perekonomian suatu wilayah dengan melakukan analisis lanjutan, diantaranya yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), Indeks Spesialisasi, dan *Shift Share Analysis* (SSA). Sebagai pembanding, nilai PDRB Provinsi Jawa Barat dan nasional turut diperhiungkan dalam analisis. Sebelum meninjau lebih jauh mengenai analisis perekonomian Kabupaten Bandung, sebagai perbandingan, berikut ditampilkan PDRB Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020.

TABEL 3.2
NILAI PDRB PER SEKTOR DI TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL TAHUN 2020 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH)

Kategori	Sektor Ekonomi	Kab. Bandung	Prov. Jawa Barat	Nasional
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp9.470.240,00	Rp192.117.060,00	Rp2.115.086.100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	Rp2.165.060,00	Rp23.160.870,00	Rp993.541.900,00
C	Industri Pengolahan	Rp64.476.540,00	Rp860.070.600,00	Rp3.068.041.700,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp125.700,00	Rp10.069.940,00	Rp179.741.600,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp47.370,00	Rp2.156.070,00	Rp11.302.800,00
F	Konstruksi	Rp7.933.860,00	Rp171.260.210,00	Rp1.652.659.600,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp15.788.430,00	Rp303.862.680,00	Rp1.995.470.100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	Rp4.468.210,00	Rp109.147.850,00	Rp689.700.700,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp3.016.970,00	Rp60.845.270,00	Rp394.230.900,00
J	Informasi dan Komunikasi	Rp2.336.670,00	Rp82.061.410,00	Rp695.839.100,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp861.330,00	Rp58.459.010,00	Rp696.065.500,00
L	Real Estate	Rp1.470.250,00	Rp23.561.250,00	Rp453.780.900,00
M,N	Jasa Perusahaan	Rp490.010,00	Rp8.402.880,00	Rp294.255.500,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp2.478.300,00	Rp46.031.120,00	Rp580.175.200,00
P	Jasa Pendidikan	Rp4.239.070,00	Rp75.567.570,00	Rp549.396.500,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp1.044.900,00	Rp16.214.510,00	Rp201.149.000,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Rp2.636.330,00	Rp45.050.440,00	Rp302.568.200,00
	TOTAL PDRB	**Rp123.049.250,00**	**Rp2.088.038.740,00**	**Rp15.434.151.800,00**

Sumber: BPS, 2021

A. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui lebih lanjut sektor perekonomian yang menjadi sektor basis (*leading sector*) perekonomian di Kabupaten Bandung dan untuk melihat kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self sufficient* (sanggup mencukupi kebutuhan sendiri) suatu sektor. Sektor yang memiliki nilai LQ > 1 ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Bandung, baik dalam lingkup perekonomian Jawa Barat maupun nasional. Hal ini dapat pula diartikan bahwa Kabupaten Bandung menjadi pengekspor bagi wilayah-wilayah lain di Jawa Barat dan nasional. Penentuan sektor basis

dengan analisis LQ dilakukan dengan membagi nilai perbandingan antara jumlah PDRB persektor di Kabupaten Bandung terhadap total PDRB Kabupaten Bandung dengan nilai perbandingan antara jumlah PDRB persektor Provinsi atau nasional terhadap total PDRB provinsi atau nasional. Hasil perhitungan nilai indeks LQ untuk setiap sektor ekonomi di Kabupaten Bandung ditampilkan pada **Tabel 3.3.**

TABEL 3.3
INDEKS LOCATION QUOTIENT SEKTOR DI KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2020

Kategori	Sektor Ekonomi	Indeks LQ	
		Terhadap Provinsi	Terhadap Nasional
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,84	0,56
B	Pertambangan dan Penggalian	1,59	0,27
C	Industri Pengolahan	1,27	2,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,53
F	Konstruksi	0,79	0,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,88	0,99
H	Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,96
J	Informasi dan Komunikasi	0,48	0,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,25	0,16
L	Real Estate	1,06	0,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,99	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,91	0,54
P	Jasa Pendidikan	0,95	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	0,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,99	1,09

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) sektor yang diberi warna hijau muda yang artinya sektor tersebut memiliki nilai LQ > 1 jika dibandingkan terhadap Provinsi Jawa Barat, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Real Estate, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Jika dibandingkan dengan nasional, terdapat 2 (dua) sektor yang memiliki nilai LQ > 1, yaitu sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa Lainnya.

Sektor-sektor tersebut menjadi sektor basis Kabupaten Bandung di tahun 2020 dan juga dapat mengindikasikan sektor-sektor unggulan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pasar daerah dan pasar di luar wilayah Kabupaten Bandung. Pertumbuhan sektor-sektor basis diharapkan dapat dikembangkan dan memicu pertumbuhan di sektor-sektor lainnya yang bersifat non-basis. Perlu dikontekskan bahwa analisis ini mencerminkan kondisi perekonomian daerah di masa pandemi dan dapat mengindikasikan besarnya potensi sektor-sektor basis untuk mendorong pertumbuhan sektor lainnya dari dampak pandemi.

Sedangkan sektor-sektor non-basis, seperti sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, mengindikasikan bahwa sektor tersebut baru dapat memenuhi kebutuhan di dalam wilayah Kabupaten Bandung.

B. Analisis Indeks Spesialisasi

Nilai Indeks spesialisasi menunjukkan konsentrasi sektor ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor ekonomi dilakukan penghitungan dengan menyelisihkan nilai-nilai positif dari persentase PDRB suatu sektor terhadap total di wilayah kabupaten dengan persentase PDRB sektor terhadap total di wilayah diatasnya (provinsi/nasional), yang kemudian dibagi 100. Apabila nilai indeks spesialisasi regional mendekati nol, maka kedua daerah yang diukur tidak memiliki spesialisasi, sedangkan bila nilai indeks spesialisasi regional mendekati nilai dua maka kedua daerah yang diukur memiliki spesialisasi.

Berdasarkan analisis spesialisasi Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional, diperoleh hasil perhitungan indeks spesialisasi masing-masing sebesar 0,12 dan 0,31. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung tidak memiliki spesialisasi sektor PDRB jika dibandingkan dengan sektor di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Informasi detail mengenai hasil perhitungan indeks spesialisasi Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 3.4**. berikut.

TABEL 3.4

PERHITUNGAN INDEKS SPESIALISASI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BANDUNG DI LINGKUP PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2020

Kategori	Sektor Ekonomi	Persentase PDRB Kab. Bandung (%)	Persentase PDRB Prov. Jabar (%)	Persentase PDB Nasional (%)	Selisih Terhadap	
					Provinsi	Nasional
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,70	9,20	13,70	0,0150	0,0601
B	Pertambangan dan Penggalian	1,76	1,11	6,44	0,0065	0,0468
C	Industri Pengolahan	52,40	41,19	19,88	0,1121	0,3252
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,48	1,16	0,0038	0,0106
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,10	0,07	0,0006	0,0003
F	Konstruksi	6,45	8,20	10,71	0,0175	0,0426
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,83	14,55	12,93	0,0172	0,0010
H	Transportasi dan Pergudangan	3,63	5,23	4,47	0,0160	0,0084
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	2,91	2,55	0,0046	0,0010
J	Informasi dan Komunikasi	1,90	3,93	4,51	0,0203	0,0261
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	2,80	4,51	0,0210	0,0381
L	Real Estate	1,19	1,13	2,94	0,0007	0,0175
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,40	1,91	0,0000	0,0151
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,01	2,20	3,76	0,0019	0,0174
P	Jasa Pendidikan	3,45	3,62	3,56	0,0017	0,0011
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,78	1,30	0,0007	0,0045
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,14	2,16	1,96	0,0002	0,0018
Total Selisih Positif					**0,24**	**0,62**
Indeks Spesialisasi (Total selisih positif/100)					**0,12**	**0,31**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

1. Shift Share Analysis

Analisis *shift share* mempertimbangkan tiga komponen pertumbuhan yang meliputi komponen Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Dibandingkan bentuk-bentuk analisis sebelumnya, konsep ini sudah memperhitungkan faktor waktu sehingga lebih bersifat dinamis dan dapat lebih menggambarkan pertumbuhan suatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis *shift share* Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 3.5**. dapat diamati bahwa kolom PR atau Pertumbuhan Regional menunjukkan angka positif untuk setiap sektor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Bandung bertumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Besaran nilai PR ini juga memberi gambaran mengenai sektor-sektor mana saja yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dari sektor lainnya. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan pertumbuhan tercepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Sektor lain di Kabupaten Bandung dengan pertumbuhan lebih cepat yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berdasarkan hasil skor PR tersebut, maka dengan mendorong ekonomi pada tiga sektor unggulan ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung.

Kolom PP atau Pertumbuhan Proporsional menggambarkan sektor-sektor yang maju, atau tumbuh lebih cepat serta sektor yang tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan sektor ekonomi pada lingkup wilayah di atasnya, katakanlah provinsi atau nasional. Nilai PP sektoral yang bernilai positif mengindikasikan sektor tumbuh lebih cepat dari sektor pada lingkup wilayah di atasnya, sedangkan angka PP sektoral yang bernilai negatif, mengindikasikan pertumbuhan sektor yang lebih lambat dari pada pertumbuhan sektor yang sama pada lingkup wilayah di atasnya. Berdasarkan hasil perhitungan PP Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat, terdapat 11 (sebelas) sektor di Kabupaten Bandung yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan Jawa Barat. Tiga sektor dengan pertumbuhan paling cepat adalah Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Informasi dan Komunikasi, dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan, tiga sektor yang memiliki pertumbuhan paling lambat jika dibandingkan pertumbuhan di sektor provinsi antara lain Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kolom PPW atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah menunjukkan daya saing suatu sektor terhadap sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih tinggi. Melalui kolom tersebut tampak bahwa beberapa sektor ekonomi Kabupaten Bandung memiliki nilai PPW positif atau memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor Industri Pengolahan memiliki nilai paling baik pada pertumbuhan pangsa wilayah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung selain berkembang di Kabupaten Bandung, juga tergolong cepat perkembangannya di Jawa Barat. Sektor lain di Kabupaten Bandung yang memiliki daya saing tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi diantara lain Sektor Jasa Lainnya dan Sektor Konstruksi.

TABEL 3.5

PERHITUNGAN INDIKATOR SHIFT SHARE ANALYSIS KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

Sektor	Kabupaten Bandung (Dalam Juta Rp)		Provinsi Jawa Barat (Dalam Juta Rp)		Pertumbuhan Regional (PR)	Rank	Pertumbuhan Proporsional (PP)	Rank	Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	Rank
	2016	2020	2016	2020						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.552.780,00	9.470.240,00	146.767.940,00	192.117.060,00	1.986.374,82	3	347.322,36	3	-416.237,17	17
Pertambangan dan Penggalian	2.064.740,00	2.165.060,00	25.347.020,00	23.160.870,00	543.024,89	9	-721.106,23	16	278.401,34	4
Industri Pengolahan	49.472.410,00	64.476.540,00	703.516.390,00	860.070.600,00	13.011.202,40	1	-2.002.057,23	17	3.994.984,83	1
Pengadaan Listrik dan Gas	112.330,00	125.700,00	11.920.090,00	10.069.940,00	29.542,70	16	-46.977,74	12	30.805,05	10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.820,00	47.370,00	1.343.140,00	2.156.070,00	7.579,64	17	9.863,55	9	1.106,81	11
Konstruksi	5.442.230,00	7.933.860,00	134.113.400,00	171.260.210,00	1.431.301,93	4	76.090,20	7	984.237,87	3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.805.360,00	15.788.430,00	249.243.980,00	303.862.680,00	3.367.798,96	2	-561.664,52	15	176.935,56	6
Transportasi dan Pergudangan	3.670.970,00	4.468.210,00	94.845.280,00	109.147.850,00	965.462,04	5	-411.883,56	14	243.661,53	5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.263.910,00	3.016.970,00	43.014.050,00	60.845.270,00	595.406,43	7	343.084,07	4	-185.430,50	15
Informasi dan Komunikasi	1.383.100,00	2.336.670,00	45.461.350,00	82.061.410,00	363.754,14	10	749.753,11	2	-159.937,25	14
Jasa Keuangan dan Asuransi	649.280,00	861.330,00	46.100.570,00	58.459.010,00	170.760,10	14	3.296,06	10	37.993,85	9
Real Estate	1.013.290,00	1.470.250,00	16.813.550,00	23.561.250,00	266.494,42	12	140.164,31	6	50.301,27	8
Jasa Perusahaan	401.390,00	490.010,00	6.645.610,00	8.402.880,00	105.565,23	15	572,59	11	-17.517,83	12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.126.430,00	2.478.300,00	39.157.140,00	46.031.120,00	559.249,31	8	-185.957,56	13	-21.421,75	13
Jasa Pendidikan	2.741.260,00	4.239.070,00	44.676.510,00	75.567.570,00	720.949,08	6	1.174.463,68	1	-397.602,76	16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	726.420,00	1.044.900,00	12.064.600,00	16.214.510,00	191.047,85	13	58.821,82	8	68.610,33	7
Jasa Lainnya	1.180.050,00	2.636.330,00	32.207.820,00	45.050.440,00	310.352,16	11	160.183,68	5	985.744,16	2

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dalam rangka merespon tantangan global, selain membandingkan kinerja perekonomian Kabupaten Bandung dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, dilakukan analisis terhadap lingkup yang lebih luas, yaitu terhadap nasional. Dengan dilakukannya analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian Kabupaten Bandung yang memiliki daya saing di level nasional. Untuk mengidentifikasi kinerja sektor perekonomian Kabupaten Bandung dalam lingkup nasional, dilakukan analisis *shift share* Kabupaten Bandung terhadap nasional.

Hasil perhitungan *shift share* Kabupaten Bandung terhadap nasional menunjukkan bahwa untuk nilai PR (Pertumbuhan Regional), diperoleh hasil yang hampir serupa dengan nilai analisis *shift share* Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat, dimana Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan pertumbuhan tercepat dibanding rata-rata pertumbuhan di nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung tidak saja berdaya saing di level Provinsi Jawa Barat tetapi juga berdaya saing di level nasional. Sebagai sektor basis Kabupaten Bandung yang cenderung potensial, maka kedepan pertumbuhan sektor ini perlu terus didorong. Demikian pula halnya untuk Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berdaya saing dan potensial dalam mendorong perekonomian Kabupaten Bandung.

Ditinjau dari nilai Pertumbuhan Proporsional, terdapat 11 (sebelas) sektor Kabupaten Bandung yang memiliki pertumbuhan positif. Berbeda halnya dengan hasil *shift share* terhadap Provinsi Jawa Barat dimana Sektor Jasa Pendidikan tumbuh paling cepat, hasil *shift share* terhadap nasional juga menunjukkan bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Disamping sektor tersebut, sektor lain yang tumbuh lebih cepat terhadap nasional antara lain Sektor Jasa Lainnya dan Sektor Konstruksi.

Ditinjau dari nilai Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW), tampak bahwa daya saing Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Bandung terhadap sektor yang sama di tingkat nasional memiliki peringkat tertinggi. Hasil analisis *shift share* Kabupaten Bandung terhadap nasional ditampilkan pada **Tabel 3.6**.

TABEL 3.6
PERHITUNGAN INDIKATOR SHIFT SHARE ANALYSIS KABUPATEN BANDUNG TERHADAP NASIONAL TAHUN 2020

Sektor	Kabupaten Bandung (Dalam Juta Rp)		Nasional (Dalam Juta Rp)		Pertumbuhan Regional (PR)	Rank	Pertumbuhan Proporsional (PP)	Rank	Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	Rank
	2016	2020	2016	2020						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.552.780,00	9.470.240,00	167.159.780,00	2.115.086.100,00	86.442.789,27	3	1.570.361,69	6	-86.095.690,96	15
Pertambangan dan Penggalian	2.064.740,00	2.165.060,00	89.086.830,00	993.541.900,00	23.631.283,41	9	-2.668.986,73	13	-20.861.976,69	9
Industri Pengolahan	49.472.410,00	64.476.540,00	254.520.360,00	3.068.041.700,00	566.219.737,95	1	-19.341.361,40	17	-531.874.246,55	17
Pengadaan Listrik dan Gas	112.330,00	125.700,00	14.234.440,00	179.741.600,00	1.285.635,03	16	20.452,13	10	-1.292.717,16	2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.820,00	47.370,00	890.940,00	11.302.800,00	329.849,56	17	6.951,80	11	-318.251,36	1
Konstruksi	5.442.230,00	7.933.860,00	128.760.080,00	1.652.659.600,00	62.287.203,00	4	2.122.602,31	3	-61.918.175,31	14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.805.360,00	15.788.430,00	163.541.040,00	1.995.470.100,00	146.559.417,33	2	-3.118.290,21	14	-140.458.057,12	16
Transportasi dan Pergudangan	3.670.970,00	4.468.210,00	64.499.390,00	689.700.700,00	42.014.845,68	5	-6.431.637,01	16	-34.785.968,66	13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.263.910,00	3.016.970,00	36.305.550,00	394.230.900,00	25.910.816,29	7	-3.591.617,73	15	-21.566.138,56	10
Informasi dan Komunikasi	1.383.100,00	2.336.670,00	44.918.870,00	695.839.100,00	15.829.803,31	10	4.212.726,03	1	-19.088.959,34	8
Jasa Keuangan dan Asuransi	649.280,00	861.330,00	52.020.680,00	696.065.500,00	7.431.114,66	14	607.331,21	7	-7.826.395,88	4
Real Estate	1.013.290,00	1.470.250,00	35.048.820,00	453.780.900,00	11.597.268,02	12	508.618,27	9	-11.648.926,28	6
Jasa Perusahaan	401.390,00	490.010,00	21.162.360,00	294.255.500,00	4.593.973,50	15	585.829,48	8	-5.091.182,98	3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.126.430,00	2.478.300,00	47.649.090,00	580.175.200,00	24.337.335,44	8	-572.359,11	12	-23.413.106,33	11
Jasa Pendidikan	2.741.260,00	4.239.070,00	41.734.480,00	549.396.500,00	31.374.164,28	6	1.970.772,30	5	-31.847.126,58	12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	726.420,00	1.044.900,00	13.210.050,00	201.149.000,00	8.313.994,45	13	2.020.759,17	4	-10.016.273,62	5
Jasa Lainnya	1.180.050,00	2.636.330,00	21.142.790,00	302.568.200,00	13.505.863,20	11	2.201.432,53	2	-14.251.015,73	7

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

C. Kesimpulan Analisis Sektoral

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bandung didorong oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Informasi detail mengenai persentase kontribusi tiga sektor utama terhadap PDRB Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 3.7**.

TABEL 3.7
PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR UTAMA TERHADAP PDRB ADHB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020

Sektor	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	52,44	51,92	52,07	53,01	50,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,57	13,49	13,29	12,94	12,83
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,01	7,95	7,84	7,53	7,7

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Ditinjau dari laju pertumbuhan PDRB per sektor, hampir seluruh sektor PDRB di Kabupaten Bandung selama rentang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi pertumbuhan. Laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada tahun 2020 menarik untuk ditinjau lebih dalam karena menunjukkan adanya deviasi laju pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh disrupsi pandemi Covid-19.

Dilihat dari besaran laju pertumbuhan ekonomi sektoral, pada tahun 2017 sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 12,99%, lalu disusul oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan angka laju pertumbuhan sebesar 11,62 % pada posisi kedua, dan sektor Konstruksi dengan angka laju pertumbuhan sebesar 10,65 % pada posisi ketiga. Adapun sektor dengan laju pertumbuhan terrendah pada tahun 2017 adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan angka laju pertumbuhan sebesar -0,70%.

Pada tahun 2020, terdapat kontribusi laju pertumbuhan sektor ekonomi yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari disrupsi pandemi Covid-19 dan adanya PSBB dan PPKM di Kabupaten Bandung. Sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi, yakni sebesar 23,61%, disusul oleh sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10,24%. Adapun beberapa sektor memiliki laju pertumbuhan yang negatif, diantaranya sektor Jasa Perusahaan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan masing-masing laju pertumbuhan sebesar -14,27%, -5,15%, dan -4,12%. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketiga sektor dengan laju pertumbuhan terendah ini sangat terdampak dengan adanya pembatasan kegiatan selama pandemi berlangsung di tahun 2020.

Informasi detail mengenai laju pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020 disajikan pada **Tabel 3.8**.

TABEL 3.8
LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2020

Sektor	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,62	1,46	1,28	0,19
Pertambangan dan Penggalian	-0,7	5,63	-1,63	0,43
Industri Pengolahan	5,75	7,48	7,49	-3,27
Pengadaan Listrik dan Gas	2,3	-1,69	0,91	-5,15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,33	6,66	4,06	10,24
Konstruksi	10,65	8,02	7,00	0,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	3,7	3,83	-3,78
Transportasi dan Pergudangan	5,38	4,25	3,5	-4,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,42	7,15	7,22	-3,21
Informasi dan Komunikasi	12,99	9,64	10,61	23,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,91	5,02	2,91	5,72
Real Estate	10,16	10,49	9,73	-0,37
Jasa Perusahaan	8,29	8,51	8,78	-14,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,95	1,87	3,19	-6,4
Jasa Pendidikan	7,92	6,25	6,35	4,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,62	8,15	9,18	-3,41
Jasa Lainnya	8,6	6,28	7,84	-1,53

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, kondisi perekonomian daerah dapat dianalisis dengan meninjau laju pertumbuhan ekonomi. Indikator angka pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan atau dikenal dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator yang dianggap lebih mencerminkan kondisi perekonomian daerah. Indikator LPE meminimalisir bias yang terjadi akibat adanya pengaruh inflasi, sehingga lebih valid dalam menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Meninjau angka LPE Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir, meskipun angka capaian PDRB ADHK Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi pertumbuhan LPE Kabupaten Bandung memiliki grafik yang fluktuatif dan cenderung menurun. Berdasarkan data BPS, LPE Kabupaten Bandung mengalami penurunan pada rentang tahun 2016-2017, yakni dari 6,34% ke 6,15%. LPE Kabupaten Bandung kemudian mengalami penguatan di tahun 2018 menjadi 6,26% namun terus menurun dari tahun 2018 ke tahun 2020. Adapun LPE di tahun 2020 mencapai -1,87% karena melemahnya perekonomian Kabupaten Bandung akibat pandemi Covid-19. Apabila disandingkan dengan target yang tercantum di dalam Perubahan RKPD 2020, dapat diketahui bahwa target LPE 2020 berada dalam rentang -1,10-2,10. Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi penurunan LPE, realisasi LPE di Kabupaten Bandung masih memenuhi target yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Fluktuasi LPE suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam konteks Kabupaten Bandung, faktor internal yang berpengaruh terhadap melemahnya LPE Kabupaten Bandung adalah menurunnya kontribusi keseluruhan sektor terhadap PDRB. Beberapa sektor yang kontribusinya menurun secara signifikan mencakup sektor Jasa Perusahaan. Melihat grafik perkembangan

LPE di Kabupaten Bandung selang waktu 2016-2020, perlu menjadi perhatian bahwa kecenderungan grafik pertumbuhan LPE sudah mengalami peningkatan, tetapi cenderung melambat dan sangat terdampak dengan adanya disrupsi kegiatan di Kabupaten Bandung selama pandemi.

Adapun dari segi eksternal, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global dan adanya perlambatan ekonomi global. Adanya ketidakstabilan perekonomian global yang disebabkan oleh disrupsi pandemi Covid-19 berpengaruh pada beberapa aspek, diantaranya:

1. Disrupsi dari rantai produksi global terhadap perdagangan dalam dan luar negeri
   Adanya perubahan rantai produksi, setiap wilayah atau negara diprediksikan akan menghentikan ekspor komoditas utama, terutama komoditas pertanian, mereka ke wilayah/negara lain dikarenakan setiap wilayah/negara dituntut untuk mengamankan pasokan dalam negerinya. Hal tersebut berdampak bahwa Kabupaten Bandung harus siap secara mandiri dalam meningkatkan pasokan ke wilayah Kabupaten Bandung.
2. Penurunan dari aktivitas pariwisata
   Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari pandemik COVID dispesifikasikan sebagai penurunan vertikal dari kurva pemintaan ekspor terkait pariwisata (yaitu perhotelan, restoran dan transportasi). Berdasarkan Survei Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, kinerja pariwisata menurun sebesar -25% sampai -50% per triwulan 1 dan 2.
3. Disrupsi produksi sebagai dampak dari PSBB dan PPKM
   Berdasarkan hasil analisis UNPAD (2020), disrupsi aktivitas produksi adalah penurunan produktivitas sebagai dampak dari PSBB yang dilakukan untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Dengan kata lain, adanya penurunan *total factor productivity* yang dialami oleh industri dari semua skala ekonomi (mikro, kecil, menengah, dan besar). Namun demikian, UNPAD (2020) memberikan penjelasan bahwa nilai *productivity shock*-nya bersifat *sector-region-specifics* dalam arti berbeda-beda tergantung sektornya apa dan lokasinya di wilayah mana, yang meliputi asumsi:
   a. Karena karakteristik proses produksi maka, sektor pertanian efeknya minimal karena tidak begitu memerlukan *physical distancing* antara pelakunya, sektor jasa diasumsikan lebih bisa memanfaatkan *work from home*, sementara sektor industri manufaktur akan terkena dampak terbesar karena karakteristik produksinya relatif membutuhkan sistem produksi massal;
   b. Tingkat informalitas dari sektor dan wilayah;
   c. Derajat *enforcement* dari pembatasan akan cenderung lebih kuat di daerah-daerah berkepadatan penduduk tinggi karena tingkat resiko penularannya tinggi. Diasumsikan pembatasan produksi efektif terjadi hanya satu bulan. Berdasarkan survei Pemerintah Kabupaten Bandung pada April 2020 terhadap kelompok usaha mikro dan kecil, tercatat sekitar 85% UMKM mengatakan produksi mengalami penurunan akibat harga bahan baku naik dan permintaan akan produk yang diproduksi menurun drastis.
   d. Untuk dampak pandemi Covid-19 yang tidak tertangani dengan baik, dilakukan melalui parameter mortalitas (penurunan *labor supply*), kualitas modal sosial, dan kenaikan dari risk-premium yang menunjukkan peningkatan ketidakpercayaan pasar.
   e. Disrupsi dari sisi konsumsi yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan.

Secara umum, dapat diketahui bahwa LPE Kabupaten Bandung pada tahun 2020 melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diilustrasikan pada **Gambar 3.1**. Meski demikian, seiring dengan keberjalanan pandemi pada paruh ke dua tahun 2020, perekonomian nasional dan daerah cenderung menguat, walau masih jauh dari laju pertumbuhan sebelum pandemi. Pada **Gambar 3.2**, dapat dilihat bahwa terjadi

penguatan pada Triwulan ke-2 hingga Triwulan ke-4 untuk LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini dapat mengindikasikan menguatnya juga LPE Kabupaten Bandung pada triwulan terkait. Selengkapnya ilustrasi LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada setiap triwulan di tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

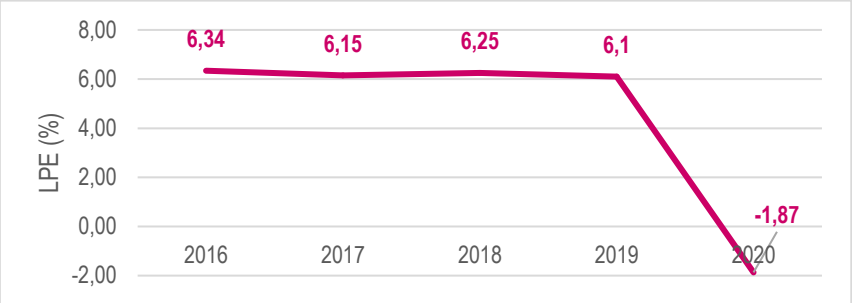

GAMBAR 3.1
GRAFIK PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

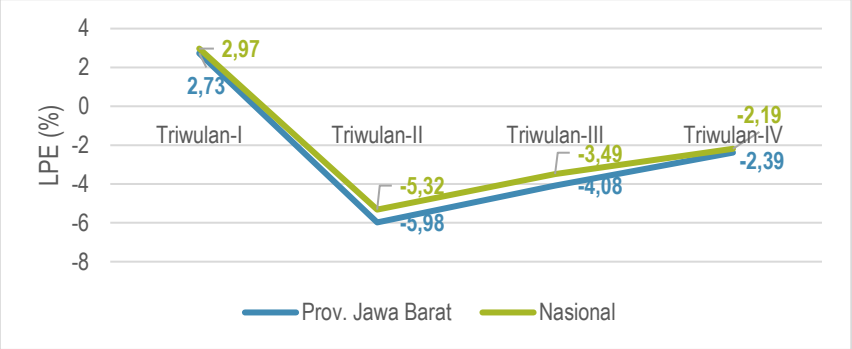

GAMBAR 3.2
GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL PER TRIWULAN DI TAHUN 2020
Sumber: BPS RI, 2021

3.1.1.3. Inflasi

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bandung yaitu tingkat inflasi. Inflasi menjadi suatu ukuran kestabilan harga barang dan jasa. Inflasi yang tinggi mengindikasikan tingginya fluktuasi kenaikan harga barang dan jasa, sedangkan inflasi yang terlampau rendah mengindikasikan lemahnya perekonomian wilayah sebab angka inflasi yang rendah tidak akan menciptakan stimulus bagi produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam lima tahun terakhir, tingkat inflasi Kabupaten Bandung cenderung berfluktuasi. Pada selang tahun 2016-2020, inflasi Kabupaten Bandung mengalami penurunan pada tahun 2016 ke 2017, yakni dari 3,61% menjadi 2,72%, dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 3,56%. Sampai tahun 2020, tingkat inflasi tersebut terus mengalami penurunan menjadi 1,44% di tahun 2020.

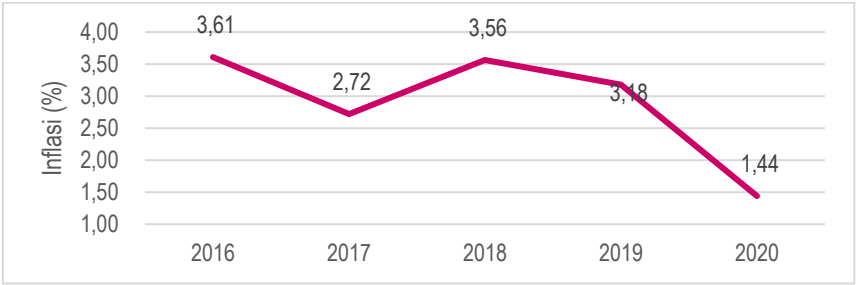

GAMBAR 3.3
GRAFIK PERKEMBANGAN INFLASI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

3.1.1.4. PDRB Per Kapita

Sejatinya tujuan pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari kemampuan daya beli atau pendapatan riil masyarakat yang dapat digambarkan melalui indikator PDRB Perkapita. PDRB Perkapita mengukur rata-rata akumulasi pendapatan yang diperoleh penduduk selama satu tahun.

Ditinjau dari indikator ini, angka PDRB Perkapita Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, PDRB ADHK dan ADHB per kapita Kabupaten Bandung tercatat sebesar Rp19.130.403,94 dan Rp26.228.705,14. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Di tahun 2020 PDRB ADHK dan ADHB perkapita Kabupaten Bandung menurun, yakni tercatat sebesar Rp21.095.968,71 dan Rp32.115.121,45, atau masing-masing mengalami penurunan sebanyak -3,27% dan -2,22%. Ditinjau pada skala lebih besar, pendapatan perkapita Kabupaten Bandung cenderung lebih rendah dari PDRB Perkapita Jawa Barat. Adanya pandemi dan disrupsi kegiatan perekonomian pada tahun 2020 tampak pada **Tabel 3.9** dengan adanya penurunan PDRB ADHB dan ADHK pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bandung. Akan tetapi, Dengan demikian, kedepan PDRB Perkapita Kabupaten Bandung perlu terus didorong dan dipulihkan kembali.

TABEL 3.9
PDRB PER KAPITA ADHB DAN ADHK DI KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PDRB ADHB PER KAPITA	PDRB ADHK PER KAPITA	LAJU PERTUMBUHAN (%)	
				PDRB ADHB PER KAPITA	PDRB ADHK PER KAPITA
2016	3.596.623	Rp26.228.705,14	Rp19.130.403,94	8,26%	4,49%
2017	3.657.601	Rp28.123.788,64	Rp19.969.224,03	7,23%	4,38%
2018	3.717.291	Rp30.474.122,31	Rp20.877.714,63	8,36%	4,55%
2019	3.775.279	Rp32.845.570,68	Rp21.809.416,71	7,78%	4,46%
2020	3.623.790	Rp32.115.121,45	Rp21.095.968,71	-2,22%	-3,27%

TAHUN	PDRB ADHB PER KAPITA		PDRB ADHK PER KAPITA	
	PROVINSI JAWA BARAT	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	NASIONAL
2016	Rp34.893.620,56	Rp47.937.722,50	Rp26.923.505,52	Rp36.468.616,38
2017	Rp37.223.110,89	Rp51.891.171,86	Rp27.970.918,46	Rp37.851.365,21
2018	Rp40.305.586,71	Rp55.990.395,65	Rp29.161.391,20	Rp39.338.850,62
2019	Rp43.092.045,33	Rp59.065.437,01	Rp30.247.470,83	Rp40.844.017,67
2020	Rp42.493.747,25	Rp56.938.720,00	Rp25.310.591,99	Rp39.556.580,00

Sumber: BPS RI, 2021

3.1.1.5. Indikator Makro Ekonomi Lainnya

Disamping indikator ekonomi yang terlah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa indikator makro lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan Kabupaten Bandung. Dalam implementasi pembangunan daerah di tahun 2022, Pemerintah dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Dengan demikian, proyeksi untuk tahun 2022 tidak dapat dilakukan secara normatif seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan mempertimbangkan dampak adanya Covid-19 di Kabupaten Bandung, khususnya terhadap dampak perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tahun 2022 juga harus mempertimbangkan semangat pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung di tahun 2020.

Dalam menentukan proyeksi pada tahun 2022, maka terdapat beberapa asumsi dan prediksi yang digunakan agar formulasi target indikator makro Kabupaten Bandung dapat sesuai dengan perkembangan yang ada. Prediksi dan asumsi yang digunakan dalam reformulasi target indikator makro Kabupaten Bandung antara lain:

1. Adanya semangat pemulihan perekonomian daerah dan kesehatan masyarakat akibat dampak Covid-19 di Indonesia. Disrupsi pandemi mengakibatkan keterpurukan kondisi ekonomi akibat terbatasnya aktivitas perekonomian global yang mengakibatkan kegiatan ekspor impor dan investasi menjadi sangat terbatas. Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak terhadap pelaku ekspor impor dan investasi saja, tetapi juga pada industri *backward* dan *forward linkage* yang terdapat di daerah. Meski demikian, kondisi ini berangsur menguat seiring dengan dilakukannya intervensi rekayasa sosial seperti skema *work from home, social distancing,* Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan 3M dan proses vaksinasi, serta digitalisasi perekonomian melalui pemasaran dan pembayaran digital di *e-commerce platforms.*
2. Sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), distribusi vaksin Covid-19 mulai dilakukan di awal tahun 2021 dan penyelenggaraan vaksinasi sudah dilakukan bertahap untuk kalangan prioritas. Dengan adanya penyelenggaraan program vaksinasi tersebut, terdapat optimisme untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan perekonomian masyarakat di tahun-tahun mendatang.
3. Penurunan kesejahteraan masyarakat secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini tentu memberikan pengaruh terhadap penurunan inflasi yang juga akan memberikan dampak terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja lainnya.
4. Ukuran kesehahteraan selanjutnya tidak hanya terbatas pada tingkat kemiskinan, tetapi juga indeks pembangunan manusia, dimana dengan adanya pandemi COVID-19 ini kondisi kesehatan masyarakat menjadi sangat rawan. Disamping itu, diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat yang salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar, sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi pendidikan masyarakat khususnya penduduk usia sekolah.

Dengan berkembangnya pandemi ini, memberikan pengaruh terhadap capaian pembangunan daerah di tahun 2022, salah satunya terhadap indikator makro sosial dan ekonomi Kabupaten Bandung. Masih terdapat banyak ketidakpastian di masa pemulihan dampak pandemi ini, di antaranya terkait penyelenggaraan pencapaian pembangunan daerah. Di lain sisi, terdapat pula target indikator makro sosial dan ekonomi dari tingkat nasional dan provinsi yang senantiasa mendorong agar pembangunan di Kabupaten Bandung kedepannya dapat berkembang secara terukur secara sosial dan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun formulasi dalam menentukan target capaian indikator makro di akhir periode tahun 2022 yang disusun ke dalam 3 (tiga) skenario, yakni skenario pesimis, moderat, dan optimis.

TABEL 3.10
SKENARIO TARGET PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Skenario Target 2022		
			Pesimis	Moderat	Optimis
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,99	4,75	5,25
2	PDRB ADHB	Juta rupiah	127.605.136,80	136.561.077,2	145.517.017,61
3	PDRB ADHK	Juta rupiah	79.566.228,46	83.856.515,35	88.146.802,24
4	PDRB ADHB Per Kapita	Rupiah	34.060.793,44	36.414.618,38	38.841.893,07
5	PDRB ADHK Per Kapita	Rupiah	21.238.086,02	22.360.712,64	23.528.441,72
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	3,8	2,9	1,99
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,46	1,43	1,4
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,47	73,48	74,32
9	Indeks Pendidikan	Indeks	64	65,78	67
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,8	8,84	9,27
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,38	12,73	13,09
12	Indeks Kesehatan	Indeks	82	82,73	83
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,62	73,77	73,92
14	Indeks Pengeluaran	Indeks	71,73	72,65	73,56
15	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	10.550,00	10.800,00	10.980,00
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,3	6,32	4,98
17	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	232.922	233.636	230.471
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,26	8,15	6,7
19	Gini Ratio	Nilai	0,41	0,4	0,39
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,3	0,4	0,5

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dari 18 indikator makro di **Tabel 3.10**, terdapat 8 (delapan) di antaranya yang diarahkan untuk Kabupaten Bandung dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Perbandingan arahan indikator makro Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk Kabupaten Bandung dengan hasil prediksi dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

TABEL 3.11
PERBANDINGAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 DAN HASIL PREDIKSI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 (Amanat RPJMN 2020-2024 dan Permendagri 18/2020)			Target Pembangunan dari Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	72,8	73,48	74,17	72,5	73,48	73,78
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,8	8,84	8,97	8,93	8,84	8,97
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,06	13,16	13,48	12,52	12,73	12,74
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,43	73,89	73,98	73,53	73,77	73,9
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	10.550	10.800	10.980	10.201	10.800,00	10.980,00
Tingkat Kemiskinan (%)	6,3	6,23	6,06	6,5	6,32	6,06

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 (Amanat RPJMN 2020-2024 dan Permendagri 18/2020)			Target Pembangunan dari Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,6	8,6	9,6	5,45	8,15	7,93
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5,25	5,59	3,56	4,75	5,17

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Berdasarkan **Tabel 3.11**, dapat diketahui terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sesuai amanat RPJMN Tahun 2020-2024 dengan target pembangunan yang diprediksi Bappeda Kabupaten Bandung dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Perbedaan ini tidak berarti bahwa program pembangunan Kabupaten Bandung tidak mendukung target nasional dan target provinsi yang diarahkan untuk kabupaten/kota. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu penetapan target, yakni indikator makro nasional yang melatarbelakangi arahan target pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota ditetapkan sebelum masa pandemi Covid-19 sedangkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berada pada pada fase pemulihan dan bahkan *second wave*. Untuk itu dilakukan penyesuaian proyeksi target indikator makro tersebut dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk merespon dan melakukan adaptasi terhadap kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Penyesuaian terhadap indikator pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Pemerintah Pusat melalui RKP 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021 yang berbeda angka target pembangunannya dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil analisis oleh Tim Penyusun RKPD, skenario yang akan diambil untuk dijadikan dasar penentuan target perubahan di tahun 2022 adalah skenario moderat. Skenario ini dipilih karena sudah memulai menguatnya perekonomian masyarakat pada akhir tahun 2020 seiring dengan diberlakukannya berbagai rekayasa sosial dan intervensi pada sektor kesehatan dan perekonomian. Selain itu, mulai berjalannya proses vaksinasi pada berbagai kalangan prioritas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, diharapkan dapat melindungi sebagian besar kesehatan masyarakat dan perlahan dapat membantu memulihkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, capaian indikator makro pada tahun 2021 dan 2022 dapat sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat. Adapun capaian indikator makro tahun 2020 serta proyeksi untuk tahun 2021 dan 2022 ditampilkan dalam **Tabel 3.12** berikut.

TABEL 3.12
REALISASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN PROYEKSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,87	3,56	4,75
2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta rupiah	123.049.250,00	124.212.480,80	136.561.077,2
3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta rupiah	80.829.310,00	79.965.806,99	83.856.515,35
4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita	Rupiah	14.639.157,88	33.596.483,16	36.414.618,38
5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita	Rupiah	32.115.121,45	21.628.824,02	22.360.712,64

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	1,44	3,89	2,9
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,49	1,81	1,43
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,39	72,33	73,48
9	Indeks Pendidikan	Indeks	65,12	64,55	65,78
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	8,93	8,84
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,52	12,73
12	Indeks Kesehatan	Indeks	82,35	82,41	82,73
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,53	73,53	73,77
14	Indeks Pengeluaran	Indeks	70,74	71,14	72,65
15	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	Ribu rupiah	10.201,00	10.201,00	10.800,00
16	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	6,91	6,5	6,32
17	Jumlah penduduk miskin (Jiwa)	Jiwa	263.600	232.923	233.636
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	8,58	5,45	8,15
19	Gini Ratio	Nilai	0,414	0,415	0,4
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	N/a	0,3	0,4

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Sistem perekonomian Kabupaten Bandung bersifat terbuka dan dipengaruhi oleh perekonomian wilayah lain, baik wilayah yang sifatnya horizontal kabupaten/kota lain maupun wilayah vertikal di tingkat provinsi dan nasional. Dengan demikian, keberadaan faktor eksternal ini dapat menjadi tantangan sekaligus prospek bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung. Sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai tantangan serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan prospek ekonomi kedepan, maka dalam RKPD Tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Bandung turut memperhatikan arah kebijakan ekonomi pemerintah provinsi Jawa Barat dan nasional, serta turut memperhatikan fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

3.1.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022

Perekonomian nasional pada akhir tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mulai menguat. Sebagaimana dapat dilihat di **Tabel 3.13**, hamper semua komponen PDB pada sisi pengeluaran mengalami perbaikan. Selain itu, penguatan ekonomi ini dapat disebabkan oleh berbagai stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti distribusi bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa, yang berkontribusi terhadap konsumsi di tingkat pemerintah daerah.

TABEL 3.13
KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL SISI KONSUMSI

Komponen	2018	2019					2020				
		I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan
Konsumsi rumah tangga	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63
Konsumsi LNPRT	9,1	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	-5,01	-7,82	-1,97	-2,14	-4,29
Konsumsi Pemerintah	4,8	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,75	-6,9	9,76	1,76	1,94
Investasi PMTDB	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	1,7	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95
Ekspor	6,55	-1,58	-0,73	0,1	-0,39	-0,87	0,24	-12,02	-11,66	-7,21	-7,7
Impor	11,88	-7,47	-6,84	-8,3	-8,05	-7,69	-3,62	-18,29	-23	-13,52	-14,71

Komponen	2018	2019					2020				
		I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan
PDB	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07

Sumber: BPS RI, 2021

Tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, kebijakan ekonomi tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi, khususnya pertumbuhan pada segi investasi, ekspor dan industri pengolahan. Adapun sektor jasa sebagai salah satu sektor yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19 menjadi fokus penanganan dan akselerasi pemulihan ekonomi.

Terdapat beberapa asumsi yang melatarbelakangi kebijakan pemulihan ekonomi di tahun 2022. Di antaranya, diprediksi bahwa konsumsi masyarakat akan kembali menguat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan rendahnya tingkat inflasi. Fenomena *revenge spending* diperkirakan akan terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas sehingga dapat mendorong belanja di masyarakat. Meski demikian, konsumsi pemerintah diperkirakan akan relatif lambat, yakni pada 0,8-2,8%, dan diarahkan untuk melakukan realokasi belanja ke yang lebih produktif serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi domestik, maka impor dan ekspor barang dan jasa juga diperkirakan akan meningkat, yakni mencapai 7,8-8,9%.

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2022 ini dapat menjadi tantangan maupun prospek bagi perekonomian Kabupaten Bandung kedepannya. Kebijakan perekonomian Indonesia yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah diantaranya yaitu pencanangan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang diharapkan dapat mencapai 5,4-6,0%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat bermaksud untuk meningkatkan PDB sisi produksi khususnya pada 7 (tujuh) sektor diantaranya sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor konstruksi, dan sektor pertambangan. Selain itu, perencanaan nasional mencanangkan penurunan PDB sisi pengeluaran diantaranya konsumsi RT dan LNPRT, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Berikut ini merupakan sasaran makro ekonomi nasional.

TABEL 3.14
TARGET SASARAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TAHUN 2020-2022

No.	Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
1	Pertumbuhan PDB (%,yoy)	-2,1	5,0	5,4-6,0
2	Laju inflasi, IHK (%, yoy): Akhir Periode	2,6	1,5	2,0-4,0
Neraca Pembayaran				
3	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%,yoy)	1,3	5,1	7,1-7,6
4	Cadangan Devisa (US$ miliar)	135,9	136,1	138,2-141,5
	- Dalam bulan impor	10,2	8,8	8,0-8,1
5	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	-1,0	(1,6)-(1,7)
Keuangan Negara				
6	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	8,3-8,4
7	Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,2	-3,6	(2,6)-(3,2)
8	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,2	-5,7	(4,7)-(5,5)
9	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	41,4	45,3-46,5
PMTB/Investasi				
10	Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB (Peringkat)	73	56	51
11	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	4,3	6,5-7,2

No.	Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
12	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Triliun)	826,3	858,5	968,4
Target Pembangunan				
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9-6,5	5,5-6,2
14	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7	8,5-9,0
15	Rasio Gini (Nilai)	0,385	0,377-0,382	0,376-0,378
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	71,94	72,70	73,44-73,48
Penurunan Emisi GRK				
17	Penurunan Emisi GRK	25,93	24,05	26,87
Indikator Pembangunan				
18	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	102-104	102-104
19	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22	102-104	102-105

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

Di samping pemulihan ekonomi, Pemerintah juga berupaya melakukan peningkatan daya saing melalui agenda reformasi struktural. Agenda ini dilakukan dengan 1) pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha; 2) diversifikasi ekonomi; dan 3) reformasi struktural. Rincian penjelasan agenda reformasi di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1) Pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha
   Upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha dilakuna dengan 5 agenda, yakni penuntasan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga, percepatan pembangunan infrastruktur padat karya, dan program khusus.
2) Diversifikasi ekonomi
   Upaya diversifikasi ekonomi dilakukan dengan melakukan peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Di samping itu, dilakukan juga transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.
3) Reformasi struktural
   Perbaikan iklim investasi dilanjutkan dengan implementasi UU Cipta Kerja dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi juga dilakukan pada kelembagaan dan tata kelola, yakni dengan mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM serta perbaikan sistem kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Outlook perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2022 didasari oleh optimisme bahwa perekonomian tahun 2021 dan 2022 akan lebih baik dari tahun 2020. Hal ini disasari oleh beberapa kebijakan yang sudah dan diprediksi akan terus membawa perbaikan yang signifikan terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, meliputi perkembangan digitalisasi perdagangan dan UMKM dan pendistribusian vaksin untuk tenaga kesehatan dan berbagai kelompok prioritas lainnya. Dengan demikian, kondisi perekonomian Jawa Barat berfokus pada akselerasi penanganan dampak Covid-19.

Beberapa tantangan perekonomian daerah yang dihadapi Provinsi Jawa Barat tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, adalah sebagai berikut.

1. Tantangan sektor investasi untuk membangkitkan kembali realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Barat;
2. Tantangan sektor industri untuk mensubstitusi bahan baku impor, menyesuaikan produksi dengan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi 4.0, terutama untuk industri otomotif, elektronik, kimia dan produk olahan pangan;
3. Tantangan sektor pariwisata untuk menguatkan kembali daya saing pariwisata daerah, terutama dengan adanya kebijakan PSBB dan PPKM yang berdampak signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan di perhotelan, restoran dan biro perjalanan;
4. Tantanan sektor perdagangan, terutama dengan menurunnya impor bahan baku dan ekspor produk Jawa Barat maka berimplikasi pada sulitnya pemenuhan kebutuhan pasar serta berkurangnya daya saing UMKM;
5. Tantangan sektor pangan untuk mendukung produksi, pengolahan, dan distribusi bahan pangan;
6. Tantangan sektor ketenagakerjaan untuk memberdayakan tenaga kerja yang dirumahkan akibat aktivitas usaha yang terhenti.

Dengan demikian, untuk tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan tema/fokus pembangunan tahunan yang tercantum dalam tema/fokus pembangunan lima tahunan pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu "Peningkatan Daya Saing Daerah". Pada tahun 2022, pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat difokuskan pada "Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian". Tema tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 meliputi:

1. Reformasi sistem kesehatan daerah
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan
4. Reformasi sistem perlindungan sosial
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah
8. Gerakan membangun desa
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Secara umum, target indikator makro Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022 disajikan pada **Tabel 3.15**.

TABEL 3.15
TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2023

No.	Indikator	Nasional (2022)	Jawa Barat (2022)	Jawa Barat (2023)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,44	72,57	73,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-6,0	3,92	4,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5-6,2	10,16	9,69
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,5-9,0	7,67	7,54
5	Indeks Gini	0,376-0,378	0,400	0,396
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,16	1,12
7	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	N/A	46,48	49,29

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, membuka bidang bisnis, berinvestasi dan membuka industri besar. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Pemulihan Industri dan Perdagangan
    a. Meningkatkan perlindungan dan keahlian tenaga kerja;
    b. Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0;
    c. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dan IKM;
    d. Meningkatkan ekspor melalui pengembangan pasar ekspor dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri;
    e. Digitalisasi koperasi dan UKM untuk peningkatan daya saing;
    f. Peningkatan kapasitas fiskal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal daerah untuk membantu efektivitas kebijakan relaksasi kredit bagi IKM dan UMKM.
2. Perbaikan sistem pangan, meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi dan pasokan pangan.
3. Pembangunan pariwisata pemulihan kinerja pariwisata dengan:
    a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif dan digital; dan
    b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dengan branding baru yang mengutamakan protokol kesehatan.
4. Percepatan investasi
    a. Mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor;
    b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
    c. Fasilitasi untuk percepatan proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya.
5. Pembangunan infrastruktur mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya
6. Penguatan sektor kesehatan
    a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan jaminan kesehatan; dan
    b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

3.1.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2022

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2022 dirumuskan atas dasar pencapaian, tantangan dan prospek perekonomian pada tahun 2020 dan awal tahun 2021. Berkaitan dengan hal ini, arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk tahun 2022 diarahkan pada berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan memulihkan kondisi perekonomian dan kesehatan daerah. Beberapa prioritas yang menjadi fokus dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung antara lain adalah sektor kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perekonomian, pendidikan, pariwisata serta keamanan dan ketertiban. Sektor-sektor tersebut dianggap sebagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Sementara itu, sektor lain yang tidak termasuk ke dalam fokus menjadi bagian dari sektor-sektor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sektor yang menjadi fokus. Artinya, dalam penyusunan kebijakan ekonomi, tetap mencantumkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor lainnya.

Dalam pelaksanaannya, intervensi pemerintah ke dalam sektor yang menjadi fokus tersebut dapat tercermin melalui kebijakan pembangunan, salah satunya adalah kebijakan ekonomi sebagai haluan bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan program dan kegiatan sesuai dengan sektornya masing-masing. Dengan

kata lain, kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung merupakan salah satu bentuk pengintegrasian sektoral dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pembangunan pada tahun 2022 diprediksi akan membaik seiring dengan terdistribusikannya vaksin Covid-19, meningkatnya produktivitas di berbagai sektor lapangan usaha, dilakukannya kembali pembangunan dan dipercepatnya digitalisasi dan investasi di sektor perdagangan. Dengan demikian, skenario pemulihan ekonomi difokuskan pada penjagaan momentum akselerasi pemulihan ekonomi daerah, yakni dengan mempertahankan keberlanjutan produksi kelompok usaha dan memastikan daya beli masyarakat terjaga. Skenario ini juga mendukung strategi pemulihan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Secara lebih rinci, skenario pemulihan ekonomi di Kabupaten Bandung dilakukan dengan 3 (tiga) pilar prioritas, yakni pilar Pemberdayaan UMKM, pilar Ketahanan Pangan, dan pilar Pemulihan Sektor Pariwisata. Berikut adalah penjelasan masing-masing pilar disertai ilustrasinya pada **Gambar 3.4**.

1. Pemberdayaan UMKM; Pilar (1) ini ditujukan untuk mempertahankan keberlanjutan produksi dan pemasaran produk UMKM melalui fasilitasi kerjasama pemodalan dan digitalisasi usaha.
2. Peningkatan ketahanan pangan melalui penataan logistik pangan; Pilar (2) memastikan masyarakat Kabupaten Bandung mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap pangan yang sehat. Penataan kelembagan simpul pangan di desa dan kabupaten menjadi prioritas.
3. Pemulihan sektor pariwisata. Branding dan promosi pariwisata menjadi target utama pada pilar (3).

GAMBAR 3.4
SKENARIO PEMULIHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Adapun strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bandung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Strategi penataan logistik produk pangan dan non pangan, dengan arah kebijakan penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar;
2. Strategi penumbuhan dan penataan sentra industri, dengan arah kebijakan a) fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri, b) fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan, c) fasilitasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi, dan d) penatausahaan penyelenggaraan panas bumi;
3. Strategi peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha, dengan arah kebijakan pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro;
4. Strategi peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi, dengan arah kebijakan a) peningkatan daya saing usaha koperasi melalui

peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya; dan b) peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi;

5. Strategi peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi, dengan arah kebijakan a) pengembangan simpul pangan regional dan lokal; b) pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular; dan c) peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
6. Strategi peningkatan daya saing sektor perikanan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi, dengan arah kebijakan a) pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan; b) pengembangan kualitas hidup ikan perairan; dan c) pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
7. Strategi promosi dan branding kawasan wisata, dengan arah kebijakan penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung;
8. Strategi penataan daerah kawasan pariwisata berstandar global, dengan arah kebijakan peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan
9. Strategi penguatan ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global, dengan arah kebijakan pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
10. Strategi penguatan ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global, dengan arah kebijakan optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan Sunda;
11. Strategi optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya daerah sebagai daya tarik investasi, dengan arah kebijakan penguatan daya tarik investasi daerah;
12. Strategi peningkatan citra Kabupaten Bandung sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan prospektif, dengan arah kebijakan a) penyelenggaraan promosi dalam investasi di Kabupaten Bandung; dan b) peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal;
13. Strategi pemerataan pelayanan sekolah formal dan non formal, dengan arah kebijakan a) pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global; dan b) pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
14. Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan pelayanan pendidikan terutama dalam mendukung industri 4.0 dan isu-isu pembangunan global, dengan arah kebijakan a) peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0; dan b) peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global;
15. Strategi peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga derajat kesehatannya terutama terkait stunting, diabetes, hipertensi, TB, HIV/AIDS dan gangguan jiwa, dengan arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan;
16. Strategi peningkatan pelayanan bidang kesehatan melalui optimalisasi sarana prasarana kesehatan, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan;
17. Strategi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan reproduksi, dengan arah kebijakan a) meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi; dan b) menurunkan angka kelahiran murni;
18. Strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dengan arah kebijakan meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada fasilitas kesehatan;
19. Strategi peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan rumah sakit daerah dalam melayani masyarakat;

20. Strategi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah yang berkualitas, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah;
21. Strategi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan infrastruktur daerah, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah;
22. Strategi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana;
23. Strategi peningkatan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik;
24. Strategi peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan;
25. Strategi meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip, dengan arah kebijakan penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip;
26. Strategi optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas APIP;
27. Strategi peningkatan kualitas sistem manajemen ASN, dengan arah kebijakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN;
28. Strategi peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dengan arah kebijakan digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan;
29. Strategi meningkatkan kemandirian fiskal, dengan arah kebijakan optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan;
30. Strategi meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan arah kebijakan penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
31. Strategi peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam hidup bermasyarakat, dengan arah kebijakan menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis;
32. Strategi peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat, dengan arah kebijakan pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan;
33. Strategi penguatan daya beli masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran;
34. Strategi meningkatkan kualitas pengelolaan angkatan kerja, dengan arah kebijakan a) meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja; b) meningkatkan perlindungan pekerja;
35. Strategi meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dengan arah kebijakan peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0.;
36. Strategi meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan melindungi hak-hak anak, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak; dan
37. Strategi pencapaian ketahanan pangan daerah dan masyarakat melalui penciptaan inovasi dan penguatan kolaborasi simpul pangan, dengan arah kebijakan pengembangan simpul pangan regional dan lokal.

Adapun proyeksi target indikator makro Kabupaten Bandung Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

TABEL 3.16
TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No	Indikator	Satuan	Proyeksi 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75
2	PDRB ADHB	Juta rupiah	136.561.077,2
3	PDRB ADHK	Juta rupiah	83.856.515,35
4	PDRB ADHB Per Kapita	Rupiah	36.414.618,38
5	PDRB ADHK Per Kapita	Rupiah	22.360.712,64
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	2,9
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,43
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,48
9	Indeks Pendidikan	Indeks	65,78
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,84
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73
12	Indeks Kesehatan	Indeks	82,73
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77
14	Indeks Pengeluaran	Indeks	72,65
15	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	10.800,00
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,32
17	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	233.636
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15
19	Gini Ratio	Nilai	0,4
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,4

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta berdasarkan azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap tahunnya dibutuhkan kebijakan dalam penggelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Melalui pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan terjadi peningkatan kapasitas riil keuangan daerah dalam efisiensi penggunaannya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan dan pendanaan daerah terkait erat dengan ketersediaan pendapatan. Besaran pendapatan daerah menentukan tingkat kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Ditinjau berdasarkan komponennya, pendapatan daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga komponen pendapatan tersebut, hanya komponen pendapatan asli daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

Tingkat II. Sehingga, pada proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang dipaparkan pada subbab ini hanya meliputi proyeksi terhadap pendapatan asli daerah.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan metode geometrik sebagaimana arahan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun basis data yang digunakan untuk menghitung variabel rata-rata pertumbuhan yaitu data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020. Adapun rumus perhitungan geometrik yang digunakan dalam perhitungan yaitu sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan (R) = $\{(1+P1)(1+P2)(1+Pt)\}^{1/t} - 1$

Dimana:

P : Perubahan nilai dari nilai tahun sebelumnya

t : Periode pengamatan perubahan nilai

Sementara nilai P didapatkan melalui logika perhitungan sederhana:

$$P = \frac{\mathbf{pn - p(n-1)}}{\mathbf{p(n-1)}}$$

Dimana:

pn : Nilai pada suatu periode

p(n-1) : Nilai pada periode satu tahun sebelumnya

Kemudian untuk memproyeksikan nilai pada tahun berikutnya, digunakan rumus yang diturunkan dari rumus rata-rata pertumbuhan diatas.

$pn = p(n-x)*(1+R)^x$

Dimana x merupakan jarak tahun dari tahun proyeksi.

Proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pendapatan asli daerah dengan didasarkan pada basis tahun proyeksi berupa data pendapatan asli daerah tahun 2020. Namun demikian, mengingat adanya fluktuasi yang sangat tajam pada beberapa komponen, maka angka pertumbuhan proyeksi beberapa komponen tersebut tidak menggunakan angka rata-rata normal, melainkan angka pertumbuhan asumsi.

3.2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan konsolidasi dengan Tim Penyusun RKPD Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2022 sebagai berikut.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Adapun yang menjadi sumber penerimaan daerah dalam APBD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 secara rinci meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Adapun komponen PAD, yaitu dari pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Dalam upaya meningkatan pendapatan dari sektor PAD ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Intensifikasi penerimaan PAD baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah melalui penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD;
b. Intensifikasi pajak dan retribusi melalui peningkatan objek pajak dengan mekanisme pemeberikan insentif dan disinsentif;
c. Meningkatkan kualitas data potensi pajak daerah sebagai dasar penetapan target penerimaan pajak daerah;
d. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dalam rangka mengurangi kesenjangan terhadap Perekonomian Daerah;
e. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah terkait;
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD;
h. Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan anggaran belanja langsung Perangkat Daerah agar dapat mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pembentuk PAD;
i. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi daerah terutama melalui kelompok retribusi jasa usaha; dan
j. Meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui penyertaan modal.

2. Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Adapun komponen Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Pendapatan transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer adalah dengan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang akan ditempuh adalah dengan cara meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Bandung tersebut, strategi pencapaiannya meliputi:

1. Strategi optimalisasi database wajib pajak;
2. Strategi relaksasi pajak daerah;
3. Strategi memperkuat sistem *self-assessment* pajak;
4. Strategi digitalisasi pelayanan pajak;
5. Strategi memperkuat sistem PBHTB sesuai dengan nilai objek pajak;
6. Strategi optimalisasi NJOP sesuai kondisi lapangan/harga pasar.

TABEL 3.17

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020 DAN PROYEKSI KABUPATEN BANDUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

No.	Uraian	RKPD 2020	Realisasi 2020	RKPD 2021	Proyeksi Tahun 2022
	Permendagri No.13 Tahun 2006				
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**893.967.336.241,73**	**980.952.203.084,99**	**816.771.755.012,80**	**-**
1.1.1	Pajak Daerah	417.274.037.623,00	498.815.169.939,00	342.359.902.000,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	22.040.410.102,33	21.282.679.329,00	19.763.902.911,40	
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	68.441.288.786,00	74.021.306.917,00	68.441.288.786,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	386.211.599.730,40	386.833.046.899,99	386.206.661.315,40	
1.2	**Dana Perimbangan**	**3.042.948.567.726,00**	**2.957.340.547.626,00**	**2.371.291.156.000,00**	**-**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	356.798.208.000,00	311.597.786.968,00	379.528.752.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.991.762.404.000,00	1.967.815.290.000,00	1.991.762.404.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	694.387.955.726,00	677.927.470.658,00	-	
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**1.425.974.263.409,00**	**961.565.635.647,00**	**859.803.884.049,00**	**-**
1.3.1	Hibah	381.302.700.000,00	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	520.504.594.049,00	452.165.021.128,00	520.504.594.049,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	83.017.987.000,00	83.017.987.000,00	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	92.849.692.360,00	82.460.426.657,00	-	
1.3.7	Dana Desa	319.299.290.000,00	318.473.742.000,00	319.299.290.000,00	
1.3.8	Penerimaan Panas Bumi	29.000.000.000,00	25.448.458.862,00	20.000.000.000,00	
	PP No. 12 Tahun 2019				
4.	**PENDAPATAN**				
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**				**1.091.878.496.339,00**
4.1..01	Pajak Daerah				542.995.000.000,00
4.1..01	Retribusi Daerah				32.414.815.670,00
4.1..01	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan				68.441.288.786,00

No.	Uraian	RKPD 2020	Realisasi 2020	RKPD 2021	Proyeksi Tahun 2022
4.1..01	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				448.027.391.883,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**				**3.233.467.956.601,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	2.639.308.213.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	594.159.743.601,00
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**				**26.900.000.000,00**
4.3.01	Hibah				26.900.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**5.362.890.167.376,73**	**4.899.858.386.357,99**	**4.047.866.795.061,80**	**4.352.246.452.940,00**

Sumber: BAPENDA dan BKAD Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 3.18
SELISIH PENDAPATAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 DENGAN PROYEKSI DALAM RPJMD

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
4.	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**1.091.878.496.339,00**	**1.091.878.496.339,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	-	542.995.000.000,00	542.995.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	-	32.414.815.670,00	32.414.815.670,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	68.441.288.786,00	68.441.288.786,00	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	448.027.391.883,00	448.027.391.883,00	
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**-**	**3.233.467.956.601,00**	**3.233.467.956.601,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	2.639.308.213.000,00	2.639.308.213.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	594.159.743.601,00	594.159.743.601,00	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**0**	**26.900.000.000,00**	**26.900.000.000,00**	
4.3.01	Hibah	0	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**4.352.246.452.940,00**	**4.352.246.452.940,00**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan dengan sasaran dan prioritas Provinsi Jawa Barat dan nasional, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung disusun dengan turut memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Adapun substansi yang perencanaan belanja Tahun 2022 telah mempedomani Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022, dengan memperhatikan:

1. Arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Nasional dan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2022;
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
3. Arah kebijakan dan sasaran RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 guna tercapainya visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Bandung;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bandung pada penyusunan RKPD Tahun 2022;
5. Evaluasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
6. Visi, misi dan program kepala daerah terpilih; dan
7. Dampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana Pemerintah menetapkan prinsip *money follow program*, kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja tahun 2022 merujuk pada 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, yakni:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
2. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
3. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
6. Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan
7. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
8. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
9. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 dirancang untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta mendukung prioritas pembangunan baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional. Selengkapnya penjabaran mengenai prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dijabarkan pada Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain meliputi:

1. Belanja Operasi

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kebijakan Belanja Operasi tahun anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

   a. Belanja Pegawai

      Mengalokasikan belanja pegawai secara cermat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   b. Belanja Barang dan Jasa

      - Mengalokasikan belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.
      - Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), pemenuhan standar pelayanan berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

   c. Belanja Subsidi

      Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD yang diperutukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum *(Public Service Obligation).*

   d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

      - Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial secara berkala.
      - Mengalokasikan belanja bantuan sosial diperuntukan untuk bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal

   Mengalokasikan belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

   Mengalokasikan belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   a. Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan transfer sekurang-kurangnya 10%) kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomi daerah;

   b. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah

desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan pada pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Adapun kegiatan prioritas tahun 2022 diarahkan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, infrastruktur, pertanian dan pariwisata, diantaranya disajikan pada **Tabel 3.19.**

TABEL 3.19
KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Kegiatan Prioritas	
A	**Pendidikan**
1	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini
2	Memenuhi persyaratan sarana pendidikan dasar (SD dan SMP) sesuai standar nasional pendidikan
3	Pengembangan kurikulum muatan lokal
4	Meningkatkan insentif bagi guru honor dan tenaga pendidikan
5	Pembinaan prestasi olah raga pada usia pendidikan dasar dan menengah
6	Memfasilitasi peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk memberi kesempatan belajar kepada penduduk usia 25 tahun keatas
7	Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi
8	Optimalisasi pendidikan karakter yang religius
B	**Kesehatan**
1	Pemerataan tenaga kesehatan sampai ke fasilitas kesehatan terdepan
2	Pembangunan rumah sakit tipe D
3	Peningkatan kapasitas Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan
4	Peningkatan kapasitas RS rujukan
5	Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
6	Fasilitasi Posyandu
7	Optimalisasi vaksinasi Covid-19 masyarakat Kabupaten Bandung
8	Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam rangka pemenuhan *Universal Health Coverage*
9	Optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
C	**Sosial**
1	Mewujudkan satu data pembangunan daerah yang terintegrasi dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten (termasuk updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2	Menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk Kab. Bandung
3	Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
4	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, Ormas, Pramuka, Karang Taruna, serta Petugas Sosial Masyarakat Lainnya
5	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan kebencanaan serta kebakaran
6	Pembinaan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
7	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
8	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan ketahanan keluarga
D	**Ekonomi**
1	Memfasilitasi bantuan modal bagi Koperasi dan usaha Mikro dalam upaya recovery ekonomi pasca Pandemi Covid-19

Kegiatan Prioritas	
2	Pengembangan Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Start Up
3	Perencanaan Pembangunan Pasar Tematik dan rumah komoditas (Konveksi, Seni, Makanan, dan souvenir lainnya)
4	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Modern
5	Perencanaan pembangunan pasar sehat dan pembinaan pengelolaan pasar desa
6	Pembentukan forum CSR untuk mendorong percepatan pembangunan
7	Penguatan pelayanan ekspor komoditi produk Kab. Bandung
8	Mendorong kemudahan investasi dan perizinan
E	**Pemerintahan**
1	Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah
2	Meningkatkan ketersediaan layanan jaringan internet untuk mewujudkan smart city
3	Pelayanan KTP, KK, dan Administrasi Kependudukan lainnya 1x24 jam
4	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan di daerah perbatasan
5	Mendorong Percepatan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang property
6	Mengkoordinasikan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pusat
7	Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan regulasi pemerintah daerah
F	**Keagamaan**
1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang religius dan berakhlak baik melalui pemahaman dan pengamalan agama secara utuh
3	Meningkatkan fasilitas pesantran dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya
4	Pemberian stimulan sarpras keagamaan
G	**Infrastruktur**
1	Menyelesaikan perbaikan dan peningkatan jalan, pedestrian, jembatan, saluran drainase, TPT dan irigasi
2	Mendorong perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran drainase desa
3	Mendorong pembangunan Terminal Tipe A, Terminal Tipe B & Revitalisasi Terminal Tipe C
4	Penertiban dan optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pelayanan dan pendapatan
5	Melakukan revitalisasi dan pembersihan anak-anak sungai yang berpotensi banjir dalam menunjang program Citarum Harum
6	Penyusunan Rencana detail tata ruang Kecamatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
7	Penyediaan fasilitasi perumahan subsidi khusus bagi buruh
8	Pembangunan rumah tidak layak huni
9	Penataan perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan
10	Memfasilitasi sertifikasi dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
H	**Pertanian**
1	Pengembangan sistem basis data lahan pertanian sebagai dasar tindak lanjut sertifikasi lahan pertanian
2	Peningkatan produktivitas lahan pertanian agro
3	Pengembangan komoditas pertanian melalui fasilitasi bantuan pertanian
4	Pengembangan pasar hasil produksi pertanian dan peternakan berbasis digital
5	Penguatan kerjasama dengan Swasta, BUMN, dan Pemerintah dalam mengembangkan pertanian dan peternakan modern

Kegiatan Prioritas	
6	Peningkatan infrastruktur pertanian
I	**Pariwisata**
1	Penyusunan rencana detail Pariwisata Daerah
2	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata melalui penguatan kerja sama komunitas masyarakat dan pelaku industri pariwisata, pemerintah, serta BUMN untuk revitalisasi prasarana pariwisata
3	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya berskala Nasional dan Internasional
4	Perencanaan pembangunan alun-alun dan Gedung Kreatif Center
5	Penguatan Paguyuban Seni dan Budaya

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan prioritas tersebut di atas dipedomani pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercermin dalam neraca belanja Pemerintah Kabupaten Bandung. Berikut rekapitulasi realisasi belanja tahun 2020 hingga 2022 serta selisih belanja daerah Kabupaten Bandung tahun 2022 pada RKPD 2022 dengan RPJMD dapat ditinjau masing-masing pada **Tabel 3.20** dan **Tabel 3.21**.

TABEL 3.20

REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN PROYEKSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

No.	Uraian	RKPD 2020	Realisasi 2020	RKPD 2021	Proyeksi Tahun 2022
	Permendagri No. 13 Tahun 2006				
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.548.246.972.945,60**	**3.154.484.908.346,00**	**2.790.962.236.891,04**	**0,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	2.347.087.556.416,40	2.137.750.374.309,00	2.069.840.161.799,90	
2.1.2	Belanja Bunga			0	
2.1.3	Belanja Subsidi			0	
2.1.4	Belanja Hibah	240.319.563.543,00	234.653.097.811,00	86.226.928.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	865.250.000,00	282.000.000,00	2.701.350.000,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	53.600.403.567,00	53.501.143.550,00	36.212.380.491,14	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	584.876.933.754,30	583.559.436.415,00	585.981.416.600,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	321.497.265.664,90	144.738.856.261,00	10.000.000.000,00	
2.2	**Belanja Langsung**	**2.399.335.076.131,86**	**1.727.153.467.862,00**	**1.528.425.344.818,46**	**0**
2.2.1	Belanja Urusan SKPD			248.545.956.469,79	0
2.2.2	Belanja Urusan Program			1.279.879.388.348,67	0
	PP No. 12 Tahun 2019				
5.	**BELANJA**				
5.1.	**Belanja Operasi**				**3.823.908.814.505,00**
5.1.01	Belanja Pegawai				0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				0,00
5.1.04	Belanja Subsidi				0,00
5.1.05	Belanja Hibah				0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.2.	**Belanja Modal**				**0,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah				0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				0,00

No.	Uraian	RKPD 2020	Realisasi 2020	RKPD 2021	Proyeksi Tahun 2022
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**				**34.737.600.868,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga				34.737.600.868,00
5.4.	**Belanja Transfer**				**763.600.037.567,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil				57.540.981.567,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan				706.059.056.000,00
	Jumlah Belanja	**5.947.582.049.077,46**	**4.881.638.376.208,00**	**4.319.387.581.709,50**	**4.622.246.452.940,00**
	Surplus / (Defisit)	**-584.691.881.700,73**	**18.220.010.149,99**	**-271.520.786.647,70**	**-270.000.000.000,00**

Sumber: BAPPEDA dan BKAD Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 3.21
SELISIH BELANJA RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 DENGAN PROYEKSI DALAM RPJMD

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
5.	**BELANJA**				
5.1.	**Belanja Operasi**	**-**	**3.823.908.814.505,00**	**3.823.908.814.505,00**	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	
5.2.	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	**0**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**-**	**34.737.600.868,00**	**34.737.600.868,00**	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	
5.4.	**Belanja Transfer**	**-**	**763.600.037.567,00**	**763.600.037.567,00**	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	57.540.981.567,00	57.540.981.567,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	706.059.056.000,00	706.059.056.000,00	
	Jumlah Belanja	**0,00**	**4.622.246.452.940,00**	**4.622.246.452.940,00**	
	Surplus / (Defisit)	**0,00**	**-270.000.000.000,00**	**-270.000.000.000,00**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
2. pencairan dana cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan pinjaman daerah;
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman,
6. penerimaan piutang daerah, dan
7. Penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yaitu mengalokasikan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2021.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan,
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah,
3. Pembayaran Pokok Utang,
4. dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2022 adalah menganggarkan tambahan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk., Perumda Air Minum Tirta Raharja, dan Perseroda BPR Kerta Raharja.

Secara umum, kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, dimanfaatkan untuk penambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, serta penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD tidak menghasilkan SiLPA, maka penganggaran belanja daerah disesuaikan dengan rencana penerimaan pendapatan daerah.

TABEL 3.22

REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 DAN PROYEKSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

No	Uraian	RKPD 2020	Realisasi 2020	RKPD 2021	Proyeksi Tahun 2022
	Permendagri No 13 Tahun 2006				
3.1	**Penerimaan pembiayaan**	**593.191.881.700,73**	**636.923.198.547,71**	**286.520.786.647,71**	**0,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	593.191.881.700,73	636.923.198.547,71	286.520.786.647,71	0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0		0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0		0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0		0	0
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0		0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0		0	0
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**-**	**15.000.000.000,00**	**-**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0		0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0		15.000.000.000,00	0
	PD. BPR	0		0	0
	CBS	0		0	0
	PDAM	0		0	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0		0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0		0	0
	PP No. 12 Tahun 2019				
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**				**350.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)				350.000.000.000,00
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**				**80.000.000.000,00**
6.2.01	**P**enyertaan Modal Daerah				80.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**593.191.881.700,73**	**636.923.198.547,71**	**271.520.786.647,71**	**270.000.000.000,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	**646.644.708.697,70**	**0**	**0**

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung, 2021

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Bandung membutuhkan dana yang besar dan membutuhkan kapasitas penanggulangan risiko yang tinggi. Ditambah dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional, maka kemandirian fiskal Kabupaten Bandung menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu didorong sumber-sumber penerimaan alternatif untuk membiayai pembangunan daerah. Selain penerimaan daerah konvensional seperti APBN, APBD Kabupaten Bandung, dan Hibah, terdapat juga potensi penerimaan yang berasal dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Penjelasan dari alternatif pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perushaaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, PKBL dan TJSL merupakan upaya perusahaan untuk dapat turutserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang semula berasal dari sumber pendanaan APBD dapat diringankan dengan bantuan PKBL dan TJSL dari perusahaan.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang semakin didorong oleh pemerintah dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Meski demikian, salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Terlebih lagi, salah satu tantangan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung adalah ketergantungan akan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang tinggi sehingga mengakibatkan kemandirian fiskal daerah yang rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong pemanfaatan KPBU sebagai skema pembiayaan alternatif yang berlandaskan semangat gotong royong. Dengan bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan, diharapkan terjadi sinergi pembangunan pentahelix dengan adanya transfer risiko dan *sharing* teknologi, pengetahuan, dan sumber daya dalam pembangunan.

Landasan hukum pemanfaatan skema pembiayaan alternatif KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan regulasi-regulasi tersebut, KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. Adapun di lingkup Provinsi Jawa Barat telah tersedia Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.185–Bapp/2019 tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Saat ini, berdasarkan Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat tahun 2020, terdapat 6 (enam) proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Di antaranya adalah pembangunan TPPAS Legok Nangka yang merupakan proyek pengembangan fasilitas persampahan senilai Rp 3,45 T dengan area layanan yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Pada tahun 2022, ditargetkan proyek ini dapat sampai tahap perjanjian KBPU dan *financial close.* Selengkapnya, daftar KPBU di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 3.23**

TABEL 3.23
DAFTAR KPBU PROVINSI JAWA BARAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No.	Nama Proyek	Area Layanan	Nilai Investasi	Target 2022
1	TPPAS Legok Nangka	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut	Rp 3,45 T	Perjanjian KPBU dan *financial close*
2	SPAM Metro Bandung Raya	Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung	Rp 2,9 T	Market sounding, peraihan PJPK dan perjanjian tarif
3	SPAM Kertasari	Kabupaten Bandung	Rp 367 M	Market sounding, peraihan PJPK dan perjanjian tarif
4	SPAM Cikalong	Kabupaten Bandung	Rp 400 M	Penyusunan FBC
5	SPALD Bandung Raya	Kota Bandung, Kabupaten Bandung	Rp 115,3 M	Penyusunan FBC
6	Kolam Retensi Andir	Kabupaten Bandung	Rp 95 M	Finalisasi FS

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, 2021

RKPD
2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian agenda utama pembangunan pemerintah daerah tahunan yang akan menjadi benang merah dalam upaya mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD. Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan urgensi dan daya ungkitnya terhadap kinerja pembangunan daerah. Dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan dengan sasaran dan prioritas Provinsi Jawa Barat dan nasional, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung disusun dengan turut memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Adapun substansi yang disampaikan dalam RKPD Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022, berpedoman dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Nasional dan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2022;
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
3. Arah kebijakan dan sasaran RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 guna tercapainya visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Bandung;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bandung pada penyusunan RKPD Tahun 2022;
5. Evaluasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
6. Visi, misi dan program kepala daerah terpilih; dan
7. Dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Penyedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung serta penganggarannya turut memperhatikan adanya penyederhanaan birokrasi dari struktural menjadi fungsional.

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dikarenakan perencanaan untuk tahun 2022 menjadi masa transisi dimana RPJMD periode sebelumnya telah berakhir dan dokumen RPJMD baru masih dalam proses penyusunan. Hal ini pula yang mengakibatkan dalam penyusunannya, RKPD Tahun 2022 mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan target-target pembangunan yang akan dicapai di tahun 2022 sesuai dengan kerangka perencanaan lima tahun ke depan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembahasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan, selain berfokus pada tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 yang mengacu pada dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tujuan dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2022 menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai tahapan terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yag mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, ditetapkan 4 (empat) pilar dari RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Ketujuh agenda pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar dan rincian berikut.

GAMBAR 4.1
PRIORITAS NASIONAL RKP 2022
Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:
   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
   d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
   e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   c. Memperkuat moderasi beragama; dan
   d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
   c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
   d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
   e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tamping lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
   c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
b. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Dengan mempertimbangkan pilar-pilar pembangunan tersebut, maka sasaran pembangunan tahun 2022 mencakup sebagai berikut.

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator a) pertumbuhan ekonomi, b) tingkat pengangguran terbuka, c) rasio gini, dan d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator a) indeks pembangunan manusia, dan b) tingkat kemiskinan.

4.1.2. Telahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah **"*Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi*".** Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, Bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan ruang;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi PRJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berkebutuhan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadlian sosial, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
   b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
   c. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
   d. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
   e. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional
3. Tewujudnya kehidupan masyarakat yang teritb dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
   b. Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial

4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
    b. Meningkatnya aksesbilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
    c. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
    d. Terbentuknya daerah ekonomi baru untuk pemerataan pembangunan
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
    b. Menngkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik
    c. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran:
    a. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
    b. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
    c. Meningkatnya peran industri dan perdgangandalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
    d. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran:
    a. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*
    b. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis.

Sehubungan dengan penanggulangan dampak Covid-19, pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan pada pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat Jawa Barat. Pemulihan kesehatan masyarakat dilakukan dengan memperluas kapasitas puskesmas, yakni dengan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, peningkatan kualitas SDM puskesmas, menjadi tempat pelayanan pasien Covid-19 dan melakukan akreditasi puskesma serta fasilitasi pembangunan rumah sakit tipe D. Selain itu, pemulihan perekonomian masyarakat dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah dan atas, melakukan pemulihan kepercayaan investasi dan mempermudah perizinan di daerah, mendorong belanja pemerintah pada proyek-proyek padat karya dan mendorong transformasi digital produk UMKM daerah.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi. Berdasarkan pasal tersebut, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 yang pada saat ini penyusunannya dihadapkan pada telah habisnya masa berlaku RPJMD Tahun 2016-2021, dan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 belum ditetapkan, didasarkan pada sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Adapun sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas lingkungan
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan

6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan
7. Menurunnya tingkat pengangguran
8. Menurunnya tingkat kemiskinan
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi
15. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
16. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik
17. Meningkatnya kualitas lingkungan
18. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk
19. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan
20. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan
21. Menurunnya tingkat pengangguran
22. Menurunnya tingkat kemiskinan
23. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah
24. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu
25. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
26. Meningkatnya pembangunan perdesaan
27. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal
28. Meningkatnya pertumbuhan investasi
29. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
30. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik
31. Meningkatnya kualitas lingkungan
32. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk
33. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan
34. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan
35. Menurunnya tingkat pengangguran
36. Menurunnya tingkat kemiskinan
37. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah
38. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu
39. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
40. Meningkatnya pembangunan perdesaan
41. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal
42. Meningkatnya pertumbuhan investasi
43. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
44. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik
45. Meningkatnya kualitas lingkungan
46. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk
47. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan
48. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan
49. Menurunnya tingkat pengangguran
50. Menurunnya tingkat kemiskinan
51. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah
52. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu
53. Meningkatnya konektivitas antar wilayah

54. Meningkatnya pembangunan perdesaan
55. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal
56. Meningkatnya pertumbuhan investasi.

Dalam kerangka tahapan yang terdapat dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, RKPD Tahun 2022 masuk ke dalam tahap terakhir atau tahap IV, yakni tahun 2021-2025. Dokumen RPJPD secara spesifik menjabarkan kebijakan yang khusus ditujuan untuk tahap keempat, dengan arahan kebijakan tahap IV adalah **"Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan"**. Arahan kebijakan ini dijabarkan ke dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman yang sudah dapat dideteksi secara dini
2. Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK
4. Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan efektifnya sistem pelayanan berbasis teknologi yang sudah terintegrasi
5. Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan sudah optimal ditandai dengan meningkatnya daya dukung lingkungan, kualitas air, udara, dan tanah
6. Pengurangan resiko bencana yang sinergi, terintegrasi, dan efektif dalam setiap dimensi pembangunan
7. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air berbasis *sustainable river environment* TOD
8. Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan semakin baiknya sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
9. Terlindunginya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dari konversi lahan pertanian ke non pertanian
10. Peningkatan akses dan ketersediaan RTH publik dan taman sudah dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi
11. Pertumbuhan jumlah penduduk alami maupun migrasi sudah terkendali
12. Meningkatkan standarisasi kualitas pendidikan formal dan non formal yang bersertifikasi dalam mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
13. Pemerataan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat
14. Fokus pada pengembangan balita melalui intervensi pada nutrisi anak dan pengembangan pendidikan prasekolah
15. Peningkatan kualitas gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak
16. Peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
17. Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan lansia
18. Terciptanya kesejahteraan pekerja di berbagai lapangan usaha yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja
19. Memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik, tersertifikasi, dan inovatif
20. Pemuda dan organisasi/ lembaga kepemudaan terlibat aktif dalam berbagai bidang pembangunan dan ikut mengawal pengendalian pembangunan
21. Kebutuhan pangan lokal sudah terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan ditandai dengan termanfaatkannya bahan baku lokal untuk konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang
22. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat

23. Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dengan kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar terwujudnya kabupaten tanpa permukiman kumuh
24. Termanfaatkannya penggunaan energi baru dan terbarukan (panas bumi) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
25. Meratanya layanan kesehatan yang ditunjang oleh tenaga kesehatan handal hingga ke wilayah terpencil
26. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi
27. Pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan terpadu
28. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu secara merata di berbagai wilayah
29. Pengelolaan sampah sudah efektif dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan
30. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat
31. Terpeliharanya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan
32. Pemantapan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan (*ecodrain*) yang terpadu di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman
33. Pemantapan pengelolaan irigasi terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian
34. Meningkatnya akses aman terhadap air bersih bagi masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan
35. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah perempuan & anak, disabilitas, dan manual sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat
36. Adanya transformasi perdesaan yang ditandai dengan perubahan pada struktur ekonomi dan pekerjaan serta meningkatnya elemen kota tanpa mengubah fungsi kawasan perdesaan
37. Terdiversifikanya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga tercipta inovasi dari keterpaduan antara sektor pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa
38. Berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan
39. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan perekonomian
40. Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu
41. Berkembangnya agroindustri yang berbasiskan sumberdaya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian
42. IKM (industri kecil menengah) dan UKM (usaha mikro dan koperasi) yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM dan UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan
43. Berkembangnya ekonomi kreatif yang difokuskan pada pengembangan seni pertunjukan dan aplikasi dan game yang ditandai dengan optimalnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif
44. Berkembangnya pangsa pasar produk-produk unggulan yang ditandai dengan terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce*
45. Penguatan sektor pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha-wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (*community-based tourism enterprise*)
46. Meningkatnya investasi yang sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan

Namun, mengingat dokumen RKPD Tahun 2022 pada saat yang sama harus pula menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dalam Perda, maka penyusunannya juga mengadaptasi kebijakan yang terdapat dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2005-2005 tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"**. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut.

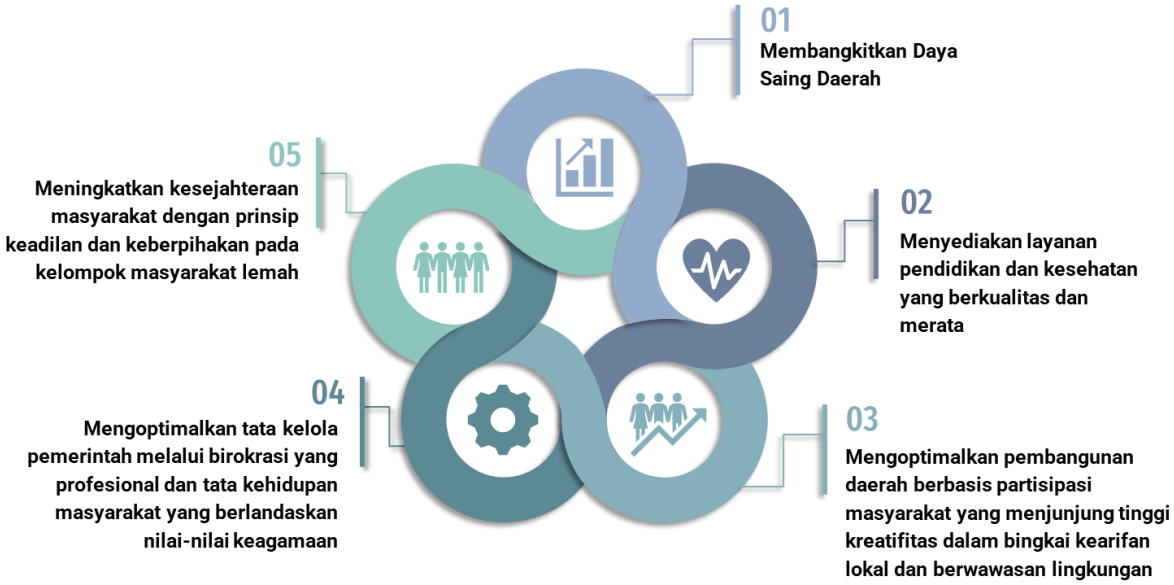

GAMBAR 4.2
MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan pada **Tabel 4.1** berikut.

TABEL 4.1

HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Sasaran		Indikator Kinerja Daerah (IKD)		Target 2022
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah								
1.1	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,75%	1.1.1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	3,68%
				1.1.2	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	1.1.2.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,09%
				1.1.3	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	1.1.3.1	Persentase koperasi yang berkualitas	5,50%
				1.1.4	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.1.4.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,39%
				1.1.5	Meningkatnya daya saing pariwisata	1.1.5.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	3,26%
						1.1.5.2	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	10%
				1.1.6	Meningkatnya investasi	1.1.6.1	Laju Pertumbuhan investasi	2,9%
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata								
2.1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	Indeks Pembangunan Manusia	73,48	2.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	2.1.1.1	Indeks Pendidikan	65,78
				2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1	Indeks Kesehatan	82,73
						2.1.2.2	Total Fertility Rate	2,42
				2.1.3	Meningkatkan aksesibilitas penduduk berpengahsilan	2.1.3.1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat berpenghasilan rendah	100%

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Sasaran		Indikator Kinerja Daerah (IKD)		Target 2022
					rendah terhadap fasilitas kesehatan			
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan								
3.1	Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	Indeks Perkembangan Wilayah	54,59	3.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.1.1.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,29
				3.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	3.1.2.1	Indeks Kualitas Infrastruktur	65,97
				3.1.3	Meningkatnya ketahanan bencana	3.1.3.1	Indeks Risiko Bencana	165
				3.1.4	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	3.1.4.1	Indeks Desa Membangun	0,81
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan								
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	67,28	4.1.1	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	4.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,3
						4.1.1.2	Nilai SAKIP Kabupaten	76
						4.1.1.3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	79,42
						4.1.1.4	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	3
						4.1.1.5	Indeks Penerapan Sistem Merit	326,5
						4.1.1.6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,15
				4.1.2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	4.1.2.1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3,04
						4.1.2.2	Opini BPK	WTP
4.2	Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	Angka Kriminalitas	44,5	4.2.1	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	4.2.1.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	72
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah								
5.1	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Indeks Gini	0,4	5.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	5.1.1.1	Indeks Pengeluaran	72,65
				5.1.2	Berkurangnya jumlah pengangguran	5.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,15%

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Sasaran		Indikator Kinerja Daerah (IKD)		Target 2022
				5.1.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	94,11
5.2	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,11	5.2.1	Menurunnya masalah pangan Daerah	5.2.1.1	Persentase Desa Rawan Pangan	8,20%

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan terjemahan dari visi dan misi bupati ke dalam level yang lebih mudah dicapai (*achievable*). Untuk memastikan perwujudan tujuan dan sasaran, pemeritah Kabupaten Bandung Menyusun Langkah-langkah yang lebih taktis sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya searah dengan visi yang ingin dicapai.

TABEL 4.2
PENJABARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah			
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Penataan logistik produk pangan dan non pangan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Penumbuhan dan penataan sentra industri	Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
			Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan
			Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
			Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi
		Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha	Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi	Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
			Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perkebunan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
			Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular
			Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
		Peningkatan daya saing sektor perikanan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan
			Pengembangan kualitas hidup ikan perairan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Meningkatnya daya saing pariwisata	Promosi dan branding kawasan wisata	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung
		Penataan daerah kawasan pariwisata berstandar global	Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan
		Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
		Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda
	Meningkatnya investasi	Penguatan daya tarik investasi Daerah	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi
			Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi
			Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata			
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Pemerataan pelayanan sekolah formal dan non formal	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
			Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan pelayanan pendidikan terutama dalam mendukung industri 4.0 dan isu-isu pembangunan global	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
			Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga derajat kesehatannya terutama terkait stunting, diabetes, hipertensi, TB, HIV/AIDS dan gangguan jiwa	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pelayanan bidang kesehatan melalui optimalisasi sarana prasarana kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
		Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan reproduksi	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi
			Menurunkan angka kelahiran murni
	Meningkatkan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan	Peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada fasilitas kesehatan
		Peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan	Peningkatan pelayanan rumah sakit daerah dalam melayani masyarakat
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan			
Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah yang berkualitas	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan infrastruktur daerah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
	Meningkatnya ketahanan bencana	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana
	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
		Peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
		Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas APIP
		Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN	Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
		Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kemandirian fiskal	Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
		Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam hidup bermasyarakat	Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
		Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat	Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah			
Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Penguatan daya beli masyarakat	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
	Berkurangnya jumlah pengangguran	Meningkatkan kualitas pengelolaan angkatan kerja	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
			Meningkatkan perlindungan perkerja
		Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan melindungi hak-hak anak	Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak
Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Menurunnya masalah pangan Daerah	Tercapainya ketahanan pangan daerah dan masyarakat melalui penciptaan inovasi dan penguatan kolaborasi simpul pangan	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Memperhatikan hasil sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung, provinsi, dan nasional, serta memperhatikan isu strategis wilayah, maka untuk tahun 2022 Pemerintah

Kabupaten Bandung menetapkan 9 prioritas pembangunan. Untuk menjaga konsistensi arah pembangunan tahun 2022, maka dalam penyusunannya, prioritas pembangunan Kabupaten Bandung juga disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Secara detail, prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung, beserta keterkaitannya dipaparkan sebagian berikut.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2022 didapatkan dari dokumen RKP Tahun 2022 yang menetapkan tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Prioritas pembangunan nasional dilaksanakan dengan 4 (empat) fokus pembangunan, yaitu fokus 1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, 3) Reformasi Sistem Perlindungan Nasional, dan 4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Berikut adalah rincian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

TABEL 4.3
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022

Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional
PN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
PN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia; b. Berkembangnya Kawasan Strategis berbasis industri dan pariwisata; c. Berkembangnya komoditas unggulan pendukung industri dan pariwisata; d. Berkembangnya kawasan perkotaan; e. Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi; f. Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal; g. Terpulihkannya daerah terdampak bencana; h. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata; i. Berkembangnya kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah pengembangan industri, pariwisata dan investasi serta kawasan khusus lainnya; dan j. Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang.
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;

Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional
		d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan; dan f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengatahuan, inovatif dan kreatif.
PN 5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
PN 6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
PN 7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	a. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; b. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; c. Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; d. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; serta e. Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Dalam menentukan prioritas pembangunan, Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu merumuskan isu strategis seperti yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, dan
5. Reformasi birokrasi.

Dalam mengimplementasikan turunan visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, terdapat tema atau fokus pembangunan yang memberikan arahan yang jelas untuk mencapai target sasaran

pembangunan tahunan. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat mengusung tema "Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian" sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Prioritas pembangunan disusun sebagai wujud implementasi arah kebijakan pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Reformasi sistem kesehatan daerah
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan
4. Reformasi sistem perlindungan sosial
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah
8. Gerakan membangun desa
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Setiap prioritas pembangunan dirinci dengan rincian kebijakan sebagai berikut.

TABEL 4.4
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2022	Rincian Arahan Program
1	Reformasi sistem kesehatan daerah	Melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui: 1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tatakelola kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan pelayaan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik; 3. Pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit, termasuk penyediaan pusat isolasi COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal; 5. Peningkatan penggunaan informasi kesehatan yang andal dan tepat waktu di berbagai tingkat sistem kesehatan baik secara teratur maupun dalam keadaan darurat; 6. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi; 7. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% *Universal Health Coverage* (UHC); dan 8. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M.
2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui: 1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK; 2. Pelatihan digital marketing dan fasilitasi promosi bagi UMKM; 3. Kemudahan akses dan prosedur perizinan usaha dan permodalan; 4. Fasilitasi pengembangan ekspor; 5. Regenerasi petani dan nelayan melalui program petani milenial;

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2022	Rincian Arahan Program
		6. Pembentukan wirausaha pemula berkolaborasi dengan inkubator bisnis; dan 7. Fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan
3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	Melakukan penguatan sistem ketahanan pangan denga memperhatikan aspek ketersediaan, aspek akses (distribusi) dan aspek pemanfaatan, melalui: 1. Penyediaan pangan baik secara mandiri ataupun mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor) serta menyediakan stok cadangan pangan untuk kejadian pasca bencana; 2. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan; 3. Pemberian insentif serta mempermudah akses permodalan bagi petani dan nelayan untuk biaya produksi; 4. Mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan; 5. Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi; 6. Peningkatan kualitas SDM (penyuluh dan petani); 7. Penerapan agriculture 4.0; 8. Membangun gudang penyimpanan sesuai komoditi; 9. Merancang perubahan pola rantai pasok; 10. Stabilisasi harga pangan; 11. Optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan; dan 12. Membangun sistem informasi satu data pangan
4	Reformasi sistem perlindungan sosial	Melakukan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui: 1. Peningkatan bantuan tunai bagi keluarga miskin khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	A. Penguatan Sistem Pendidikan melalui: 1. Pemerataan dan penguatan tata kelola, aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan di daerah; 2. Penguatan sistem pendidikan jarak jauh 3. Penguatan program vokasi; dan 4. Bantuan hukum bagi tenaga pendidik. B. Pemajuan kebudayaan untuk Pembentukan karakter melalui pemanfaatan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan
6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana melalui: 1. Pengembangan sistem mitigasi bencana; 2. Pemetaan (mapping) daerah rawan bencana; dan 3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan yang modern.
7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Digitalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi secara optimal, seperti: Inovasi Penanganan COVID-19, Mall Pelayanan Publik (MPP), kolaborasi pelayanan publik dengan pemanfaatan e-commerce dan fintech. 2. Optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi.

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2022	Rincian Arahan Program
		3. Optimalisasi unit kerja untuk melahirkan terobosan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik. 4. Peningkatan implementasi inovasi terbaik yang berkualitas untuk dapat diadopsi dan diimplementasikan (direplikasi) secara nasional. 5. Pemanfaatan pengelolaan kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan media partisipasi aktif masyarakat.
8	Gerakan membangun desa	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, masyarakat hukum adat, pranata desa dan sarana prasarana desa, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, melalui: 1. Satu Desa Satu BUMDes; *One Village One Company* (OVOC); 2. Desa Digital; 3. Patriot Desa; 4. CEO BUMDes (Chief Executive Officer); 5. Kampung Keluarga Juara; 6. Desa Sejahtera Mandiri; 7. Desa Wisata; 8. Sapa Warga; 9. Mobil Siaga; 10. Penguatan Infrastruktur Perdesaan; serta 11. Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa)
9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan tata kelola/manajemen tempat ibadah; dan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama; 3. Peningkatan kemampuan manajerial pendidikan keagamaan
10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya; 2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi; 3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan; 4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota; 5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota; 6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi; 7. Bantuan dana untuk perbaikan/peningkatan jalan kabupaten/kota 8. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon ; 9. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi; 10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2022	Rincian Arahan Program
		lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya melalui Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum; 11. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas; 12. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis; 13. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman 14. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan 15. Penyelenggaraan Urusan Pertanahan.
11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	1. Pembangunan atau penataan destinasi dan infrastruktur pariwisata; 2. Pembenahan amenitas, atraksi dan akses pariwisata; 3. Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal; 4. Standarisasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE); 5. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Pembangunan pusat budaya; 7. Pengembangan sentra industri ekonomi kreatif; dan 8. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat 2022

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022

Penentuan tema pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan periode IV dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, dan RKP Tahun 2022. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, tema pembangunan untuk tahap IV (Periode 2021-2025) adalah "Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan". Aspek penting yang dapat difokuskan di tahun 2022 berdasarkan tema pembangunan tersebut adalah aspek perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penentuan tema pembangunan 2022.

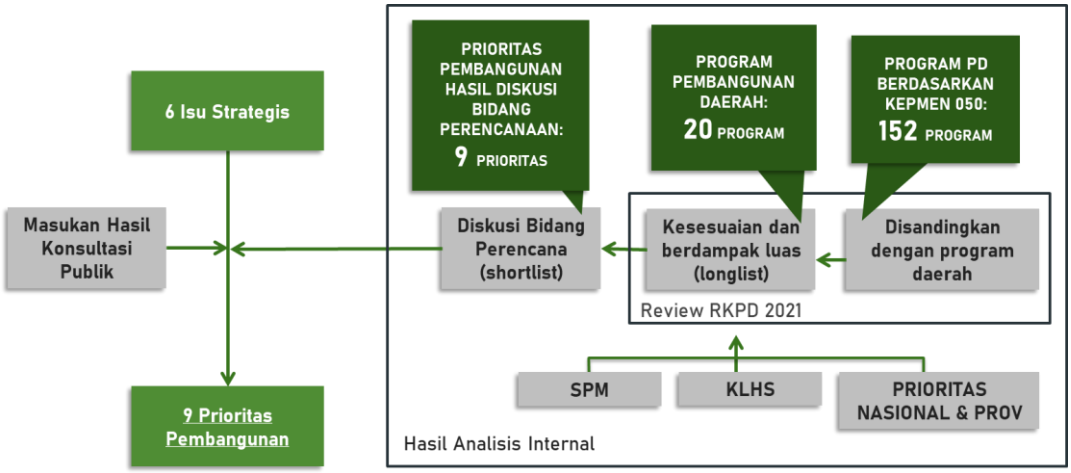

GAMBAR 4.3
KERANGKA PEMIKIRAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Pada implementasinya, penentuan tema pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 juga tidak luput dari kondisi faktual yang tengah terjadi di masyarakat. Pada tahun penyusunan rencana, yakni tahun 2021, Indonesia dan negara-negara di dunia masih berupaya memulihkan kesehatan dan perekonomian masyarakat sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang mewabah secara global. Memasuki tahun ke-2 dan ke-3 setelah penularan Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia di awal tahun 2020, diprediksikan bahwa dampak pandemi Covid-19 masih akan terasa di kalangan masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai di Indonesia sejak Januari 2021 untuk kalangan prioritas, diprediksikan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 terdapat dorongan besar untuk melakukan pemulihan perekonomian daerah dan nasional dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Atas pertimbangan hal-hal tersebut, maka tema pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk tahun 2022 adalah ***"Pemulihan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif"***. Adapun tema pembangunan di tahun 2022 ini diselaraskan dengan tema pembangunan pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat guna memastikan pembangunan Kabupaten Bandung di tahun 2022 selaras di setiap tingkatan pemerintahan. Berikut adalah sinergi tema pembangunan tahun 2022 di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten Bandung.

TABEL 4.5
SINERGI TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT, DAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Tema Pembangunan Nasional	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Tema Pembangunan Kabupaten Bandung
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian	Pemulihan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, serta hasil tinjauan terhadap strategi dan kebijakan pembangunan. Hasil evaluasi dan kondisi eksisting di lapangan akan dikerucutkan menjadi isu strategis Kabupaten Bandung. Kemudian isu strategis ini akan menjadi dasar dari prioritas pembangunan tahun 2022. Adapun isu strategis dalam RKPD tahun 2022 mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dan

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. **Tabel 4.6** menampilkan rincian masalah pokok dan isu strategis yang tertera dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

TABEL 4.6
MASALAH POKOK DAN ISU RPJPD KABUPATEN BANDUNG 2005-2025

Masalah Pokok	Isu
Masih tingginya pelanggaran Perda	Peningkatan keamanan publik dan kesejahteraan sosial
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah	
Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana	Pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan
Masih tingginya permasalahan sosial	
Rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik	
Belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat	
Adanya peningkatan alih fungsi lahan	Pengendalian penataan ruang dan pertanahan
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	
Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan	Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	
Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal	
Pengendalian penduduk belum optimal	Pengendalian pertumbuhan penduduk
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Peningkatan kualitas hidup masyarakat & penanggulangan kemiskinan
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	
Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	
Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	
Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	
Rendahnya minat baca	
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga	
Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang	Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas
Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan	
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global
Kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata masih rendah	
Tingginya kasus KDRT dan *human trafficking*	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
Kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan belum merata	
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai	
Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar	
Belum tertatanya kawasan kumuh	
Belum memadainya sarana penangana penyandang masalah kesejahteraan sosial	
Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS)	
Rendahnya penggunaan kendaraan umum	
Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor	

Masalah Pokok	Isu
Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi	
Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif	Ekonomi kemasyarakatan yang berdaya saing dan berkelanjutan
Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan	
Belum optimalnya daya tarik investasi	
Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal	Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan
Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal	
Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal	
Produktivitas pertanian masih rendah	
Masih rendahnya kualitas produksi pertanian	
Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	
Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa	
Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4.2.3.1. Isu Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2022

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pula pada upaya penyelesaian isu strategis yang dihadapi Kabupaten Bandung sesuai yang tertera dalam sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dan isu strategis Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. Rincian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas lingkungan
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan
7. Menurunnya tingkat pengangguran
8. Menurunnya tingkat kemiskinan
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi.

RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 juga mengacu pada isu strategis yang dikawal dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Isu strategis ini diantaranya berupaya menggambarkan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung dan diperkirakan akan tetap menjadi fenomena yang berpengaruh terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepannya, termasuk namun tidak terbatas pada penanganan Covid-19. Selengkapnya, isu strategis yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
2. Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
3. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
4. Belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan

5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan
6. Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan

Tabel 4.7 menampilkan sinergi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022. Adapun keterkaitan isu strategis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 ditampilkan pada **Tabel 4.8**.

TABEL 4.7
SINERGI SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2025 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025		Prioritas Pembangunan Rancangan RKPD 2022	
S1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	P8	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
S2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik	P8	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
S3	Meningkatnya kualitas lingkungan	P9	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
S4	Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
		P9	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
S5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
		P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		P3	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
		P4	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
S6	Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan
		P9	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
S7	Menurunnya tingkat pengangguran	P4	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
S8	Menurunnya tingkat kemiskinan	P4	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
S9	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
S10	Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu		
S11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah		
S12	Meningkatnya pembangunan perdesaan		
S13	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		P5	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025		Prioritas Pembangunan Rancangan RKPD 2022	
S14	Meningkatnya pertumbuhan investasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupten Bandung, 2021

TABEL 4.8
SINERGI ISU STRATEGIS RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RANCANGAN RKPD 2022

Isu Strategis Rancangan Awal RPJMD 2021-2026		Prioritas Pembangunan Rancangan RKPD 2022	
ISU 1	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	P9	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
ISU 2	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyata
		P5	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi
ISU 3	Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
		P3	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
		P4	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
ISU 4	Belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan	P8	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
ISU 5	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan	P5	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi
		P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
ISU 6	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Adapun kriteria teknis yang digunakan dalam dalam penentuan skala prioritas pembangunan antara yaitu kriteria yang mengacu pada arahan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan jenis kriteria sebagai berikut.

TABEL 4.9
KRITERIA PRIORITAS PEMBANGUNAN

No.	Kriteria
1	Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional
2	Kesesuaian dengan proritas pembangunan Provinsi Jawa Barat
3	Kesesuaian dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung
4	Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung
5	Dampak bagi masyarakat umum
6	Tingkat kemungkinan dalam pelaksanaannya
7	Daya ungkit terhadap pembangunan daerah
8	Tingkat kemendesakan

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efisien dan tepat sasaran, 9 prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 perlu disusun dalam prioritas pembangunan berdasarkan skala urgensi. Mengingat akan perlunya efisiensi pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung, maka penetapan skala prioritas terhadap prioritas pembangunan tersebut menjadi semakin esensial. Penetapan skala diurutkan berdasarkan masukan berbagai kalangan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung pada Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 melalui penyebaran kuesioner.

Kuesioner yang disebarkan pada Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan secara daring. Formulir daring tersbeut berisikan matriks urutan piroritas dan penilaian dari pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tersebut memberikan penilaian terhadap isu strategis RPJMD Teknokratik 2021-2026 dan prioritas pembangunan Rancangan Awal RKPD 2022, yakni terkait isu dan prioritas pembangunan yang mana yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung di tahun 2022. Pemangku kepentingan memberikan penilaian dengan menggunakan skala Likert, yakni dengan membuat centang untuk opsi sangat setuju, setuju, setara, tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk setiap penilaian isu strategis dan prioritas pembangunan. Pada saat rekapitulasi penilaian, setiap penilaian memiliki bobot nilai yang kemudian diakumulasi menjadi skor setiap isu strategis dan prioritas pembangunan. Hasil skoring tersebut mencerminkan urutan urgensi prioritas pembangunan. **Gambar 4.4** menampilkan hasil kuesioner terhadap tingkat urgensi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022.

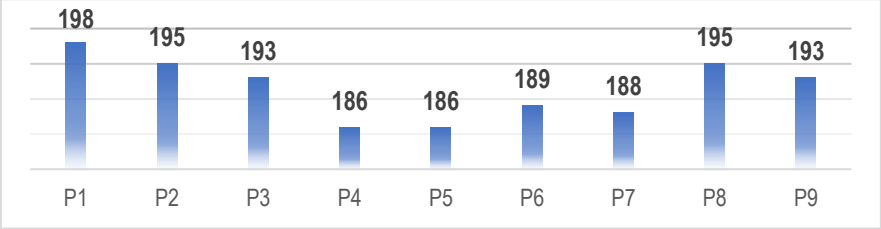

GAMBAR 4.4
GRAFIK HASIL KUESIONER TERHADAP TINGKAT URGENSI PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 MENURUT PERSEPSI STAKEHOLDER
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Keterangan:

P1 : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
P2 : Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
P3 : Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
P4 : Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
P5 : Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi
P6 : Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan
P7 : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
P8 : Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
P9 : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim

Berdasarkan hasil kuesioner yang dipaparkan di **Gambar 4.4** maka urutan prioritas pembangunan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
2. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
3. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
6. Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan
7. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
8. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
9. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Adapun berdasarkan hasil konsultasi publik tersebut, urutan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2022 ini berbeda dengan urutan prioritas pembangunan yang terdapat di dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.Perbedaan urutas prioritas pembangunan yang ada di RKPD 2022 menunjukkan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang lebih diprioritaskan pada tahun terkait yang telah disepakati pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022 pada Februari 2021.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 perlu dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung selaras dengan seluruh Prioritas Nasional, sehingga tingkat keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Nasional (PN) adalah 100%. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat disajikan pada **Tabel 4.10** dan **Tabel 4.11**.

TABEL 4.10
SINERGI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
PN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
				Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
				Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan
				Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
				Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi
				Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
				Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
				Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
		P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
				Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular
				Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
				Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan
				Pengembangan kualitas hidup ikan perairan
				Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung
				Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan
				Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
				Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda
				Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi
				Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi
				Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal
PN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
				Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi
				Menurunkan angka kelahiran murni

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
		P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
				Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
				Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
		P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
				Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
				Meningkatkan perlindungan perkerja
				Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
				Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada fasilitas kesehatan
				Peningkatan pelayanan rumah sakit daerah dalam melayani masyarakat
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
				Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
				Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
PN 5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
PN 6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
				Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana
PN 7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
				Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
				Peningkatan kapasitas APIP
				Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
				Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
				Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
				Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 4.11
SINERGI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
				Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi
				Menurunkan angka kelahiran murni
PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
				Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
				Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan
				Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
				Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi
				Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
				Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak
				Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
				Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular
				Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
				Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan
				Pengembangan kualitas hidup ikan perairan
				Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
PP4	Reformasi sistem perlindungan sosial	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
				Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
				Meningkatkan perlindungan perkerja
				Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
				Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada fasilitas kesehatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
				Peningkatan pelayanan rumah sakit daerah dalam melayani masyarakat
PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
				Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
				Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
				Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana
PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
				Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
				Peningkatan kapasitas APIP
				Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
				Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
				Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
				Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan
PP8	Gerakan membangun desa	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
				Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
				Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan
				Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
				Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi
				Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
				Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak
				Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
		P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
				Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
				Peningkatan kapasitas APIP
				Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
				Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
				Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
				Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan
PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
				Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
				Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
		P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
				Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana
		P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
				Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan
				Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
				Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda
				Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi
				Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi
				Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berkaitan dengan keselarasan priortas pembangunan tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi dan Nasional, berikut ini ditampilkan keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada **Tabel 4.12**, sasaran prioritas Kabupaten Bandung Tahun 2022 dengan sasaran prioritas tahun 2022 di tingkat provinsi dan nasional pada **Tabel 4.13** dan rincian penjelasan dan keselarasan setiap program prioritas dan program pembangunan daerah pada **Tabel 4.14**. Adapun dukungan program prioritas daerah terhadap masing-masing kegiatan prioritas nasional tahun 2022 pada **Tabel 4.15**.

TABEL 4.12

SINERGI PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN TAHUN 2022 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NASIONAL 2022

NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KABUPATEN BANDUNG	
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
PN1	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		PP8	Gerakan membangun desa		
PN7	Memperkuat Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
		PP8	Gerakan membangun desa		
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara		
PN6	Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup		
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara		
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan sosial	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 4.13

SINERGI SASARAN PRIORITAS RKPD KABUPATEN TAHUN 2022 DENGAN SASARAN PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 DAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2022

Sasaran RKP Tahun 2022		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022		Sasaran RKPD Kabupaten Bandung 2022	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S19	Meningkatnya daya saing pariwisata
		S2	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S2	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan
				S3	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri
				S4	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern
				S5	Berkurangnya jumlah pengangguran
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S3	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S20	Meningkatnya investasi
		S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian	S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur
S3	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S6	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S14	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
				S15	Menurunnya masalah pangan Daerah
		S12	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S7	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S8	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik
				S9	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
				S10	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S17	Meningkatkan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan
				S18	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S11	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda			S6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
S8		S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S2	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan

Sasaran RKP Tahun 2022		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022		Sasaran RKPD Kabupaten Bandung 2022	
	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan			S3	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri
				S4	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern
				S5	Berkurangnya jumlah pengangguran
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S11	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S18	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S11	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S18	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S11	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S10	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S10	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S10	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S11	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S7	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur
		S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S10	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian	S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian	S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S14	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	S8	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik

Sasaran RKP Tahun 2022		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022		Sasaran RKPD Kabupaten Bandung 2022	
S21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S10	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S13	Meningkatnya ketahanan bencana
		S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*	S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	S7	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa
S25	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	S9	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung,2021

TABEL 4.14
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Indikatif 2022	PD Penanggungjawab
1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	1.1.	Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	82,73	483.096.721.400	DINKES, RSUD SOREANG, RSUD CICALENGKA
				Total Fertility Rate	Kelahiran/ibu	2,42		DP2KBP3A
2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	2.1.	Program peningkatan daya saing sektor perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	%	3,68	5.232.302.000	DISPERIN
		2.2.	Program peningkatan daya saing produk unggulan industri	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,09	6.891.194.573	DISPERIN; DISKOPUKM
		2.3.	Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase koperasi yang berkualitas	%	5,50	12.219.481.000	DISKOPUKM
		2.4	Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,15	34.240.468.949	DISNAKER
3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif, dan dinamis	3.1.	Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	81,14	20.849.797.000	DPMD
		3.2.	Program peningkatan kualitas e-government	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,30	798.937.290.793	Seluruh PD; Seluruh Kecamatan; DISDUKCAPIL
				Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	76,00		SETDA; SETWAN; DISKOMINFO; BAPPEDA
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	79,42		BAPPEDA; DISARPUS
				Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Nilai	3		INSPEKTORAT
				Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	326,50		BKPSDM
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,15		DISKOMINFO

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Indikatif 2022	PD Penanggungjawab
		3.3.	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	3,04	882.853.399.435	BAPENDA
				Opini BPK	Nilai	WTP		BKAD
		3.4.	Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	72,00	57.700.060.500	BAKESBANGPOL; SATPOL PP
4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	4.1.	Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	65,78	1.445.475.359.905	DISDIK, DISPORA, DISARPUS
5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	5.1.	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,90	69.085.218.354	DLH
		5.2.	Program peningkatan ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	165,00	33.031.438.000	DISDAMKAR, DINSOS, BPBD,
6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	6.1.	Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	1,39	72.001.764.000	DISTAN; DISPAKAN
		6.2.	Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah	Persentase Desa Rawan Pangan	%	8,20	17.127.228.200	DISPAKAN
7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	7.1.	Program peningkatan kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	65,97	560.278.922.291	DPUTR, DISHUB, DISKOMINFO, DISPERKIMTAN
8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	8.1.	Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat berpenghasilan rendah	%	100,00	11.500.331.000	DINKES, RSUD MAJALAYA, RSUD SOREANG, RSUD CICALENGKA, DP2KBP3A
		8.2.	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Indeks Pengeluaran	Indeks	72,65	35.120.735.640	DINSOS
		8.3.	Program Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,11	26.852.880.000	DP2KBP3A
9		9.1.	Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan	%	3,26	28.419.245.900	DISPARBUD

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Indikatif 2022	PD Penanggungjawab
	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi			akomodasi dan makan minum				
				Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	%	10		DISPARBUD
		9.2	Program peningkatan potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan investasi	%	2,9	21.332.614.000	DPMPTSP
						TOTAL	**4.622.246.452.940**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 4.15
DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan						
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan			
		2	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati			
		3	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi			
		4	Peningkatan pemenuhan energi domestik			
		5	Pengembangan industri pendukung EBT	P 6	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Penyediaan air untuk pertanian			
		2	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas			
		3	Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau			
		4	Pengembangan waduk multiguna			
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	P 6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
						Program Penanganan Kerawanan Pangan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		2	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
		3	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar			Program Penyuluhan Pertanian
		4	Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						Program Penyuluhan Pertanian
						Program Perizinan Usaha Pertanian
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		5	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional			
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	P 6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		2	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiyaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		3	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan			
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengan (UMKM), dan koperasi	1	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pengembangan UMKM
		2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		3	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		4	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
						Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
		5	Peningkatan nilai tambah usaha sosial			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir			
		2	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	P 9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		3	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		4	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				P 9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
						Program Pelayanan Penanaman Modal
		5	Pengembangan industri halal	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pengembangan Ekspor
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
						Program Penempatan Tenaga Kerja
						Program Perencanaan Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial
		2	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		3	Pengelolaan impor			
		4	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		5	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global			
		6	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif	P 9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Program Pemasaran Pariwisata
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1	Peningkatan pendalaman sektor keuangan			
		2	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0			
		3	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga			
		4	Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	P 9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Program Pengembangan Kebudayaan
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional
						Program Pembinaan Sejarah
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

No.	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah
						Program Pengelolaan Permuseuman
						Program Promosi Penanaman Modal
PN 2: Membangun Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
1	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	1	Pengembangan sektor unggulan	P 7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
						Program Penatagunaan Tanah
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
						Program Penataan Bangunan Gedung
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing						
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1	Percepatan cakupan administrasi kependudukan			
		2	Integrasi sistem administrasi kependudukan			
		3	Pendampingan layanan terpadu			
		4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk			
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1	Sistem jaminan sosial nasional	P 8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		2	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran			Program Pemberdayaan Sosial
		3	Perlindungan sosial adaptif			Program Perlindungan Perempuan
		4	Kesejahteraan sosial			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	P 8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		2	Percepatan perbaikan gizi masyarakat			
		3	Peningkatan pengendalian penyakit			
		4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			
		5	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	P 4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Program Pengelolaan Pendidikan
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		2	Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun			Program Pengembangan Kurikulum
		3	Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		4	Penjaminan mutu pendidikan			Program Pengembangan Kurikulum
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Program Pembinaan Perpustakaan
		5	Peningkatan tata kelola pendidikan			Program Pengelolaan Pendidikan
						Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	P 8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Program Perlindungan Khusus Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		2	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
						Program Rehabilitasi Sosial
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
		3	Kualitas pemuda			
6	Pengentasan kemiskinan	1	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga			
		2	Kepantaran usaha dan dampak sosial			
		3	Reformasi agraria			
		4	Perhutanan sosial			
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasi kerjasama industri			
		2	Prestasi olahraga			
PN 4: Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan						
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untukmemperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti			
		2	Revolusi mental dalam tata kelola			
		3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter			
		4	Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila			
		5	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme			
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal			
		2	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat			
		3	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif			
		4	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan			
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi	1	Peningkatan budaya literasi	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
	terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra		Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		3	Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta			Program Pengembangan Kurikulum
		4	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi			Program Pembinaan Perpustakaan
PN 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Program Pengembangan Perumahan
						Program Kawasan Permukiman
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
						Program Penataan Bangunan Gedung
		2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		3	Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		4	Keselamatan dan keamanan transportasi			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		5	Ketahanan kebencanaan infrastruktur			
		6	Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2	Infrastruktur ekonomi	1	Konektivitas jalan	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan
		2	Konektivitas darat			Program Pengelolaan Perkeretaapian
3	Transformasi digital	1	Penuntasan infrastruktur TIK	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Program Aplikasi Informatika
		2	Pemanfaatan infrastruktur TIK			
		3	Fasilitas pendukung transformasi digital			
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim						

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		2	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		4	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1	Penanggulangan bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Program Penanggulangan Bencana
						Program Penanganan Bencana
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		2	Peningkatan ketahanan iklim			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
3	Pembngunan rendah karbon	1	Pembangunan energi berkelanjutan	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		2	Pemulihan lahan berkelanjutan			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		3	Pengelolaan limbah			Program Pengelolaan Persampahan
		4	Pengembangan industri hijau			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
						Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
1	Konsolidasi Demokrasi	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
		2	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik			Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1	Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		2	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		3	Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global			

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
3	Penegakan Hukum Nasional	1	Penataan Regulasi			
		2	Perbaikan Sistem Hukum dan Perdata			
		3	Penguatan Sistem Anti Korupsi			
		4	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan			
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program Kepegawaian Daerah
		2	Transformasi Pelayanan			Program Pencatatan Sipil
						Program Pendaftaran Penduduk
						Program Aplikasi Informatika
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		3	Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
						Program Pengelolaan Arsip
						Program Perizinan Penggunaan Arsip
						Program Penataan Desa
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		4	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan			Program Penyelenggaraan Pengawasan
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
						Program Perekonomian Dan Pembangunan
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Dukungan Program Prioritas Daerah
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
						Program Administrasi Pemerintahan Desa
						Program Peningkatan Kerjasama Desa
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	
		2	Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)			
		3	Penguatan Keamanan Laut			
		4	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakaat			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		5	Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2022; Hasil analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dalam implementasinya, prioritas pembangunan Kabupaten Bandung diwujudkan melalui berbagai gerakan dan program strategis. Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diantaranya berupa inovasi untuk mendukung percepatan perwujudan prioritas pembangunan daerah. Adapun rincian dari masing-masing prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

(i) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif

Diimplementasikan melalui:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
e. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
f. Program Pengendalian Penduduk

(ii) Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan

Diimplementasikan melalui:

a. Program Pengembangan Ekspor
b. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
d. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
e. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
g. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
j. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
k. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
l. Program Pengembangan UMKM
m. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
n. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
o. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
p. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
q. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
r. Program Penempatan Tenaga Kerja
s. Program Perencanaan Tenaga Kerja
t. Program Hubungan Industrial
u. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

(iii) Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis

Diimplementasikan melalui:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
c. Program Penataan Desa
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

g. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
h. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
i. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
j. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
k. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
l. Program Pencatatan Sipil
m. Program Pendaftaran Penduduk
n. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
o. Program Perekonomian dan Pembangunan
p. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
q. Program Informasi dan Komunikasi Publik
r. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
s. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
t. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
u. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
v. Program Pengelolaan Arsip
w. Program Perizinan Penggunaan Arsip
x. Program Penyelenggaraan Pengawasan
y. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
z. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
aa. Program Kepegawaian Daerah
bb. Program Aplikasi Informatika
cc. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
dd. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
ee. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
ff. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
gg. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
hh. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
ii. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
jj. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
kk. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
ll. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
mm. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

(iv) <u>Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global</u>

Diimplementasikan melalui:

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
d. Program Pengembangan Kurikulum
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
f. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
g. Program Pembinaan Perpustakaan
h. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

(v) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim

Diimplementasikan melalui:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
d. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
e. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
f. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
g. Program Pengelolaan Persampahan
h. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
i. Program Penanganan Bencana
j. Program Penanggulangan Bencana
k. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
l. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup (PPLH)
m. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
n. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
o. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
p. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
q. Program Pengelolaan Persampahan
r. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
s. Program Penanganan Bencana
t. Program Penanggulangan Bencana

(vi) Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan

Diimplementasikan melalui:

a. Program Penyuluhan Pertanian
b. Program Perizinan Usaha Pertanian
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
h. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
i. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
j. Program Penanganan Kerawanan Pangan
k. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
l. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
m. Program Pengawasan Keamanan Pangan

(vii) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Diimplementasikan melalui:

a. Program Penyelenggaraan Jalan
b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
e. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
f. Program Pengelolaan Pelayaran
g. Program Pengelolaan Penerbangan
h. Program Pengelolaan Perkeretaapian
i. Program Informasi dan Komunikasi Publik
j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
k. Program Pengembangan Perumahan
l. Program Kawasan Permukiman
m. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
n. Program Penataan Bangunan Gedung
o. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
p. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Danutilitas Umum (PSU)
q. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
r. Program Penatagunaan Tanah
s. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
t. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

(viii) Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat

Diimplementasikan melalui:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Program Rehabilitasi Sosial
f. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
g. Program Pemberdayaan Sosial
h. Program Perlindungan Perempuan
i. Program Perlindungan Khusus Anak
j. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
k. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
l. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
m. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

(ix) Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Diimplementasikan melalui:

a. Program Pemasaran Pariwisata
b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
e. Program Pengembangan Kebudayaan
f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
g. Program Pembinaan Sejarah
h. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
i. Program Pengelolaan Permuseuman
j. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

k. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
l. Program Promosi Penanaman Modal
m. Program Pelayanan Penanaman Modal
n. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.2.3.2. Kebijakan Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 perlu dirancang untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs merupakan paradigma pembangunan global baru yang merupakan lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Berbeda dengan MDGs, SDGs lebih memberikan penekanan pada upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berfokus pada upaya menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dan target SDGs diakomodir dalam pembangunan Kabupaten Bandung melalui penetapan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung. Khusus untuk tahun 2022, tujuan dan target SDGs tercermin dalam kebijakan yang tercantum dalam kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap Keempat dikarenakan arah kebijakan pada RPJMD 2016-2021 hanya sampai tahun 2020 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD. Adapun sinergitas tujuan SDGs dan kebijakan pembangunan tahun 2022 sebagai berikut.

TABEL 4.16
SINERGI DAN SINKRONISASI TUJUAN TPB DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No.	Tujuan TPB	Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Tahun 2022	
1	Menanggulangi kemiskinan dalam berbagai bentuk dan dimanapun	1	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
		2	Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
		3	Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan
		4	Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
		5	Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi
		6	Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
		7	Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
		8	Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
		9	Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak
		10	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
2	Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian	1	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
		2	Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular
		3	Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
		4	Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan
		5	Pengembangan kualitas hidup ikan perairan
		6	Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

No.	Tujuan TPB	Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Tahun 2022	
3	Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia	1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan
		2	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
		3	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi
		4	Menurunkan angka kelahiran murni
4	Menjamin pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan kesempatan belajar sepanjang usia kepada semua penduduk	1	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
		2	Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
		3	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
		4	Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
5	Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1	Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak
6	Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan manajemen terhadap air dan sanitasi bagi seluruh penduduk	1	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
7	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi seluruh penduduk	1	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk	1	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
		2	Meningkatkan perlindungan pekerja
		3	Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	1	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
10	Mengurangi kesenjangan antar negara		
11	Membuat kota-kota dan permukiman penduduk inklusif, aman, *resilient* dan berkelanjutan	1	Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	1	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
13	Melaksanakan aksi-aksi penting untuk mengakhiri perubahan iklim beserta dampaknya	1	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
		2	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana
14	Menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya laut, pantai dan pesisir bagi pembangunan berkelanjutan		
15	Melindungi, memperbaiki dan mendorong penggunaaan ekosisem terestrial yang berkelanjutan, management hutan secara	1	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah

No.	Tujuan TPB	Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Tahun 2022	
	berkelanjutan, menghilangkan proses penggurunan, serta menghentikan degradasi lahan dan kepunahan biodiversity	2	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi seluruh penduduk serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	1	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
		2	Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
17	Memperkuat pemanfaatan implementasi dan revitalisasi kerjasama global bagi pembangunan berkelanjutan	1	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Adapun kebijakan pengarusutamaan lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital.Aspek-aspek pengarusutamaan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah di Kabupaten Bandung.Untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan tersebut, berikut adalah keterkaitan program pembangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2022 dengan aspek-aspek pengarusutamaan pada RPJMN 2020-2025.

TABEL 4.17
KETERKAITAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 DENGAN PENGARUSUTAMAAN PADA RPJMN 2020-2025

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)		Dukungan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Daerah
1	**Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**	
	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	**Program Pembangunan Daerah:** Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 10. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 12. Program Pengembangan UMKM 13. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 14. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 15. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 16. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 17. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 18. Program Penempatan Tenaga Kerja 19. Program Perencanaan Tenaga Kerja 20. Program Hubungan Industrial 21. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)		Dukungan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Daerah
	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pengawasan Keamanan Pangan 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Tujuan 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif **Program Prioritas Daerah:** 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 10. Program Pengendalian Penduduk
	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	**Program Pembangunan Daerah:** Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 4. Program Pengembangan Kurikulum 5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 9. Program Pembinaan Perpustakaan 10. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Perlindungan Khusus Anak 6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Tujuan 6 Air Bersih & Sanitasi Layak	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Kawasan Permukiman

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)		Dukungan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Daerah
		6. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Tujuan 7 Energi Bersih & Terjangkau	**Program Pembangunan Daerah:** Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan **Program Prioritas Daerah:** 7. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	**Program Pembangunan Daerah:** A. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat B. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi **Program Prioritas Daerah (A)** 1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 4. Program Promosi Penanaman Modal 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 7. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 8. Program Pelayanan Penanaman Modal **Program Prioritas Daerah (B)** 1. Program Pemasaran Pariwisata 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 5. Program Pengembangan Kebudayaan 6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 7. Program Pembinaan Sejarah 8. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 9. Program Pengelolaan Permuseuman
	Tujuan 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 10. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11. Program Pengelolaan Pelayaran 12. Program Pengelolaan Penerbangan 13. Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	**Program Pembangunan Daerah** Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat **Program Prioritas Daerah** 1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)		Dukungan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Daerah
	Tujuan 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 5. Program Penatagunaan Tanah 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	Tujuan 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Perizinan Usaha Pertanian 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 9. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	**Program Pembangunan Daerah:** Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 10. Program Penanganan Bencana 11. Program Penanggulangan Bencana
	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	
	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	**Program Pembangunan Daerah:** Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)		Dukungan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Daerah
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7. Program Penataan Desa 8. Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	**Program Pembangunan Daerah:** Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2	**Kerentanan Bencana**	**Program Pembangunan Daerah:** A. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim **Program Prioritas Daerah (A)** 1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Program Penanganan Bencana 3. Program Penanggulangan Bencana **Program Prioritas Daerah (B)** 1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Program Pembangunan Daerah:** Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 9. Program Pencatatan Sipil 10. Program Pendaftaran Penduduk 11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 12. Program Perekonomian Dan Pembangunan 13. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 14. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 15. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 16. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 17. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 18. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 19. Program Pengelolaan Arsip 20. Program Perizinan Penggunaan Arsip 21. Program Penyelenggaraan Pengawasan 22. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 24. Program Kepegawaian Daerah 25. Program Aplikasi Informatika 26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 27. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 28. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 29. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)		Dukungan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Daerah
		30. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 31. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	**Gender**	**Program Pembangunan Daerah:** Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5	**Modal Sosial dan Budaya**	**Program Pembangunan Daerah:** Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 5. Program Pembinaan Perpustakaan 6. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
6	**Transformasi Digital**	**Program Pembangunan Daerah:** Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis **Program Prioritas Daerah:** 1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4.2.3.3. Kebijakan Terkait Standar Pelayanan Minimal

Disamping SDG's, adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat sesuai kewenangan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus);*
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Penyusunan RKPD tahun 2022 menggunakan target dan capaian SPM dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan dan *outcome* program. Berikut kebijakan Kabupaten Bandung tahun 2022 yang disandingkan dengan SPM 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

TABEL 4.18
ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Urusan SPM	Kebijakan Kabupaten Bandung Tahun 2022
1	Pendidikan	1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global 2. Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0 4. Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
2	Kesehatan	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan 3. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi 4. Menurunkan angka kelahiran murni 5. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada fasilitas kesehatan 6. Peningkatan pelayanan rumah sakit daerah dalam melayani masyarakat
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah 2. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah

No.	Urusan SPM	Kebijakan Kabupaten Bandung Tahun 2022
		3. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana 4. Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah 2. Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis 3. Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan
6	Sosial	1. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran 3. Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja 4. Meningkatkan perlindungan pekerja 5. Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0 6. Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.2.3.4. Kebijakan Terkait Penataan Ruang Wilayah

Untuk menjamin implementasi rencanan pembangunan secara efektif dan efisien, strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengadopsi perencanaan yang berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036. Mengacu pada RTRW, arahan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 antara lain meliputi arahan perwujudan struktur ruang dan arah perwujudan pola ruang. Arah perwujudan struktur ruang antara lain:

1. Perwujudan pusat kegiatan, melalui:
   a. Pengembangan dan Penataan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) Soreang – Kutawaringin – Katapang, melalui pembangunan dan pengembangan Pasar Induk dan Pasar Industri Soreang,Kutawaringin, Katapang
   b. Pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp)
   c. Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) melalui penyediaan Terminal Tipe C
   d. Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
2. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama, melalui:
   a. Pengembangan sistem jaringan jalan, melalui peningkatan jaringan jalan (Arteri Primer, Keloktor Primer 1, Kolektor Primer 4 (K4)), peningkatan jalan (Arteri Primer, Keloktor Primer 1), pembangunan jalan (Arteri Primer, Keloktor Primer 1), pembangunan jaringan jalan (Kolektor Primer 2 (K-2), Kolektor Primer 4 (K4), Lokal Primer), pengembangan dan penataan jaringan jalan (Lokal Primer, Kolektor Sekunder)
   b. Pengembangan sistem jaringan perkerataapian, melalui pembangunan jalur ganda KA, peningkatan jalur KA, reaktivasi jalur KA perkotaan, elektrifikasi jalur KA, pembangunan dry port Bandung Urban Railway Transport Development Electrification, pengembangan monorel Bandung Raya, peningkatan jaringan prasarana jalan rel untuk mendukung pengembangan pelabuhan darat (dry port), perbaikan persinyalan kereta api, penggantian moda angkutan umum massal jalan raya, pembangunan jalur LRT (Light Rapid Transport), pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, peningkatan prasarana perkeretaapian, pembangunan stasiun kereta api untuk angkutan

barang, penambahan sarana KRD baru beserta perbaikan dipo/bengkelnya, perbaikan antara KA dan jalan, pengembangan stasiun angkutan penumpang, pembangunan stasiun dan depo sebagai bagian dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

c. Pengembangan jaringan sistem transportasi udara, melalui pengembangan Bandar Udara khusus pertahanan dan keamanan (Lanud Sulaeman) dan ruang udara untuk penerbangan
d. Pengembangan angkutan orang, melalui pengembangan angkutan taksi, pengembangan angkutan pariwisata, angkutan dengan tujuan tertentu, angkutan kawasan tertentu

3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, antara lain sistem pengembangan sumber daya air, sistem jaringan prasana energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan prasaarana lingkungan persampahan, sistem pengolahan dan pengelolaan air limbah dan limbah B3, sistem jaringan prasarana lingkungan drainase, sistem pelayanan air minum, sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Seperti yang telah dicantumkan dalam RTRW Kabupaten Bandung 2016-2036, Selain mengacu pada perwujudan struktur ruang, arahan pembangunan Kabupaten Bandung 2022 harus turut pula memperhatikan arah perwujudan pola ruang antara lain:

1. Perwujudan pola ruang, melalui penataan guna lahan pada kawasan lindung, melalui:
   a. Penataan guna lahan pada hutan lindung, melalui rehabilitasi kawasan hutan lindung
   b. Perlindungan bagi kawasan dibawahnya, melalui Penetapan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air
   c. Perlindungan setempat, antara lain melalui penetapan kawasan sempadan sungai, pengamanan daerah aliran sungai di beberapa kecamatan yang dilalui DAS Citarum
   d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, melalui Pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman nabati dan hayati
   e. Rawan bencana, melalui Pembatasan pembangunan (lahan terbangun)
2. Penataan guna lahan pada kawasan budidaya, melalui:
   a. Kawasan peruntukan hutan produksi, melalui pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin Kelestarian Hutan
   b. Kawasan peruntukan hutan rakyat, melalui Pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan Hutan Rakyat, Penyediaan lembaga Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
   c. Kawasan peruntukan hortikultura, melalui Mempertahankan kawasan potensi hortikulutra, mempertahankan kawasan potensi hortikulutra, pengembangan dan penguatan kelembagaan petani
   d. Kawasan peruntukan perkebunan, melalui pengembangan sentra perkebunan rakyat komoditas cengkeh, kelapa, kopi, teh, tembakau.
   e. Kawasan peruntukan peternakan, melalui pengembangan dan fasilitasi ternak besar, kecil, dan unggas.
   f. Kawasan peruntukan kegiatan perikanan, melalui intensifikasi budidaya perikanan,
   g. Kawasan peruntukan kegiatan pertambangan, melalui pengembangan dan pemanfaatan lahan yang sudah berkembang untuk pengembangan sentra industri rumah tangga/UMKM/UKM
   h. Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata, melalui penataan kawasan wisata buatan dan pengembangan dan penataan kawasan wisata.
   i. Kawasan peruntukan permukiman, melalui pengembangan hunian vertical pada kawasan permukiman perkotaan, Penataan dan peningkatan sarana dan pelayanan dasar permukiman peerkotaan, pengembangan kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya.

j. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, melalui pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan
k. Kawasan peruntukan lainnya, melalui pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum
l. Perwujudan kawasan strategis kabupaten, melalui pengembangan kawasan agropolitan Ciwidey - Pasirjambu – Rancabali dan agropolitan Pangalengan.

4.2.3.5. Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19

Tema yang diusung untuk tahun 2022, yakni Pemulihan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif, merupakan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang berupaya memperkuat kembali perekonomian masyarakat. Diketahui bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat tidak merata di semua sektor dan kalangan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari adanya sektor-sektor yang lebih terdampak dibandingkan yang lain dan adanya kalangan masyarakat yang lebih rentan terhadap reprekusi pandemi dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemulihan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bandung.

Dalam mewujudkan tema pembangunan tersebut, pola pembiayaan pembangunan Kabupaten Bandung disusun dengan menggunakan skala prioritas pengalokasian anggaran. Selaras denagn pola pembiayaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, berikut adalah prioritas pola pembiayaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bandung.

1. Prioritas 1: Dialokasikan untuk membiayai belanja dan pegeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, serta penanganan, rekonstruksi, dan rehabilitasi dampak pandemik Covid-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial
2. Prioritas 2: Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan pelayanan dasar
3. Prioritas 3: Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Kebijakan terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung mencakup dua aspek, yakni penanganan kesehatan dan pemulihan perekonomian masyarakat. Rincian kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung berdasarkan kedua aspek tersebut adalah sebagai berikut.

A. Penanganan Kesehatan Masyarakat

Dalam mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat, Indonesia per Januari 2021 sudah melakukan program vaksinasi secara bertahap dengan targer kalangan masyarakat prioritas. Sesuai dengan instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi Covid-19, vaksin diberikan secara gratis, yakni masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk memprioritaskan program vaksinasi mulai tahun anggaran 2021 dan direncanakan program tersebut akan berlanjut hingga tahun 2022.

Pada implementasinya, gelombang 1 vaksinasi mencakup periode Januari-April 2021 utnuk petugas kesehatan, petugas public, dan lansia. Sedangkan gelombang 2 vaksinasi adalah April 2021 hingga Maret 2022 untuk masyarakat rentan dan masyarakat lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Meski program vaksinasi telah berjalan secara bertahap di Indonesia, pemerintah daerah diarahkan untuk terus mengadvokasi penerapan 3M ke masyarakat, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Rincian kebijakan prioritas penanganan Covid-19 yang diterapkan oleh Pemerintah Bandung mencakup aspek preventif, kuratif, dan promotif. Adapun rincian kebijakan priortas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Preventif, yakni meliputi kebijakan pencegahan sebagai berikut.
   a. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
   b. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Upaya yang dilakukan meliputi Disinfeksi dan Pemasangan Sarana CTPS di Tempat Umum. Secara lebih rinci, kegiatan yang dilakukan mencakup:

i. Desinfeksi di Tempat Umum (Terminal, pasar, sekolah, perkantoran dll) melalui kemitraan dengan Organisasi Profesi, BUMN, dan Swasta dalam rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19
ii. Pemasangan sarana CTPS di tempat umum disertai edukasi cuci tangan yang benar dan gerakan bersih-bersih

c. Peningkatan surveilans bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penularan Covid-19 serta dalam rangka meningkatkan survailans bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dilakukan dengan cara :
   i. *Testing* (Test), meliputi:
      - Pembentukan jejaring lab. pemeriksa COVID-19
      - Percepatan tes COVID-19 bagi yang bergejala (suspek)
   ii. *Tracing* (pelacakan), meliputi:
      - Penguatan PE dan pelacakan kontak
      - Pemantauan karantina kontak erat
   iii. *Isolate (*Isolasi), meliputi:
      - Isolasi mandiri, isolasi di RS darurat, isolasi di RS rujukan
      - Karantina mandiri bagi kontak erat
   iv. *Treatment* (Penanganan), meliputi:
      - Penyiapan RS darurat, RS perawatan, dan RS rujukan COVID-19
      - Pengobatan simptom, suportif, penyakit komorbid.
d. Mengembangkan jaring pengaman sosial mandiri maupun dengan pemerintah
e. Penegakan hukum protokol kesehatan di setiap jenjang aktivitas masyarakat
f. Peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 di masyarakat Kabupaten Bandung

2. Promotif, yakni meliputi kebijakan peningkatan sebagai berikut.
   a. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
   b. Advokasi 5M. Kebijakan Advokasi 5 M meliputi penyebarluasan Informasi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat Tentang Covid-19 dan pencegahan dengan 5 M, kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya:
      i. Pembuatan Poster Digital Untuk Masyarakat
      ii. Membuat Pedoman Bagi tenaga kesehatan, masyarakat, dan Kelompok Rentan
      iii. Kampanye Beribadah Ramadhan Sehat dan Ajakan Tidak Mudik.
      iv. Membuat Iklan Layanan Masyarakat
      v. Kampanye pakai 5 M dan Periaku Hidup Bersih dan Sehat
      vi. Kampanye adaptasi kebiasaan baru
   c. Advokasi vaksinasi
   d. Advokasi Gerakan Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS). Kebijakan ini dapat diimplementasi dengan kegiatan sebagai berikut.
      i. GERMAS di semua tatanan dengan adaptasi kebiasaan baru
      ii. Dilakukan semua sektor mulai dari pusat, provinsi, kab/kota, puskesmas serta kelompok2 masyarakat
      iii. Edukasi & Perilaku Hidup Sehat di berbagai media
      iv. Penyusunan regulasi GERMAS tingkat Kabupaten
      v. Advokasi ke pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain untuk menggalakkan GERMAS
   e. Kerjasama dengan komunitas dalam rangka peningkatan kewaspadaan Covid-19. Keibjakan ini dapat diimplementasi dengan kegiatan sebagai berikut.

i. Senam Virtual
ii. Poster bagi remaja
iii. Lomba vlog bersih lingkungan
iv. Komunitas gizi, ibu dan anak untuk cegah COVID 19
v. Kemitraan dunia usaha, swasta
vi. Gerakan Masyarakat 5 M (GEMA 5 M)
vii. Kampanye Pencegahan COVID-19 Pelajar Kabupaten Bandung
viii. Kampanye #satukertascegahcovid
ix. Kampanye bersama mahasiswa Cegah COVID19
x. Gerakan Bersih Sekolah dan Giat Bersih Tempat Ibadah
xi. Dukungan pencegahan COVID-19 pada PMI

3. Kuratif, yakni meliputi kebijakan penyembuhan sebagai berikut.
   a. Peningkatan kapasitas daya tampung fasilitas kesehatan untuk penyintas Covid-19
   b. Penyintas Covid-19 Tanpa Gejala diisolasi secara mandiri dengan pendampingan tenaga/kader kesehatan setempat

B. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung berupaya mendukung tercapainya *Indonesian economic rebound* Tahun 2022 dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional 5,4 – 6% dan LPE Provinsi Jawa Barat 5% berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Dukungan pencapaian LPE tersebut, Kabupaten Bandung ditargetkan sebesar 5,25% pada Tahun 2022.

Menurut BPS (2021), dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 79% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 19%. Sedangkan, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 54% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil, serta sektor pertanian. Selain itu, BPS melaporkan sekitar 97% ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, penguatan pada sektor-sektor ini dapat mengakselerasi peningkatan LPE di Kabupaten Bandung untuk mendukung Indonesian *Economic Rebound*; yang pada akhirnya juga dapat mendukung tercapai penurunan tingkat kemiskinan Jawa Barat ke 7,3 - 7,9% dan tingkat pengangguran ke 9,7%.

Pada tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi masyarakat meliputi 2 langkah, yakni melalui 3 (tiga) pilar pemulihan ekonomi dan program strategis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan masing-masing upaya tersebut adalah sebagai berikut.

❖ 3 Pilar Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung

Pada tahun 2022, pembangunan Kabupaten Bandung berfokus pada fase pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat, yakni dengan penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan logistik pangan, dan penguatan investasi pariwisata serta pengembangan pusat inovasi melalui kerjasama pentahelix. Ketiga skenario pemulihan tersebut saling terintegrasi untuk mendorong pemulihan perekonomian masyarkaat yang inklusif di Kabupaten Bandung. Rincian masing-masing skenario adalah sebagai berikut.

1. Penguatan UMKM dan Koperasi

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 53%. Peranan pemerintah Kabupaten Bandung dalam intervensi sektor industri pengolahan difokuskan pada industri kecil, terutama pada UMKM yang disinergiskan oleh koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat. Dalam skenario ini, peranan pemerintah adalah menjaga kontinuitas produksi dan mengembangkan diferensiasi produk, membangun rintisan *end-to-end system* dalam pemasaran produk UMKM berbasis digital, serta mengembangkan pusat inovasi dan inkubasi bisnis menjadi kerangka prioritas ketahanan ekonomi lokal.

Skenario penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas struktur prioritas kebijakan yang saling berkesinambungan. Keempat prioritas kebijakan ini menjadi penunjang dalam pembentukan klaster-klaster industry. Prioritas kebijakan penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas:

a. Kontinuitas produksi dan diferensiasi produk UMKM, yang diwujudkan dengan:
   i. Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM;
   ii. Fasilitasi penguatan kontinuitas ketersediaan sarana produksi;
   iii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder meliputi: perguruan Tinggi, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan diferensiasi produk dan teknologi produksi;
   iv. Pengembangan standar dan protokol kesehatan dalam produksi produk; dan,
   v. Fasilitasi sertifikasi produk.
b. Pembangunan sistem *end-to-end business*, yang diwujudkan dengan:
   i. Pengembangan digitalisasi pemasaran produk UMKM (e-Commerce);
   ii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan KADIN, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan pemasaran;
   iii. Penguatan branding produk UMKM;
   iv. Pengembangan koperasi produksi digital; dan
c. Penguatan Pemodalan UMKM, yang diwujudkan dengan:
   i. Fasilitasi pengembangan Kerjasama perkreditan (*business matching*) dengan perbankan;
   ii. Penguatan lembaga BPR sebagai lembaga penyalur kredit usaha kecil;
   iii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan KADIN atau Lembaga pemodalan lainnya.
d. Pengembangan pusat inovasi dan inkubasi bisnis, yang diwujudkan dengan:
   i. Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM (inkubasi bisnis);
   ii. Pemetaan pengembangan *business matching;*
   iii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau institusi lainnya sebagai transfer teknologi produksi dan diferensiasi produk, pemasaran, dan branding;
   iv. Penguatan database UMKM; dan
   v. Penelitian dan pengembangan produk berorientasi ekspor dan substitusi impor.

2. Pengembangan Logistik Pangan

Sementara itu, pengembangan logistik pangan dititikberatkan pada peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Titik fokus pada pengembangan logistik pangan adalah menata dan memperkuat rantai pasok pangan dalam pendekatan deglobalisasi pangan, yakni penguatan produksi pangan lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan swasembada pangan sebagai akibat dampak terganggunya jalur distribusi pangan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Pembatasan perdagangan ekspor-impor di wilayah Indonesia yang mengakibatkan daerah perlu memperkuat ketahanan pangan sendiri melalui pengembangan logistik pangan. Selain itu, menghadapi tantangan adanya paparan virus COVID-19, pemerintah juga perlu mulai mensosialisasikan pergeseran preferensi pangan masyarakat terhadap healthy food untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengelola ketahanan pangan rumah tangga, menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan produk pangan, menata distribusi pangan, mensosialisasikan program B2SA dan mengendalikan stabilitas harga pangan.

Melalui kebijakan pengembangan logistik pangan, diharapkan dapat menciptakan kepastian harga pasar, informasi pasokan yang tersedia, transparansi biaya transaksi, dan konsumsi pangan sehat bernutrisi. Sebagai tahap awal pengembangan sistem logistik pangan Kabupaten Bandung, pemerintah menyusun arah kebijakan prioritas program/kegiatan untuk Tahun 2022, antara lain:

a. Penguatan sub-sistem produksi pangan melalui penguatan teknologi produksi dan pendampingan desiminasi teknologi dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

b. Penguatan kelembagaan simpul pangan tingkat kabupaten.
c. Penguatan kelembagaan simpul pangan pada lingkungan masyarakat terendah.
d. Pengembangan kolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi, BULOG, perusahaan layanan pengiriman.
e. Penguatan database pangan *real-time* dan faktual.

3. Penguatan Investasi Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 menjadi komponen yang juga harus diintervensi dalam rangka pemulihan ekonomi. Kabupaten Bandung memiliki banyak objek wisata, khususnya wisata alam, perlu menerapkan kebijakan baru berkaitan dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun dan menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata demi mendorong perubahan layanan kepariwisataan. Layanan ini termasuk di dalamnya adalah perhotelan, restoran, dan jasa-jasa lainnya. Kebijakan lainnya adalah membangun kembali kepercayaan bersama antara pemerintah dan sektor swasta, memperkuat kolaborasi antar stakeholder, dan menata kawasan pariwisata berbasis *cleanliness, health, dan safety*.

Untuk mampu menguatkan kembali investasi di bidang pariwisata Kabupaten Bandung, ditetapkan 3 (tiga) tahapan prioritas kebijakan yang mampu menunjang penguatan investasi pariwisata. Ketiga prioritas kebijakan tersebut yaitu:

a. Pengembangan *branding* wisata
   i. Penyusunan dan penerapan protokol CHS (*cleanliness, health, safety*) wisata untuk hotel, restoran, gerai produk wisata, dan kawasan wisata;
   ii. Pengembangan branding destinasi wisata;
   iii. Promosi wisata; dan
   iv. Penguatan kerjasama dan keterlibatan komunitas wisata, masyarakat, dan institusi lainnya dalam branding wisata.
b. Penataan Kawasan wisata
   i. Penguatan keterlibatan dan kerjasama dengan komunitas wisata, masyarakat, dan institusi (PTPN, Perhutani) atau pihak swasta lainnya dalam penataan kawasan wisata;
   ii. Penataan lingkungan wisata.
   iii. Penataan gerai produk wisata.
   iv. Aktivasi pusat informasi pariwisata.
   v. Penyusunan masterplan kawasan wisata.
c. Penguatan investasi pariwisata
   i. Penyusunan profil dan proposal investasi kawasan unggulan Kabupaten Bandung.
   ii. *Business matching* pelaku dan *stakeholder* wisata.

❖ **Program Strategis Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan program strategi yang menitikberatkan penguatan modal sosial masyarakat. Program strategi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya penurunan tingkat kemiskinan Nasional ke 8,5 – 9% serta tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat 7,3 – 7,9% di Tahun 2022. Guna mendukung penurunan tingkat kemiskinan tersebut, Kabupaten Bandung ditargetkan 6,32%.

Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung akibat COVID-19 untuk mendukung tercapainya *Indonesian economic rebound* Tahun 2022 dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional 5,4 – 6% dan LPE Provinsi Jawa Barat 5% berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Dukungan pencapaian LPE tersebut, Kabupaten Bandung ditargetkan sebesar 5,34% pada Tahun 2022.

Menurut BPS (2021), dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 79% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 19%. Sedangkan, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 54% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil, serta sektor pertanian. Selain itu, BPS melaporkan sekitar 97% ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, penguatan pada sektor-sektor ini dapat mengakselerasi peningkatan LPE di Kabupaten Bandung untuk mendukung Indonesian Economic Rebound; yang pada akhirnya juga dapat mendukung tercapai penurunan tingkat kemiskinan Jawa Barat ke 7,3 - 7,9% dan tingkat pengangguran ke 9,7%.

Program strategis Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui "Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa" pada sektor-sektor ekonomi produktif yang dapat menguatkan ekonomi kerakyatan. Program strategis ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan skala mikro bagi masyarakat dan pelaku usaha, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri.

Pada implementasinya, program ini mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut.

1. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Adapun tujuan dan sasaran program strategis Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bandung baik di bidang sosial kemasyarakat (daya tahan), bidang pemberdayaan ekonomi (daya saing dan daya tarik), maupun bidang pembangunan sarana dan prasarana dasar (daya lestari).
2. Mengakselerasi pengembangan aktivitas usaha masyarakat berbasis klaster ekonomi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, pelaku usaha mikro serta koperasi guna meningkatkan kewirausahaan dan skala ekonomi masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Masyarakat diarahkan untuk meningkatan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, melalui:

1. Pengembangan dan pemberdayaan usaha dalam bentuk Koperasi dan/atau bentuk lembaga ekonomi mikro lainnya.
2. Pemberdayaan UMKM, industri rumah tangga, industri kreatif, usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta usaha ekonomi produktif lainnya.
3. Mengoptimalkan peran aktif lembaga kemasyarakat desa dalam sektor ekonomi.

4. Mendorong pelaku usaha mikro untuk ikut serta dalam koperasi dalam upaya meningkatkan skala ekonomi.
5. Menintegrasikan aktivitas ekonomi BUM Desa dengan Koperasi dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan skala ekonomi pelaku usaha.
6. Menjembatani pemasaran produk pelaku usaha mikro dan kecil melalui kemitraan usaha dengan Koperasi, Koperasi Desa, dan Koperasi produksi lainnya.
7. Meningkatkan keterlibatan filantropi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif.
8. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Penelitian dalam mengembangkan pusat inovasi dan *co-working space* di tingkat masyarakat sebagai wadah transfer pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan skala ekonomi koperasi dan pelaku usaha mikro.

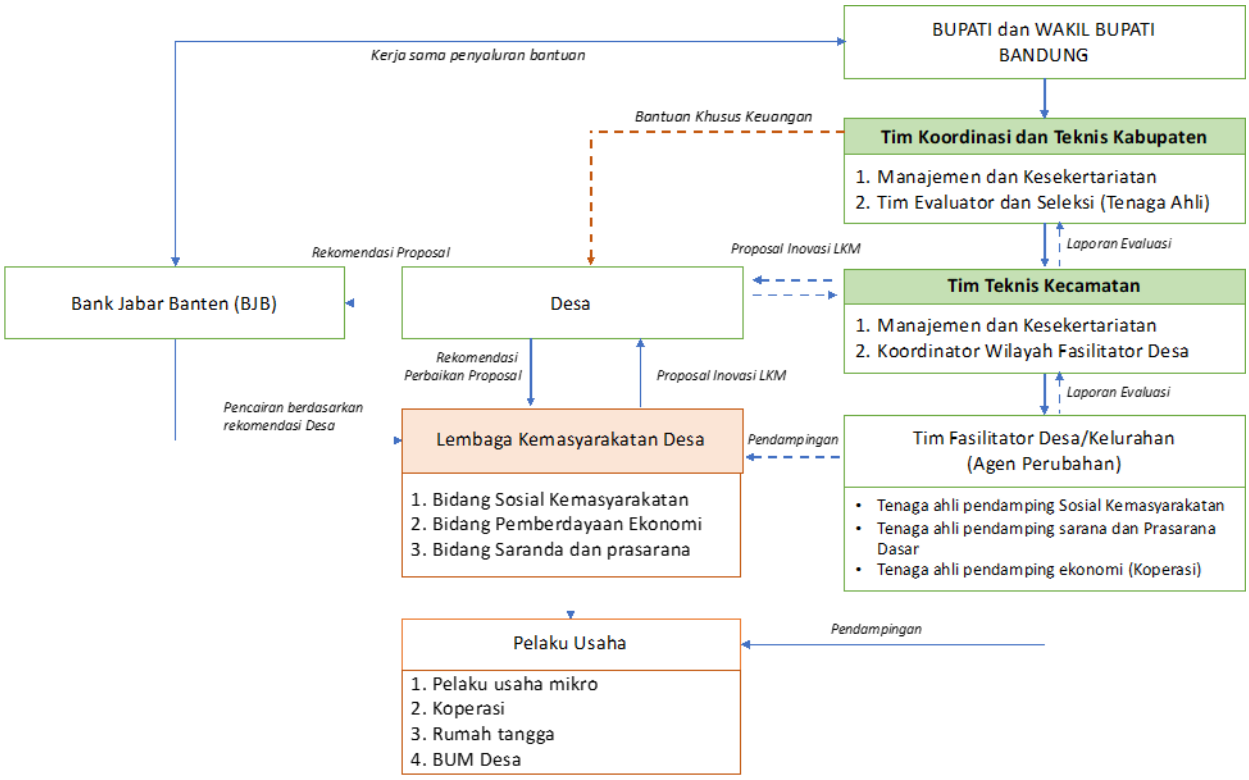

GAMBAR 4.5
KELEMBAGAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Alternatif mekanisme penyaluran dana APBD Kabupaten Bandung dalam program ini dapat berupa: 1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, dan 2) Kerja sama dengan Perbankan (BJB dan/atau perbankan BUMN lainnya) (lihat **Gambar 4.6**). Sedangkan peruntukan program ini terutama digunakan untuk pembinaan, pendampingan, pengendalian, dan pengawasan. Beberapa Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan Peraturan Bupati:
   a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa,
   b. Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran, Pemanfataan, Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Keuangan.
2. Menu Kegiatan menjadi bagian dalam SIPD yang diprioritaskan untuk program pembinaan, pendampingan, pengendalian, dan pengawasan bagi pengembangan lembaga keuangan mikro.
3. Perangkat Daerah: DPMD, DiskopUKM, Disperindag, Bagian Perekonomian Setda, dan Kecamatan & Kelurahan.

Bantuan Keuangan Khusus Desa	Kerja sama dengan BPR dan Perbankan
Definisi: bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. 1. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus pada Desa. 2. Menu Kegiatan menjadi bagian dalam SIPD yang diprioritaskan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3. Kepala Desa menyusun usulan penyaluran dana kepada Perangkat Daerah yang membidangi PMD dan Keuangan Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluator Independen hasil seleksi proposal bisnis koperasi dan pelaku usaha mikro.	Dana salur berupa Hibah bergulir kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 1. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme kerja sama dengan BPR atau Perbankan lainnya, terutama terkait dengan indikator koperasi dan pelaku usaha penerima, bunga, dan agunan pinjaman. 2. BPR atau perbankan dapat menyalurkan dana atas dasar hasil rekomendasi dari Tim Evaluator.

GAMBAR 4.6
RINCIAN ALTERNATIF MEKANISME PENYALURAN APBD KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4.2.3.6. Kebijakan Terkait Penanganan Stunting

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Apabila tidak ditangani sejak dini, kondisi stunting dapat menimbulkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek dari kondisi stunting adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Sementara dampak jangka panjang dari kondisi stunting adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya), meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Hal-hal tersebut yang menjadikan stunting sebagai permasalahan strategis yang perlu ditangani untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang dan memiliki kemampuan yang optimal dalam meneruskan pembangunan wilayah.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan stunting daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun kebijakan yang disahkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Penyusunan kebijakan ini menimbang beberapa hal, diantaranya adalah: 1) dalam rangka mendukung program prioritas nasional sebagai upata penurunan stunring perlu dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui sinkronisasi program kegiatan di tingkat pusat dan daerah secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel; 2) kejadian stunting pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun akibat dari kekurangan giizi kronis masih banyak terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan dan faktor keturunan; dan 3) untuk memberikan pedoman dalam kegiatan peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia masyarakat diperlukan pengaturan mengenai percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting. Sasaran dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting terdiri atas 2 (dua) jenis intervensi, yakni intervensi gizi spesifik, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan, dan ibu menyusui dan anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, serta intervensi

gizi sensitif yang meliputi masyarakat umum. Adapun rincian kegiatan intervensi dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil meliputi:
   a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
   b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
   c. mengatasi kekurangan iodium;
   d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
   e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan.
2. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan meliputi:
   a. mendorong inisiasi menyusu dini; dan
   b. mendorong pemberian air susu ibu ekslusif.
3. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan meliputi:
   a. mendorong melanjutkan pemberian air susu ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping air susu ibu;
   b. menyediakan obat cacing;
   c. menyediakan suplementasi zink;
   d. melakukan fortifikasi zat besi kedalam makanan;
   e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan memberikan imunisasi lengkap; dan
   f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
4. Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran dengan sasaran masyarakat umum meliputi:
   a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
   b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
   c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
   d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
   e. menyediakan jaminan kesehatan nasional;
   f. menyediakan jaminan persalinan universal;
   g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
   h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
   i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
   j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
   k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
   l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan penyelenggaraan penurunan stunting di Kabupaten Bandung tahun 2020 yang disampaikan sebelumnya di Bab 2, maka dapat disimpulkan bahwa strategi utama dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan stunting;
2) Melakukan upaya percepatan program-program intervensi stunting baik sensitif maupun spesifik;
3) Mengembangkan sistem manajemen data stunting terpadu di Kabupaten Bandung;
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penanggulangan stunting.

Rincian strategi pemecahan kendala penanganan stunting di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 4.19** berikut.

TABEL 4.19
STRATEGI PEMECAHAN KENDALA PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG

No.	Aspek Analisis Manajemen Layanan	Strategi
1	Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	Menyusun rencana induk terpadu terkait pencegahan dan penanganan stunting
		Menyusun regulasi terkait pencegahan dan penurunan stunting
2	Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program	Membangun basis data terpadu terkait stunting sampai dengan ke tingkat desa
		Melakukan optimalisasi sosialisasi ke masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting dengan mempertimbangkan protokol kesehata
3	Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana	Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pengukur status gizi balita
		Meningkatkan kuantitas tenaga kesehatan pengelola gizi di lokus intervensi stunting
		Meningkatkan koordinasi dan advokasi antar stakeholder dalam meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan dan penurunan stunting
4	Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait stunting
		Mhenggiatkan kampanye terkait informasi publik dalam pencegahan dan penurunan stunting

Sumber: Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung (2020)

4.2.3.7. Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

DPRD memberikan saran dan masukan terhadap perumusan RKPD 2022 berdasarkan hasil reses dan aspirasi dari masyarakat. Masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan dicantumkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Rincian saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang disinergikan dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 4.20** berikut.

TABEL 4.20
KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DENGAN POKOK-POKOK PIKIRAN DAERAH

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1	**Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					DINAS KESEHATAN	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Poskesdes/Pustu	128	m²	Kp. Bandawa Rt. 02 Rw. 15, Kab. Bandung rt 4/rw 4 desa rancaekek kulon, Kab. Bandung Poskesdes Mekarmanik, Kab. Bandung RW 11 Kp. Taraju Kec Banjaran Desa Tarajusari, Kab. Bandung	DINAS KESEHATAN	Usulan disetujui
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	206	paket	Desa Pinggirsari, Kab. Bandung Dusun I s/d IV, Kab. Bandung Desa Ciaro, Kab. Bandung Desa Mekarmanik, Kab. Bandung Kp. Sekeawi, Kec Pamengpeuk Desa Rancatungku, Kab. Bandung	DINAS KESEHATAN	Usulan disetujui
2	**Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan LPK yang terjalin	3	orang	Kelurahan Rancaekek Kencana, Kab. Bandung	DINAS KETENAGAKERJAAN	Usulan disetujui
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah pencari kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan	834	0rang	Kab. Bandung	DINAS KETENAGAKERJAAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					DINAS KETENAGAKERJAAN	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri	115	orang	Kab. Bandung	DINAS KETENAGAKERJAAN	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	jumlah UMKM yang mengikuti Pendampingan bagi UMKM	1188	Peserta	Kab. Bandung	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Usulan disetujui
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMD atau Perusahaan Besar	127	Peserta	Kab. Bandung	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Usulan disetujui
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi	Jumlah pra koperasi yang mengikuti kegiatan pemahaman perkoperasian Jumlah SDM koperasi yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi	569	Peserta	Desa Pinggirsari, Kab. Bandung	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Usulan disetujui
4	**Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada					DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
	membentuk generasi berdaya saing global	**Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	3064	unit	Kabupaten Bandung	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula	Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua	13	Kelompok	Kabupaten Bandung	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					DINAS PENDIDIKAN	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah pemb. sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	276	meter	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					DINAS PENDIDIKAN	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Jumlah pemb. sarana air bersih dan sanitasi SMP	709	paket	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					DINAS PENDIDIKAN	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		Pengadaan Mebeluer Sekolah SD	Jumlah pengadaan meubelair sekolah	17	Paket	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP	Jumlah meubelair sekolah SMP yang tersedia	4	paket	KP. UBRA RT.01 RW. 12, Kab. Bandung SMPN 3 Rancaekek, Kab. Bandung SMP AL QONA"AH , Jl. Giriharja No.41 RT 04/01 Jelekong , kec Baleendah, Kab. Bandung Jln. Raya Banjaran 595 bojong sereh Kec Arjasari Kel lebakwangi, Kab. Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengadaan Meubelair PAUD	jumlah pengadaan meubelair PAUD	35	Paket	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	jumlah perlengkapan PAUD	20	Paket	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengadaan Perlengkapan SISWA PAUD	jumlah buku-buku dan alat tulis siswa PAUD yang disediakan, jumlah raport PAUD yang disediakan	5	paket	Kober Nurul ikhwan Kp. Pasirhonje Rt. 01 Rw. 08, Kab. Bandung PAUD At-Taubah - Kp. Pamuliahan RT. 01 RW. 02, Kab. Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					DINAS PENDIDIKAN	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD	9	lokal	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					DINAS PENDIDIKAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	15	ruang	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					DINAS PENDIDIKAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah rehab sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	257	lokal	Kabupaten Bandung	DINAS PENDIDIKAN	Usulan disetujui
5	**Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Pengelolaan Sampah					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4	unit	Sukamukti, Kab. Bandung	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usulan disetujui
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan persampahan	850	peserta	Kab. Bandung	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Bibit MPTS dan Kayu-kayuan Jumlah Pemelihara Persemaian	3165	peserta	Desa Pinggirsari, Kab. Bandung	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
			Jumlah Persemaian yang terbangun Jumlah Sosialiasi Penanaman					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Jumlah verifikasi lapangan usaha/kegiatan	120	orang	Desa Pinggirsari, Kab. Bandung Kantor Balai Desa Alamendah, Kab. Bandung Desa Ciapus, Kab. Bandung	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran yang Di isolasi	3	kegiatan	KP.Babakan Mantri (paguyuban cacing barokah) Desa Pinggirsari, Kab. Bandung Jl. Raya Arjasari-Ciparay KM 5, Kab. Bandung KP. Panyandaan, Kab. Bandung	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usulan disetujui
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah SKKL desa yang telah terbentuk relawan Kebakaran	1	paket	Rancamanyar, Kab. Bandung Karang Taruna Desa Mekarmanik, Kab. Bandung Desa langonsari, Kab. Bandung	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah mayarakat yang mendapat sosialisasi pencegahan dan pengangulangan bahaya kebakaran dan jumlah masyarakat yang menjadi relawan kebakaran	3	Paket	Mekarmaju Desa Mekarmaju, Kab. Bandung Pacet, Kab. Bandung Desa Panyirapan, Kab. Bandung	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Usulan disetujui
6	**Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	4	Kelompok	Desa Gn.leutik Ciparay RW.13, Kab. Bandung Kp. Pamoyanan RW 01, Kab. Bandung kelompok wanita tani cupu manik di kp bojongmalaka, Kab. Bandung KWT dan Taruna Tani di Desa Cibiruwetan, Desa Cibiruhilir, Desa Cileunyi Wetan dan Desa Cimekar, Kab. Bandung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pelaku usaha pengolahan ikan	21	Unit	Kabupaten Bandung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi	11	kelompok	Kabupaten Bandung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah TTI yang terfasilitasi	1	TTI	Kp. Pasirkemir rt 01 rw 12, Kab. Bandung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan prasarana pembudidayaan ikan	3	kelompok	ko seke Rt 3 Rw 6 Desa Cikasungka kecamatan cikancung, Kab. Bandung Rancaekek permai C-4 No.21 RT.06/RW.18, Kab. Bandung Kelompok Ternak MINA RAHARJA II, Kab. Bandung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN	
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					DINAS PERTANIAN	
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Fasilitasi Prasarana Kandang Ternak Fasilitasi sarana kandang Ternak Jumlah kelompok tani ternak yang mengembangkan potensi hasil peternakan wilayahnya Jumlah Kelompok ternak yang menerapkan konsep budidaya ramah lingkungan	2	set	Kp. Cibodas Rt 03/Rw 05, Kab. Bandung kp mekarmulya rt 2 rw 21, Kab. Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					DINAS PERTANIAN	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi sarana benih, pengolah lahan, pengendalian, dan pasca panen Jumlah luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan (Ha) Jumlah pengembangan tanaman pertanian	59	ha	Kabupaten Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN					DINAS PERTANIAN	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PERTANIAN	
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Fasilitasi Obat Cacing Ruminansia Kecil dan Besar Jumlah Kelompok terdampak kasus yang difasilitasi (Kelompok)	2	set	Kp Cipatat, Kab. Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					DINAS PERTANIAN	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana pertanian yang terpelihara dan dapat digunakan Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam penggunaan sarana pendukung pertanian	98	unit	Kabupaten Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PERTANIAN	
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Fasilitasi Bibit Ternak Jumlah peternak yang mampu menerapkan teknis budidaya ternak yang baik (orang)	83	set	Kabupaten Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					DINAS PERTANIAN	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Fasilitasi sarana pengendalian OPT Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian hortikultura dengan baik (kelompok) Jumlah petani yang mampu menerapkan Pengendalian Hama (orang)	39	set	Kabupaten Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					DINAS PERTANIAN	
		Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi Bibit dan Pengolah Lahan Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang dihasilkan oleh UPTD Pembibitan Jumlah komoditi unggulan pertanian yang dilestarikan dan dikembangkan di UPTD Pembibitan	25	set	Kabupaten Bandung	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui
7	**Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Pembangunan Jalan	Panjang Bangunan Pelengkap Jalan TPT yang terbangun	3903	meter	Kabupaten Bandung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
			Panjang jalan yang dibangu/ditingkatkan Panjang trotoar yang terbangun					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Pembangunan Sistem drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	4067	m3	Kabupaten Bandung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Usulan disetujui
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun	160	Titik	Kabupaten Bandung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Volume Jaringan Irigasi permukaan yang direhabilitasi	705	m3	Kabupaten Bandung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Usulan disetujui
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	13653	m2	Kabupaten Bandung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha.	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	41676	meter	Kabupaten Bandung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun	6530	paket	Kabupaten Bandung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)	8281	unit	Kabupaten Bandung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan - Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana Taman dan TPU	843	paket	Kabupaten Bandung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Usulan disetujui
8	**Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					DINAS SOSIAL	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					DINAS SOSIAL	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/ Individu yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial	61	kelompok	Kabupaten Bandung	DINAS SOSIAL	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					DINAS SOSIAL	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					DINAS SOSIAL	
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Bimbingan Fisik, Mental dan Spriritual	121	Orang	Kabupaten Bandung	DINAS SOSIAL	Usulan disetujui
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					DINAS SOSIAL	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					DINAS SOSIAL	
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	45	Orang	Kabupaten Bandung	DINAS SOSIAL	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
			Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Mendapat Bimbingan Sosial					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					DINAS SOSIAL	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					DINAS SOSIAL	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Terlantar yang Mendapat Permakanan	6	Orang	Kabupaten Bandung	DINAS SOSIAL	Usulan disetujui
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					DINAS SOSIAL	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					DINAS SOSIAL	
		Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Sandang	1	Orang	Desa Cikawao, Kab. Bandung	DINAS SOSIAL	Usulan disetujui
9	**Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang terFasilitasi Pengembangan Kompetensinya	856	Peserta	Kabupaten Bandung	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Usulan disetujui

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume		Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan atau siswa)	Jumlah Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan yang terlaksana	461	Peserta	Kabupaten Bandung	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi Luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah Kelompok seni yang di berikan penghargaan berupa fasilitasi pagelaran seni budaya bagi yang berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan Jumlah seniman budayawan yang berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan	1	Paket	Kp. Ciparigi RT 02 RW 14, Kab. Bandung	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Usulan disetujui
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	162	Peserta	Kabupaten Bandung	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Usulan disetujui

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4.2.3.8. Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon adalah platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Fokus perencanaan pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Pembangunan rendah karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial, melalui pengurangan kemiskinan.

Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
4. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
5. Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
6. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
7. Tujuan 11: Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
8. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
9. Tujuan 13: Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasai perubahan iklim dan dampaknya;
10. Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; dan
11. Tujuan 15: Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Perpres tersebut melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Komitmen pemerintah pusat dalam hal ini juga tertuang dalam RPJMN Tahun 2018-2023 dimana pembangunan rendah karbon menjadi sasaran nasional ke-23.

Terkait hal ini, Provinsi Jawa Barat melalui dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 juga menuangkan kebijakan ini ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu sasaran ke-13: *"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat"*. Sasaran ini dicapai melalui strategi "mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon" yang diturunkan ke dalam 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;

2. Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

Untuk menindaklanjuti dinamika perkembangan dunia internasional dalam upaya antisipasi dampak perubahan iklim, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Paris Agreement adalah persetujuan yang dihasilkan COP 21 di Paris pada Tahun 2015 yang memuat mengenai komitmen Negara-negara di dunia untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta meningkatkan penanganan perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai implikasi dari penetapan Undang-Undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 akan digantikan dengan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sebagai transformasi dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dimana di dalamnya telah memasukkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan jumlah dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mentransformasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 7 (tujuh) provinsi yang menjadi percontohan perencanaan pembangunan rendah karbon nasional. Peraturan Gubernur melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2021 dan menjadi acuan kebijakan untuk RPJMD periode berikutnya. Kendatipun demikan, prinsip-prinsip rendah karbon pada dasarnya telah tertuang pada program dan kegiatan di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program strategis, penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan proyek strategis, serta pengawasan ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Berkaitan dengan kualitas udara yang ada di Kabupaten Bandung, terdapat tiga sumber polutan utama, yakni industri, rumah tangga dan kendaraan bermotor. Ketiga sumber polutan ini perlu diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Bandung yang ramah karbon dalam waktu lima tahun kedepan. Berdasarkan data dari KLHS RPJMD Kabupaten Bandung, rincian mengenai masing-masing polutan tersebut di Kabupten Bandung adalah sebagai berikut.

A. Industri

Pemakain bahan bakar untuk industri berhubungan dengan kebutuhan menghasilkan energy. Diketahui bahwa dari 216 industri manufaktur yang terdata, tidak semua memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi. Beberapa industri telah beralih menggunakan LPG maupun bahan bakar lain. Total bahan bakar yang dikonsumsi adalah LPG sebanyak 200 Kg/bulan, solar sebanyak 51,250.00Liter/bulan, 3.39.00 MMSCFGas/bulan, 27,430.00 Ton batubara/bulan dan 206.00 Ton biomassa/bulan. Dengan mengacu pada Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca, IPCC 2006 maka dari pembakaran bahan bakar tersebut akan menghasilkan gas rumahkaca (CO_2) sebesar 600,474.12 ton/tahun. Perkiraan hitungan ini disajikan pada gambar berikut.

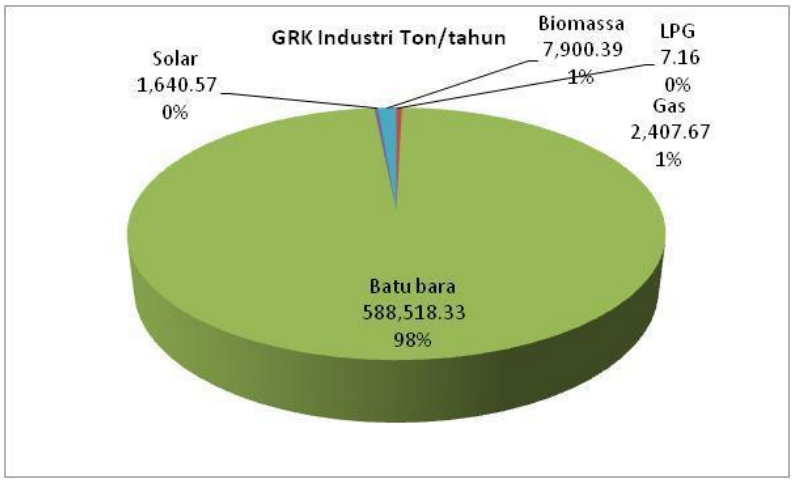

GAMBAR 4.7
EMISI GRK CO_2 DARI PEMAKAIAN BBM INDUSTRI
Sumber: Hasil Analisis Tim IKPLHD, 2018

Dari pemakaian berbagai jenis bahan bakar di industri, terlihat bahwa, batubara adalah bahan bakar yang paling besar mengemisikan GRK (CO_2) dari sektor industri, selain karena jumlah pemakaian bahan bakar yang sangat besar juga karena faktor emisi CO_2 per unit pemakaiannya juga besar.

B. Rumah Tangga

Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1,055,844, maka total konsumsi LPG domestik Kabupaten Bandung di tahun 2018 adalah 76,020,758.09 Kg. Berdasarkan perhitungan emisi GRK sektor rumah, total CO_2di Kabupaten Bandung sebesar 226,893.58 Ton/tahun dimana perkiraan emisi GRK paling besar berasal dari Kecamatan Baleendah karena memiliki jumlah rumah tangga paling banyak dengan konsumsi LPG paling besar.

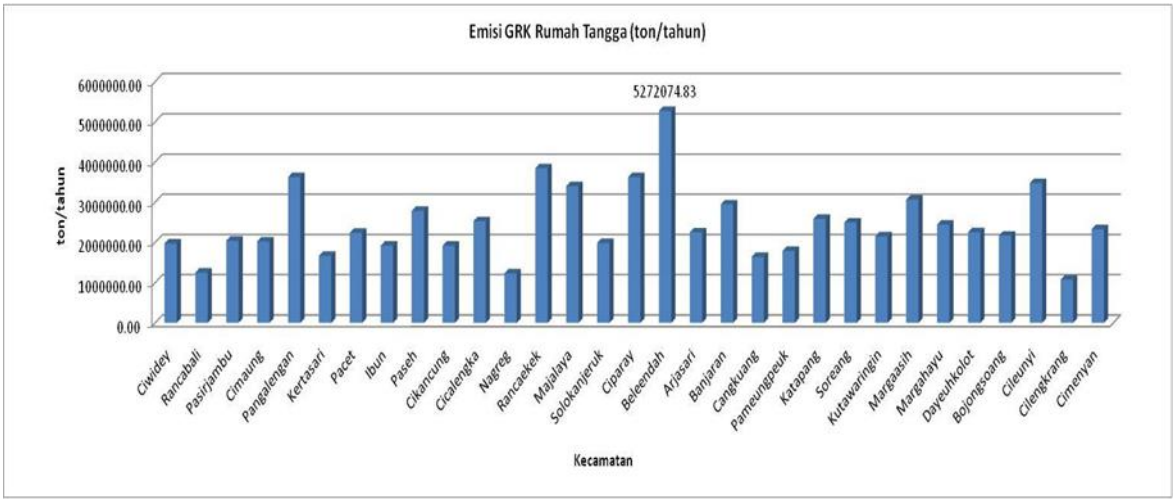

GAMBAR 4.8
PERKIRAAN EMISI GRK RUMAH TANGGA TAHUN 2018
Sumber: Hasil Analisis Tim IKPLHD, 2018

C. Kendaraan Bermotor

Dari semua kendaraan yang beroperasi tersebut tentunya memerlukan bahan bakar yang efek sampingnya akan mengeluarkan emisi pencemar udara dan Gas Rumah Kaca yang menjadi tekanan terhadap lingkungan terutama udara. Operasional 584.904 unit kendaraan bermotor tersebut diprediksi mengkonsumsi bensin maupun solar masing-masing sebanyak 469.502.5 KL bensin /tahun dan 370946 KL solar /tahun yang akan

mengemisikan CO_2 sebanyak 2.063.240 ton/tahun yang berasal dari 1.073.705.27 Ton / tahun dari kendaraan berbahan bakar bensin dan 989.534.94 Ton/tahun dari kendaraan berbahan bakar solar. Berikut ini trend GRK (CO_2) yang diemisikan kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung selama tahun 2012 hingga tahun 2018.

Rekapitulasi emisi GRK dari 3 sektor transportasi, industri dan rumah tangga, memperlihatkan sektor transportasi di Kabupaten Bandung menyumbang CO_2 paling tinggi dibandingkan sektor industri dan rumah tangga, seperti pada gambar berikut.

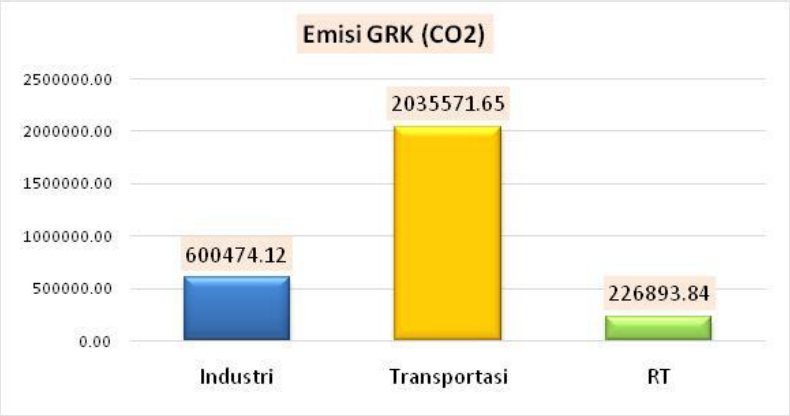

GAMBAR 4.9
EMISI GRK (TON/TAHUN) DARI KEGIATAN TRANSPORTASI INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA
Sumber: Hasil Analisis Tim IKPLHD, 2018

Berdasarkan pemaparan tersebut, upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon di Kabupaten Bandung dilakukan melalui:

1. Pertanian, meliputi Intensifikasi pertanian dengan kebun campuran, Penggunaan pupuk organik, pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas;
2. Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pelaksanaan car free day, peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir; dan
3. Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), pembangunan dan operasional Bank Sampah, serta pembangunan IPAL domestik.

Menurut amanat Undang Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa kewenangan Energi dan Kehutanan menjadi urusan Provinsi, bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Bandung tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon antara lain subtitusi bahan bakar dengan biogas, gerakan penanaman pohon, pembuatan kebun bibit keanekaragaman hayati, program kampung iklim, perlindungan mata air, pembuatan sumur resapan air, pemanenan air hujan, serta rehabilitasi lahan bagi perlindungan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi dan pemanfaatan air.

4.3. Inovasi Perencanaan Tahun 2022

Dalam menjawab tantangan pembangunan khususnya di era pandemi, inovasi dan kolaborasi multistakholder dalam perencanaan pembangunan menjadi penting untuk menghadirkan program pembangunan yang tepat dan tanggap. Untuk pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bandung merumuskan konsep Bandung Bedas Manunggal sebagai konsep kebijakan *integrated planning* atau perencanaan terpadu yang mengedepankan inovasi, integrasi, dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan berbasis tematik desa. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 menjadi tahun pertama konsep kebijakan ini diimplementasi di Kabupaten Bandung.

Secara epistimologis, konsep Bandung Bedas Manunggal berupaya mengembangkan semangat Bedas Manunggal dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Konsepsi tersebut dapat dirinci dengan penjelasan-penjelasan berikut.

a. Dalam Bahasa Sunda, kata "Bedas" memiliki makna *jelas*, *kuat* dan *tangguh*. Sejalan dengan amanat Rancangan Awal RPJMD, Bandung BEDAS memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera. Pendekatan "Bedas" atau sifat jelas, kuat dan tangguh diperlukan dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut pada tahun 2021-2026.
b. Manunggal, dalam KBBI memiliki arti *menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku*. Prinsip ini menjadi dimanifestasikan dalam pembangunan berbasis *integrated planning* atau perencanaan terpadu dalam bingkai Bedas.

Secara teoritis, konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal berupaya mengontekstualisasi teori *Doughnut Economics* yang dikembangkan oleh Ratworth (2012) dan *Lego Philosophy* oleh Irwin et al., (2017). Pada dasarnya, Ratworth (2012) mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan haurs memperhatikan dua plafon, yakni plafon sosial dan plafon ekologis. Dalam menuju suatu tujuan pembangunan, plafon sosial bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah tersebut agar mendukung dan terus mengembangkan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Adapun plafon ekologis ada untuk memastikan pembangunan yang terjadi sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat dan menghindari wilayah dari pembangunan yang mengakibatkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat setempat. Dengan demikian, kedua plafon tersebut mengarahkan pada pembangunan yang tidak semata-mata untuk mengeksploitasi potensi daerah, baik potensi alam maupun potensi sosial, namun mengarahkan wilayah pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan *Lego Philosophy* berkenaan dengan prinsip kreatifitas dalam proses pembangunan suatu identitas dan manifestasi visi yang dilakukan secara bersama meskipun memiliki karateristik dan latar belakang yang beragam

Selain itu, konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal juga mempedomani konsep pembangunan daerah yang menjunjung pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rincian penjelasan masing-masing pendekatan yang terkandung dalam konsepsi Bandung Bedas Manunggal adalah sebagai berikut.

a. **Tematik-Holistik,** yakni dalam rangka memfokuskan pembangunan di Kabupaten Bandung dipilih beberapa tema strategis untuk dikembangkan. Terdapat 5 (lima) tema yang menjadi fokus. Kelima tematik ini dipilih dengan melihat tema-tema pembangunan yang merupakan bagian dari satu kesatuan potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling terkait di Kabupaten Bandung. Adapun tematik ini dibingkai oleh Kearifan Lokal, dan Plafon Ekologis yang terdiri dari Ketahanan Bencana, Integrasi Spasial dan Daya Dukung Lingkungan. Secara garis besar, manifestasi tematik-holistik konsep Bandung Bedas Manunggal terilustrasi dalam fondasi Semangat Pembangunan Bedas. Selengkpanya, 5 (lima) tema tersebut adalah sebagai berikut.
    a. Kearifan lokal, yang diterjemahkan menjadi fokus Semangat Pembangunan BEDAS;
    b. Pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Berdaya;
    c. Reformasi birokrasi, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Rancage;
    d. Transformasi digital, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Net 4.0; dan
    e. Pembangunan berkelanjutan, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Lestari.
b. **Integratif,** yakni dalam melakukan intervensi pada pembangunan di Kabupaten Bandung memerlukan sinergi multipihak dan multiaspek. Secara lebih rinci, khususnya terkait 5 tematik yang diusung, intervensi untuk masing-masing tematik ini memerlukan intervensi dari multipihak dan multiaspek.
c. **Spasial,** yakni bahwa pengembangan konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal melalui 5 tematik yang diangkat akan tersebar ke seluruh daerah di Kabupaten Bandung pada skala desa. Pembangunan di tingkat desa sebagai daerah otonom menjadi lokus pembangunan yang diarahkan sesuai potensi lokal yang ada sekaligus simpul data yang dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat desa setempat.

Adapun konsep Bandung Bedas Manunggal dilengkapi 3 (tiga) pendekatan dalam mewujudkan *integrated planning,* yakni pendekatan kolaboratif, integratif, dan inovatif. Pendekatan kolaboratif dikedepankan untuk memastikan intervensi kebijakan Bandung Bedas Manunggal dilakukan secara multiaspek dan multipihak. Pendekatan integratif berupaya memanifestasi semangat 'Manunggal' atau keterpaduan dalam intervensi pembangunan Bandung Bedas Manunggal dalam mewujudkan satu tujuan, yakni Bandung BEDAS. Terakhir, pendekatan inovatif mengedepankan intervensi yang berorientasi pada proses pemecahan masalah yang kreatif dan solusi pembangunannya dapat aplikatif di lokus-lokus pembangunan Bedas Manunggal.

Berdasarkan konsepsi tersebut, Bandung Bedas Manunggal terdiri dari 5 (lima) lapisan pembangunan sebagai berikut.

1. **Semangat Pembangunan BEDAS (2022-2026)**, mencakup semangat pembangunan yang mendasari konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal. Semangat pembangunan berupaya mendorong pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, inovasi dan kolaborasi, kearifan lokal dan kesetaraan gender.
2. **BEDAS Berdaya (2022)**, merupakan manifestasi simpul kreatif BEDAS yang terdiri dari 3 (tiga) tema yang dinilai strategis untuk pembangunan Kabupaten Bandung, yakni Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Pangan.
    a. **Ekonomi Kreatif.** Pengembangan tematik ekonomi kreatif berupaya memanfaatkan potensi keahlian, bakat, dan juga kreativitas masyarakat Kabupaten Bandung serta letak Kabupaten Bandung yang strategis untuk menjangkau pasar. Pengembangan tematik ini juga sejalan untuk memberdayakan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan di tingkat desa/kampung pada berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, seni pertunjukan, fesyen, kraf, desain produk dan lain-lain. Dengan demikian, pengembangan tematik ini juga akan mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
    b. **Ketahanan Pangan.** Pengembangan tematik pangan meliputi upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjamin ketersediaan, kualitas, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini dilatarbelakangi oleh upaya menunkan angka prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Upaya yang didorong dalam pengembangan tematik pangan ini meliputi pengembangan simpul pangan regional kabupaten dan lokal sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dari tingkat terkecil yaitu desa.
    c. **Pariwisata.** Pada kondisi eksisting, Kabupaten Badung memiliki banyak potensi pariwisata, baik yang itu untuk objek-objek wisata yang sudah dikembangkan maupun yang belum dikembangkan. Objek-objek wisata Kabupaten Bandung yang telah berkembang tidak menjadi destinasi bagi wisatawan domestik, tetapi juga bagi wisatawan internasional.
3. **BEDAS Rancage (2023)**, mencakup semangat reformasi birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pembenahan *human capital* di lingkungan pemerintahan dan di kalangan masyarakat pada mumumnya berupaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berintegritas dan kompeten menuju perwujudan *Society 5.0.*
4. **BEDAS Net 4.0 (2024)**, yakni upaya-upaya pemerintah untuk melakukan transformasi digital yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. **BEDAS Lestari (2025-2026),** merupakan konsepsi pembangunan daerah berbasis mikro DAS. Dalam hal ini, penyelenggaraan pembangunan berbasis mikro DAS menjunjung adanya plafon ekologis dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak hanya untuk mengejar nilai-nilai ekonomi semata namun juga turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) plafon ekologis yang dijunjung dalam konsepsi BEDAS Lestari, yakni Ketahanan Bencana, Daya Dukung Lingkungan dan Integrasi Spasial.

Berikut adalah ilustrasi konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal.

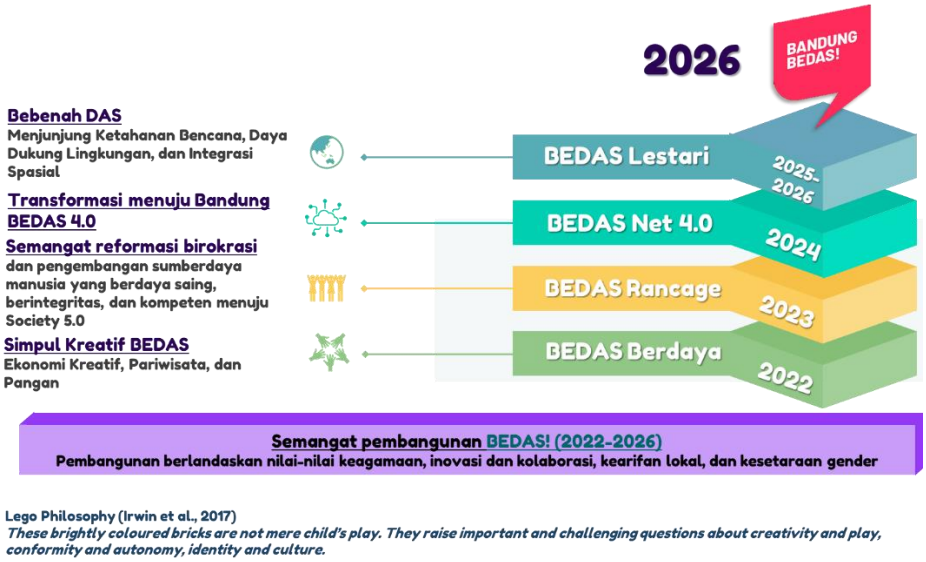

GAMBAR 4.10
KONSEP KEBIJAKAN BANDUNG BEDAS MANUNGGAL
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Pada implementasinya, konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal didukung oleh desa sebagai lokus pembangunan dan indikator-indikator kinerja yang mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala. Dengan mengacu pada indikator dalam *Sustainable Development Goals* Desa, maka setiap desa sebagai lokus intervensi kebijakan Bandung Bedas Manunggal dapat dilihat perkembangannya dan dipastikan bahwa intervensi tersebut mendukung perwujudan Bandung BEDAS.

Konsep pembangunan tematik Bandung Bedas Manunggal telah dirancang sesuai dengan tema pembangunan tahunan dan akan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan hingga tingkat program Perangkat Daerah agar mendukung tema pembangunan tahunan. Pada tahun 2022, implementasi Bandung Bedas Manunggal adalah mendorong fokus tema Semangat Pembangunan BEDAS dan BEDAS Berdaya.

Selain dari keselarasan konsep pembangunan tematik tahunan, dalam mewujudkan pembangunan yang proporsional, tepat sasaran, dan efisien, maka konsep pembangunan tematik terintegrasi Bandung Bedas Manunggal dirancang dengan berbagai tolak ukur keberhasilan untuk setiap tema. Rincian tolak ukur keberhasilan tersebut dapat ditinjau pada **Tabel 4.21**.

TABEL 4.21
RINCIAN TOLAK UKUR KEBERHASILAN BANDUNG BEDAS MANUNGGAL

Bandung Bedas Manunggal		Tolak Ukur Keberhasilan	Perangkat Daerah
SEMANGAT PEMBANGUNAN BEDAS (2022-2026)			
Semangat pembangunan BEDAS! Pembangunan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, inovasi dan kolaborasi, kearifan lokal, dan kesetaraan gender	Kearifan Lokal; Kolaborasi dan inovasi; Nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya indeks desa membangun	DPMD
		Meningkatnya paritispasi komunitas aktif di pembangunan tingkat desa	DPMD; Bakesbangpol
		Meningkatnya dana umat yang dimanfaatkan untuk pembangunan tingkat desa	Setda; DPMD
	Kesejahteraan gender	Meningkatnya proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Dinsos
		Meningkatnya proporsi posisi diduduki perempuan di pemerintahan dan legislatif	DP2KBP3A
		Meningkatnya persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	DP2KBP3A
BEDAS BERDAYA (2022)			
Simpul Kreatif BEDAS Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Pangan	Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kerjasama perdagangan antar industri/usaha	Disperin
		Meningkatnya industri kecil dan menengah yang memiliki izin usaha	Disperin
		Meningkatnya industri kecil dan menegah yang sudah ekspor	Disperin
		Meningkatnya omset UMKM	DiskopUKM
		Meningkatnya jumlah koperasi yang patuh	DiskopUKM
		Meningkatnya UMKM yang memiliki sertifikat standar produk/yang difasilitasi sertifikasi HAKI	DiskopUKM
		Meningkatnya jumlah UMKM yang naik kelas menjadi usaha kecil	DiskopUKM
		Menurunnya angka pengangguran	Disnaker
		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap	Disnaker
		Meningkatnya volume produksi pertanian/ kehutanan/perikanan	Dispangkan; Distan
		Meningkatnya nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	Distan
	Pariwisata	Meningkatnya potensi pariwisata	Disparbud
		Meningkatnya kerjasama branding pariwisata daerah yang berkualitas	Disparbud
		Meningkatnya investasi bidang pariwisata	Disparbud; DPMPTSP
		Meningkatnya kemudahan investasi bidang pariwisata	Disparbud; DPMPTSP
	Ketahanan Pangan	Meningkatnya indeks desa tahan pangan	Dispangkan

Bandung Bedas Manunggal		Tolak Ukur Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Dispangkan
		Meningkatnya indeks konsumsi pangan	Dispangkan
		Meningkatnya simpul pangan desa yang dibangun	Dispangkan; DPMD
BEDAS RANCAGE (2023)			
Semangat reformasi birokrasi dan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berintegritas, dan kompeten menuju Society 5.0	Bandung Sehat	Meningkatnya pelayanan balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan pendanganan sesuai standar	Dinkes
		Meningkatnya jumlah penduduk yang dilakukan surveilans epidemiologi dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis simpul pangan desa	Dinkes
		Meningkatnya ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinkes
		Meningkatnya ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dinkes
		Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinkes
		Meningkatnya jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita	Dinkes
		Meningkatnya persentase desa siaga aktif	Dinkes; DPMD
		Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinsos
	Merdeka Belajar	Meningkatnya Skor APK/APM SD/Paket A	Disdik
		Meningkatnya Skor APK/APM SMP/Paket B	Disdik
		Menurunnya angka putus sekolah tingkat SD	Disdik
		Menurunnya angka putus sekolah tingkat SMP	Disdik
		Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan di setiap kecamatan	Disdik
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Disdik
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya jumlah desa dengan penilaian opini WTP Desa atas Laporan Keuangan Desa	DPMD; BKAD
		Menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	DP2KBP3A

Bandung Bedas Manunggal		Tolak Ukur Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
BEDAS NET 4.0 (2024)			
Transformasi menuju Bandung BEDAS 4.0	Smart City	Meningkatnya jumlah kampung digital	DPMD
		Meningkatnya konektivitas jaringan digital	DPUTR
		Meningkatnya kualitas konten digital	Diskominfo
		Meningkatnya jumlah komunitas digital	DPMD
	Smart Government	Meningkatnya jumlah aplikasi manajemen publik yang terintegrasi	Diskominfo
		Indeks SPBE	Diskominfo
		Meningkatnya kelengkapan data center	Diskominfo
BEDAS LESTARI (2025-2026)			
Bebenah DAS Menjunjung Ketahanan Bencana, Daya Dukung Lingkungan, dan Integrasi Spasial	Integrasi Spasial	Meningkatnya jumlah mikro DAS yang berkualitas (indikator: indeks kualitas air, run off, sampah, sedimentasi, dll)	DLH
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar	DPUTR
		Meningkatnya drainase lingkungan dalam kondisi baik	DPUTR
		Meningkatnya indeks aksesbilitas jalan	DPUTR
		Meningkatnya persentase jalan mantap desa dan kabupaten	DPUTR; DPMD
		Meningkatnya persentase penerangan jalan umum yang terbangun	DPUTR
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Disperkimtan
		Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Disperkimtan
		Meningkatnya KK yang memiliki akses air bersih	Disperkimtan
		Meningkatnya KK yang memiliki akses terhadap IPAL (sanitasi)	Disperkimtan
		Meningkatnya desa melek internet	DPMD
	Daya dukung lingkungan	Meningkatnya jumlah Kampung Bedas yang berkualitas (indikator: indeks kualitas air, run off, sampah, sedimentasi, dll)	DLH
		Meningkatnya Ruang Terbuka Publik yang terbangun	DPUTR; Disperkimtan; DLH
		Meningkatnya Ruang Terbuka Publik yang terkelola	DPUTR; Disperkimtan; DLH
		Meningkatnya pengelolaan sampah domestik	DLH

Bandung Bedas Manunggal		Tolak Ukur Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Ketahanan bencana	Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana yang berkualitas (indikator: indeks kualitas air, run off, sampah, sedimentasi, dll)	DPMD; BPBD
		Menurunnya wilayah tergenang banjir	BPBD
		Meningkatnya RW siaga bencana	DPMD; BPBD

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

RKPD
2022

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Implementasi dari kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam proses perencanaan pembangunan dituangkan dalam bentuk instrumen pelaksanaan teknis berupa rencana program, kegiatan, dan subkegiatan. Sebagai salah satu instrumen kebijakan, setiap program akan membawahi satu atau lebih kegiatan, dan setiap kegiatan akan membawahi satu atau lebih subkegiatan yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat, yang akan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Alokasi sumber daya daerah berupa sumber daya manusia maupun modal yang menjadi input menghasilkan *output* sebagai hasil dari subkegiatan yang dilaksanakan, dan *outcome* dari kegiatan yang membawahi subkegiatan tersebut.

Penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarakan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang mulai berlaku dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam pemutakhiran regulasi tersebut, terdapat sebuah perbedaan yang cukup signifikan berpengaruh dalam proses perencanaan dan penganggaran, dimana berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah komposisi klasifikasi program dan kegiatan diubah menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan, dimana program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan Kabupaten Bandung Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan di tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan tujuan besar Kabupaten Bandung yakni visi dan misi dapat terwujud, serta mempertimbangkan masukan dari seluruh stakeholder yang dihimpun menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam suatu mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional. Selain sebagai upaya menghimpun program dan kegiatan pembangunan, kegiatan Musrenbang juga ditujukan sebagai upaya penyepakatan terhadap anggaran yang merupakan komponen utama dalam mendukung terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi dan masukan dari stakeholder, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 disusun sejalan dengan 20 (dua puluh) Program Pembangunan Daerah (PPD). PPD merupakan turunan dari visi dan misi Kabupaten Bandung yang menjadi program strategis kepala daerah. Adapun program-program tersebut antara lain meliputi:

1. Program peningkatan daya saing sektor perdagangan
2. Program peningkatan daya saing produk unggulan industri
3. Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern
4. Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
5. Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing
6. Program peningkatan potensi investasi daerah
7. Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
8. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat

9. Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan
10. Program peningkatan kualitas lingkungan hidup
11. Program peningkatan kualitas infrastruktur
12. Program peningkatan ketahanan bencana
13. Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa
14. Program peningkatan kualitas *e-government*
15. Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
16. Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
17. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan
18. Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja
19. Program pptimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20. Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah

Dalam mewujudkan 20 PPD kepala daerah selama lima tahun periode menjabat, pelaksanaan pembangunan juga dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan yang terdiri dari 9 (Sembilan) poin prioritas yang didapatkan dari rumusan isu strategis Kabupaten Bandung. Sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
2. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
3. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
6. Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan
7. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
8. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
9. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bandung, disamping menyusun rencana anggaran untuk program dan kegiatan, juga memformulasikan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditunjang oleh urusan pada program/kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terdapat pemetaan yang jelas antara prioritas pembangunan dan program/kegiatan Perangkat Daerah, sehingga intervensi terhadap program dan kegiatan dapat dengan mudah dilakukan sesuai dengan prioritas pembangunannya. Selain itu, dapat diketahui pula kebutuhan anggaran bagi masing-masing prioritas pembangunan untuk dapat mencapai target pembangunan yang akan dituju. Adapun rincian pagu anggaran berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

TABEL 5.1
REKAPITULASI PAGU ANGGARAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

No	Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran
1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	483.096.721.400,00
2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	58.583.446.522,00
3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.760.340.547.728,00
4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	1.445.475.359.905,00
5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	102.116.656.354,00

No	Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran
6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	89.128.992.200,00
7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	560.278.922.291,00
8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	73.473.946.640,00
9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	49.751.859.900,00
	Total	**4.622.246.452.940,00**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021

Rincian keterkaitan setiap prioritas pembangunan dengan sasaran RPJMD, indikator sasaran, straregi, arah kebijakan, program prioritas serta pagu anggaran dan perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada **Tabel 5.2.** Selain itu, seluruh belanja langsung daerah didistribusikan di 65 perangkat daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Informasi detail mengenai distribusi belanja langsung Kabupaten Bandung Tahun 2022 disajikan pada **Tabel 5.3**. Adapun rencana anggaran per program dan kegiatan prioritas setiap Perangkat Daerah akan dipaparkan secara rinci pada Lampiran RKPD.

TABEL 5.2

MATRIKS KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PRIORITAS, PAGU ANGGARAN DAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB TAHUN 2022

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	82,73	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga derajat kesehatannya terutama terkait stunting, diabetes, hipertensi, TB, HIV/AIDS dan gangguan jiwa	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan	Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	Persen	100	91.485.735.400	Dinkes, RSUD
									Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan)	Indeks	82,22		
						Peningkatan pelayanan bidang kesehatan melalui optimalisasi sarana prasarana kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan		Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Persen	55		
									Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	42,66		
			Total Fertility Rate	Kelahiran/ibu	2,42	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan reproduksi	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi		Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru	Persen	82,73		
							Menurunkan angka kelahiran murni		TFR (angka kelahiran total)	Kelahiran/ibu	2,42		
TOTAL												**91.485.735.400**	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	Persen	3,68	Penataan logistik produk pangan dan non pangan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar	Program peningkatan daya saing sektor perdagangan	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	USD	$726.705.758	5.232.302.000	Disperin
									Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	Persen	14		
									Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	Persen	3		
									Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Persen	20		
									Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	Persen	60		
									Persentase Alat UTTP sesuai standar	Persen	80		
		Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,53	Penumbuhan dan penataan sentra industri	Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri	Program peningkatan daya saing produk unggulan industri	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Persen	20	1.900.000.000	Disperin
							Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan		Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	Persen	2,3		
							Revitalisasi manajemen data		Persentase pelaporan SIINAS	Persen	20		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
							base industri, usaha mikro dan koperasi						
							Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi		Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	Persen	80		
						Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha	Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro		Persentase Kapasitas Usaha Mikro	Persen	4,25		
									Persentase Kualitas Usaha Mikro	Persen	10		
		Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	5,5	Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi	Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya	Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase Koperasi Patuh	Persen	20	8.162.950.573	Diskopukm
									Persentase Koperasi Sehat	Persen	20		
							Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan		Persentase Koperasi Berizin	Persen	55		
									Persentase SDM koperasi yang kompeten	Persen	13,2		
									Persentase pertumbuhan	Persen	0,5		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
							RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi		volume usaha koperasi				
		Berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15	Meningkatkan kualitas pengelolaan angkatan kerja	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja	Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	15	19.393.512.949	
									Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	Persen	60		
							Meningkatkan perlindungan perkerja		Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	56		
						Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0		Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	Persen	40		
TOTAL												**34.688.765.522**	
3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,3	Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik	Program peningkatan kualitas e-government	Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	100	2.742.507.560.868	Seluruh Perangkat Daerah
									Jumlah OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	Jumlah	62		
									- Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	- Persen	-95		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		n pelayanan publik							- Cakupan kepemilikan akta kematian - IKM	- Persen - Nilai	-40 -95		
									- Cakupan Kepemilikan KIA - Cakupan Kepemilikan KK - Cakupan Kepemilikan KTP-el - IKM	- Persen - Persen - Persen - Nilai	-40 -96,5 -99,5 -85,37		
			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	76	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan		- Nilai LPPD - Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	;- Nilai - Persen	;- 70,30 -100		
			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	79,42				Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi	Persen	100		
									-Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu - Persentase aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	- Persen - Persen	-100 -100		
									Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi	Indeks	100		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									pemerintahan daerah				
									- Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	- Persen	;- 100		
									- Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD	- Persen	-100		
									- Presentase muatan RKA dengan RKPD	- Persen	-100		
									Capaian nilai PPD	Nilai	87,6		
									- Persentase hasil penelitian/kajian yang didiseminasikan	- Persen	-80%		
									- Persentase peningkatan jumlah inovasi yang aktif di Perangkat Daerah	- Persen	-75%		
									- Persentase keikutsertaan penilaian penghargaan Tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah lingkup kelitbangan	- Persen	-100%		
						Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip		Persentase arsip yang terlindungi	Persen	20		
									Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	20		
									Persentase Informasi Arsip	Persen	20		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									yang Termanfaatkan				
			Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Nilai	3	Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas APIP		Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Objek	397		
									persentase cakupan penanganan pengawasan	Objek	197		
			Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	326,5	Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN	Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN		Persentase peningkatan kompetensi ASN	Persen	100		
									Rata-rata persentase manajemen layanan ASN	Persen	80		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,15	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan		- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	- Persen - Persen	-10,69 -32,81		
									Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	50		
									persentase ketersediaan data statistik yang	Persen	27		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									memenuhi Kaedah Satu Data				
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	3,04	Meningkatkan kemandirian fiskal	Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Prosentase Peningkatan pendapatan daerah	Persen	18,5	816.637.180.435	BKAD, Bapenda
			Opini BPK	Nilai	WTP	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100		
									Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100		
		Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	72	Peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam hidup bermasyarakat	Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis	Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	- Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemsyarakatan	- Persen	-60	28.443.893.500	Kesbangpol, Satpol PP
									- Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	- Persen	0		
									Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persen	100		
									Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	60		
									Prosentase peningkatan pendidikan politik	Persen	50		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat	Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan		Persentase penanganan konflik sosial	Persen	40		
									Persentase pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Persen	50		
		Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	81,14	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Persen	10	11.336.781.000	DPMD
									Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Persen	5		
									Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Persen	2		
									Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Persen	96		
TOTAL												**3.598.925.415.803**	
4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	65,78	Pemerataan pelayanan sekolah formal dan non formal	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	APK SD APK SMP APK PAUD APK KEJAR PAKET Prosentase Sekolah Berakreditasi A	- Persen - Persen - Persen - Persen	APK SD = 103, 78% APK SMP = 91.65% APK PAUD = 32,45% APK KEJAR PAKET = 49,69%	328.638.242.830	Disdik, Dispora

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
	generasi berdaya saing global									- Persen			
							Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan		Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP index pemerataan guru mapel SMP	- Indeks - Indeks - Indeks - Indeks	Index pemerataan guru kelas SD = 0,19 index pemerataan guru matpel index pemerataan guru UN SMP = 0,23 index pemerataan guru mapel SMP = 0,42SD = 0,45	
									- prsentase lembaga SD dan SMP swasta yang mempunyai ijin operasional	- Persen	-80		
									- Presentase lembaga PAUD dan PKBM yang mempunyai ijin	- Persen	-47		
						Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan pelayanan pendidikan terutama dalam	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0		Persentase peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal	Persen	100		
									Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	Persen	100		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						mendukung industri 4.0 dan isu-isu pembangunan global	Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global		Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	25		
									- Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional - Persentase organisasi pemuda yang aktif	- Orang - Persen	-80 -60		
									Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Atlet	150		
									- Rata-rata ketersediaan fasilitas membaca - Rata-rata pemanfaatan bahan bacaan - Rata-rata kebiasaan membaca masyarakat	- Poin - Poin - Poin	-45,5 -67 -55,5		
									persentase kecamatan yang terdapat naskah kuno	Persen	20		
TOTAL												**328.638.242.830**	
5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,9	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah yang berkualitas	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kebijakan terkait lingkungan hidup yang diimplementasikan	Persen	100	27.306.494.354	DLH
									Persentase Volume Sampah yang terkelola	Persen	65		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
	dan mengantisipasi risiko perubahan iklim						pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah		- Nilai Indeks Kualitas Air - Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan - Nilai Indeks Kualitas Udara	- Nilai - Nilai - Nilai	-29 -53,9 -78		
									Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki ijin PPLH (Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)	Persen	100		
									Persentase penyediaan data penegakan hukum lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	Persen	100		
									Persentase penyediaan data hasil peran serta masyarakat dalam rangka edukasi lingkungan dan pengawasan sosial di bidang PPLH berbasis kearifan lokal	Persen	100		
									Persentase desa yang mendapatkan kampung Bedas	Persen	41		
									Nilai adipura	Nilai	70		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	165	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana	Program peningkatan ketahanan bencana	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	- Persen	0	26.249.065.000	BPBD, Dinsos, Disdamkar
									- Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	- Persen	-81		
									Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	Persen	24,61		
									Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100		
TOTAL												**53.555.559.354**	
6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	1,39	Peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perkebunan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal	Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	- Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	- Persen	-2,45	27.009.812.000	Distan
									- Persentase peningkatan masing-masing kelas kelompok	- Persen	-4,86		
									Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Persen	100		
									- Jumlah Populasi Ternak	- Ekor	-7.029.529		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									- Produksi komoditi holtikultura - Produksi komoditi perkebunan - Produksi komoditi Tanaman Pangan	- Ton - Ton - Ton	-400.144 -13.147 -889.707		
									- Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan infrastruktur pertanian - Rasio luas lahan LP2B yang sudah dipetakan	- Persen - Persen	-9,5 -77		
							Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular		- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	- Persen - Persen	-73,05 -85,1		
							Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan		Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Persen	3,2		
						Peningkatan daya saing sektor perikanan melalui penciptaan	Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan		Persentase peningkatan Produksi	Persen	2,06		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						Inovasi dan penguatan kolaborasi			perikanan budidaya				
							Pengembangan kualitas hidup ikan perairan		- Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	- Persen	-100
									- Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap	- Persen	-3
							Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		- Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	- Persen	-2,06
									- Nilai Tukar Pengolahan Ikan Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	- Persen	-3
									- Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	- Persen	-3
		Menurunnya masalah pangan Daerah	Persentase Desa Rawan Pangan	Persen	8,2	Tercapainya ketahanan pangan daerah dan masyarakat melalui penciptaan inovasi dan penguatan kolaborasi simpul pangan	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal	Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah	Persentase penurunan desa rawan pangan yang tertangani	Persen	100	11.046.495.200	Dispangkan
									Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	100		
									Persentase desa rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Persen	20		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	> 80		
TOTAL												**38.056.307.200**	
7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	Indeks	65,97	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan infrastruktur daerah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	Program peningkatan kualitas infrastruktur	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	87	422.466.625.291	DPUTR, Dishub, Diskominfo, Disperkimtan
									Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikas	Persen	100		
									Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	43		
									- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten - Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik	- Poin - Persen	27,72		
									Persentase perwujudan bangunan pemerintah yang terbangun	Persen	100		
									Persentase dokumen rencana tata ruang untuk terselenggaranya	Persen	14		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan harmonis				
									Persentase Luas Kehati Vegetasi non hutan	Persen	100		
									Jumlah ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	Persen	36,65		
									Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	Persen	50		
									Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	Persen	25		
									- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet - Persentase layanan publik yang	- Persen - Persen	-10,69 -32,81		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									diselenggarakan secara online				
									persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	Persen	17		
									AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	89,24		
									AKSES AMAN TERHADAP AIR MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	80,73		
									Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung	Persen	96,36		
									persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Persen	0,23		
									persentase prioritas rumah tidak layak huni	Persen	74		
									Persentase Bidang Tanah pemda yang telah bersertipikat	Persen	27,03		
									Persentase Bidang Tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	-1,34 -1,47		
									Persentase jumlah penyelesaian sengketa tanah	Persen	60		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
TOTAL												**422.466.625.291**	
8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat berpenghasilan rendah	Persen	100	Peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada fasilitas kesehatan	Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	Persen	82	2.384.270.000	Dinkes, RSUD, DP2KBP3A
									Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya	Nilai	80,8		
									Presentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	100		
									Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	Persen	77,56		
									Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka	Persen	87,25		
						Peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan	Peningkatan pelayanan rumah sakit daerah dalam melayani masyarakat		Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Persen	55		
									Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100		
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Indeks Pengeluaran	Indeks	72,65	Penguatan daya beli masyarakat	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	Persen	36,04	31.825.015.640	Dinsos

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
							yang tepat sasaran	kelompok rentan	Porsentase PMKS yang meningkat Keberfungsiannya sosialnya	Persen	33,11		
									Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	- Persen - Persen	-2,29 -46,6		
									Porsentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelenggaraan kesos	Persen	41,89		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,11	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan melindungi hak-hak anak	Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak	Program Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	Persen	100	1.346.220.000	DP2KBP3A
									Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	Persen	100		
									Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan,	Persen	100		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
									kapasitas, penghasilan) Keluarga				
									Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100		
									Persentase data terpilah anak	Persen	100		
									Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Persen	100		
TOTAL												**35.555.505.640**	
9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Meningkatnya daya saing pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Indeks	3,26	Promosi dan branding kawasan wisata	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung	Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Persen	10	14.424.296.900	Disparbud
						Penataan daerah kawasan pariwisata berstandar global	Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan		- Jumlah Desa Wisata yang ditata - Jumlah Destinasi Baru	- Destinasi - Destinasi	-1 0		
						Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya	Pengembangan simpul inovasi dan kreatif		Prosentase Sumber Daya Manusia	Persen	10		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						sebagai lokomotif pariwisata berskala global	sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif		Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina				
									Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan i HAKI	Persen	2		
			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	Persen	10	Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda		Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Persen	10		
									Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	Persen	10		
									Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	Persen	10		
									Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persen	10		
									Terbangunnya museum sejarah Daerah	Museum	0		
		Meningkatnya investasi	Laju Pertumbuhan investasi	Persen	2,9	Penguatan daya tarik investasi Daerah	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi	Program peningkatan potensi investasi daerah	Persentase peluang investasi yang dipromosikan	Persen	100	4.449.999.000	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran RPJMD	Rumusan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
							Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi		Jumlah peluang investasi unggulan dan kemitraan pelaku usaha	Jumlah	1		
									Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha	Persen	12		
							Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal		Tersedianya sistem informasi layanan perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah	1		
									Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	Persen	0,44		
TOTAL												**18.874.295.900**	
GRAND TOTAL												**4.622.246.452.940**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 5.3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Urusan Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Urusan Program	Total Pagu Indikatif
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	24.528.567.000,00	5.310.720.000,00	29.839.287.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.142.692.000,00	11.477.843.500,00	17.620.535.500,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.997.361.000,00	803.192.944.435,00	825.190.305.435,00
4	Badan Pendapatan Daerah	44.218.858.000,00	13.444.236.000,00	57.663.094.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.078.093.000,00	5.957.241.000,00	16.035.334.000,00
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.792.145.000,00	6.103.684.000,00	19.895.829.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.142.547.000,00	2.853.557.000,00	16.996.104.000,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	21.660.941.000,00	51.876.611.712,00	73.537.552.712,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.339.523.000,00	3.403.747.000,00	33.743.270.000,00
10	Dinas Kesehatan	309.643.255.000,00	78.319.581.400,00	387.962.836.400,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.045.381.000,00	5.984.647.000,00	23.030.028.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.047.725.000,00	8.162.950.573,00	17.210.675.573,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	41.778.724.000,00	27.306.494.354,00	69.085.218.354,00
14	Dinas Pangan dan Perikanan	11.787.455.000,00	11.046.495.200,00	22.833.950.200,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.994.949.000,00	14.424.296.900,00	28.419.245.900,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.289.145.000,00	282.346.519.146,00	364.635.664.146,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.513.016.000,00	11.336.781.000,00	20.849.797.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.882.615.000,00	4.449.999.000,00	21.332.614.000,00
19	Dinas Pendidikan	1.095.176.176.075,00	276.761.631.118,00	1.371.937.807.193,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.506.660.000,00	3.730.490.000,00	29.237.150.000,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35.322.929.000,00	7.132.302.000,00	42.455.231.000,00
22	Dinas Perhubungan	35.095.641.000,00	4.931.053.000,00	40.026.694.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.156.340.000,00	1.056.446.000,00	12.212.786.000,00
24	Dinas Pertanian	39.285.230.000,00	27.009.812.000,00	66.295.042.000,00
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	20.753.900.000,00	131.306.129.145,00	152.060.029.145,00
26	Dinas Sosial	12.003.917.000,00	23.116.818.640,00	35.120.735.640,00
27	Dinas Tenaga Kerja	14.846.956.000,00	19.393.512.949,00	34.240.468.949,00
28	Inspektorat	17.152.720.000,00	2.443.550.000,00	19.596.270.000,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka	69.330.312.000,00	3.367.500.000,00	72.697.812.000,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Urusan Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Urusan Program	Total Pagu Indikatif
30	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya	146.908.095.000,00	3.632.834.000,00	150.540.929.000,00
31	Rumah Sakit Umum Daerah Soreang	184.488.640.000,00	6.165.820.000,00	190.654.460.000,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	23.113.475.000,00	16.966.050.000,00	40.079.525.000,00
33	Sekretariat Daerah	53.159.131.793,00	22.137.960.000,00	75.297.091.793,00
34	Sekretariat DPRD	59.897.180.000,00	13.099.061.000,00	72.996.241.000,00
35	Kecamatan Arjasari	4.149.043.000,00	249.999.000,00	4.399.042.000,00
36	Kecamatan Baleendah	12.527.268.000,00	6.703.400.000,00	19.230.668.000,00
37	Kecamatan Banjaran	4.218.546.000,00	176.000.000,00	4.394.546.000,00
38	Kecamatan Bojongsoang	4.357.464.000,00	256.300.000,00	4.613.764.000,00
39	Kecamatan Cangkuang	4.252.350.000,00	249.997.000,00	4.502.347.000,00
40	Kecamatan Cicalengka	4.618.762.000,00	249.999.000,00	4.868.761.000,00
41	Kecamatan Cikancung	4.443.574.000,00	217.000.000,00	4.660.574.000,00
42	Kecamatan Cilengkrang	4.247.189.000,00	233.113.000,00	4.480.302.000,00
43	Kecamatan Cileunyi	4.708.834.000,00	247.910.000,00	4.956.744.000,00
44	Kecamatan Cimaung	4.707.603.000,00	136.000.000,00	4.843.603.000,00
45	Kecamatan Cimenyan	7.906.036.000,00	2.655.099.000,00	10.561.135.000,00
46	Kecamatan Ciparay	4.218.128.200,00	166.316.800,00	4.384.445.000,00
47	Kecamatan Ciwidey	5.050.904.500,00	365.117.500,00	5.416.022.000,00
48	Kecamatan Dayeuhkolot	5.818.918.000,00	1.179.220.000,00	6.998.138.000,00
49	Kecamatan Ibun	4.311.860.000,00	250.000.000,00	4.561.860.000,00
50	Kecamatan Katapang	4.127.381.000,00	280.000.000,00	4.407.381.000,00
51	Kecamatan Kertasari	4.045.948.000,00	180.000.000,00	4.225.948.000,00
52	Kecamatan Kutawaringin	4.370.711.000,00	140.000.000,00	4.510.711.000,00
53	Kecamatan Majalaya	4.190.149.000,00	222.499.000,00	4.412.648.000,00
54	Kecamatan Margaasih	4.385.648.000,00	230.000.000,00	4.615.648.000,00
55	Kecamatan Margahayu	5.971.396.000,00	1.057.200.000,00	7.028.596.000,00
56	Kecamatan Nagreg	4.687.643.000,00	164.000.000,00	4.851.643.000,00
57	Kecamatan Pacet	4.361.384.000,00	185.000.000,00	4.546.384.000,00
58	Kecamatan Pameungpeuk	4.246.795.000,00	239.094.000,00	4.485.889.000,00
59	Kecamatan Pangalengan	4.322.629.000,00	172.147.000,00	4.494.776.000,00
60	Kecamatan Paseh	4.683.569.000,00	203.000.000,00	4.886.569.000,00
61	Kecamatan Pasirjambu	4.545.310.000,00	159.664.000,00	4.704.974.000,00
62	Kecamatan Rancabali	3.870.645.000,00	250.000.000,00	4.120.645.000,00
63	Kecamatan Rancaekek	6.112.632.000,00	1.305.785.000,00	7.418.417.000,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Urusan Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Urusan Program	Total Pagu Indikatif
64	Kecamatan Solokanjeruk	4.507.334.000,00	210.000.000,00	4.717.334.000,00
65	Kecamatan Soreang	4.433.325.000,00	184.000.000,00	4.617.325.000,00
	TOTAL	**2.694.479.273.568,00**	**1.927.767.179.372,00**	**4.622.246.452.940,00**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

RKPD
2022

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upayanya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah telah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja tersebut akan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, sehingga selain akan memperjelas target pembangunan, juga dapat berperan sebagai pemegang fungsi kontrol evaluasi terhadap progres pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Adapun pembahasan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dijelaskan melalui penjabaran 1) indikator makro; 2) indikator pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah; 3) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan 4) indikator kinerja Program Pembangunan Daerah (PPD). Penetapan target indikator makro, IKU daerah dan IKK mempertimbangkan kondisi Kabupaten Bandung saat ini dengan adanya Covid-19, evaluasi penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, dan arahan dari Provinsi dan Nasional. Meski demikian, perlu diketahui bahwa pada waktu dirumuskannya RKPD ini Pemerintah Kabupaten Bandung belum menetapkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 maupun Renstra PD Tahun 2021-2026. Dengan demikian, pada saat ini RKPD 2022 belum dapat mengakomodasi IKK tingkat *impact* dan indikator tersebut baru dapat ditetapkan pada saat RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disahkan.

Rincian indikator makro dan IKD Kabupaten Bandung tahun 2022 dapat dilihat masing-masing pada **Tabel 6.1** dan **Tabel 6.2** berikut.

TABEL 6.1
INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No	Indikator	Satuan	Proyeksi 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75
2	PDRB ADHB	Juta rupiah	136.561.077,2
3	PDRB ADHK	Juta rupiah	83.856.515,35
4	PDRB ADHB Per Kapita	Rupiah	36.414.618,38
5	PDRB ADHK Per Kapita	Rupiah	22.360.712,64
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	2,9
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,43
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,48
9	Indeks Pendidikan	Indeks	65,78
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,84
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73
12	Indeks Kesehatan	Indeks	82,73
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77
14	Indeks Pengeluaran	Indeks	72,65
15	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	10.800,00
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,32
17	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	233.636
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15
19	Gini Ratio	Nilai	0,4
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,4

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 6.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Proyeksi		Sumber Data
			2020	2021	2022	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,87	3,56	4,75	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,39	72,33	73,48	BPS
3	Indeks Perkembangan Wilayah	Poin	N/A	52,65	54,59	Bappeda
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,33	65,8	67,28	Kemenpan RB
5	Angka Kriminalitas	Angka	49,86	46	44,5	Satpol PP
6	Indeks Gini	Poin	0,414	0,415	0,4	BPS
7	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	79,08	80,1	81,11	Kementerian Pertanian
8	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	Persen	3,35	3,23	3,68	BPS
9	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-3,27	2,52	3,09	BPS
10	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	5	5	5,5	Diskop UKM
11	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	0,19	0,59	1,39	BPS
12	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	-3,21	1,66	3,26	BPS
13	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	Persen	NA	5	10	Disparbud
14	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen	NA	2,9 *	2,9	DPMPTSP
15	Indeks Pendidikan	Poin	65,12	65,12	65,78	BPS
16	Indeks Kesehatan	Poin	82,35	82,41	82,73	BPS
17	Total Fertility Rate	Kelahiran/Ibu	2,43	2,43	2,42	DP2KBP3A
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat berpenghasilan rendah	Persen	100%	100%	100%	Dinkes
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54,12	53,29	53,9	DLH
20	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	50,84	64,66	65,97	Bappeda
21	Indeks Risiko Bencana	Poin	174	170	165	BNPB
22	Indeks Desa Membangun	Poin	75,24	78,19	81,14	Kementerian Desa

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Proyeksi		Sumber Data
			2020	2021	2022	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,78	82,73	83,3	Setda
24	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	71,44	73	76	Kemenpan RB
25	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	78,02	78,72	79,42	Bappeda
26	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Nilai	3	3	3	BPKP-RI
27	Indeks Penerapan Sistem Merit	Poin	N/A	304,5	326,5	KASN
28	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,82	2,98	3,15	Kemenpan RB
29	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	2,641	2,84	3,04	Kemenkeu
30	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	BPK
31	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	70	72	Satpol PP
32	Indeks Pengeluaran	Poin	70,74	71,14	72,65	BPS
33	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,58	5,45	8,15	BPS
34	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,59	93,85	94,11	BPS
35	Persentase Desa Rawan Pangan	Persen	8,9	8,2	8,2	Dispakan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, atau IKK, dapat terbagi menjadi dua, yakni IKK tingkat dampak atau *impact* dan IKK tingkat hasil atau *outcome.* IKK pada tingkat dampak menggambarkan indikator kinerja untuk setiap aspek, sedangkan IKK tingkat hasil menggambarkan indikator kinerja untuk setiap urusan. Pada RKPD 2022, baru dapat dilakukan penetapan atas IKK tingkat hasil untuk setiap urusan, sedangkan IKK tingkat dampaknya ditetapkan bersamaan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Rincian IKK tangkat hasil dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menetapkan program pembangunan daerah yang direncanakan pada tahun 2022 dan target implementasi terkait yang mendukung pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah. Selengkapnya, indikator kinerja program pembangunan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 6.4**.

TABEL 6.3

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1		**PENDIDIKAN**			
	1	- Nilai AKIP - Nilai IKM	- Poin - Persen	-78 - 90	Disdik
	2	- APK SD - APK SMP - APK PAUD - APK KEJAR PAKET - Persentase sekolah berakreditasi A	- Poin - Poin - Poin - Poin - Persen	- 103, 78 - 91.65 - 32,45 - 49,69	Disdik
	3	Persentase peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal	Persen	100	Disdik
	4	- Indeks pemerataan guru kelas - Indeks pemerataan guru matpel SD - Indeks pemerataan guru UN SMP - Indeks pemerataan guru mapel SMP	- Indeks - Indeks - Indeks - Indeks	- 0,19 - 0,45 - 0,23 - 0,42	Disdik
	5	Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	Persen	100	Disdik
2		**KESEHATAN**			
	1	Nilai AKIP Dinkes	Nilai	77,50	Dinkes
	2	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	Persen	100	Dinkes
	3	Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	Persen	80,00	Dinkes
	4	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	Persen	82	Dinkes
	5	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Persen	55	Dinkes
	6	- Nilai AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	- Nilai - Persen	- 70,5 - 77,56	RSUD Soreang
	7	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Persen	78	RSUD Soreang
	8	Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	77	RSUD Soreang
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan)	Persen	82,22	RSUD Soreang
	10	Nilai AKIP PD (RSUD Majalaya)	Nilai	78,69	RSUD Majalaya
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Persen	80,80	RSUD Majalaya
	12	Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	100	RSUD Majalaya
	13	1. Nilai AKIP (RSUD Cicalengka) 2. Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target	Nilai	- 70,5 - 90	RSUD Cicalengka
	14	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka	Indeks	87,25	RSUD Cicalengka

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	15	Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	42,66	RSUD Cicalengka
3		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
	1	Akses Aman Terhadap Air Bersih Di Kawasan Perdesaan	Persen	90,73	Disperkimtan
	2	Akses Aman Terhadap Sanitasi Di Kawasan Permukiman	Persen	89,24	Disperkimtan
	3	- Nilai SKIP PD - Persentase aset dlm kondisi baik Nilai SKIP PD	- Persen - Persen	- 80 - 100	DPUTR
	4	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten 2. Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik	- Persen - Persen	27,72	DPUTR
	5	Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	43,00	DPUTR
	6	Persentase perwujudan bangunan pemerintah yang terbangun	Persen	100,00	DPUTR
	7	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	87,00	DPUTR
	8	Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikasi	Persen	100,00	DPUTR
	9	Persentase dokumen rencana tata ruang untuk terselenggaranya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan harmonis	Persen	19,00	DPUTR
4		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	A (81,24)	Disperkimtan
	2	Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung	Persen	96.36	Disperkimtan
	3	persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Persen	0,23	Disperkimtan
	4	persentase prioritas rumah tidak layak huni	Persen	74,00	Disperkimtan
	5	persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	Persen	17,00	Disperkimtan
5		**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	70	BPBD
	2	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100	BPBD
	3	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- Nilai - Nilai	- 80 - 82	Disdamkar
	4	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) - Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	- 0 - 81	Disdamkar
	5	1. Nilai SAKIP 2. Nilai IKM 3. Presentase Asset dalam Keadaan Baik	- Poin - Persen - Persen	-78,50 -77,82 - 100	Satpol
	6	Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persen	100	Satpol
6		**SOSIAL**			

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	100	Dinsos
	2	Porsentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelenggaraan kesos	Persen	42	Dinsos
	3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persen	- 2,29 - 46,6	Dinsos
	4	Porsentase PMKS yang meningkat Keberfungsiannya sosialnya	Porsen	33,11	Dinsos
	5	Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi	Persen	36,4	Dinsos
	6	Persentase () KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	Persen	24,61	Dinsos
	7	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Representatif	Persen	100	Dinsos
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1		**TENAGA KERJA**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	- 69 - 90	Disnaker
	2	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	Persen	60	Disnaker
	3	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	Persen	40	Disnaker
	4	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	15	Disnaker
	5	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	56	Disnaker
2		**PEMBERDAYAAN PEREMUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
	1	Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	Persen	100	DP2KBP3A
	2	Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	Presen	100	DP2KBP3A
	3	Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	Presen	100	DP2KBP3A
	4	Persentase data terpilah anak	Persen	100	DP2KBP3A
	5	Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Presen	100	DP2KBP3A
	6	Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presen	100	DP2KBP3A
3		**PANGAN**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	- 86 - 80,76	Dispangkan
	2	Persentase desa rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Persen	20	Dispangkan
	3	Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	1	Dispangkan
	4	Persentase penurunan desa rawan pangan yang tertangani	Persen	100	Dispangkan
	5	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	>80	Dispangkan

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
4		**PERTANAHAN**			
	1	Persentase jumlah penyelesaian sengketa tanah	Persen	60,00	Disperkimtan
	2	Persentase Bidang Tanah pemda yang telah bersertipikat	Persen	27,03	Disperkimtan
	3	Persentase Bidang Tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	-1,34 - 1,47	Disperkimtan
5		**LINGKUNGAN HIDUP**			
	1	Nilai SAKIP	Nilai	77,5	DLH
	2	Persentase kebijakan terkait lingkungan hidup yang diimplementasikan	Persen	100	DLH
	3	- Nilai Indeks Kualitas Air - Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan - Nilai Indeks Kualitas Udara	- Poin - Poin - Poin	- 29 - 53,90 - 78	DLH
	4	Persentase Luas Kehati Vegetasi non hutan	Persen	100	DLH
	5	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki ijin PPLH (Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)	Persen	100	DLH
	6	Persentase penyediaan data hasil peran serta masyarakat dalam rangka edukasi lingkungan dan pengawasan sosial di bidang PPLH berbasis kearifan lokal	Persen	100	DLH
	7	Persentase desa yang mendapatkan kampung Bedas	Persen	41	DLH
	8	Nilai adipura	Nilai	70	DLH
	9	Persentase penyediaan data penegakan hukum lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	Persen	100	DLH
	10	Persentase Volume Sampah yang terkelola	Persen	65	DLH
6		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
	1	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil 2. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	- Nilai - Persen	-74,30 - 91,2	Disdukcapil
	2	- Cakupan kepemilikan KTP-el - Cakupan kepemilikan KK - Cakupan Kepemilikan KIA - IKM	- Persen - Persen - Persen - Indeks	-99,5 -96,5 -40 -85,37	Disdukcapil
	3	- Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun - Cakupan kepemilikan akta kematian - IKM	- Persen - Persen - Indeks	-95 -40 -95	Disdukcapil
	4	Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	100	Disdukcapil
	5	Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan	Jumlah	62	Disdukcapil
7		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
	1	Nilai SAKIP	Nilai	74	DPMD
	2	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Persen	2	DPMD

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	3	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Persen	5	DPMD
	4	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Persen	10	DPMD
	5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Persen	96	DPMD
8		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
	1	- Nilai SAKIP - Presentase Aset Dalam kondisi Baik	Nilai	100	DP2KBP3A
	2	TFR (angka kelahiran total)	Angka	2,42	DP2KBP3A
	3	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru	Persen	82,73	DP2KBP3A
	4	Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Presen	100	DP2KBP3A
9		**PERHUBUNGAN**			
	1	- Nilai AKIP - Nilai IKM - Rata-rata nilai AKIP dan IKM	Nilai	75,50	Dishub
	2	Jumlah ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	Persen	36,65	Dishub
	3	Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	Persen	50,00	Dishub
	4	Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	Persen	25,00	Dishub
	5	Persentase PJU yang terbangun pada tahun rencana	Persen	100	DPUTR
10		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
	1	Nilai SAKIP	Nilai	72	Diskominfo
	2	Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah	Persen	100	Diskominfo
	3	- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	- Persen - Persen	- 10,69 - 32,81	Diskominfo
11		**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
	1	- Nilai AKIP - Nilai IKM	- Nilai - Nilai	- 74,82 - 81,77	Diskopukm
	2	Persentase Koperasi Berizin	Persen	55,0	Diskopukm
	3	Persentase Koperasi Patuh	Persen	20	Diskopukm
	4	Persentase Koperasi Sehat	Persen	20	Diskopukm
	5	Persentase SDM koperasi yang kompeten	Persen	13,2	Diskopukm
	6	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	0,5	Diskopukm
	7	Persentase Kapasitas Usaha Mikro	Persen	4,25	Diskopukm
	8	- Persentase Kualitas Usaha Mikro	Persen	10,0	Diskopukm

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
12		**PENANAMAN MODAL**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	- 80 - 84,50	DPMPTSP
	2	Jumlah peluang investasi unggulan dan kemitraan pelaku usaha	Jumlah	1	DPMPTSP
	3	Persentase peluang investasi yang dipromosikan	Persen	100	DPMPTSP
	4	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	Persen	0,44	DPMPTSP
	5	'Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha	P	12	DPMPTSP
	6	Tersedianya sistem informasi layanan perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah	1	DPMPTSP
13		**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
	1	- Nilai IKM - Nilai SAKIP	- Nilai - Nilai	- 75 - 70	Dispora
	2	- Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional - Persentase organisasi pemuda yang aktif	- Jumlah - Persen	- 80 - 60	Dispora
	3	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah	150	Dispora
	4	Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah	25	Dispora
14		**STATISTIK**			
	1	persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data	Persen	27,00	Diskominfo
15		**PERSANDIAN**			
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	50,00	Diskominfo
	2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pola hubungan Komunikasi sandi			Diskominfo
16		**KEBUDAYAAN**			
	1	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Persen	10	Disparbud
	2	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	Persen	10	Disparbud
	3	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	Persen	10	Disparbud
	4	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persen	10	Disparbud
	5	Terbangunnya museum sejarah Daerah	Persen	0	Disparbud
17		**PERPUSTAKAAN**			
	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,75	Disarpus
	2	Rata-rata ketersediaan fasilitas membaca (X1)	Nilai	45,50	Disarpus
	3	Rata-rata Pemanfaatkan bahan bacaan (X2)	Nilai	67,00	Disarpus
	4	Rata-rata Kebiasaan membaca masyarakat (X3)	Nilai	55,50	Disarpus
	5	persentase kecamatan yang terdapat naskah kuno	Persen	20,00	Disarpus
18		**KEARSIPAN**			

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	1	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	20	Disarpus
	2	Persentase arsip yang terlindungi	Persen	20	Disarpus
	3	Persentase Informasi Arsip yang Termanfaatkan	Persen	20	Disarpus
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			
1		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	1	1. Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya 2. Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap	- Persen - Persen	- 100 - 3	Dispangkan
	2	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	Persen	2,06	Dispangkan
	3	1. Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya 2. Nilai Tukar Pengolahan Ikan Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan 3. Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	- Persen - Persen - Persen	- 2,06 - 3 - 3	Dispangkan
2		**PARIWISATA**			
	1	Nilai AKIP DISPARBUD	Nilai	74	Disparbud
	2	1. Jumlah Desa Wisata yang ditata 2. Jumlah Destinasi Baru	- Jumlah - Jumlah	- 1 Desa - 0 Destinasi	Disparbud
	3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Persen	10	Disparbud
	4	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan i HAKI	Persen	2	Disparbud
	5	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	Persen	10	Disparbud
3		**PERTANIAN**			
	1	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	- Persen - Nilai	- 86,84 - 82	Distan
	2	- Jumlah Populasi Ternak - Produksi komoditi holtikultura - Produksi komoditi perkebunan - Produksi komoditi Tanaman Pangan	- Ekor - Ton - Ton - Ton	- 7.029.529 - 400.144 - 13.147 - 889.707	Distan
	3	- Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan infrastruktur pertanian - Rasio luas lahan LP2B yang sudah dipetakan	- Persen - Persen	- 9,5 - 77	Distan
	4	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	- Persen - Persen	- 73,05 - 85,1	Distan
	5	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Persen	3,20	Distan
	6	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Persen	100	Distan
	7	- Persentase peningkatan kelas kelompok Tani - Persentase peningkatan masing-masing kelas kelompok	- Persen - Persen	- 2,45 - 4,86	Distan
4		**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			
	1	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	Persen	80	Disperin

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
5		**PERDAGANGAN**			
	1	Nilai AKIP	Nilai	**79 Point**	Disperin
	2	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	Persen	60	Disperin
	3	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Persen	20	Disperin
	4	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	Persen	3	Disperin
	5	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	$	**$ 726.705.758**	Disperin
	6	Persentase Alat UTTP sesuai standar	Persen	80	Disperin
	7	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	Persen	14	Disperin
6		**PERINDUSTRIAN**			
	1	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Persen	20	Disperin
	2	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	Persen	2,5	Disperin
	3	Persentase pelaporan SIINAS	Persen	20	Disperin
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
1		**SEKRETARIAT DAERAH**			
	1	- Nilai SAKIP - Persentase Aset dalam kondisi baik	- Nilai - Persen	- 70,30 - 100	Setda
	2	- Nilai LPPD- Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Nilai	-4,03	Setda
	3	- Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi	Persen	100,00	Setda
2		**SEKRETARIAT DPRD**			**0,00**
	1	- Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik	- Nilai - Persen	- 70 - 80	Setwan
	2	-Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu - Persentase aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	- Persen - Persen	- 100 - 100	Setwan
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			
1		**PERENCANAAN**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	- 81,5 - 81,5	Bappeda
	2	Capaian nilai PPD	Persen	87,60	Bappeda
	3	- Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD	Presen	-100 - 100 - 100	Bappeda
2		**KEUANGAN**			
	1	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Operasional Perkantoran)	Persen	100	Bapenda
	2	Prosentase Peningkatan pendapatan daerah	Persen	18,50	Bapenda

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	3	- Nilai Akuntaibilitas Kinerja BKAD - Persentase aset yang terkelola dengan baik	- Persen - Persen	-77 - 93	BKAD
	4	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	BKAD
	5	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	BKAD
3		**KEPEGAWAIAN**			
	1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76,5	BKPSDM
	2	Rata-rata persentase manajemen layanan ASN	Persen	80	BKPSDM
4		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
	1	Persentase peningkatan kompetensi ASN	Persen	100	BKPSDM
5		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
	1	- Persentase hasil penelitian/kajian yang didiseminasikan - Persentase peningkatan jumlah inovasi yang aktif di Perangkat Daerah - Persentase keikutsertaan penilaian penghargaan Tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah lingkup kelitbangan	Persen	- 80 - 75 - 100	Bappeda
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			
1		**INSPEKTORAT DAERAH**			
	1	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- Nilai - Persen	- 81,70 - 76	Inspektorat
	2	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Objek	397	Inspektorat
	3	persentase cakupan penanganan pengawasan	Objek	197	Inspektorat
7		**KEWILAYAHAN**			
1		**KECAMATAN**			
	1	Prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Nilai	85	Kec. Arjasari
	2	Prosentase Nilai IKM	Indeks	86	Kec. Arjasari
	3	Prosentase program pemberdayaan masyarakat Desa dan Keluerahan	Persen	100	Kec. Arjasari
	4	Prosentase program ketertiban umum	Persen	100	Kec. Arjasari
	5	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Arjasari
	6	prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persen	100	Kec. Arjasari
	7	Nilai AKIP	Nilai	72	Kec. Baleendah
	8	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Baleendah
	9	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Baleendah
	10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Baleendah
	11	1. Nilai AKIP 2. Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan PD	- Nilai - Persentase	- 66 - 100	Kec. Banjaran

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	Kec. Banjaran
	13	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	Kec. Banjaran
	14	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Banjaran
	15	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Banjaran
	16	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Banjaran
	17	Nilai SAKIP	Nilai	- 65 - 100	Kec. Bojongsoang
	18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	Kec. Bojongsoang
	19	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	0	Kec. Bojongsoang
	20	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kec. Bojongsoang
	21	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	0	Kec. Bojongsoang
	22	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	63,00	Kec. Bojongsoang
	23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	63	Kec. Cangkuang
	24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	Kec. Cangkuang
	25	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	Kec. Cangkuang
	26	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Cangkuang
	27	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Cangkuang
	28	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Cangkuang
	29	1. Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Persentase capaian Laporan keuangan 3. Prosentase sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Prosentase administrasi umum perangkat daerah 5. Prosentase Pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah 6. Prosentase program penataan administrasi perkantoran 7. Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	Kec. Cicalengka
	30	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Indeks	100,00	Kec. Cicalengka
	31	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	Kec. Cicalengka
	32	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Persen	100	Kec. Cicalengka
	33	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	Kec. Cicalengka
	34	1. Nilai SAKIP 2. Persentase aset dlm kondisi baik	- Nilai - Persen	- 70,5 - 80	Kec. Cikancung
	35	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	Kec. Cikancung

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	36	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan Trantibum	Persen	100	Kec. Cikancung
	37	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80,00	Kec. Cikancung
	38	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Cikancung
	39	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Cikancung
	40	Capaian Nilai SAKIP	Nilai	- 69.00 - 100	Kec. Cilengkrang
	41	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	- Nilai - Persen	- 80 - 100	Kec. Cilengkrang
	42	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Cilengkrang
	43	persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Cilengkrang
	44	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00	Kec. Cilengkrang
	45	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00	Kec. Cilengkrang
	46	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	- 86 - 71	Kec. Cileunyi
	47	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	Kec. Cileunyi
	48	- Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Cileunyi
	49	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan Kententraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	Kec. Cileunyi
	50	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintah umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Cileunyi
	51	Persentase Desa yang dibina dan diawas	Persen	100	Kec. Cileunyi
	52	Nilai SAKIP	Nilai	69	Kec. Cimaung
	53	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Kec. Cimaung
	54	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Cimaung
	55	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Cimaung
	56	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Cimaung
	57	- Nilai SAKIP - IKM - Persentase Aset dalam kondisi baik	- Nilai - Nilai - Persen	- 70 - 80 - 90	Kec. Cimenyan
	58	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	Kec. Cimenyan
	59	IKM	Persen	80	Kec. Cimenyan
	60	IKM	Persen	80	Kec. Cimenyan
	61	IKM	Persen	80	Kec. Cimenyan
	62	IKM	Persen	80	Kec. Cimenyan
	63	Nilai AKIP PD	Nilai	67,42	Kec. Ciparay
	64	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,00	Kec. Ciparay

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	65	- Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - Persentase capaian keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa	- Persen - Persen	- 100 - 100	Kec. Ciparay
	66	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Ciparay
	67	- Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Persentase desa yang dibina dan diawasi	- Persen - Persen	- 100 - 100	Kec. Ciparay
	68	- Nilai AKIP - Nilai IKM penunjang sarpras	NILAI	- 74 - 70	Kec. Ciwidey
	69	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	Kec. Ciwidey
	70	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persen	95	Kec. Ciwidey
	71	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	Kec. Ciwidey
	72	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	90	Kec. Ciwidey
	73	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Ciwidey
	74	Nilai AKIP	Nilai	100	Kec. Dayeuhkolot
	75	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	Kec. Dayeuhkolot
	76	IKM	Persen	100	Kec. Dayeuhkolot
	77	IKM	Persen	100	Kec. Dayeuhkolot
	78	IKM	Persen	100	Kec. Dayeuhkolot
	79	IKM	Persen	100	Kec. Dayeuhkolot
	80	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan - Indeks Kepuasan Masyarakat	- Kegiatan - Kegiatan	- 1 - 3	Kec. Ibun
	81	- Jumlah kegiatan rakor - Jumlah peserta yang hadir dalam penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	- Kegiatan - Kegiatan	- 1 - 1	Kec. Ibun
	82	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kec. Ibun
	83	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kegiatan	2,00	Kec. Ibun
	84	Jumlah fasilitasi administrasi Desa	Jenis	3,00	Kec. Ibun
	85	Nilai AKIP	Nilai	72	Kec. Katapang
	86	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	Kec. Katapang
	87	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Katapang
	88	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangungan Tingkat Kecamatan	Persen	100	Kec. Katapang
	89	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Katapang
	90	- Nilai SAKIP - BMD dalam kondisi baik	- Nilai - Nilai	- 71 - 98	Kec. Kertasari
	91	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	Kec. Kertasari
	92	IKM	Indeks	84	Kec. Kertasari

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	93	IKM	Indeks	84	Kec. Kertasari
	94	IKM	Indeks	84	Kec. Kertasari
	95	- Nilai AKIP - Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan PD	- Nilai - Persen	- 66 - 100	Kec. Kutawaringin
	96	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	Kec. Kutawaringin
	97	Persentase program dan kegiatan yang teakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	Persen	100	Kec. Kutawaringin
	98	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Kutawaringin
	99	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	Kec. Kutawaringin
	100	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Kutawaringin
	101	Nilai AKIP	Nilai	70	Kec. Majalaya
	102	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	Kec. Majalaya
	103	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Majalaya
	104	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Majalaya
	105	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Majalaya
	106	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Majalaya
	107	- Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah - Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persen	100,00	Kec. Margaasih
	108	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	6,00	Kec. Margaasih
	109	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1,00	Kec. Margaasih
	110	Jumlah Aparat Keamanan (Linmas) yang mengikuti Sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Republik Indonesia	Kegiatan	1,00	Kec. Margaasih
	111	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kegiatan	1,00	Kec. Margaasih
	112	Persentase fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	Kec. Margaasih
	113	Prosentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	100	Kec. Margahayu
	114	Persentase program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persen	100	Kec. Margahayu
	115	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Margahayu
	116	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Margahayu
	117	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	Kec. Margahayu
	118	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Margahayu
	119	Nilai SAKIP	Nilai	72	Kec. Nagreg

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	120	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	Kec. Nagreg
	121	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	Kec. Nagreg
	122	Persentase capaian pelaksanaan program urusan pemerintahan	Persen	100	Kec. Nagreg
	123	Persentase capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	Kec. Nagreg
	124	- Nilai SAKIP - Persentase Aset dalam kondisi baik	Nilai	0	Kec. Pacet
	125	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	Kec. Pacet
	126	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kec. Pacet
	127	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	0	Kec. Pacet
	128	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	0	Kec. Pacet
	129	Nilai AKIP	Nilai	66,5	Kec. Pameungpeuk
	130	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	Kec. Pameungpeuk
	131	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	Kec. Pameungpeuk
	132	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100	Kec. Pameungpeuk
	133	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100	Kec. Pameungpeuk
	134	Nilai AKIP	Nilai	63,00	Kec. Pangalengan
	135	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	Kec. Pangalengan
	136	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Pangalengan
	137	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Pangalengan
	138	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Pangalengan
	139	Nilai SAKIP	Nilai	67,50	Kec. Paseh
	140	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,20	Kec. Paseh
	141	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Paseh
	142	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Paseh
	143	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Paseh
	144	- Nilai SAKIP - Nilai IKM - Persentase Aset dlm kondisi Baik	Nilai	0	Kec. Pasirjambu
	145	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	Kec. Pasirjambu
	146	- Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Pasirjambu
	147	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	Kec. Pasirjambu
	148	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	0	Kec. Pasirjambu
	149	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	0	Kec. Pasirjambu
	150	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	- 60 - 0	Kec. Rancabali

No.		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	151	NILAI Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	74	Kec. Rancabali
	152	Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	Kec. Rancabali
	153	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Rancabali
	154	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Rancabali
	155	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Rancabali
	156	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Nilai	-68 -80	Kec. Rancaekek
	157	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	Kec. Rancaekek
	158	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Kec. Rancaekek
	159	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	Kec. Rancaekek
	160	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	Kec. Rancaekek
	161	Nilai AKIP PD	Nilai	67,75	Kec. Solokanjeruk
	162	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	Kec. Solokanjeruk
	163	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persen	86,00	Kec. Solokanjeruk
	164	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	86,00	Kec. Solokanjeruk
	165	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	86,00	Kec. Solokanjeruk
	166	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	86,00	Kec. Solokanjeruk
	167	1. Nilai akutabilitas kinerja pemerintah (AKIP) PD 2. Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai	- Nilai - Bulan	- 77 - 14	Kec. Soreang
	168	Nilai IKM	Nilai	82,00	Kec. Soreang
	169	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	Kec. Soreang
	170	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	Kec. Soreang
	171	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	Kec. Soreang
	172	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	Kec. Soreang
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			
1		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
	1	Nilai sakip	Nilai	70	Kesbangpol
	1	Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	60	Kesbangpol
	1	Prosentase peningkatan pendidikan politik	Persen	60	Kesbangpol
	1	- Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemsyarakatan - Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	- Persen - Persen	- 60 - 0	Kesbangpol
	1	Prosentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan ketahanan sosial dan budaya	Persen	50	Kesbangpol
	1	Persentase penanganan konflik sosial	Persen	40	Kesbangpol

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

TABEL 6.4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	Persen	100	91.485.735.400,00	Dinkes, RSUD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan)	Indeks	82,22		
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Persen	55		
		Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	42,66		
		Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru	Persen	82,73		
		TFR (angka kelahiran total)	Kelahiran/ibu	2,42		
2	Program peningkatan daya saing sektor perdagangan	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	USD	726.705.758,00	5.232.302.000,00	Disperin
		Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	Persen	14		
		Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	Persen	3		
		Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Persen	20		
		Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	Persen	60		
		Persentase Alat UTTP sesuai standar	Persen	80		
3	Program peningkatan daya saing produk unggulan industri	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Persen	20	1.900.000.000,00	Disperin
		Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	Persen	2,3		
		Persentase pelaporan SIINAS	Persen	20		
		Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	Persen	80		
		Persentase Kapasitas Usaha Mikro	Persen	4,25		
		Persentase Kualitas Usaha Mikro	Persen	10		
4	Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase Koperasi Patuh	Persen	20	8.162.950.573,00	Diskopukm
		Persentase Koperasi Sehat	Persen	20		
		Persentase Koperasi Berizin	Persen	55		
		Persentase SDM koperasi yang kompeten	Persen	13,2		
		Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	0,5		
5	Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	15	19.393.512.949,00	
		Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	Persen	60		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	56		
		Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	Persen	40		
6	Program peningkatan kualitas e-government	Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	100	2.742.507.560.868,00	Seluruh Perangkat Daerah
		Jumlah OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	Jumlah	62		
		- Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun - Cakupan kepemilikan akta kematian - IKM	Persen Persen Nilai	-95 -40 -95		
		- Cakupan Kepemilikan KIA - Cakupan Kepemilikan KK - Cakupan Kepemilikan KTP-el - IKM	Persen Persen Persen Nilai	-40 -96,5 -99,5 -85,37		
		- Nilai LPPD - Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Nilai Persen	;- 70,30 -100		
		Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi	Persen	100		
		-Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu - Persentase aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen - Persen	-100 -100		
		Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah	Indeks	100		
		- Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD	- Persen - Persen - Persen	;- 100 -100 -100		
		Capaian nilai PPD	Nilai	87,6		
		- Persentase hasil penelitian/kajian yang didiseminasikan - Persentase peningkatan jumlah inovasi yang aktif di Perangkat Daerah - Persentase keikutsertaan penilaian penghargaan Tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah lingkup kelitbangan	- Persen - Persen - Persen	-80% -75% -100%		
		Persentase arsip yang terlindungi	Persen	20		
		Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	20		
		Persentase Informasi Arsip yang Termanfaatkan	Persen	20		
		Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Objek	397		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		persentase cakupan penanganan pengawasan	Objek	197		
		Persentase peningkatan kompetensi ASN	Persen	100		
		Rata-rata persentase manajemen layanan ASN	Persen	80		
		- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	- Persen - Persen	-10,69 -32,81		
		Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	50		
		persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data	Persen	27		
7	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Prosentase Peningkatan pendapatan daerah	Persen	18,5	816.637.180.435,00	BKAD, Bapenda
		Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100		
		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100		
8	Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	- Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemsyarakatan - Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	- Persen - Persen	-60 0	28.443.893.500,00	Kesbangpol, Satpol PP
		Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persen	100		
		Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	60		
		Prosentase peningkatan pendidikan politik	Persen	50		
		Persentase penanganan konflik sosial	Persen	40		
		Persentase pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Persen	50		
9	Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Persen	10	11.336.781.000,00	DPMD
		Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Persen	5		
		Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Persen	2		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Persen	96		
10	Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	APK SD APK SMP APK PAUD APK KEJAR PAKET Prosentase Sekolah Berakreditasi A	- Persen	APK SD = 103, 78%	328.638.242.830,00	Disdik, Dispora
			- Persen	APK SMP = 91.65%		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			- Persen	APK PAUD = 32,45%		
			- Persen	APK KEJAR PAKET = 49,69%		
			- Persen			
		Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP index pemerataan guru mapel SMP	- Indeks	Index pemerataan guru kelas SD = 0,19		
			- Indeks	index pemerataan guru matpel index pemerataan guru UN SMP = 0,23		
			- Indeks	index pemerataan guru mapel SMP = 0,42SD = 0,45		
			- Indeks			
		- prsentase lembaga SD dan SMP swasta yang mempunyai ijin operasional	- Persen	-80		
		- Presentase lembaga PAUD dan PKBM yang mempunyai ijin	- Persen	-47		
		Persentase peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal	Persen	100		
		Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	Persen	100		
		Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	25		
		- Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	- Orang	-80		
		- Persentase organisasi pemuda yang aktif	- Persen	-60		
		Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Atlet	150		
		- Rata-rata ketersediaan fasilitas membaca	- Poin	-45,5		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		- Rata-rata pemanfaatan bahan bacaan - Rata-rata kebiasaan membaca masyarakat	- Poin - Poin	-67 -55,5		
		persentase kecamatan yang terdapat naskah kuno	Persen	20		
11	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kebijakan terkait lingkungan hidup yang diimplementasikan	Persen	100	27.306.494.354,00	DLH
		Persentase Volume Sampah yang terkelola	Persen	65		
		- Nilai Indeks Kualitas Air - Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan - Nilai Indeks Kualitas Udara	- Nilai - Nilai - Nilai	-29 -53,9 -78		
		Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki ijin PPLH (Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)	Persen	100		
		Persentase penyediaan data penegakan hukum lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	Persen	100		
		Persentase penyediaan data hasil peran serta masyarakat dalam rangka edukasi lingkungan dan pengawasan sosial di bidang PPLH berbasis kearifan lokal	Persen	100		
		Persentase desa yang mendapatkan kampung Bedas	Persen	41		
		Nilai adipura	Nilai	70		
12	Program peningkatan ketahanan bencana	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) - Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	- Persen - Persen	0 -81	26.249.065.000,00	BPBD, Dinsos, Disdamkar
		Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	Persen	24,61		
		Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100		
13	Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	- Persentase peningkatan kelas kelompok Tani - Persentase peningkatan masing-masing kelas kelompok	- Persen - Persen	-2,45 -4,86	27.009.812.000,00	Distan
		Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Persen	100		
		- Jumlah Populasi Ternak - Produksi komoditi holtikultura - Produksi komoditi perkebunan - Produksi komoditi Tanaman Pangan	- Ekor - Ton - Ton - Ton	-7.029.529 -400.144 -13.147 -889.707		
		- Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan infrastruktur pertanian	- Persen	-9,5		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		- Rasio luas lahan LP2B yang sudah dipetakan	- Persen	-77		
		- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	- Persen - Persen	-73,05 -85,1		
		Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Persen	3,2		
		Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	Persen	2,06		
		- Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya - Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap	- Persen - Persen	-100 -3		
		- Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya - Nilai Tukar Pengolahan Ikan Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan - Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	- Persen - Persen - Persen	-2,06 -3 -3		
14	Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah	Persentase penurunan desa rawan pangan yang tertangani	Persen	100	11.046.495.200,00	Dispangkan
		Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	100		
		Persentase desa rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Persen	20		
		Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	> 80		
15	Program peningkatan kualitas infrastruktur	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	87	422.466.625.291,00	DPUTR, Dishub, Diskominfo, Disperkimtan
		Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikas	Persen	100		
		Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	43		
		- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten - Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik	- Poin - Persen	27,72		
		Persentase perwujudan bangunan pemerintah yang terbangun	Persen	100		
		Persentase dokumen rencana tata ruang untuk terselenggaranya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan harmonis	Persen	14		
		Persentase Luas Kehati Vegetasi non hutan	Persen	100		
		Jumlah ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	Persen	36,65		
		Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	Persen	50		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	Persen	25		
		- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	- Persen - Persen	-10,69 -32,81		
		persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	Persen	17		
		AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	89,24		
		AKSES AMAN TERHADAP AIR MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	80,73		
		Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung	Persen	96,36		
		persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Persen	0,23		
		persentase prioritas rumah tidak layak huni	Persen	74		
		Persentase Bidang Tanah pemda yang telah bersertipikat	Persen	27,03		
		Persentase Bidang Tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	-1,34 -1,47		
		Persentase jumlah penyelesaian sengketa tanah	Persen	60		
16	Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpengahsilan rendah terhadap fasilitas kesehatan	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	Persen	82	2.384.270.000,00	Dinkes, RSUD, DP2KBP3A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya	Nilai	80,8		
		Presentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	Persen	82,22		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka	Persen	87,25		
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Persen	55		
		Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100		
17	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	Persen	36,04	31.825.015.640,00	Dinsos
		Porsentase PMKS yang meningkat Keberfungsiannya sosialnya	Persen	33,11		
			- Persen	-2,29		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	- Persen	-46,6		
		Porsentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelenggaraan kesos	Persen	41,89		
18	Program Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	Persen	100	1.346.220.000,00	DP2KBP3A
		Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	Persen	100		
		Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	Persen	100		
		Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100		
		Persentase data terpilah anak	Persen	100		
		Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Persen	100		
19	Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Persen	10	14.424.296.900,00	Disparbud
		- Jumlah Desa Wisata yang ditata - Jumlah Destinasi Baru	- Destinasi - Destinasi	-1 0		
		Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	Persen	10		
		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan i HAKI	Persen	2		
		Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Persen	10		
		Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	Persen	10		
		Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	Persen	10		
		Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persen	10		
		Terbangunnya museum sejarah Daerah	Museum	0		
20	Program peningkatan potensi investasi daerah	Persentase peluang investasi yang dipromosikan	Persen	100	4.449.999.000,00	
		Jumlah peluang investasi unggulan dan kemitraan pelaku usaha	Jumlah	1		
		Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha	Persen	12		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Tersedianya sistem informasi layanan perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah	1		
		Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	Persen	0,44		
					4.622.246.452.940,00	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

RKPD
2022

BAB VII
PENUTUP

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

BAB 7
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama perode RPJMD 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Pada penyusunan RKPD Tahun 2022 merupakan masa transisi atas berakhirnya RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2022 agar berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD atau pada arah kebijakan dan sasaran pokok tahun 2022 dalam RPJPD bagi daerah yang RPJMD-nya telah berakhir. Maka RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 dan pada arah kebijakan yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Penggunaan RPJPD dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sementara penggunaan rancangan awal dimaksudkan untuk mengadaptasi rencana kebijakan yang akan diterapkan dalam rencana jangka menengah lima tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2022 menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Tahun 2022. Maka Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2022 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan bernegara.

Dokumen RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2022. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu:

1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut:
   a. Dokumen RKPD Kabupaten Bandung tahun 2022 menjadi pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2022, dalam rangka pencapaian indikator kinerja PD yang akan dicapai.
   b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Bandung merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
   c. Renja PD yang disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati bersama dan pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD).

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

RKPD
2022

LAMPIRAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

Rekapitulasi Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2022
Per Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah (PD)	Perbup RKPD 2022		Total Pagu Indikatif 2022
		Pagu Indikatif Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Pagu Indikatif Urusan Pelayanan Publik	
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	24.528.567.000,00	5.310.720.000,00	**29.839.287.000,00**
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.142.692.000,00	11.477.843.500,00	**17.620.535.500,00**
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.997.361.000,00	803.192.944.435,00	**825.190.305.435,00**
4	Badan Pendapatan Daerah	44.218.858.000,00	13.444.236.000,00	**57.663.094.000,00**
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.078.093.000,00	5.957.241.000,00	**16.035.334.000,00**
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.792.145.000,00	6.103.684.000,00	**19.895.829.000,00**
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.142.547.000,00	2.853.557.000,00	**16.996.104.000,00**
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	21.660.941.000,00	51.876.611.712,00	**73.537.552.712,00**
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.339.523.000,00	3.403.747.000,00	**33.743.270.000,00**
10	Dinas Kesehatan	309.643.255.000,00	78.319.581.400,00	**387.962.836.400,00**
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.045.381.000,00	5.984.647.000,00	**23.030.028.000,00**
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.047.725.000,00	8.162.950.573,00	**17.210.675.573,00**
13	Dinas Lingkungan Hidup	41.778.724.000,00	27.306.494.354,00	**69.085.218.354,00**
14	Dinas Pangan dan Perikanan	11.787.455.000,00	11.046.495.200,00	**22.833.950.200,00**
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.994.949.000,00	14.424.296.900,00	**28.419.245.900,00**
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.289.145.000,00	282.346.519.146,00	**364.635.664.146,00**
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.513.016.000,00	11.336.781.000,00	**20.849.797.000,00**
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.882.615.000,00	4.449.999.000,00	**21.332.614.000,00**
19	Dinas Pendidikan	1.095.176.176.075,00	276.761.631.118,00	**1.371.937.807.193,00**
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.506.660.000,00	3.730.490.000,00	**29.237.150.000,00**
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35.322.929.000,00	7.132.302.000,00	**42.455.231.000,00**
22	Dinas Perhubungan	35.095.641.000,00	4.931.053.000,00	**40.026.694.000,00**
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.156.340.000,00	1.056.446.000,00	**12.212.786.000,00**
24	Dinas Pertanian	39.285.230.000,00	27.009.812.000,00	**66.295.042.000,00**
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	20.753.900.000,00	131.306.129.145,00	**152.060.029.145,00**
26	Dinas Sosial	12.003.917.000,00	23.116.818.640,00	**35.120.735.640,00**
27	Dinas Tenaga Kerja	14.846.956.000,00	19.393.512.949,00	**34.240.468.949,00**
28	Inspektorat	17.152.720.000,00	2.443.550.000,00	**19.596.270.000,00**
29	Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka	69.330.312.000,00	3.367.500.000,00	**72.697.812.000,00**
30	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya	146.908.095.000,00	3.632.834.000,00	**150.540.929.000,00**
31	Rumah Sakit Umum Daerah Soreang	184.488.640.000,00	6.165.820.000,00	**190.654.460.000,00**

No.	Perangkat Daerah (PD)	Perbup RKPD 2022		Total Pagu Indikatif 2022
		Pagu Indikatif Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Pagu Indikatif Urusan Pelayanan Publik	
32	Satuan Polisi Pamong Praja	23.113.475.000,00	16.966.050.000,00	**40.079.525.000,00**
33	Sekretariat Daerah	53.159.131.793,00	22.137.960.000,00	**75.297.091.793,00**
34	Sekretariat DPRD	59.897.180.000,00	13.099.061.000,00	**72.996.241.000,00**
35	Kecamatan Arjasari	4.149.043.000,00	249.999.000,00	**4.399.042.000,00**
36	Kecamatan Baleendah	12.527.268.000,00	6.703.400.000,00	**19.230.668.000,00**
37	Kecamatan Banjaran	4.218.546.000,00	176.000.000,00	**4.394.546.000,00**
38	Kecamatan Bojongsoang	4.357.464.000,00	256.300.000,00	**4.613.764.000,00**
39	Kecamatan Cangkuang	4.252.350.000,00	249.997.000,00	**4.502.347.000,00**
40	Kecamatan Cicalengka	4.618.762.000,00	249.999.000,00	**4.868.761.000,00**
41	Kecamatan Cikancung	4.443.574.000,00	217.000.000,00	**4.660.574.000,00**
42	Kecamatan Cilengkrang	4.247.189.000,00	233.113.000,00	**4.480.302.000,00**
43	Kecamatan Cileunyi	4.708.834.000,00	247.910.000,00	**4.956.744.000,00**
44	Kecamatan Cimaung	4.707.603.000,00	136.000.000,00	**4.843.603.000,00**
45	Kecamatan Cimenyan	7.906.036.000,00	2.655.099.000,00	**10.561.135.000,00**
46	Kecamatan Ciparay	4.218.128.200,00	166.316.800,00	**4.384.445.000,00**
47	Kecamatan Ciwidey	5.050.904.500,00	365.117.500,00	**5.416.022.000,00**
48	Kecamatan Dayeuhkolot	5.818.918.000,00	1.179.220.000,00	**6.998.138.000,00**
49	Kecamatan Ibun	4.311.860.000,00	250.000.000,00	**4.561.860.000,00**
50	Kecamatan Katapang	4.127.381.000,00	280.000.000,00	**4.407.381.000,00**
51	Kecamatan Kertasari	4.045.948.000,00	180.000.000,00	**4.225.948.000,00**
52	Kecamatan Kutawaringin	4.370.711.000,00	140.000.000,00	**4.510.711.000,00**
53	Kecamatan Majalaya	4.190.149.000,00	222.499.000,00	**4.412.648.000,00**
54	Kecamatan Margaasih	4.385.648.000,00	230.000.000,00	**4.615.648.000,00**
55	Kecamatan Margahayu	5.971.396.000,00	1.057.200.000,00	**7.028.596.000,00**
56	Kecamatan Nagreg	4.687.643.000,00	164.000.000,00	**4.851.643.000,00**
57	Kecamatan Pacet	4.361.384.000,00	185.000.000,00	**4.546.384.000,00**
58	Kecamatan Pameungpeuk	4.246.795.000,00	239.094.000,00	**4.485.889.000,00**
59	Kecamatan Pangalengan	4.322.629.000,00	172.147.000,00	**4.494.776.000,00**
60	Kecamatan Paseh	4.683.569.000,00	203.000.000,00	**4.886.569.000,00**
61	Kecamatan Pasirjambu	4.545.310.000,00	159.664.000,00	**4.704.974.000,00**
62	Kecamatan Rancabali	3.870.645.000,00	250.000.000,00	**4.120.645.000,00**
63	Kecamatan Rancaekek	6.112.632.000,00	1.305.785.000,00	**7.418.417.000,00**
64	Kecamatan Solokanjeruk	4.507.334.000,00	210.000.000,00	**4.717.334.000,00**
65	Kecamatan Soreang	4.433.325.000,00	184.000.000,00	**4.617.325.000,00**
	Jumlah	**2.694.479.273.568,00**	**1.927.767.179.372,00**	**4.622.246.452.940,00**

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**27,972,323,000**							**28,193,031,000**		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Point		Point	76.5 Point	**24,528,567,000**						76.5 Point	**24,579,306,000**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku Persentase pemenuhan proses perencanaan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	**39,000,000**						100 Persen 100 Persen 100 Persen	**46,900,000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu				4 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	4 Dokumen	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	1 Dokumen	3,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	1 Dokumen	3,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	1 Dokumen	5,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	1 Dokumen	5,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	1 Dokumen	3,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan BKPSDM	7 Dokumen	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	Persen		Persen	100 Persen	**22,864,398,000**						100 Persen	**22,866,698,000**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	22,829,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	12 Bulan	22,829,398,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	1 Dokumen	15,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				8 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	8 Dokumen	22,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Persen		Persen	100 Persen	**85,380,000**						100 Persen	**90,000,000**	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				70 Orang	85,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	70 Orang	90,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang- undangan				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	0 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**364,000,000**						100 Persen	**373,600,000**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				25 Jenis	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	25 Jenis	15,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				15 Jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	15 Jenis	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli				10 Jenis	33,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	10 Jenis	33,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				10 Jenis	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	10 Jenis	91,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan				3 Jenis	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	3 Jenis	11,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu				500 Orang	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	500 Orang	15,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				75 HOK	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	75 HOK	156,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang yang dibeli	Unit		Unit	4 Unit	**25,000,000**						4 Unit	**25,500,000**	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dibeli				4 Unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	4 Unit	25,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**719,539,000**						100 Persen	**724,251,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tertata				9000 Surat	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	9000 Surat	40,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	12 Bulan	183,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa / diadakan				0 Bulan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	0 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang bulan (OB) jasa keamanan kantor Jumlah orang bulan (OB) jasa kebersihan kantor Jumlah orang bulan (OB) jasa THL				12 Orang/Bulan 36 Orang/Bulan 44 Orang/Bulan	499,539,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	12 Orang/Bulan 36 Orang/Bulan 44 Orang/Bulan	499,851,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	**426,250,000**						100 Persen	**446,900,000**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak beroperasi				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	0 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak beroperasi				23 Unit	281,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dilingkungan BKPSDM	23 Unit	300,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				27 Unit	40,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	27 Unit	40,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / direhab				1 Unit	100,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	1 Unit	101,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara				1 Unit	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	1 Unit	5,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Jumlah dokumen penataan organisasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**5,000,000**						1 Dokumen	**5,457,000**	
5	03	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen laporan analisisi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan BKPSDM	1 Dokumen	5,457,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	Persen		Persen	80 Persen	**3,443,756,000**						80 Persen	**3,613,725,000**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Peserta Yang Terfasilitasi dalam Pengadan ASN Jumlah SK Pensiun Yang Terselesaikan Jumlah Updating Data Kepegawaian	Sistem Orang SK Data		Sistem Orang SK Data	1 Sistem 10000 Orang 1200 SK 5000 Data	**1,448,750,000**						1 Sistem 10000 Orang 1200 SK 5000 Data	**1,516,025,000**	
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1 Dokumen	35,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	48,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1 Dokumen	49,725,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang di Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5000 Orang	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	5000 Orang	765,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1 Dokumen	30,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah penyelesaian administrasi pensiun				1200 SK	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1200 SK	101,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1 Dokumen	61,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN				2 Kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	2 Kegiatan	102,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola				1 Aplikasi	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1 Aplikasi	330,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diremajakan				5000 Data	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	5000 Data	20,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung & Pelamar Calon ASN	1 Dokumen	20,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah Pegawai Yang Mutasi Jumlah pengelolan kegiatan Promosi ASN Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN Yang Diterbitkan	Dokumen Kegiatan SK		Dokumen Kegiatan SK	40 Dokumen 27 Kegiatan 2000 SK	**710,000,000**						40 Dokumen 27 Kegiatan 2000 SK	**713,200,000**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen Pengelolaan Promosi ASN				40 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	40 Dokumen	20,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen SK kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan				1750 SK	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	1750 SK	142,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang ditempatkan sesuai dengan jabatan/kompetensinya				2 Kegiatan	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	550,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	Persen		Persen	90 Persen	**725,000,000**						90 Persen	**744,800,000**	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen Data profil kompetensi ASN				100 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	100 Orang	220,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan				100 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	100 Orang	316,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN jabatan dikelola				0 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	0 Kegiatan	30,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN				2 Kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	101,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Yang terfasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				8 Orang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	8 Orang	77,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	Persen		Persen	90 Persen	**560,006,000**						90 Persen	**639,700,000**	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Yang terselesaikan				1 Dokumen	61,730,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	1 Dokumen	65,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	103,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	2 Dokumen	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	0 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan berprestasi				6 Orang	211,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	6 Orang	225,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Tanda Jasa				326 Orang	8,776,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	326 Orang	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin yang diselesaikan				3 Kegiatan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	3 Kegiatan	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilaksanakan				20 Penyelesaian	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	20 Penyelesaian	81,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Yang Dilaksanakan				40 Izin	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	40 Izin	40,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Disiplin				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	1 Dokumen	15,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1,866,964,000**							**3,382,000,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Persen		Persen	100 Persen	**1,866,964,000**						100 Persen	**3,382,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	Persen		Persen	90 Persen	**520,000,000**						90 Persen	**836,400,000**	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan UrusanPemerintahan Yang Tersedia				1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	1 Dokumen	35,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis				100 Orang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	100 Orang	765,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi diklattt				1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	1 Dokumen	35,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi manajerial dan fungsional	Orang		Orang	100 Orang	**1,346,964,000**						100 Orang	**2,545,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	1 Dokumen	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial				100 0rang	1,311,964,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	100 0rang	2,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat Manajerial				1 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	1 Dokumen	30,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
										TOTAL	**29,839,287,000**							**31,575,031,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**17,620,535,500**							**17,222,432,300**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai sakip	point		point	70 point	**6,142,692,000**						70 point	**5,722,192,000**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen anggran /keuangan yang diselesaikan tepat waktu	poin		poin	70 poin	**26,000,000**						70 poin	**0**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan Renja yang diselesaikan				4 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunanan Dokumen RKA				2 dokumen	3,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA perubahan				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunanan Dokumen DPA				2 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA perubahan				1 dokumen	3,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu				10 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya dokumen keuangan perangkat daerah	poin		poin	70 poin	**5,480,561,000**						70 poin	**5,470,561,000**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji pegawai				10 bulan	5,470,561,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	10 bulan	5,470,561,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di penuhi				1 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				2 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya pembinaan pegawai perangkat daerah	Orang		Orang	34 Orang	**5,000,000**						34 Orang	**0**	
8	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah ASN Kesbangpol				34 orang	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	34 orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya operasional kantor	poin		poin	70 poin	**92,500,000**						70 poin	**0**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				35 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35 jenis	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				8 Jenis	2,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Jenis	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				250 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	250 Jenis	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				14 buah	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14 buah	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli				4 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 jenis	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan alat kebersihan				12 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 jenis	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah				400 HOK	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400 HOK	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya operasional perkantoran	poin		poin	70 poin	**336,631,000**						70 poin	**251,631,000**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				400 buah	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	400 buah	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				3 jenis	80,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 jenis	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun				12 bulan	251,631,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	251,631,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya operasional perkantoran	poin		poin	70 poin	**202,000,000**						70 poin	**0**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan				9 uniit	102,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9 uniit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya				18 unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				18 jenis dan jasa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18 jenis dan jasa	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	0Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%		%	60 %	**250,000,000**						60 %	**255,000,000**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase pengkaderan generasi muda yang dibina pendidikan wawasan kebangsaan	%		%	60 %	**250,000,000**						60 %	**255,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara				50 orang 250 orang 250 orang 50 orang 50 orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	50 orang 250 orang 250 orang 50 orang 50 orang	255,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase peningkatan pendidikan politik	%		%	50 %	**3,312,851,000**						50 %	**3,313,371,000**	
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase peranserta dalam berdemokrasi didaerah	%		%	50 %	**3,312,851,000**						50 %	**3,313,371,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik				250 orang	3,286,851,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Generasi muda	250 orang	3,286,851,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemerintahan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah				3 laporan	26,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Generasi muda	3 laporan	26,520,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	0Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	% 00		% 00	60 % 00 00	**1,605,000,000**						60 % 00 00	**1,605,200,000**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dalam pemantapan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%		%	60 %	**1,605,000,000**						60 %	**1,605,200,000**	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan				24 organisasi 200 orang	1,595,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Organisasi kemasyarakatan	24 organisasi 200 orang	1,595,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				3 laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Organisasi kemasyarakatan	3 laporan	10,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%		%	50 %	**150,000,000**						50 %	**153,000,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase generasi muda yang dibina untuk pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	%		%	50 %	**150,000,000**						50 %	**153,000,000**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan				100 orang 100 orang 200 orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	100 orang 100 orang 200 orang	153,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase penanganan konflik sosial	%		%	40 %	**6,159,992,500**						40 %	**6,173,669,300**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase kerawanan konflik sosial yang terdeteksi	%		%	40 %	**6,159,992,500**						40 %	**6,173,669,300**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat				100 orang	5,226,152,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Instansi vertikal	100 orang	5,226,152,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung				15 dokumen/laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Instansi vertikal	15 dokumen/laporan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah				15 dokumen/laporan	8,235,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Instansi vertikal	15 dokumen/laporan	8,399,700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA				12 bulan	675,605,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Instansi vertikal	12 bulan	689,117,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									TOTAL		**17,620,535,500**							**17,222,432,300**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**825.190.305.435**							**23.357.450.851**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	poin		poin	73 poin	**21.997.361.000**						73 poin	**21.104.564.368**	
5	**02**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP dan BMD	poin		poin	77 poin	**260.550.000**						77 poin	**265.761.000**	
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	3 dok			3 dok	50.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	3 dok	51.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			1 dok	12.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	1 dok	12.750.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan	1 dok			1 dok	12.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	1 dok	12.750.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			1 dok	12.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	1 dok	12.750.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Perubahan	1 dok			1 dok	12.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	1 dok	12.750.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP PD yang diselesaikan tepat waktu	4 dok			4 dok	85.550.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	4 dok	87.261.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok			3 dok	75.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	3 dok	76.500.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP dan BMD	poin		poin	77 poin	**16.007.879.000**						77 poin	**17.442.222.127**	
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			12 bulan	15.803.079.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	17.233.326.127	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 dok			1 dok	87.200.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	1 dok	88.944.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	4 dok			4 dok	117.600.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	4 dok	119.952.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai AKIP dan BMD	poin		poin	77 poin	**182.593.000**						77 poin	**186.245.141**	
5	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang terdata dalam pengolahan administrasi kepegawaian	12 bulan			12 bulan	32.593.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	33.245.141	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal	10 orang			10 orang	150.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	10 orang	153.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP dan BMD	poin		poin	77 poin	**2.108.726.000**						77 poin	**1.246.888.389**	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	20 jenis			20 jenis	17.800.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	20 jenis	18.156.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan			12 bulan	1.500.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	777.899.132	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor	12 bulan			12 bulan	54.254.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	55.339.631	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dab digandakan	16 jenis			16 jenis	97.611.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	16 jenis	99.563.740	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	3 jenis			3 jenis	15.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	3 jenis	15.300.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan			12 bulan	102.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	104.550.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD	12 bulan			12 bulan	321.561.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	176.079.886	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP dan BMD	poin		poin	77 poin	**1.854.759.000**						77 poin	**1.759.447.711**	
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar	5000 surat			5000 surat	89.260.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	5000 surat	5.100.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon selama 1 tahun	12 bulan			12 bulan	90.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	91.800.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	1.675.499.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	12 bulan	1.662.547.711	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP dan BMD	poin		poin	77 poin	**1.582.854.000**						77 poin	**204.000.000**	
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	25 unit			25 unit	200.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	25 unit	204.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	17 jenis			17 jenis	129.356.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	17 jenis	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor sedang/berat	1 unit			1 unit	1.253.498.000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai BKAD	1 unit	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	**801.705.000.435**						100 %	**1.644.644.068**	
5	**02**	**02**	2,01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan	%		%	100 %	**2.144.675.000**						100 %	**1.058.486.938**	
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA dan PPAS	2 dok			2 dok	135.985.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	65.191.209	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dok			2 dok	97.815.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	46.892.511	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA	65 skpd			65 skpd	214.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	65 skpd	102.831.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA Perubahan	65 skpd			65 skpd	80.750.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	65 skpd	38.711.550	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi DPA	65 skpd			65 skpd	114.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	65 skpd	54.891.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi DPA Perubahan	65 skpd			65 skpd	52.093.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	65 skpd	24.973.816	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup tentang APBD dan Penjabaran APBD	2 dok			2 dok	437.200.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	239.922.848	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup tentang APBD dan Penjabaran APBD Perubahan	2 dok			2 dok	371.406.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	178.052.084	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisa Standar Biaya (ASB)	2 dok			2 dok	640.426.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	307.020.320	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2,02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Serapan Belanja Daerah	%		%	89 %	**466.065.000**							89 %	**223.431.581**	
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas	200 laporan			200 laporan	66.546.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	200 laporan	31.902.152	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Terbitnya Anggaran Kas dan SP2D	1 dok			1 dok	65.252.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	31.281.809	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang tertib Penatausahaan Keuangan	65 skpd			65 skpd	334.267.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	65 skpd	160.247.620	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2,03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%		%	100 %	**756.622.000**							100 %	**362.725.549**	
5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan yang tersedia	1 dok			1 dok	78.810.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	37.781.778	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang tersedia	1 dok			1 dok	184.566.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	88.480.996	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersedia	2 dok			2 dok	129.688.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	62.172.427	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Standar Operasional dan Prosedur Bidang Akuntansi yang disusun	1 dok			1 dok	113.215.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	54.275.674	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan/kursus/bimbin gan teknis pengelolaan keuangan daerah	65 skpd			65 skpd	250.343.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	65 skpd	120.014.674	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	**02**	**02**	2,04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Bantuan Keuangan dan BTT	%		%	100 %	**798.337.638.435**						100 %	**0**	
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah BTT yang disalurkan	1 LS			1 LS	34.737.600.868	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Desa	1 LS	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	0 -			0 -	763.600.037.567	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Desa	0 -	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**1.487.944.000**						100 %	**608.242.415**	
5	**02**	**03**	2,01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik	%		%	90 %	**1.487.944.000**						90 %	**608.242.415**	
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Penyusunan Standar Harga berdasarkan jenis dan type barang	1 buku			1 buku	281.620.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 buku	53.900.141	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya SK Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dok			2 dok	130.820.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 dok	62.715.204	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD	1 dok			1 dok	255.252.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	98.398.035	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penghapusan BMD	1 dok			1 dok	305.252.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	146.338.035	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD	1 dok			1 dok	515.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	1 dok	246.891.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
										TOTAL	**825.190.305.435**							**23.357.450.851**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**						**57,663,094,000**								**60,744,953,878**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	**44,218,858,000**						100 %	**46,748,814,967**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**320,000,000**						100 %	**326,400,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				4 Dokumen	70,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	71,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	20,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	20,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	20,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	20,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12 Bulan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	153,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	20,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**38,874,411,000**						100 %	**41,145,349,707**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan PNS				12 Bulan	38,844,411,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	41,114,749,707	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	15,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran				3 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	3 Dokumen	15,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**102,000,000**	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis penyediaan pakaian dinas				3 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	3 Jenis	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				180 Orang	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	180 Orang	102,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Operasional Perkantoran)	%		%	100 %	**555,000,000**						100 %	**567,100,000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik				23 Jenis	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	23 Jenis	25,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan umum kantor				12 Bulan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	153,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga				27 Jenis	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	27 Jenis	51,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor				4 Jenis	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	4 Jenis	52,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan				14 Jenis	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	14 Jenis	102,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan				5 Jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	5 Jenis	15,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang datang				12 Bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	51,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait				12 Bulan	115,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	117,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**3,964,447,000**						100 %	**3,888,865,260**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar				12 Bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran listrik, air, internet dan telepon dalam setahun				12 Bulan	615,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	627,300,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95 OK	3,344,447,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	95 OK	3,256,465,260	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**405,000,000**						100 %	**719,100,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kepala badan				1 Unit	26,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	26,520,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan				126 Unit	379,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	126 Unit	488,580,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				12 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	12 Jenis	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	ASN dan Non-ASN Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	204,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase Peningkatan pendapatan daerah	%		%	18,50 %	**13,444,236,000**						18,50 %	**13,996,138,911**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Prosentase Target Pajak Daerah (Pencapaian Target Pajak Daerah)	%		%	100 %	**13,444,236,000**						100 %	**13,996,138,911**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen pendapatan daerah dan pajak daerah				2 Dokumen	520,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	2 Dokumen	560,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola				3 Aplikasi	1,533,050,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	3 Aplikasi	1,573,050,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan operasional UPT Pajak Daerah wilayah I-V				12 Bulan	527,971,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	12 Bulan	549,888,903	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana-prasarana pajak II yang dipelihara				9 Unit	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	9 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak I				8 Jenis Pajak	2,257,140,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	8 Jenis Pajak	2,525,116,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pemeliharaan Basis Data pajak daerah				1 Dokumen	500,410,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	1 Dokumen	510,418,608	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah penerimaan pajak daerah bidang II				2 Jenis Pajak	5,170,400,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	2 Jenis Pajak	5,270,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan penetapan pajak daerah bidang pajak I				1 Dokumen	217,360,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	1 Dokumen	227,360,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan piutang pajak daerah				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	1 Dokumen	201,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan penetapan dan realisasi pajak daerah Bidang Pajak I				2 Dokumen	298,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	2 Dokumen	299,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih				10 Jenis Pajak	1,119,905,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	10 Jenis Pajak	1,219,905,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengurangan dan keberatan pajak daerah				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	2 Dokumen	220,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pendapatan daerah dan pajak daerah				1 Dokumen	800,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	1 Dokumen	840,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah PD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan retribusi daerah				44 PD	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Wajib Pajak, ASN dan Non-ASN Kabupaten Bandung	44 PD	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL											**57,663,094,000**							**60,744,953,878**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URURSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**16,035,334,000**								**16,769,734,097**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Nilai SAKIP; 2. Persentase aset dlm kondisi baik	00		00	00 00	**10,078,093,000**							00 00	**9,893,121,837**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**50,000,000**							100 %	**35,700,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra Jumlah Dokumen RKA dan RKAP				2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	25,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan LAPTAH PD yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	2 Dokumen	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**6,698,323,000**							100 %	**7,381,729,837**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan				12 Bulan	6,685,323,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	12 Bulan	7,371,529,837	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen 1 Dokumen	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**0**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				80 Stell	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	80 Stell	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	%		%	100 %	**660,000,000**						100 %	**96,900,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				15 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	15 Jenis	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				8 Unit	195,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	8 Unit	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				5 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	5 Jenis	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	0 Jenis	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				6 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	6 Jenis	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Penyediaan Bahan Bacaan				4 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	4 Jenis	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Penyediaan Makan Minum dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu/Rapat				500 HOK	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	500 HOK	30,600,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana				250 HOK 0 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	250 HOK 0 Orang	25,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Persentase ketersediaan Barang Milik Daerrah	%		%	0 %	**0**						0 %	**1,000**	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibeli				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	0 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	0 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	0 Jenis	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Persentase Ketersediaanya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%		%	100 %	**2,179,770,000**						100 %	**2,082,990,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				3000 Buah	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	3000 Buah	10,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	112,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	12 Bulan	114,750,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan BPJS NON PNS Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman Jumlah Penyediaan Tenaga NON PNS				660 OB 48 OB 48 OB 660 OB	2,057,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	660 OB 48 OB 48 OB 660 OB	1,958,040,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	**440,000,000**						100 %	**295,801,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara				14 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	14 Unit	102,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara				23 Unit	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	23 Unit	71,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara				0 jenis	0				Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	0 jenis	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				2 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	2 Jenis	20,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Jenis Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				5 Jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	5 Jenis	51,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab				1 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemda Kab Bandung	1 Paket	51,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	00		00	00 00	**5,957,241,000**						00 00	**6,876,612,260**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang		orang	50000 orang	**800,000,000**						50000 orang	**204,000,000**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal				100 %	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	102,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				100 %	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	102,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%		%	50000 %	**3,532,241,000**						50000 %	**5,289,968,760**	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal				0 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 %	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan				100 %	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	260,252,785	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 %	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	384,031,831	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan				0 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 %	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah mitigasi risiko bencana yang dilaksanakan				0 Kali	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 Kali	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa tangguh bencana				3 Desa	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Desa	370,260,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan yang penanganan pasca bencana				129 Orang	1,619,241,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	129 Orang	3,803,158,144	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Bimtek TRC, SAR, Sekolah Gunung dan sungai, dan Latihan Gabungan				25 Orang	463,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	25 Orang	472,260,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal				100 %	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase umlah Warga Negara yang ikut pelatihan				100 %	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 Dokumen	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang		orang	50000 orang	**1,625,000,000**						50000 orang	**1,382,638,500**	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah penanganan kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas				0 Orang	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 Orang	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)				100 %	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	133,135,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana				100 %	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 %	153,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kebutuhan dasar bagi korban bencana				6 Jenis	1,075,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	6 Jenis	1,096,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				0 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 %	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)				0 %	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 %	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan	%		%	100 %	**0**						100 %	**5,000**	
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana kabupaten				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Lembaga kebencanaan kabupaten Bandung	0 Dokumen	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kebencanaan yang mendapatkan peningkatan kapasitas				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Lembaga kebencanaan kabupaten Bandung	0 Unit	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah lembaga dan kemitraan yang bekerja sama dalam penanggulangan bencana kabupaten				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Lembaga kebencanaan kabupaten Bandung	0 Unit	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah sistem informasi kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Lembaga kebencanaan kabupaten Bandung	0 Unit	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Lembaga kebencanaan kabupaten Bandung	0 Unit	1,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									TOTAL	**16,035,334,000**								**16,769,734,097**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**01**				**PERENCANAAN**						**19,044,829,000**								**17,123,684,120**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Nilai SAKIP	Point Point		Point Point	81.5 Point 81.5 Point	**13,792,145,000**						81.5 Point 81.5 Point	**14,161,415,090**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	%		%	100 %	**457,500,000**						100 %	**247,350,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu				2 dokumen	292,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	2 dokumen	145,350,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	51,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**10,796,947,000**						100 %	**12,097,906,469**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN				12 bulan	10,730,947,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	12 bulan	12,062,206,469	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK				1 dokumen	36,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 dokumen	15,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	**90,000,000**						100 %	**10,200,000**	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				75 stel	40,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	75 stel	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				40 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	40 Orang	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai Persentase pemenuhan operasional perkantoran	% %		% %	100 % 100 %	**679,000,000**						100 % 100 %	**153,000,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				35 jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	35 jenis	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				15 unit	420,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	15 unit	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				5 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	5 jenis	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah satuan bahan logistik kantor yang dibeli				3 jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	3 jenis	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				15 jenis	40,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	15 jenis	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				3 jenis	24,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	3 jenis	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				250 box	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	250 box	51,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				250 hox	95,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	250 hox	51,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan				1 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeulair				1 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**1,373,698,000**						100 %	**1,301,058,621**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				4000 surat	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	4000 surat	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 bulan	161,944,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	12 bulan	158,352,621	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang disewa				40 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	40 unit	10,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya asuransi BMD Jumlah bulan pembayaran jasa keamanan Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan) Jumlah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran				1 paket 12 bulan 12 bulan 23 orang	1,191,754,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 paket 12 bulan 12 bulan 23 orang	1,122,306,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		%	100 %	**395,000,000**						100 %	**351,900,000**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil operasional yang dipelihara				34 unit	245,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	34 unit	249,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				40 unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	40 unit	51,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 paket	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 paket	51,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				1 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Bappeda Kabupaten Bandung	1 paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Capaian nilai PPD	00		00	00 00	**2,649,984,000**						00 00	**1,223,985,030**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	**1,526,231,000**						100 %	**766,256,263**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Ranwal RKPD Jumlah Ranwal Teknokratik RKPD				1 dokumen 1 Dokumen	273,314,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen 1 Dokumen	74,780,280	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Bantuan Keuangan Gubernur Jumlah Dokumen Usulan DAK				1 dokumen 1 dokumen	114,343,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen 1 dokumen	91,129,860	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan konsultasi publik RKPD				1 dokumen	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				1 dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD				1 dokumen	420,657,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	265,870,140	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan)				2 dokumen	267,917,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	2 dokumen	130,475,983	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	''Persentase ketersediaan dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	%		%	100 %	**609,553,000**						100 %	**290,244,767**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Pembangunan Jumlah Dokumen E-Database SIPD Kabupaten bandung				1 dokumen 1 dokumen	146,200,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen 1 dokumen	98,124,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Prosiding Satu Data Kabupaten Bandung (SDKB) Jumlah Updating Aplikasi Perencanaan				1 dokumen 1 aplikasi	333,582,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen 1 aplikasi	85,253,640	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Saku Profil Data Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Profil Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan kewilayahan Jumlah dokumen Prosiding Pendampingan Aplikasi SIPD				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	129,771,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	106,867,127	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	% %		% %	94.5 % 95.5 %	**514,200,000**						94.5 % 95.5 %	**167,484,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah				1 dokumen	231,200,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	82,824,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan				1 dokumen 1 dokumen	283,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen 1 dokumen	84,660,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**2,602,700,000**						100 % 100 % 100 %	**1,738,284,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Ma Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**864,500,000**						100 % 100 % 100 %	**593,640,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan				1 dokumen	172,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	100,980,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan				1 dokumen	118,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	108,120,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan				1 dokumen	97,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	99,450,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia				1 dokumen	259,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	109,140,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia				1 dokumen	122,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia				1 dokumen	95,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	73,950,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**871,000,000**						100 % 100 % 100 %	**567,120,000**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian				1 dokumen	218,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	171,360,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian				1 dokumen	323,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	191,760,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil sinergitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian				1 dokumen	330,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	204,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**867,200,000**						100 % 100 % 100 %	**577,524,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur				1 dokumen	171,100,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	108,222,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur				1 dokumen	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur				1 dokumen	162,430,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	73,878,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan				1 dokumen	185,100,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,102,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan				1 dokumen	123,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan				1 dokumen	125,570,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	89,321,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**851,000,000**							**551,714,611**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil penelitian/kajian yang didiseminasikan .Persentase keikutsertaan penilaian penghargaan Tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah lingkup kelitbangan Persentase peningkatan jumlah inovasi yang aktif di Perangkat Daerah	0 0 0		0 0 0	0 0 0 0 0 0	**851,000,000**						0 0 0 0 0 0	**551,714,611**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	%		%	100 %	**253,000,000**						100 %	**156,060,000**	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan				1 dokumen	253,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkar Daerah, Stakeholders	1 dokumen	156,060,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	%		%	100 %	**305,000,000**						100 %	**204,000,000**	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 dokumen	205,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangana Komunikasi dan Informatika				1 dokumen	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase ketersediaan dokumen inovasi dan teknologi	%		%	100 %	**293,000,000**						100 %	**191,654,611**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen inovasi daerah				1 dokumen	293,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah, Stakeholders	1 dokumen	191,654,611	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
									TOTAL	**19,895,829,000**								**17,675,398,731**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**16,996,104,000**								**17,626,104,195**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Nilai Sakip 2 Nilai SKM	Poin Poin		Poin Poin	80 Poin 81 Poin	**14,142,547,000**							80 Poin 81 Poin	**15,594,986,055**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sesuai ketentuan -	%		%	100 %	**95,000,000**							100 %	**96,900,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP PD yang deselaikan secara tepat waktu				10 dokumen	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aapartur	10 dokumen	45,900,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan				3 dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aapartur	3 dokumen	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan				3 dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aapartur	3 dokumen	40,800,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan -	%		%	100 %	**10,363,994,000**							100 %	**11,265,479,055**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tiap Bulan				12 Bulan	10,343,994,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	11,245,079,055	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK				1 set	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 set	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 dokumen	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**0**							100 % 100 % 100 %	**250,000,000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan				163 Stell	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	163 Stell	250,000,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**76,500,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				20 jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	20 jenis	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				30 jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	30 jenis	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				12 bulan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 bulan	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				1 paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 paket	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli				5 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	5 jenis	10,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				180 Hok	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	180 Hok	25,500,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**3,362,553,000**						100 %	**3,365,187,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				12 Bulan	1,700,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	1,734,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	132,600,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan) Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)				12 Bulan 90 Orang Bulan	3,230,853,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan 90 Orang Bulan	3,230,853,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	%		%	100 %	**246,000,000**						100 %	**540,920,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan dan roda dua yang dipelihara				20 unit	196,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	20 unit	199,920,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				1 paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 paket	40,800,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				6 unit	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	6 unit	300,200,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	1. Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK); 2. Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran 1"- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 2 Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran"	00 %		00 %	00 00 81 %	**2,853,557,000**						00 00 81 %	**2,031,118,140**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase capaian respon time penanggulangan kebakaran	%		%	82 %	**978,057,000**						82 %	**997,618,140**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dan penyelamatan				2 Dok	132,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	2 Dok	339,048,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan Pemadaman kebakaran Porsentase tingkat waktu tanggap (Respon Time)				12 bulan	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 bulan	408,000,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan B3 (bahan berbahaya beracun)				12 bulan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 bulan	20,400,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sapras dan APD untuk pencegahan dan penggulangan kebakaran				6 Jenis	175,657,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	6 Jenis	179,170,140	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Prosentase cakupan layanan komukasi dan informasi kebakaran dan penyalamatan di wil desa/kel se kab Bandung				80 Persen	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	80 Persen	30,600,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerjama antar wilayah kabupaten/kota				5 Wilayah	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	5 Wilayah	20,400,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase bangunan gedung yang proteksi kebakaran yang dilakukan inspeksi	%		%	35 %	**115,000,000**						35 %	**117,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Kegiatan pendataan/Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran				100 gedung	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kab bandung	100 gedung	51,000,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan gedung yang memenuhi kelaikan standar teknis proteksi kebakaran				100 gedung	65,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kab bandung	100 gedung	66,300,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**04**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi	%		%	80 %	**35,000,000**						80 %	**35,700,000**	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran dan peyelamatan yang perlu dilakukan investigasi dalam hal penyebab kebakaan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 Bulan	35,700,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah SKKL yang rebentuk	Desa		Desa	30 Desa	**1,550,500,000**						30 Desa	**702,000,000**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah mayarakat yang mendapat sosialisasi pencegahan dan pengangulangan bahaya kebakaran dan jumlah masyarakat yang menjadi relawan kebakaran				2000 Orang	950,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masayarakat kab bandung	2000 Orang	351,000,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah SKKL desa yang telah terbentuk relawan Kebakaran				10 Desa	600,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masayarakat kab bandung	10 Desa	351,000,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dukungan sapras untuk SKKL/ relawan kebakaranKebakaran				5 Desa	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masayarakat kab bandung	5 Desa	0	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**05**	**04**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Prosentase pelayanan penyelamatan dan pertolongan yangtidak menimbulkan jiwa	%		%	99 %	**175,000,000**						99 %	**178,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah dukungan sapras untuk SKKL/ relawan kebakaranKebakaranJumlah Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan				12 Bulan	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 Bulan	102,000,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras yang terstandarisasi untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				12 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 Jenis	20,400,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				12 Jenis	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 Jenis	35,700,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur yang terampil /ahli / bersertifikat dalam Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				12 Orang	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat	12 Orang	20,400,000	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TOTAL											**16,996,104,000**							**17,626,104,195**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**73.537.552.712**							**70.947.655.715**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Point		Point	70 Point	**21.660.941.000**						70 Point	**25.756.871.715**	
2	**19**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**300.000.000**						100 %	**402.000.000**	
2	19	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 Dokumen			3 Dokumen	200.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	3 Dokumen	251.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang diselesaikan secara tepat waktu	3 Dokumen			3 Dokumen	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	3 Dokumen	151.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**10.799.194.000**						100 %	**11.892.665.204**	
2	19	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	12 Bulan			12 Bulan	10.709.194.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	12 Bulan	11.779.598.779	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang diselesaikan secara tepat waktu Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen			2 Dokumen	45.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	2 Dokumen	55.500.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen capaianLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Dokumen			12 Dokumen	45.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	12 Dokumen	57.566.425	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**400.000.000**						100 %	**677.000.000**	
2	19	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 Stell			75 Stell	50.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	75 Stell	75.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Monev Penilaian Kinerja Pegawai	3000 Orang Kegiatan			3000 Orang Kegiatan	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3000 Orang Kegiatan	251.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	85 Orang			85 Orang	250.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	85 Orang	351.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1.067.000.000**						100 %	**1.276.413.000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	10 Jenis			10 Jenis	10.000.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Dinas	10 Jenis	17.500.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	56 Jenis			56 Jenis	250.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	56 Jenis	300.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	35 Jenis			35 Jenis	60.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	35 Jenis	79.113.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang dibeli	9 Jenis			9 Jenis	25.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	9 Jenis	30.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	55 Jenis			55 Jenis	150.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	55 Jenis	153.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang dibeli	5349 Eksemplar			5349 Eksemplar	22.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	5349 Eksemplar	25.400.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Tamu	100 Orang Kegiatan			100 Orang Kegiatan	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	100 Orang Kegiatan	120.400.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah dan Luar Daerah	400 Orang Kegiatan			400 Orang Kegiatan	450.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	400 Orang Kegiatan	551.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**3.850.000.000**						100 %	**5.136.000.000**	
2	19	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit			0 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	0 Unit	0	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebeleur yang dibeli	3 Jenis			3 Jenis	25.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	3 Jenis	51.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis			6 Jenis	75.000.000				Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	6 Jenis	85.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Gedung kantor yang akan dibangun	1 Gedung			1 Gedung	3.750.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	1 Gedung	5.000.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**4.919.747.000**						100 %	**5.936.481.011**	
2	19	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dalam satu tahun	500 Materai			500 Materai	7.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	500 Materai	7.383.511	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan			12 Bulan	2.000.573.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	12 Bulan	2.100.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas yang membantu administrasi teknis, perkantoran, kebersihan dan Keamanan	85 Orang			85 Orang	2.912.174.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	85 Orang	3.829.097.500	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**325.000.000**						100 %	**436.312.500**	
2	19	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit			1 Unit	30.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	1 Unit	35.062.500	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	25 Unit			25 Unit	175.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	25 Unit	250.450.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharan Mebel	4 Jenis			4 Jenis	20.000.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Pegawai dan Dinas	4 Jenis	30.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	10 Unit			10 Unit	50.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	10 Unit	60.400.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Gedung			1 Gedung	50.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai dan Dinas	1 Gedung	60.400.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		Orang	80 Orang	**5.985.605.800**						80 Orang	**6.261.500.000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**	2,01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		Orang	80 Orang	**3.035.605.800**						80 Orang	**3.296.500.000**	
2	19	02	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Kepemudaan jumlah hasil karya tulis ilmiah yang bermanfaat bagi pembangunan kepemudaa Jumlah Pemuda pelopor yang dibina Jumlah Produk Unggulan Pemuda yang di Pamerkan	1 Dokumen 62 Dokumen 12 Orang 20 Produk			1 Dokumen 62 Dokumen 12 Orang 20 Produk	450.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	1 Dokumen 62 Dokumen 12 Orang 20 Produk	453.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Bisnis berbasis Online Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan Kewirausahaan	100 Orang 150 Orang			100 Orang 150 Orang	660.605.800	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	100 Orang 150 Orang	653.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti Bhakti Sosial Kepemudaan Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Keimanan dan Ketakwaan sehingga Berwawasan Religius Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Jumlah Pendataan Pontensi Kepemudaan di Kab. Bandung	150 Orang 100 Orang 320 Orang 1 Dokumen			150 Orang 100 Orang 320 Orang 1 Dokumen	550.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	150 Orang 100 Orang 320 Orang 1 Dokumen	553.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2,01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah pemuda yang mengikuti temu wicara pemuda	100 Orang			100 Orang	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	100 Orang	102.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2,01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	jumlah pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan	1 Pembangunan			1 Pembangunan	500.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	1 Pembangunan	655.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	2,01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	jumlah pemuda yang mengikuti DIKLATSARPIM agar memiliki semangat kepemimpinan yang mandiri	75 Orang			75 Orang	75.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	75 Orang	76.500.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan Paskibraka dan Menjadi Anggota Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Bandung	50 Orang			50 Orang	700.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	50 Orang	804.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**02**	2,02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		%	60 %	**2.950.000.000**						60 %	**2.965.000.000**	
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Penerima Hibah Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan Marching Band yang Menjadi Anggota Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Bandung Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan Paduan Suara yang Menjadi Anggota Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Bandung	1 Organisasi 120 Orang 80 Orang			1 Organisasi 120 Orang 80 Orang	2.950.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Pemuda	1 Organisasi 120 Orang 80 Orang	2.965.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		Orang	150 Orang	**44.691.005.912**						150 Orang	**37.578.284.000**	
2	**19**	**03**	2,01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		Orang	150 Orang	**14.626.322.912**						150 Orang	**9.430.000.000**	
2	19	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	jumlah atlet pelajar pecaksilat yang mengikuti Pasanggiri Pencak Silat	150 Atlet			150 Atlet	200.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	150 Atlet	250.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahaan yang menerima Hibah Sarana dan Prasarana Hasil Musrenbang Jumlah Pembangunan Pendukung PORPROV Jabar 2022 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	280 Desa/Kelurahan 5 Pembangunan 10 Pembangunan			280 Desa/Kelurahan 5 Pembangunan 10 Pembangunan	14.426.322.912	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Olahraga	280 Desa/Kelurahan 5 Pembangunan 10 Pembangunan	9.180.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2,02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Atlet		Atlet	150 Atlet	**2.464.683.000**						150 Atlet	**2.700.000.000**	
2	19	03	2,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet remaja yang mengikuti kejuaraan liga remaja tingkat Kabupaten	175 Atlet			175 Atlet	464.683.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	175 Atlet	500.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet ASN yang mengikuti ajang PORPEMDA	100 Atlet			100 Atlet	900.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	100 Atlet	1.000.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berprestasi yang di kirim ke ajang POPDA/POPWILDA Jumlah Kegiatan Pendukung PORPROV Jabar 2022	120 Atlet 1 Kegiatan			120 Atlet 1 Kegiatan	1.100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	120 Atlet 1 Kegiatan	1.200.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2,03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Atlet		Atlet	150 Atlet	**1.200.000.000**						150 Atlet	**1.371.284.000**	
2	19	03	2,03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet yang mengikuti tes kesehatan dan kebugaran Jumlah Jasa Media Promosi keolahragaan	50 Orang 10 Kegiatan			50 Orang 10 Kegiatan	300.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	50 Orang 10 Kegiatan	406.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang di Bina di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Jumlah Organisasi Penerima Hibah	50 Atlet 1 Organisasi			50 Atlet 1 Organisasi	600.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	50 Atlet 1 Organisasi	604.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	2,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah atlet dan Pelatih berprestasi penerima penghargaan Jumlah Kegiatan Pemberian Uang Kadeudeuh Untuk Atlet dan Pelatih PORPROV Jabar, PAPERPROV Jabar, PON Papua, PEPARNAS Papua	4 Orang 4 Kegiatan			4 Orang 4 Kegiatan	125.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	4 Orang 4 Kegiatan	127.500.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen survey pendataan keolahragaan di wilayah kab bandung	1 Dokumen			1 Dokumen	175.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	1 Dokumen	233.784.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2,04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Atlet		Atlet	150 Atlet	**23.300.000.000**						150 Atlet	**20.957.000.000**	
2	19	03	2,04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pelatih yang mengikuti kegiatan BIMTEK Keolahragaan agar memiliki kompetensi sesuai dengan cabang olahraganya	150 Orang			150 Orang	200.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	150 Orang	204.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah atlet dan pelatih yang mengikuti BIMTEK	100 Orang			100 Orang	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	100 Orang	153.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2,04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang menerima bantuan keuangan/hibah sesuai dengan peruntukannya	2 Organisasi			2 Organisasi	23.000.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	2 Organisasi	20.600.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2,05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Atlet		Atlet	150 Atlet	**3.100.000.000**						150 Atlet	**3.120.000.000**	
2	19	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah atlet pelajar tradisional jumlah masyarakat yang mengikuti haornas Jumlah Organisasi Penerima Hibah	50 Atlet 1000 Orang 1 Organisasi			50 Atlet 1000 Orang 1 Organisasi	1.100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	50 Atlet 1000 Orang 1 Organisasi	1.120.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemeliharaan Pendukung PORPROV Jabar 2022 Jumlah Pemeliharaan Venue Sarana dan Prasarana Keolahragaan	12 Bulan 12 Bulan			12 Bulan 12 Bulan	2.000.000.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Olahraga	12 Bulan 12 Bulan	2.000.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah Anggota Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		Orang	25 Orang	**1.200.000.000**						25 Orang	**1.351.000.000**	
2	**19**	**04**	2,01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Anggota Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		Orang	25 Orang	**1.200.000.000**						25 Orang	**1.351.000.000**	
2	19	04	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Penerima Hibah jumlah perwakilan kwartir ranting yang mengikuti sismintir (sistim administrasi kwartir)	1 Organisasi 10 Kwartir			1 Organisasi 10 Kwartir	1.150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Anggota Pramuka	1 Organisasi 10 Kwartir	1.300.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	04	2,01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah pembina dan pelatih dan anggota pramuka yang memiliki sertifikat keahlian	50 Orang			50 Orang	50.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat dan Anggota Pramuka	50 Orang	51.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
TOTAL											**73.537.552.712**							**70.947.655.715**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**33.743.270.000**							**19.566.777.109**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	point		point	74.3 point	**30.339.523.000**						74.3 point	**15.996.625.691**	
2	**12**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	**50.550.000**						100 %	**48.450.000**	
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang diselesaikan tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen	7.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	4 dokumen	7.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan keuangan dan anggaran	4 dokumen			4 dokumen	8.550.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	4 dokumen	2.550.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan perencanaan keuangan dan anggaran	4 dokumen			4 dokumen	2.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	4 dokumen	2.550.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu	9 dokumen			9 dokumen	12.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	9 dokumen	15.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen			1 dokumen	20.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1 dokumen	20.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**9.877.265.000**						100 %	**10.798.346.651**	
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji pegawai	48 orang			48 orang	9.867.265.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	48 orang	10.788.146.651	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	5 dokumen			5 dokumen	10.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	5 dokumen	10.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Aset dalam Kondisi baik	%		%	100 %	**7.500.000**						100 %	**7.650.000**	
2	12	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD	1 kegiatan			1 kegiatan	7.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1 kegiatan	7.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**20.000.000**						100 %	**20.400.000**	
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas, KORPRI, dan pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	0 orang			0 orang	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	0 orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monev pegawai	1 kegiatan			1 kegiatan	10.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1 kegiatan	10.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	48 orang			48 orang	10.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	48 orang	10.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**15.425.350.000**						100 %	**221.340.000**	
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	14 jenis			14 jenis	25.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	14 jenis	25.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	26 jenis			26 jenis	15.190.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	26 jenis	51.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	15 jenis			15 jenis	5.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	15 jenis	5.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan/Minuman Pokok yang dibeli	3 jenis			3 jenis	15.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	3 jenis	15.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang yang dicetak dan digandakan	7 jenis			7 jenis	10.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	7 jenis	10.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	5 jenis			5 jenis	5.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	5 jenis	5.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kendaraan Hias PHBN yang terpenuhi	1 paket			1 paket	5.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1 paket	5.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang terpenuhi	70 OK			70 OK	2.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	70 OK	2.040.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi	217 HOK			217 HOK	93.350.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	217 HOK	51.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah luas ruangan yang difumigasi	1000 m3			1000 m3	75.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1000 m3	51.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan sarana	%		%	0 %	**0**						0 %	**0**	
2	12	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibeli	0 unit			0 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	0 unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibeli	0 unit			0 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	0 unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penunjang operasional kantor yang terpenuhi	%		%	100 %	**4.533.858.000**						100 %	**4.451.639.040**	
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	448 buah			448 buah	5.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	448 buah	5.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan			12 bulan	300.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	12 bulan	408.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pendukung administrasi/teknis perkantoran	1704 OB			1704 OB	4.228.858.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1704 OB	4.038.539.040	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD yang layak pakai	%		%	100 %	**425.000.000**						100 %	**448.800.000**	
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	1 unit			1 unit	20.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1 unit	20.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang terpenuhi	29 unit			29 unit	245.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	29 unit	306.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis Mebeuler yang dipelihara	2 jenis			2 jenis	10.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	2 jenis	20.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki dan Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara	8 jenis			8 jenis	50.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	8 jenis	51.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 gedung			1 gedung	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Disdukcapil	1 gedung	51.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	IKM	pint		pint	85.37 pint	**1.666.500.000**						85.37 pint	**1.699.830.000**	
2	**12**	**02**	2,01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	**1.526.500.000**						100 %	**1.557.030.000**	
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Pendataan Kependudukan	2 dokumen			2 dokumen	286.500.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 dokumen	292.230.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP-el yang diterbitkan	80000 keping 400000 lembar 150000 keping			80000 keping 400000 lembar 150000 keping	1.000.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	80000 keping 400000 lembar 150000 keping	1.020.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pemohon adminduk yang dilayani di luar kantor	85000 pemohon			85000 pemohon	70.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	85000 pemohon	71.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan	48000 dokumen			48000 dokumen	170.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	48000 dokumen	173.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**02**	2,03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipadi dalam tertib Adminduk	%		%	100 %	**140.000.000**						100 %	**142.800.000**	
2	12	02	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pemerintah dan non- pemerintah yang melaksanakan kemitraan dalam penertiban dokumen adminduk	3 lembaga			3 lembaga	40.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 lembaga	10.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	02	2,03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah media sosialisasi yang digunakan	1 media			1 media	10.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 media	10.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti komunikasi dan edukasi adminduk	200 orang			200 orang	90.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	200 orang	122.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	IKM	%		%	95 %	**458.000.000**						95 %	**565.488.000**	
2	**12**	**03**	2,01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%		%	100 %	**290.000.000**						100 %	**394.128.000**	
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Jumlah Akta Perkawinan Non-muslin yang diterbitkan	50000 akta 2100 akta 325 akta			50000 akta 2100 akta 325 akta	200.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	50000 akta 2100 akta 325 akta	204.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pemohon adminduk yang dilayani di luar kantor	15000 pemohon			15000 pemohon	90.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	15000 pemohon	190.128.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**03**	2,02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan dengan Kemenag	%		%	100 %	**168.000.000**						100 %	**171.360.000**	
2	12	03	2,02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah data perkawinan yang tercatat di DISDUKCAPIL	2500 akta			2500 akta	68.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	2500 akta	69.360.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah media sosialisasi yang digunakan	2 media			2 media	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 media	102.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Validitas Data Kependudukan	%		%	100 %	**1.223.247.000**						100 %	**1.247.713.418**	
2	**12**	**04**	2,01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah OPD yang telah bekerjasama untuk memanfaatkan Data Kependudukan	OPD		OPD	31 OPD	**216.291.000**						31 OPD	**220.617.330**	
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah jenis data yang diolah	27 jenis			27 jenis	129.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD di Kabupaten Bandung	27 jenis	131.580.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama yang terjalin dalam hal pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen			5 dokumen	87.291.000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD di Kabupaten Bandung	5 dokumen	89.037.330	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	2,02		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	%		%	100 %	**182.000.000**						100 %	**185.640.000**	
2	12	04	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen regulasi adminduk dan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3 dokumen			3 dokumen	182.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 dokumen	185.640.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	2,03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data	lembaga		lembaga	21 lembaga	**583.652.000**						21 lembaga	**595.325.396**	
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi pendukung SIAK yang terpelihara	3 dokumen			3 dokumen	300.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Pengguna Data Kependudukan	3 dokumen	306.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data	5 lembaga			5 lembaga	157.360.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Pengguna Data Kependudukan	5 lembaga	160.507.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2,03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media sosialisasi yang digunakan	2 media			2 media	86.292.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Pengguna Data Kependudukan	2 media	88.018.196	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabk an	Jumlah dokumen data kependudukan yang disajikan	2 dokumen			2 dokumen	40.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Pengguna Data Kependudukan	2 dokumen	40.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	2,04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah OPD yang telah bekerjasama untuk memanfaatkan Data Kependudukan Persentase Petugas yang kompeten dalam bidang Adminduk	OPD %		OPD %	31 OPD 100 %	**241.304.000**						31 OPD 100 %	**246.130.692**	
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah tenaga pendukung pelayanan adminduk	280 orang			280 orang	200.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pengelola SIAK	280 orang	204.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah pengelola SIAK yang terampil	60 orang			60 orang	41.304.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pengelola SIAK	60 orang	42.130.692	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	OPD		OPD	62 OPD	**56.000.000**						62 OPD	**57.120.000**	
2	**12**	**05**	2,01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Data Profil Perkembangan Kependudukan	data		data	1 data	**56.000.000**						1 data	**57.120.000**	
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil perkembangan kependudukan	1 dokumen			1 dokumen	56.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD Kabupaten Bandung	1 dokumen	57.120.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										TOTAL	**33.743.270.000**							**19.566.777.109**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**258,563,327,400**								**235,137,226,833**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi AKIP PD	Poin		Poin	77 Poin	**180,243,746,000**						77 Poin	**187,231,163,361**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku Persentase pemenuhan proses perencanaan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**324,500,000**						100 % 100 % 100 %	**131,580,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	2 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang diselesaikan tepat pada waktunya				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	10,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang diselesaikan tepat pada waktunyaJumlah Dokumen RKA Perubahan yang diselesaikan tepat pada waktunya				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	10,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang diselesaikan tepat pada waktunya				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	10,200,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA perubahan yang diselesaikan tepat pada waktunya				1 Dokumen	7,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	7,140,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	7,140,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat pada waktunya				4 Dokumen	80,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	4 Dokumen	81,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	- % % %		- % % %	1 - 100 % 100 % 100 %	**171,141,668,000**						1 - 100 % 100 % 100 %	**181,721,639,455**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang dibayarkan gajinya				12 Bulan	170,921,668,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	12 Bulan	181,701,239,455	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	2 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu umlah dokumen CALK				1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen 1 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Aset - BMD	%		%	100 %	**103,000,000**						100 %	**120,000,000**	
1	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD				1 Dokumen	33,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah data untuk penyusunan LBP - BMD				62 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	62 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LBP - BMD				1 Dokumen	55,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**120,000,000**						100 %	**115,100,000**	
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal				100 %	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 %	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Operasional Kantor	%		%	100 %	**940,000,000**						100 %	**117,300,000**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				1 Paket	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Paket	25,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				1 Paket	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Paket	20,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor				12 Bulan	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	0	12 Bulan	20,400,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				1 Paket	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Paket	10,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli				4 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	4 Jenis	10,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan untuk orang yang melakukan kunjungan tamu				12 Bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	12 Bulan	10,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan untuk orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				12 Bulan	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	12 Bulan	20,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Jasa Kantor	%		%	100 %	**6,714,578,000**						100 %	**4,821,543,906**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				700 Lembar	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	700 Lembar	4,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	330,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	353,918,646	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Non ASN Jasa Pelayanan Umum kantor				12 Bulan	6,380,578,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	4,463,545,260	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase aset yang terdata	%		%	100 %	**900,000,000**						100 %	**204,000,000**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				12 Bulan	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	102,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				12 Bulan	500,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	102,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	%		%	100 %	**72,327,354,400**						100 %	**47,304,263,472**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	%		%	100 %	**23,984,008,400**						100 %	**10,583,236,430**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas				1 Unit	984,504,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	4,307,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Poskesdes/Pustu				8 unit	8,187,799,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 unit	3,898,750,008	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan				8 Paket	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	8 Paket	20,400,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat dan Vaksin bermutu sesuai Standar				122 Item	1,818,859,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	122 Item	1,855,236,422	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai				43 Item	12,592,846,400	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	43 Item	501,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase orang yang dibayarkan premi kesehatan bagi masyarakat miskin Persentase pelayanan balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan penanganan sesuai standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja dan olah raga Presentase kejadian krisis kesehatan yang dapat ditanggulangi sesuai standar kesehatan	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**47,923,346,000**					100 % 100 % 100 % 100 %	**26,257,002,592**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil				68566 Ibu Hamil	155,742,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	68566 Ibu Hamil	158,857,733	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin				64333 Ibu Bersalin	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	64333 Ibu Bersalin	153,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				62798 Bayi Baru Lahir	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	62798 Bayi Baru Lahir	153,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan Balita				273336 Balita	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	273336 Balita	153,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah siswa Sekolah Dasar/Setingkat yang mendapat Imunisasi Jumlah siswa Sekolah Dasar/Setingkat yang mendapat Imunisasi				23307 Siswa 421972 Anak	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	23307 Siswa 421972 Anak	153,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Desa yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jumlah orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas dengan ≥ 40% FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi Jumlah Puskesmas yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas Jumlah WUS usia 30–50 tahun mendapatkan skrining kanker sesuai standar				35 Desa 1370248 Orang 45 Puskesmas 62 Puskesmas 45 Puskesmas 322045 WUS	315,698,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	35 Desa 1370248 Orang 45 Puskesmas 62 Puskesmas 45 Puskesmas 322045 WUS	322,012,470	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60tahunke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar				327577 Orang	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	327577 Orang	153,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				662261 Orang	115,466,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	662261 Orang	117,775,320	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				165080 Orang	124,171,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	165080 Orang	126,654,420	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				3755 Orang	168,805,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	3755 Orang	17,218,110	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai				56067 Orang	241,950,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	56067 Orang	246,789,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkanpelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				87240 Orang	210,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	87240 Orang	418,812,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian KLB dengan penduduk terdampak KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				83 Kejadian	70,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	83 Kejadian	73,511,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kejadian dengan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan				40 Kejadian	140,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	40 Kejadian	143,605,800	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pelayanan Balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan penanganan sesuai standar				273336 Balita	750,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	273336 Balita	907,265,520	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga				62 Puskesmas	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	62 Puskesmas	111,121,350	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Frekuensi Inspeksi Kesehatan Lingkungan Jumlah RW yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				170 Kali 412 RW	260,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	170 Kali 412 RW	265,373,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-				100 %	180,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 %	185,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Tradisional				44 Puskesmas	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	44 Puskesmas	250,533,675	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pengamatan surveilans kewaspadaan dini dan respons yang dilakukan verifikasi secara epidemiologi kesehatan dalam waktu ≤ 24 jam				52 Pengamatan	80,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	52 Pengamatan	102,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Fasilitasi Tim Kesehatan Terlaksananya PSC 119				400 Tim Kesehatan	800,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	400 Tim Kesehatan	255,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah penduduk yang dilakukan surveilans epidemiologi dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan				2875 Penduduk	2,000,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	2875 Penduduk	2,550,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Capaian program pengendalian penyakit zoonosis , filariasis , dan kusta sesuai standar				6 Kegiatan	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	6 Kegiatan	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang yang dibayarkan Premi BPJS Kesehatan (PBI APBD) Pasien Penerima Rekomendasi SKTM				203268 Jiwa 704 Pasien	37,621,514,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	203268 Jiwa 704 Pasien	15,828,472,394	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB yang dilakukan pengambilan dan pengiriman ke Lab Rujukan/Nasional				90 Spesimen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	90 Spesimen	25,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Strata penilaian status kabupaten Bandung Sehat				6 Tatanan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	6 Tatanan	204,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kunjungan masyarakat ke fasyankes				2175292 Kunjungan	2,500,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	2175292 Kunjungan	2,550,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kunjungan ke labkesda				6300 Pasien	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	6300 Pasien	102,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tereakreditasi dengan strata Jumlah Fasyankes yang terakreditasi dengan strata Jumlah Fasyankes yang terakreditasi dengan strata Jumlah Fasyankes yang terakreditasi dengan strata				3 RS Paripurna 5 PKM Paripurna 17 PKM Madya 40 PKM Utama	90,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	3 RS Paripurna 5 PKM Paripurna 17 PKM Madya 40 PKM Utama	102,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kejadian KIPI dan pemberian obat masal yang dapat ditanggulangi dan diverifikasi secara surveilans epidemiologi dalam waktu ≤ 24 jam				10 Kejadian	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	10 Kejadian	102,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Frekuensi penyemprotan / Fogging sarang nyamuk				145 Titik	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	145 Titik	76,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Presentase dokumen sistem informasi kesehatan yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan	%		%	100 %	**250,000,000**						100 %	**153,000,000**	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen sistem informasi kesehatan yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan (Profil kesehatan, Simpus, komdat, Buku saku, Informasi publik)				5 Dokumen	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	5 Dokumen	153,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	"Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi"	%		%	100 %	**170,000,000**						100 %	**10,311,024,450**	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit yang visitasi / dibina				9 RS	80,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	9 RS	51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar				9 RS	80,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	9 RS	51,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan BOK				62 Puskesmas	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	62 Puskesmas	10,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Kebijakan teknis yang ditetapkan				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1 Dokumen	9,024,450	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	%		%	80 %	**5,592,227,000**						80 %	**397,800,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP	%		%	80 %	**300,000,000**						80 %	**306,000,000**	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP				1500 Tenaga	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	1500 Tenaga	306,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai jenis yang dipersyaratkan	%		%	100 %	**5,232,227,000**						100 %	**51,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Puskesmas Yang Memiliki Jenis Tenaga kesehatan Sesuai Standar				62 Puskesmas	5,232,227,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	62 Puskesmas	51,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas	%		%	60 %	**60,000,000**						60 %	**40,800,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kompetensi				100 Orang	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	100 Orang	40,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	%		%	82 %	**200,000,000**						82 %	**102,000,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah rekomendasi teknis Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	Sarana		Sarana	98 Sarana	**100,000,000**						98 Sarana	**51,000,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana Farmasi yang dimonitoring dan evaluasi				132 Sarana	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	132 Sarana	51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Produk Olahan Makanan dan Minuman yang telah tersertifikasi layak edar memenuhi syarat	%		%	75 %	**100,000,000**						75 %	**51,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produk olahan makanan dan minuman yang bersertifikasi memenuhi syarat				175 Produk	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	175 Produk	51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	%		%	55 %	**200,000,000**						55 %	**102,000,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase posyandu aktif	%		%	82 %	**100,000,000**						82 %	**51,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa Siaga Aktif (Strata Purnama - Mandiri) Jumlah Informasi (konten) Promosi Kesehatan				154 Desa 22 Konten	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	154 Desa 22 Konten	51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Tangga (RT) yang ber PHBS	%		%	50 %	**100,000,000**						50 %	**51,000,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang ber PHBS				589204 Rumah Tangga	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	589204 Rumah Tangga	51,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,326,145,216**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,326,145,216**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,326,145,216**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,326,145,216	Kab. Bandung, Arjasari, Arjasari	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,953,328,992**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi AKIP PD	Poin		Poin	77 Poin	**2,953,328,992**						77 Poin	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,953,328,992**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				23771 Orang	2,953,328,992	Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	0	23771 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,244,597,366**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,244,597,366**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,244,597,366**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				19184 Orang	2,244,597,366	Kab. Bandung, Banjaran, Banjaran Kulon	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		19184 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,620,179,938**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,620,179,938**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,620,179,938**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	1,620,179,938	Kab. Bandung, Cileunyi, Cileunyi Wetan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,565,050,372**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,565,050,372**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,565,050,372**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				15335 Orang	1,565,050,372	Kab. Bandung, Katapang, Katapang	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		15335 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,853,078,052**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,853,078,052**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,853,078,052**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				26137 Orang	2,853,078,052	Kab. Bandung, Bojongsoang, Cipagalo	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		26137 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,520,806,932**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,520,806,932**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**3,520,806,932**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				15409 Orang	3,520,806,932	Kab. Bandung, Arjasari, Batukarut	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		15409 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,689,697,080**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,689,697,080**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,689,697,080**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				20587 Orang	1,689,697,080	Kab. Bandung, Margahayu, Margahayu Tengah	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		20587 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,440,398,536**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,440,398,536**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,440,398,536**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				16593 Orang	1,440,398,536	Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		16593 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,381,414,162**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,381,414,162**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,381,414,162**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				16164 Orang	1,381,414,162	Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		16164 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**796,534,524**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**796,534,524**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**796,534,524**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				8241 Orang	796,534,524	Kab. Bandung, Cileunyi, Cibiru Hilir	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		8241 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,488,043,052**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,488,043,052**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**4,488,043,052**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				19708 Orang	4,488,043,052	Kab. Bandung, Cicalengka, Cicalengka Wetan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		19708 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,174,180,096**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,174,180,096**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,174,180,096**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				10483 Orang	2,174,180,096	Kab. Bandung, Cimaung, Cikalong	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		10483 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,147,405,704**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,147,405,704**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**3,147,405,704**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				15335 Orang	3,147,405,704	Kab. Bandung, Cikancung, Mandalasari	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		15335 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,105,604,632**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,105,604,632**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,105,604,632**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13098 Orang	2,105,604,632	Kab. Bandung, Majalaya, Majakerta	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13098 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,576,492,638**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,576,492,638**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,576,492,638**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13409 Orang	1,576,492,638	Kab. Bandung, Cilengkrang, Jatiendah	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13409 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,597,049,304**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,597,049,304**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,597,049,304**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				10120 Orang	1,597,049,304	Kab. Bandung, Cikancung, Ciluluk	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		10120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,067,335,574**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,067,335,574**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,067,335,574**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13353 Orang	2,067,335,574	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13353 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,479,100,920**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,479,100,920**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,479,100,920**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				12015 Orang	1,479,100,920	Kab. Bandung, Cimenyan, Cimenyan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		12015 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,606,190,796**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,606,190,796**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,606,190,796**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				20537 Orang	1,606,190,796	Kab. Bandung, Cileunyi, Cinunuk	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		20537 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,601,471,566**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,601,471,566**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**4,601,471,566**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				15348 Orang	4,601,471,566	Kab. Bandung, Ciparay, Ciparay	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		15348 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,797,510,722**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,797,510,722**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,797,510,722**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13903 Orang	1,797,510,722	Kab. Bandung, Paseh, Cipedes	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13903 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,635,104,708**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,635,104,708**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,635,104,708**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				11946 Orang	1,635,104,708	Kab. Bandung, Ciwidey, Ciwidey	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		11946 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,290,454,532**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,290,454,532**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,290,454,532**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				11044 Orang	1,290,454,532	Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Dayeuhkolot	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		11044 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,789,221,594**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,789,221,594**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**3,789,221,594**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				14904 Orang	3,789,221,594	Kab. Bandung, Ibun, Ibun	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		14904 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,092,844,338**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,092,844,338**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,092,844,338**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				21817 Orang	2,092,844,338	Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		21817 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,588,812,048**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,588,812,048**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,588,812,048**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				12606 Orang	2,588,812,048	Kab. Bandung, Kertasari, Cibeureum	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		12606 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,370,115,902**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,370,115,902**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,370,115,902**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				18377 Orang	1,370,115,902	Kab. Bandung, Banjaran, Kiangroke	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		18377 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,786,608,294**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,786,608,294**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,786,608,294**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				25474 Orang	1,786,608,294	Kab. Bandung, Kutawaringin, Kutawaringin	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		25474 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,004,394,534**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,004,394,534**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,004,394,534**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				14763 Orang	2,004,394,534	Kab. Bandung, Kutawaringin, Jatisari	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		14763 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,520,799,080**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,520,799,080**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,520,799,080**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	1,520,799,080	Kab. Bandung, Rancaekek, Linggar	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,929,483,984**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,929,483,984**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,929,483,984**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	2,929,483,984	Kab. Bandung, Majalaya, Majalaya	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,535,045,536**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,535,045,536**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,535,045,536**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	2,535,045,536	Kab. Bandung, Margaasih, Margaasih	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**559,893,990**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**559,893,990**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**559,893,990**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	559,893,990	Kab. Bandung, Margahayu, Magahayu Selatan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,573,190,734**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,573,190,734**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,573,190,734**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	1,573,190,734	Kab. Bandung, Cangkuang, Jatisari	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,919,162,328**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,919,162,328**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,919,162,328**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	2,919,162,328	Kab. Bandung, Nagreg, Nagreg	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,859,223,792**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,859,223,792**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,859,223,792**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	1,859,223,792	Kab. Bandung, Rancaekek, Nanjung Mekar	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,122,322,028**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,122,322,028**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**4,122,322,028**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	4,122,322,028	Kab. Bandung, Pacet, Maruyung	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,165,037,370**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,165,037,370**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,165,037,370**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	1,165,037,370	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Padamukti	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,913,278,510**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,913,278,510**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,913,278,510**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	1,913,278,510	Kab. Bandung, Ciparay, Pakutandang	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,023,295,818**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,023,295,818**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,023,295,818**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	2,023,295,818	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Sukasari	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,053,442,004**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,053,442,004**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,053,442,004**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				0 Orang	2,053,442,004	Kab. Bandung, Pacet, Nagrak	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5,409,924,094**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,409,924,094**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**5,409,924,094**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	5,409,924,094	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,720,171,118**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,720,171,118**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**3,720,171,118**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	3,720,171,118	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,667,961,000**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,667,961,000**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,667,961,000**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	2,667,961,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,457,430,114**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,457,430,114**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,457,430,114**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,457,430,114	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,070,365,084**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,070,365,084**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,070,365,084**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	2,070,365,084	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,082,386,910**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,082,386,910**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**4,082,386,910**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	4,082,386,910	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,315,594,864**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,315,594,864**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,315,594,864**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,315,594,864	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,353,727,562**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,353,727,562**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,353,727,562**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,353,727,562	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,551,615,884**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,551,615,884**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,551,615,884**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,551,615,884	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**849,100,022**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**849,100,022**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**849,100,022**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	849,100,022	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,533,175,448**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,533,175,448**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,533,175,448**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,533,175,448	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,169,883,196**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,169,883,196**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,169,883,196**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	2,169,883,196	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,439,172,832**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,439,172,832**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**2,439,172,832**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	2,439,172,832	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,089,367,996**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,089,367,996**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,089,367,996**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,089,367,996	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,326,780,048**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,326,780,048**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,326,780,048**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,326,780,048	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**841,843,650**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**841,843,650**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**841,843,650**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	841,843,650	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,610,499,304**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,610,499,304**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,610,499,304**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,610,499,304	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,277,971,972**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,277,971,972**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,277,971,972**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,277,971,972	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,234,615,080**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,234,615,080**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,234,615,080**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				13346 Orang	1,234,615,080	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		13346 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,634,575,524**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,634,575,524**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**1,634,575,524**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (BLUD)				14904 Orang	1,634,575,524	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif		14904 Orang	0	DINAS KESEHATAN
										TOTAL	**387,962,836,400**						**235,137,226,833**		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**20,928,305,000**							**18,804,149,489**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Poin		Poin	72 Poin	**17,045,381,000**						72 Poin	**15,370,413,665**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**29,499,000**						100 %	**30,089,592**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan				3 Dokumen	11,319,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	3 Dokumen	11,545,992	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA yang diselesaikan				2 dokumen	3,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	2 dokumen	3,315,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA perubahan dan DPPA yang diselesaikan				2 dokumen	3,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	2 dokumen	3,315,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja yang diselesaikan				4 dokumen	11,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	4 dokumen	11,913,600	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	%		%	100 %	**10,291,513,000**						100 %	**11,560,824,068**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN Diskominfo yang menerima Gaji dan tunjangan				57 orang	10,280,763,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	57 orang	11,549,859,068	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu-jumlah dokumen CALK				1 paket	10,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 paket	10,965,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**39,900,000**						100 %	**40,698,000**	
2	16	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan				4 kegiatan	17,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	4 kegiatan	18,298,800	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				2 kegiatan	11,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	2 kegiatan	12,199,200	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kegiatan bimtek yang dilaksanakan				1 kegiatan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 kegiatan	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**105,402,000**						100 %	**107,510,040**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang tersedia				20 jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	20 jenis	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (ATK, Alat elektronik dan kebersihan)				3 paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	3 paket	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				0 0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	0 0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia				4 jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	4 jenis	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				1 paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 paket	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bacaan yang tersedia				1 tahun	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 tahun	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan material yang tersedia				1 paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 paket	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jamuan makanan dan minuman tamu yang tersedia				300 OK	19,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	300 OK	19,890,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				200 OH	25,902,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	200 OH	26,420,040	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO		0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**6,232,950,000**						100 %	**3,278,250,891**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				1 paket	1,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 paket	1,691,568	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik Jumlah penyediaan layanan internet PD pada lingkup Kabupaten Bandung				12 Bulan 12 Bulan	5,936,553,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	12 Bulan 12 Bulan	2,995,284,123	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah petugas administrasi teknis, perkantoran dan kebersihan				10 orang	294,739,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	10 orang	281,275,200	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase aset dalam kondisi baik	%		%	95 %	**346,117,000**						95 %	**353,041,074**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang terpelihara				27 unit	269,109,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	27 unit	274,492,098	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil operasional yang dipelihara				4 Unit	32,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	4 Unit	32,640,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				5 jenis	35,008,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	5 jenis	35,708,976	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang terpelihara				1 gedung	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISKOMINFO	1 gedung	10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah	%		%	100 %	**326,389,000**						100 %	**332,917,231**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PD yang mengelola informasi publik dengan baik (PPID)	%		%	100 %	**326,389,000**						100 %	**332,917,231**	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media massa dan media sosial				1 dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	1 dokumen	7,140,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah aktivitas penyelenggaraan konten agenda prioritas pemerintah daerah dan pusat melalui media diseminasi informasi				1 dokumen	119,864,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	1 dokumen	122,261,566	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah aduan / aspirasi/informasi masyarakat yang dikelola				12 bulan	72,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	12 bulan	73,440,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah PD yang menyusun daftar informasi publik				80 persen	86,385,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	80 persen	88,112,865	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah fasilitasi penguatan SDM				1 kegiatan	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	1 kegiatan	6,630,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah diseminasi informasi/forum komunikasi informasi				5 kegiatan	34,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	5 kegiatan	35,332,800	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet	%		%	10.69 %	**3,556,535,000**						10.69 %	**3,100,818,593**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	%		%	100 %	**1,629,960,000**						100 %	**1,662,559,218**	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jml (bln) layanan webhosting bandungkab.go.id dan penyediaan lisensi cPanel				12 Bulan	194,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	12 Bulan	197,936,100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan layanan internet PD pada lingkup Kabupaten Bandung Jumlah waktu (bulan) pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi Data Pemkab Bandung				3 paket 12 Bulan	1,435,905,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	3 paket 12 Bulan	1,464,623,118	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Aplikasi penunjang egovernment terbangun dan terpeliharA	Aplikasi		Aplikasi	8 Aplikasi	**1,926,575,000**						8 Aplikasi	**1,438,259,375**	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen/ regulasi kebijakan TIK tersusun				2 dokumen	249,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	2 dokumen	165,860,058	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	jumlah jenis kelengkapan data center				4 paket	228,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	4 paket	233,401,151	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	- Jumlah aplikasi layanan publik dan kepemerintahan yang terintegrasi -Jumlah database aplikasi dan website terpelihara - jumlah data base aplikasi dan website yang terpelihara				3 aplikasi 300 Database	639,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	3 aplikasi 300 Database	270,966,264	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dibangun				8 aplikasi	418,491,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	8 aplikasi	227,431,902	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	- Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan smart city dan jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan smart city				3 paket	105,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	3 paket	183,600,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah SDM TIK yang mendapatkan pelatihan				250 orang	185,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	250 orang	255,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah pelaksanaan monev SPBE				1 kali	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung dan Masyarakat	1 kali	102,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**1,330,827,000**							**1,330,827,932**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaedah Satu Data	%		%	27 %	**1,330,827,000**						27 %	**1,330,827,932**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata	Data		Data	3548 Data	**1,330,827,000**						3548 Data	**1,330,827,932**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral, dokumen data wilayah pendukung dan dokumen analisis statistik				3 dokumen	1,104,287,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat, Desa, Stake Holder, dan Perangkat Daerah	3 dokumen	1,104,287,432	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral				1 dokumen	169,540,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat, Desa, Stake Holder, dan Perangkat Daerah	1 dokumen	169,540,500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah metadata statistik sektoral yang direkomendasikan oleh BPS				1 dokumen	57,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat, Desa, Stake Holder, dan Perangkat Daerah	1 dokumen	57,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**770,896,000**							**970,092,825**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%		%	50 %	**770,896,000**						50 %	**970,092,825**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pejabat yang menerapkan Tandatangan Digital	%		%	50 %	**770,896,000**						50 %	**786,314,325**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi/ kebijakan Keamanan Informasi dan Persandian				3 dokumen	192,795,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung	3 dokumen	196,650,900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- jumlah aplikasi yang telah diuji keamanannya - penyediaan lisensi firewall untuk pengamanan informasi				5 aplikasi 1 paket	397,926,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung	5 aplikasi 1 paket	405,884,925	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase PD yang telah melakukan monitoring, evaluasi dan audit tentang keamanan informasi dan persandian				100 Persen	180,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung	100 Persen	183,778,500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**21**	**02**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen pola hubungan komunikasi	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	**0**						0 Dokumen	**183,778,500**	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah di lingkup Kab. Bandung		183,778,500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
										TOTAL	**23,030,028,000**							**21,105,070,246**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**17,210,675,573**							**18,266,580,890**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Nilai IKM	Point Point		Point Point	74.82 Point 81.77 Point	**9,047,725,000**						74.82 Point 81.77 Point	**10,070,818,841**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan	%		%	100 %	**263,000,000**						100 %	**278,480,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu				5 Dokumen	155,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	5 Dokumen	155,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	8,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP, LKIP, LPPD, LKPJ PD yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu				6 Dokumen	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	6 Dokumen	27,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Dinas (LAPTAH, LAPTRIWULAN)				2 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	2 Dokumen	75,480,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas	%		%	100 %	**6,990,527,000**						100 %	**7,763,729,681**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Diskop UKM				14 Bulan	6,959,027,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	14 Bulan	7,734,413,181	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen kelengkapan verifikasi keuangan dinas				1 Dokumen	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	2,932,500	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	2 Laporan	3,519,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas				1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	2,932,500	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan				1 Dokumen	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	2,932,500	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Laporan	17,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	2 Laporan	17,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD	%		%	100 %	**10,500,000**						100 %	**10,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan/ Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	3,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen inventarisasi aset barang dinas				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian	%		%	100 %	**175,550,000**						100 %	**225,829,000**	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	0 Orang	50,184,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu				3 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	3 Dokumen	5,865,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Laporan	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	2 Laporan	11,730,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Penilain Kinerja Pegawai				1 Laporan	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Laporan	3,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	154,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	38 Orang	154,550,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	0 Orang	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	%		%	20 %	**520,400,000**						20 %	**594,214,720**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				11 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	11 Jenis	17,595,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				63 Jenis	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	63 Jenis	150,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli				7 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	7 Jenis	17,595,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan				12 Jenis	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	12 Jenis	58,101,036	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan (surat kabar lokal, regional dan nasional) yang dibeli				2410 Eksemplar	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	2410 Eksemplar	16,257,780	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang dibeli				1 Jenis	25,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Jenis	29,794,200	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Snack, Makanan dan Minuman untuk Tamu				604 Porsi	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	604 Porsi	21,149,190	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				297 HOK	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	297 HOK	208,722,514	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				81 Poin	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	81 Poin	75,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	%		%	94 %	**6,461,000**						94 %	**6,461,000**	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebeleur yang dibeli				1 Jenis	6,461,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Jenis	6,461,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	%		%	20 %	**551,938,000**						20 %	**662,255,440**	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi , air dan listrik				12 Bulan	47,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	12 Bulan	47,275,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	504,663,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	12 Bulan	614,980,440	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	%		%	94 %	**529,349,000**						94 %	**529,349,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				1 Unit	27,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	1 Unit	27,750,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Roda 2 / Roda 4 yang dipelihara				18 Unit	140,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	18 Unit	140,700,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara				40 Unit	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	40 Unit	6,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang diperbaiki				30 Unit	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	30 Unit	36,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor atau bangunan				4 Jenis	318,899,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Diskop UKM	4 Jenis	318,899,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Koperasi Berizin	%		%	55 %	**125,000,000**						55 %	**127,500,000**	
2	**17**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**76,500,000**	
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi				10 Koperasi	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	10 Koperasi	76,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**02**	2.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**51,000,000**	
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi				5 Koperasi	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	5 Koperasi	51,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Patuh	%		%	20 %	**737,152,000**						20 %	**751,896,325**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%		%	20 %	**737,152,000**						20 %	**751,896,325**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Koperasi Berkualitas Jumlah koperasi yang mengikuti workshop/ pelatihan/ bimtek perkoperasian				41 Koperasi 3 Koperasi 145 Koperasi	408,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	41 Koperasi 3 Koperasi 145 Koperasi	416,645,071	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kepatuhannya Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi				135 Koperasi 3 Koperasi	328,677,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	135 Koperasi 3 Koperasi	335,251,254	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi Sehat	%		%	20 %	**303,050,000**						20 %	**309,111,714**	
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase KSP/USP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	%		%	20 %	**303,050,000**						20 %	**309,111,714**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kesehatannya				75 Koperasi	203,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	75 Koperasi	207,111,714	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi sehat				3 Koperasi	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	3 Koperasi	102,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%		%	13.2 %	**890,587,000**						13.2 %	**890,587,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan koperasi	%		%	100 %	**890,587,000**						100 %	**890,587,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pra koperasi yang mengikuti kegiatan pemahaman perkoperasian Jumlah SDM koperasi yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi				46 Pra Koperasi 80 Orang	890,587,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	46 Pra Koperasi 80 Orang	890,587,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**05**	2.02		**Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**0**							**0**	
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM						0							0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	% %		% %	0,5 % 0.5 %	**1,115,967,000**						0,5 % 0.5 %	**1,115,967,000**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koperasi yang diberdayakan	%		%	100 %	**1,115,967,000**						100 %	**1,115,967,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi hasil produk usaha koperasi Jumlah koperasi penerima akses permodalan yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah koperasi yang difasilitasi kelembaga permodalan Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan dengan pihak lain (antar koperasi, perusahaan dan buyer)				3 Koperasi 100 Koperasi 195 Koperasi 30 Koperasi	1,115,967,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Koperasi di Kabupaten Bandung	3 Koperasi 100 Koperasi 195 Koperasi 30 Koperasi	1,115,967,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Kapasitas Usaha Mikro Persentase Kapasitas Usaha Mikro	% %		% %	4,25 % 4.25 %	**1,447,544,000**						4,25 % 4.25 %	**1,457,049,437**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase UMKM yang diberdayakan	%		%	4 %	**1,447,544,000**						4 %	**1,457,049,437**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya				1 Dokumen	221,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	1 Dokumen	225,930,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMD atau Perusahaan Besar				293 UMKM	783,451,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	293 UMKM	783,451,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi Perizinan Usaha Mikro				100 UMKM	253,727,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	100 UMKM	258,802,050	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan UMKM				2 Kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	100,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan bagi UMKM				3 Kegiatan	88,866,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	3 Kegiatan	88,866,387	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Kualitas Usaha Mikro	%		%	10 %	**3,543,650,573**						10 %	**3,543,650,573**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	''Persentase Usaha Mikro yang fasilitasi pengembangan Usaha	%		%	10 %	**3,543,650,573**						10 %	**3,543,650,573**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi produk bagi UMKM Jumlah UMKM yang mengikuti inkubasi bisnis bagi UMKM jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan jumlah UMKM yang mengikuti Pendampingan bagi UMKM				4 Kegiatan 100 UMKM 500 UMKM 100 UMKM	3,543,650,573	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	4 Kegiatan 100 UMKM 500 UMKM 100 UMKM	3,543,650,573	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
									TOTAL	**17,210,675,573**								**18,266,580,890**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**69,085,218,354**							**64,139,555,951**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Poin		Poin	77,5 Poin	**41,778,724,000**						77,5 Poin	**43,352,691,372**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**61,000,000**						100 %	**62,220,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Penyelenggaraan Forum PD				2 Dokumen 1 Kegiatan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	2 Dokumen 1 Kegiatan	25,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	1 Dokumen	4,080,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	1 Dokumen	4,080,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	1 Dokumen	4,080,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	1 Dokumen	4,080,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diselesaikan secara tepat waktu				3 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	3 Dokumen	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	4 Dokumen	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan PD	%		%	100 %	**25,399,662,000**						100 %	**27,348,255,912**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan				2080 Orang/Bulan	25,389,662,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	2080 Orang/Bulan	27,338,055,912	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	2 Dokumen	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian PD	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**10,200,000**	
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan evaluasi Pegawai				1 Kegiatan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	1 Kegiatan	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum PD	%		%	100 %	**77,765,000**						100 %	**79,320,300**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				10 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	10 Jenis	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli				3 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	3 Jenis	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	0 Jenis	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli				3 Jenis	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	3 Jenis	5,610,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				2 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	2 Jenis	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				5 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	5 Jenis	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu				350 Dus	8,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	350 Dus	8,415,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				50 HOK	24,015,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Intenral PD	50 HOK	24,495,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**14,947,847,000**						100 %	**14,534,396,160**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				2000 Buah	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	2000 Buah	5,100,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	12 Bulan	306,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Pegawai Non PNS				4488 Orang/Bulan	14,642,847,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	4488 Orang/Bulan	14,223,296,160	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%		%	100 %	**292,450,000**						100 %	**308,499,000**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan dan operasional yang dipelihara				1 Unit	32,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	1 Unit	33,150,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				122 Unit	219,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	122 Unit	224,349,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				7 Jenis	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	7 Jenis	30,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	3 Paket	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor				3 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal PD	3 Paket	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Penyelenggaraan pelayanan BLUD Laboratorium Lingkungan	%		%	100 %	**990,000,000**						100 %	**1,009,800,000**	
2	11	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Tahun	990,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten, Pengguna Jasa Pengujian Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	1,009,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kebijakan terkait lingkungan hidup yang diimplementasikan	%		%	100 %	**70,000,000**						100 %	**71,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase capaian kegiatan terkait RPPLH Kabupaten Bandung yang dilaksanakan	%		%	100 %	**70,000,000**						100 %	**71,400,000**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah RPPLH kabupaten yang disusun dan ditetapkan				1 Kegiatan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	40,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan SPPL Jumlah Monev Dokumen Lingkungan				50 Dokumen 25 Kegiatan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	50 Dokumen 25 Kegiatan	30,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Nilai Indeks Kualitas Air Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nilai Indeks Kualitas Udara	Poin Poin Poin		Poin Poin Poin	29 Poin 53.90 Poin 78 Poin	**1,623,873,000**						29 Poin 53.90 Poin 78 Poin	**468,363,957**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Air Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara	Lokasi Lokasi		Lokasi Lokasi	20 Lokasi 20 Lokasi	**671,323,000**						20 Lokasi 20 Lokasi	**219,658,540**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah laporan hasil uji kualitas air Jumlah laporan hasil uji kualitas udara				60 laporan 80 laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	60 laporan 80 laporan	102,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Bimtek KSDA Jumlah Bimtek Proklim Jumlah Instalasi KSDA (IPAH) Jumlah Instalasi KSDA (Sumur Resapan) yang terbangun Jumlah terbentuknya Kampung Iklim				3 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Unit 27 Unit 6 Lokasi	501,323,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Unit 27 Unit 6 Lokasi	46,258,540	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas akomodasi pelanggan Jumlah sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan Persentase ketersediaan alat uji terhadap parameter baku mutu Persentase SDM terhadap analisis beban kerja				0 0 0 0 62 Persen 0 0	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 0 0 0 62 Persen 0 0	71,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase lokasi pencemaran yang ditanggulangi	%		%	100 %	**214,872,000**						100 %	**161,444,417**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Penyusunan Dokumen IKPLHD				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	0	1 Dokumen	102,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran yang Di isolasi				1 Lokasi	84,872,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	0	1 Lokasi	28,844,417	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sosialisasi penerapan produksi bersih ramah lingkungan				1 Sosialisasi	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	0	1 Sosialisasi	30,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Luas pertambahan penanaman pohon	Ha		Ha	7 Ha	**737,678,000**						7 Ha	**87,261,000**	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Bibit MPTS dan Kayu-kayuan Jumlah Pemelihara Persemaian Jumlah Persemaian yang terbangun Jumlah Sosialiasi Penanaman				7544 Polibag 6 Orang 7 Lokasi 24 Kegiatan	737,678,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	7544 Polibag 6 Orang 7 Lokasi 24 Kegiatan	87,261,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Luas Kehati Vegetasi non hutan	%		%	100 %	**69,190,000**						100 %	**70,573,800**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	%		%	100 %	**69,190,000**						100 %	**70,573,800**	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah pengelolaan taman keanekaragaman hayati				1 Lokasi	69,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Lokasi	70,573,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki ijin PPLH (Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)	%		%	100 %	**123,006,000**						100 %	**125,466,120**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki ijin PPLH	%		%	100 %	**123,006,000**						100 %	**125,466,120**	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha/Kegiatan yang terpenuhi dalam pemrosesan Izin PPLH				30 usaha/kegiatan	23,006,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	30 usaha/kegiatan	23,466,120	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Jumlah verifikasi lapangan usaha/kegiatan				1 Kegiatan 100 Kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan 100 Kegiatan	102,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase penyediaan data hasil peran serta masyarakat dalam rangka edukasi lingkungan dan pengawasan sosial di bidang PPLH berbasis kearifan lokal	%		%	100 %	**342,083,000**						100 %	**236,640,000**	
2	**11**	**07**	2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	Jumlah data hasil edukasi lingkungan berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Badega Lingkungan Jumlah data hasil pengawan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Badega Lingkungan	Kegiatan Titik		Kegiatan Titik	120 Kegiatan 1200 Titik	**342,083,000**						120 Kegiatan 1200 Titik	**236,640,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah edukasi lingkungan dan kemitraan dalam rangka PPLH				5 segmen	342,083,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	5 segmen	236,640,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase desa yang mendapatkan kampung Bedas	%		%	41 %	**171,905,000**						41 %	**175,343,100**	
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase desa yang mendapatkan Kampung Bedas	%		%	41 %	**171,905,000**						41 %	**175,343,100**	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah pendampingan desa yang mendapatkan kampung saber Jumlah Sosialisasi adiwiyata				2 Kegiatan 1 Kegiatan	171,905,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Kegiatan 1 Kegiatan	175,343,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Nilai Adipura	Poin		Poin	70 Poin	**50,000,000**						70 Poin	**51,000,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan Adipura Kabupaten Bandung	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**51,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi kegiatan adipura Jumlah Penyusunan data isian non Fisik				2 Kegiatan 1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Kegiatan 1 Dokumen	51,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyediaan data penegakan hukum lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	%		%	100 %	**160,000,000**						100 %	**163,200,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan penegakan hukum lingkungan Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH	% %		% %	100 % 100 %	**160,000,000**						100 % 100 %	**163,200,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan Masyarakat dan/atau sengketa dibidang Lingkungan Hidup				25 Pengaduan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	25 Pengaduan	61,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan (sanksi adinistratif, perdata, dan/atau pidana/ penyidikan)				20 Perusahaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	20 Perusahaan	102,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Volume Sampah yang terkelola	%		%	65 %	**24,696,437,354**						65 %	**19,424,877,602**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	% %		% %	42 % 23 %	**24,696,437,354**						42 % 23 %	**19,424,877,602**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Jakstrada Jumlah Monev TPS 3R				1 Kegiatan 7 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan 7 Unit	10,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah volume sampah yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali				3600 ton	250,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	3600 ton	255,671,634	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengangkutan sampah per hari dari operasional UPTD Baleendah Jumlah tonase pengangkutan sampah per hari dari operasional UPTD Ciparay Jumlah tonase pengangkutan sampah per hari dari operasional UPTD Rancaekek Jumlah tonase pengangkutan sampah per hari dari operasional UPTD Soreang Jumlah tonase pengangkutan sampah per hari dari operasional URC (terpisah dengan UPTD)				20.88 ton 10.483 ton 20.16 ton 24.36 ton 48.744 ton	16,314,567,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	20.88 ton 10.483 ton 20.16 ton 24.36 ton 48.744 ton	16,640,859,015	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan persampahan				950 Orang	832,183,800	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	950 Orang	96,793,716	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				6 Jenis	7,289,028,554	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	Masyarakat Kabupaten Bandung	6 Jenis	2,421,353,237	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									TOTAL	**69,085,218,354**								**64,139,555,951**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**17,127,228,200**							**17,112,418,995**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Nilai SAKIP	% poin		% poin	86 % 80,76 poin	**11,787,455,000**						86 % 80,76 poin	**12,783,595,982**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		%	100 %	**105,000,000**						100 %	**107,100,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu				2 dokumen	85,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN	2 dokumen	86,700,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rapat/desk terkait perencanaan dan pelaporan				1 kali	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN	1 kali	15,300,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan secara tepat waktu				7 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN	7 dokumen	5,100,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		%	100 %	**9,109,091,000**						100 %	**10,085,573,982**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	9,095,871,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN	12 bulan	10,072,089,582	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN	1 dokumen	2,040,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semster SKPD				12 laporan	11,220,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN	12 laporan	11,444,400	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibayarkan pajaknya Persentase penunjang kerja aparatur	% %		% %	100 % 100 %	**50,000,000**						100 % 100 %	**51,000,000**	
2	09	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah rapat koordinasi bulanan				12 kali	50,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 kali	51,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	%		%	100 %	**667,500,000**						100 %	**679,850,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang dibeli				1 paket	20,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	1 paket	20,400,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perelatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				2 paket	350,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	2 paket	357,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				2 paket	60,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	2 paket	61,200,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang dibeli				1 paket	30,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	1 paket	30,600,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUmlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				2 paket	110,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	2 paket	112,200,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang dibeli				3400 eksemplar	17,500,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	3400 eksemplar	17,850,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang dibeli				2 paket	30,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	2 paket	30,600,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				100 HOK	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	100 HOK	50,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	%		%	100 %	**600,000,000**						100 %	**612,000,000**	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur tersedia				1 paket	200,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	BMD	1 paket	204,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau banguan lainnya yang dibangun				2 paket	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	BMD	2 paket	408,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	%		%	100 %	**775,864,000**						100 %	**758,472,000**	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 bulan	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	12 bulan	255,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				20 unit	40,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	20 unit	40,800,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUmlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	485,864,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Operasional kantor	12 bulan	462,672,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	%		%	100 %	**480,000,000**						100 %	**489,600,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara				1 unit	30,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	BMD	1 unit	30,600,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				42 unit	250,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	BMD	42 unit	255,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab/dipelihara				2 paket	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	BMD	2 paket	204,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	%		%	20 %	**442,500,000**						20 %	**428,400,000**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik (kumulatif)	unit		unit	42 unit	**442,500,000**						42 unit	**428,400,000**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Terfasilitasi				3 unit	442,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	poktan, gapoktan	3 unit	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur logistik				0 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	poktan, gapoktan	0 paket	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan				0 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	poktan, gapoktan	0 paket	122,400,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan pangan utama	%		%	100 %	**4,247,273,200**						100 %	**3,237,423,013**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase simpul pangan di desa yang aktif	%		%	45 %	**698,772,200**						45 %	**502,599,127**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan				0 dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	PUPM, LDPM, TTI	0 dokumen	51,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah fasilitasi penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal				1 paket	58,077,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	PUPM, LDPM, TTI	1 paket	51,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan yang dilaksanakan				1 paket	71,744,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	PUPM, LDPM, TTI	1 paket	73,179,127	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan rekomendasi bulanan pasokan dan harga pangan				12 laporan	170,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	PUPM, LDPM, TTI	12 laporan	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi paangan masyarakat terfasilitasi				2 PUPM	121,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	PUPM, LDPM, TTI	2 PUPM	123,420,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah TTI yang terfasilitasi				2 TTI	277,951,200	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	PUPM, LDPM, TTI	2 TTI	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase penguatan cadangan pangan	%		%	30 %	**1,931,199,000**						30 %	**1,969,823,886**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pengendalian cadangan pangan yang dilaksanakan				1 paket	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat rentan rawan pangan	1 paket	51,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah kajian ketersediaan pangan tersedia tepat waktu				1 dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat rentan rawan pangan	1 dokumen	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah CPPD tersedia				100 ton	1,731,199,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat rentan rawan pangan	100 ton	1,765,823,886	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal	%		%	100 %	**1,617,302,000**						100 %	**765,000,000**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah kajian pola dan kebutuhan konsumsi pangan tersedia tepat waktu				2 dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	KWT, TTI, masyarakat	2 dokumen	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal				10 KWT	1,167,302,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	KWT, TTI, masyarakat	10 KWT	510,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun yang dilaksanakan				1 paket	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	KWT, TTI, masyarakat	1 paket	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penurunan desa rawan pangan yang tertangani	%		%	100 %	**400,000,000**						100 %	**408,000,000**	
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	0		0	0 0	**50,000,000**						0 0	**51,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah pemutakhiran laporan SKPG-FSVA tersedia tepat waktu				1 dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Kabupaten Bandung	1 dokumen	51,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase daerah rawan pangan tersalurkan CPPD Persentase KK miskin yang tertangani	0 %		0 %	0 0 100 %	**350,000,000**						0 0 100 %	**357,000,000**	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan				12 laporan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	masyarakat rawan pangan, balita stunting	12 laporan	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK miskin yang terintervensi				1000 kk	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	masyarakat rawan pangan, balita stunting	1000 kk	204,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%		%	>80 %	**250,000,000**						>80 %	**255,000,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sertfikasi PSAT (kumulatif)	pelaku		pelaku	91 pelaku	**250,000,000**						91 pelaku	**255,000,000**	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang/poktan yang dilatih				31 orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	pelaku usaha pangan	31 orang	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT yang diuji mutu dan keamanan pangan				1 paket	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	pelaku usaha pangan	1 paket	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**5,706,722,000**							**3,965,714,427**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap	% %		% %	100 % 3 %	**175,000,000**						100 % 3 %	**178,500,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase perairan umum yang ditebar	0		0	0 0	**175,000,000**						0 0	**102,000,000**	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi penebaran ikan (restoking ikan)				2 lokasi	175,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pokmaswas, Perairan Umum	2 lokasi	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perairan umum yang ditebar ikan	%		%	2 %	**0**						2 %	**76,500,000**	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapat sosialisasi akses bantuan pembiayaan				0 orang	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pokmaswas	0 orang	76,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	%		%	2.06 %	**4,474,092,000**						2.06 %	**3,228,214,427**	
3	**25**	**04**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi Nomor Izin Berusaha (NIB) perikanan	NIB		NIB	20 NIB	**145,000,000**						20 NIB	**91,800,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Julmlah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan ditetapkan				0 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku usaha perikanan	0 paket	0	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Nomor Izin Berusaha (NIB) perikanan				20 NIB	145,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pelaku usaha perikanan	20 NIB	91,800,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Cakupan bina kelompok perikanan	kelompok		kelompok	45 kelompok	**2,720,355,000**						45 kelompok	**943,500,000**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi				45 kelompok	2,366,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih Ikan	45 kelompok	612,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan fasilitasi kelembagaan				3 kelas	179,160,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih Ikan	3 kelas	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapat sosialisasi akses bantuan pembiayaan				30 orang	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih Ikan	30 orang	76,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang difasilitasi pendampingan				150 orang	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih Ikan	150 orang	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Produksi ikan	ton		ton	15786.24 ton	**1,608,737,000**						15786.24 ton	**2,192,914,427**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi pembudidayaan ikan				12 laporan	76,327,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	12 laporan	77,854,427	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan prasarana pembudidayaan ikan				18 paket	519,260,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	18 paket	1,258,260,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah induk ikan lele unggul tersedia Jumlah induk ikan mas unggul tersedia Jumlah induk ikan nila tersedia				50 paket 800 kg 20 paket	623,150,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	50 paket 800 kg 20 paket	459,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring kesehatan ikan yang diselesaikan tepat waktu				12 laporan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	12 laporan	132,600,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi penerapan CPIB, CBIB				10 kelompok	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	10 kelompok	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat tersedia				0 dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	0 dokumen	61,200,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat tersedia				0 dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Pembudidaya ikan, UPR, Pembenih ikan	0 dokumen	102,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0**								**0**	
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**						**0**								**0**	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dilaksanakan				0 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		0 paket	0	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	%		%	2.06 %	**1,057,630,000**						2.06 %	**559,000,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif)	%		%	20 %	**75,000,000**						20 %	**100,000,000**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pengolahan yang dikeluarkan tepat waktu				2 dok	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku usaha perikanan	2 dok	100,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah produk perikanan yang tersertifikasi mutu dan aman (akumulasi)	0		0	0 0	**75,000,000**						0 0	**153,000,000**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah yang dilatih Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan diversifikasi nilai tambah pengolahan ikan				30 orang	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Poklahsar	30 orang	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Produksi hasil olahan perikanan Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton 0		ton 0	18333 ton 0 0	**907,630,000**						18333 ton 0 0	**306,000,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye/ promosi/kampanye produk perikanan				1 kali	205,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Poklahsar, masyarakat	1 kali	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pelaku usaha pengolahan ikan				2 kegiatan	702,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Poklahsar, masyarakat	2 kegiatan	153,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
									TOTAL	**22,833,950,200**							**21,078,133,422**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**4,707,565,110**							**3,050,473,918**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	%		%	10 %	**2,343,782,450**						10 %	**1,534,600,000**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Borang Kebudayaan yang terkelola	%		%	100 %	**605,000,000**						100 %	**616,600,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2 Borang	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Borang	484,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang di bina				50 orang	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kabupaten Bandung	50 orang	132,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	prosentase Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	%		%	100 %	**1,588,782,450**						100 %	**765,000,000**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Bantuan sarana prasarana kesenian yang di serahkan kepada masyarakat(Paguron Pusaka Kujang Kencana dan Paguron Sinar Siliwangi) Top down Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				200 Buah 2 Borang	889,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	200 Buah 2 Borang	561,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina				1 Kegiatan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	204,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kelompok seni yang di berikan penghargaan berupa fasilitasi pagelaran seni budaya bagi yang berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan Jumlah seniman budayawan yang berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan				8 Pagelaran 0 Seniman / Budayawan	499,157,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabupaten Bandung	8 Pagelaran 0 Seniman / Budayawan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase lembaga adat yang terbina	%		%	10 %	**150,000,000**						10 %	**153,000,000**	
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				1 Kegiatan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Lembaga Adat	1 Kegiatan	153,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	%		%	10 %	**1,352,632,660**						10 %	**484,500,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lingkung Seni yang aktif	%		%	10 %	**1,352,632,660**						10 %	**484,500,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				4 Pelatihan	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	4 Pelatihan	484,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				600 Peserta	877,632,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabupaten Bandung	600 Peserta	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitas Tata Kelolanya				1 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	%		%	10 %	**641,150,000**						10 %	**653,973,918**	
2	**22**	**04**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sejarah Lokal yang terkelola	%		%	10 %	**641,150,000**						10 %	**653,973,918**	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Bandung yang diberdayakan				1 Kegiatan	56,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	masyarakat kabupaten bandung	1 Kegiatan	57,783,918	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Kegiatan	462,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	masyarakat kabupaten bandung	1 Kegiatan	471,240,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah yang tersedia				1 Kegiatan	122,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	masyarakat kabupaten bandung	1 Kegiatan	124,950,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	%		%	10 %	**370,000,000**						10 %	**377,400,000**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Prosentase Cagar Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan	%		%	10 %	**70,000,000**						10 %	**71,400,000**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya				0 Objek	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	0 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang telah didaftarkan dan akan ditetapkan				5 Cagar Budaya	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	5 Cagar Budaya	71,400,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	Cagar Budaya		Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	**300,000,000**						10 Cagar Budaya	**306,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang lindungi				111 Objek	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Cagar Budaya dan Juru Pelihara Cagar Budaya	111 Objek	306,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Terbangunnya museum sejarah Daerah	Museum		Museum	0 Museum	**0**						0 Museum	**0**	
2	**22**	**06**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah Museum yang terkelola	Museum		Museum	0 Museum	**0**						0 Museum	**0**	
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Museum yang terbangun				0 museum	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Benda Benda Koleksi Museum dan Bangunan Museum Daerah	0 museum	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**23,711,680,790**							**21,819,504,995**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai LAKIP DISPARBUD	Point		Point	76 Point	**13,994,949,000**						76 Point	**14,732,567,411**	
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**222,000,000**						100 %	**283,560,000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen resntra dan renja yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	2 Dokumen	51,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 Dokumen	2,040,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 Dokumen	2,040,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 Dokumen	2,040,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 Dokumen	2,040,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	14,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 Dokumen	20,400,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kajian kawasan GBS menjadi BLUD dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	2 Dokumen	204,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan Pelayanan administrasi Keuangan Perangkat daerah	%		%	100 %	**8,303,639,000**						100 %	**9,156,463,664**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	8,290,639,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	12 Bulan	9,149,323,664	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun Yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu				1 dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 dokumen	3,060,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan/Semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu				2 dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	2 dokumen	2,040,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran				2 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	2 dokumen	2,040,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**26**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Prosentase Pemenuhan administrasi BMD di DISPARBUD	%		%	100 %	**58,000,000**						100 %	**8,160,000**	
3	26	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 dokumen	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset DSIAPRBUD	2 dokumen	1,020,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Monitoring pengawasan kondisi Barang Milik Daerah yang terdata / tercatat				12 dokumen	57,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset DSIAPRBUD	12 dokumen	7,140,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**6,202,000**						100 %	**6,120,000**	
3	26	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Retribusi Daerah				12 dokumen	6,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	12 dokumen	6,120,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**457,000,000**						100 %	**516,720,000**	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan				200 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	200 Unit	30,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan				7 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	7 Jenis	153,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan				6 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	6 Jenis	20,400,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang disediakan				50 Buah	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	50 Buah	40,400,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan yang disediakan				7 Jenis	81,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	7 Jenis	82,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				1000 Eksemplar	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	DISPARBUD	1000 Eksemplar	6,120,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan				15 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	15 Unit	30,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				1500 dus	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DISPARBUD	1500 dus	51,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan koordinas skpd				150 OH	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	150 OH	102,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	0 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase Pemenuhan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**125,000,000**						100 %	**25,000,000**	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				8 Unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	8 Unit	25,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin yang disediakan				5 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	5 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang diadakan				5 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	5 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**4,413,108,000**						100 %	**4,165,343,747**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik				12 Bulan	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	12 Bulan	867,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Bulan	3,563,108,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	12 Bulan	3,298,343,747	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pemenuhan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**410,000,000**						100 %	**571,200,000**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	12 Bulan	51,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara				12 Bulan	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	12 Bulan	214,200,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	0 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin yang diservis/diperbaiki				25 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	25 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara				20 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	20 Unit	51,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara				1 Lokasi	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DISPARBUD	1 Lokasi	255,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Desa Wisata yang ditata Jumlah Destinasi	Desa Wisata ODTW		Desa Wisata ODTW	1 Desa Wisata 0 ODTW	**2,525,351,000**						1 Desa Wisata 0 ODTW	**2,570,978,850**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase Daya tarik wisata yang dikelola	%		%	10 %	**0**						10 %	**175,950,000**	
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang tersusun				0 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	ODTW dan Desa Wisata	0 dokumen	175,950,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Kawasan strategis pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	%		%	10 %	**1,167,000,000**						10 %	**1,190,340,000**	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bandung				1 dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Desa Wisata dan ODTW	1 dokumen	255,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Bandung				1 Lokasi	767,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Desa Wisata dan ODTW	1 Lokasi	782,340,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bandung				50 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Desa Wisata dan ODTW	50 Orang	153,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	%		%	10 %	**1,258,351,000**						10 %	**1,102,688,850**	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bandung yang tersusun				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	ODTW dan Desa Wisata	1 Dokumen	255,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam yang diadakan /dipelihara/diRehabilitasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bandung				1 Lokasi	721,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	ODTW dan Desa Wisata	1 Lokasi	735,807,600	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten bandung yang dikembangkan				1 Kegiatan	177,284,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	ODTW dan Desa Wisata	1 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bandung				1 Kegiatan	109,687,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	ODTW dan Desa Wisata	1 Kegiatan	111,881,250	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**102,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota yang terlayani				10 Usaha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Pengusaha Pariwisata	10 Usaha	102,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	%		%	10 %	**1,825,440,000**						10 %	**1,502,399,004**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**1,825,440,000**						2 kegiatan	**1,502,399,004**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	824,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	wisatawan nusantara dan mancanegara	2 Kegiatan	481,440,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bandung yang terFasilitasi				2 Event	550,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	wisatawan nusantara dan mancanegara	2 Event	561,959,004	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri yang di tingkatkan				1 Kegiatan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	wisatawan nusantara dan mancanegara	1 Kegiatan	204,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah PKS Pengembangan Pariwisata / Kebudayaan yang terjalin				2 PKS	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	wisatawan nusantara dan mancanegara	2 PKS	255,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	%		%	2 %	**230,000,000**						2 %	**255,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**26**	**04**	2.01		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah creative Hub yang terbentuk	Creative Hub		Creative Hub	1 Creative Hub	**200,000,000**						1 Creative Hub	**255,000,000**	
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi				1 Kegiatan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	255,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**04**	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah creative Hub yang terbentuk Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf	Creative HUB Komunitas		Creative HUB Komunitas	1 Creative HUB 1 Komunitas	**30,000,000**						1 Creative HUB 1 Komunitas	**0**	
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Sektor Ekraf				0 Kegiatan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Pengembangan Sistem Pemasaran pada Sektor Ekraf				0 Kegiatan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	04	2.02	06	Pemberian Insentif	Jumlah Pemberian Insentif untuk Pelaku Ekraf				0 Kegiatan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	0 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekraf				1 Kegiatan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	%		%	10 %	**5,135,940,790**						10 %	**2,758,559,730**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	Orang		Orang	500 Orang	**5,115,940,790**						500 Orang	**2,758,559,730**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya				100 orang	375,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 orang	382,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Partisipasi Peningkatan Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				1 Kegiatan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	30,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan yang terlaksana				20 Pelatihan	1,404,509,730	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat Kabupaten Bandung	20 Pelatihan	1,404,509,730	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata				1 Kegiatan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	127,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi				2 Kegiatan	897,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	507,450,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang terFasilitasi Pengembangan Kompetensinya				1500 Orang	2,113,931,060		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1500 Orang	306,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**05**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf	Orang		Orang	100 Orang	**20,000,000**						100 Orang	**0**	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Sektor Ekraf				1 Kegiatan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Dukungan Penyediaan Fasilitas untuk Pelaku Ekraf dalam Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Kegiatan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
										TOTAL	**28,419,245,900**							**24,869,978,913**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**349,845,260,196**							**224,046,349,367**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SKIP PD	persen		persen	80 persen	**82,289,145,000**						80 persen	**91,111,349,026**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan	persen		persen	100 persen	**545,000,000**						100 persen	**546,000,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Dokumen	225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	51,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlahdokumen Perubhana RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				2 Dokumen 3 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Dokumen 3 Laporan	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	persen		persen	100 persen	**35,730,017,000**						100 persen	**38,767,655,721**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	35,475,017,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	38,512,655,721	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen 1 Laporan	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Laporan	85,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				12 Laporan	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	85,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	85,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terdata	persen		persen	100 persen	**250,000,000**						100 persen	**253,000,000**	
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	51,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan barang milik daerah				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	51,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	51,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	persen		persen	100 persen	**520,400,000**						100 persen	**1,411,050,000**	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				468 Stel	140,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	468 Stel	985,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi pegawai				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Laporan	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja				1 Laporan	25,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Laporan	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal				200 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	200 Orang	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				62 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	62 Orang	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				62 Orang	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	62 Orang	151,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	persen		persen	100 persen	**3,595,460,000**						100 persen	**3,180,303,768**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				7 Jenis	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Jenis	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli				15 Jenis 10 Jenis	1,060,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Jenis 10 Jenis	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeliyang dibeli				20 Jenis	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Jenis	197,714,568	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli				7 Jenis	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Jenis	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				10 Jenis	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Jenis	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan				12 Bulan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang dibeli				4 Jenis	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	4 Jenis	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				50 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				60 Orang	100,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Orang	26,989,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	**766,000,000**						100 persen	**5,213,610,000**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli				2 Unit	66,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	321,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Alat Berat yang dibeli				1 Unit	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	4,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				4 Jenis	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Jenis	109,520,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibeli				3 Jenis	105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis	61,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1 Lokasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Lokasi	121,890,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**38,840,919,000**						100 persen	**39,820,751,924**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				2 Jenis	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Jenis	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	31,179,852,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	32,426,363,924	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa / diadakan				4 Alat	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Alat	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan pembayaran tenaga pendukung teknis dan administrasi tugas ASN Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	7,581,067,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	7,282,188,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**2,041,349,000**						100 persen	**1,918,977,613**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				8 Unit	183,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	8 Unit	273,360,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil oprasional yang dipelihara				61 Unit	496,929,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	61 Unit	506,868,396	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat-alat Berat yang terpelihara				11 Jenis	730,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	11 Jenis	745,224,240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				4 Jenis	52,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Jenis	53,815,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium yang terpelihara umlah Alat Bengkel (UPCA) yang terpelihara				8 Jenis 4 Jenis	283,048,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	8 Jenis 4 Jenis	288,709,777	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				2 Lokasi	295,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Lokasi	51,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	persen		persen	27.72 persen	**23,865,610,155**						27.72 persen	**15,441,927,441**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	"- Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terbangun - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terpelihara - Persentase pembangunan embung dan penampung air lainnya - Persentase volume sungai kewenangan kabupaten yang ditanggulangi	persen		persen	100 persen	**9,677,998,000**						100 persen	**9,522,004,980**	
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen Master Plan Sumber daya Air penanganan genangan dan banjir				5 Dokumen	565,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	5 Dokumen	206,040,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Embung dan Penampungan Lainnya yang dibangun				600 m2	456,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	600 m2	465,120,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun				520 m3	775,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	520 m3	790,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang direhabilitasi				2200 m3	3,623,529,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	2200 m3	3,346,445,706	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi				1148 m3	1,070,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1148 m3	1,091,910,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi				1 lokasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 lokasi	207,060,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang direhabilitasi				1 lokasi	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 lokasi	214,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang direhabilitasi				61017 m3	2,510,969,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	61017 m3	2,561,189,274	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara				1 Lokasi	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Lokasi	76,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dipelihara				1 Lokasi	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Lokasi	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Penanggulangan Banjir				10 Kelompok	452,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	10 Kelompok	461,040,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	"-Persentase jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi dan dipelihara -Persentase bendung irigasi yang direhabilitasi dan dipelihara	persen		persen	100 persen	**14,187,612,155**						100 persen	**5,919,922,461**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi yang disusun				12 Dokumen	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	12 Dokumen	306,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Volume Jaringan Irigasi permukaan yang direhabilitasi				3672 m3	11,133,257,155	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	3672 m3	3,722,479,805	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Volume bendung irigasi yang direhabilitasi				97 m3	771,499,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	97 m3	786,929,217	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Volume jaringan irigasi permukaan yang dipelihara (operasi)				324 m3	982,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	324 m3	747,513,439	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Volume bendung irigasi yang dipelihara				13 m3	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	13 m3	357,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik	persen		persen	43 persen	**29,950,965,136**						43 persen	**25,534,329,609**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	"- Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang terbangun - Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang terpelihara	persen		persen	100 persen	**29,950,965,136**						100 persen	**25,534,329,609**	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase				6 Dokumen	686,497,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	6 Dokumen	292,227,103	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen outplan pada kawasan genangan				1 Dokumen	105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Dokumen	107,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi kegiatan pembangunan saluran drainase				12 Dokumen	937,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	12 Dokumen	955,740,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun				5059 m3	20,234,619,136	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5059 m3	6,430,856,290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0		8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang direhabilitasi				8611 m3	6,427,849,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	8611 m3	8,188,406,216	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem drinase yang terpelihara				1500 m	1,560,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1500 m	1,560,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase perwujudan bangunan pemerintahg yang terbangun	%		%	100 %	**54,956,856,000**						100 %	**4,121,305,660**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	- Persentase bangunan gedung yang terbangun - Persentase rekomendasi IMB yang diterbitkan di atas 250m2"	persen		persen	100 persen	**54,956,856,000**						100 persen	**4,121,305,660**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen data bangunan pemerintah yang disusun Jumlah dokumen data SLF bangunan milik pemerintah Jumlah rekomendasi IMB				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	484,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				4 Lokasi 4 Dokumen	54,156,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	4 Lokasi 4 Dokumen	3,205,305,660	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi bangunan gedung yang disusun				3 Dokumen	325,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	3 Dokumen	331,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen bantek bangunan gedung yang disusun				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi/renovasi				0 Lokasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	0 Lokasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen		persen	87 persen	**153,689,042,905**						87 persen	**82,243,923,095**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	"- Persentase panjang jalan yang terbangun - Persentase panjang jalan yang terpelihara - Persentase jembatan yang terbangun - Persentase jembatan yang terpelihara - Persentase ketersediaan data legger jalan dan jembatan - Persentase data kondisi jalan dan jembatan	persen		persen	100 persen	**153,689,042,905**						100 persen	**82,243,923,095**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan,jembatan, dan bangunan pelengkap				20 Dokumen	2,025,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	20 Dokumen	535,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Lahan/tanah yang Terbebaskan Untuk Jalan				2 Lokasi	4,572,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	2 Lokasi	4,663,950,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen informasi database jalan dan jembatan				3 Dokumen	396,193,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	3 Dokumen	506,117,778	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan dan jembatan yang tersusun				3 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	3 Dokumen	357,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Bangunan Pelengkap Jalan TPT yang terbangun Panjang jalan yang dibangu/ditingkatkan Panjang trotoar yang terbangun				7547 m3 6142 m2 9170 m2	30,398,053,484	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	7547 m3 6142 m2 9170 m2	23,063,142,331	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dibangun untuk dilebarkan				12723 m2	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	12723 m2	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jaringan Jalan yang direkontruksi				26219 m2	12,319,780,141		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	26219 m2	22,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi				30847 m2	77,954,775,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	30847 m2	27,642,909,062	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara				424 km	7,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	424 km	7,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun				4 jembatan	2,400,928,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	4 jembatan	2,448,947,059	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	jumlah Jembatan yang direhabilitasi				5 jembatan	4,271,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 jembatan	2,964,268,865	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara secara rutin				121 jembatan	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	121 jembatan	2,040,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan				22 Dokumen	5,000,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	22 Dokumen	5,000,088,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikasi	persen		persen	100 persen	**550,000,000**						100 persen	**809,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	persen		persen	100 persen	**450,000,000**						100 persen	**657,000,000**	
1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan / bimtek jasa konstruksi yang mendapatkan sertifikat terampil konstruksi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Dokumen	357,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan / bimtek Jasa Konstruksi yang mendapatkan sertifikat terampil konstruksi				150 Orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	150 Orang	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase laporan / dokumen jasa konstruksi	persen		persen	100 persen	**100,000,000**						100 persen	**102,000,000**	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengelolaan oprasional layanan informasi Jasa kontruksi				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Dokumen	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah dokumen data dan informasi profil pekerjaan kontruksi				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah dokumen data dan informasi kecelakaan kerja proyek kontruksi				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	2.03		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**						**0**							**0**	
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional						0				Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**						**0**							**50,000,000**	
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.			50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase dokumen rencana tata ruang untuk terselenggaranya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan harmonis	persen		persen	14 persen	**4,543,641,000**						14 persen	**4,784,514,536**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah berkas dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	persen		persen	100 persen	**150,000,000**						100 persen	**142,545,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan verifikasi/validasi, persetujuan substansi dan konsultasi dalam rangka penetapan dokumen penataan ruang				2 kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	2 kegiatan	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang				1 kegiatan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 kegiatan	40,545,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen kajian bahan penyusunan dokumen rencana tata ruang	persen		persen	100 persen	**3,893,641,000**						100 persen	**4,174,769,536**	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian bahan penyusunan RTRW				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Dokumen	1,836,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian bahan penyusunan RRTR				5 Dokumen	3,743,641,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	5 Dokumen	2,288,769,536	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat				4 kegiatan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	4 kegiatan	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase rencana tapak yang diidentifikasi progres pemanfaatan ruangnya	persen		persen	100 persen	**250,000,000**						100 persen	**214,200,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rencana tapak yang diidentifikasi progres pemanfaatan ruangnya				4 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	4 Dokumen	214,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase rencana tapak yang dipantau	persen		persen	100 persen	**250,000,000**						100 persen	**253,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkroniasi pengendalian pemanfaatan ruang				2 kegiatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	2 kegiatan	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan koordinasi dan Monev pelaksanaan penataan ruang				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1 Dokumen	153,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**14,790,403,950**							**5,803,182,002**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase PJU yang terbangun pada tahun rencana	persen		persen	100 persen	**14,790,403,950**						100 persen	**5,803,182,002**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	"- Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terehabilitasi dan terpelihara"	persen		persen	100 persen	**14,790,403,950**						100 persen	**5,803,182,002**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun				760 TC	10,790,403,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	760 TC	3,763,727,247	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang direhabilitasi dan dipelihara				1888 TC	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	0	1888 TC	2,039,454,755	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									TOTAL		**364,635,664,146**							**229,849,531,369**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**20,849,797,000**							**21,834,824,479**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Point		Point	74 Point	**9,513,016,000**						74 Point	**10,225,824,479**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	**24,500,000**						100 Persen	**27,540,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	5 Dokumen	7,650,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen	3,570,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen	3,570,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen	2,040,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen	2,040,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu Jumlah Penyelenggaraan Desk Jumlah penyelenggaraan Forum PD Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi teknis Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat terkait program				1 dokumen 4 kali 1 kali 2 kali 4 kali	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 dokumen 4 kali 1 kali 2 kali 4 kali	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang diselesaikan secara teoat waktu Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu Jumlah dokumen hasil evaluasi PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3,570,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**8,271,058,000**						100 Persen	**9,205,544,479**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah OB				12 bulan	8,246,058,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	12 bulan	9,180,044,479	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen kelengkapan laporan SPJ				60 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	60 Dokumen	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen LPJ PD				12 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	12 dokumen	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CLAK Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen 1 Dokumen	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP Inspektorat Kabupaten Jumlah LHP Insptektorat Provinsi				1 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Dokumen 1 Dokumen	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu				18 laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	18 laporan	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**10,000,000**						100 Persen	**25,500,000**	
2	13	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana displin pegawai yang terpenuhi				1 Sarana Prasarana	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Sarana Prasarana	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya				65 stell	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	65 stell	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Jumlah dokumen kenaikan pangkat				2 Dokumen 46 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	2 Dokumen 46 Dokumen	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP				46 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	46 Dokumen	10,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				21 Pegawai	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	21 Pegawa	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**378,170,000**						100 Persen	**151,980,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				20 jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	20 jenis	15,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli				1 jenis 20 jenis	120,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 jenis 20 jenis	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga dan alat/bahan kebersihan yang dibeli				10 jenis	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	10 jenis	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang di beli Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				2 jenis 150 hok	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	2 jenis 150 hok	10,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				2 jenis	44,170,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	2 jenis	5,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				2 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	2 jenis	10,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia				1 paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 paket	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi ke luar daerah				75 HOK	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	75 HOK	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang tertata				1620 Dokumen	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1620 Dokumen	4,080,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan BMD	Persen		Persen	100 Persen	**0**						100 Persen	**0**	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				5 jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	5 jenis	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun				1 Gedung	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Gedung	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**650,958,000**						100 Persen	**652,060,000**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				10000 buah	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	10000 buah	10,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 bulan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	12 bulan	45,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Bulan				12 bulan	595,958,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	12 bulan	595,960,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pemeliharaan BMD	Persen		Persen	100 Persen	**178,330,000**						100 Persen	**163,200,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				1 Unit	38,330,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Unit	20,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara				3 Unit	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	3 Unit	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				4 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	4 jenis	10,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Paket	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dinas PMD	1 Paket	30,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Persen		Persen	2 Persen	**125,000,000**						2 Persen	**229,500,000**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	Persen		Persen	2 Persen	**125,000,000**						2 Persen	**229,500,000**	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa dengan pembentukan status desa Jumlah Desa dengan Penggabungan status desa Jumlah Desa dengan Penghapusan status desa Jumlah Desa dengan Perubahan status desa Jumlah dokumen Perencanaan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa				0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 1 dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 1 dokumen	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi tata wilayah desa				2 Desa	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Desa di Kabupaten Bandung	2 Desa	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang memiliki perdes tentang penataan kewenangan desa				31 Desa	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Desa di Kabupaten Bandung	31 Desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi sarana dan prasarana desa				0 Desa	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Desa di Kabupaten Bandung	0 Desa	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Persen		Persen	5 Persen	**125,000,000**						5 Persen	**127,500,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	persen		persen	70 persen	**125,000,000**						70 persen	**127,500,000**	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Desa				3 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	3 desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten				2 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	2 desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen perencanaan kawasan perdesaan Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk				1 dokumen 0 kawasan	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	1 dokumen 0 kawasan	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Persen		Persen	10 Persen	**10,103,400,000**						10 Persen	**10,000,600,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	Persen		Persen	11 Persen	**10,103,400,000**						11 Persen	**10,000,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa berdasarkan peraturan Jumlah desa dengan status mandiri di Kabupaten Bandung				10 desa 10 desa	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	10 desa 10 desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				270 desa	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Desa di Kabupaten Bandung	270 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				270 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	270 desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah bulan pembayaran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah desa penerima bantuan keuangan ADPD dan Dana Desa yang terealisasi dengan tepat waktu Jumlah desa penerima bantuan keuangan khusus kepada desa yang terealisasi dengan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyampaikan Catatan laporan Keuangan (CaLK Desa) desa secara benar dan tepat waktu				3 bulan 270 desa 270 desa 270 desa	9,203,400,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	3 bulan 270 desa 270 desa 270 desa	9,205,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Pelatihan				135 orang	175,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Desa di Kabupaten Bandung	135 orang	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penyelenggaraan musyawarah desa tepat waktu				54 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	54 desa	61,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah peraturan desa yang telah sesuai dengan aturan				270 Perdes	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	270 Perdes	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang aktif Jumlah Lembaga kerja sama antar desa yang aktif				85 Bumdes 0 LKAD	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	85 Bumdes 0 LKAD	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades Jumlah kegiatan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkades				0 desa 1 kegiatan	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	0 desa 1 kegiatan	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa				2 dokumen	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	2 dokumen	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang sudah mempunyai sistem data berdasarkan potensi masyarakat Jumlah desa yang telah menginput data profil desa dengan benar				10 desa 20 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	10 desa 20 desa	71,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang menata aset desa sesuai pedoman				10 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	10 desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pelatihan Jumlah Pembinaan kepada BPD				50 Orang 1 kali	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	50 Orang 1 kali	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa dengan penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan titik koordinat				10 desa	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	10 desa	76,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah dokumen laporan kepala desa				270 dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Desa di Kabupaten Bandung	270 dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dengan status cepat berkembang				10 desa	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa di Kabupaten Bandung	10 desa	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Persen		Persen	96 Persen	**983,381,000**						96 Persen	**1,251,400,000**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	Persen		Persen	50 Persen	**983,381,000**						50 Persen	**1,251,400,000**	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat yang teridentifikasi dan terinventarisasi				2 Lembaga Adat	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	2 Lembaga Adat	35,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat Desa/LAD yang terbina Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD yang terbina				13 LAD 1 LKD	110,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	13 LAD 1 LKD	112,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah anggota lembaga Kemasyarakatan Desa /LKD dan Lembaga Adat Desa/LAD yang mengikuti pelatihan				150 orang	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	150 orang	510,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa yang dikembangkan				4 Usaha Ekonomi	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	4 Usaha Ekonomi	76,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna				4 desa	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	4 desa	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam bulan bhakti gotong royong Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kegiatan BSMSS Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kegiatan TMMD				1 kali 0 kali 0 kali	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	1 kali 0 kali 0 kali	51,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 kali	413,381,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	12 kali	415,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
									TOTAL	**20,849,797,000**								**21,834,824,479**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**21,332,614,000**							**8,814,795,037**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai sakip	poin		poin	80 poin	**16,882,615,000**						80 poin	**4,687,800,080**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja pd	dokumen		dokumen	9 dokumen	**23,000,000**						9 dokumen	**21,420,000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu				3 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	3 dokumen	5,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	4,080,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	2,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	2,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP				1 dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	3,060,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja				1 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	5,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan tahunan	laporan		laporan	1 laporan	**11,826,740,000**						1 laporan	**23,970,000**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	11,803,240,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penata usahaan keuangan				10 dokumen	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	10 dokumen	4,080,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 kali	3,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	2 kali	3,060,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 kali	6,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	2 kali	6,630,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan				1 dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	3,060,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran				2 dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	2 dokumen	3,060,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis				1 dokumen	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 dokumen	4,080,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Bmd dalam keadaan baik	%		%	90 %	**8,000,000**						90 %	**8,160,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		1 dokumen	2,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah koordinasi Pembinaan dan pengawasan BMD				2 kali	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		2 kali	2,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Data BMD				2 kali	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		2 kali	2,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		1 dokumen	2,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**895,000,000**						100 %	**908,900,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik				30 jenis	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	30 jenis	51,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75 jenis 15 jenis	320,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	75 jenis 15 jenis	322,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15 jenis	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	15 jenis	61,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket/Porsi/Box makanan dan minuman untuk rapat dinas dan piket dinas				600 OK	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	600 OK	102,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan				15 jenis	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	15 jenis	102,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan				12 bulan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	12 bulan	15,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan				10 kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	10 kali	51,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi				50 kali	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	50 kali	153,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 paket	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 paket	51,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**3,649,875,000**						100 %	**3,235,750,080**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Listrik dan Internet				12 bulan	900,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	12 bulan	918,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	2,749,875,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	12 bulan	2,317,750,080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase aset dalam keadaan baik	%		%	90 %	**480,000,000**						90 %	**489,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara				17 unit	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	17 unit	255,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				15 jenis	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	15 jenis	30,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 paket	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 paket	204,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**1,345,102,000**							**1,419,000,000**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**395,102,000**							**450,000,000**	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan / kajian pemerintah mengenai insentif di bidang penanaman modal				1 kebijakan	395,102,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		1 kebijakan	450,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase kajian atas kebijakan pemerintah Daerah tentang penetapan insentif dibidang penanaman modal yang dilegitimasi melalui Produk hukum daerah Persentase Peningkatan jumlah peluang investasi	% %		% %	100 % 100 %	**950,000,000**						100 % 100 %	**969,000,000**	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian/regulasi tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Bandung yang disusun				1 kajian	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 kajian	408,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi baru Jumlah Peluang Investasi yang dimitrakan				1 peluang 1 Peluang	550,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 peluang 1 Peluang	561,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase peluang investasi yang dipromosikan	%		%	100 %	**400,000,000**						100 %	**408,000,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya event Promosi peluang investasi	%		%	100 %	**400,000,000**						100 %	**408,000,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang diselenggarakan				3 event	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	3 event	408,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	peningkatan nilai ikm bidang perizinan	5		5	0,44 5	**1,604,897,000**						0,44 5	**1,636,994,957**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**						**1,604,897,000**							**1,636,994,957**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Ijin Yang Diterbitkan				2250 dokumen	815,060,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	masyarakat pemohon izin	2250 dokumen	831,361,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan				500 pengaduan	789,837,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	masyarakat pemohon izin	500 pengaduan	805,633,757	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha	%		%	12 %	**300,000,000**						12 %	**306,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku UKM yang menyampaikan Laporan Usaha Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha	UKM %		UKM %	100 UKM 12 %	**300,000,000**						100 UKM 12 %	**306,000,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pemantauann pelaksanaan penanaman modal				4 laporan	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		4 laporan	102,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina				100 perusahaan	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		100 perusahaan	102,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN penerima fasilitas penanaman modal yang terawasi				200 perusahaan 5 perusahaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		200 perusahaan 5 perusahaan	102,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	tersedianaya sistem informasi layanan perizinan dan penanaman modal	sistem		sistem	1 sistem	**800,000,000**						1 sistem	**357,000,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah data layanan perizinan dan penanaman modal	layanan		layanan	155 layanan	**800,000,000**						155 layanan	**357,000,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen laporan pengelolaan data perizinan Jumlah Sistem Informasi yang diperbaharui (upgrade)				1 1 laporan 1 sistem	800,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.		1 1 laporan 1 sistem	357,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									TOTAL	**21,332,614,000**								**8,814,795,037**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.371.937.807.193**							**61.656.303.712**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.095.176.176.075**							**0**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**894.343.075**							**0**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen			1 Dokumen	375.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DID yang diselesaikan tepat waktu	4 Dokumen			4 Dokumen	45.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen			10 Dokumen	45.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		10 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen			10 Dokumen	20.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		10 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen			10 Dokumen	20.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		10 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu	3 Dokumen			3 Dokumen	203.232.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		3 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja	2 Dokumen			2 Dokumen	183.111.075	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		2 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1.090.521.559.000**							**0**	
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai ASN	1 tahun			1 tahun	1.090.441.559.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikkan secara tepat waktu	36 Dokumen			36 Dokumen	80.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		36 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**301.000.000**							**0**	
1	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah kegiatan penatausahaan barang	6 kegiatan			6 kegiatan	150.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		6 kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan sensus per tahun	15 Kegiatan			15 Kegiatan	151.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		15 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian**						**153.000.000**							**0**	
1	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pegawai yang ikut BIMTEK	50 Orang			50 Orang	153.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		50 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum**						**832.000.000**							**0**	
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	7 Jenis			7 Jenis	25.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		7 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kanator yang dibeli	40 Jenis			40 Jenis	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		40 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan			4 Kegiatan	82.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		4 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang diceetak dan digandakan	8 Jenis			8 Jenis	60.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		8 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Banyaknya kebutuhan mataerial	10 Jenis			10 Jenis	20.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		10 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyaknya kunjungan tamu dalam satu tahun	1 Tahun			1 Tahun	195.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya kegitan rapat koordinasi dalam waktu satu tahun	1 Tahun			1 Tahun	300.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.074.274.000**							**0**	
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa layanan listrik dalam waktu 1 tahun	1 Tahun			1 Tahun	300.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah 1 tenaga sopir Jumlah 4 Satpam Jumlah Tenaga Harian Lepas Jumlah tenaga Kebersihan	1 Orang Bulan 4 Orang Bulan 41 Orang Bulan 6 Orang Bulan			1 Orang Bulan 4 Orang Bulan 41 Orang Bulan 6 Orang Bulan	1.774.274.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 Orang Bulan 4 Orang Bulan 41 Orang Bulan 6 Orang Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**400.000.000**							**0**	
1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	19 Unit			19 Unit	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		19 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung			1 gedung	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		1 gedung	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Prosentase SD ber akreditasi A	%		%	103,98 %	**275.161.358.957**						103,98 %	**60.531.031.551**	
1	**01**	**02**	2,01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	APK/APM SD APK SD	% %		% %	103.98 % 103.98 %	**131.649.677.425**						103.98 % 103.98 %	**1.274.000.000**	
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun	7 lokal			7 lokal	3.092.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	7 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah pembangunan ruang guru SD	2 lokal			2 lokal	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	2 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan SD yang dibangun	2 lokal			2 lokal	500.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	2 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemb. sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	2000 m2			2000 m2	7.268.613.696	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	2000 m2	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD	35 lokal			35 lokal	7.249.467.826	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	35 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah rehab perpustakaan SD	2 lokal			2 lokal	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	2 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	75 paket			75 paket	4.184.254.503	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	75 paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rehab sedang/beratrumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga SD	10 lokal			10 lokal	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	10 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan meubelair sekolah	125 paket			125 paket	5.265.600.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	125 paket	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	3 paket			3 paket	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	3 paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa	950 paket			950 paket	525.166.400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	950 paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat peraga siswa SD yang disediakan	10 lembaga			10 lembaga	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	10 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa SD yang mengikuti ujian	1412 siswa			1412 siswa	500.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	1412 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi PPDB SMP	120 SD			120 SD	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	120 SD	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi lomba minat bakat dan kreativitas	8 mata lomba			8 mata lomba	250.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	8 mata lomba	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat insentif	1 tahun			1 tahun	40.223.500.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah calon kepala sekolah yang megikuti diklat (OJL) jumlah guru yang mengikuti bimtek pengembangan karier (KKG) jumlah guru yang mengikuti calon seleksi kepala sekolah	120 orang 100 guru 125 orang			120 orang 100 guru 125 orang	1.371.075.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	120 orang 100 guru 125 orang	1.274.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti bimtek	200 SD			200 SD	60.520.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	200 SD	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar penerima BOS	31 kecamatan			31 kecamatan	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung	31 kecamatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2,02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	APK SMP	%		%	91,85 %	**70.882.421.952**						91,85 %	**2.718.533.551**	
1	01	02	2,02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	jumlah sekolah yang dibangun	1 sekolah			1 sekolah	274.500.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	1 sekolah	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas SMP yang dibangun	1 sekolah			1 sekolah	9.777.155.520	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	1 sekolah	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembangunan fasilitas parkir	204 M2			204 M2	800.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	204 M2	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemb. sarana air bersih dan sanitasi SMP	408 M2			408 M2	4.543.812.591	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SMP Se-Kabupaten Bandung	408 M2	2.718.533.551	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	10 lokal			10 lokal	2.230.241.057	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SMP Se-Kabupaten Bandung	10 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubelair sekolah SMP yang tersedia	43 paket			43 paket	2.018.300.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SMP Se-Kabupaten Bandung	43 paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penyediaan personil peserta didik SMP	833 siswa			833 siswa	1.600.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	833 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah SD yang mengikuti bimtek pendidikan karakter	1583 siswa			1583 siswa	800.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	1583 siswa	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah SMP yang mengikuti sosialisasi dan bimtek persiapan akreditasi	200 SMP			200 SMP	362.182.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	200 SMP	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMP yang mengikuti festival lomba	8 mata lomba			8 mata lomba	500.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	8 mata lomba	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat insentif	1 tahun			1 tahun	23.342.500.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah calon kepala sekolah yang mengikuti diklat OJL Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti bimtek pengembangan karier (MGMP) jumlah guru yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah	90 orang 200 guru smp 100 orang			90 orang 200 guru smp 100 orang	783.298.784	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	90 orang 200 guru smp 100 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti bimtek pengembangan manajemen	200 Guru SMP			200 Guru SMP	23.650.432.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	200 Guru SMP	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah SMP penerima BOS	31 kecamatan			31 kecamatan	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SMP Se-Kabupaten Bandung	31 kecamatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2,03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD	%		%	41,3 %	**56.443.498.000**						41,3 %	**56.238.498.000**	
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah pemb. gedung /ruang kelas/ruang guru paud yang dibangun dan beroperasi	5 lokal			5 lokal	750.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	5 lokal	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD	jumlah pengadaan meubelair PAUD	200 paket			200 paket	5.250.062.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PAUD Se-Kabupaten Bandung	200 paket	5.250.062.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	jumlah perlengkapan PAUD	400 paket			400 paket	4.801.376.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PAUD Se-Kabupaten Bandung	400 paket	4.801.376.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	jumlah buku-buku dan alat tulis siswa PAUD yang disediakan, jumlah raport PAUD yang disediakan	200 paket			200 paket	2.084.910.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PAUD Se-Kabupaten Bandung	200 paket	2.084.910.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	40 paket			40 paket	500.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	40 paket	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan proses belajar	156 lembaga			156 lembaga	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	156 lembaga	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	jumlah guru honorer yang diberi insentif	3872 guru			3872 guru	25.177.750.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	3872 guru	25.177.750.000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepsek jumlah guru yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti bimtek pengembangan karier	15 orang 30 orang 100 lembaga			15 orang 30 orang 100 lembaga	405.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	15 orang 30 orang 100 lembaga	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	jumlah lembaga yang mengikuti bimtek pengembangan data dan informasi PAUD	2000 lembaga			2000 lembaga	17.074.400.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	2000 lembaga	17.074.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Lembaga PAUD yang penerima BOP PAUD	31 kecamatan			31 kecamatan	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD Se-Kabupaten Bandung	31 kecamatan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2,04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n**	APK Kejar Paket A,B,C	%		%	51,6 %	**16.185.761.580**						51,6 %	**300.000.000**	
1	01	02	2,04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemb. gedung/ruangkelas/ruan g guru Nonformal/Kesetaraan	2 lokal			2 lokal	513.153.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	2 lokal	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemb. sarana prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	60 lembaga			60 lembaga	1.975.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	60 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah mebel PKBM	56 lembaga			56 lembaga	286.982.980	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	56 lembaga	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah pengadaan perlengkapan PNF	75 lembaga			75 lembaga	3.653.625.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	75 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemberian bantuan operasional PNF	78 lembaga			78 lembaga	2.472.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	78 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penyelenggara paket A setara SD, SMP, SMA (Paket A,B,C)	6000 WB			6000 WB	6.760.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	6000 WB	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PNF yang mengikuti bimtek kelembagaan	78 lembaga			78 lembaga	200.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	78 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK PNF yang mengikuti bimtek	136 PTK			136 PTK	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	136 PTK	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PNF yang mengikuti bimtek kelembagaan	78 lembaga			78 lembaga	175.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	78 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga pkbm penerima BOP	78 lembaga			78 lembaga	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PKBM dan LKP Se-Kabupaten Bandung	78 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**400.000.000**							**100.000.000**	
1	**01**	**03**	2,01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**						**400.000.000**							**100.000.000**	
1	01	03	2,01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti bimtek penyusunan kompetensi dasar mulok dikdas	200 guru SD dan SMP			200 guru SD dan SMP	300.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		200 guru SD dan SMP	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	03	2,01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2,01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah guru yang mengikuti kegiatan penyusunan kuruikulum mulok dikdas	100 guru SD dan SMP			100 guru SD dan SMP	100.000.000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		100 guru SD dan SMP	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	2,02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	JUMLAH SISWA YANG TUNTAS DALAM PEMBELAJARAN MULOK	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
1	01	03	2,02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikutibimtek penyusunan kompeteni dasar mulok PAUD dan PNF	200 guru			200 guru	0	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SD DAN SMP	200 guru	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	index pemerataan guru UN SMP	index		index	0.23 index	**600.000.000**						0.23 index	**725.000.000**	
1	**01**	**04**	2,01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n**	index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP	index index index index		index index index index	0.19 index 0.42 index 0.45 index 0.23 index	**600.000.000**						0.19 index 0.42 index 0.45 index 0.23 index	**725.000.000**	
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan satdikdas, PAUD dan PNF	5 kegiatan			5 kegiatan	300.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Guru SD dan SMP	5 kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan penataan, pendistribusian pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Kegiatan			5 Kegiatan	300.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	Guru SD dan SMP	5 Kegiatan	725.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	prsentase lembaga SD dan SMP swasta yang mempunyai ijin operasional	%		%	80 %	**300.272.161**						80 %	**300.272.161**	
1	**01**	**05**	2,01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	jumlah SD dan SMP yang memiliki ijin operasional	%		%	80 %	**0**						80 %	**0**	
1	01	05	2,01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah lembaga yang mengusulkan perijinan	10 lembaga			10 lembaga	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.		10 lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**05**	2,02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	JUMLAH LEMBAGA YANG MEMPUNYAI IJIN OPERASIONAL	LEMBAGA		LEMBAGA	47 LEMBAGA	**300.272.161**						47 LEMBAGA	**300.272.161**	
1	01	05	2,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah lembaga PAUD dan kesetaraan yang mengusulkan perizinan	56 lembaga			56 lembaga	150.347.161	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD DAN PKBM	56 lembaga	150.347.161	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang Mengikuti Monev Perijinan	50 lembaga			50 lembaga	149.925.000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	PAUD DAN PKBM	50 lembaga	149.925.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Prosentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	0%		0%	100 0%	**300.000.000**						100 0%	**0**	
1	**01**	**06**	2,01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah**	Jumlah kegiatan pembinaan bahasa dan sastra	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	**300.000.000**						7 kegiatan	**0**	
1	01	06	2,01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen silabus yang tersusun	3 Dokumen			3 Dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SD dan SMP di Kabupaten Bandung	3 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2022
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	06	2,01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	4 dokumen			4 dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SD dan SMP di Kabupaten Bandung	4 dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	2,01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah guru yang mengikuti kegiatan publikasi	150 Orang			150 Orang	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SD dan SMP di Kabupaten Bandung	150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	2,01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Guru yang mengikuti BIMTEK penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah	150 Orang			150 Orang	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.	SD dan SMP di Kabupaten Bandung	150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
										TOTAL	**1.371.937.807.193**							**61.656.303.712**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1,346,220,000**							**1,513,505,802**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Presentase Peningkatan Organisasi Wanita Yang Berperan Serta Dalam Pembangunan	%		%	100 %	**313,750,000**						100 %	**590,325,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Organisasi Wanita Yang Berperan Serta Dalam Pembangunan	%		%	100 %	**213,750,000**						100 %	**182,325,000**	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen kebijakan dalam pelaksanaan PUG				1 dokumen	113,750,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 dokumen	116,025,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPRG				70 peserta	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	70 peserta	66,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Organisasi Wanita Yang Berperan Serta Dalam Pembangunan	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**408,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang memberikan advokasi terhadap Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten				2 lembaga	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 lembaga	102,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	306,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Presentase Pencegahan Kekerasan Dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Yang Memerlukan Perlindungan	%		%	100 %	**120,000,000**						100 %	**71,400,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pencegahan Kekerasan Dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Yang Memerlukan Perlindungan	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**30,600,000**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus				50 layanan	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	50 layanan	30,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Presentase Pencegahan Kekerasan Dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Yang Memerlukan Perlindungan	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**40,800,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan				65 kasus	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	65 kasus	40,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Presentase Peningkatan Kualitas (Pengetahuan, Kapasitas, Pengahasilan) Keluarga	%		%	100 %	**454,813,000**						100 %	**463,909,422**	
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Kualitas (Pengetahuan, Kapasitas, Pengahasilan) Keluarga	%		%	100 %	**170,000,000**						100 %	**173,400,000**	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terbentuknya Desa P2WKSS percontohan Tk. Kabupaten				1 Desa	170,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 Desa	173,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**04**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Kualitas (Pengetahuan, Kapasitas, Pengahasilan) Keluarga	%		%	100 %	**70,000,000**						100 %	**71,400,000**	
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Yang Terbina				1 lembaga	70,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 lembaga	71,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**04**	2.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Kualitas (Pengetahuan, Kapasitas, Pengahasilan) Keluarga	%		%	100 %	**214,813,000**						100 %	**219,109,422**	
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan dalam bidang KG dan hak anak				31 kecamatan	214,813,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	31 kecamatan	219,109,422	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Presentase Data Teroilah Anak	%		%	100 %	**130,000,000**						100 %	**96,900,000**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Data Teroilah Anak	%		%	100 %	**130,000,000**						100 %	**96,900,000**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				31 kecamatan	65,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	31 kecamatan	66,300,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PD yang memanfaatkan data gender dan anak				47 PD	65,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	47 PD	30,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Presentase Lembaga Yang Menyediakan Pemenuhan Hak Anak	%		%	100 %	**152,657,000**						100 %	**145,510,149**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Presentase Lembaga Yang Menyediakan Pemenuhan Hak Anak	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**51,000,000**	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				39 kelompok	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	39 kelompok	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Presentase Lembaga Yang Menyediakan Pemenuhan Hak Anak	%		%	100 %	**92,657,000**						100 %	**94,510,149**	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 layanan	92,657,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 layanan	94,510,149	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Presentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		%	100 %	**175,000,000**						100 %	**145,461,231**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		%	100 %	**110,000,000**						100 %	**91,800,000**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan				2 kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kegiatan	40,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan				50 layanan	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	50 layanan	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		%	100 %	**65,000,000**						100 %	**53,661,231**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus				31 kecamatan	65,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	31 kecamatan	53,661,231	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**27,890,930,000**							**27,815,813,716**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**25,506,660,000**						100 %	**25,259,454,000**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**137,000,000**						100 %	**90,780,000**	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	17,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	17,340,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	8,160,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	9,180,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 dokumen	30,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**24,370,647,000**						100 %	**24,376,537,000**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	24,329,147,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	12 bulan	24,329,147,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	0 0	4,080,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 dokumen	9,180,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 kegiatan	7,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 kegiatan	7,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 dokumen	16,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	3 dokumen	9,180,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	0 dokumen	7,650,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**25,000,000**						100 %	**15,300,000**	
2	14	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 kegiatan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	3 kegiatan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SK				1 kegiatan	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 kegiatan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**33,900,000**						100 %	**19,278,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100 %	5,900,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	100 %	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	0 kegiatan	918,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	3 kegiatan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 kegiatan	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 kegiatan	4,080,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 kegiatan	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 kegiatan	4,080,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**231,574,000**						100 %	**156,040,000**	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	3 jenis	20,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	70,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	12 bulan	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 kegiatan	7,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 kegiatan	7,140,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2 jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 jenis	20,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				12 bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	12 bulan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 jenis	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0 jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	0 jenis	20,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	12 bulan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	83,574,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	12 bulan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 jenis	11,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 jenis	11,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**15,300,000**	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				3 jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	3 jenis	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2 jenis	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 jenis	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**460,539,000**						100 %	**463,819,000**	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				2 jenis	4,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	2 jenis	4,080,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				3 jenis	160,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	3 jenis	163,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan SDM pendukung				12 bulan	296,539,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	12 bulan	296,539,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1. Nilai SAKIP; 2. Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**188,000,000**						100 %	**122,400,000**	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7 unit	70,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	7 unit	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136 unit	73,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	136 unit	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 gedung	45,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD	1 gedung	20,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	TFR (Angka Kelahiran Total) TFR (Angka Kelahiran Total)	0 0		0 0	2.42 0 2.43 0	**234,000,000**						2.42 0 2.43 0	**238,680,000**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	TFR (Angka Kelahiran Total)				2.43	**100,000,000**						2.43	**91,800,000**	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan kebijakan perihal persentase pemanfaatan hasil penyusunan GDPK yang dimiliki Kabupaten Bandung				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang dimiliki Kabupaten				3 sekolah	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	3 sekolah	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan				3 kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	3 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian program KKBPK				2 kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR		TFR	2.42 TFR	**134,000,000**						2.42 TFR	**146,880,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah kebijakan terkait perumusan parameter kependudukan				1 kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	''Jumlah dokumen terkait penyediaan dan pengolahan data kependudukan				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga				1 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan					0 0	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 0	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah pembentukan Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain				2 kegiatan	38,750,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kegiatan	39,525,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 kegiatan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga				2 dokumen	25,250,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 dokumen	25,755,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data Keluarga				1 kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen hasil pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB di Kabupaten Bandung				2 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK				2 dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 dokumen	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Dan Peserta KB Baru Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Dan Peserta KB Baru	% %		% %	82,73 % 82.73 %	**1,775,270,000**						82,73 % 82.73 %	**1,854,635,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Dan Peserta KB Baru	%		%	82.73 %	**244,500,000**						82.73 %	**1,188,300,000**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholers dan Mitra Kerja				2 kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kegiatan	40,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi terlaksananya jenis KIE melalui moment strategis				4 kegiatan	99,050,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	4 kegiatan	153,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah kebijakan terkait sarana promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang				1 kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK				1 kegiatan	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	5,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan Mekanisme Operasional program KKBPK				2 kegiatan	60,450,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kegiatan	948,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Paguyuban yang berperan dalam Program KKBPK				31 kelompok	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	31 kelompok	30,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Dan Peserta KB Baru	%		%	82.73 %	**1,050,500,000**						82.73 %	**132,600,000**	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	jumlah IMP yang dibina				31 kecamatan	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Masyarakat	31 kecamatan	102,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB PNS dan Non PNS				1 kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 kegiatan	442,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah pelaksanaan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Pos KB dan Sub PPKBD)				1 kegiatan	498,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Dan Peserta KB Baru	%		%	82.73 %	**400,270,000**						82.73 %	**452,135,400**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya				200 Faskes	180,270,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	200 Faskes	227,735,400	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat				21000 akseptor	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	21000 akseptor	102,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitasi Kesehatan				70000 orang	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	70000 orang	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat				70 akseptor	70,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	70 akseptor	71,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Dan Peserta KB Baru	%		%	82.73 %	**80,000,000**						82.73 %	**81,600,000**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4653 orang	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	4653 orang	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kegiatan Yang berintegrasi di Kampung KB				0 kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB				0 kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah pelaksanaan pembinaan terpadu Kampung KB Kabupaten Bandung				0 kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	0 kegiatan	10,200,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Presentase Pembinaan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	%		%	100 %	**375,000,000**						100 %	**463,044,316**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Presentase Pembinaan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	%		%	100 %	**375,000,000**						100 %	**463,044,316**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	30,095,289	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok pengelola bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga				2 kelompok	145,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kelompok	296,269,027	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok pelaksana bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendampingan tentang bina keluarga				1 kelompok	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kelompok	60,180,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat promosi dan sosialisasi tentang orang tua hebat, generasi berecana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga				2 kelompok	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	2 kelompok	51,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah sosialisasi IPK yang dilaksanakan				1 kegiatan	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	OPD dan Masyarakat	1 kegiatan	25,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
					TOTAL	29,237,150,000								29,329,319,518	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**268,900,000**							**274,278,000**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	%		%	80 %	**268,900,000**						80 %	**274,278,000**	
3	**29**	**05**	2.01		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	%		%	95 %	**268,900,000**						95 %	**274,278,000**	
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/ kota				1 Laporan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Laporan	51,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	29	05	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan dan jumlah dokumen informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi yang dikeluarkan				2 Dokumen	168,900,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	2 Dokumen	172,278,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi				165 Kali	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	165 Kali	51,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**40,286,331,000**							**42,264,571,419**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**35,322,929,000**						79 Point	**37,711,898,455**	
3	**30**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**334,350,000**						79 Point	**341,037,000**	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Dokumen	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	30,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Terkait LPPD, LKPJ, Sakip Perangkat Daerah				3 Dokumen	94,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Dokumen	96,237,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu				5 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Dokumen	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**32,031,618,000**						79 Point	**34,457,362,015**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan				12 Bulan	31,992,618,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	34,417,582,015	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran (CALK) yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	10,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu				2 Laporan	14,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Laporan	14,280,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**45,000,000**						79 Point	**35,700,000**	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan				0 Stel	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 Stel	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang diikuti				7 Kali	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	7 Kali	35,700,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**633,651,000**						79 Point	**751,270,800**	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik / Penerangan yang dibeli				15 Jenis	7,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	15 Jenis	7,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli				8 Jenis	251,070,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	8 Jenis	336,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	142,459,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Jenis	129,030,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				1700 Eksemplar	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1700 Eksemplar	10,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				630 Orang/Hari	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	630 Orang/Hari	20,400,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan luar daerah				125 Kali	192,622,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	125 Kali	247,390,800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**0**						79 Point	**0**	
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli				0 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				0 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**1,794,972,000**						79 Point	**1,708,410,240**	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi, Air, Dan Listrik				12 Bulan	148,212,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	144,505,440	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	1,646,760,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	1,563,904,800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	79 Point	**483,338,000**						79 Point	**418,118,400**	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara				18 Unit	148,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	18 Unit	150,960,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara				12 Unit	122,920,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Unit	125,378,400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diservis/Diperbaiki				8 Unit	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	8 Unit	19,380,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara				1 Paket	187,418,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Paket	102,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara				1 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Unit	20,400,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	%		%	60 %	**233,500,000**						60 %	**238,170,000**	
3	**30**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	%		%	65 %	**203,500,000**						65 %	**207,570,000**	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemudahan Pengembangan Usaha (Perizinan) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi TDG, STPW, dan kemitraan dengan toko modern				100 pelaku usaha 100 pelaku usaha	203,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	100 pelaku usaha 100 pelaku usaha	207,570,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	2.02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Jumlah gudang yang mendapatkan fasilitasi penerbitan TDG	Gudang		Gudang	30 Gudang	**15,000,000**						30 Gudang	**15,300,000**	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan fasilitasi penerbitan TDG				30 Gudang	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	30 Gudang	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	2.03		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	%		%	40 %	**15,000,000**						40 %	**15,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang direkomendasi STPW dalam negeri dan luar negeri				40 Pelaku Usaha	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	40 Pelaku Usaha	15,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	%		%	20 %	**1,834,104,000**						20 %	**1,870,786,208**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	65 %	**1,746,604,000**						65 %	**1,781,536,208**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan sarana, prasarana dan pengelolaannya				4 Pasar	1,637,154,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	4 Pasar	1,669,897,208	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan				10 Unit	109,450,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	10 Unit	111,639,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	%		%	42 %	**87,500,000**						42 %	**89,250,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan				100 Orang	87,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	100 Orang	89,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	%		%	3 %	**1,259,329,000**						3 %	**1,284,516,478**	
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%		%	80 %	**259,329,000**						80 %	**264,516,478**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka ketersediaan BAPOKTING di tingkat agen dan pasar rakyat selama 1 tahun				1 Dokumen	34,329,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	35,016,478	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasidalam rangka peningkatan aksesibilitas BAPOKTING ditingkat agen dan pasar rakyat selama 1 tahun				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	204,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dalam 1 tahun				204 Kali	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	204 Kali	25,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase updating data harga dan stok pada SIBAPOKTING	%		%	89 %	**925,000,000**						89 %	**943,500,000**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan harga dan stok BAPOKTING pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 tahun				168 Kali	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	168 Kali	25,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pemantauan harga dan stok BAPOKTING pada pasar rakyat yang terintergrasi dalam sistem informasi perdagangan dalam 1 tahun				1008 Kali	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1008 Kali	102,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus				2 Kali	800,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	2 Kali	816,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer	%		%	90 %	**75,000,000**						90 %	**76,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang lengkap legalitasnya				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	25,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi				216 Kali	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	216 Kali	25,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi				48 Kali	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	48 Kali	25,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	$		$	726705758	$ **286,378,000**						726705758	$ **292,106,325**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	%		%	6 %	**286,378,000**						6 %	**292,106,325**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang terbina				30 Pelaku Usaha	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	30 Pelaku Usaha	76,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang yang diikuti oleh produk ekspor unggulan				1 Event	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Event	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah pelaku ekspor yang ditingkatkan citra produk ekspornya				30 Orang	61,378,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	30 Orang	62,606,325	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Alat UTTP sesuai standar	%		%	80 %	**550,091,000**						80 %	**561,093,953**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera yang sah	%		%	70 %	**550,091,000**						70 %	**561,093,953**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP Tera dan Tera Ulang yang sesuai dengan ketentuan				5000 Unit	302,304,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	5000 Unit	308,350,716	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP Pasca Tera dan Tera Ulang yang diawasi dan dimonitoring				5000 Unit	247,787,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	5000 Unit	252,743,237	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%		%	14 %	**800,000,000**						14 %	**306,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	%		%	6 %	**800,000,000**						6 %	**306,000,000**	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 Kegiatan	650,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	4 Kegiatan	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran dan peningkaan penggunaan produk dalam negeri				3 Kegiatan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	3 Kegiatan	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1,900,000,000**							**1,938,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	%		%	2 %	**1,125,000,000**						2 %	**1,147,500,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**1,125,000,000**						1 Dokumen	**1,147,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri (Roadmap pembangunan industri Kabupaten Bandung)				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri				1 Laporan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Laporan	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri Jumlah Kelompok IKM yang terpenuhi sarana dan prasarananya				1 Dokumen 4 IKM	175,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen 4 IKM	178,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah IKM yang terfasilitasi usahanya				1 Dokumen 100 IKM	500,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen 100 IKM	510,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	%		%	2.5 %	**350,000,000**							2.5 %	**357,000,000**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah izin industri kecil dan menengah	Perusahaan		Perusahaan	50 Perusahaan	**350,000,000**							50 Perusahaan	**357,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah peserta yang terfasilitasi perizinan IUI secara elektronik				20 Peserta	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	20 Peserta	204,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI				40 Perusahaan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	40 Perusahaan	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase pelaporan SIINAS	%		%	20 %	**425,000,000**						20 %	**433,500,000**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	%		%	34 %	**425,000,000**						34 %	**433,500,000**	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data SIINAS				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	153,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah peserta diseminasi dan publikasi data informasi industri				200 Orang	225,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	200 Orang	229,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup dalam penyampaian data ke SIINAS Jumlah perusahaan yang menyampaikan data laporan industri ke SIINAS				1 Dokumen 75 Perusahaan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen 75 Perusahaan	51,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TOTAL											**42,455,231,000**							**44,476,849,419**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**40,026,694,000**							**41,451,234,547**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Nilai IKM Rata-rata Nilai AKIP dan IKM	Point Point Point		Point Point Point	75.50 Point 75.50 Point 75.50 Point	**35,095,641,000**						75.50 Point 75.50 Point 75.50 Point	**36,441,955,387**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	Point		Point	76.89 Point	**70,686,000**						76.89 Point	**72,099,768**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				5 Dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	5 Dokumen	51,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kinerja Yang Tersedia				3 dokumen	20,686,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	3 dokumen	21,099,768	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	% %		% %	100 % 100 %	**21,282,520,000**						100 % 100 %	**23,102,652,644**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				100 %	21,282,520,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	100 %	23,102,652,644	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**0**							**358,579,508**	
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		12 Bulan	358,579,508	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				100 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal				100 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tercapainya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai Terpenuhinya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	% %		% %	69 % 100 %	**527,647,000**						69 % 100 %	**558,413,517**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				19 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	19 Jenis	10,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				5 Jenis	9,999,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	5 Jenis	10,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia				6 Jenis	482,257,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	6 Jenis	501,913,861	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				12 Bacaan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	12 Bacaan	10,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi				24 Kegiatan	25,391,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	24 Kegiatan	25,899,656	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**0**	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur yang dibeli				3 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		3 Jenis	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tercapainya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	%		%	100 %	**12,618,428,000**						100 %	**11,731,721,760**	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	351,548,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	12 Bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Non ASN Jumlah Pembayaran Gaji Outsourching Tenaga Keamanan dan Kebersihan				12 Bulan 12 Bulan	12,266,880,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	12 Bulan 12 Bulan	11,731,721,760	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	% %		% %	69 % 69 %	**596,360,000**						69 % 69 %	**618,488,190**	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara				41 Kendaraan	501,960,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	41 Kendaraan	511,999,552	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara				5 Jenis	94,400,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	5 Jenis	96,288,638	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				138 m2	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai	138 m2	10,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Jumlah ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	%		%	36,65 %	**4,647,177,000**						36,65 %	**4,990,945,170**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	%		%	70 %	**78,917,000**						70 %	**111,095,595**	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan dan disosialisasikan				3 Dokumen	78,917,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Dokumen	111,095,595	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%		%	19.71 %	**1,006,735,000**						19.71 %	**1,206,390,200**	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpasang / terbangun di jalan dan di luar badan jalan (fasilitas parkir on street dan off street, halte, shelter dll)				738 Perlengkapan Jalan	452,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat kabupaten Bandung	738 Perlengkapan Jalan	563,040,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan terpasang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat				745 Perlengkapan Jalan	518,111,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat kabupaten Bandung	745 Perlengkapan Jalan	605,993,248	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di badan jalan dan di luar badan jalan (fasilitas parkir on street dan off street, halte, shelter dll) yang di perbaiki				1 fasilitas	36,624,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat kabupaten Bandung	1 fasilitas	37,356,952	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C	%		%	65.23 %	**780,216,000**						65.23 %	**1,092,825,968**	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Jalan Berkeselamatan Persentase Koneksitas Angkutan Umum Persentase Sarana Transportasi Berkeselamatan				100 % 100 % 100 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 % 100 % 100 %	1,092,825,968	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas utama dan pendukung terminal tipe C yang diperbaiki				3 Fasilitas	780,216,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Fasilitas	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala	%		%	40.1 %	**1,112,564,000**						40.1 %	**298,415,484**	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan bukti lulus uji				30000 Buah	750,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	30000 Buah	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor yang dilakukan Persentase Kendaraan Bermotor yang dilakukan Uji Berkala				100 % 100 %	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	100 % 100 %	182,920,884	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara				29 Alat Uji	294,334,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	29 Alat Uji	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Uji Emisi pada Pelayanan Terpadu Uji Petik Angkutan Umum Lebaran, Natal dan Tahun Baru				44 layanan 6 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	44 layanan 6 Kegiatan	89,994,600	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah lokasi uji petik dan uji emisi kendaraan bermotor				70 Lokasi	68,230,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	70 Lokasi	25,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Rata-rata kinerja ruas jalan (rata-rata kecepatan perjalanan)	%		%	94 %	**901,587,000**						94 %	**700,949,304**	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan survei lalu lintas dan jumlah kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas				3 Kegiatan	123,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	3 Kegiatan	125,878,445	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas				16 Kegiatan	144,383,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	16 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas				2 Kegiatan	618,194,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	559,158,859	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten				4 Kegiatan	15,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	4 Kegiatan	15,912,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui	%		%	100 %	**33,590,000**						100 %	**105,661,800**	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen andalaln yang dibahas				13 dokumen	21,860,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	13 dokumen	93,697,200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pelaksanaan pengawasan rekomendasi andalalin				6 Lokasi	11,730,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	6 Lokasi	11,964,600	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah sektor keselamatan LLAJ yang diinspeksi	%		%	21.09 %	**203,427,000**						21.09 %	**395,439,414**	
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ)				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	248,168,550	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor umum diinspeksi				420 Pengemudi	203,427,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	420 Pengemudi	147,270,864	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor umum diinspeksi				28 Pengemudi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	28 Pengemudi	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi penumpang	%		%	44.04 %	**380,141,000**						44.04 %	**626,990,440**	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang yang tersedia				2527 Kendaraan	325,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Mayarakat Kabupaten Bandung	2527 Kendaraan	570,746,620	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan angkutan umum orang dan barang yang diawasi				44 Perusahaan	55,141,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Mayarakat Kabupaten Bandung	44 Perusahaan	56,243,820	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.11		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi regulator	%		%	65.75 %	**150,000,000**						65.75 %	**453,176,965**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Buy the service angkutan umum				1 llopline	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupten Bandung	1 llopline	271,220,542	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek perkotaan yang dievaluasi				1 dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupten Bandung	1 dokumen	181,956,423	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	%		%	50 %	**17,974,000**						50 %	**18,333,990**	
2	**15**	**03**	2.03		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	Jumlah izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan	%		%	50 %	**17,974,000**						50 %	**18,333,990**	
2	15	03	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan pemenuhan persyaratan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang terfasilitasi				2 Permohonan	17,974,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	2 Permohonan	18,333,990	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	%		%	25 %	**265,902,000**						25 %	**0**	
2	**15**	**05**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Persentase Rencana Induk perkeretaapian yang ditetapkan	%		%	75 %	**265,902,000**						75 %	**0**	
2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian yang disusun				1 Dokumen	265,902,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
					TOTAL	40,026,694,000								41,451,234,547	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**687,969,000**							**0**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rata-rata Kebiasaan membaca masyarakat (X3) Rata-rata ketersediaan fasilitas membaca (X1) Rata-rata Pemanfaatan bahan bacaan (X2)	Poin Poin Poin		Poin Poin Poin	55.50 Poin 45.50 Poin 67.00 Poin	**657,969,000**						55.50 Poin 45.50 Poin 67.00 Poin	**0**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Perpustakaan yang Dikelola	Jenis		Jenis	5 Jenis	**476,079,000**						5 Jenis	**0**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan di pelihara				320 layanan	104,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	320 layanan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan daerah yang dikembangkan				10 perpustakaan	35,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10 perpustakaan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina				50 perpustakaan sekolah	38,317,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	50 perpustakaan sekolah	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina				70 orang	42,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	70 orang	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Judul Buku Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bandung				1100 Judul	154,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1100 Judul	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang Terpelihara				2000 buku	33,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2000 buku	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pustakawan				1 Dokumen	68,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Rangka Pembudayaan Gemar Membaca	Jenis		Jenis	3 Jenis	**181,890,000**						3 Jenis	**0**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat				2 Kegiatan	49,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Kegiatan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan				5 kegiatan	111,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5 kegiatan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial				2 Kegiatan	20,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Kegiatan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase kecamatan yang terdapat naskah kuno	Persen		Persen	20 Persen	**30,000,000**						20 Persen	**0**	
2	**23**	**03**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jenis		Jenis	1 Jenis	**30,000,000**						1 Jenis	**0**	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno				1 Kegiatan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Kegiatan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno				1 Kegiatan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Kegiatan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**11,524,817,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Poin		Poin	73.75 Poin	**11,156,340,000**						73.75 Poin	**0**	
2	**24**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis dokumen perencanaan yang disusun	Jenis		Jenis	5 Jenis	**55,719,000**						5 Jenis	**0**	
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Disarpus				4 Dokumen	12,316,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD				2 Dokumen	11,712,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA DISARPUS				2 Dokumen	14,712,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DISARPUS				2 Dokumen	8,102,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi DISARPUS Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja DISARPUS				4 Dokumen 4 Dokumen	8,877,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4 Dokumen 4 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**9,385,485,000**						4 Dokumen	**0**	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	9,377,565,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	14 Bulan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun DISARPUS				1 Dokumen	4,059,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran DISARPUS				2 Dokumen	3,861,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Berhasil disusun	Jenis		Jenis	1 Jenis	**2,508,000**						1 Jenis	**0**	
2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah DISARPUS				7 Dokumen	2,508,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	7 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Berhasil disusun	Jenis		Jenis	3 Jenis	**22,220,000**						3 Jenis	**0**	
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendapat Pakaian Dinas				19 pegawa	10,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	19 pegawai	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun				3 Dokumen	6,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				1 Pegawai	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Pegawai	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Operasional Umum Kantor yang Tersedia	Jenis		Jenis	9 Jenis	**200,907,000**						9 Jenis	**0**	
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Alat-alat Listrik dan Penerangan				10 Jenis	7,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10 Jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				2 Jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga				10 Jenis	4,077,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10 Jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5 Jenis	5,346,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5 Jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15 Jenis	47,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	15 Jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	J Jumlah Bulan Pembayaran penyediaan Surat Kabar Harian dan Majalah				12 Bulan	18,059,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12 Bulan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Snack dan Makan Minum Kegiatan				330 Orang per Kegiatan	17,127,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	330 Orang per Kegiatan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar DISARPUS				50 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	50 Laporan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Dinamis in Aktif yang Dikelola				3 Daftar Arsip	1,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3 Daftar Arsip	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Berhasil Dibeli	Jenis		Jenis	5 Jenis	**14,300,000**						5 Jenis	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 jenis	14,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Kantor yang Tersedia	Jenis		Jenis	3 Jenis	**1,106,107,000**						3 Jenis	**0**	
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar				2200 surat	6,572,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2200 surat	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 bulan	113,013,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12 bulan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	986,522,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12 bulan	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jenis		Jenis	5 Jenis	**369,094,000**						5 Jenis	**0**	
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				5 unit	73,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5 unit	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara				14 unit	77,389,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	14 unit	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Meubeulair yang Dipelihara				1 jenis	1,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara/servis				2 jenis	16,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara				3 gedung	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3 gedung	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen		Persen	20 Persen	**321,826,000**						20 Persen	**0**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang Dikelola	Jenis		Jenis	10 Jenis	**63,893,000**						10 Jenis	**0**	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen/Arsip in Aktif yang disusutkan				1 Dokumen	22,486,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Kearsipan				1 Dokumen	41,407,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Arsip Statis yang Dikelola	Jenis		Jenis	2 Jenis	**163,150,000**						2 Jenis	**0**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Jenis Pemeliharaan Arsip				2 Jenis	163,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Jenis	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**94,783,000**						2 Dokumen	**0**	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kearsipan				2 Dokumen	94,783,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase arsip yang terlindungi	Persen		Persen	20 Persen	**23,413,000**						20 Persen	**0**	
2	**24**	**03**	2.04		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**23,413,000**						2 Dokumen	**0**	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah dokumen arsip hasil alih media yang sesuai dengan keabsahan arsip				2 Dokumen	23,413,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase Informasi Arsip yang Termanfaatkan	Persen		Persen	20 Persen	**23,238,000**						20 Persen	**0**	
2	**24**	**04**	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen yang Telah diberikan Izin Penggunaan Arsip	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**23,238,000**						1 Dokumen	**0**	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Dokumen/Arsip yang dientry ke dalam Aplikasi Si-Dokter				1 Dokumen	23,238,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Dokumen	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
									TOTAL	**12,212,786,000**							**0**		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**62,243,242,000**							**55,809,182,222**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	% Poin		% Poin	86,84 % 82 Poin	**39,285,230,000**						86,84 % 82 Poin	**41,829,161,129**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	**149,189,000**						14 Dokumen	**152,172,780**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang diselesaikan tepat waktu				4 dokumen	91,545,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 dokumen	93,375,900	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	8,240,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	8,404,800	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	8,240,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	8,404,800	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	8,240,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	8,404,800	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	8,240,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	8,404,800	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen dan data dukung laporan capaian kinerja Perangkat Daerah				6 Dokumen	24,684,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	6 Dokumen	25,177,680	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelayanan keuangan dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,499,143,000**						12 Bulan	**36,103,584,097**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan pegawai terpenuhi				12 Bulan	33,474,843,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	36,078,798,097	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah periode verifikasi terhadap dokumen keuangan				12 Bulan	4,300,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	4,386,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	5,100,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang dilaporkan				17 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	17 Dokumen	15,300,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas	bulan		bulan	12 bulan	**75,505,000**						12 bulan	**77,015,100**	
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian				12 Bulan	10,505,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan	10,715,100	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Periode monitoring kinerja pegawai				12 Bulan	7,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan	7,650,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan teknis kepegawaian terlaksana				12 Bulan	57,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan	58,650,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelayanan umum kantor dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	**809,280,000**						12 Bulan	**823,438,672**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				6 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	6 Jenis	20,400,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				16 Jenis	314,780,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	16 Jenis	321,075,600	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				3 Jenis	75,250,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Jenis	76,755,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia				1 Jenis	40,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Jenis	40,800,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				29 jenis	101,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	29 jenis	101,350,072	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				3 jenis	3,150,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 jenis	3,213,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				430 HOK	254,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	430 HOK	259,845,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang kantor dinas disediakan	Jenis		Jenis	5 Jenis	**167,820,000**						5 Jenis	**171,176,400**	
3	27	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat bongkar muat barang besar (forklift)				0 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				2 jenis	105,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 jenis	107,100,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli				3 Jenis	62,820,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Jenis	64,076,400	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	**3,664,393,000**						12 Bulan	**3,563,451,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				12 Bulan	1,500,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	1,530,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	555,440,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	566,548,800	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan, keamanan, tenaga administrasi dan tenaga teknis				12 Bulan	3,107,453,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	2,995,372,800	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	**919,900,000**						12 Bulan	**938,322,480**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				12 Bulan	47,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	47,940,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil Operasional yang dipelihara				12 Bulan	340,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	346,800,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa				2 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Jenis	20,400,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				9 Gedung	512,900,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	9 Gedung	523,182,480	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Populasi Ternak Produksi komoditi hortikultura Produksi komoditi perkebunan Produksi komoditi Tanaman Pangan	ekor ton ton ton		ekor ton ton ton	7029529 ekor 400144 ton 13147 ton 889707 ton	**17,340,033,000**						7029529 ekor 400144 ton 13147 ton 889707 ton	**6,918,385,460**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	%		%	6 %	**6,082,378,000**						6 %	**2,219,338,440**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Fasilitasi sarana Benih, Pengolahan Tanah, dan Pompa Jumlah database dan sistem informasi sarana pertanian yang di-update Jumlah implementasi teknologi sarana pertanian				0 0 160 Paket 1 berkas 3 Kegiatan	5,167,378,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan Kelompok tani	0 0 160 Paket 1 berkas 3 Kegiatan	1,286,038,440	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah fasilitasi sarana pendukung pertanian yang disediakan				6 Jenis	915,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan Kelompok tani	6 Jenis	933,300,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan	komoditi		komoditi	4 komoditi	**5,288,520,000**						4 komoditi	**2,430,766,940**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi Bibit dan Pengolah Lahan Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang dihasilkan oleh UPTD Pembibitan Jumlah komoditi unggulan pertanian yang dilestarikan dan dikembangkan di UPTD Pembibitan				38 Paket 1 Jenis 3 Komoditi	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan Kelompok Tani	38 Paket 1 Jenis 3 Komoditi	712,457,760	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luas lahan intensifikasi tanaman pertanian (ha) Jumlah penerapan tekologi pertanian yang dikembangkan				10 ha 2 Kegiatan	2,587,792,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan Kelompok Tani	10 ha 2 Kegiatan	1,596,804,900	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi sarana benih, pengolah lahan, pengendalian, dan pasca panen Jumlah luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan (Ha) Jumlah pengembangan tanaman pertanian				79 Paket 10 ha 3 komoditi	2,700,728,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan Kelompok Tani	79 Paket 10 ha 3 komoditi	121,504,280	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	%		%	3.5 %	**5,969,135,000**						3.5 %	**2,268,280,080**	
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak unggul yang dihasilkan di UPTD Jumlah Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang dikeluarkan				30 ekor 25 Dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Peternak, Pelaku usana peternakan dan Kelompok Ternak	30 ekor 25 Dokumen	726,036,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah bibit ternak yang terfasilitasi recording Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pembinaan sertifikasi				75 ekor 5 Kelompok	223,750,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Peternak, Pelaku usana peternakan dan Kelompok Ternak	75 ekor 5 Kelompok	228,225,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah kelompok yang dibina dalam penyediaan Hijauan Pakan Ternak (kelompok) Jumlah peternak pembibit yang mampu menerapkan pembibitan ternak yang baik (orang) Jumlah Sapi Potong/Perah yang di Inseminasi Buatan (ekor)				3 kelompok 20 orang 9000 ekor	455,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Peternak, Pelaku usana peternakan dan Kelompok Ternak	3 kelompok 20 orang 9000 ekor	464,100,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Fasilitasi Bibit Ternak Jumlah peternak yang mampu menerapkan teknis budidaya ternak yang baik (orang)				8 Paket 20 orang	5,290,385,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Peternak, Pelaku usana peternakan dan Kelompok Ternak	8 Paket 20 orang	849,919,080	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan infrastuktur pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	% %		% %	9.5 % 77 %	**2,241,626,811**						9.5 % 77 %	**2,393,439,180**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian	dokumen		dokumen	13 dokumen	**801,500,000**						13 dokumen	**817,539,180**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah buku data pokok pertanian Jumlah jenis informasi pengelolaan LP2B Luas lahan LP2B yang dikelola (ha)				4 dokumen 1 Kegiatan 10 ha	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	4 dokumen 1 Kegiatan 10 ha	102,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang tersusun Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan (%)				5 Dokumen 15 persen	352,800,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	5 Dokumen 15 persen	359,865,180	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian				2 Laporan	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	2 Laporan	76,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah kajian pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas				2 Dokumen	273,700,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	2 Dokumen	279,174,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	Hektar		Hektar	2950 Hektar	**850,000,000**						2950 Hektar	**1,142,400,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)				4 unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	4 unit	408,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani		25,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)				1 unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	1 unit	25,500,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)				1 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	1 unit	25,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)				1 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	1 unit	25,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	2 Unit	224,400,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)				4 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	4 unit	153,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (puskeswan, pasar hewan, kandang komunal, sumur dangkal, sumur dalam, dll) (unit)				3 unit	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan Kelompok Tani	3 unit	255,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**	2.03		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah pengembangan sarana prasarana dalam cluster peternakan	jenis		jenis	3 jenis	**590,126,811**							3 jenis	**433,500,000**	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Fasilitasi Prasarana Kandang Ternak Fasilitasi sarana kandang Ternak Jumlah kelompok tani ternak yang mengembangkan potensi hasil peternakan wilayahnya Jumlah Kelompok ternak yang menerapkan konsep budidaya ramah lingkungan				3 Paket 5 Paket 2 kelompok 5 Kelompok	590,126,811	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Kelompok ternak	3 Paket 5 Paket 2 kelompok 5 Kelompok	433,500,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	% %		% %	85.1 % 73.05 %	**1,425,939,000**						85.1 % 73.05 %	**2,289,900,000**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyakit PHMS yang difasilitasi	PHMS		PHMS	4 PHMS	**940,939,000**						4 PHMS	**928,200,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang divaksin dan dilayani (ekor)				550 ekor	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat, peternak dan kelompok ternak	550 ekor	408,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kompartemen yang terkendali PHMS dan zoonosis (wilayah)				1 lokasi	210,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat, peternak dan kelompok ternak	1 lokasi	214,200,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Fasilitasi Obat Cacing Ruminansia Kecil dan Besar Jumlah Kelompok terdampak kasus yang difasilitasi (Kelompok)				11 Paket 10 kelompok	330,939,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat, peternak dan kelompok ternak	11 Paket 10 kelompok	306,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	ekor		ekor	10200 ekor	**150,000,000**						10200 ekor	**433,500,000**	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah lahan pasar hewan (lokasi) Jumlah pelayanan penjualan ternak di pasar hewan (ekor) Jumlah sarana yang menunjang operasional Pasar Hewan (jenis)				2 lokasi 200 ekor 2 jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat, peternak dan pelaku usaha peternakan	2 lokasi 200 ekor 2 jenis	280,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak kurban yang terawasi status kesehatannya (ekor)				10000 ekor	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat, peternak dan pelaku usaha peternakan	10000 ekor	153,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah wilayah pelayanan Puskeswan dilayani	kecamatan		kecamatan	31 kecamatan	**0**						31 kecamatan	**357,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan/ternak yang terlayani kesehatan hewan oleh UPT Puskeswan dan Lab (ekor)				10000 ekor	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat, peternak dan kelompok ternak	10000 ekor	357,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH Jumlah penyakit PHMS yang difasilitasi	lokasi penyakit		lokasi penyakit	8 lokasi 4 penyakit	**335,000,000**						8 lokasi 4 penyakit	**571,200,000**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah ternak yang dipotong di UPTD RPH dalam pemenuhan produk hewan yang HAUS				8000 ekor	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat veteriner dan Kelompok ternak	8000 ekor	229,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah produk hewan yang diperiksa Jumlah ternak ruminansia betina produktif dikendalikan di RPH/tahun (ekor)				200 sampel 20 ekor	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat veteriner dan Kelompok ternak	200 sampel 20 ekor	153,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah penerapan persyaratan Teknis Kesmavet di masyarat				2 kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat veteriner dan Kelompok ternak	2 kegiatan	51,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel hasil produk ternak yang diuji tingkat Halal Aman Utuh dan Sehat				200 sampel	135,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat veteriner dan Kelompok ternak	200 sampel	137,700,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	%		%	3.2 %	**1,475,413,189**						3.2 %	**797,296,453**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Luas lahan pertanian yang terfasilitasi pengendalian dan penanggulangan OPT dan bencana pertanian	Hektar		Hektar	1000 Hektar	**1,475,413,189**						1000 Hektar	**797,296,453**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Fasilitasi sarana pengendalian OPT Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian hortikultura dengan baik (kelompok) Jumlah petani yang mampu menerapkan Pengendalian Hama (orang)				117 Paket 10 kelompok 30 orang	1,275,413,189	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan kelompok tani	117 Paket 10 kelompok 30 orang	593,296,453	DINAS PERTANIAN
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah fasilitasi, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan				3 kali	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Petani dan kelompok tani	3 kali	204,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	%		%	100 %	**175,000,000**						100 %	**178,500,000**	
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	pelaku usaha		pelaku usaha	10 pelaku usaha	**175,000,000**						10 pelaku usaha	**178,500,000**	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah fasilitasi penilaian kelayakan dan pemberian perimbangan teknis izin usaha pertanian				20 Dokumen	125,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan pelaku usaha pertanian	20 Dokumen	127,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian				2 Kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Masyarakat dan pelaku usaha pertanian	2 Kegiatan	51,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani Persentase peningkatan masing-masing kelas kelompok	% %		% %	2.45 % 4.86 %	**300,000,000**						2.45 % 4.86 %	**1,402,500,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah wilayah terlayani penyuluhan pertanian	kecapatan		kecapatan	31 kecapatan	**300,000,000**						31 kecapatan	**1,402,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah jenis kegiatan kepenyuluhan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat diikuti/dilaksanakan (kali) Jumlah Penyuluh ASN dan Non-ASN yang meningkat pengetahuan teknis (orang) Jumlah penyuluh pertanian yang dipenuhi kebutuhan administrasi dan operasional penyuluhan (orang)				3 Kali 30 orang 155 orang	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Penyuluh, Petani, Kelompok Tani dan Lembaga masyarakat	3 Kali 30 orang 155 orang	306,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok dan lembaga tani yang difasilitasi peningkatan kemampuan manajemen organisasi				5 kelompok	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Penyuluh, Petani, Kelompok Tani dan Lembaga masyarakat	5 kelompok	204,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan pertanian tersedia (jenis)				5 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Penyuluh, Petani, Kelompok Tani dan Lembaga masyarakat	5 Jenis	433,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan usaha (unit)				5 unit	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Penyuluh, Petani, Kelompok Tani dan Lembaga masyarakat	5 unit	306,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang/Bimbingan Teknis Kelompok Tani				3 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.	Penyuluh, Petani, Kelompok Tani dan Lembaga masyarakat	3 Kegiatan	153,000,000	DINAS PERTANIAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**375,000,000**							**400,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**375,000,000**							**400,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**						**375,000,000**							**400,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana pertanian yang terpelihara dan dapat digunakan Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam penggunaan sarana pendukung pertanian				30 unit 30 orang	375,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		30 unit 30 orang	400,000,000	DINAS PERTANIAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**475,000,000**							**475,000,000**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**175,000,000**							**175,000,000**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**						**175,000,000**							**175,000,000**	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara				2 unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		2 unit	175,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**300,000,000**							**300,000,000**	
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**						**300,000,000**							**300,000,000**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah ternak yang dipotong di UPTD RPH dalam pemenuhan produk hewan yang ASUH				8000 ekor	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		8000 ekor	300,000,000	DINAS PERTANIAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**490,000,000**							**520,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**490,000,000**							**520,000,000**	
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**						**490,000,000**							**520,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi Bibit dan Pengolah Lahan Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang dihasilkan oleh UPTD Pembibitan Jumlah komoditi unggulan pertanian yang dilestarikan dan dikembangkan di UPTD Pembibitan				38 paket 1 Jenis 3 Komoditi	490,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		38 paket 1 Jenis 3 Komoditi	520,000,000	DINAS PERTANIAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**350,000,000**							**382,500,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**350,000,000**							**382,500,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**350,000,000**							**382,500,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan/ternak yang terlayani kesehatan hewan oleh UPT Puskeswan dan Lab (ekor)				10000 ekor	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		10000 ekor	382,500,000	DINAS PERTANIAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**275,000,000**							**275,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**275,000,000**							**275,000,000**	
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**						**275,000,000**							**275,000,000**	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah lahan pasar hewan (lokasi) Jumlah pelayanan penjualan ternak di pasar hewan (ekor) Jumlah sarana yang menunjang operasional Pasar Hewan (jenis)				2 lokasi 200 ekor 2 jenis	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		2 lokasi 200 ekor 2 jenis	275,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**861,800,000**							**875,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**861,800,000**							**875,000,000**	
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**861,800,000**							**875,000,000**	
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak unggul yang dihasilkan di UPTD Jumlah Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang dikeluarkan				30 ekor 25 Dokumen	861,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		30 ekor 25 Dokumen	875,000,000	DINAS PERTANIAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1,225,000,000**							**1,225,000,000**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**150,000,000**							**150,000,000**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**						**150,000,000**							**150,000,000**	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan yang dibangun/direhabilitas/dipelihara (unit)				4 unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		4 unit	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1,075,000,000**							**1,075,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**						**1,075,000,000**							**1,075,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah jenis kegiatan kepenyuluhan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat diikuti/dilaksanakan (kali) Jumlah Penyuluh ASN dan Non-ASN yang meningkat pengetahuan teknis (orang) Jumlah penyuluh pertanian yang dipenuhi kebutuhan administrasi dan operasional penyuluhan (orang)				3 kali 30 orang 155 orang	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		3 kali 30 orang 155 orang	300,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok dan lembaga tani yang difasilitasi peningkatan kemampuan manajemen organisasi				5 kelompok	200,000,000				Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		5 kelompok	200,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan pertanian tersedia (jenis)				5 Jenis	425,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		5 Jenis	425,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang/Bimbingan Teknis Kelompok Tani				3 kegiatan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.		3 kegiatan	150,000,000	DINAS PERTANIAN
										TOTAL	**66,295,042,000**							**59,961,682,222**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**50,757,803,929**							**12,533,957,034**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Akses aman terhadap air minum di kawasan permukiman	persen		persen	90,73 persen	**28,378,643,000**						90,73 persen	**12,413,189,034**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah spam yang terbangun	unit		unit	176 unit	**28,378,643,000**						176 unit	**12,413,189,034**	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun				149 unit	26,491,093,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	masyarakat kabupaten bandung	149 unit	10,890,584,034	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang berkomitmen mengelola air bersih dan sanitasi berstrata baik				535 KK	495,050,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	masyarakat kabupaten bandung	535 KK	504,951,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diperbaiki				27 unit	1,392,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	masyarakat kabupaten bandung	27 unit	1,017,654,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Akses aman terhadap sanitasi di kawasan permukimann	persen		persen	89,24 persen	**22,379,160,929**						89,24 persen	**120,768,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sarana sanitasi yang terbangun	unit		unit	241 unit	**22,379,160,929**						241 unit	**120,768,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)				800 KK	6,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	800 KK	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional IPAL Domestik				3500 KK	118,400,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	masyarakat kabupaten bandung	3500 KK	120,768,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)				1750 KK	16,260,760,929	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		masyarakat kabupaten bandung	1750 KK	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**99,169,615,216**							**47,055,721,850**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	**20,753,900,000**						6 kegiatan	**22,063,017,718**	
1	**04**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Data Informasi Keciptakaryaan, Kesesuain Program/Kegiatan Yang Diusulkan Wilayah Terhadap Program/Kegiatan Yang Diterima Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**241,104,000**						100 persen	**244,547,775**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen prioritas pembangunan bidang keciptakaryaan				1 Dokumen	97,151,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	1 Dokumen	99,094,275	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen data sarana dan prasarana keciptakaryaan di Kabupaten Bandung				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	1 Dokumen	51,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Usulan Kegiatan Kewilayahan				475 Usulan	68,953,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	475 Usulan	68,953,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				10 Dokumen	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	10 Dokumen	25,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	persen		persen	100 persen	**15,027,366,000**						100 persen	**16,438,215,185**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	15,027,366,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	16,438,215,185	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	persen		persen	100 persen	**328,900,000**						100 persen	**335,478,000**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				10 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	10 Jenis	10,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli				60 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	60 Jenis	10,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen KAP-Jumlah Dokumen Apprisial				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	10,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				22 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	22 Jenis	10,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli Jumlah/jenis media informasi				12 Bulan 2 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan 2 Jenis	10,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pelaksanaan kegiatan hari-hari besar bersejarah (HUT RI, HUT PU, HUT Kab.Bandung)				3 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	3 Kegiatan	10,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu				12 Bulan	18,900,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	19,278,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				170 Orang Kegiatan	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	170 Orang Kegiatan	255,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	persen		persen	100 persen	**339,000,000**						100 persen	**345,780,000**	
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibeli				5 Unit	339,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	5 Unit	345,780,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	persen		persen	100 persen	**4,400,030,000**						100 persen	**4,273,146,758**	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik				12 Bulan	84,781,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	86,476,688	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan pelayanan umum kantor				12 Bulan	4,315,249,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	4,186,670,070	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	persen		persen	100 persen	**417,500,000**						100 persen	**425,850,000**	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				12 Bulan	210,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	214,200,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara				12 Bulan	157,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	160,650,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				12 Bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	asn dan non asn disperkimtan kab. bandung	12 Bulan	51,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung	persen		persen	96,36 persen	**1,000,650,000**						96,36 persen	**780,963,000**	
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang tertangani	persen		persen	38.46 persen	**235,000,000**						38.46 persen	**0**	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan rumah beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota				3 unit	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	3 unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni	persen		persen	41.72 persen	**536,200,000**						41.72 persen	**546,924,000**	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	jumlah rusunawa yang dibangun prasarana dan sarana utilitas				3 lokasi	536,200,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	3 lokasi	546,924,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	persen		persen	100 persen	**229,450,000**						100 persen	**234,039,000**	
1	04	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	jumlah dokumern kebijakan strategi dan program perumahan				1 dokumen	120,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	1 dokumen	122,400,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah laporan koodinasi dalam rangka inventarisasi perumahan dan verifikasi PSU perumahan				1 dokumen	109,450,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	1 dokumen	111,639,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	persen		persen	0.23 persen	**2,380,350,000**						0.23 persen	**2,430,957,000**	
1	**04**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	persentase kesesuaian luas kawasan permukiman dengan rencana tata ruang	persen		persen	10 persen	**434,350,000**						10 persen	**443,037,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pengembangan kawasan permukiman				2 dokumen	213,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	2 dokumen	217,260,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen kajian keterpaduan kawasan permukiman				1 dokumen	120,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	1 dokumen	122,400,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman				1 dokumen	101,350,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	1 dokumen	103,377,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Persentase jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 ha	persen		persen	0.23 persen	**1,946,000,000**						0.23 persen	**1,987,920,000**	
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	jumlah lokasi kawasan kumuh yang ditata dan jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh				10 lokasi	1,946,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	Persentase jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 ha	10 lokasi	1,987,920,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase prioritas rumah tidak layak huni	persen		persen	74 persen	**60,660,257,216**						74 persen	**11,541,454,332**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan	persen		persen	74 persen	**60,660,257,216**						74 persen	**11,541,454,332**	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak				471 titik 476 unit	60,660,257,216	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat kabupaten bandung	471 titik 476 unit	11,541,454,332	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	persen		persen	17 persen	**14,374,458,000**						17 persen	**10,239,329,800**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	- Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan - Jumlah Lokasi Penataan PSU	kegiatan		kegiatan	8 kegiatan	**14,374,458,000**						8 kegiatan	**10,239,329,800**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan - Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana Taman dan TPU				8 kegiatan	14,374,458,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat kabupaten bandung	8 kegiatan	10,239,329,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2,132,610,000**							**2,175,262,706**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase jumlah Penyelesaian sengketa tanah	persen		persen	60 persen	**247,250,000**						60 persen	**252,195,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan berupa upaya penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah milik pemerintah kab bandung	lokasi		lokasi	2 lokasi	**247,250,000**						2 lokasi	**252,195,000**	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah pemda yang telah selesai sengketa / jumlah tanah yang bersengketa				2 lokasi	247,250,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	2 lokasi	252,195,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase bidang tanah pemda yang bersertifikat	persen		persen	27,03 persen	**1,193,360,000**						27,03 persen	**1,217,227,706**	
2	**10**	**09**	2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Jumlah izin membuka tanah yang dikeluarkan	sertifikat		sertifikat	100 sertifikat	**1,193,360,000**						100 sertifikat	**1,217,227,706**	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah bidang tanah pemda yang sudah bersertifikat				100 Sertifikat	1,193,360,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	100 Sertifikat	1,217,227,706	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase bidang tanah pemda yang dimanfaatkan Persentase bidang tanah pemda yang dimanfaatkan	persen persen		persen persen	1,34 persen 1,47 persen	**692,000,000**						1,34 persen 1,47 persen	**705,840,000**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan kajian penggunaan dan pemanfaatan tanah - Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan teknis tentang pertanahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**692,000,000**						1 kegiatan	**705,840,000**	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah kegiatan kajian penggunaan dan pemanfaatan tanah				1 Kegiatan	500,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	1 Kegiatan	510,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan teknis tentang pertanahan				1 Kegiatan	192,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat kabupaten bandung	1 Kegiatan	195,840,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									TOTAL	**152,060,029,145**								**61,764,941,590**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**35,120,735,640**								**28,231,979,360**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	%		%	100 %	**12,003,917,000**						100 %	**13,130,397,132**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	%		%	100 %	**65,000,000**						100 %	**66,300,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang Diselesaikan Tepat Waktu				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	2 Dokumen	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,100,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,100,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP PD yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Evaluasi yang Diselesaikan Tepat Waktu				5 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,100,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	%		%	100 %	**10,064,875,000**						100 %	**11,215,770,048**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 Tahun				12 Bulan	10,064,875,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 Bulan	11,215,770,048	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Dibutuhkan				75 Stel	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerrah	75 Stel	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerrah	65 Orang	20,400,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	%		%	100 %	**132,700,000**						100 %	**135,354,179**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan yang Dibeli				26 Jenis	52,700,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	26 Jenis	53,754,179	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli Jumlah Satuan Alat Tulis Kantor yang Dibeli				5 Jenis 20 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	5 Jenis 20 Jenis	10,200,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli				20 Jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	20 Jenis	15,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang Diperlukan				6 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	6 Jenis	20,400,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Satuan Barang yang Dicetak dan Digandakan				10 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	10 Jenis	10,200,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Koran, Majalah, Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Dibeli				19 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	19 Jenis	5,100,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan /Material yang Dibeli				1 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	1 Jenis	5,100,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan dan Minuman				100 Orang	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	100 Orang	5,100,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Melaksanakan Rapat Koordinasi /Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				65 Orang	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Darah	65 Orang	10,200,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**40,800,000**	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeleur Kursi, Lemari dan Lain-Lain				3 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	3 Jenis	20,400,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibeli				1 Paket	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	1 Paket	20,400,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP	%		%	100 %	**1,259,841,000**						100 %	**1,221,841,375**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku Cek yang Tersedia				2 Jenis	5,855,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	2 Jenis	5,972,687	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi, Air dan Listrik				12 Bulan	215,537,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 Bulan	195,368,250	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Selama 1 Tahun, Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Kebersihan (Meliputi Penyediaan Alat Kebersihan) Outsourching Kebersihan				12 Bulan	1,038,449,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 Bulan	1,020,500,438	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik	%		%	100 %	**421,501,000**						100 %	**429,931,530**	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas /Dinas Jabatan yang Dipelihara				7 Unit	96,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	7 Unit	97,920,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Motor Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				22 Unit	170,501,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	22 Unit	173,911,530	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebeleur Kursi, Lemari dan Lain-lain				3 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	3 Jenis	5,100,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara				25 Unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	25 Unit	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara				3 Unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	3 Unit	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara				4 Unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	4 Unit	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos	%		%	41.89 %	**5,482,852,000**						41.89 %	**5,337,510,154**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**02**	2.02		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial	%		%	0 %	**43,981,000**						0 %	**32,124,390**	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang Diterbitkan				50 Orang	43,981,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Dunia Usaha yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	50 Orang	32,124,390	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial	%		%	0 %	**5,438,871,000**						0 %	**5,305,385,764**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Meningkat Kemampuannya				786 Orang	1,134,434,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sosial	786 Orang	1,547,131,022	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Memiliki Kompetensi Pelayanan Sosial				31 Orang	333,100,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sosial	31 Orang	530,541,015	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kesejahteraan Sosial (PKS) yang Meningkat Kemampuannya				571 Orang	3,132,428,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sosial	571 Orang	2,040,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				339 Orang	790,679,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sosial	339 Orang	1,034,713,727	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LKS, Puskesos, LK3 dan CSR yang Meningkat Kapasitasnya				5 Lembaga	48,230,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sosial	5 Lembaga	153,000,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	% %		% %	2.29 % 46.60 %	**50,000,000**						2.29 % 46.60 %	**51,000,000**	
1	**06**	**03**	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.	% %		% %	0 % 46.6 %	**50,000,000**						0 % 46.6 %	**51,000,000**	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal				10 Orang	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Warga Negara Migran Terlantar	10 Orang	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya	%		%	33.11 %	**9,058,090,040**						33.11 %	**4,429,757,419**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	%		%	0 %	**8,332,391,040**						0 %	**3,677,304,031**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Terlantar yang Mendapat Permakanan				629 Orang	1,815,613,500	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	629 Orang	765,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Sandang				215 Orang	1,531,750,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	215 Orang	552,585,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu				79 Orang	285,625,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	79 Orang	270,938,143	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Pelayanan Reunifikasi Keluarga				66 Orang	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	66 Orang	15,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Bimbingan Fisik, Mental dan Spriritual				585 Orang	2,966,475,040	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	585 Orang	1,020,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Mendapat Bimbingan Sosial				354 Orang	1,447,103,500	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	354 Orang	765,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Dokumen Kependudukan				100 Orang	34,020,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	100 Orang	34,700,400	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar				70 Orang	43,200,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	70 Orang	44,064,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Masuk				1 Dokumen	31,350,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	1 Dokumen	44,217,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS Terlantar (LU dan Anak) yang Mendapat Layanan Kedaruratan (Permakanan dan Sandang)				100 Orang	107,999,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	100 Orang	110,159,388	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS Terlantar yang Mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga				20 Orang	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	20 Orang	25,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk				20 Orang	29,255,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gepeng	20 Orang	29,840,100	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan	%		%	0 %	**725,699,000**							0 %	**752,453,388**	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Masuk				1 Dokumen	31,350,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	1 Dokumen	44,217,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS Terlantar (Tunsol dan PD) yang Mendapat Layanan Kedaruratan (Permakanan dan Sandang)				100 Orang	102,760,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	100 Orang	104,815,200	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan di UPTD				4 Jenis	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	4 Jenis	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan (Peralatan Kesehatan) yang Disediakan di UPTD				20 Jenis	14,900,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	20 Jenis	15,198,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat				104 Orang	482,739,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	104 Orang	492,394,188	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga				15 Orang	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	15 Orang	15,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang Direunifikasi dengan Keluarga				20 Orang	14,050,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	20 Orang	14,331,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rujukan				75 Orang	14,900,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	75 Orang	15,198,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	%		%	36.40 %	**5,130,156,600**						36.40 %	**2,397,000,000**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi	%		%	0 %	**5,130,156,600**						0 %	**2,397,000,000**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Diverifikasi				1 Dokumen	550,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Keluarga Fakir Miskin	1 Dokumen	561,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Terdata Cakupan Kabupaten/ Kota				355.027 KFM	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Keluarga Fakir Miskin	355.027 KFM	306,000,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/ Individu yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial				825 Orang	4,280,156,600	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Keluarga Fakir Miskin	825 Orang	1,530,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	%		%	24.61 %	**3,295,720,000**						24.61 %	**2,784,314,655**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS	%		%	0 %	**2,995,720,000**						0 %	**2,529,314,655**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Jiwa Korban Bencana yang Memperoleh Bantuan Permakanan per 7 Hari				5000 Orang	891,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Korban Bencana Alam dan Sosial	5000 Orang	909,330,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang				100 Orang	275,600,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Orang	281,112,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Paket Permakanan Khusus bagi Kelompok Rentan				100 Orang	312,620,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Orang	318,872,655	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial				100 Orang	1,516,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Orang	1,020,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih	% % %		% % %	0 % 0 % 0 %	**300,000,000**						0 % 0 % 0 %	**255,000,000**	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang Terbentuk				90 Orang	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Korban Bencana Alam dan Sosial	90 Orang	153,000,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Tersedia				86 Orang	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Korban Bencana Alam dan Sosial	86 Orang	102,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**102,000,000**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Unit		Unit	2 Unit	**100,000,000**						2 Unit	**102,000,000**	
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang Representatif				1 Unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Taman Makam Pahlawan	1 Unit	51,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang Terawat				2 Unit	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Taman Makam Pahlawan	2 Unit	51,000,000	DINAS SOSIAL
TOTAL											**35,120,735,640**							**28,231,979,360**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**34,240,468,949**							**24,009,498,607**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Nilai IKM	Poin Poin		Poin Poin	69 Poin 90 Poin	**14,846,956,000**						69 Poin 90 Poin	**15,201,698,607**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai IKM Nilai IKM	Poin poin		Poin poin	69 Poin 90 poin	**53,000,000**						69 Poin 90 poin	**13,260,000**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	2 Dokumen	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	1 Dokumen	3,060,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	1 Dokumen	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**11,115,341,000**						100 %	**12,213,044,627**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				54 Orang	11,095,341,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	54 Orang	12,192,644,627	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen kelengkapan laporan SPJ				5 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	5 Dokumen	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	1 Dokumen	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	1 Dokumen	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	2 Dokumen	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**35,000,000**						100 %	**5,100,000**	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian				74 Stel	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	74 Stel	0	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal				54 Orang	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	54 Orang	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**360,773,000**						100 %	**86,500,000**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				10 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	10 Jenis	15,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli				62 Jenis	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	62 Jenis	10,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli				2 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	2 Jenis	10,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				10 Jenis	130,273,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	10 Jenis	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan				12 Bulan	27,500,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	12 Bulan	10,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi				150 OH	13,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	150 OH	5,100,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				12 Bulan	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	12 Bulan	20,400,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Pemeliharaan Arsip				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	0 Jenis	10,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**98,000,000**						100 %	**35,700,000**	
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan		0	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				3 Unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	3 Unit	0	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	0 Jenis	10,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				2 Jenis	98,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	2 Jenis	25,500,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**2,642,462,000**						100 %	**2,658,634,080**	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				0 Surat	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	0 Surat	2,040,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	406,104,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	12 Bulan	414,226,080	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Pelayanan Kantorsa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	2,236,358,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	12 Bulan	2,242,368,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**542,380,000**						100 Persen	**189,459,900**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				1 Unit	42,380,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	1 Unit	20,400,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				7 Unit	180,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	7 Unit	102,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	0 Jenis	5,859,900	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				2 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	2 Jenis	10,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Internal Dinas Ketenagakerjaan	1 Unit	51,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	%		%	60 %	**571,000,000**						60 %	**101,000,000**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase program/kegiatan yang berdasarkan RTK	%		%	100 %	**571,000,000**						100 %	**101,000,000**	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen RTK Makro yg dievaluasi				1 Dokumen	271,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab.Bandung	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen RTK Mikro				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab.Bandung	1 Dokumen	51,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	%		%	40 %	**9,498,251,200**						40 %	**5,814,000,000**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan				4000	**8,993,547,200**						4000	**5,610,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah pencari kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan				3031 Orang	6,756,969,500	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabuoaten Bandung	3031 Orang	5,100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan LPK yang terjalin				14 Kerjasama	2,236,577,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabuoaten Bandung	14 Kerjasama	510,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	%		%	60 %	**250,000,000**						60 %	**102,000,000**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina				1 Kegiatan	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	LPK Swasta	1 Kegiatan	102,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**03**	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan produktivitasnya	Orang		Orang	50 Orang	**254,704,000**						50 Orang	**102,000,000**	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan produktivitasnya				30 Orang	254,704,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	30 Orang	102,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%		%	15 %	**7,330,491,949**						15 %	**1,835,000,000**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen penganggur di Kabupaten Bandung	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**6,633,070,949**						1 Dokumen	**1,631,000,000**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah kegiatan Pelayanan Antar Kerja				3 Kegiatan	979,022,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Mssyarakat Kab Bandung	3 Kegiatan	510,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan				180 Orang	91,524,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Mssyarakat Kab Bandung	180 Orang	51,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelnggaraan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan				12 Bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Mssyarakat Kab Bandung	12 Bulan	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja MAndiri				720 Orang	5,512,524,949	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mssyarakat Kab Bandung	720 Orang	1,020,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah dokumen penganggur di Kabupaten Bandung	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**613,138,000**						1 Dokumen	**153,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah informasi pasar kerja online yang tersedia				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Dokumen	51,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah kegiatan Job Fair yang dilaksanakan				1 Kegiatan	553,138,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	0	1 Kegiatan	102,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	persentase PMI yang terlayani	%		%	100 %	**84,283,000**						100 %	**51,000,000**	
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah operasional kegiatan layanan terpadu pada calon pekerja migran				12 Bulan	39,375,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	12 Bulan	20,400,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna penempatan yang mendapat sosialisasi pemberdayaan pekerja migran indonesia				20 Orang	44,908,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	20 Orang	30,600,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%		%	56 %	**1,993,769,800**						56 %	**1,057,800,000**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Perusahaan yang menerapkan PP dan PKB	%		%	97.1 %	**358,324,000**						97.1 %	**153,000,000**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melakukan pengesahan peraturan perusahaan				50 Perusahaan	141,784,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	50 Perusahaan	51,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran				5 Perusahaan	66,540,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	5 Perusahaan	25,500,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				30 Persen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kabupaten Bandung	30 Persen	76,500,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Porsentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi	%		%	56 %	**1,635,445,800**						56 %	**904,800,000**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial				1 Kegiatan	73,271,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	1 Kegiatan	20,400,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial				1 Kegiatan	70,100,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	1 Kegiatan	20,400,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah anggota organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dan non afiliasi yang terverifikasi dan terekapitulasi				150 Orang	842,074,800	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	150 Orang	510,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit				12 Bulan	500,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	12 Bulan	204,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan				95.2 persen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan.	Masyarakat Kab. Bandung	95.2 persen	150,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
										TOTAL	**34,240,468,949**							**24,009,498,607**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**19,596,270,000**							**20,552,748,080**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	**17,152,720,000**						12 Bulan	**17,515,993,080**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan yang tepat waktu	laporan		laporan	14 laporan	**35,000,000**						14 laporan	**35,700,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Biasa				4 Dokumen 36 HOK	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	4 Dokumen 36 HOK	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan				4 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	4 Dokumen	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	1 Dokumen	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	1 Dokumen	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	1 Dokumen	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	1 Dokumen	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	1 Dokumen	5,100,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**15,746,402,000**						100 Persen	**16,097,085,080**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				14 Bulan	15,728,322,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	14 Bulan	16,078,685,080	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang				0 Bulan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	0 Bulan	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				12 Dokumen	4,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	12 Dokumen	4,180,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK				12 Dokumen	4,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	12 Dokumen	4,370,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capain Keuangan				2 dokumen	9,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	2 dokumen	9,850,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	Orang		Orang	24 Orang	**130,060,000**						24 Orang	**131,060,000**	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP		0	INSPEKTORAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat				24 orang	130,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	24 orang	131,060,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**408,099,400**						100 Persen	**410,339,400**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik				22 orang	8,149,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	22 orang	8,249,400	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor				8 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	8 jenis	300,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga				2 jenis	3,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	2 jenis	3,760,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	12 Bulan	110,200,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Satuan Barang Cetakan & Penggandaan				7 jenis	58,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	7 jenis	59,190,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				3 eksemplar	23,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	3 eksemplar	23,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan				11 Bulan	84,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	11 Bulan	84,940,000	INSPEKTORAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				80 HOK	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	80 HOK	120,200,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**0**	
6	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset				0 0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 0	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**627,658,600**						100 Persen	**632,288,600**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				1500 dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	1500 dokumen	7,650,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan				12 Bulan	105,693,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	12 Bulan	108,173,600	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			APIP	12 Bulan	51,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	464,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	APIP	12 Bulan	465,465,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	Persen		Persen	100 Persen	**205,500,000**						100 Persen	**209,520,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit				1 unit	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sarana dan Prasarana Kantor APIP	1 unit	23,520,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit				24 unit	130,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sarana dan Prasarana Kantor APIP	24 unit	132,600,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sarana dan Prasarana Kantor APIP		21,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket				1 paket	31,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sarana dan Prasarana Kantor APIP	1 paket	32,400,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Objek		Objek	397 Objek	**1,006,245,000**						397 Objek	**1,581,000,000**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	65 Laporan	**559,760,000**						65 Laporan	**969,000,000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	204,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	255,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	102,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	102,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	109,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	153,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	0				0 0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	0 0	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	153,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	100 Laporan	**446,485,000**						100 Laporan	**612,000,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	207,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah & Stake Holder lainnya	62 Objek	306,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	239,285,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah & Stake Holder lainnya	62 Objek	306,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Cakupan Penanganan Pengawasan	Objek		Objek	197 Objek	**1,437,305,000**						197 Objek	**1,455,755,000**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	97 Laporan	**100,000,000**						97 Laporan	**102,000,000**	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	51,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	62 Objek	51,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	14 Laporan	**1,337,305,000**						14 Laporan	**1,353,755,000**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	37,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah dan Stake Holder lainnya	62 Objek	51,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah dan Stake Holder lainnya	62 Objek	25,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	1,225,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah dan Stake Holder lainnya	62 Objek	1,226,255,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Objek Pengawasan				62 Objek	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah dan Stake Holder lainnya	62 Objek	51,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
									TOTAL	**19,596,270,000**								**20,552,748,080**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**72,697,812,000**								**82,244,576,429**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP (RSUD Cicalengka) Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target	Point %		Point %	70.5 Point 90 %	**69,330,312,000**						70.5 Point 90 %	**74,936,076,429**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP (RSUD Cicalengka)	Point		Point	70.5 Point	**16,328,194,000**						70.5 Point	**18,288,059,414**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	16,328,194,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur PNS di RSUD Cicalengka	12 Bulan	18,288,059,414	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang kompeten bersertifikasi Nilai AKIP (RSUD Cicalengka)	Orang Point		Orang Point	13 Orang 70.5 Point	**65,000,000**						13 Orang 70.5 Point	**250,000,000**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang kompeten bersertifikasi				13 Orang	65,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur di RSUD Cicalengka	13 Orang	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP (RSUD Cicalengka)	Point		Point	70.5 Point	**1,071,161,000**						70.5 Point	**500,000,000**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Kegiatan	1,071,161,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur di RSUD Cicalengka	1 Kegiatan	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP (RSUD Cicalengka)	Point		Point	70.5 Point	**4,636,015,000**						70.5 Point	**4,645,080,000**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	1,260,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Cicalengka	12 Bulan	1,386,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor				12 Bulan	3,376,015,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Cicalengka	12 Bulan	3,259,080,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP (RSUD Cicalengka) Prosentase Aset dalam kondisi baik	Point %		Point %	70.5 Point 80 %	**229,942,000**						70.5 Point 80 %	**252,937,015**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang berfungsi dalam kondisi baik				5 Unit	110,942,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur di RSUD Cicalengka	5 Unit	122,037,015	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Aset dalam kondisi baik				80 %	119,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur di RSUD Cicalengka	80 %	130,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Prosentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target	%		%	90 %	**47,000,000,000**						90 %	**51,000,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rumah Sakit				12 Bulan	47,000,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	Pendapatan dari BLUD		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Cicalengka	12 Bulan	51,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka	%		%	87.25 %	**500,000,000**						87.25 %	**1,000,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka	%		%	87.25 %	**500,000,000**						87.25 %	**1,000,000,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien memakai SKTM yang berobat				100 Orang	500,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Cicalengka	100 Orang	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Prosentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan standar	%		%	42,66 %	**2,867,500,000**						42,66 %	**6,308,500,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Prosentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan standar	%		%	42.66 %	**2,867,500,000**						42.66 %	**6,308,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumberdaya Manusia Kesehatan yang tersedia				145 Orang	2,867,500,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Tenaga Medis Non PNS di RSUD Cicalengka	145 Orang	6,308,500,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL											**72,697,812,000**							**82,244,576,429**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**150,540,929,000**							**159,624,989,957**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP PD (RSUD Majalaya)	Point		Point	78.69 Point	**146,908,095,000**						78.69 Point	**153,624,989,957**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	**27,750,595,000**						100 %	**29,624,989,957**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	27,750,595,000	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Karyawan Rumah sakit	12 Bulan	29,624,989,957	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Indikator SPM Rumah Sakit	%		%	94 %	**119,157,500,000**						94 %	**124,000,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Rumah Sakit				12 Bulan	119,157,500,000	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pasien/Pengunjung dan Karyawan Rumah sakit	12 Bulan	124,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
														masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif					
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya	Point		Point	80.80 Point	**3,632,834,000**						80.80 Point	**6,000,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	%		%	80 %	**0**						80 %	**0**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya yang Terbangun				1 Paket	0	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Pasien/Pengunjung dan Karyawan Rumah sakit	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia				1 Paket	0	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Pasien/Pengunjung dan Karyawan Rumah sakit	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia				1 Paket	0	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Pasien/Pengunjung dan Karyawan Rumah sakit	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia				1 Unit	0	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Pasien/Pengunjung dan Karyawan Rumah sakit	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Masyarakat Tidak Mampu yang Terlayani	Orang		Orang	727 Orang	**3,632,834,000**							727 Orang	**6,000,000,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat tidak mampu yang terlayani				727 Orang	3,632,834,000	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Pasien/Masyarakat Tidak Mampu	727 Orang	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bulan Pemenuhan Sumber Daya Manusia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**0**						12 Bulan	**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				1140 OB	0	Kab. Bandung, Paseh, Cipaku				Karyawan Rumah sakit	1140 OB	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA
									TOTAL	**150,540,929,000**								**159,624,989,957**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**190,654,460,000**								**193,357,183,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	Poin		Poin	70.5 Poin	**184,488,640,000**						70.5 Poin	**186,913,072,000**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	Poin %		Poin %	70.5 Poin 77.56 %	**48,488,640,000**						70.5 Poin 77.56 %	**50,913,072,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	48,488,640,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Soreang	12 Bulan	50,913,072,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	%		%	77.56 %	**136,000,000,000**						77.56 %	**136,000,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pasien yang terlayani				130000 orang	136,000,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Pendapatan dari BLUD		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Soreang	130000 orang	136,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	%		%	77.56 %	**6,165,820,000**						77.56 %	**6,444,111,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	%		%	77.56 %	**5,165,820,000**						77.56 %	**5,424,111,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang tersedia				100 %	5,165,820,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Soreang	100 %	5,424,111,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	%		%	77.56 %	**1,000,000,000**							77.56 %	**1,020,000,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien memakai SKTM yang berobat				200 Orang	1,000,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Soreang	200 Orang	1,020,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	%		%	77.56 %	**0**							77.56 %	**0**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	%		%	77.56 %	**0**							77.56 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah objek promosi kesehatan yang tersampaikan				0 Paket	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Penerima Layanan Kesehatan di RSUD Soreang	0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
TOTAL											**190,654,460,000**							**193,357,183,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**40,079,525,000**								**40,881,115,500**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Nilai SAKIP Presentase Asset dalam Keadaan Baik	Persen Poin Persen		Persen Poin Persen	77.82 Persen 78.50 Poin 100 Persen	**23,113,475,000**						77.82 Persen 78.50 Poin 100 Persen	**23,575,744,500**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Nilai AKIP	Poin		Poin	78.5 Poin	**240,000,000**						78.5 Poin	**244,800,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dan dokumen perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Dokumen	102,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD yang dilaksanakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan (LKIP, LPPD, LKPJ, EMONEV, SPM)				5 Dokumen	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Dokumen	30,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	51,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Poin		Poin	78.5 Poin	**10,957,480,000**						78.5 Poin	**11,176,629,600**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	10,857,480,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	11,074,629,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	35,700,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	30,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD) yang terselesaikan				3 Dokumen	35,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Dokumen	35,700,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Presentase Asset dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	93.3 Persen	**30,000,000**						93.3 Persen	**30,600,000**	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsialiasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				12 bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan Tepat waktu				12 bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Rata-Rata Capaian SAKIP ASN	Poin		Poin	78.5 Poin	**125,000,000**						78.5 Poin	**127,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai				12 bulan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				12 bulan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	25,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan				1 kali	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 kali	102,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Operasional Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	**566,000,000**						12 Bulan	**577,320,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang dibeli				12 bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	10,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli				12 bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	10,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan				12 bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	5,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan bahan logistik kantor yang dibutuhkan				12 bulan	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	204,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				12 bulan	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli				12 bulan	51,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	52,020,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi				12 bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	15,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan				12 bulan	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	204,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Satpol PP	Bulan		Bulan	12 Bulan	**100,000,000**						12 Bulan	**102,000,000**	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli				0 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang di beli				5 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan perallatan dan mesin lainnya				1 tahun	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya				1 unit	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 tahun	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	102,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**10,599,995,000**						12 Bulan	**10,811,994,900**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 bulan	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	51,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10 bulan	10,474,995,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	10 bulan	10,684,494,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**495,000,000**						12 Bulan	**504,900,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan				1 tahun	98,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	99,960,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 tahun	312,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	318,240,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				1 tahun	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				1 tahun	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor				1 tahun	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	51,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				1 tahun	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	25,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara				1 tahun	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 tahun	10,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Tertatanya Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	**0**						100 Persen	**0**	
1	05	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan				2 Dokumen	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Pengendalian Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	**16,966,050,000**						100 Persen	**17,305,371,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	**15,926,050,000**						100 Persen	**16,244,571,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan , dan Pengawalan				12 bulan	3,272,736,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	3,338,190,720	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa				12 bulan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	153,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan MasyarakatTingkat Kabupaten / kota				12 bulan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	153,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 bulan	9,903,314,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	10,101,380,280	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan dalam rangka peningkatan Kapassitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				12 bulan	750,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	765,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 bulan	1,500,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	1,530,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketentrraman Masyarakat yg tersusun				12 bulan	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				12 bulan	125,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	127,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen		Persen	100 Persen	**950,000,000**						100 Persen	**969,000,000**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota				12 bulan	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	306,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota				12 bulan	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	306,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 bulan	350,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	357,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	**90,000,000**						12 Bulan	**91,800,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS				12 bulan	90,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 bulan	91,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									TOTAL	**40,079,525,000**								**40,881,115,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**75,297,091,793**							**74,927,381,062**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip	Poin		Poin	70.30 Poin	**53,159,131,793**						70.30 Poin	**55,202,661,862**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	**635,000,000**						100 Persen	**142,800,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu				3 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	3 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	96,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran penyusunan DPA SKPD				1 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran penyusunan perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP PD yang siselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	94,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja				4 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	4 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**41,093,059,000**						12 Bulan	**41,731,320,180**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	40,753,059,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	pemerintah Daerah	14 Bulan	41,568,120,180	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Sekretariat Daerah				12 Bulan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	pemerintah Daerah	12 Bulan	20,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan Keuangan Akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	pemerintah Daerah	1 Laporan	25,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				2 Laporan	25,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	pemerintah Daerah	2 Laporan	15,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi Keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				12 Bulan	160,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	pemerintah Daerah	12 Bulan	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	BMD Kondisi Baik/Jumlah BMD x 100% Jumlah Aset Dalam Kondisi Baik /Total seluruh Aset x 100 % Persentase aset dalam keadaan Baik	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	91.25 Persen 100 Persen 100 Persen	**100,000,000**						91.25 Persen 100 Persen 100 Persen	**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah bulan pembayaran jasa keamanan jumlah laporan asuransi BMD				12 bulan 1 Laporan	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 bulan 1 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Nilai AKIP	Poin		Poin	70.3 Poin	**530,000,000**						70.3 Poin	**230,739,300**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				250 Stel	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	250 Stel	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian				4 Dokumen	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	4 Dokumen	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				2 Kegiatan	180,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	26,739,300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				1 Kegiatan	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah	Persen		Persen	100 Persen	**725,000,000**						100 Persen	**3,483,100,000**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				17 Jenis	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	17 Jenis	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli				192 Jenis	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	192 Jenis	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				54 Jenis	75,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	54 Jenis	76,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dari mass media				140 Media Massa	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	140 Media Massa	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				1500 Kegiatan	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1500 Kegiatan	2,998,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi daerah Jumlah laporan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah				6 Dokumen 1594 Kegiatan 300 Kegiatan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	6 Dokumen 1594 Kegiatan 300 Kegiatan	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**1,150,000,000**						100 Persen	**408,000,000**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibeli				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				12 Bulan	650,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	12 Bulan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli				3 Kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	3 Kegiatan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibeli				121 Item	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	121 Item	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan pendukung gedung kantor yang dibeli				33 Unit	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	33 Unit	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Nilai AKIP	Poin		Poin	70.3 Poin	**3,090,960,000**						70.3 Poin	**3,152,779,200**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				8 Kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	8 Kegiatan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				8 Kegiatan	1,496,239,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	8 Kegiatan	1,526,163,780	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa				193 Kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	193 Kegiatan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulanan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan) Jumlah Tenaga harian Lepas				12 Gedung 52 Orang	1,494,721,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Gedung 52 Orang	1,524,615,420	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase aset dalam keadaan Baik	Persen		Persen	100 Persen	**1,895,112,793**						100 Persen	**1,933,015,049**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				12 Bulan	452,925,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	461,983,500	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan				12 Bulan	951,111,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	970,133,220	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	10,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara				12 Bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat				12 Bulan 12 Bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan 12 Bulan	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara				12 Bulan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				12 Bulan	231,076,793	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	235,698,329	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Tersedianya operasional KDH/WKDH	Persen		Persen	100 Persen	**1,840,000,000**						100 Persen	**1,878,908,133**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	206,108,133	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan KDH/WKDH				250 stel	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	250 stel	204,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	1,440,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,468,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Tersedianya operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**750,000,000**						100 Persen	**765,000,000**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli				11 Kegiatan	750,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	11 Kegiatan	765,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Tertatanya PD sesuai dengan Program dan Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	**450,000,000**						100 Persen	**459,000,000**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil analisis Kebijakan Daerah Tentang Kelembagaan dan Tusi PD. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pelayanan publik dan tatalaksana Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana				1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah laporan hasil fasilitasi kinerja dan RB				1 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	51,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasi ke masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	**900,000,000**						100 Persen	**918,000,000**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi koordinasi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya Jumlah laporan hasil fasilitasi Kunjungan Kerja/Inspeksi Pimpinan Daerah Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan kerja pihak luar pemerintah kabupaten bandung Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan hari-hari bersejarah lingkup Pemda Jumlah prosiding bimtek keprotokolan				6 Dokumen 300 Kegiatan 30 Kegiatan 3 Laporan PHBN 1 Sosialisasi	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	6 Dokumen 300 Kegiatan 30 Kegiatan 3 Laporan PHBN 1 Sosialisasi	255,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen kegiatan sinergitas pemerintah dan media massa Jumlah informasi kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan melalui media massa				1 Kali 150 Laporan ADV	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Kali 150 Laporan ADV	255,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumen hasil kegiatan pelatihan kehumasan Jumlah dokumen hasil pembuatan logo Hari Jadi Kabupaten Bandung Jumlah dokumen pembuatan backwall HUT Republik Indonesia Jumlah dokumen pembuatan buku Selayang Pandang Kabupaten Bandung Jumlah dokumen pembuatan video kegiatan pimpinan Jumlah laporan hasil kegiatan pimpinan yang terpublikasikan Jumlah Laporan Pembuatan Media Informasi Kegiatan Pimpinan				2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	400,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	408,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Nilai LPPD Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Poin Persentase		Poin Persentase	3.03 Poin 100 Persentase	**19,396,753,000**						3.03 Poin 100 Persentase	**16,928,688,060**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Persen		Persen	100 Persen	**650,000,000**						100 Persen	**663,000,000**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan				4 Laporan	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	4 Laporan	204,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Capaian Rata-rata IKM Paten Capaian Rata-rata IKM Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penetapan Batas Wilayah Administrasi Lingkup Kabupaten Jumlah Dokumen Toponomi dan Batas Wilayah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemberian Cuti KDH dan Wakil KDH Jumlah Laporan Fasilitasi penilaian RLPPD dan EPPD Jumlah laporan hasil fasilitasi pelaksanaan otnonomi daerah (DOB) Jumlah laporan Pasilitasi Penyelenggaraan AMJ Bupati Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pelantikan dan pemberhentian KDH, Wakil KDH, dan PAW Anggota DPRD Jumlah Laporan Penerapan SPM Jumlah laporan penyelenggaraan pemilihan umum Nilai Peringkat LPPD				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	300,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	306,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif	Persen		Persen	100 Persen	**17,796,753,000**						100 Persen	**15,296,688,060**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya Jumlah laporan hasil fasilitasi pemberian hibah bantuan sarana keagamaan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				30 Laporan 1 Dokumen 4 Laporan	15,942,250,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	30 Laporan 1 Dokumen 4 Laporan	13,405,095,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Lingkup Kesejahtraan Sosial Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Capaian Kinerja Kesos Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Kesejahtraan Sosial				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1,650,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1,683,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Lingkup Kesejahtraan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Capaian Kinerja Kesmas Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Kesejahtraan Masyarakat				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	204,503,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	208,593,060	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase penetapan produk hukum	Persen		Persen	100 Persen	**500,000,000**						100 Persen	**510,000,000**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Yang Ditetapkan				30 Kepsekda/Perda 775 Perbub/Kepbub	200,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	30 Kepsekda/Perda 775 Perbub/Kepbub	204,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Hukum Yang Mendapatkan Bantuan/Pendampingan Hukum Jumlah Legal Opinion Yang Dihasilkan				15 Perkara 4 Legal Opinion	150,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	15 Perkara 4 Legal Opinion	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kodifikasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Yang Dipublikasikan				4 Dokumen 34 Sosialisasi	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	4 Dokumen 34 Sosialisasi	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementasi Kerjasama daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**450,000,000**						100 Persen 100 Persen	**459,000,000**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Antar Daerah Yang Implementatif Jumlah Kerjasama Daerah dan Badan Usaha Yang Implementatif				7 Dokumen 8 Dokumen	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	7 Dokumen 8 Dokumen	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga Yang Implementatif Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri Yang Implementatif				14 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	14 Dokumen 1 Dokumen	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama Jumlah Laporan Hasil Analisis Rencana Kerjasama				1 Laporan 1 Laporan	250,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan	255,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi	Persen		Persen	100 Persen	**2,741,207,000**						100 Persen	**2,796,031,140**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi	Persen		Persen	100 Persen	**600,000,000**						100 Persen	**612,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Perusahaan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan CSR Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD Nilai tingkat kemandirian BLUD				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	306,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pengawasan Distribusi Perekonomian Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan DBHCHT Jumlah Rekomendasi Pengembangan Aksesibilitas Wilayah				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	204,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan BLUD				5 Kajian	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	5 Kajian	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan Pengembangan BUMD				1 Kajian	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	1 Kajian	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang kinerja baik	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**1,091,207,000**						100 Persen 100 Persen	**1,113,031,140**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Penyusunan Program Pembangunan				1 Dokumen 1 Dokumen	425,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	433,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Monev Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Bandung Jumlah laporan hasil analisis Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK, Tugas Pembantuan, Bangub, dan Tepra Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan DAK, Tugas Pembantuan, Bangub dan Tepra				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	516,207,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	526,531,140	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ	Persen		Persen	100 Persen	**650,000,000**						100 Persen	**663,000,000**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Klarifikasi Penyediaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan PBJ Yang Dilaksanakan Melalui UKPBJ				4 Laporan 2 Kegiatan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	4 Laporan 2 Kegiatan	255,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi SPSE Jumlah Laporan Penyelenggaraan LPSE				2 Kegiatan 3 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	2 Kegiatan 3 Laporan	204,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengumuman RUP Laporan Maturisasi UKPBJ				1 Laporan 4 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Daerah	1 Laporan 4 Laporan	204,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau	Persen		Persen	100 Persen	**400,000,000**						100 Persen	**408,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi, Analisis Sinkronisasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Kebijakan atas kebijakan Daerah Lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	2 Dokumen	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Hasil koordinasi, Analisis Sinkronisasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Kebijakan atas kebijakan Daerah Lingkup Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	2 Dokumen	102,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Hasil koordinasi, Analisis Sinkronisasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Kebijakan atas kebijakan Daerah Lingkup Energi dan Air				2 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah daerah	2 Dokumen	153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
									TOTAL	**75,297,091,793**								**74,927,381,062**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**72,996,241,000**							**76,808,729,820**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Persentase BMD dalam kondisi baik	Point Persen		Point Persen	70 Point 80 Persen	**59,897,180,000**						70 Point 80 Persen	**61,095,123,600**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**135,000,000**						100 Persen	**137,700,000**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Tepat Waktu				2 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	20,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Laporan	25,500,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu				3 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	3 Dokumen	10,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**8,799,197,000**						100 Persen	**8,975,180,940**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	8,714,197,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	12 Bulan	8,888,480,940	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				12 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	12 Dokumen	15,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu				2 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	2 Laporan	30,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu				12 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	12 Laporan	40,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	Persen		Persen	80 Persen	**659,500,000**						80 Persen	**672,690,000**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN Beserta Perlengkapannya				100 Stel	107,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	100 Stel	109,650,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				1 Kegiatan	302,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	308,040,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				3 Kegiatan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	3 Kegiatan	255,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**1,719,400,000**						100 Persen	**1,753,788,000**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibeli				16 Jenis	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	16 Jenis	30,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli				69 Jenis	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	69 Jenis	204,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli				18 Jenis	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	18 Jenis	183,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Dibeli				10 Jenis	84,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	10 Jenis	85,680,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				15 Jenis	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	15 Jenis	255,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				105 Jenis	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	105 Jenis	306,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Dibeli				1 Jenis	25,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Jenis	25,908,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu				7 Bulan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	7 Bulan	459,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan				5 Kegiatan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	204,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan BMD	Persen		Persen	80 Persen	**50,000,000**						80 Persen	**51,000,000**	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	0 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Dibeli				2 Jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	2 Jenis	51,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**2,354,912,000**						100 Persen	**2,402,010,240**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penerimaan Surat Masuk dan Pembuatan Surat Keluar				2500 Surat	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	2500 Surat	20,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	338,942,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	12 Bulan	345,720,840	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	1,995,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	12 Bulan	2,035,889,400	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	80 Persen	**1,142,372,000**						80 Persen	**1,165,219,440**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				5 Unit	464,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	5 Unit	474,147,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				20 Unit	456,622,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	20 Unit	465,754,440	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Dipelihara				4 Jenis	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	4 Jenis	15,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Diservis/Diperbaiki				4 Jenis	145,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	4 Jenis	148,308,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Gedung	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	3 Gedung	51,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara				1 Jenis	10,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	1 Jenis	10,710,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Pemenuhan Kesejahteraan DPRD	Persen		Persen	100 Persen	**43,697,000,000**						100 Persen	**44,570,940,000**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD				12 Bulan	43,016,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	12 Bulan	43,876,983,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				275 Stel	577,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	275 Stel	589,050,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Medical Check Up				55 Orang	102,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	55 Orang	104,907,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Pemenuhan Administrasi DPRD Persentase Sarana dan Prasarana DPRD yang Difasilitasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**1,339,799,000**						100 Persen 100 Persen	**1,366,594,980**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	10,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Fraksi				12 Bulan	557,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	12 Bulan	568,854,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat DPRD yang Difasilitasi				20 Kegiatan	772,099,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	20 Kegiatan	787,540,980	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**13,099,061,000**						100 Persen 100 Persen	**15,713,606,220**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	**1,524,606,000**						100 Persen	**1,555,098,120**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	8 Dokumen	306,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	8 Dokumen	1,020,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	104,606,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	106,698,120	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun				2 Dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	122,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen		Persen	100 Persen	**2,050,000,000**						100 Persen	**2,091,000,000**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disepakati				2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	204,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang Disepakati				2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	204,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang Ditetapkan				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	510,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Ditetapkan				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	510,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan Laporan Semester				1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Laporan	153,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	510,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	Persen		Persen	100 Persen	**1,885,561,000**						100 Persen	**1,923,272,220**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				13 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	13 Laporan	357,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				13 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	13 Laporan	357,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				13 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	13 Laporan	357,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				13 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	13 Laporan	357,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan				2 Laporan	34,129,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	2 Laporan	34,811,580	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	2 Laporan	153,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Laporan	301,432,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Laporan	307,460,640	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya	Persen		Persen	100 Persen	**2,339,000,000**						100 Persen	**2,385,780,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD				9 Kegiatan	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	9 Kegiatan	1,530,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan				80 Kegiatan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	80 Kegiatan	408,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	28,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	8 Orang	28,560,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi				96 Orang	336,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	96 Orang	342,720,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog				4 Kegiatan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	4 Kegiatan	61,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	15,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	**3,435,812,000**						100 Persen	**3,504,528,240**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah				9 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	9 Laporan	153,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				55 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	55 Dokumen	35,700,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Reses				55 Laporan	3,250,812,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	55 Laporan	3,315,828,240	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	Persen		Persen	100 Persen	**296,744,000**						100 Persen	**302,678,880**	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				7 Laporan	296,744,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	7 Laporan	302,678,880	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	**256,270,000**						100 Persen	**2,613,959,400**	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				48 Dokumen	256,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	48 Dokumen	2,613,959,400	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	**1,311,068,000**						100 Persen	**1,337,289,360**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Laporan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	20 Laporan	1,020,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	15,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi				3 Laporan	296,068,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	DPRD Kabupaten Bandung	3 Laporan	301,989,360	SEKRETARIAT DPRD
									TOTAL	**72,996,241,000**								**76,808,729,820**	

RKPD
2022

LAMPIRAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

TEMA PEMBANGUNAN 2022:
PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | TAHUN 2021

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,399,042,000**							**4,787,656,820**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	%		%	100 %	**4,149,043,000**						100 %	**4,532,656,820**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Penyusunan Dokumen Renja	%		%	100 %	**25,000,000**						100 %	**25,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan rencanan dan penganggaran kegiatan				3 dokumer	15,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 dokumer	15,300,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan				4 dokumer	10,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 dokumer	10,200,000	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**3,881,958,000**						100 %	**4,273,780,820**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji pegawai				21 orang	3,875,958,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	21 orang	4,267,660,820	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	prosentase laporan keuangan akhir tahun				4 dokumer	2,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 dokumer	2,040,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase laporan keuangan semesteran				8 dokumer	4,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 dokumer	4,080,000	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**63,000,000**						100 %	**64,260,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 jenis	5,100,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan alat tulis kantor				50 jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 jenis	15,300,000	KECAMATAN ARJASARI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				10 jenis	4,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 jenis	4,080,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan snack 1 tahun				5 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 jenis	5,100,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan				5 jenis	2,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 jenis	2,040,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan				3 jenis	2,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 jenis	2,040,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah				200 HOK	30,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	200 HOK	30,600,000	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**150,085,000**						100 %	**139,536,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar				1 Tahun	2,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun	2,040,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah sumber daya air , listrik dan komunikasi				12 Bulan	25,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	25,500,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang bekerja				6 orang	123,085,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 orang	111,996,000	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	%		%	100 %	**29,000,000**						100 %	**29,580,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas oprasional				8 unit	20,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 unit	20,400,000	KECAMATAN ARJASARI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				3 gedung	9,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 gedung	9,180,000	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Nilai IKM	%		%	100 %	**98,781,000**						100 %	**100,756,698**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Prosentase peserta yang menikuti sosialisasi	%		%	100 %	**21,470,000**						100 %	**21,899,400**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah peserta yang mengikuti sosiaslisasi				1 kegiatan	21,470,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 kegiatan	21,899,400	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	prosentase jumlah peserta yang mengikuti sosiaslisasi	%		%	100 %	**10,735,000**						100 %	**10,949,700**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah peserta yang mengikuti sosiaslisasi				1 kegiatan	10,735,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 kegiatan	10,949,700	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Prosentase urusan yang dilaksanakan	%		%	100 %	**66,576,000**						100 %	**67,907,598**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kewenangan yang dilimpahkan				4 jenis	66,576,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 jenis	67,907,598	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	prosentase program pemberdayaan masyarakat Desa dan Keluerahan	%		%	100 %	**10,735,000**						100 %	**10,949,700**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	prosentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	**10,735,000**						100 %	**10,949,700**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pembinaan Organisasi Perempuan di wilayah Kecamatan Arjasari				1 kegiatan	10,735,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 kegiatan	10,949,700	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	prosentase program ketertiban umum	%		%	100 %	**15,235,000**						100 %	**15,539,700**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	prosentase pamswakarsa	%		%	100 %	**15,235,000**						100 %	**15,539,700**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah kegiatan patroli malam				15 kali	15,235,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 kali	15,539,700	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**65,000,000**						100 %	**66,300,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Prosentase kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	**65,000,000**						100 %	**66,300,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah perayaan HUT Kabupaten Bandung dan HUT RI				2 kegiatan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 kegiatan	51,000,000	KECAMATAN ARJASARI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Tarling ke Desa-desa				28 Hari	15,000,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	28 Hari	15,300,000	KECAMATAN ARJASARI
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	prosentasde pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	%		%	100 %	**60,248,000**						100 %	**61,453,902**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	prosentase lembaga kemasyarakatn dan fasilitasi sinkronisasi pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	%		%	100 %	**60,248,000**						100 %	**61,453,902**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah usulan skala prioritas yang diterima oleh kecamatan				2 kegiatan	44,517,000	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 kegiatan	45,408,168	KECAMATAN ARJASARI
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah ibu hamil dari Keluarga kurang mampu yang mengikuti Penyuluhan Kesehatan				1 kegiatan	15,731,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 kegiatan	16,045,734	KECAMATAN ARJASARI
									TOTAL	**4,399,042,000**							**4,787,656,820**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**19,230,668,000**							**19,615,281,360**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	Point		Point	72 Point	**12,527,268,000**						72 Point	**12,777,813,360**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	**59,000,000**						13 Dokumen	**60,180,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,120,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,120,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,120,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,120,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,120,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 Dokumen	9,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	5 Dokumen	9,180,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya dokumen laporan kinerja (LKIP,LKPJ,LPPD) tepat waktu				3 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	3 Dokumen	20,400,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan (ASN dan non-ASN) tepat waktu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**10,778,944,000**						12 Bulan	**10,994,522,880**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang dibayarkan gaji				12 Bulan	10,758,944,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,974,122,880	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,200,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen KAP dan dokumen appraisal				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,200,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum	%		%	100 %	**433,811,000**						100 %	**442,487,220**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				20 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	20 Jenis	20,400,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan perlengkapan kantor				5 Jenis	247,306,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	5 Jenis	252,252,120	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah satuan alat rumah tangga				5 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	5 Jenis	10,200,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				1792 Orang Per Kegiatan	107,525,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	1792 Orang Per Kegiatan	109,675,500	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				5 Jenis	30,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	5 Jenis	30,600,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				300 Orang Per Kegiatan	18,980,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	300 Orang Per Kegiatan	19,359,600	KECAMATAN BALEENDAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan Orang		Bulan Orang	12 Bulan 37 Orang	**1,214,513,000**						12 Bulan 37 Orang	**1,238,803,260**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan				12 Bulan	93,188,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	12 Bulan	95,051,760	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jumlah Pegawai Non PNS (Tenaga Kebersihan Kantor/Cleaning Service) Jumlah Pegawai Non PNS Kategori Tugas Teknis Jumlah Pegawai Non PNS Tenaga Pendukung Adminitrasi				37 Orang	1,121,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Perangkat Daerah	37 Orang	1,143,751,500	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah aset yang terpelihara	Unit		Unit	17 Unit	**41,000,000**						17 Unit	**41,820,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				17 Unit	41,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	OPD (Aset Daerah)	17 Unit	41,820,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	**6,598,400,000**						100 %	**6,730,368,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah rencana program dan kegiatan masyarakat desa	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	**145,000,000**						6 Kegiatan	**147,900,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)				2 Kegiatan	35,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	35,700,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				4 Kegiatan	110,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	4 Kegiatan	112,200,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah rencana program dan kegiatan masyarakat kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	25 Kegiatan	**6,453,400,000**						25 Kegiatan	**6,582,468,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5 Kelurahan	1,000,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat (Eksternal Kecamatan)	5 Kelurahan	1,020,000,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				25 Kegiatan	5,453,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat (Eksternal Kecamatan)	25 Kegiatan	5,562,468,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**30,600,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang direncanakan mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	Orang Per Kegiatan		Orang Per Kegiatan	160 Orang Per Kegiatan	**30,000,000**						160 Orang Per Kegiatan	**30,600,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Sosialisasi				2 Kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur (Internal Kecamatan)	2 Kegiatan	30,600,000	KECAMATAN BALEENDAH
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**76,500,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	**75,000,000**						8 Kegiatan	**76,500,000**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Musdes/Muskel				8 Kegiatan	75,000,000	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur dan Masyarakat	8 Kegiatan	76,500,000	KECAMATAN BALEENDAH
									TOTAL		**19,230,668,000**							**19,615,281,360**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,394,546,000**							**4,777,069,888**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akip	point		point	66 point	**4,218,546,000**						66 point	**4,522,069,888**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Presentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**15,300,000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	**3,729,357,000**						14 Bulan	**4,108,255,888**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				21 Pegawai	3,720,357,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	21 Pegawai	4,099,075,888	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan / CALK				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang di selesaikan tepat waktu				4 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian pelaksanaan adminsitrasi Kepegawaian	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Penyediaan Pelengkap Penunjuang Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terakomodir				35 Pegawai	20,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	35 Pegawai	20,400,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan)				0 Pegawai	0	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Pegawai	0	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				0 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Kegiatan	0	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	PresentasePelaksanaan Administrasi umum PD	%		%	100 %	**53,500,000**						100 %	**54,570,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	15 Jenis	10,200,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli				23 Jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	23 Jenis	15,300,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga di beli				25 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	25 Jenis	5,100,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga di beli				25 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	25 Jenis	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang di cetak dan digandakan				4 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	4 Jenis	5,100,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran bulanan penyediaan/pembeliaan bahan bacaan surat kabar harian dan majalah				4 Jenis	4,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	4 Jenis	4,080,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang hadir				50 Hok	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	50 Hok	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Hok	8,500,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kantor Kecamatan Banjaran	66 Hok	8,670,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Pelaksanaan Pengadaan BMD	%		%	100 %	**51,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang di beli				4 Unit	10,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset Kantor Kecamatan	4 Unit	10,200,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli				7 Unit	41,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset Kantor Kecamatan	7 Unit	30,600,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	**256,689,000**						100 %	**252,144,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, surat/dokumen yang terkirim Jumlah Materai dan Buku Cek				12 Bulan	3,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	12 Bulan	3,060,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Beban Penyediaan Jasa Listrik dan Komunikasi setiap Bulan				12 Bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	12 Bulan	15,300,000	KECAMATAN BANJARAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah Tenaga Non PNS				12 Bulan	238,689,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	12 Bulan	233,784,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan PD	%		%	100 %	**93,000,000**						100 %	**30,600,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				5 Unit	15,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset Kantor Kecamatan Banjaran	5 Unit	15,300,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara				6 Unit	5,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset Kantor Kecamatan Banjaran	6 Unit	5,100,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				0 Gedung	0	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset Kantor Kecamatan Banjaran	0 Gedung	0	KECAMATAN BANJARAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	73,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aset Kantor Kecamatan Banjaran	1 Paket	10,200,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	82 point	**22,000,000**						82 point	**40,800,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**22,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Kegiatan	22,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan Banjaran	2 Kegiatan	40,800,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	**26,000,000**						100 %	**51,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Presentase pelaksanaan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	**14,000,000**						100 %	**30,600,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa				100 Orang	14,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa Wil Kecamatan Banjaran	100 Orang	30,600,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	**12,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga				100 Orang	12,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa Wil Banjaran	100 Orang	20,400,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**18,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Prosentase jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang pengakan peraturan perundang-undangan	%		%	100 %	**18,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				100 Orang	18,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan Wil Banjaran	100 Orang	20,400,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**35,000,000**						100 %	**35,700,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Keg		Keg	3 Keg	**35,000,000**						3 Keg	**35,700,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN				2 Kegiatan	35,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan Banjaran	2 Kegiatan	35,700,000	KECAMATAN BANJARAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**107,100,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pelaksanaan Penataan Administrasi desa	Keg		Keg	3 Keg	**75,000,000**						3 Keg	**107,100,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan DesaJumlah kegiatan pelaksanaan Penataan Administrasi desa				3 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Kegiatan	35,700,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				5 Kegiatan	45,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Kegiatan	45,900,000	KECAMATAN BANJARAN
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Pendampingan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Kegiatan	25,500,000	KECAMATAN BANJARAN
										TOTAL	**4,394,546,000**							**4,777,069,888**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,613,764,000**							**4,997,153,597**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	65 Nilai	**4,357,464,000**						65 Nilai	**4,742,153,597**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu Persentase dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu	% persen		% persen	100 % 100 persen	**2,500,000**						100 % 100 persen	**5,916,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Bojongsoang	1 Dokumen	5,916,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**3,959,828,000**						4 Kegiatan	**4,345,218,110**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,952,328,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	12 Bulan	4,336,038,110	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	4 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	4 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	Persen		Persen	100 Persen	**0**						100 Persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas				25 Stel	0	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	25 Stel	0	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	0	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Perkantoran	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	**56,018,000**						7 Kegiatan	**35,209,227**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				10 Jenis	2,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	10 Jenis	2,550,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				8 Jenis	24,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	8 Jenis	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli				5 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	5 Jenis	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				11 Jenis	3,018,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	11 Jenis	3,079,227	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan				5 Jenis	2,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	5 Jenis	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu				1 Tahun	6,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	1 Tahun	5,100,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				1 Tahun	15,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	1 Tahun	15,300,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**283,618,000**							**278,800,260**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tertata				600 Buah	0	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600 Buah	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	22,181,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	22,624,773	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN Jumlah Bulan Pembayaran Piket Kantor Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) jumlah oranJumlah Bulan Pembayaran Piket Kantor yang mendapatkan makanan dan minuman				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	261,437,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	253,115,487	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Perkantoran	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**55,500,000**							4 Kegiatan	**77,010,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak beroperasi				7 Unit	40,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	7 Unit	56,100,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				2 Jenis	1,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	2 Jenis	3,060,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara				3 Jenis	4,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	3 Jenis	7,650,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara				9 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Kecamatan Bojongsoang	9 Jenis	10,200,000	KECAMATAN BOJONGSOANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		Persen	85 Persen	**79,000,000**						85 Persen	**86,700,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		Persen	85 Persen	**79,000,000**						85 Persen	**86,700,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah				1 Kegiatan	9,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				7 Kegiatan	70,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	7 Kegiatan	76,500,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**37,300,000**						100 Persen	**20,400,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**37,300,000**						2 Kegiatan	**20,400,000**	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	29,800,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	2 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan ibu hamil				1 Kegiatan	7,500,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	00		00	00 00	**15,000,000**						00 00	**10,200,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**15,000,000**						1 Kegiatan	**10,200,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	00		00	00 00	**25,000,000**						00 00	**25,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	**25,000,000**						100 %	**25,500,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan peringatan hari bersejarah				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				1 Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Laporan	15,300,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	00		00	00 00	**100,000,000**						00 00	**112,200,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Desa		Desa	6 Desa	**100,000,000**						6 Desa	**112,200,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan				6 Kegiatan / Desa	25,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	6 Kegiatan / Desa	25,500,000	KECAMATAN BOJONGSOANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADPD Jumlah kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa				2 Kali 3 Kali	25,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	2 Kali 3 Kali	25,500,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasiltiasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa				1 Kegiatan	9,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	9,180,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				1 Kegiatan	9,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	9,180,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				2 Kali	22,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	2 Kali	27,540,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah peserta sosialisasi tentang penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Bojongsoang	1 Kegiatan	15,300,000	KECAMATAN BOJONGSOANG
									TOTAL	**4,613,764,000**								**4,997,153,597**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,502,347,000**							**4,915,565,834**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Poin		Poin	63 Poin	**4,252,350,000**						63 Poin	**4,660,565,834**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**10,200,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Renja, Renstra, Laptah, Laporan Triwulan, Semesteran)				4 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	4 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	%		%	100 %	**3,919,892,000**						100 %	**4,303,072,394**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya				12 Bulan	3,919,892,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	12 Bulan	4,303,072,394	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	%		%	100 %	**53,412,000**						100 %	**54,480,750**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				5 Jenis	6,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	5 Jenis	6,120,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibeli				40 Jenis	22,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	40 Jenis	22,440,000	KECAMATAN CANGKUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu				400 hok	13,860,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	400 hok	14,137,200	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan				6 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	6 Jenis	5,100,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan				3 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	3 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke luar wilayah kabupaten				25 hok	3,552,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	25 hok	3,623,550	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**11,387,000**						100 %	**41,615,250**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang baik				3 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	3 Unit	30,000,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan				3 Buah	5,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	3 Buah	5,100,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat-alat dan perlengkapan kantor				5 Unit	6,387,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	5 Unit	6,515,250	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**207,659,000**						100 %	**200,197,440**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	25,200,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	12 Bulan	25,704,000	KECAMATAN CANGKUANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas administrasi				72 ob	182,459,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	72 ob	174,493,440	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**51,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat, roda tiga, dan kendaraan roda dua				5 Unit	15,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	5 Unit	15,300,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor				4 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	4 Jenis	5,100,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rumah dinas, gedung dan halaman kantor				1 Tahun	30,000,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	1 Tahun	30,600,000	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		Poin	75 Poin	**65,527,000**						75 Poin	**66,837,642**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**65,527,000**						100 %	**66,837,642**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				650 Orang	65,527,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cangkuang	650 Orang	66,837,642	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	**63,089,000**						100 %	**64,352,412**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	% %		% %	100 % 100 %	**63,089,000**						100 % 100 %	**64,352,412**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta forum musyawarah dalam forum perencanaan pembangunan				140 Orang	21,358,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cangkuang	140 Orang	21,785,976	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat desa yang mengikuti pembinaan				280 Orang	41,731,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cangkuang	280 Orang	42,566,436	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakkan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**74,276,000**						100 %	**75,762,203**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**74,276,000**						100 %	**75,762,203**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang melibatkan unsur TNI/POLRI				4 Laporan	61,027,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	4 Laporan	62,248,019	KECAMATAN CANGKUANG
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan				2 Laporan	13,249,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	2 Laporan	13,514,184	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**9,649,000**						100 %	**9,842,184**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	**9,649,000**						100 %	**9,842,184**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Laporan	9,649,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cangkuang	2 Laporan	9,842,184	KECAMATAN CANGKUANG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	%		%	100 %	**37,456,000**						100 %	**38,205,559**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	**37,456,000**						100 %	**38,205,559**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa				7 Desa	37,456,000	Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Kecamatan Cangkuang	7 Desa	38,205,559	KECAMATAN CANGKUANG
									TOTAL		**4,502,347,000**							**4,915,565,834**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,868,761,000**							**5,222,856,176**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**4,618,762,000**						100 %	**4,924,662,884**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan yang tepat waktu	%		%	100 %	**5,100,000**						100 %	**6,630,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				3 Dokumen	2,100,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	3 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Dokumen	765,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Dokumen	765,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	750,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Dokumen	765,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Dokumen	765,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Cicalengka	2 Dokumen	765,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Dokumen	765,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	%		%	100 %	**4,200,060,000**						100 %	**4,612,999,844**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				25 Ob	4,187,460,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	25 Ob	4,600,759,844	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan akuntansi SKPD				2 Dokumen	3,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	2 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD				2 Dokumen	3,150,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	2 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD				4 Dokumen	3,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Cicalengka	4 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan realisasi anggaran				2 Dokumen	3,150,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	2 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**7,650,000**	
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan Non ASN Kecamatanan Cicalengka	1 Kegiatan	7,650,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah administrasi umum terpenuhi	%		%	100 %	**106,610,000**						100 %	**34,374,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang dibeli				5 Jenis	2,500,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan NON ASN Kecamatan Cicalengka	5 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				13 Jenis	12,500,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan NON ASN Kecamatan Cicalengka	13 Jenis	10,200,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				2 Jenis	8,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan NON ASN Kecamatan Cicalengka	2 Jenis	5,100,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang mendapatkan makana dan minuman				1840 Dus	58,029,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan NON ASN Kecamatan Cicalengka	1840 Dus	10,200,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				3 Jenis	2,605,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan NON ASN Kecamatan Cicalengka	3 Jenis	2,754,000	KECAMATAN CICALENGKA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang dibeli				5 Jenis	22,976,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN dan NON ASN Kecamatan Cicalengka	5 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah BMD yang terpelihara	%		%	100 %	**29,509,000**						100 %	**8,160,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				4 Jenis	29,509,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	4 Jenis	8,160,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka		0	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah program penataan administrasi perkantoran yang tersedia	%		%	100 %	**224,931,000**						100 %	**218,904,240**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli				1000 Lembar	2,500,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1000 Lembar	3,060,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				3 Jenis	37,572,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	3 Jenis	39,841,200	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				2 Unit	6,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	2 Unit	5,100,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan				6 Ob	178,859,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	6 Ob	170,903,040	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	**42,552,000**						100 %	**35,944,800**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				6 Unit	24,200,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	6 Unit	20,400,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan				6 Kegiatan	18,352,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	6 Kegiatan	15,544,800	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASARAKAT	%		%	100 %	**45,000,000**						100 %	**45,900,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	%		%	100 %	**3,780,000**						100 %	**3,855,600**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Kegiatan	3,780,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	3 Kegiatan	3,855,600	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan yang terlaksana	%		%	100 %	**21,220,000**						100 %	**21,644,400**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	6,500,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Warga Kecamatan Cicalengka	1 Kegiatan	6,630,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di kecamatan				1 Kegiatan	14,720,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Warga Kecamatan Cicalengka	1 Kegiatan	15,014,400	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	presentase capaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan sesuai rencana dikali 100%	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah DSP hasil Musrenbang Kecamatan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Dokumen	20,400,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Presentase capaian pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	**92,888,000**						100 %	**139,740,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan sesuai rencana dikali 100%	%		%	100 %	**92,888,000**						100 %	**139,740,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 Kegiatan	38,196,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	2 Kegiatan	38,760,000	KECAMATAN CICALENGKA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				4 Kegiatan	23,108,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	4 Kegiatan	23,460,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan				1 Kegiatan	31,584,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Cicalengka	1 Kegiatan	77,520,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase capaian pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	**72,111,000**						100 %	**71,753,292**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan sesuai rencana dikalii 100%	%		%	100 %	**72,111,000**						100 %	**71,753,292**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Prosentase jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				36 kali 36 kali	21,180,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Warga kecamatan Cicalengka	36 kali 36 kali	22,180,292	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				36 kali	20,013,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Warga kecamatan Cicalengka	36 kali	21,013,000	KECAMATAN CICALENGKA
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				3 Kegiatan	30,918,000	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Warga kecamatan Cicalengka	3 Kegiatan	28,560,000	KECAMATAN CICALENGKA
									TOTAL	**4,868,761,000**								**5,222,856,176**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,660,574,000**							**5,189,570,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip	Point		Point	70,5 Point	**4,560,574,000**						70,5 Point	**4,897,270,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**6,300,000**						100 %	**10,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan				2 Dokumen	3,150,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran				2 Dokumen	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Diselesaikan Tepat Waktu				2 Dokumen	3,150,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**4,221,135,000**						100 %	**4,411,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4,214,635,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	12 Bulan	4,400,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Diselesaikan Tepat Waktu				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	0 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				3 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	3 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	SKPD	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**34,000,000**						100 %	**47,220,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	0 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor				44 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	44 Jenis	25,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				10 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	10 Jenis	5,100,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				14 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	14 Jenis	0	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	0 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung				0 OK	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	0 OK	4,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				40 OK	6,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat daerah	40 OK	6,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**288,139,000**						100 %	**293,550,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	0 Bulan	3,500,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	10,005,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	12 Bulan	10,050,000	KECAMATAN CIKANCUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga administras				12 Bulan	278,134,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	12 Bulan	280,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	%		%	100 %	**11,000,000**						100 %	**135,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				7 Unit	11,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	7 Unit	11,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	0 Jenis	4,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan gedung kantor yang direhab				0 Unit	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perangkat Daerah	0 Unit	120,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		Point	80 Point	**40,000,000**						80 Point	**85,300,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Capaian Pelaksanaan dalam Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**85,300,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0 Kegiatan/Laporan	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	0 Kegiatan/Laporan	15,300,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				2 Kegiatan/Laporan	40,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan/Laporan	70,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat	0		0	80 0	**0**						80 0	**7,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	**0**						100 %	**7,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pegawai yang menghadiri Musyawarah Desa (MUSDES)				0 OK	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	0 OK	7,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan Trantibum	00 %		00 %	00 00 100 %	**20,000,000**						00 00 100 %	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persetase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**25,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Aparat Keamanan(Linmas) yang mengikuti sosialisasi dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / kepolisian negara RI				85 Orang/Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	85 Orang/Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		Point	80 Point	**0**						80 Point	**25,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**0**						100 %	**25,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional				0 Kegiatan/Laporan	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	0 Kegiatan/Laporan	25,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**150,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**150,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa				0 Kegiatan/Laporan	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparat Desa dan Masyarakat	0 Kegiatan/Laporan	35,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				0 Kegiatan/Laporan	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Desa dan Masyarakat	0 Kegiatan/Laporan	25,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta yang menikuti Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				90 Orang/Kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparat Desa dan Masyarakat	90 Orang/Kegiatan	35,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Program/Kegiatan Sosialisasi, Rapat Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan				0 Kegiatan/Laporan	0	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparat Desa dan Masyarakat	0 Kegiatan/Laporan	20,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				40 OK	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Desa dan Masyarakat	40 OK	35,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
									TOTAL	**4,660,574,000**								**5,189,570,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,480,302,000**							**5,520,618,685**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Sakip	point		point	69 point	**4,247,189,000**						69 point	**5,068,538,685**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Nilai Sakip	%		%	100 %	**15,995,000**						100 %	**52,320,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu				2 dokumen	1,999,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	2 dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD diselesaikan tepat waktu				1 dokumen	1,999,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	1,999,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	1,999,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlaph DPPA SKPD Diselesaikan Tepat Waktu				1 Dokumen	1,999,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sakip SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	13,080,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Nilai Sakip	%		%	100 %	**3,906,818,000**						100 %	**4,352,746,685**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				22 orang	3,899,648,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan Cilengkrang	22 orang	4,333,126,685	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan Cilengkrang	1 Dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	4,170,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan Cilengkrang	1 Dokumen	13,080,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai BMD dalam Keadaan Baik	%		%	80 %	**3,000,000**						80 %	**4,470,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	2 Dokumen	4,470,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip	Point		Point	78 Point	**3,000,000**						78 Point	**6,540,000**	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Pendapatan Retribusi Daerah				4 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Dokumen	6,540,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	78 point	**3,000,000**						78 point	**103,080,000**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu				22 Dokumen ASN	3,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	22 Dokumen ASN	13,080,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				22 ASN	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	22 ASN	90,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Nilai Sakip	%		%	100 %	**62,997,000**						100 %	**227,950,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi listrik/penerangan yang dibeli Jumlah Jenis komponen Instalasi listrik/penerangan yang dibeli				3 Jenis 24 Buah	6,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	3 Jenis 24 Buah	6,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				20 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	20 Jenis	36,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli				1 Jenis	0	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	1 Jenis	20,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli				4 Jenis	0	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	4 Jenis	18,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				5 Buah Spanduk 5000 penggandaan	5,697,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	5 Buah Spanduk 5000 penggandaan	10,050,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	12 Bulan	10,050,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis bahan/Material yang dibeli				10 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	10 Jenis	30,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta kunjungan tamu				75 Hok	0	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	75 Hok	11,700,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				65 Hok	21,300,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	65 Hok	86,150,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Capaian Nilai Sakip	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**90,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeuleur yang dibeli				1 Jenis	0	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Jenis	40,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibeli				3 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Jenis	50,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Nilai Sakip	%		%	100 %	**202,159,000**						100 %	**190,792,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan listrik				12 Bulan	21,520,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	12 Bulan	21,520,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang bulan (OB) jasa THL dan jasa kebersihan kantor				12 Bulan	180,639,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur Kecamatan	12 Bulan	169,272,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Nilai Sakip	&		&	100 &	**30,220,000**						100 &	**40,640,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak beroperasi Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak beroperasi				6 Unit 12 Bulan	25,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah	6 Unit 12 Bulan	30,200,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				6 Unit	5,220,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah	6 Unit	10,440,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		Point	80 Point	**46,216,000**						80 Point	**85,100,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		Point	80 Point	**4,999,000**						80 Point	**5,100,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di Kecamatan				345 Orang	4,999,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	345 Orang	5,100,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	80 point	**41,217,000**						80 point	**80,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat				6 Laporan	41,217,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Seluruh Stakeholder	6 Laporan	80,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	**64,512,000**						100 %	**133,180,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point		Point	78 Point	**64,512,000**						78 Point	**133,180,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan pembinaan Musrenbang Desa				6 Laporan	4,725,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	6 Laporan	12,830,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kecamatan				1 Laporan	30,308,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Laporan	50,350,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pembinaan PKK				2 Kegiatan	29,479,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	70,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**40,725,000**						100 %	**68,400,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Laporan		Laporan	1 Laporan	**4,725,000**						1 Laporan	**20,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan keamanan di wilayah Kecamatan Cilengkrang				6 Laporan	4,725,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	6 Laporan	20,400,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Pembinaan keamanan di wilayah kecamatan cilengkrang Jumlah laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Laporan Laporan		Laporan Laporan	6 Laporan 1 Laporan	**36,000,000**						6 Laporan 1 Laporan	**48,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Operasi Penegakan perda				12 Laporan	36,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kec Cilengkrang	12 Laporan	48,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	80 point	**51,760,000**						80 point	**110,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase capaian IKM	%		%	100 %	**51,760,000**						100 %	**110,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan PHBN				2 Laporan	41,760,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyakarat	2 Laporan	85,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan PHBI				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyakarat	1 Laporan	25,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	80 point	**29,900,000**						80 point	**55,400,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	80 point	**29,900,000**						80 point	**55,400,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Desa				6 Laporan	14,950,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Desa	6 Laporan	25,000,000	KECAMATAN CILENGKRANG
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Keuangan Desa				6 Laporan	14,950,000	Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Desa	6 Laporan	30,400,000	KECAMATAN CILENGKRANG
									TOTAL	**4,480,302,000**								**5,520,618,685**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,956,744,000**							**5,440,624,137**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Nilai SAKIP	Poin Poin		Poin Poin	86 Poin 71 Poin	**4,708,834,000**						86 Poin 71 Poin	**5,095,147,937**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ketercapaian kinerja hasil	%		%	100 %	**19,252,000**						100 %	**4,080,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yg diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	3,252,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	4,250,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKAP SKPD				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	3,750,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPAP SKPD				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LPPD, LKPJ PD yg diselesaikan secara tepat waktu				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	3 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	%		%	100 %	**4,221,276,000**						100 %	**4,614,540,257**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4,214,276,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	4,606,380,257	KECAMATAN CILEUNYI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	4 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase laporan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	%		%	100 %	**2,750,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				4 Dokumen	2,750,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	4 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan retribusi daerah	%		%	100 %	**2,250,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan PAD SKPD				4 Dokumen	2,250,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	4 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata - rata capaian SKP ASN diatas >=80%	%		%	100 %	**2,804,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				4 Dokumen	2,804,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec.Cileunyi	4 Dokumen	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**89,393,000**						100 %	**46,920,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				6 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	6 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CILEUNYI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				12 Bulan	25,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	25,500,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				5 Jenis	7,223,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	5 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	10,200,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				8 Jenis	11,200,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	8 Jenis	3,060,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	6,240,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	2,040,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat dan Koordinasi/ konsultasi ke dalam dan luar daerah				12 Bulan	36,730,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase ketersediaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**64,557,000**						100 %	**5,100,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				50 Unit	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	50 Unit	5,100,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6 Unit	64,557,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	6 Unit	0	KECAMATAN CILEUNYI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan operasional perkantoran	%		%	100 %	**226,320,000**						100 %	**373,507,680**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	2,040,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	30,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	30,600,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang di service/perbaiki				3 Jenis	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	3 Jenis	5,100,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga administrasi dan jasa tenaga kebersihan				12 Bulan	196,320,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	12 Bulan	335,767,680	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan operasional perkantoran	%		%	100 %	**80,232,000**						100 %	**51,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/opersional yg di pelihara (service, pembayaran stnk, pajak mobil dll)				7 Unit	14,312,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	7 Unit	10,200,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang di perbaiki				1 set	2,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 set	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkap-an Kantor (Printer, Laptop, proyektor dan AC)				4 Jenis	6,675,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	4 Jenis	10,200,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pemeliharaan/ Rehab Gedung Kantor				1 Kegiatan	57,245,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN CILEUNYI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/ Rehab Pagar Gedung Negara				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Poin		Poin	86 Poin	**53,379,000**						86 Poin	**61,016,400**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan	%		%	100 %	**4,214,000**						100 %	**0**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan publik				1 Kegiatan	4,214,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**49,165,000**						100 %	**61,016,400**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Usaha				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	10,016,400	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan				3 Kegiatan	49,165,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	3 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	**0**						100 %	**40,800,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	**0**						100 %	**40,800,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik				2 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	40,800,000	KECAMATAN CILEUNYI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan Kententraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	**35,187,000**						100 %	**35,717,340**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**22,425,000**						100 %	**35,717,340**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan sinergitas 3 pilar di Kecamatan				2 Kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	35,717,340	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FKUU				2 Kegiatan	7,425,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan(Satpol PP, Linmas) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	%		%	100 %	**12,762,000**						100 %	**0**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS, Satpol PP) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Kegiatan	12,762,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**04**	2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**						**0**							**0**	
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam				0 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Kegiatan	0	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintah umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintah umum yang dilaksankan sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**139,344,000**						100 %	**187,542,460**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengewasan pemerintah desa	%		%	100 %	**139,344,000**						100 %	**187,542,460**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Kegiatan	2,677,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	2,677,200	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata Pemerintahan Desa				1 Kegiatan	14,843,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	20,239,860	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasiltiasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa				1 Desa	0	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Desa	20,400,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Koordinasi dan pembinaan BPD yang dilaksanakan				1 Kegiatan	12,430,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	1 Kegiatan	3,725,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	32,450,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	32,450,000	KECAMATAN CILEUNYI
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				2 Kegiatan	25,320,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	2 Kegiatan	56,426,400	KECAMATAN CILEUNYI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pembinaan lembaga dan masyarakat Desa				6 Kegiatan	51,624,000	Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec. Cileunyi	6 Kegiatan	51,624,000	KECAMATAN CILEUNYI
TOTAL											**4,956,744,000**							**5,440,624,137**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,843,603,000**							**5,291,692,386**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip	ponit		ponit	69 ponit	**4,707,603,000**						69 ponit	**5,036,692,386**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%		%	100 %	**6,500,000**						100 %	**3,060,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 laporan	6,500,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	4 laporan	3,060,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**4,021,262,000**						100 %	**4,415,039,439**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan				14 bulan	4,006,262,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	14 bulan	4,403,819,439	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	5 dokumen	3,060,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	4 dokumen	3,060,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	4 laporan	5,100,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	%		%	100 %	**0**						100 %	**5,100,000**	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 kegiatan	0	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	1 kegiatan	5,100,000	KECAMATAN CIMAUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran	%		%	100 %	**160,700,000**						100 %	**102,724,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 jenis	6,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	7 jenis	7,344,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 jenis	86,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	20 jenis	25,500,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	4 jenis	3,060,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor				10 jenis	0	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	10 jenis	5,100,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	6 jenis	3,060,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	2 jenis	3,060,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu				12 bulan	7,800,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	12 bulan	7,800,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 jenis	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Cimaung	6 jenis	47,800,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**263,341,000**							**254,952,947**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 jenis	7,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		2 jenis	5,100,000	KECAMATAN CIMAUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	18,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		12 bulan	18,360,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				72 0b	238,341,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		72 0b	231,492,947	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan aset yang baik	%		%	100 %	**255,800,000**						100 %	**255,816,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25,000,000					Kecamatn Cimaung		25,500,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 tahun	10,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatn Cimaung	1 tahun	5,100,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 paket	220,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatn Cimaung	1 paket	225,216,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	81 point	**25,000,000**						81 point	**55,080,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**25,000,000**						100 %	**55,080,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1 kegiatan	0	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 kegiatan	9,180,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 laporan	25,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	4 laporan	45,900,000	KECAMATAN CIMAUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**0**							**0**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan				1 laporan	0	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		1 laporan	0	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	00 %		00 %	00 00 100 %	**15,000,000**						00 00 100 %	**15,300,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin		poin	70 poin	**15,000,000**						70 poin	**15,300,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 laporan	15,300,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**76,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**76,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				2 laporan	40,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 laporan	0	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 kegiatan	0	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 kegiatan	51,000,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan				2 laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 laporan	25,500,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**46,000,000**						100 %	**108,120,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Capaian desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**46,000,000**						100 %	**108,120,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Laporan	0	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 Laporan	0	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	2 kegiatan	35,700,000	KECAMATAN CIMAUNG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				1 Laporan	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemdes	1 Laporan	41,820,000	KECAMATAN CIMAUNG
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				1 Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 Laporan	30,600,000	KECAMATAN CIMAUNG
									TOTAL	**4,843,603,000**								**5,291,692,386**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**10,561,135,000**							**10,522,113,534**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Nilai SAKIP; 2.Persentase aset dalam kondisi baik	1. poin; 2. Persen		1. poin; 2. Persen	1.70 ; 2.90 1. poin; 2. Persen	**7,906,036,000**						1.70 ; 2.90 1. poin; 2. Persen	**8,655,513,533**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ketercapaian kinerja hasil perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	**19,500,000**						100 Persen	**17,340,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yg diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimentan	2 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA,RKAP				2 dokumen	4,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimentan	2 dokumen	4,080,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA,DPAA				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimentan	1 Dokumen	4,080,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan DPAP SKPD				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimentan	1 Dokumen	0	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yg diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimentan	1 Dokumen	4,080,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	**7,288,737,000**						100 Persen	**8,051,649,053**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				30 Orang	7,279,737,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	30 Orang	8,045,529,053	KECAMATAN CIMENYAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran (CALk) yg diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yg diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	0	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase laporan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	**3,000,000**						100 Persen	**3,060,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	3 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan retribusi daerah	Persen		Persen	100 Persen	**5,000,000**						100 Persen	**5,100,000**	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan PAD SKPD				1 Tahun	5,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	1 Tahun	5,100,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	Persen		Persen	100 Persen	**30,000,000**						100 Persen	**35,700,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				31 Stel	0	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Internal Kecamatan Cimenyan	31 Stel	0	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				31 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	31 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Internal Kecamatan Cimenyan		0	KECAMATAN CIMENYAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan				1 Kegiatan	25,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	1 Kegiatan	30,600,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**82,500,000**						100 Persen 100 Persen	**71,910,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yg di beli				12 Jenis	7,500,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	12 Jenis	7,650,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Unit	30,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	5 Unit	30,600,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yg di beli				10 Jenis	9,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	10 Jenis	9,180,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang di beli				10 Jenis	0	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	10 Jenis	1,020,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				7 Jenis	14,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	7 Jenis	6,120,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material penunjang urusan pemerintahan				4 Jenis	0	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	4 Jenis	5,100,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu				200 HOK	9,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	200 HOK	1,020,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat dan Koordinasi/konsultasi ke luar/dalam daerah				500 OK	13,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	500 OK	11,220,000	KECAMATAN CIMENYAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	**32,000,000**						100 Persen	**30,600,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeuler				3 Unit	15,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	3 Unit	15,300,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di beli				3 unit	17,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	3 unit	15,300,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**410,799,000**						100 Persen	**399,864,480**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat				3000 lembar	5,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	3000 lembar	3,060,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	35,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	12 Bulan	35,700,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	0	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	12 Bulan	6,120,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran gaji PHL				12 Orang	370,799,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	12 Orang	354,984,480	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	**34,500,000**						90 Persen	**40,290,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/opersional yg di pelihara				12 Bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	12 Bulan	20,400,000	KECAMATAN CIMENYAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Printer, 2 Laptop dan 4 AC)				6 Unit	5,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	6 Unit	5,100,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				3 Unit	14,500,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Kecamatan Cimenyan	3 Unit	14,790,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	IKM	poin		poin	80 poin	**66,977,000**						80 poin	**31,412,671**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima	Persen		Persen	100 Persen	**6,500,000**						100 Persen	**0**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di Kecamatan				2000 orang	6,500,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	2000 orang	0	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	**60,477,000**						100 Persen	**31,412,671**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Peserta kegiatan organisasi perempuan atau gender Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan Lingkungan Sehat Jumlah peserta Sosialisasi pembinaan kepemudaan Jumlah peserta sosialisasi peningkatan pelayanan publik dalam bdang kependudukan				150 Peserta 75 Peserta 30 Peserta 20 Peserta	60,477,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	150 Peserta 75 Peserta 30 Peserta 20 Peserta	31,412,671	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	IKM	poin		poin	80 poin	**2,455,600,000**						80 poin	**1,687,819,500**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	**45,000,000**						100 Persen	**55,819,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik				1 Laporan	45,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	55,819,500	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**2,410,600,000**						100 Persen	**1,632,000,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta pelaksanaan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				300 Peserta	60,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Padasuka dan Cibeunying	300 Peserta	61,200,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di laksanakan oleh kelurahan				4 Unit	750,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Padasuka dan Cibeunying	4 Unit	765,000,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kelurahan				10 Laporan	1,540,600,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Padasuka dan Cibeunying	10 Laporan	744,600,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi di Kelurahan				2 Laporan	60,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Padasuka dan Cibeunying	2 Laporan	61,200,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM	poin		poin	80 poin	**30,000,000**						80 poin	**37,695,204**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	orang		orang	100 orang	**30,000,000**						100 orang	**37,695,204**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Aparat Keamanan (LINMAS) yang mengikuti Sosialisasi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				100 orang	30,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	100 orang	37,695,204	KECAMATAN CIMENYAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM	poin		poin	80 poin	**32,522,000**						80 poin	**33,172,626**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase capaian keberhasilan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**32,522,000**						100 Persen	**33,172,626**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan hari Bersejarah				2 Laporan	15,522,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	2 Laporan	0	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan				1 kegiatan	0	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	1 kegiatan	15,832,626	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				1 Laporan	17,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	17,340,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	IKM	Persen		Persen	80 Persen	**70,000,000**						80 Persen	**76,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah laporan kegiatan Pembinaan administrasi dan keuangan desa Jumlah Laporan kegiatan pembinaan administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Laporan sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan (LPMD,Karang Taruna,PKK) Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	laporan laporan laporan kegiatan Persen		laporan laporan laporan kegiatan Persen	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 kegiatan 100 Persen	**70,000,000**						1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 kegiatan 100 Persen	**76,500,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan gai aparatur pemerintahan desa				1 kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	1 kegiatan	10,200,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pembinaan administrasi dan keuangan desa				1 kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	1 kegiatan	20,400,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				2 lembaga	30,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	2 lembaga	30,600,000	KECAMATAN CIMENYAN
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	JUmlah laporan sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan				1 Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	15,300,000	KECAMATAN CIMENYAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**0**							**20,400,000**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0**							**20,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**0**							**20,400,000**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0							20,400,000	KECAMATAN CIMENYAN
										TOTAL	**10,561,135,000**							**10,542,513,534**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,384,445,000**							**4,492,533,900**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP PD.	point		point	67,42 point	**4,218,128,200**						67,42 point	**4,302,490,764**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	persen		persen	100 persen	**3,000,000**						100 persen	**3,060,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu				5 Dok	1,000,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	aparatur	5 Dok	1,020,000	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu				5 Dok	1,000,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	aparatur	5 Dok	1,020,000	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				5 Dok	1,000,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	aparatur	5 Dok	1,020,000	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	persen		persen	100 persen	**3,772,740,000**						100 persen	**3,848,194,800**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				264 OB	3,772,740,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	264 OB	3,848,194,800	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"- Persentase ketersediaan operasional perkantoran "	persen		persen	100 persen	**124,342,636**						100 persen	**126,829,489**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				4 Jenis	1,948,238	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	4 Jenis	1,987,203	KECAMATAN CIPARAY

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				23 Jenis	92,815,758	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	23 Jenis	94,672,073	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli				13 Jenis	2,490,140	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	13 Jenis	2,539,943	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				10 Jenis	2,938,500	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	10 Jenis	2,997,270	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				178 Ok	24,150,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	178 Ok	24,633,000	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase ketersediaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	**10,000,000**						100 persen	**10,200,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				3 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	aparatur	3 Jenis	10,200,000	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran	persen		persen	100 persen	**262,493,000**						100 persen	**267,742,860**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tertata				500 Lembar	2,075,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	500 Lembar	2,116,500	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	31,248,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	31,872,960	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah orang bulan (OB) jasa THL -Jumlah orang bulan (OB) jasa kebersihan kantor -Jumlah orang bulan (OB) jasa keamanan kantor				84 OB	229,170,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	84 OB	233,753,400	KECAMATAN CIPARAY

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan aset yang baik	persen		persen	100 persen	**45,552,564**						100 persen	**46,463,615**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak beroperasi				10 Unit	22,850,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	10 Unit	23,307,000	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Alat bengkel yang terpelihara				2 Jenis	2,720,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Jenis	2,774,400	KECAMATAN CIPARAY
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				1 Paket	19,982,564	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Paket	20,382,215	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	.INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	point		point	82 point	**40,232,000**						82 point	**41,036,640**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan	persen		persen	100 persen	**11,000,000**						100 persen	**11,220,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aparatur pemerintahan desa				150 Orang	11,000,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur	150 Orang	11,220,000	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**29,232,000**						100 persen	**29,816,640**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				120 Orang	29,232,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur	120 Orang	29,816,640	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa persentase capaian keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**24,864,000**						100 persen 100 persen	**25,361,280**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	laporan		laporan	1 laporan	**12,432,000**						1 laporan	**12,680,640**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12,432,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Laporan	12,680,640	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	lembaga		lembaga	1 lembaga	**12,432,000**						1 lembaga	**12,680,640**	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan pembinaan UMKM				1 Laporan	12,432,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Laporan	12,680,640	KECAMATAN CIPARAY
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	.Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	persen		persen	100 persen	**29,142,800**						100 persen	**29,725,656**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	urusan persen		urusan persen	2 urusan 100 persen	**29,142,800**						2 urusan 100 persen	**29,725,656**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Laporan	14,472,800	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur	2 Laporan	14,762,256	KECAMATAN CIPARAY
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				12 Laporan	14,670,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.	Masyarakat dan Aparatur	12 Laporan	14,963,400	KECAMATAN CIPARAY

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang dibina dan diawasi	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**72,078,000**						100 persen 100 persen	**93,919,560**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen		persen	100 persen	**72,078,000**						100 persen	**93,919,560**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				1 Laporan	10,080,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	masyarakat	1 Laporan	10,281,600	KECAMATAN CIPARAY
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	masyarakat	2 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN CIPARAY
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				100 %	15,630,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	masyarakat	100 %	15,942,600	KECAMATAN CIPARAY
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	10,080,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	masyarakat	1 Laporan	10,281,600	KECAMATAN CIPARAY
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				1 Lembaga	36,288,000	Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	masyarakat	1 Lembaga	37,013,760	KECAMATAN CIPARAY
									TOTAL	**4,384,445,000**								**4,492,533,900**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**5,416,022,000**							**5,342,488,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Nilai IKM penunjang sarpras	Poin Poin		Poin Poin	74 Poin 70 Poin	**5,050,904,500**						74 Poin 70 Poin	**4,862,788,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%		%	90 %	**14,332,500**						90 %	**19,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu				4 dok	1,995,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	4 dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA diselesaikan secara tepat waktu				1 dok	1,995,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA				1 Dok	1,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 Dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA diselesaikan secara tepat waktu				1 dok	1,995,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA				1 dok	1,995,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan secara tepat waktu				3 dok	4,357,500	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	3 dok	7,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	%		%	100 %	**4,347,564,000**						100 %	**4,113,500,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				20 OB	4,334,859,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kesekretariatan	20 OB	4,100,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK				1 Dok	7,542,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kesekretariatan	1 Dok	8,500,000	KECAMATAN CIWIDEY

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				4 dok	3,080,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	4 dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				1 dok	2,082,500	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 dok	2,500,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas 80 %	%		%	80 %	**13,840,000**						80 %	**14,000,000**	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				100 org	13,840,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kec Ciwidey	100 org	14,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Persentase ketersediaan operasional perkantoran "	%		%	90 %	**192,828,000**						90 %	**186,100,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				6 Jenis	4,075,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	6 Jenis	3,100,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				40 Jenis	32,133,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	40 Jenis	32,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli				30 Jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	30 Jenis	15,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				9 Jenis	8,020,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	9 Jenis	9,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan				12 bulan	48,600,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	12 bulan	21,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu				250 Tamu	15,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	250 Tamu	16,000,000	KECAMATAN CIWIDEY

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				100 OK	70,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	100 OK	90,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan barang milik daerah	%		%	85 %	**120,000,000**						85 %	**145,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibeli				8 Jenis	70,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	8 Jenis	75,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan		70,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran	%		%	85 %	**199,140,000**						85 %	**200,688,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan listrik				12 bulan	18,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	12 bulan	14,688,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey		6,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang bulan (OB) jasa THL, jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan kantor				12 bulan	176,140,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	12 bulan	180,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan aset yang baik	%		%	80 %	**163,200,000**						80 %	**184,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak beroperasi				6 unit	58,200,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	6 unit	60,000,000	KECAMATAN CIWIDEY

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat bengkel yang terpelihara				5 unit	10,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	5 unit	11,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 gd	30,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 gd	31,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				6 gedung	50,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	6 gedung	51,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara				1 jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kesekretariatan	1 jenis	31,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Poin		Poin	83 Poin	**151,200,000**						83 Poin	**193,000,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan	%		%	90 %	**16,800,000**						90 %	**23,000,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di kecamatan				12200 Orang	16,800,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	12200 Orang	23,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	95 %	**134,400,000**						95 %	**170,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				400 org	134,400,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	400 org	170,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN	%		%	95 %	**16,800,000**						95 %	**16,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	95 %	**16,800,000**						95 %	**16,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta yang hadir pada kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Tk Desa				50 org	16,800,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	50 org	16,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**33,600,000**							**100,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**0**							**60,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas Siaga yang hadir pada kegiatan dalam melakukan Pencegahan Tindak kejahatan				140 org	0	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		140 org	60,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Linmas siaga yang memahami dalam melakukan Pencegahan Tindak kejahatan	%		%	95 %	**33,600,000**						95 %	**40,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				100 Orang	33,600,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	100 Orang	40,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH	%		%	90 %	**71,560,000**						90 %	**70,700,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%		%	95 %	**71,560,000**						95 %	**70,700,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari bersejarah				3 Keg	35,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	3 Keg	35,700,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				4 Dok	36,560,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	4 Dok	35,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	%		%	100 %	**91,957,500**						100 %	**100,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	90 %	**91,957,500**						90 %	**100,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di monitoring dan evaluasi				7 desa	16,957,500	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	7 desa	20,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				95 %	75,000,000	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masy Kec Ciwidey	95 %	80,000,000	KECAMATAN CIWIDEY
										TOTAL	**5,416,022,000**							**5,342,488,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**6,998,138,000**							**7,503,690,149**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	NILAI AKIP	%		%	100 %	**5,818,918,000**						100 %	**6,267,860,149**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen	Dok		Dok	11 Dok	**15,000,000**						11 Dok	**15,300,000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				2 Dok	5,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	2 Dok	5,100,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				2 Dok	5,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	2 Dok	5,100,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				2 Laporan	5,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	2 Laporan	5,100,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan Jumlah dokumen Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan	Bulan Dok Tahun % Bulan		Bulan Dok Tahun % Bulan	12 Bulan 2 Dok 1 Tahun 100 % 12 Bulan	**4,942,036,000**						12 Bulan 2 Dok 1 Tahun 100 % 12 Bulan	**5,446,311,349**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				12 Bulan	4,934,036,000					ASN dan NON ASN Kantor Kecamatan	12 Bulan	5,438,151,349	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Dok	2,000,000					ASN dan NON ASN Kantor Kecamatan	1 Dok	2,040,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				3 Laporan	4,000,000					ASN dan NON ASN Kantor Kecamatan	3 Laporan	4,080,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan				2 Laporan	2,000,000					ASN dan NON ASN Kantor Kecamatan	2 Laporan	2,040,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah sosialisasi	Keg		Keg	1 Keg	**4,080,000**						1 Keg	**0**	
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kkegiatan sosialisasi				1 Keg	4,080,000					ASN Kantor Kecamatan	1 Keg	0	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan	Keg		Keg	7 Keg	**106,200,000**						7 Keg	**74,460,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik				4 Jenis	2,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	4 Jenis	5,100,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				72 Jenis	33,200,000					Pegawai Kantor Kecamatan	72 Jenis	10,200,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				1 Jenis	2,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	1 Jenis	2,040,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				2 Jenis	6,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	2 Jenis	3,060,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyedian Surat Kabar				3 Jenis	1,040,000					Pegawai Kantor Kecamatan	3 Jenis	3,060,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu				250 Hok	31,960,000					Pegawai Kantor Kecamatan	250 Hok	10,200,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi didalam dan Luar Daerah				230 HO	30,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	230 HO	40,800,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						0							0	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan	Keg		Keg	3 Keg	**726,602,000**						3 Keg	**706,288,800**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat				4 Jenis	3,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	4 Jenis	3,060,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	76,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	12 Bulan	77,520,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan Jumlah tenaga outsourcing petugas keamanan Jumlah tenaga pendukung pegawai Non PNS				4 Orang 2 Orang 15 Orang	647,602,000					Pegawai Kantor Kecamatan	4 Orang 2 Orang 15 Orang	625,708,800	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan	Keg		Keg	2 Keg	**25,000,000**						2 Keg	**25,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah Jenis Kendaraan Dinas Yang Di Pelihara				5 Unit	20,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	5 Unit	20,400,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3 Jenis	5,000,000					Pegawai Kantor Kecamatan	3 Jenis	5,100,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0					Pegawai Kantor Kecamatan		0	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	IKM	%		%	100 %	**28,400,000**						100 %	**32,640,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah	Keg		Keg	1 Keg	**18,400,000**						1 Keg	**22,440,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Prima di Kecamatan				1 Keg	18,400,000					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg	22,440,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	Keg		Keg	1 Keg	**10,000,000**						1 Keg	**10,200,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Peserta Sosialisasi Persampahan				1 Keg	10,000,000					0	1 Keg	10,200,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	IKM	%		%	100 %	**1,032,100,000**						100 %	**1,034,790,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Keg		Keg	1 Keg	**32,000,000**						1 Keg	**22,440,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan				1 Keg	32,000,000					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg	22,440,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**966,500,000**						1 Tahun	**981,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang dan Monev				1 Keg	37,500,000					Masyarakat di wilayah kelurahan	1 Keg	38,250,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pelaksanan Kegiatan				1 Tahun	700,000,000					Masyarakat di wilayah kelurahan	1 Tahun	714,000,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	204,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di wilayah kelurahan	1 Tahun	204,000,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi				3 Laporan	25,000,000					Masyarakat di wilayah kelurahan	3 Laporan	25,500,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarkatan Tingkat Kecamatan	Keg		Keg	3 Keg	**33,600,000**						3 Keg	**30,600,000**	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan P2TP2A dan Posyandu Jumlah Kegiatan Pembinaan Oragnisasi Perempuan Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan				1 Keg 1 Keg 1 Keg	33,600,000					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg 1 Keg 1 Keg	30,600,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM	%		%	100 %	**21,920,000**						100 %	**46,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Rapat Koordinasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**21,920,000**						1 Tahun	**46,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat dan Koordinasi				1 Tahun	21,920,000	Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	46,000,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM	%		%	100 %	**66,800,000**						100 %	**91,800,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan	Keg		Keg	2 Keg	**66,800,000**						2 Keg	**91,800,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari bersejarah				2 Keg	33,200,000					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Keg	30,600,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta sosialisasi Kepemudaan				1 Keg	16,800,000					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg	30,600,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi				1 Keg	16,800,000					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg	30,600,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	IKM	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**30,600,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Kegiatan Pemerintahan	Keg		Keg	3 Keg	**30,000,000**						3 Keg	**30,600,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi				1 Keg	10,000,000					Aparat Desa di Wilayah Kecamatan	1 Keg	10,200,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi				1 Keg	10,000,000					Aparat Desa di Wilayah Kecamatan	1 Keg	10,200,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi				1 Keg	10,000,000					Aparat Desa di Wilayah Kecamatan	1 Keg	10,200,000	KECAMATAN DAYEUHKOLOT
										TOTAL	**6,998,138,000**							**7,503,690,149**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,561,860,000**							**5,034,645,100**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,311,860,000**						1 Dokumen	**4,759,645,100**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen lakip yang diselesaikan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**3,000,000**						1 Dokumen	**3,300,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP yang diselesaikan				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Dokumen LAKIP	1 Dokumen	3,300,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan tahunan Jumlah laporan program realisasi anggaran Jumlah penyusunan laporan program realisasi anggaran Jumlah penyusunan laporan semesteran Jumlah tunjangan dan gaji ASN	Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Orang		Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Orang	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan 26 Orang	**4,019,171,000**						1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan 26 Orang	**4,437,188,100**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tunjangan dan gaji ASN				26 Orang	4,004,171,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi keuangan perangkat daerah	26 Orang	4,421,088,100	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Tahunan				1 kegiatan	9,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi keuangan perangkat daerah	1 kegiatan	9,500,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan semesteran				4 Laporan	3,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi keuangan perangkat daerah	4 Laporan	3,300,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah penyusunan laporan program realisasi anggaran				4 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dokumen	3,300,000	KECAMATAN IBUN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah penydiaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaaan komponen intalasi listrik/penerangan kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah rakor dan konsultasi keluar daerah	Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis bulan Jenis Orang		Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis bulan Jenis Orang	2 Jenis 10 Jenis 35 Jenis 3 Jenis 13 Jenis 12 bulan 15 Jenis 20 Orang	**69,000,000**						2 Jenis 10 Jenis 35 Jenis 3 Jenis 13 Jenis 12 bulan 15 Jenis 20 Orang	**66,800,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan kantor				10 jenis	40,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	40,400,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				2 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	2 jenis	0	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				15 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	15 jenis	5,500,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan				13 jenis	2,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	13 jenis	2,200,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan				3 jenis	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	3 jenis	2,200,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan Alat Yulis Kantor				35 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	35 jenis	5,500,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan penyediaan makanan da minuman				12 Bulaln	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	12 Bulaln	5,500,000	KECAMATAN IBUN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah				20 Orang	5,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Administrasi umum perangkat daerah	20 Orang	5,500,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli Jumlah meubeler yang dibeli	Jenis Jenis		Jenis Jenis	4 Jenis 4 Jenis	**10,000,000**						4 Jenis 4 Jenis	**20,600,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang dibeli				4 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pengadaan barang milik daerah	4 jenis	5,100,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli				4 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pengadaan barang milik daerah	4 jenis	15,500,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa yang dibayar dalam 1 tahun Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lembar Orang Bulan Jenis		Lembar Orang Bulan Jenis	1200 Lembar 5 Orang 12 Bulan 15 Jenis	**170,689,000**						1200 Lembar 5 Orang 12 Bulan 15 Jenis	**187,757,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat				1200 lembar	3,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1200 lembar	3,300,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 Bulaln	20,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulaln	22,000,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				15 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	15 jenis	5,500,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa yang dibayar dalam 1 Tahun				5 Orang	142,689,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5 Orang	156,957,000	KECAMATAN IBUN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah gedung kantor yang direhab/diperbaiki Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi/ diperbaiki Jumlah rumah dinas yang direhab/diperbaiki	Paket Unit buah		Paket Unit buah	1 Paket 2 Unit 1 buah	**40,000,000**						1 Paket 2 Unit 1 buah	**44,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang direhabilitasi/diperbaiki				2 Unit	10,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	2 Unit	11,000,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab/diperbaiki				1 Paket	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1 Paket	16,500,000	KECAMATAN IBUN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas yang direhab/diperbaiki				1 Buah	15,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1 Buah	16,500,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**110,000,000**						1 Kegiatan	**121,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**20,000,000**						1 kegiatan	**22,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan				1 kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat yang mempunyai kegiatan wirausaha	1 kegiatan	22,000,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah kegiatan peserta pembinaan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	**90,000,000**						3 Kegiatan	**99,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta kegiatan Pembinaan				3 kegiatan	90,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	3 kegiatan	99,000,000	KECAMATAN IBUN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah kegiatan rakor Jumlah peserta yang hadir dalam penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	**60,000,000**						1 kegiatan 1 kegiatan	**66,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Rakor Jumlah peserta yang hadir dalam penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	**60,000,000**						1 Kegiatan 1 Kegiatan	**66,000,000**	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rakor				1 kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Ibu hamil dari kalangan keluarga tidak mampu	1 kegiatan	22,000,000	KECAMATAN IBUN
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta yang Hadir dalam Penyuluhan bagi Ibu Hamil, dari Keluarga Tidak Mampu				1 kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Ibu hamil dari kalangan keluarga tidak mampu	1 kegiatan	44,000,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	00		00	00 00	**30,000,000**						00 00	**33,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**30,000,000**						3 kegiatan	**33,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Keagamaan				3 kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Tokoh agama dan masyarakat	3 kegiatan	33,000,000	KECAMATAN IBUN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepada daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**20,000,000**						2 Kegiatan	**22,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah peringatan hari-hari bersejarah	Kegiaan		Kegiaan	2 Kegiaan	**20,000,000**						2 Kegiaan	**22,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari bersejarah				2 kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Hari-hari bersejarah	2 kegiatan	22,000,000	KECAMATAN IBUN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah fasilitasi administrasi Desa	Jenis		Jenis	3 Jenis	**30,000,000**						3 Jenis	**33,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah fasilitasi administrasi Desa	Jenis		Jenis	3 Jenis	**30,000,000**						3 Jenis	**33,000,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah yang dipasilitasi terkait administrasi desa				3 Jenis	30,000,000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemerintah Desa	3 Jenis	33,000,000	KECAMATAN IBUN
									TOTAL		**4,561,860,000**							**5,034,645,100**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,407,381,000**							**4,785,406,876**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akip	Point		Point	72 Point	**4,127,381,000**						72 Point	**4,535,406,876**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Presentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**10,200,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang				16 Dokumen/Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Sangkanhurip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	16 Dokumen/Laporan	10,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	**3,643,882,000**						14 Bulan	**4,011,907,876**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	3,643,882,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN KECAMATAN	14 Bulan	4,011,907,876	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**5,100,000**	
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		1 Kegiatan	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Pelaksanaan Administrasi umum PD	%		%	100 %	**34,500,000**						100 %	**27,390,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				5 Jenis	8,500,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	5 Jenis	8,670,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				3 Unit	5,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	3 Unit	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				2 Kegiatan	5,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	2 Kegiatan	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				1200 Box	10,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	1200 Box	1,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				7 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	7 Jenis	3,060,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				2 Jenis	3,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	2 Jenis	3,060,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan katapang	1 Kegiatan	1,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Jasa Penunjang Urusan PD	%		%	100 %	**413,499,000**						100 %	**459,899,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				2 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	2 Jenis	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	40,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	12 Bulan	61,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				5 Unit	5,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	5 Unit	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)				13 Bulan	363,499,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan	13 Bulan	388,499,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemeliharaan PD	%		%	100 %	**20,500,000**						100 %	**20,910,000**	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset kantor				1 Kegiatan	5,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Katapang	1 Kegiatan	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor				1 Kegiatan	5,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Katapang	1 Kegiatan	5,100,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor				1 Paket	10,500,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Katapang	1 Paket	10,710,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	Point		Point	80 Point	**70,000,000**						80 Point	**62,400,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Presentase urusan Pelimpahan Kepada Camat	%		%	100 %	**0**						100 %	**1,200,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan	1 Kegiatan	1,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Presentase peserta sosialisasi	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**10,200,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di kecamatan				1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Presentase peserta sosialisasi	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**51,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				6 Kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	6 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**24,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**24,400,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Kegiatan	60,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Katapang	1 Kegiatan	24,400,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	''Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	**90,000,000**						100 %	**91,800,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Presentase peserta sosialisasi	%		%	100 %	**90,000,000**						100 %	**91,800,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				1 Kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan	1 Kegiatan	30,600,000	KECAMATAN KATAPANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan				1 Kegiatan	50,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa dan Kecamatan	1 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KATAPANG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**71,400,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	**60,000,000**						100 %	**71,400,000**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasiltiasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan dan Desa	1 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan dan Desa	1 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				1 Kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan dan Desa	1 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN KATAPANG
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				4 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Katapang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan dan Desa	4 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN KATAPANG
									TOTAL	**4,407,381,000**								**4,785,406,876**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,225,948,000**							**4,795,126,048**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip	point		point	71 point	**4,045,948,000**						71 point	**4,469,126,048**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**2,200,000**						100 %	**2,724,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	1,200,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Dokumen	1,224,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	%		%	100 %	**3,639,448,000**						100 %	**4,026,189,338**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan				14 Bulan	3,637,948,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	14 Bulan	4,020,069,338	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Akuntansi SKPD				0 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Kegiatan	2,040,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	1,530,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Dokumen	0	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan LHP Pemerikasaan Reguler				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Dokumen	2,550,000	KECAMATAN KERTASARI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	**15,750,000**						100 %	**18,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				21 Stel	15,750,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	21 Stel	18,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase terlaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	%		%	100 %	**80,550,000**						100 %	**102,672,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan elektronik				12 Bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	18,360,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor				46 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	46 Jenis	10,200,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4 Jenis	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	4 Jenis	5,100,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Jenis	1,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Jenis	5,100,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu				12 Bulan	15,550,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	15,912,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	45,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	47,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	**47,000,000**						100 %	**50,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeluer yang dibeli				2 Jenis	7,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Jenis	5,100,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Jenis	40,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	5 Jenis	35,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Kantor				0 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Kegiatan	10,200,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	prosentase penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**206,000,000**						100 %	**200,440,710**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi,Air dan Listrik				12 Bulan	18,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	18,360,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	188,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	182,080,710	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik	Bulan		Bulan	12 Bulan	**55,000,000**						12 Bulan	**58,600,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15 Unit	30,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	15 Unit	32,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				0 Unit	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Unit	5,100,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	5 Jenis	6,500,000	KECAMATAN KERTASARI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Kegiatan	15,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**						**0**							**10,200,000**	
7	01	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Bulan	10,200,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	point		point	84 point	**15,000,000**						84 point	**23,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	prosentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**23,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Peserta Sosialisasi				2 Kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	23,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	point		point	84 point	**10,000,000**						84 point	**12,000,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Pesentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Mengikuti Sosialisasi di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan prosentase sosialisasi penegakkan peraturan daerah	% %		% %	100 % 100 %	**10,000,000**						100 % 100 %	**12,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat/Linmas	1 Kegiatan	12,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	point		point	84 point	**35,000,000**						84 point	**36,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah prosentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	% %		% %	100 % 100 %	**35,000,000**						100 % 100 %	**36,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari bersejarah				1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Kegiatan	23,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan kegiatan hari-hari besar Nasional				1 Kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Kegiatan	13,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	point		point	84 point	**120,000,000**						84 point	**255,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% %		% %	100 % 100 %	**120,000,000**						100 % 100 %	**255,000,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa				2 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KERTASARI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Desa				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui Pra Musrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				1 Kegiatan	35,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Kegiatan	0	KECAMATAN KERTASARI
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mendapatakan Pembinaan				4 Kegiatan	35,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	4 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KERTASARI
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN KERTASARI
									TOTAL	**4,225,948,000**								**4,795,126,048**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,510,711,000**							**431,290,156,772**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	Poin		Poin	66 Poin	**4,370,711,000**						66 Poin	**431,035,156,772**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**5,000,000**						100 %	**5,100,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja				4 dok	5,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 dok	5,100,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai		Pegawai	23 Pegawai	**3,929,872,000**						23 Pegawa	**430,692,519,768**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegaeai ASN				23 Pegawai	3,917,372,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	23 Pegawa	430,684,869,768	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				4 dok	2,500,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 dok	2,550,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	2,550,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Dokumen Realisasi				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	2,550,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	**28,000,000**						100 %	**5,100,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				57 Stell	28,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kecamatan Kutawaringin	57 Stell	5,100,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum PD	%		%	100 %	**87,890,000**						100 %	**54,927,804**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				5 Jenis	10,500,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Jenis	10,710,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19 Jenis	15,090,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	19 Jenis	10,200,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				18 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Jenis	9,690,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli				655 Dus	20,500,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	655 Dus	10,200,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				4 Jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Jenis	2,000,004	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				105 Eksemplar	1,800,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	105 Eksemplar	1,927,800	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 HOK	15,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	78 HOK	10,200,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**17,340,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				3 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Jenis	10,200,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli				5 Jenis	30,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Jenis	7,140,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	100 %	**224,949,000**						100 %	**219,769,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	31,260,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	32,130,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	193,689,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	187,639,200	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	% %		% %	100 % 100 %	**55,000,000**						100 % 100 %	**40,400,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10 Unit	20,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Unit	20,000,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Jenis	5,100,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				10 Jenis	25,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Jenis	15,300,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**71,400,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**71,400,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan intensipikasi dan ekstensipikasi sumber-sumber pendapatan Daerah				4 Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	20,400,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				198 Peserta	25,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	198 Peserta	51,000,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**76,500,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**76,500,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				90 %	30,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 %	40,800,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta yang mendapat Pelatihan				100 Peserta	20,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Peserta	35,700,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	% %		% %	100 % 100 %	**15,000,000**						100 % 100 %	**40,800,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				100 Peserta	15,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Peserta	40,800,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**45,900,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**45,900,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				2 Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	45,900,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				100 Peserta	20,000,000	Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Peserta	20,400,000	KECAMATAN KUTAWARINGIN
									TOTAL	**4,510,711,000**								**431,290,156,772**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,412,648,000**							**4,803,209,758**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP)	Poin		Poin	70 Poin	**4,190,149,000**						70 Poin	**4,576,322,600**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**5,000,000**						3 Dokumen	**5,100,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu				3 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	3 Laporan	5,100,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Neraca dan LRA) Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Dokumen Dokumen Bulan		Dokumen Dokumen Dokumen Bulan	2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	**3,816,678,000**						2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	**4,207,396,920**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,801,678,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	4,192,246,920	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Neraca dan LRA)				2 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	2 Laporan	5,050,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	4 Laporan	5,050,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	4 Laporan	5,050,000	KECAMATAN MAJALAYA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Piket Pengamanan BMD	Bulan		Bulan	12 Bulan	**10,000,000**						12 Bulan	**10,200,000**	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Piket Pengamanan BMD				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	10,200,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Stel Kegiatan		Stel Kegiatan	49 Stel 1 Kegiatan	**10,000,000**						49 Stel 1 Kegiatan	**10,200,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				40 Stel	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	40 Stel	5,100,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	1 Laporan	5,100,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Daerah Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	Jenis Jenis Jenis Bulan Bulan Bulan Bulan		Jenis Jenis Jenis Bulan Bulan Bulan Bulan	16 Jenis 14 Jenis 15 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	**65,000,000**						16 Jenis 14 Jenis 15 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	**65,900,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				16 Jenis	8,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	16 Jenis	8,160,000	KECAMATAN MAJALAYA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				14 Jenis	30,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	14 Jenis	30,200,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				15 Jenis	7,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	15 Jenis	7,140,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	3,060,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan				12 Bulan	2,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	2,040,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman				12 Bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	5,100,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Daerah				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	10,200,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jenis		Jenis	8 Jenis	**5,000,000**						8 Jenis	**5,100,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlaj mebeleur yang dibeli				8 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	8 jenis	5,100,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	Bulan Bulan Lembar		Bulan Bulan Lembar	12 Bulan 12 Bulan 600 Lembar	**238,971,000**						12 Bulan 12 Bulan 600 Lembar	**232,135,680**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				600 Lembar	3,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	600 Lembar	3,060,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	25,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	25,500,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	210,971,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	12 Bulan	203,575,680	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang /berat Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah peralatan kerja yang diservis / diperbaiki	Unit Unit Jenis Jenis		Unit Unit Jenis Jenis	1 Unit 1 Unit 9 Jenis 6 Jenis	**39,500,000**					1 Unit 1 Unit 9 Jenis 6 Jenis	**40,290,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9 Jenis	7,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	9 Jenis	7,140,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis / diperbaiki				6 Jenis	2,500,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	6 Jenis	2,550,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang /berat				1 Unit	15,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	1 Unit	15,300,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	15,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	1 Unit	15,300,000	KECAMATAN MAJALAYA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen		Persen	70 Persen	**94,086,000**						70 Persen	**95,905,388**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang		Orang	120 Orang	**14,648,000**						120 Orang	**14,940,960**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan				120 Orang	14,648,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	120 Orang	14,940,960	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah peserta sosialisasi	Orang		Orang	80 Orang	**79,438,000**						80 Orang	**80,964,428**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				80 Orang	79,438,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	80 Orang	80,964,428	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**48,000,000**						100 Persen	**48,960,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat	Laporan Orang		Laporan Orang	3 Laporan 235 Orang	**48,000,000**						3 Laporan 235 Orang	**48,960,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta yang mengikut kegiatan pemberdayaan masyarakat				3 Laporan 235 Orang	48,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	3 Laporan 235 Orang	48,960,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	**15,000,000**						100 Persen	**15,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Orang		Orang	43 Orang	**15,000,000**						43 Orang	**15,300,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti koordinasi dengan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43 Orang	15,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	43 Orang	15,300,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	**25,000,000**						100 Persen	**25,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah	Laporan		Laporan	2 Laporan	**25,000,000**						2 Laporan	**25,500,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Laporan	25,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	2 Laporan	25,500,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	''Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen		Persen	100 Persen	**40,413,000**						100 Persen	**41,221,770**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah laporan sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan Jumlah program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan/Jumlah usulan program dan kegiatan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan	**40,413,000**						1 Laporan 1 Laporan	**41,221,770**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan/Jumlah usulan program dan kegiatan				2 Kegiatan	36,000,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	2 Kegiatan	36,720,000	KECAMATAN MAJALAYA
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah laporan sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan				1 Laporan	4,413,000	Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Majalaya	1 Laporan	4,501,770	KECAMATAN MAJALAYA
									TOTAL	**4,412,648,000**							**4,803,209,758**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,615,648,000**							**4,653,740,133**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**4,385,648,000**						100 Persen	**4,358,340,133**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**12,500,000**						100 Persen	**10,200,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan.				1 kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 kegiatan	10,200,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Lakip, Laporan tahunan dan Renja.				4 dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	4 dokumen	0	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**4,030,310,000**						100 Persen	**4,030,460,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN				21 orang	4,022,810,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	21 orang	4,022,810,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				4 dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	4 dokumen	2,550,000	KECAMATAN MARGAASIH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun`				2 dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	2 dokumen	2,550,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan dokumen Pelaporan Program Realisasi Anggaran.				4 dokumen	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	4 dokumen	2,550,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Uang Lembur Piket	Orang		Orang	166 Orang	**25,000,000**						166 Orang	**5,100,000**	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah uang lembur piket				166 orang	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	166 orang	5,100,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**48,179,000**						100 Persen	**49,142,693**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.				15 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	15 jenis	5,100,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor				15 jenis	13,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	15 jenis	10,200,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga				15 jenis	11,179,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	15 jenis	11,402,693	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan				5 jenis	2,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	5 jenis	5,100,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3 jenis	2,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	3 jenis	2,040,000	KECAMATAN MARGAASIH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	12 bulan	5,100,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				20 hok	10,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	20 hok	10,200,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Mebel	Paket		Paket	1 Paket	**10,000,000**						1 Paket	**10,200,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				1 Paketj	10,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 Paketj	10,200,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**234,659,000**						100 Persen	**227,737,440**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat.				700 lembar	3,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	700 lembar	3,060,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.				12 bulan	38,400,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	12 bulan	39,168,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				6 orang	193,259,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	6 orang	185,509,440	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**25,000,000**						100 Persen	**25,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.				9 unit	10,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	9 unit	10,200,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.				1 Paket	15,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 Paket	15,300,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	**90,000,000**						6 Kegiatan	**153,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	**90,000,000**						6 Kegiatan	**153,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.				6 Kegiatan	90,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	6 Kegiatan	153,000,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdyaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**30,000,000**						1 Kegiatan	**30,600,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdyaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**30,000,000**						1 Kegiatan	**30,600,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Maasyarakat di Wilayah Kecamatan.				1 Kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 Kegiatan	30,600,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Aparat Keamanan (Linmas) yang mengikuti Sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Republik Indonesia	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**25,000,000**						1 Kegiatan	**25,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Aparat Keamanan (Linmas) yang mengikuti Sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Republik Indonesia	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**25,000,000**						1 Kegiatan	**25,500,000**	
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Aparat Keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisaian Republik Indonesia.				1 Kegiatan	25,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 Kegiatan	25,500,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**25,000,000**						1 Kegiatan	**25,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**25,000,000**						1 Kegiatan	**25,500,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan				1 Kegiatan	25,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 Kegiatan	25,500,000	KECAMATAN MARGAASIH
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen		Persen	100 Persen	**60,000,000**						100 Persen	**60,800,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen		Persen	100 Persen	**60,000,000**						100 Persen	**60,800,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi terhadap Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.				1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Margaasih	1 Kegiatan	20,000,000	KECAMATAN MARGAASIH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa				3 Kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Margaasih	3 Kegiatan	40,800,000	KECAMATAN MARGAASIH
TOTAL										**4,615,648,000**								**4,653,740,133**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**7,028,596,000**							**6,911,931,251**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PROSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%		%	100 %	**5,971,396,000**						100 %	**6,004,131,251**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**15,300,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancangan				5 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Dokumen	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 buku	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 buku	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD				1 buku	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan DPA-SKPD				1 buku	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP,LPPD,LKPJ PD yang diselesaikan secara tepat waktu				3 buku	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**5,073,920,000**						100 %	**5,074,070,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN				27 orang	5,066,420,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	27 orang	5,066,420,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan secara tepat waktu				1 buku	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				4 buku	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 buku	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buku	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**69,918,500**						100 %	**50,942,197**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	8,943,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	9,122,197	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor				12 bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	9,180,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan Rumah Tangga				6 jenis	4,975,500	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	6 jenis	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan				12 jenis	6,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 jenis	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	2,040,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman				12 bulan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	10,200,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dalam dan Luar Daerah				12 bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	10,200,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**20,985,000**						100 %	**22,440,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair				6 unit	6,300,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	6 unit	7,140,000	KECAMATAN MARGAHAYU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlahn Peralatan dan Mesin				1 unit	4,900,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 unit	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 unit	9,785,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	2 unit	10,200,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**748,390,970**						100 %	**815,879,054**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penerimaan Surat Masuk dan Pembuatan Surat Keluar				1500 berkas	2,500,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1500 berkas	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi,air, dan listrik				12 bulan	36,129,100	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	74,034,273	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservice/perbaiki				12 bulan	15,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	12 bulan	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor/Tenaga Harian Lepas (THL) & Lembur Aset Kantor				23 orang bulan	694,761,870	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	23 orang bulan	734,194,781	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**43,181,530**						100 %	**25,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda Empat, Roda Tiga dan Roda Dua				14 unit/bulan	23,181,530	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	14 unit/bulan	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Kantor Sedang/Berat				0 0	0	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	0 0	10,200,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor				25 Jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	25 Jenis	10,200,000	KECAMATAN MARGAHAYU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%		%	100 %	**34,000,000**						100 %	**18,360,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**5,100,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah ibu hamil yang dapat menjaga kesehatan diri dan bayi				1 laporan dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 laporan dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**8,160,000**	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah peserta pelayanan administrasi kependudukan				1 laporan dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 laporan dokumen	8,160,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persenase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**18,000,000**						100 %	**5,100,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Terhadap Anak Usia Dini Jumlah Peserta Sosialisasi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)				1 laporan dokumen 1 Laporan Dokumen	18,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 laporan dokumen 1 Laporan Dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	PROSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%		%	100 %	**964,200,000**						100 %	**856,800,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	**55,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peserta yang berperan dalam Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang)				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	2 Dokumen	20,400,000	KECAMATAN MARGAHAYU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan desa yang berperan dalam Organisasi Perempuan				3 Laporan Dokumen	30,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	3 Laporan Dokumen	20,400,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	Persentase		Persentase	100 Persentase	**909,200,000**						100 Persentase	**816,000,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				2 Dokumen	21,410,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	2 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 Paket	429,150,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 Paket	805,800,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Dokumen	458,640,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	7 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase		Persentase	100 Persentase	**8,000,000**						100 Persentase	**3,060,000**	
7	**01**	**04**	2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase		Persentase	100 Persentase	**8,000,000**						100 Persentase	**3,060,000**	
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan Dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 Laporan Dokumen	3,060,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%		%	100 %	**43,000,000**						100 %	**24,480,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**43,000,000**						100 %	**24,480,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Laporan Dokumen	9,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	2 Laporan Dokumen	9,180,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelestarian Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa				1 Laporan Dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 Laporan Dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah laporan kegiatan keagamaan				4 Laporan Dokumen	18,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	4 Laporan Dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Sosial				3 Laporan Dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	3 Laporan Dokumen	5,100,000	KECAMATAN MARGAHAYU
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**5,100,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**5,100,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Perundang-undangan Desa				1 Laporan Dokumen	8,000,000	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 Laporan Dokumen	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 kegiatan	0	Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Se-Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	1 kegiatan	2,550,000	KECAMATAN MARGAHAYU
TOTAL											**7,028,596,000**							**6,911,931,251**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,851,643,000**							**5,266,151,115**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	NILAI SAKIP	POINT		POINT	72 POINT	**4,687,643,000**						72 POINT	**5,011,151,115**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen		Persen	100 Persen	**11,000,000**						100 Persen	**6,120,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan				1 Dokumen	7,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Tertatanya Administrasi Pelaporan dan Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	**4,092,366,000**						100 Persen	**4,512,983,115**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai				26 Orang	4,092,366,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	26 Orang	4,512,983,115	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**10,000,000**						100 persen	**13,260,000**	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Kegiatan	13,260,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal	Persen		Persen	100 Persen	**135,000,000**						100 Persen	**39,780,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				5 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Jenis	10,200,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor dan jumlah peralatan perlengkapan kantor				30 Jenis	40,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	30 Jenis	5,100,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan				10 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	10 Jenis	5,100,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah nasi box dan snack				1120 Ok	0	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1120 Ok	5,100,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggadaan				5 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Jenis	2,040,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar dan tabloit				3 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Jenis	2,040,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah				180 Ok	70,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	180 Ok	10,200,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**379,277,000**						100 Persen	**372,708,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah sumber daya air, listrik dan komunikasi				12 Bulan	20,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	27,540,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang bekerja				11 Orang	359,277,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	11 Orang	345,168,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**60,000,000**						100 Persen	**66,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Roda 2 Jumlah Roda 4				7 Unit 2 Unit	20,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	7 Unit 2 Unit	5,100,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat				3 Kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Kegiatan	30,600,000	KECAMATAN NAGREG
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan routin/berkala gedung kantor				2 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Kegiatan	30,600,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20,000,000**							**45,900,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**20,000,000**							**45,900,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				3 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		3 Kegiatan	45,900,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	prosentase pelaksanaan pemberdayaan Desa prosentase pelaksanaan pemberdayaan Desa	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	**10,000,000**						100 % 100 Persen	**20,400,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**51,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Prosentase kegiatan peningkatan aparat dalam siskamswakarsa	Persen		Persen	100 Persen	**20,000,000**						100 Persen	**51,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Presentase Capaian pelaksanaan program urusan pemerintahan	%		%	100 %	**44,000,000**						100 %	**45,900,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Prosentase Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	**44,000,000**						100 Persen	**45,900,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Hari Besar				2 Kegiatan	44,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Kegiatan	45,900,000	KECAMATAN NAGREG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		%	100 %	**70,000,000**						100 %	**91,800,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentasae Pelaksanaan kegiatan fasilitas rekomendasi pembinaan dan pengawasan sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	**70,000,000**						100 persen	**91,800,000**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Kegiatan	45,900,000	KECAMATAN NAGREG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Kegiatan	45,900,000	KECAMATAN NAGREG
									TOTAL	**4,851,643,000**								**5,266,151,115**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,546,384,000**							**4,780,294,200**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0	0		0	0 0	**4,361,384,000**						0 0	**4,525,294,200**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan dan evaluasi kinerja	%		%	100 %	**12,000,000**						100 %	**17,340,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Biaya perencanaan pembangunan musrenbang				2 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	2 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	1 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan Dokumen Pereubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	2 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD				2 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	2 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-RKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	1 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.				3 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	3 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	1 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	%		%	100 %	**3,915,922,000**						100 %	**4,111,988,100**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan Pegawai Asn				14 bulan	3,907,922,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	14 bulan	4,103,318,100	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JumlahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	4 Dokumen	2,550,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				12 bulan	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	12 bulan	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	18 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	5 Dokumen	2,040,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan pelayanan adminikstrasi umum yang maksimal	%		%	100 %	**78,266,000**						100 %	**48,960,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar				12 bulan	4,416,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	12 bulan	15,300,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				9 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	9 jenis	5,100,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga				3 jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	3 jenis	5,100,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor				0 bulan	0	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	0 bulan	5,100,000	KECAMATAN PACET

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan				3 jenis	1,850,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	3 jenis	3,060,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pasilitasi Kunjungban Tamu				12 bulan	12,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	12 bulan	5,100,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	45,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	12 bulan	10,200,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang Milik Daertah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**37,420,000**							100 %	**38,991,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan				0 unit	0	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	0 unit	0	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebeler				3 unit	10,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	3 unit	10,200,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lain				1 paket	27,420,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	1 paket	28,791,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediuaan jasa p[enunjang urusan pemerintah Daerah	%		%	100 %	**255,362,000**							100 %	**265,175,100**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2,500,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	12 bulan	2,550,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik				12 bulan	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	12 bulan	12,240,000	KECAMATAN PACET

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.				13 bulan	238,462,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Pacet	13 bulan	250,385,100	KECAMATAN PACET
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pelayanan adminikstrasi umum yang maksimal	%		%	100 %	**62,414,000**						100 %	**42,840,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 unit	20,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	2 unit	5,100,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3 unit	10,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	3 unit	5,100,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 unit	10,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	4 unit	15,300,000	KECAMATAN PACET
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 paket	22,414,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan pacet	2 paket	17,340,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	00		00	00 00	**35,000,000**						00 00	**76,500,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat	%		%	100 %	**35,000,000**						100 %	**76,500,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar Bersejarah				2 Kegiatan	35,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	76,500,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	00		00	00 00	**40,000,000**						00 00	**76,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	persentase Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**76,500,000**	
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan Siskamswakarsa				2 Kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.	masyarakat	2 Kegiatan	76,500,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	00		00	00 00	**40,000,000**						00 00	**51,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan ureusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**51,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya				2 Kegiatan	40,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	51,000,000	KECAMATAN PACET
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	00		00	00 00	**70,000,000**						00 00	**51,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Desa yang di bina dan diawasi	%		%	100 %	**70,000,000**						100 %	**51,000,000**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Peserta Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kecamatan				125 HOK	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	125 HOK	0	KECAMATAN PACET
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Organisasi Perempuan				150 HOK	40,000,000	Kab. Bandung, Pacet, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	150 HOK	51,000,000	KECAMATAN PACET
										TOTAL	**4,546,384,000**							**4,780,294,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,485,889,000**							**4,897,067,281**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akip Nilai Akip	point Point		point Point	66,5 point 66.5 Point	**4,246,795,000**						66,5 point 66.5 Point	**4,642,067,281**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**15,300,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, laptah, Renja, Renstra, Laporan Semeter)				8 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	8 Dokumen	15,300,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase tertatanya Administrasi pelapor dan keuangan	%		%	100 %	**3,818,300,000**						100 %	**4,206,380,803**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN				20 Orang	3,803,300,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	20 Orang	4,191,080,803	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen pelaporan Keuangan Akhir (Dok)				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	1 Dokumen	15,300,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Pemenuhan Disiplin penunjang aparatur	%		%	100 %	**12,000,000**						100 %	**27,300,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian dinas				20 Stel	12,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	20 Stel	12,000,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek				1 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	1 Kegiatan	15,300,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	%		%	100 %	**119,404,000**						100 %	**21,806,478**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik				10 Jenis	6,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	10 Jenis	5,100,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				30 Jenis	38,057,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	30 Jenis	5,100,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35 Jenis	14,026,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	35 Jenis	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Mamin Pegawai				300 Galon	6,378,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	300 Galon	6,506,478	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Bahan Cetakan dan Pengandaan				9 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	9 Jenis	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	6,500,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	12 Bulan	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Jamuan Tamu				12 Bulan	12,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	12 Bulan	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keg. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	26,443,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	12 Bulan	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**0**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	0	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		4 Unit	0	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	%		%	100 %	**219,591,000**						100 %	**317,220,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai				200 Buah	2,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	200 Buah	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, dan telepon				12 Bulan	35,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	12 Bulan	35,700,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor				12 Bulan	182,591,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Internal Kecamatan Pameungpeuk	12 Bulan	280,500,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	%		%	100 %	**62,500,000**						100 %	**54,060,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	14,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah Kecamatan Pameungpeuk	4 Unit	35,700,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3 Unit	30,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah Kecamatan Pameungpeuk	3 Unit	15,300,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Service Perbaikan peralatan kantor dan Pengadaan Suku Cadang				3 Jenis	8,500,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah Kecamatan Pameungpeuk	3 Jenis	1,020,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokumen rencana Pembangunan Gedung dan halaman Kantor				1 Dokumen	0	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah Kecamatan Pameungpeuk	1 Dokumen	0	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				1 Paket	10,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Barang Milik Daerah Kecamatan Pameungpeuk	1 Paket	2,040,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	86 %	**98,316,000**						86 %	**111,406,134**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	**98,316,000**						100 %	**111,406,134**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				450 Orang	98,316,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Pameungpeuk	450 Orang	111,406,134	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	86 %	**12,094,000**						86 %	**12,336,186**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**12,094,000**						100 %	**12,336,186**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				50 Orang	12,094,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Petugas Keamanan wilyah Kecamatan Pameungpeuk	50 Orang	12,336,186	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	86 %	**62,679,000**						86 %	**63,932,580**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**62,679,000**						100 %	**63,932,580**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Laporan Kegiatan	42,679,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Pameungpeuk	2 Laporan Kegiatan	43,532,580	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				2 laporan kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Pameungpeuk	2 laporan kegiatan	20,400,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	86 %	**66,005,000**						86 %	**67,325,100**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**66,005,000**						100 %	**67,325,100**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				100 Persen	41,000,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Pameungpeuk	100 Persen	41,820,000	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				3 Laporan Kegiatan	25,005,000	Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Pameungpeuk	3 Laporan Kegiatan	25,505,100	KECAMATAN PAMEUNGPEUK
TOTAL											**4,485,889,000**							**4,897,067,281**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,494,776,000**							**4,889,247,456**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	Persen		Persen	63 Persen	**4,322,629,000**						63 Persen	**4,634,247,456**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah perencanaan, penganggaran , dan evaluasi Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**15,000,000**						12 Bulan	**20,400,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				6 Dokumen	15,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Pangalengan	6 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	0	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Pangalengan	100 Persen	10,200,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	**3,864,100,000**						12 Bulan	**4,261,441,536**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,864,100,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Pangalengan	12 Bulan	4,261,441,536	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	**115,602,000**						12 Bulan	**53,550,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	4,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perkantoran	5 Jenis	7,650,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	70,602,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perkantoran	12 Bulan	15,300,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor				10 Jenis	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perkantoran	10 Jenis	10,200,000	KECAMATAN PANGALENGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan				12 Bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perkantoran	12 Bulan	5,100,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Dan Majalah				12 Bulan	6,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perkantoran	12 Bulan	5,100,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi				12 Bulan	25,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Perkantoran	12 Bulan	10,200,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**282,880,000**						12 Bulan	**235,105,920**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi				3 Jenis	13,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat/Cleaning servise/PHL	3 Jenis	15,300,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	269,880,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat/Cleaning servise/PHL	12 Bulan	219,805,920	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terawatnya Kendaraan - kendaraan Dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	**45,047,000**						12 Bulan	**63,750,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor				12 Bulan	22,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	12 Bulan	30,600,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				12 Bulan	10,547,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	12 Bulan	20,400,000	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				12 Bulan	12,500,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	12 Bulan	12,750,000	KECAMATAN PANGALENGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen		Persen	83 Persen	**120,000,000**						83 Persen	**146,336,881**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**120,000,000**						100 persen	**146,336,881**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan soaialisasi Organisasi Perempuan, Jumlah kegiatan sosialisasi organisasi kepemudaan jumlah korban bencana yang ditangani Jumlah laporan Kegiatan penataan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Jumlah Pelayanan Publik bidang Kependudukan yang dilayani				48 kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 13 Desa 4 Kegiatan 4 Kegiatan 12 Bulan	120,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	48 kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 13 Desa 4 Kegiatan 4 Kegiatan 12 Bulan	146,336,881	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	**4,410,000**						100 Persen	**38,104,844**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Pengamanan wilayah dan Penegakan Perda dan Perkada	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**4,410,000**						3 kegiatan	**38,104,844**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				30 Peserta	4,410,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	30 Peserta	38,104,844	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	**13,737,000**						100 Persen	**22,402,431**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**13,737,000**						12 Bulan	**22,402,431**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Kegiatan	13,737,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	14,012,250	KECAMATAN PANGALENGAN
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				2 Kegiatan	0	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Kegiatan	8,390,181	KECAMATAN PANGALENGAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase desa yang di bina dan diawasi	Persen		Persen	100 Persen	**34,000,000**						100 Persen	**48,155,844**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen		persen	100 persen	**34,000,000**						100 persen	**48,155,844**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan/Jumlah usulan program dan kegiatan				250 Usulan	34,000,000	Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	250 Usulan	48,155,844	KECAMATAN PANGALENGAN
									TOTAL	**4,494,776,000**								**4,889,247,456**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,886,569,000**							**5,330,971,073**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Point		Point	67,50 Point	**4,683,569,000**						67,50 Point	**5,075,971,073**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%		%	100 %	**3,760,000**						100 %	**4,196,354**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	1,260,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	2 Dokumen	1,285,200	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	4 Dokumen	2,911,154	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	%		%	100 %	**4,209,584,000**						100 %	**4,651,429,732**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	4,204,249,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	14 bulan	4,644,682,432	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK				1 Dokumen	1,365,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	1 Dokumen	1,392,300	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				0 Laporan	0	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	0 Laporan	1,178,100	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				6 Laporan	1,470,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	6 Laporan	1,499,400	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Laporan	2,500,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	2 Laporan	2,677,500	KECAMATAN PASEH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**4,080,000**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	0 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	0 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				51 Orang	4,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	51 Orang	1,020,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				51 Orang	4,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	51 Orang	1,020,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional Perkantoran	%		%	100 %	**70,455,000**						100 %	**15,402,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				9 jenis	2,100,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	9 jenis	2,142,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibelii				7 jenis	42,155,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	7 jenis	5,100,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli				12 jenis	7,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	12 jenis	2,040,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				11 jenis	7,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	11 jenis	2,040,000	KECAMATAN PASEH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganani				12 bulan	4,200,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	12 bulan	2,040,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				12 OK	8,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	12 OK	2,040,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**10,200,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				3 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	3 jenis	10,200,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional Perkantoran	%		%	100 %	**303,400,000**						100 %	**320,924,640**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tertata				1000 buah	2,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	1000 buah	2,040,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 bulan	32,071,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	12 bulan	38,556,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa / diadakan				0 jenis	0	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	0 jenis	2,040,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"-Jumlah orang bulan (OB) jasa THL -Jumlah orang bulan (OB) jasa kebersihan kantor - Jumlah orang bulan (OB) jasa keamanan kantor				60 OB	269,329,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	60 OB	278,288,640	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan aset yang baik	%		%	100 %	**78,370,000**						100 %	**69,738,347**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak beroperasi				10 unit	25,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	10 unit	15,300,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Alat bengkel yang terpelihara				4 unit	7,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	4 unit	2,040,000	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 paket	46,370,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	1 paket	42,198,347	KECAMATAN PASEH
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				0 paket	0	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Paseh	0 paket	10,200,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Point		Point	88,20 Point	**58,000,000**						88,20 Point	**64,260,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Kegiatan koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksanakan	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**9,180,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan				31 peserta	8,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	31 peserta	9,180,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**55,080,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah				31 peserta	8,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	31 peserta	9,180,000	KECAMATAN PASEH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan + Jumlah peserta sosialisasi pembinaan organisasi kepemudaan + Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan + Jumlah peserta sosialisasi pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat Daerah + jumlah peserta sosialisasi pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat				164 peserta	42,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	164 peserta	45,900,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	1000 %	**7,000,000**						1000 %	**8,160,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan (Linmas) yang mengikuti Sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	%		%	100 %	**7,000,000**						100 %	**8,160,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				26 OK	7,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Linmas	26 OK	8,160,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**33,000,000**						100 %	**34,680,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	**33,000,000**						100 %	**34,680,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				2 Laporan	25,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	2 Laporan	25,500,000	KECAMATAN PASEH
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				1 Laporan	8,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	1 Laporan	9,180,000	KECAMATAN PASEH
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**105,000,000**						100 %	**147,900,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	%		%	100 %	**105,000,000**						100 %	**147,900,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Laporan	6,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 Laporan	7,140,000	KECAMATAN PASEH
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan Desa				1 Laporann	6,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 Laporanr	19,380,000	KECAMATAN PASEH
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pembinaan / Monitoring evaluasi pengeloaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Laporan	31,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	6 Laporan	33,660,000	KECAMATAN PASEH
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 Laporan	25,500,000	KECAMATAN PASEH
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				5 Laporan	30,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	5 Laporan	31,620,000	KECAMATAN PASEH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Laporan	7,000,000	Kab. Bandung, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pemdes	1 Laporan	30,600,000	KECAMATAN PASEH
TOTAL											**4,886,569,000**							**5,330,971,073**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,704,974,000**							**5,144,859,625**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Nilai SAKIP, 2. Nilai IKM 1. Nilai SAKIP; 2. Persentase aset dlm kondisi baik	00 00		00 00	00 00 00 00	**4,545,310,000**						00 00 00 00	**4,880,559,625**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**2,000,000**						100 Persen	**2,040,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja(LAKIP,LPPD,LKPJ)				4 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 dokumen	2,040,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**4,108,405,000**						100 Persen	**4,530,609,945**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah OB				21 Orang	4,093,905,000					0	21 Orang	4,515,819,945	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				3 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				4 Dokumen	4,500,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Dokumen	4,590,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran, persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen		Persen	100 Persen	**118,000,000**						100 Persen	**27,540,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/Penerangan yang dibeli				12 jenis	12,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 jenis	3,060,000	KECAMATAN PASIRJAMBU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				10 Jenis	60,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	10 Jenis	10,200,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				5 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Jenis	1,020,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang dibeli				15 Jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	15 Jenis	10,200,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				12 Bulan	6,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	1,020,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				20 Orang	20,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	20 Orang	2,040,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	**10,000,000**						100 Persen	**10,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli				5 jenis	10,000,000					0	5 jenis	10,000,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	**223,405,000**						100 Persen	**214,999,680**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				600 Lembar	0	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	600 Lembar	1,020,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	12,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	12,240,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	211,405,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	201,739,680	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**83,500,000**						100 Persen 100 Persen	**95,370,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang kena pajak				5 Unit	15,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Unit	0	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis / diperbaiki				6 Jenis	7,500,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	6 Jenis	7,650,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang /berat				2 Unit	50,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Unit	76,500,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 Unit	11,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Unit	11,220,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	00		00	00 00	**39,664,000**						00 00	**61,200,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persen		Persen	100 Persen	**39,664,000**						100 Persen	**61,200,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				100 Orang	9,664,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	100 Orang	10,200,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan organisasi kepemudaan				200 Orang	30,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	200 Orang	51,000,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**15,000,000**						100 Persen	**15,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase program perencanaan pembangunan daerah	Persen		Persen	100 Persen	**15,000,000**						100 Persen	**15,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu				100 Orang	15,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	100 Orang	15,000,000	KECAMATAN PASIRJAMBU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	00		00	00 00	**15,000,000**						00 00	**30,000,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan (Linmas) yang mengikuti sosialisasi dibidang penegakan peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	**15,000,000**						100 Persen	**30,000,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				140 Orang	15,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	140 Orang	30,000,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	00		00	00 00	**15,000,000**						00 00	**20,400,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	**15,000,000**						100 Persen	**20,400,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa				3 Kegiatan	15,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Kegiatan	20,400,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	00		00	00 00	**75,000,000**						00 00	**137,700,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persen		Persen	100 Persen	**75,000,000**						100 Persen	**137,700,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH				12 Bulan	50,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	112,200,000	KECAMATAN PASIRJAMBU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrenbang dan Musrenbang tingkat Kecamatan / Jumlah usulan program dan kegiatan				200 Orang	25,000,000	Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	200 Orang	25,500,000	KECAMATAN PASIRJAMBU
TOTAL										**4,704,974,000**								**5,144,859,625**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						4,120,645,000							4,826,856,270	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Poin		Poin	60 Poin	3,870,645,000						60 Poin	4,564,355,270	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	24,832,000						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	29,697,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	5,597,500	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Dokumen	5,915,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	3,656,500	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	4,483,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	4,048,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	5,170,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	3,885,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	5,182,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	4,058,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	5,180,000	KECAMATAN RANCABALI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				3 Dokumen	3,587,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	3 Dokumen	3,767,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Dokumen Bulan Dokumen		Dokumen Dokumen Bulan Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	**3,412,328,000**						1 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	**4,019,257,270**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	3,401,224,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	4,007,596,270	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	5,484,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	5,759,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				4 Dokumen	3,090,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	4 Dokumen	3,245,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,530,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Dokumen	2,657,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Bulan		Dokumen Bulan	0 Dokumen 0 Bulan	**0**						0 Dokumen 0 Bulan	**2,000,000**	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah biaya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Bulan	0	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN RANCABALI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Presentase Administrasi Kepegawaian	Stel Orang		Stel Orang	0 Stel 0 Orang	**0**						0 Stel 0 Orang	**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Stel	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 Stel	0	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	0 Orang	0	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang/Kali Jenis Jenis Jenis Jenis Bulan		Orang/Kali Jenis Jenis Jenis Jenis Bulan	100 Orang/Kali 0 Jenis 2 Jenis 26 Jenis 0 Jenis 12 Bulan	**40,901,000**						100 Orang/Kali 0 Jenis 2 Jenis 26 Jenis 0 Jenis 12 Bulan	**50,606,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				2 Jenis	2,140,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	2 Jenis	2,704,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli				26 Jenis	12,846,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	26 Jenis	15,593,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Jenis	0	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik kantor yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Jenis	0	KECAMATAN RANCABALI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang dibeli				100 Orang/Kali	3,100,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	100 Orang/Kali	4,200,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	22,815,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	28,109,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	0 Jenis 3 Jenis 3 Jenis	**23,841,000**						0 Jenis 3 Jenis 3 Jenis	**25,034,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibeli				0 Unit	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Unit	0	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Jenis	0	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dibeli				3 Jenis	23,841,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	3 Jenis	25,034,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan Lembar		Bulan Bulan Lembar	12 Bulan 12 Bulan 100 Lembar	**333,940,000**						12 Bulan 12 Bulan 100 Lembar	**389,202,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Lembar	1,000,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	16,500,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	16,830,000	KECAMATAN RANCABALI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	316,440,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	12 Bulan	371,322,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis Unit Kali		Jenis Unit Kali	1 Jenis 1 Unit 10 Kali	**34,803,000**						1 Jenis 1 Unit 10 Kali	**48,559,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10 Kali	22,000,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	10 Kali	28,409,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Jenis	500,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Jenis	1,020,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	12,303,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	1 Unit	19,130,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	%		%	74 %	**40,640,000**						74 %	**42,672,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Orang		Orang	50 Orang	**16,800,000**						50 Orang	**17,640,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50 Orang	16,800,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	50 Orang	17,640,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	Orang		Orang	30 Orang	**7,040,000**						30 Orang	**7,392,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan				30 Orang	7,040,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	30 Orang	7,392,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Orang		Orang	50 Orang	**16,800,000**						50 Orang	**17,640,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				50 Orang	16,800,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	50 Orang	17,640,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%		%	100 %	**52,867,500**						100 %	**55,511,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Orang		Orang	168 Orang	**52,867,500**						168 Orang	**55,511,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan				168 Orang	52,867,500	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	168 Orang	55,511,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**16,800,000**						100 %	**17,640,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Orang		Orang	50 Orang	**16,800,000**						50 Orang	**17,640,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				50 Orang	16,800,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur (Linmas)	50 Orang	17,640,000	KECAMATAN RANCABALI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**60,190,000**						100 %	**63,200,000**	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Laporan % Laporan Orang Laporan Orang Laporan Orang		Laporan % Laporan Orang Laporan Orang Laporan Orang	1 Laporan 100 % 1 Laporan 30 Orang 1 Laporan 250 Orang 1 Laporan 50 Orang	**60,190,000**						1 Laporan 100 % 1 Laporan 30 Orang 1 Laporan 250 Orang 1 Laporan 50 Orang	**63,200,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	16,800,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	50 Orang	17,640,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan hari-hari besar nasional				250 Orang	19,550,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	250 Orang	20,528,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keagamaan				30 Orang	7,040,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	30 Orang	7,392,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan				100 %	16,800,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	100 %	17,640,000	KECAMATAN RANCABALI
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**79,502,500**						100 %	**83,478,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Orang Orang Orang Orang Orang		Orang Orang Orang Orang Orang	75 Orang 0 Orang 120 Orang 127 Orang 50 Orang	**79,502,500**						75 Orang 0 Orang 120 Orang 127 Orang 50 Orang	**83,478,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan				75 Orang	9,975,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	75 Orang	10,474,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasiltiasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa				0 Orang	0	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	0 Orang	0	KECAMATAN RANCABALI
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				127 Orang	28,127,500	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	127 Orang	29,534,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum / PAM Hari Libur Panjang Nasional				120 Orang	24,600,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	120 Orang	25,830,000	KECAMATAN RANCABALI
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan				50 Orang	16,800,000	Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparatur	50 Orang	17,640,000	KECAMATAN RANCABALI
									TOTAL		**4,120,645,000**							**4,826,856,270**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**7,418,417,000**							**7,522,483,559**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP dan IKM	Point dan %		Point dan %	68 dan 80 Point dan %	**6,112,632,000**						68 dan 80 Point dan %	**6,476,983,559**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-Persentase Ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase pemenuhan proses perencanaan - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan	%		%	100 %	**6,000,000**						100 %	**4,080,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja yg diselesaikan secara tepat waktu				4 dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	4 dokumen	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LKIP PD, LKPJ, LPPD dan eMonev yg diselesaikan secara tepat waktu				4 dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	4 dokumen	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran / keuangan yang diselesaikan tepat waktu. - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan. - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	**5,470,973,000**						100 %	**5,999,178,195**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	5,466,973,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 Bulan	5,995,098,195	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yg diselesaikan secara tepat waktu				2 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	2 dokumen	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosisi realisasi anggaran yg diselesaikan secara tepat waktu				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	1 dokumen	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan operasional perkantoran	%		%	100 %	**78,996,000**						100 %	**45,240,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yg di beli				15 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	15 jenis	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor yg di beli				70 jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	70 jenis	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yg di beli				20 jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	20 jenis	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yg mendapatkan makanan dan minuman				2 jenis	0	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	2 jenis	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang di cetak dan digandakan				12 bulan	9,996,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 bulan	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4 jenis	6,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	4 jenis	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu				300 OK	8,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Internal Perangkat Daerah	300 OK	11,000,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat koordinasi/konsultasi				450 OK	15,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Internal Perangkat Daerah	450 OK	22,000,000	KECAMATAN RANCAEKEK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah yang memadai	%		%	100 %	**30,900,000**						100 %	**3,060,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeuler yang di beli				10 jenis	10,900,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	10 jenis	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang di beli				5 jenis	20,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	5 jenis	1,020,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan operasional perkantoran	%		%	100 %	**485,763,000**						100 %	**356,265,364**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar				500 surat	6,003,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	500 surat	2,040,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi , air dan istrik				12 bulan	33,600,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 bulan	132,600,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang di service/diperbaiki				12 bulan	0	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 bulan	0	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran gaji Non PNS				12 bulan	446,160,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	12 bulan	221,625,364	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**69,160,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/opersional yg di pelihara				3 jenis	15,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	3 jenis	38,760,000	KECAMATAN RANCAEKEK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor (Printer, Laptop, PC)				2 unit	5,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Internal Perangkat Daerah	2 unit	10,000,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara				2 paket	20,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Internal Perangkat Daerah	2 paket	20,400,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	point		point	80 point	**110,698,000**						80 point	**283,328,307**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	**110,698,000**						100 %	**283,328,307**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				5 kegiatan	110,698,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	5 kegiatan	283,328,307	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai		Nilai	80 Nilai	**1,050,087,000**						80 Nilai	**644,871,693**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Prosentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	**31,378,000**						100 %	**58,464,449**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik				2 kegiatan	31,378,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	2 kegiatan	58,464,449	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	**1,018,709,000**						100 %	**586,407,244**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				2 kegiatan	20,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana	2 kegiatan	25,500,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibanguun di kelurahan				3 paket	239,909,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana	3 paket	244,707,244	KECAMATAN RANCAEKEK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat kelurahan yang diberdayakan				16 kegiatan	743,800,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana	16 kegiatan	285,600,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kelurahan				1 laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana	1 laporan	30,600,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**20,400,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Linmas Kecamatan Rancaekek	2 kegiatan	20,400,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	**40,000,000**						100 %	**40,800,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				3 laporan	25,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	3 laporan	30,600,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				2 laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	2 laporan	10,200,000	KECAMATAN RANCAEKEK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**56,100,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**56,100,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina				1 kegiatan	30,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	1 kegiatan	20,400,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang difasilitasi				1 kegiatan	0	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	1 kegiatan	5,100,000	KECAMATAN RANCAEKEK
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				3 kegiatan	45,000,000	Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Rancaekek	3 kegiatan	30,600,000	KECAMATAN RANCAEKEK
									TOTAL	**7,418,417,000**								**7,522,483,559**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,717,334,000**							**4,720,334,920**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP PD	Point		Point	67.75 Point	**4,507,334,000**						67.75 Point	**4,465,334,920**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	**2,000,000**						100 Persen	**3,060,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Dokumen	3,060,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	**4,089,349,000**						100 Persen	**4,092,529,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				322 OB	4,083,349,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	322 OB	4,083,349,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen CALK				1 dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 dokumen	3,060,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu				12 Laporan	2,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Laporan	3,060,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				2 Laporan	2,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Laporan	3,060,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Prosentase pengamanan BMD yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	**21,900,000**						100 Persen	**3,060,000**	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan barang milik daerah				12 Bulan	21,900,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	3,060,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**64,950,000**						100 Persen	**24,480,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				6 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	6 Jenis	5,100,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				32 Jenis	30,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	32 Jenis	5,100,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli				15 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	15 Jenis	5,100,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli				234 OB	15,210,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	234 OB	2,040,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				5 Jenis	4,740,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Jenis	7,140,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran dan pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen		Persen	100 Persen	**45,000,000**						100 Persen	**46,206,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli				2 Jenis	5,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Jenis	5,100,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Paket	40,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Paket	41,106,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen	**259,185,000**						100 Persen	**257,749,920**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tertata				300 Buah	3,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	300 Buah	3,060,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	22,200,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	12 Bulan	25,704,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah orang bulan (OB) jasa THL -Jumlah orang bulan (OB) jasa kebersihan kantor -Jumlah orang bulan (OB) jasa keamanan kantor				96 OB	233,985,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	96 OB	228,985,920	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**24,950,000**						100 Persen	**38,250,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak beroperasi				9 Unit	14,950,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	9 Unit	17,850,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat bengkel yang terpelihara				4 Unit	5,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	4 Unit	10,200,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Paket	5,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Paket	10,200,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara				1 Paket	0	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Paket	0	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				7 Jenis	0	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	7 Jenis	0	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		Persen	86 Persen	**45,000,000**						86 Persen	**71,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		Persen	85 Persen	**45,000,000**						85 Persen	**71,400,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di kecamatan				100 Orang	10,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	100 Orang	15,300,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				150 Orang	35,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	150 Orang	56,100,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persen		Persen	86 Persen	**15,000,000**						86 Persen	**20,400,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	83 Persen	**15,000,000**						83 Persen	**20,400,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	15,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Laporan	20,400,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	86 Persen	**10,000,000**						86 Persen	**15,300,000**	
7	**01**	**04**	2.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persen		Persen	85 Persen	**10,000,000**						85 Persen	**15,300,000**	
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				40 Orang	10,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	40 Orang	15,300,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen		Persen	86 Persen	**40,000,000**						86 Persen	**53,244,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	85 Persen	**40,000,000**						85 Persen	**53,244,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah				3 Laporan	30,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	3 Laporan	32,844,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	1 Laporan	20,400,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen		Persen	86 Persen	**100,000,000**						86 Persen	**94,656,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen		Persen	81 Persen	**100,000,000**						81 Persen	**94,656,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Laporan	30,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	6 Laporan	20,400,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	2 Laporan	10,200,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan				90 Persen	20,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	90 Persen	38,556,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan				5 Lembaga	40,000,000	Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	0	5 Lembaga	25,500,000	KECAMATAN SOLOKAN JERUK
										TOTAL	**4,717,334,000**							**4,720,334,920**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,617,325,000**							**4,607,721,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	NILAI AKUTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (AKIP) PD	Point		Point	77 Point	**4,433,325,000**						77 Point	**4,339,721,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja PD	Persen		Persen	100 Persen	**10,000,000**						100 Persen	**7,140,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	2 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang diselesaikan tepat waktu				2 Dokumen	3,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	2 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD				2 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	2 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Bulan	1,020,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Pelaksanaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang bulan pemayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persen Bulan Bulan		Persen Bulan Bulan	100 Persen 14 Bulan 14 Bulan	**3,975,314,000**						100 Persen 14 Bulan 14 Bulan	**3,976,629,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	3,973,314,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang	14 Bulan	3,973,314,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan realiasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang	0 Dokumen	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CaLK				2 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang	2 Dokumen	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang	0 Dokumen	765,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan tepat waktu				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang	0 Dokumen	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang diselesaikan tepat waktu				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang	0 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	NILAI AKIP KECAMATAN Prosentase Capaian Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan P{emeriksanaan	Point Persen		Point Persen	77 Point 100 Persen	**2,000,000**						77 Point 100 Persen	**3,060,000**	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang,	0 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang,	1 Dokumen	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen inventarisasi aset				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang,	0 Bulan	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**0**							**510,000**	
7	01	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah				0 orang	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 orang	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian PD Prosentase Pelaksanaan Dminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**18,000,000**						100 Persen 100 Persen	**22,295,000**	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang terpenuhi (fingerprint,DHE,dll)				0 jenis	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASK Kecamatan	0 jenis	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan				21 stel	18,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASK Kecamatan	21 stel	20,000,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASK Kecamatan	0 Bulan	765,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai (ASN dan non ASN) yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASK Kecamatan	0 Dokumen	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian pelaskanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**87,420,000**						100 Persen	**12,444,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli				15 Jenis	2,500,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	15 Jenis	1,530,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Perlengkapan Kantor yang dibeli				25 Jenis	34,920,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	25 Jenis	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli (perlengkapan rumah tangga)				30 Jenis	10,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	30 Jenis	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan				12 Bulan	10,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan				12 Bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	1,224,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu				12 Bulan	5,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah				12 Bulan	20,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang terkelola				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Bulan	510,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang beroperasi				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Jenis	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Caoaian Pelaksanaan Pengadaan BMD sebagai Penunjang Urusan PD	Persen		Persen	100 Persen	**0**						100 Persen	**7,140,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN KECAMATAN	0 Jenis	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli				0 Jenis	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN KECAMATAN	0 Jenis	1,020,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0 Paket	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN KECAMATAN	0 Paket	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Penyediaan jasa Penunjang urusan PD	Persen		Persen	100 Persen	**230,591,000**						100 Persen	**235,023,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertata				12 Bulan	2,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	2,040,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	36,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	40,392,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang bulan (OB) jasa THL, Jumlah orang bulan (OB) jasa kebersihan kantor, Jumlah orang bulan (OB) jasa keamanan kantor				12 Bulan	192,591,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	192,591,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan BMD PD Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	**110,000,000**						100 Persen 100 persen	**75,480,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak beroperasi				12 Bulan	60,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	12 Bulan	61,200,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				0 Paket	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Paket	2,040,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara				0 Bulan	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	0 Bulan	2,040,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara				1 Paket	50,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan	1 Paket	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Point		Point	82 Point	**61,000,000**						82 Point	**109,900,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian koordinasi pemeliharaan prasaranan dan saranan pelayanan umum	Persen		Persen	100 Persen	**11,000,000**						100 Persen	**33,400,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan, Aparatur Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	20,400,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan				40 orang	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Soreang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kecamatan, Aparatur Desa dan Masyarakat	40 orang	13,000,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**						**0**							**20,400,000**	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan masyarakat yang mendapatkan pelayanan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayana minimall				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Presentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamtan yang terlaksanakan	persen		persen	100 persen	**0**						100 persen	**10,200,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi/sinergi dengan PD dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Kecamatan Soreang	0 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan yg di limpahkan kepada camat	Persen		Persen	100 Persen	**50,000,000**						100 Persen	**45,900,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Laporan yang mendapatkan pelayanan perizinan non usaha				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan dan Arapur Desa / Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Laporan yang mendapatkan pelayanan yang terkait dengan perijinan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan dan Arapur Desa / Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan dan Arapur Desa / Masyarakat	1 Dokumen	35,700,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**22,000,000**							**61,200,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**0**							**35,700,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Laporan Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0 Dokumen	20,400,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Cakupan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian Indek Kepuasan Masyarakat Prosentase capaian pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemsayrakatan di Tingkat Kecamatab	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	**22,000,000**						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	**25,500,000**	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang dan Masyarakat	1 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang dan Masyarakat	1 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	INDEK KEPUASAN MAYARAKAT	Point		Point	82 Point	**11,000,000**						82 Point	**25,500,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan Persentase Indeks Kepuasan Masyrakat Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Persen Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan		Persen Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan	100 Persen 1 Laporan Kegiatan 2 Laporan Kegiatan	**0**						100 Persen 1 Laporan Kegiatan 2 Laporan Kegiatan	**15,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan inergiats dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang dan Masyarakat	0 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di Bidang Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persen		Persen	100 Persen	**11,000,000**						100 Persen	**10,200,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Repulblik Indonesia				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang dan Masyarakat	1 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Point		Point	82 Point	**22,000,000**						82 Point	**20,400,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	**22,000,000**						100 Persen	**20,400,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN , APARYUR DESA DAN MASYARAKAT	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN , APARYUR DESA DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN , APARYUR DESA DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Point		Point	82 Point	**68,000,000**						82 Point	**51,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase capaian pelaksanaaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daeraha	Persen		Persen	100 Persen	**68,000,000**						100 Persen	**51,000,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	1 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Laporan administrasi tata pemerintahan desa				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dikeluarkan				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Program dan Kegiatan yang terakomodir melalui Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat kecamatan/jumlah usulan program dan kegiatan, Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Musrenbang				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	1 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM/LPMD, Lembaga adat, LINMAS) yang mendapatkan pembinaan				1 Dokumen	22,000,000	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	1 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ASN Kecamatan Soreang , Perangkat Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	5,100,000	KECAMATAN SOREANG
TOTAL											**4,617,325,000**							**4,607,721,000**	

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021